

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon Anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati oleh DPRD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pasal 2

RKPD ditetapkan dengan tujuan sebagai:

- a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022.

Pasal 3

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan Daerah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII PENUTUP

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2022:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;
- b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi bersama DPRD menelaah kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan RKPD Tahun 2022.

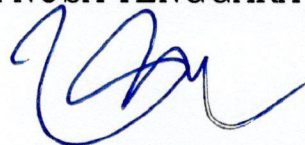
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2021

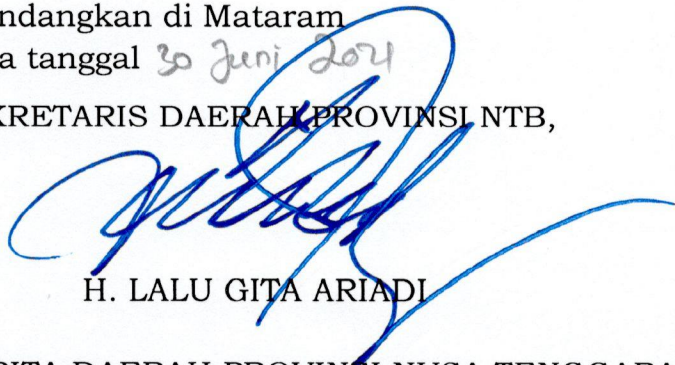
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 24

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	1
EXECUTIVE SUMMARY	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	13
1.4 Maksud dan Tujuan	14
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	17
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH.....	17
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	17
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	30
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	181
2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA	182
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020	182
2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023	185
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	189
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	202
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	202
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	202
3.1.2 Inflasi	207
3.1.3 Ketenagakerjaan	209
3.1.4 Kemiskinan.....	212
3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	215
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	216
3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan.....	217

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah	218
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah	221
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	222
3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya	223
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	229
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	229
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022.....	222
4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	224
4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022.....	224
4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022	227
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA	224
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022.....	224
5.1.1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	224
5.1.2. Percepatan Penurunan dan Penanggulangan Kemiskinan	227
5.1.3. Penanganan dan Pemulihan Dampak COVID-19	229
5.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	230
1.2.1. Pengembangan Wilayah.....	231
1.2.1.1. Struktur Ruang	231
1.2.1.2. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah.....	241
1.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis	243
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	257
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	257
BAB VIII PENUTUP	265

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen perencanaan	14
Gambar 2.1 Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing.....	31
Gambar 2.2 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum	37
Gambar 2. 25 Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB Tahun 2017-2019 (Rp.000)	167
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019	202
Gambar 3.2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019	204
Gambar 3. 3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019.....	205
Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDRB NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2019	206
Gambar 3. 5 Inflasi Tahun 2016-2019	208
Gambar 3. 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	212
Gambar 3. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 – 2019	214
Gambar 3. 8 Perbandingan IPM NTB dan Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2010– 2019	215

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Pulau Tahun 2020	17
Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020	17
Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	18
Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor	19
Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi.....	20
Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami.....	20
Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan	21
Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang	21
Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan	22
Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia.....	22
Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB.....	23
Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2016-2020	24
Tabel 2-13 Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020 .	24
Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020	25
Tabel 2-15 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 ..	26
Tabel 2-16 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019	26
Tabel 2-17 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat	28
Tabel 2-18 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	30
Tabel 2-19 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum.....	31
Tabel 2-20 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2019-2020	37
Tabel 2-21 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2020	38
Tabel 2-22 Perkembangan Lulusan dan Melanjutkan Ke Jenjang yang Lebih Tinggi Tahun Pelajaran 2012/2013 - 2019/2020	39
Tabel 2-23 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2019/2020	40
Tabel 2-24 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2020	41
Tabel 2-25 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2020	42
Tabel 2-26 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020.....	44
Tabel 2-27 Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	49
Tabel 2-28 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2020	51
Tabel 2-29 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2020	51
Tabel 2-30 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2020.....	52
Tabel 2-31 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019-2020	53

Tabel 2-32 Kasus Covid 19 per Kabupaten/kota Provinsi NTB Tahun 2020	56
Tabel 2-33 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2020	57
Tabel 2-34 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2018-2020	58
Tabel 2-35 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2018-2020	58
Tabel 2-36 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di BAPELKES Tahun 2018-2020	59
Tabel 2-37 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan di RSUD Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2020	60
Tabel 2-38 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018-2020	60
Tabel 2-39 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2020	62
Tabel 2-40 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2020	62
Tabel 2-41 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2020	63
Tabel 2-42 Kerjasama RSUD Provinsi NTB Di Bidang Pendidikan Tahun 2020	65
Tabel 2-43 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Penunjang Tahun 2020	65
Tabel 2-44 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2020	67
Tabel 2-45 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Jasa Tahun 2020	70
Tabel 2-46 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Terkait Sewa Lahan Tahun 2020	72
Tabel 2-47 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2020	73
Tabel 2-48 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan di RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2020	76
Tabel 2-49 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019-2020	77
Tabel 2-50 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019-2020	78
Tabel 2-51 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2019-2020	78
Tabel 2-52 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2020	79
Tabel 2-53 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2019-2020	80
Tabel 2-54 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Integrasi Kesehatan Jiwa Tahun 2019-2020	84
Tabel 2-55 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2019-2020	84
Tabel 2-56 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak Pasien yang Berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020	84
Tabel 2-57 Capaian Indikator Urusan Bidang Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	86
Tabel 2-58 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019 – 2020	87
Tabel 2-59 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2020	88
Tabel 2-60 Target dan capaian indikator bidang urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2020	90

Tabel 2-61 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020 ...	90
Tabel 2-62 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2020	91
Tabel 2-63 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020	92
Tabel 2-64 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Gubernur) Tahun 2020	92
Tabel 2-65 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2020.....	95
Tabel 2-66 Target dan Capaian Indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020.....	96
Tabel 2-67 Penegakan Yang Dilaksanakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2020.....	96
Tabel 2-68 Data Penertiban Bidang Tibumtran Provinsi NTB Tahun 2020.....	99
Tabel 2-69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Tahun 2020	100
Tabel 2-70 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2020	110
Tabel 2-71 PMKS yang diberikan Pelayanan.....	111
Tabel 2-72 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2020.....	111
Tabel 2-73 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB Tahun 2018-2020 Menurut Kabupaten/Kota	113
Tabel 2-74 Rekapitulasi Data Remittance PMI Provinsi NTB Tahun 2018-2020	113
Tabel 2-75 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2020.....	114
Tabel 2-76 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa Dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2020	115
Tabel 2-77 Target dan Capaian Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2020	116
Tabel 2-78 Perkembangan Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis Provinsi NTB Tahun 2018-2020.....	117
Tabel 2-79 Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2020.....	118
Tabel 2-80 Target dan Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020.....	121
Tabel 2-81 Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	121
Tabel 2-82 Capaian Indeks Pengelolaan Sampah (%) Tahun 2018-2019	122
Tabel 2-83 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2020	123
Tabel 2-84 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2020	123
Tabel 2-85 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2020	124
Tabel 2-86 Rincian Status Desa tahun 2018 - 2020.....	125
Tabel 2-87 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	125

Tabel 2-88 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2018-2020	126
Tabel 2-89 BUMDes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2018-2020 ..	127
Tabel 2-90 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2020.....	127
Tabel 2-91 Capaian Indikator Urusan Bidang Perhubungan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	130
Tabel 2-92 Sarana Transportasi Darat yang Sudah Memiliki Kartu Pengawas Tahun 2020	130
Tabel 2-93 Skor Prasarana Transportasi Perhubungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020 ...	131
Tabel 2-94 Kondisi Pelabuhan di Provinsi NTB Tahun 2020	132
Tabel 2-95 Capaian indikator bidang Komunikasi Dan Informatika berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	134
Tabel 2-96 Capaian Indikator Urusan Bidang Koperasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Dinas dengan Gubernur) Tahun 2020.....	135
Tabel 2-97 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2018-2020.....	135
Tabel 2-98 Capaian Indikator Urusan Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Dinas dengan Gubernur) Tahun 2020	136
Tabel 2-99 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB	137
Tabel 2-100 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2018-2020	137
Tabel 2-101 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2020	138
Tabel 2-102 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2020.....	139
Tabel 2-103 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2020	143
Tabel 2-104 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi (dipagar) di Kabupaten/Kota se-NTB tahun 2020	144
Tabel 2-105 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2016-2020	144
Tabel 2-106 Capaian Indikator Urusan Bidang Perpustakaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	145
Tabel 2-107 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2018 - 2020	146
Tabel 2-108 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2018 - 2020.....	146
Tabel 2-109 Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020	147
Tabel 2-110 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020	150
Tabel 2-111 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Gubernur) Tahun 2020.....	152
Tabel 2-112 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2018 – 2020	153
Tabel 2-113 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	153
Tabel 2-114 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2017-2020	154
Tabel 2-115 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2020	155
Tabel 2-116 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	155

Tabel 2-117 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	156
Tabel 2-118 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2018 - 2020	157
Tabel 2-119 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2018 - 2020	158
Tabel 2-120 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	159
Tabel 2-121 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2018-2020	159
Tabel 2-122 Data Pemasukan DOC Tahun 2018 -2020	160
Tabel 2-123 Produksi Telur di Provinsi NTB Tahun 2018-2020.....	160
Tabel 2-124 Indikator urusan Kehutanan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020	160
Tabel 2-125 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019.....	164
Tabel 2-126 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019	165
Tabel 2-127 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2019	166
Tabel 2-128 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahun 2019.....	168
Tabel 2-129 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019	168
Tabel 2-130 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019	169
Tabel 2-131 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019	169
Tabel 2-132 Perkembangan Industri Formal Tahun 2019	170
Tabel 2-133 Perkembangan Industri Non Formal Tahun 2019.....	171
Tabel 2-134 Perkembangan Industri Tahun 2015-2019.....	171
Tabel 2-135 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah.....	172
Tabel 2-136 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019.....	173
Tabel 2-137 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2019.....	173
Tabel 2-138 Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Provinsi Tahun 2017-2019.....	174
Tabel 2-139 Penetapan APBD Provinsi NTB Dalam 5 Tahun Terakhir.....	174
Tabel 2-140 Opini BPK Tahun 2015-2018.....	175
Tabel 2-141 Opini BPK-RI Kabupaten/Kota Tahun 2015-2018	176
Tabel 2-142 Akreditasi Jenis Diklat Tahun 2019	177
Tabel 2-143 Jenis dan Jumlah Peserta Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019	177
Tabel 2-144 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	178
Tabel 2-145 Hasil Audit Penyelenggaraan Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017-2019... ..	179
Tabel 2-146 Pencapaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2017-2019.....	180
Tabel 2-147 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019.....	181
Tabel 2-148 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah	182
Tabel 2-149 Rekapitulasi Rata – Rata Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	183
Tabel 2-150 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020	185
Tabel 2-151 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2020	188
Tabel 3. 1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah).....	203
Tabel 3. 2 PDRB Provinsi NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019	206
Tabel 3. 3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 – 2019	210
Tabel 3. 4 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010 – 2019.....	216

Tabel 3. 5 Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 2020-2022	Tahun 217
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	231
Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2022	256
Tabel 4. 3 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional dan Daerah	223
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023	257
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	259

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini.

Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2022 ini tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program-program prioritas dan strategis nasional tahun 2022, serta Permendagri 86 Tahun 2017.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 ini dilakukan di saat pandemi global *Corona Virus Disease* (Covid-19) masih melanda Indonesia diakhir tahun 2020, termasuk NTB. Oleh karena itu, perkembangan terkini dari dampak penyebaran wabah pandemi global Covid-19, pemberlakuan PSBB dan kondisi sosial-ekonomi pada tahun 2021, tentunya secara otomatis akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Provinsi NTB di tahun 2022.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2022 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah, NGO dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih NTB Gemilang yang kita cintai bersama ini.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, hal inilah yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik di segala aspek pembangunan. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi yang memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu perencanaan pembangunan merupakan awal dalam suatu proses pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia dan diharapkan dapat mendayagunakan potensi baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sehingga memiliki kebermanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi NTB juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi NTB diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat NTB baik dalam skala nasional maupun regional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional menerapkan sistem perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selain perencanaan dengan pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan keselarasan dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi NTB juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* dengan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan

penganggaran, (3) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi NTB dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD, dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA). Sementara itu, hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu KUA dan (PPAS).

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi NTB, hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan di berbagai sektor pada tahun 2020. Oleh sebab itu dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, prioritas dalam rangka pemulihan perekonomian dan kesehatan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dampak Covid-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan dari prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini akan ditegaskan kembali dalam setiap tahapan perencanaan sejak Konsultasi Publik,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 hingga ditetapkan dan dilaksanakan pada APBD Provinsi NTB Tahun 2022.

Penyusunan RKPD Tahun 2022 merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan di tengah pandemi Covid-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan mendukung tahapan tahun keempat pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2019-2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

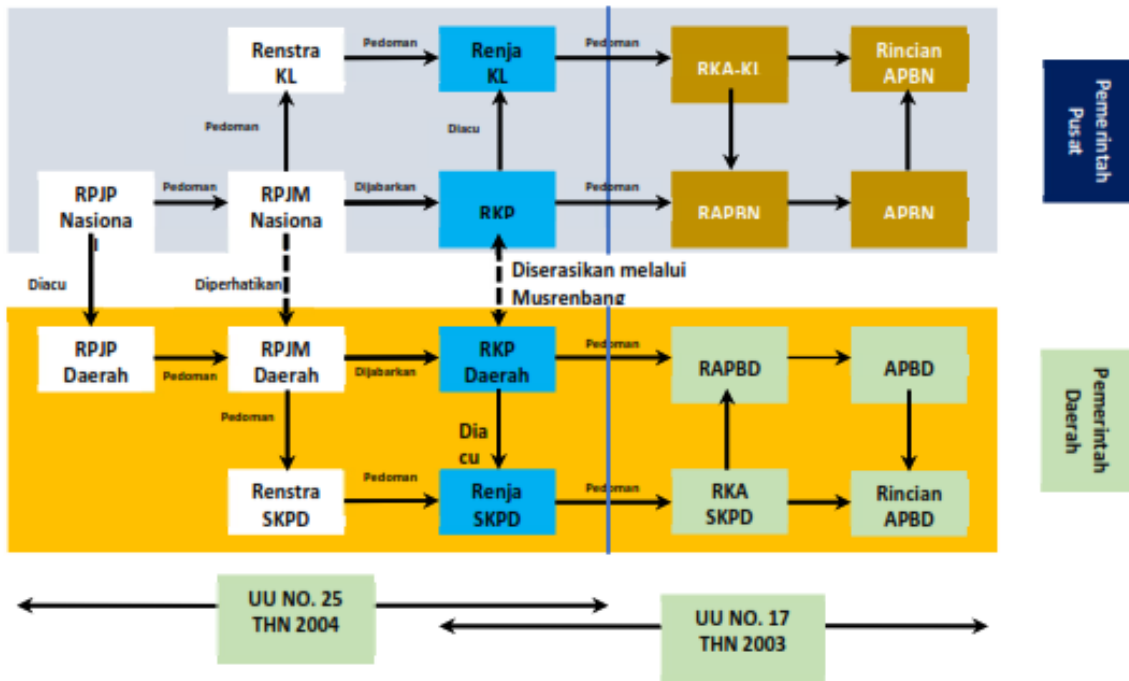
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2-40/2021).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Keberadaan RKPD tersebut dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan satu bagian penting yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah, dimana Renja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka dokumen RKPD Provinsi NTB menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD NTB. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.



Gambar 1- 1 Hubungan antar dokumen perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi NTB;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan

6. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi NTB, Pelaku Usaha Swasta dan Masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah daerah lainnya.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2022, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi NTB diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi NTB, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.124,48 km² (40,81%) dan perairan laut seluas 29.187,71 km² (59,19%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Lombok seluas 4.699,83 km² (23,35%) dan Pulau Sumbawa seluas 15.424,65 km² (76,65%) yang dikelilingi oleh 378 pulau-pulau kecil (Gambar 2-1). Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°05' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah: sebelah utara Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Lombok & Provinsi Bali, dan sebelah timur Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2-1 Luas Wilayah Provinsi NTB Menurut Pulau Tahun 2020

Pulau	Luas (km ²)	Persentase
Pulau Lombok	4.699,83	23,35
Pulau Sumbawa	15.424.65	76,65
NTB	20.124,48	100,00

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021: NTB Dalam Angka 2021.

Secara Administratif Provinsi NTB terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota dengan 117 kecamatan dan 1.143 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	1.053,87
2	Kabupaten Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.169,58
4	Kabupaten Lombok Timur	21	254	1.605,55
5	Kabupaten Sumbawa	24	166	6.643,98
6	Kabupaten Dompu	8	81	2.320,00
7	Kabupaten Bima	18	192	4.389,40
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	41	222,25
	Jumlah	117	1.143	20.124,48

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

- **Topografi**

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 – 3.726 mdpl untuk Pulau Lombok dan 0 – 2.755 mdpl untuk Pulau Sumbawa, dengan klasifikasi ketinggian wilayah 0 - 100 mdpl sekitar 23,76% (seluas 478.911 Ha), ketinggian 100 - 500 mdpl sekitar 37,39% (seluas 753.612 Ha), ketinggian 500 - 1000 mdpl sekitar 15,25% (seluas 307.259 Ha) dan lebih dari 1000 mdpl 23,60% (seluas 475.533 Ha).

- **Geologi**

Geologi wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan.

- **Hidrologi**

Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2-3 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km ²)	Air Tanah Bebas (Juta M ³ /Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M ³ /Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

- **Klimatologi**

Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada tahun 2017 temperatur udara maksimum di Provinsi NTB berkisar 33,2°C – 33,6°C, temperatur udara minimum 17°C – 21,4°C dan temperatur rata-rata 26,9°C–27,6°C. Kelembaban udara rata-rata 78%-85%, kelembaban udara minimum 57% - 64% dan kelembaban udara maksimum 94% - 96%. Kecepatan angin rata-rata 3-5 knots, tekanan udara antara 1003,1 – 1009,8 mb, lamanya penyinaran matahari 69% - 79% dan curah hujan berkisar antara 1.775 mm – 2.874 mm.

Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 1 mm dan tertinggi pada bulan Desember sebesar 398 mm. Sementara, hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Oktober sebanyak 1 hari dan tertinggi di bulan Desember sebanyak 25 hari. Lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 61% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 93%. Rata-rata kecepatan angin setiap bulan berkisar antara 3 sampai 5 knots. Rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan Februari dan Desember serta tertinggi pada bulan Agustus, September, dan Oktober.

- **Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-4 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-5 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km ²
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km ² yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sosi Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-6 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-7 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woja dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-8 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejorong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2-9 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk- Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturatok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar- Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI (*modified mercally intensity*).

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 2-10 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : Revisi RTRW Provinsi NTB, 2020-2040

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2-11 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m ³)	Kebutuhan (m ³)			Selisih (m ³)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampau

Sumber: Bappeda Prov. NTB. 2019

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m³ sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m³ sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m³.

2.1.1.2 Demografi NTB

Perkembangan penduduk Provinsi NTB terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk NTB tahun 2016-2020 cenderung meningkat disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2020 sebanyak 5.320.092 jiwa, terdiri atas laki-laki 2.656.208 jiwa (49,93%) dan perempuan 2.663.884 jiwa (50,07%).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS Provinsi NTB Tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yakni, hal ini disebabkan adanya perubahan perhitungan menggunakan variabel baru yang bersumber data administrasi kependudukan.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-12 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2016-2020

Thn	Jenis Kelamin	Penduduk		Laju Pertumbuhan
		Jiwa	%	
2016	Laki-laki	2,375,750	49%	1.28
	Perempuan	2,520,412	51%	1.23
	Jumlah	4,896,162	100%	1.25
2017	Laki-laki	2,405,080	49%	1.23
	Perempuan	2,550,498	51%	1.19
	Jumlah	4,955,578	100%	1.21
2018	Laki-laki	2,433,731	49%	1.19
	Perempuan	2,579,956	51%	1.16
	Jumlah	5,013,687	100%	1.18
2019	Laki-laki	2,461,652	49%	1.15
	Perempuan	2,608,733	51%	1.12
	Jumlah	5,070,385	100%	1.14
2020	Laki-laki	2,656,208	50%	7.90
	Perempuan	2,663,884	50%	2.11
	Jumlah	5,320,092	100%	10.02

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021. Sensus Penduduk Provinsi NTB, 2020

Persebaran penduduk di Provinsi NTB belum merata, persentase penduduk yang tinggal di Pulau Lombok mencapai 70,65% sementara di Pulau Sumbawa sebesar 29,35%. Ketimpangan distribusi penduduk berdampak pada munculnya masalah menurunnya kualitas lingkungan hidup seperti ketersediaan sumber air, kerusakan hutan dan lahan, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, dan lain-lain. Persebaran penduduk Provinsi NTB disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-13 Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2018	2019	2020
1	Lombok Barat	685.161	694.985	721.481
2	Lombok Tengah	939.409	947.488	1.034.859
3	Lombok Timur	1.192.110	1.200.612	1.325.240
4	Lombok Utara	218.533	220.412	247.400
5	Kota Mataram	477.476	486.715	429.651
	Pulau Lombok	3.512.689	3.550.212	3.758.631
6	D o m p u	248.879	252.288	236.665
7	B i m a	483.901	488.577	514.105

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2018	2019	2020
8	Sumbawa Barat	144.707	148.606	145.798
9	Sumbawa	453.797	457.671	509.753
10	Kota Bima	169.714	173.031	155.140
	Pulau Sumbawa	1.500.998	1.520.173	1.561.461
	Jumlah	5.013.687	5.070.385	5.320.092

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021. Sensus Penduduk Provinsi NTB, 2020

Tidak meratanya distribusi penduduk antara kedua pulau tersebut di Provinsi NTB berimplikasi pada tingginya ketimpangan kepadatan penduduk di antara kedua pulau tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-14 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)		
		2018	2019	2020
1	Lombok Barat	650.14	659.46	684.60
2	Lombok Tengah	1,160.44	810.11	884.81
3	Lombok Timur	986.52	747.79	825.41
4	Lombok Utara	118.19	272.27	305.61
5	Kota Mataram	7,789.17	7,939.89	7,008.99
	Pulau Lombok	705.06	755.39	799.74
6	Sumbawa Barat	32.97	80.37	78.85
7	Sumbawa	282.64	68.89	76.72
8	Dompu	37.46	108.74	102.01
9	Bima	208.17	111.31	117.12
10	Kota Bima	817.9	778.54	698.04
	Pulau Sumbawa	98.94	98.55	101.23
	Provinsi NTB	248.78	251.95	264.36

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021 (diolah)

Merujuk pada tabel di atas, Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yakni delapan kali lipat dari Pulau Sumbawa yakni masing-masing sebesar 799,74 jiwa/km² dibandingkan 101,23 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Mataram yakni 7.008,99 jiwa/km² dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa sebesar 76,72 jiwa/km².

Sex ratio merupakan perbandingan antaran jumlah penduduk laki dibanding jumlah penduduk perempuan. Sex ratio penduduk Provinsi NTB Tahun 2020 mencapai 99,71%. Besarnya sex ratio pada tahun 2019 adalah 94,36%, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan

meskipun secara keseluruhan cenderung menurun dari 1,17% tahun 2018 menjadi 1,13% di tahun 2019. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhannya secara rinci selama periode tahun 2017 - 2019.

Tabel 2-15 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

Thn	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			Sex Ratio
	L	P	Jumlah	L	P	Jlh	
2016	2.375.750	2.520.412	4.896.162	1,28	1,23	1,25	94,26
	48,52%	51,48%	100%				
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,3
	48,53%	51,47%	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,16	1,18	94,33
	48,54%	51,46%	100%				
2019	2.461.652	2.608.733	5.070.385	1,15	1,12	1,14	94,36
	48,55%	51,45%	100%				
2020	2.656.208	2.663.884	5.320.092	7,90	2,11	10,02	99,71
	49,93%	50,07%	100%				

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2021, Hasil Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2019 sebanyak 3.325.403 orang atau sebesar 65,58% atau meningkat 1,32% dibandingkan tahun 2018. Sementara, kelompok umur tidak produktif sebesar 1.744.982 orang atau 34,42%. Penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu mencapai 52,37% sedangkan laki-laki sebesar 47,63%. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki tidak produktif (50,29%) lebih tinggi dari penduduk perempuan (49,71%). Adapun rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 52,47 atau cenderung mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,29 dan 0,57 poin. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya sumber daya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin serta rasio ketergantungan tahun 2017 – 2019.

Tabel 2-16 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

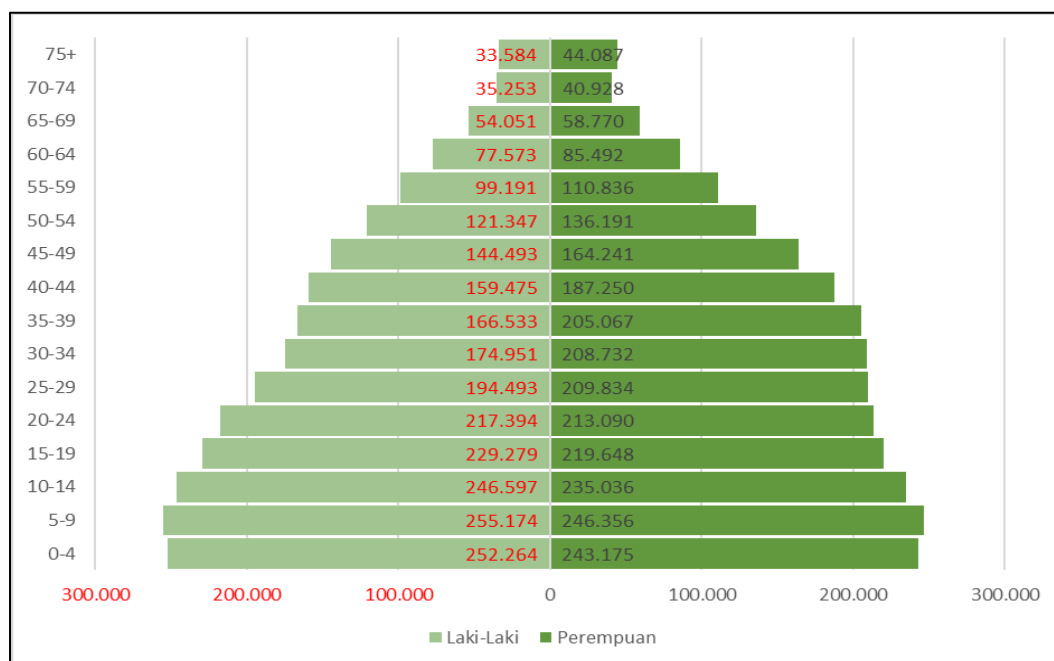
TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
2017	Laki	749.138	1.540.900	115.042	56,08

TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65	
	Perempuan	718.95	1.697.088	134.46	50,29
	Total	1.468.088	3.237.988	249.502	53,04
2018	Laki	751.919	1.563.026	118.786	55,71
	Perempuan	722.099	1.719.054	138.803	50,08
	Total	1.474.018	3.282.080	257.589	52,76
2019	Laki	753.255	1.584.052	124.312	55,40
	Perempuan	723.150	1.741.351	144.265	49,81
	Total	1.476.405	3.325.403	268.577	52,47

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, meningkatnya tingkat kepadatan dan semakin bertambahnya penduduk kelompok umur produktif. Situasi dan kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan komprehensif kaitannya dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja melainkan juga memiliki daya ungkit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) semakin berkurang. Berdasarkan struktur umur penduduk NTB 2019, kelompok umur produktif (15-64) lebih mendominasi. Struktur umur penduduk tersebut disajikan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020.

Gambar 2- 1 Struktur Umur Penduduk NTB Tahun 2019

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-17 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,1	3,08	4,76	2,5-2,75	-5,19	-197,71
2	Inflasi	%	3,7	3,16	1,87	3,0 - 4,0	0,68	177,33
3	Tingkat Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,88	13,64	14,23	95,67
4	Gini Ratio	Point	0,378	0,372	0,379	0,379	0,386	98,15
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	66,58	67,3	68,14	68,64	68,25	99,43

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2020

Dari 5 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, seluruh indikator tersebut capaiannya tidak sesuai target. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sangat berdampak pada menurunnya aspek kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami kontraksi sebesar 5,19 persen. Kondisi tersebut disebabkan adanya pandemi global covid-19 pada tahun 2020 yang membuat ekonomi global, nasional, dan regional

tertekan. Kontraksi terdalam terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan dengan kontraksi sebesar 31,39 persen. Selanjutnya kategori penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 28,24 persen. Adapun kategori konstruksi mengalami kontraksi hingga 14,35 persen.

Pada indikator kemiskinan mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi NTB, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2020 tercatat sebesar 746.040 orang (14,23 persen). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 713.890 orang (13,97 persen). Terlihat adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami peningkatan sejumlah 32.110 jiwa dari bulan Maret hingga September 2020 atau meningkat 0,26 persen. Pada September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 389.600 orang atau 15,05 persen, sedangkan penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 356.440 orang atau 13,42 persen.

Pengeluaran masyarakat miskin NTB terhadap kebutuhan makanan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran terhadap kebutuhan non makanan. Sementara itu, peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada September 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,78 persen untuk perkotaan dan 74,72 persen untuk perdesaan.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB tercatat sebesar 0,386. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,376. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,374, Gini Ratio September 2020 naik sebesar 0,012 poin. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2020, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,43 persen yang berarti Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah. Dengan demikian, meskipun ada kenaikan ketimpangan tetapi ketimpangan di Provinsi NTB masih tergolong kategori rendah.

IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,14 di tahun 2019 menjadi 68,25 pada tahun 2020. IPM Provinsi NTB masih berada pada kategori capaian sedang. Pertumbuhan IPM NTB di tahun 2020 mencapai 0,16 persen. Laju pertumbuhan IPM NTB tahun ini merupakan yang terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator

Umur Harapan Hidup, di tahun 2020 Provinsi NTB mencapai 66,51 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,23 tahun dibandingkan tahun 2019. Dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2020 Provinsi NTB mencapai 13,70 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun 2019. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,31 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,04 tahun dibanding tahun sebelumnya. Dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2020 sebesar 10,35 juta rupiah per orang per tahun. Indikator ini menurun sebanyak 289 ribu rupiah dibandingkan tahun 2019. Dengan demikian, adanya perlambatan pertumbuhan IPM NTB pada tahun 2020 dipengaruhi oleh dimensi ekonomi yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

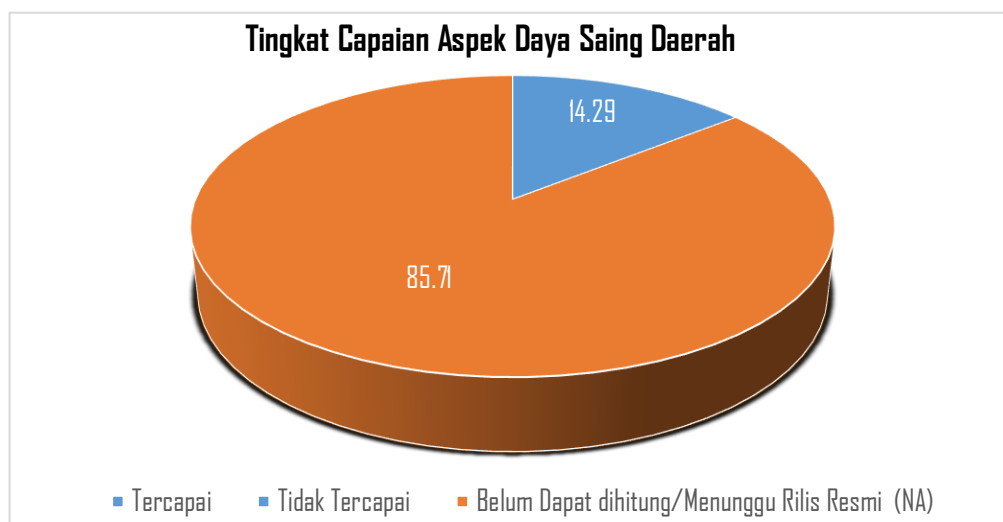
Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-18 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kriminalitas	Point	18,05	17,25	12,71	15,65	13,09	116,36
2	Indeks Aksesibilitas	Point	71,44	74,60	74,92	77,14	NA	NA
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	74,72	75,16	76,16	77,16	NA	NA
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	87,52	87,51	88,08	88,45	NA	NA
5	Indeks Risiko Bencana	Point	142,90	139,4	129,02	126,91	NA	NA
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	CC	CC	B	B	NA	NA
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	97,88	3,93	NA	NA

Ket. NA : Not Available

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 1 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, sedangkan 6 indikator lainnya belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait yaitu Indeks Aksesabilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ketaatan terhadap RTRW, Indeks Resiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.



Gambar 2- 2 Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 92 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 31 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 31 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 17 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta urusan fungsi penunjang sebanyak 13 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-19 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
C	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.01	Pendidikan							
1	Indeks Pendidikan	Point	60,39	60,85	61,68	62,03	62,42	100,63
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,48	13,49	13,7	101,56
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	7,03	7,27	7,37	7,31	99,21

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
1.02	Kesehatan							
4	Indeks Kesehatan	Point	70,08	70,57	71,20	71,51	71,55	100,06
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	86,47	75,00	83,48	111,31
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	79,36	80,27	101,15
7	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi Aman	%	3,32	4,03	4,29	4,66	4,66	100,00
8	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,48	66,51	100,05
9	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,5	31,99	23,33	127,07
10	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00	100,00	100	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
11	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	0	10,00	50,00	100,00	100	100,00
12	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,65	80,05	99,26
13	Cakupan Air Minum	%	0	70,48	72,59	75,74	75,74	100,00
14	Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	48,11	57,07	118,62
15	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	18,18	17,18	94,50
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
16	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	0	20,00	84,88	100,00	91	91,00
17	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	91,76	92,01	92,02	92,74	92,09	99,30
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
18	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0,00	10,00	33,21	100,00	NA	NA
19	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0,00	10,00	11,48	100,00	NA	NA
20	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100
21	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
22	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	16,36	11,98	73,23
23	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	0	0,41	10,00	20,00	NA	NA
24	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	%	0,53	0,55	0,57	0,59	0,59	100,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
25	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,1	46,15	14,29	6,00	158,01
26	Partisipasi politik masyarakat (%)	%	78,44	77,5	82,80	82,80	82,80	100,00
27	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,70	0,70	100,00
28	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	5,13	5,13	100,00
1.06	Sosial							
29	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00
30	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,29	4,64	4,31	92,89
31	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100	100,00	100,00
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR							
2.01	Tenaga Kerja							
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	3,35	4,22	74,03
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
33	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,95	60,06	55,81	57,81	NA	NA
34	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,36	90,37	90,4	90,43	NA	NA
35	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,21	20,50	20,35	99,27
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	17,93	17,93	100,00
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10,00	40,00	40,00	40,00	100,00
2.03	Pangan							
38	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	77,80	78,30	85,30	85,80	NA	NA
2.04	Lingkungan Hidup							
39	Indeks Kualitas Air	Point	74,18	74,63	75,63	76,63	NA	NA
40	Indeks Kualitas Udara	Point	86,82	87,17	88,17	89,17	NA	NA
41	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	36,50	39,80	34,91	55,00	NA	NA
42	Persentase Penanganan Sampah	%	25,00	30,00	34,91	40,00	38,22	95,55
43	Persentase Pengurangan Sampah	%	0,00	0,00	35,91	15,00	7,03	46,87
2.05	Pertanahan							
44	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
45	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	0,94	0,99	0,82	1,03	125,49
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa							
46	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	33,29	26,74	NA	NA
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
47	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,08	1,63	49,07
2.09	Perhubungan							
48	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	78,64	NA	NA
2.10	Komunikasi dan Informatika							
49	Kualifikasi Layanan Badan Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi	N/A	N/A		Interaksi	Interaksi	100,00
50	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	N/A	N/A		15	15,00	100,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
51	Persentase Koperasi Aktif	%	61,91	60,00	61,77	63,00	64,77	102,81
2.12	Penanaman Modal							
52	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.574	9655,00	83,42
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga							
53	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	35	30	0	0
54	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	23	15	16	106,67
55	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	68	68,07	68,07	100,00
2.14	Statistik							
56	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	N/A	N/A		15,00	15,00	100,00
2.15	Persandian							
57	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	I	I		II	III	120
2.16	Kebudayaan							
58	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	0,00	0,00	1,98	7,05	NA	NA
59	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8,70	17,39	26,00	24,35	NA	NA
2.17	Perpustakaan							
60	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	NA	NA
61	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	26,57	27,90	28,6	102,51
2.18	Kearsipan							
62	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	50,00	35,68	71,36
3	URUSAN PILIHAN							
3.01	Kelautan dan Perikanan							

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019			
63	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,57	4,76	NA	NA
3.02	Pariwisata							
64	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	100,00
65	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,05	2,95	1,98	67,12
66	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.812.379	3.706.352	4.400.000	NA	NA
67	Persentase Geosites yang Tertata	%	0,03	0,06	0,06	12,50	NA	NA
68	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	112,36	76,13	117,21	116,04	116,04	100,00
3.03	Pertanian							
69	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,29	23,81	102,23
70	Nilai Tukar Petani	Point	107,63	111,21	115,27	>105	109,22	104,02
3.04	Kehutanan							
71	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	66,1	66,56	67,56	68,56	NA	NA
72	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	0,08	2,13	5,08	0	0
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral							
73	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,66	99,98	100,32
3.06	Perdagangan							
74	Indeks Pengeluaran		69,76	70,99	72,03	72,91	71,19	97,63
75	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.952	10351	94,51
3.07	Perindustrian							
76	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	240,99	56,28	165	160,00	410,16	256,35
77	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,90	2,20	NA	NA
78	Pertumbuhan Industri	%	2	2,00	4,57	5,5	NA	NA
3.08	Transmigrasi							
79	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80,00	85	50,00	58,82
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG							
4.01	Administrasi Pemerintahan							
80	Skor EKPPD	Point	2,9752	3,2048	3,2048	3,0462	3,0000	98,48
81	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100,00	100,00	144,05	100,00	136,86	136,86
82	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	36,00	36,16	NA	NA
83	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	2,00	100

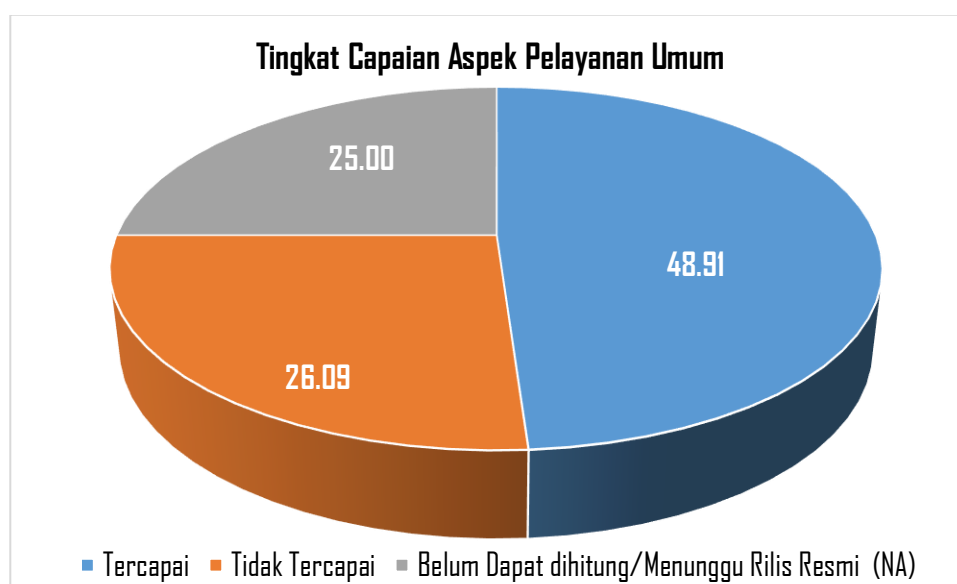
RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD			TARGET CAPAIAN	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2017	2018	2019	2020		
84	Persentase Kerjasama Daerah	%	100	100	150	100	42,86	42,86
4.02	Pengawasan							
85	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB (70,05-73,00)	NA	NA
4.03	Perencanaan							
86	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	95,09	100,00	100	100
4.04	Keuangan							
87	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100
88	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,46	0,45	0,5	0,48	0,48	100
89	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	34,06	34,06	100
4.05	Kepegawaian							
90	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,66	0,59	89,39
4.06	Pendidikan dan Pelatihan							
91	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	NA	NA	0,23	0,24	NA	NA
4.07	Penelitian dan Pengembangan							
92	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	21,00	21,00	17	80,95

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2019

Ket. NA= Not Available

Dari 92 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 45 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 24 indikator belum memenuhi target, namun 10 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 23 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait.



Gambar 2- 3 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat umum serta sosial.

1. Bidang Pendidikan

Perkembangan pembangunan bidang Pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan atas data dan indikator. Indikator pendidikan menggambarkan kondisi dan perkembangan pendidikan secara tepat antara lain melalui indikator indeks Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel 2-20 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	PENDIDIKAN				
1	Indeks Pendidikan (Point)	-	61,68	62,03	62,42
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,57	13,48	13,62	13,70
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,96	7,27	6,98	7,31
4	Persentase APK SMA/MA/SMK/Paket C (%)	98,13	98,55	98,63	102,21
5	Persentase APM SMA/MA/SMK/Paket C (%)	90,50	88,42	92,42	99,69
6	Persentase APS SMA/MA/SMK/Paket C (%)	94,57	94,43	95,79	97,40
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas /Penduduk usia sekolah pendidikan menengah (%)	1,04	1,00	1,02	0,99
8	Persentase APK PK-PLK (%)	68,44	80,87	69,00	81,71

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
9	Rasio Guru Terhadap murid pendidikan Menengah (SMA, SMK)	1:22	1:23	1:20	1:20
10	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk SLB	1:16	1:16	1:15	1:6

Sumber: Dinas Dikbud, Provinsi NTB, BPS NTB, 2020

Indikator kinerja daerah urusan Pendidikan sesuai RPJMD 2019-2023 adalah indeks Pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator indeks Pendidikan tahun 2020 telah mencapai 62,42 point, melampaui target yang ditetapkan (62,03 point) dan melampaui capaian tahun 2019 yaitu sebesar 61,68 point. Harapan lama sekolah tahun 2020 mencapai 13,70 tahun melebihi capaian tahun 2019 sebesar 13,48 tahun dan telah mencapai target tahun 2020 (13,62 tahun). Indikator rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 7,31 tahun, telah melampaui capaian tahun 2019 (7,27 tahun) dan telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2020 (6,98 tahun).

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah. Angka melek huruf adalah kemampuan membaca dan menulis sebagai tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Sedangkan Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal, dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir/selesai, tanpa memperhitungkan apakah tinggal kelas atau tidak.

Angka melek huruf berbanding terbalik dengan angka buta huruf, yaitu persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis, baik huruf latin dan atau huruf lainnya. Semakin tinggi angka melek huruf suatu wilayah berarti angka buta hurufnya akan semakin rendah. Angka melek huruf di NTB tahun 2019-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-21 Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2020

ANGKA MELEK HURUF	LAKI	PEREMPUAN	NTB
2019	92,12	83,49	87,59
2020	91,19	84,34	87,60

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019-2020,

Dari tabel diatas, Tahun 2020 tercatat penduduk NTB yang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 87,60 persen. Capaian ini masih berada dibawah angka melek huruf Indonesia yaitu 96,00 persen. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat NTB harus

bersinergi untuk menuntaskan buta aksara agar dapat meningkatkan angka melek huruf pada penduduk usia 15 tahun.

Pada tahun 2020, program pelatihan TOEFL/IELTS dan mengirimkan putra/putri NTB ke luar negeri merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah NTB, yang mana pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah NTB baru mencapai 7,31 tahun masih jauh dibawah nasional 8,48 tahun. Selain upaya tersebut diatas, upaya lainnya adalah: memberikan beasiswa kedokteran bagi lulusan terbaik pesantren sebanyak 9 orang; beasiswa miskin berprestasi (BMB) diberikan kepada 330 orang; dan beasiswa stimulant diberikan kepada 490 orang.

Re-engineering SMK adalah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluaran SMK, yang mana tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi tahun 2019 dan 2020 berturut-turut diduduki oleh penduduk dengan Pendidikan tertinggi SMK. Salah satu factor penyebabnya adalah belum link and match antara keluaran SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. Untuk mengatasi permasalahan diatas, pemerintah melakukan revitalisasi SMK dengan tujuan untuk menciptakan keluaran SMK yang siap kerja dengan kompetensi kerja memenuhi kebutuhan kerja dan standar kerja dunia usaha dunia industry.

Dalam rangka penyelenggaraan program *re-engineering* SMK, pada tahun 2020 telah dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Revitalisasi SMK sebagai payung hukum pelaksanaan re-engineering SMK, yang juga diikuti dengan penyusunan Road Map atau peta jalan Revitalisasi SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah satu kegiatan re-engineering SMK yang dilakukan tahun 2020 adalah pengiriman 50 orang siswa ke Bali untuk mengikuti LSP atau sertifikasi kompetensi dibidang kelautan.

Tabel 2-22 Perkembangan Lulusan dan Melanjutkan Ke Jenjang yang Lebih Tinggi Tahun Pelajaran 2012/2013 - 2019/2020

JENJANG	TAHUN AJARAN	LULUSAN	MELANJUTKAN (CR) (%)
SD/MI			Ke SMP/MTs
	2012/2013	93.572	100,75
	2013/2014	94.520	102,48
	2014/2015	95.469	101,09
	2015/2016	100.784	100,88
	2016/2017	101.329	100,04
	2017/2018	98.274	100,25
	2018/2019	97.184	100,18
	2019/2020	98.564	100.05
SMP/MTs			Ke SMA/MA/SMK
	2012/2013	78.457	97,16

JENJANG	TAHUN AJARAN	LULUSAN	MELANJUTKAN (CR) (%)
	2013/2014	76.622	98,97
	2014/2015	79.366	98,99
	2015/2016	88.016	99,03
	2016/2017	89.049	99,07
	2017/2018	86.065	99,21
	2018/2019	84,077	99,32
	2019/2020	85.733	99,99

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2020

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2012/2013-2019/2020 angkanya fluktuatif namun telah melampaui 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua lulusan SD telah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di tingkat SMP/MTs. Sementara itu, bila melihat angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke jenjang SMA/MA dari tahun ke tahun cenderung meningkat dan hampir mencapai 100 persen. Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/MA pada tahun 2019/2020 sebesar 99,99 persen. Hal ini menunjukkan hampir semua lulusan SMP/MTs telah melanjutkan ke jenjang SMA/MA.

Tabel 2-23 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2019/2020

NO	TAHUN	ANGKA PUTUS SEKOLAH (DO) SD, SMP, SMA DAN SMK							
		SD	%	SMP	%	SMA	%	SMK	%
1.	2012/2013	1.116	0,20	843	0,48	1259	1,32	915	1,84
2.	2013/2014	1.047	0,19	822	0,47	1128	1,15	857	1,66
3.	2014/2015	969	0,18	801	0,45	990	1,02	907	1,56
4.	2015/2016	894	0,17	582	0,33	828	0,82	955	1,53
5.	2016/2017	782	0,15	463	0,25	688	0,67	864	1,37
6.	2017/2018	456	0,09	312	0,17	422	0,40	548	0,81
7.	2018/2019	475	0,09	273	0,15	393	0,37	465	0,65
8.	2019/2020	344	0,07	43	0,02	47	0,05	249	0,34

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka drop out untuk semua jenjang dari tahun 2012/2013-2019/2020 terus mengalami penurunan. Angka drop out tahun 2019/2020 untuk tingkat SD sebesar 0,07 persen, tingkat SMP sebesar 0,02 persen, tingkat SMA sebesar 0,05 persen dan untuk tingkat SMK sebesar 0,34 persen. Hal ini menunjukkan intervensi program Pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa maupun bantuan kepada siswa kurang mampu melalui dana BOS telah memberikan manfaat bagi penurunan angka drop out.

2. Bidang Kesehatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak

dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan diselenggarakan oleh 4 (empat) Perangkat Daerah, yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi, dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut.

a. DINAS KESEHATAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1) Proporsi Kematian Ibu, dan 2) Proporsi Kematian Bayi, 3) Prevalensi Wasting, 4) Cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan nasional, 5) Cakupan Jamban Memenuhi Syarat. Target dan capaian indikator urusan bidang Sosial tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-24 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	Proporsi Kematian Ibu	90	119,05
2		Proporsi Kematian Bayi	8,5	8,38
3	Menurunnya Prevalensi <i>Wasting</i>	Prevalensi <i>Wasting</i>	12,41	6,56
4	Meningkatnya Kepesertaan JKN PBI	Cakupan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional	61	64,09
5	Meningkatnya Kualitas Penyehatan Lingkungan	Cakupan Jamban Memenuhi Syarat	90	91,36

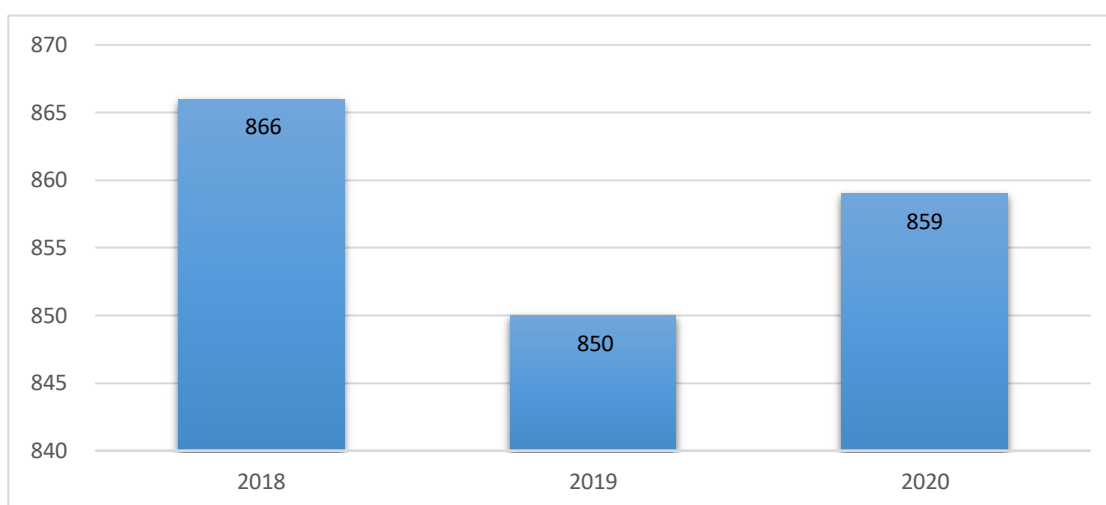
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Pencapaian Urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan untuk semua indikator diatas telah melampaui target, kecuali indikator Proporsi Kematian Ibu. Tidak tercapainya target indikator Angka Kematian Ibu ini didominasi oleh perdarahan dan hipertensi, pelayanan kesehatan ibu belum dilaksanakan sesuai standar seperti ANC, kemudian pelaksanaan kelas ibu hamil, tingkat partisipasi masyarakat di posyandu, dan sistem rujukan yang terganggu sejak masa pandemi Covid-19.

- **Umur Harapan Hidup (UHH)**

Umur Harapan Hidup pada tahun 2018 menjadi 65,87, pada tahun 2019 meningkat menjadi 66,28 tahun, dan tahun 2020 menjadi 66.51 UHH, sudah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2020, sebesar 66,48. Peningkatan UHH pada tiga tahun terakhir menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah cukup efektif. Peningkatan UHH tahun 2020 ini sejalan dengan penurunan jumlah kasus kematian bayi, dan jumlah kasus kematian ibu.

Peningkatan pencapaian UHH, meskipun belum signifikan namun peningkatannya tetap dipengaruhi oleh berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan desa serta NGO, swasta dan masyarakat seperti program Generasi Emas NTB, program ASHAR, dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin/kurang mampu, dan lain-lain. Berbagai program diatas diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi kurang gizi yang semuanya berpengaruh pada pencapaian UHH. Gambaran kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 4 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

Kasus kematian bayi pada tahun 2018 terjadi sebanyak 866 kasus dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 850 kasus, dengan proporsi 8,36 per 1.000 kelahiran hidup, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 859 kasus, dengan proporsi 8,38 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2018-2020 per kabupaten/kota se-NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-25 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2020

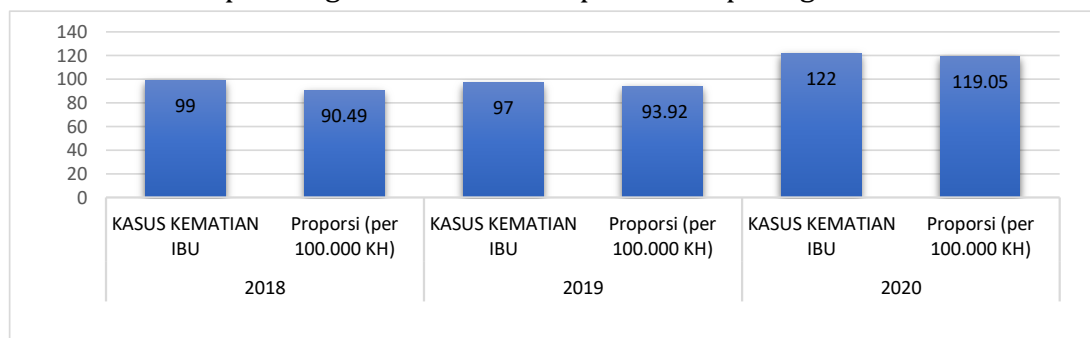
NO	KABUPATEN/ KOTA	2018			2019			2020		
		JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)
1.	Mataram	58	7.748	7,48	36	7.761	4,64	37	8.842	4.18
2.	Lombok Barat	28	13.723	2,04	46	13.708	3,94	42	13.663	3.07
3.	Lombok Utara	87	4.517	19,26	76	4.670	16,27	69	4.443	15.53
4.	Lombok Tengah	230	19.500	11,80	204	19.577	10,42	194	19.145	10.13
5.	Lombok Timur	226	27.211	8,31	288	27.047	10,64	297	24.651	12.05
6.	Sumbawa Barat	17	3.119	5,45	13	2.821	6,38	13	3.495	3.72
7.	Sumbawa	74	8.857	8,35	59	8.701	6,78	76	9.052	8.40

NO	KABUPATEN/ KOTA	2018			2019			2020		
		JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	JUMLAH KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)
8.	Dompu	43	10.950	3,93	21	5.570	3,77	36	5.763	6.25
9.	Bima	79	10.496	7,53	79	10.149	7,78	81	10,084	8.03
10.	Kota Bima	24	3.279	7,32	28	3.270	8,56	14	3,339	4.19
NTB		866	109.400	7,91	850	103.274	8,36	859	102,477	8.38

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020, *) Proporsi: per 1000 Kelahiran Hidup

Menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kasus kematian bayi tahun 2018 terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 230 kasus dan Kabupaten Lombok Timur 226 Kasus. Pada Tahun 2019 kasus kematian bayi tertinggi di kabupaten Lombok Tengah 204 kasus, dan Kabupaten Lombok Timur 288 Kasus dan pada tahun 2020 kasus kematian bayi terbanyak di Kabupaten Lombok Timur 297 kasus, dan Kabupaten Lombok Tengah 194 Kasus. Sementara untuk proporsi kematian bayi per 100 kelahiran hidup di Kabupaten Lombok Utara masih menempati tempat tertinggi pada tahun 2018 sebesar 19,26 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil diturunkan menjadi 16,27 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Kasus kematian bayi terendah tahun 2018 terjadi di Kota Bima dengan 24 kasus, dan pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 18 kasus. Proporsi terendah tahun 2018 terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebesar 2,04 per 1.000 kelahiran hidup dengan kasus kematian bayi sebanyak 28 kasus, kemudian pada tahun 2019 proporsi terendah terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 3,77 per 1.000 kelahiran hidup dengan 21 kasus kematian bayi.

Indikator berikutnya yang turut mempengaruhi capaian UHH adalah Kasus Kematian Ibu. Selama periode tiga tahun terakhir jumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami kecenderungan meningkat, dengan capaian berturut dari tahun 2018-2020 adalah 85 kasus, 99 kasus, dan 97 kasus. Sama dengan jumlah kasus, kecenderungan meningkat juga terjadi pada angka proporsi kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2017-2019 adalah 82,40, 90,49, dan 93,92. Kasus kematian ibu dan proporsinya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 5 Jumlah Kasus dan Proporsi Kematian Ibu di NTB Tahun 2018 - 2020

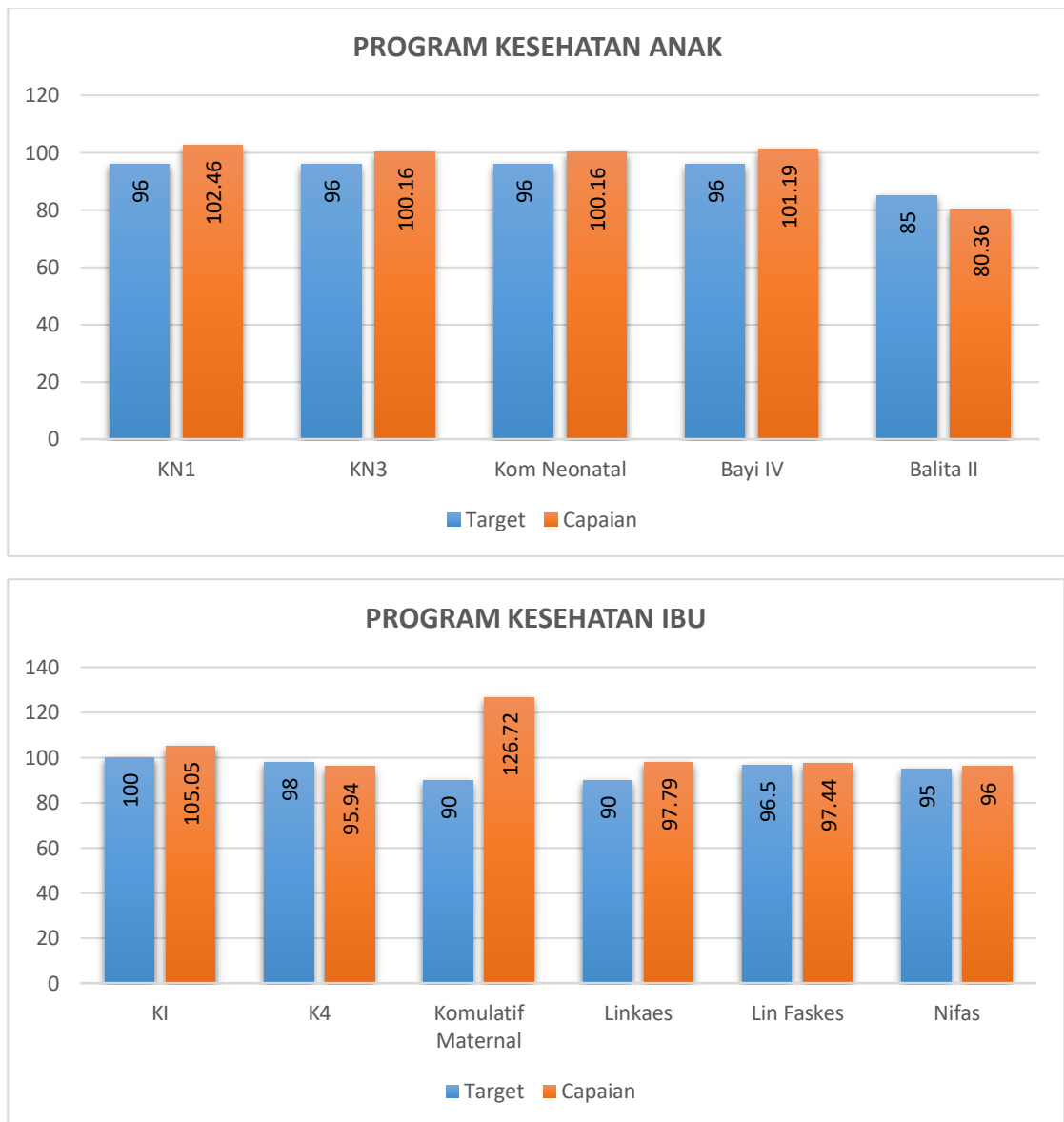
Kasus kematian ibu terbanyak pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 43 kasus dengan proporsi 174,44 per 100.000 kelahiran hidup, terendah di Kabupaten Dompu 1 Kasus dengan proporsi 17. 35 dan Sumbawa Barat 1 kasus dengan proporsi 28,61 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota tahun 2018-2020 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-26 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/ KOTA	2018			2019			2020		
		KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)
1	Mataram	9	7.78	72,72	6	7.761	77,31	7	8,842	79.17
2	Lombok Barat	5	13.772	36,31	6	13.708	43,77	14	13,663	102.47
3	Lombok Utara	2	4.567	65,69	4	4.670	85,65	3	4,443	67.52
4	Lombok Tengah	24	19.641	91,80	30	19.577	153,24	29	19,145	151.48
5	Lombok Timur	34	26.145	84,15	29	27.047	107,22	43	24,651	174.44
6	Sumbawa Barat	1	2.837	105.75	2	2.821	70,89	1	3,495	28.61
7	Sumbawa	12	8.853	45,19	5	8.701	57,46	11	9,052	121.52
8	Dompu	0	5.700	70,18	4	5.570	71,81	1	5,763	17.35
9	Bima	8	10.207	78,38	5	10.149	49,26	10	10,084	99.17
10	Kota Bima	4	3.177	188,86	6	3.270	183,48	3	3,339	89.85
NTB		99	103.170	82,38	97	103.274	93,92	122	102,477	119.05

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020; Proporsi *) : per 100.000 Kelahiran Hidup

Ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi adalah melalui berbagai program dan kegiatan yang diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.



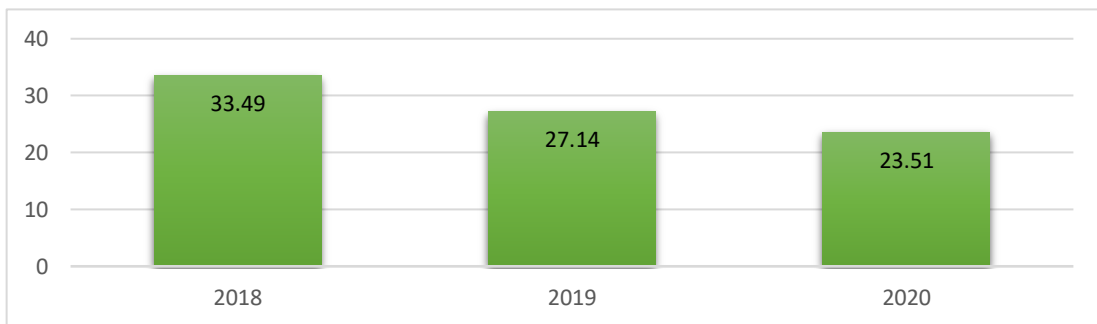
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2020

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator sudah mencapai target yang ditentukan, untuk program ibu, yang belum tercapai adalah kunjungan keempat ibu hamil (K4), kunjungan nifas, sementara untuk program anak yang belum mencapai target hanya indikator kunjungan neonatal ketiga (K3). Belum tercapainya target indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa monitoring terhadap ibu hamil masih harus terus ditingkatkan, disamping itu peningkatan kompetensi petugas kesehatan juga harus terus dilakukan.

- **Balita Stunting**

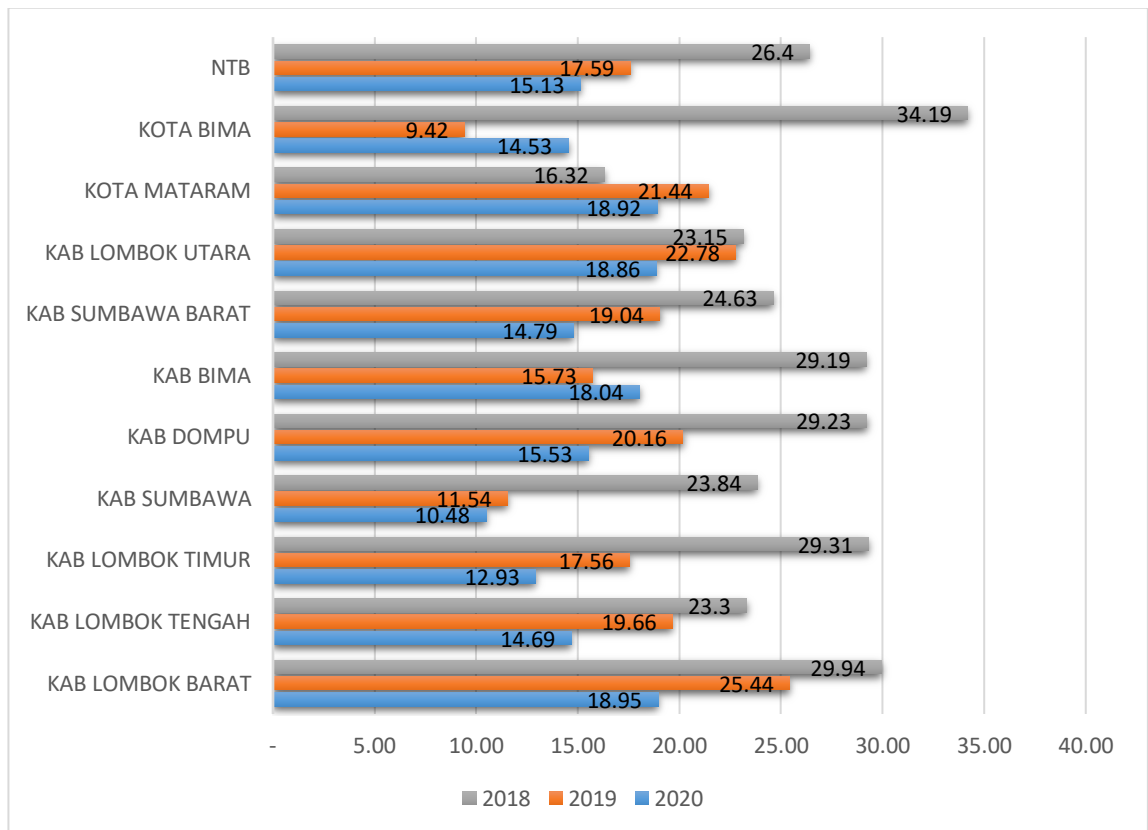
Pencapaian indikator Kinerja “Persentase Balita Stunting” pada tahun 2020 telah mencapai 23,51%. Data ini diperoleh dari hasil pelaporan melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), namun hingga 31 Desember 2020, cakupan pendataan/pengukuran baru mencapai 79,26%. Sehingga angka 23,51% belum dapat menggambarkan secara menyeluruh keadaan stunting di NTB. Pendataan/pengukuran dilakukan secara terus menerus sampai dengan seluruh Balita sasaran terdata. Indikator yang mempengaruhi dalam rangka menurunkan angka balita stunting adalah prevalensi kurang gizi dan tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S). Untuk indikator prevalensi Stunting dapat dilihat perkembangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 6 Prevalensi Stunting NTB Tahun 2018-2020

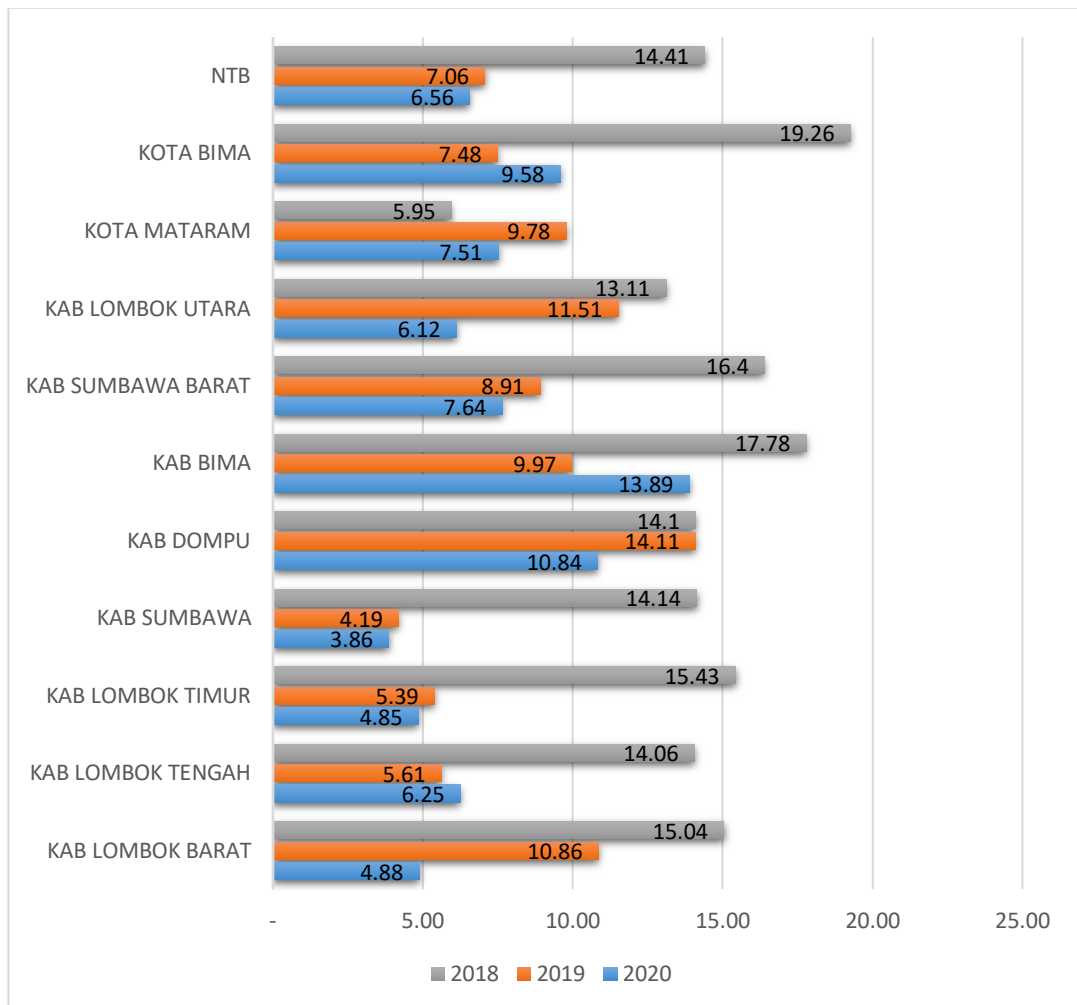
Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menangani stunting termasuk underweight dan wasting. Beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan prevalensi/persentase Stunting di NTB adalah Asupan gizi yang terus membaik, terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang terus membaik, dan faktor-faktor lainnya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 7 Persentase Berat Kurang (*Underweight*) Menurut Indeks Berat Badan dan Umur Tahun 2018-2020

Persentase berat badan menurut indeks umur hampir pada periode pada tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. Kabupaten/kota dengan prevalensi *underweight* yang masih tinggi yaitu Kabupaten Lombok Barat 18.95%, Kota Mataram 18.92 dan Kabupaten Lombok Utara 18.86. Meskipun begitu, angka prevalensi berat badan kurang secara umum menunjukkan penurunan. Pengetahuan masyarakat akan peran gizi bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas sangat perlu lebih ditingkatkan. Masalah gizi tidak saja timbul karena ketidakmampuan untuk membeli bahan pangan berkualitas namun juga dipengaruhi oleh pola asuh anak, yang mana karena kesibukan orangtua mencari nafkah sehingga pengasuhan anak termasuk di dalamnya pengaturan pola makan anak diserahkan kepada asisten rumah tangga atau nenek/kakeknya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 8 Persentase Balita Wasting Menurut Indeks Berat Badan dan Tinggi/Panjang Badan Provinsi NTB, Tahun 2018-2020

Persentase balita Wasting di provinsi NTB dari tahun 2018 samapai dengan tahun 2020 menunjukkan trend penurunan kejadian kasus yang semakin membaik, pada tahun 2020 berada pada angka 6,56 % dari target 12,41%, namun hal ini masih dirasa tinggi melihat kondisi dilapangan dan pada masa pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi status gizi anak balita, sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan, dengan cakupan input data melalui aplikasi sigizi terpadu melalui elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) rata-rata 79%. Masih adanya kasus balita wasting yang merupakan kasus anak-anak gizi buruk yang akan berpengaruh juga pada peningkatan kasus Stunting di Provinsi NTB.

Penanganan balita stunting juga dilakukan dengan optimalisasi peran posyandu sebagai wadah pemantau masalah gizi pada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat (ibu hamil/menyusui, bayi dan balita) harus didorong untuk rajin

memeriksa status gizinya di posyandu sehingga jika terjadi gangguan terkait kecukupan gizi dapat segera diketahui dan ditangani. Pemanfaatan Posyandu oleh masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Indikator yang dipergunakan adalah jumlah balita yang datang dibandingkan dengan jumlah balita yang ada atau D/S. selama periode 2018-2020 terlihat bahwa pencapaian cakupan D/S terus menunjukkan kecenderungan menurun. Cakupan D/S tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Timur dengan cakupan sebesar 87,80%, dan terendah di Kota Mataram sebesar 39,70%. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-27 Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	KAB/KOTA	TAHUN		
		2018	2019	2020
1.	Lombok Barat	95,63	95,80	74.10
2.	Lombok Tengah	80,26	80,55	67.00
3.	Lombok Timur	79,34	88,55	87.80
4.	Sumbawa	83,35	82,67	53.90
5.	Dompu	79,19	81,92	61.50
6.	Bima	80,2	81,33	76.10
7.	Sumbawa Barat	83,28	84,30	75.80
8.	Lombok Utara	79,44	86,91	76.50
9.	Mataram	83,86	83,19	39.70
10.	Kota Bima	72,12	76,08	64.40
	NTB	82,37	85,15	71.80

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Cakupan D/S merupakan angka yang menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di posyandu, dengan menghitung tingkat kedatangan pada posyandu. Cakupan D/S tahun 2019 di Provinsi NTB telah mencapai 85,15% naik dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 82,37%. Pada tahun 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 mengalami penurunan menjadi 71.80%, gerak kegiatan masyarakat terbatas sebagai akibat pandemi di seluruh kabupaten/kota di NTB sejak bulan Maret 2020 terus mengalami peningkatan, kebijakan untuk membatasi aktifitas masyarakat untuk keluar rumah termasuk ibu balita dan ibu hamil mempengaruhi dampak pelayanan kesehatan di Posyandu. Selama pencapaian cakupan D/S belum mencapai 100%, maka kasus gizi buruk maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk masih mungkin terjadi karena masih ada balita yang tidak terpantau pertumbuhannya secara dini oleh kader maupun petugas kesehatan di lapangan. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain melalui:

- a. Memperkuat standar pelayanan (SOP) di Posyandu dengan menerapkan protokol kesehatan 5M: Menggunakan Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dengan Air dan Sabun
- b. Melakukan sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
- c. Pembinaan Keluarga Sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi;
- d. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di 100 Desa GEN di kabupaten/kota se NTB oleh mahasiswa dalam rangka ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan);
- e. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan desa dan kader posyandu;
- f. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui.
- g. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil.

- **Jaminan Kesehatan Nasional**

Indikator Kinerja Daerah “Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional” telah mencapai 90,3% pada tahun 2020, melampaui target RPJMD NTB 2019-2023 sebesar 73%. Pencapaian ini juga naik secara signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 70,35%. Kuota peserta JKN NTB yang terdaftar dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2020 sebanyak 147.588 jiwa.

Tabel 2-28 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1.	Kota Mataram	145.109	7.978	17.699	170.786
2.	Kabupaten Lombok Barat	391.392	18.605	18.354	428.351
3.	Kabupaten Lombok Utara	134.256	48.600	9.970	192.826
4.	Kabupaten Lombok Tengah	569.634	21.069	49.311	640.014
5.	Kabupaten Lombok Timur	869.915	19.403	60.248	949.566
6.	Kota Bima	64.658	17.910	12.595	95.163
7.	Kabupaten Bima	319.012	6.705	25.721	351.438
8.	Kabupaten Dompu	135.256	2.447	49.015	186.718
9.	Kabupaten Sumbawa	231.442	3.732	58.967	294.141
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	56.572	1.139	43.804	101.515
TOTAL PROV NTB		2.917.226	147.588	345.684	3.410.518

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Provinsi NTB baik PBI, Non PBI maupun Non JKN sampai 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 2-29 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (DATA BPS)	NON PBI	PBI
1.	Kota Mataram	432.451	170.786	193.668
2.	Kabupaten Lombok Barat	722.961	428.351	138.258
3.	Kabupaten Lombok Utara	243.530	192.826	28.492
4.	Kabupaten Lombok Tengah	1.050.725	640.014	155.872
5.	Kabupaten Lombok Timur	1.304.489	949.566	169.018
6.	Kota Bima	150.465	95.163	54.404
7.	Kabupaten Bima	532.110	351.438	91.436
8.	Kabupaten Dompu	225.161	186.718	51.372
9.	Kabupaten Sumbawa	518.019	294.121	110.917
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	141.641	101.515	38.389
PROVINSI NTB		5.321.552	1.031.826	3.410.498

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020; Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk NTB yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 5.321.552 jiwa atau 83,48% dari jumlah penduduk NTB (Non PBI + PBI). Besar dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 34.580.885.250 untuk masyarakat miskin diluar JKN Pusat.

Tabel 2-30 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2020

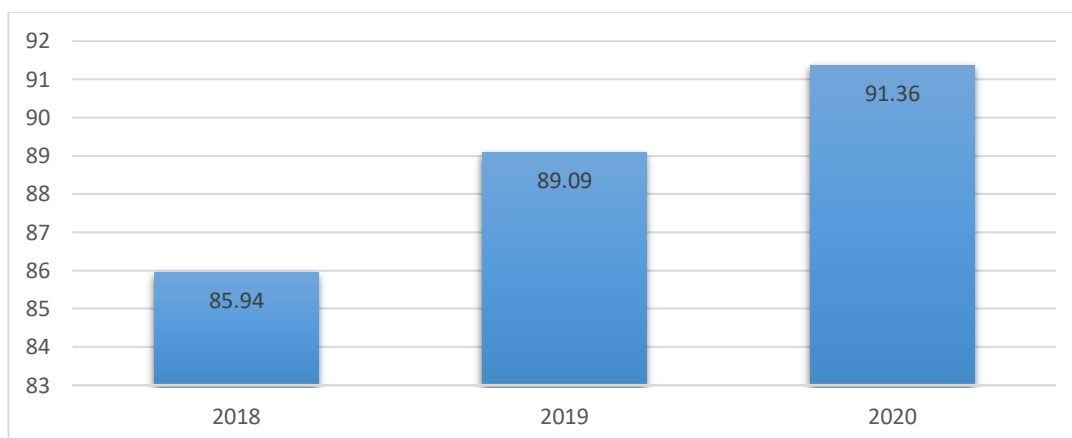
NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
1.	Provinsi	39.763.269.112	34.580.885.250	86.9	Termasuk Penambahan Pajak Rokok
2.	Kota Mataram	1.892.016.000	1.556.943.000	82.3	
3.	Lombok Barat	1.432.368.000	1.432.368.000	100	
4.	Lombok Tengah	1.350.000.000	1.350.000.000	100	
5.	Lombok Timur	0	0	0	Tidak ada kerja sama
6.	Lombok Utara	6.229.890.000	6.229.890.000	100	
7.	Sumbawa Barat	0	0	0	Tidak ada kerja sama
8.	Sumbawa	1.240.344.000	1.240.344.000	100	
9.	Dompu	438.228.000	438.228.000	100	
10.	Bima	555.930.000	555.930.000	100	
11.	Kota Bima	4.280.042.000	4.280.042.000	100	
JUMLAH		57.182.087.112	51.664.630.250	90.30	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Realisasi dana sharing provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ditransfer ke BKSPJK adalah Rp.51.664.630.250,- dari target sebesar Rp.57.182.087.112,-. Kabupaten Lombok Timur dan Sumbawa Barat tidak memberikan dana sharing pada tahun 2020 karena kabupaten tersebut tidak ada kerja sama. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, karena keterbatasan anggaran yang banyak dialokasikan untuk penanganan akibat dampak gempa sehingga tidak mengalokasikan untuk sharing. Total iuran peserta PBI NTB yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.143.176.500,- dengan jumlah kepesertaan 147.588 jiwa.

- **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah “Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak” pada tahun 2020 mencapai 91,36 % melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 72,62%. Dalam rangka pencapaian Indikator ini, Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2020 mengintervensi melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan jamban keluarga. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus meningkat, ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 9 Cakupan Jamban Keluarga NTB Tahun 2018 – 2020

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui metode pemecuan yang dilakukan oleh Tim Pemicu Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara kontinyu sehingga akses jamban meningkat 2,27%, dalam kurun 2019 samapai dengan 2020. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya Kabupaten yang telah berhasil meraih angka cakupan 100%, dan kabupaten Sumbawa Barat sebagai kabupaten dengan pencapaian terendah pada tahun 2020 dengan cakupan sebesar 100%. Pencapaian cakupan jamban keluarga tahun 2018 dan 2020 secara detail per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2-31 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019-2020

NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN JAMBAN (%)		
		2018	2019	2020
1.	Kota Mataram	99,49	99,54	99.54
2.	Kab. Lombok Barat	92,45	93,92	96.25
3.	Kab. Lombok Tengah	82,26	84,19	86.81
4.	Kab. Lombok Timur	82,72	85,02	85.89
5.	Kab. Lombok Utara	82,10	88,27	90.41
6.	Kab. Sumbawa Barat	100,00	100,00	100.00
7.	Kab. Sumbawa	82,32	84,02	88.63
8.	Kab. Dompu	85,47	84,56	92.58
9.	Kab. Bima	87,52	93,34	95.71
10.	Kota Bima	90,19	91,74	91.74
NTB		85,94	89,09	91.36

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten di NTB yang telah bebas buang air besar sembarangan dan mendapatkan reward sebagai kabupaten bebas BASNO. Ketersediaan sanitasi adalah salah satu syarat utama untuk mencapai predikat sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan.

Kabupaten Lombok Timur memiliki cakupan jamban terendah tahun 2020, Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 berada pada posisi tertinggi dengan capaian 100%, Kabupaten Sumbawa berhasil memperbaikinya dengan cakupan 88,63% pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan keberhasilan Rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca gempa bumi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi.

Pemicuan Program BASNO di 10 kabupaten/kota pada tahun sejak tahun 2015 telah dilaksanakan pada 1.131 desa (2015-2019), total desa BASNO sampai dengan tahun 2019 sebanyak 626 Desa dan Tahun 2020 sebanyak 726 desa. Faktor yang mempengaruhi capaian cakupan jamban keluarga antara lain:

1. Akses air bersih yang terjangkau, semakin mudah mengakses air bersih berpengaruh pada kesadaran masyarakat membangun jamban menjadi semakin tinggi;
2. Lingkungan pemukiman yang padat, semakin padat lingkungan pemukiman lahan untuk membangun jamban menjadi semakin kecil sehingga diperlukan pembangunan MCK komunal/*septic tank* komunal;
3. Kemampuan ekonomi, untuk masyarakat miskin pemerintah memberikan bantuan pembangunan jamban melalui pola bantuan permodalan koperasi;
4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya aliran sungai, pesisir pantai, kebun dan lain-lain.

Upaya-Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan cakupan jamban keluarga, yaitu :

1. Melaksanakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2015;
2. Melakukan pemicuan yang dilakukan oleh petugas sanitarian puskesmas dengan didukung oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, Da'i kesehatan, dan masyarakat yang tidak memiliki jamban yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. Memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang telah mencapai BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 tahun 2013 tentang GERAKAN BASNO; catatan program ini masih terkendala pada pencairan realisasi (sehingga program ini masih tertunda atau Hutang pada desa dan Kecamatan yang mencapai BASNO pada tahun 2020)
4. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan DPMPD Dukcapil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, BAPPEDA, dan Baznas khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan MCK Komunal;
5. Melibatkan DA' I Kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan;

6. Penyusunan awig-awig atau peraturan desa bagi desa yang telah mendeklarasikan Desa BASNO sehingga PHBS tetap terjaga;
7. Pemberdayaan Masyarakat melalui pemicuan pada lokasi program PAMSIMAS, dan MCAI;
8. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK; Tidak Ada dari 2019 dan 2020 disebabkan pandemic covid 19
9. Pembinaan Wira Usaha Sanitasi untuk mendukung sarana sanitasi/jamban yang lebih murah.

- **Program Unggulan di Bidang Kesehatan Revitalisasi Posyandu**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistim pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan kesehatan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2018 sebanyak 7.207 dan bertambah Tahun 2019. Jadi setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita. Namun bila ditinjau dari aspek kualitas, masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun prosentase posyandu Purnama dan mandiri) karena kedua strata tersebut dikatakan sebagai posyandu aktif. Dalam penilaian tingkat perkembangan posyandu ada 4 (empat) strata yaitu Strata Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Posyandu Purnama dan Mandiri disebut Posyandu aktif karena lebih banyak peran masyarakat dibandingkan peran petugas dalam pelaksanaan posyandu. Berdasarkan data posyandu yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tingkat perkembangan Posyandu pada tahun 2018 masih terbanyak pada strata Madya (42,6%) dan posyandu strat purnama dan mandiri baru 52,9% masih dibawah target yang diharapkan yakni 55%. Hal ini berarti masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan posyandu antara lain kurangnya kader yang aktif, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengambil langkah bijak, dengan mengangkat atau menghidupkan kembali kinerja

Posyandu ini, melalui program unggulan “Revitalisasi Posyandu”. Hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu. Upaya ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat. Karena itu, mengingat sumberdaya yang terbatas, maka penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dirancang sebagai suatu kolaborasi dan sinergi yang sistematis antar sektor terkait, para mitra pembangunan (NGO), swasta serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota bahkan sampai pemerintah Desa.

Peningkatan kualitas posyandu juga mencakup upaya perluasan sasaran, sehingga posyandu di NTB dapat melayani/ memberikan manfaat bagi semua kelompok sasaran yang rentan, seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja dan kelompok lanjut usia. Karena itu, Pemerintah provinsi NTB telah merumuskan arah revitalisasi posyandu di NTB yaitu terbentuknya “Posyandu Keluarga” di semua Desa/ Kelurahan, atau posyandu yang dapat melayani semua anggota keluarga. Sejak diluncurkan program Posyandu keluarga sebagai salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017, perkembangan terbentuknya posyandu keluarga cukup pesat dari 86 Posyandu pada tahun 2019 saat ini jumlah posyandu keluarga 1050 dan pada tahun 2020 menjadi 2223 posyandu, karena dirasa begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

- **Program Penanggulangan Covid 19 Dinas Kesehatan Provinsi NTB**

Perkembangan Kasus covid 19 di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan, namun tetap dalam pemantauan pihak satgas covid 19 provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama 10 Kabupaten/Kota di NTB, kasus covid 19 pada tahun 2020 yang terdiri dari Pelaku Perjalanan sebesar 108.188 Kasus, Kontak Erat 44.698 Jiwa, Sembuh 4.724 Jiwa, Meninggal 288 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat per kabupaten/kota pada tabel dibawah ini:

Tabel 2-32 Kasus Covid 19 per Kabupaten/kota Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	PELAKU PERJALANAN	KONTAK ERAT	SEMBUH	MENINGGAL
1	Mataram	2.582	8.489	1.241	94
2	Lombok Barat	4.332	6.070	689	50
3	Lombok Tengah	11.720	4.634	260	18
4	Lombok Utara	1.079	1.033	127	5
5	Lombok Timur	18.185	5.683	636	27
6	Sumbawa Barat	13.463	1.343	164	3
7	Sumbawa	10.674	2.829	452	47
8	Dompu	20.002	4.173	360	16
9	Bima	12.343	5.320	270	11
10	Kota Bima	3.440	5.124	429	17
	WNA	0	0	4	0
	Luar Provinsi	10.368	0	92	0
	Total	108.188	44.698	4724	288

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Upaya Strategis Penanggulangan Covid 19 di Provinsi NTB melalui strategi 3T (Tracing-Testing-Treatment Masif NTB), tes Antigen bagi pelaku perjalanan, peningkatan kapasitas Kesehatan dan Laboratorium seluruh NTB, melakukan pengawasan Kontak Erat satu persatu pada masyarakat di NTB.

Pada Tahun 2020, penanganan Covid 19 pada Dinas Kesehatan dilakukan dengan program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, dalam bentuk kegiatan surveilans aktif covid 19, Penyelidikan epidimiologi covid 19, verifikasi rumor covid 19, verifikasi data covid 19, vaksinasi data covid 19, penjemputan spesimen covid 19 serta pengadaan ATK dan Dokumentasi Covid 19, sebagian besar bersumber dari BOK, BTT dan DBHCHT. Dalam penanganannya terjadi beberapa kendala dan Upaya yang dilakukan untuk menangani kendala tersebut, antara lain:

1. Stigma masyarakat tentang covid 19 yang masih rendah, sehingga protokol kesehatan kurang dapat dipatuhi secara merata oleh lapisan masyarakat di NTB, upaya yang dilakukan memperkuat koordinasi berbagai pihak-pihak terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama dan petugas kesehatan sendiri
2. Standar prosedur kontak stressing tidak berjalan secara maksimal, sehingga perlu upaya lebih maksimal dalam kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi 5M melalui media KIE covid 19 di NTB
3. Penyebarluasan informasi kesehatan khususnya yang berkenaan dengan perkembangan kasus, penanganan dan standar-satandar pelayanan pada masa pandemic serta pembagian masker kesehatan

Adapun capaian pelayanan yang dilaksanakan pada unit-unit pelaksana teknis daerah di Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019 antara lain:

1) Rumah Sakit Mata NTB

Capaian indikator kinerja bidang kesehatan pada Rumah Sakit Mata NTB tahun 2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-33 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2020

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN		
			2018	2019	2020
1.	Sterilisasi kultur peralatan medis dan ruangan	Kali	2	2	2
2.	Cakupan <i>screening</i> penyakit mata	Orang	2.500	1.500	2.2975
3.	Cakupan operasi katarak	Orang	1.009	1.251	1.179
4.	Cakupan kunjungan	Orang	28.246	24.826	22.975
5.	Cakupan Operasi pterygium dan operasi lainnya	Orang	266	420	248

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja Rumah Sakit Mata NTB pada tahun 2020 untuk indikator cakupan screening penyakit mata dan cakupan kunjungan, mengalami

penurunan. Sementara indikator cakupan operasi katarak, serta cakupan operasi pterygium dan operasi lainnya meningkat pada tahun 2020.

2) Balai Laboratorium Kesehatan Kalibrasi dan Penunjang Medis (BLKKPM)

Kunjungan pasien ke BLKKPM pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.536 orang, terus mengalami peningkatan dan adanya perbaikan serta peningkatan pelayanan. Meningkatnya jumlah kunjungan tersebut disebabkan tingginya peran bersama petugas dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tingginya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium dan mengharuskan masyarakat yang melakukan perjalanan untuk melakukan uji tes laboratorium untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta pada situasi pandemic covid 19. Untuk Pemeriksaan Medis, Pelayanan radiologi, dan Pelayanan Kalibrasi Alat jumlah yang dapat dilayani oleh BLKKPM terus mengalami peningkatan. Capaian indikator kinerja program pada BLKKPM Tahun 2018-2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-34 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN			
			2018	2019	2020	
			REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Kunjungan pasien	Orang	2.983	4.101	4.511	4.536
2.	Pemeriksaan Medis	Orang	1.458	3.420	3.762	659
3.	Pelayanan radiologi	Orang	80	216	238	623
4.	Pelayanan Kalibrasi Alat	Unit	592	1.752	1.925	1.645

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2020

Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BLKKPM pada periode Tahun 2018-2020, dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2-35 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2018-2020

NO	BIDANG PEMERIKSAAN	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN			
			2018	2019	2020	
					TARGET	REALISASI
1.	Hematologi	Parameter	2.829		3.112	3.909
2.	Kimia Klinik	Parameter	12.215		13.437	12.441
3.	Mikrobiologi	Parameter	5.576		2.769	2.451
4.	Imunoserologi	Parameter	3.513		3.864	12.309
5.	Toksikologi	Parameter	1.245		1.370	3.254
6.	Kimia Kesehatan	Parameter	7.863	12.293	13.525	12.950
7.	Pengabdian Masyarakat	Parameter		771		
8.	Pemeriksaan Mobil Keliling	Parameter			2.450	682
9.	Media Reageb		31.706	547.190		

NO	BIDANG PEMERIKSAAN	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN			
			2018	2019	2020	
					TARGET	REALISASI
10.	Sampling		2.492	3.341		
Jumlah			58.738	588.973		

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

3) Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES)

Pelaksanaan Pelatihan oleh BAPELKES bekerjasama dengan Badan Pusat Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK), Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, BBPK Ciloto, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB dengan menyiapkan Fasilitator, Narasumber dan Master of Trainer. Sedangkan OPD/lembaga donor/LSM yang menggunakan tempat/ruang pertemuan di BAPELKES antara lain RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah kegiatan pelatihan dan non pelatihan di BAPELKES, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-36 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di BAPELKES Tahun 2018-2020

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					
		PEMERINTAH			NON PEMERINTAH		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Pelatihan	4	37	3	2	4	3
2.	Pertemuan (Non Pelatihan)	2	0	1	0	0	1
JUMLAH		6	37	4	2	4	4

Sumber: Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2019

Kegiatan pelatihan pada tahun 2020 lebih banyak dilakukan di lingkungan BAPELKES Provinsi NTB, namun untuk praktek lapangan BAPELKES Provinsi NTB bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram serta Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi ketiga “NTB Sehat dan Cerdas”. Keberhasilan pembangunan bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Daerah Provinsi NTB diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH) dan Status Akreditasi Rumah Sakit. Adapun capaian indikator kinerja tersebut 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-37 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan di RSUD Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,07	66,28	66,48	66,51
2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber: BPS NTB, RSUD Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Angka Harapan Hidup NTB tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019. Pencapaian ini bukanlah semata kinerja dari RSUD Provinsi NTB saja melainkan merupakan akumulasi kinerja dari berbagai sector. Berbagai pelayanan yang bersifat kuratif dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB untuk berkontribusi dalam meningkatkan AHH NTB.

Kualitas layanan RSUD Provinsi NTB kepada masyarakat diukur dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Untuk itu pada bulan Februari 2020 RSUD Provinsi NTB kembali melaksanakan re-assesment akreditasi RS versi 2012 yang dilakukan oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Hasil re-assessment akreditasi RS tersebut yaitu RSUD Provinsi NTB mampu mempertahankan predikat PARIPURNA seperti tahun 2019 yang lalu.

Pencapaian indikator bidang urusan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) diperoleh melalui pelaksanaan 5 (lima) program pokok dan 7 (tujuh) kegiatan.

Penyelenggaraan bidang urusan Kesehatan oleh RSUD Daerah Provinsi NTB tahun 2020 adalah melakukan pelayanan meliputi: pelayanan administrasi manajemen, rawat inap, rawat jalan, rekam medis, farmasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keperawatan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Perinatal Resiko Tinggi, IGD, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Radiologi, gizi, pelayanan intensif, pelayanan darah, dan Pelayanan pasien Covid-19. Dalam rangka peningkatan pelayanan, RSUDP Tahun 2020 telah membangun Gedung Trauma Center dan Covid-19.

Sesuai dengan tusunya, RSUD Daerah Provinsi NTB melakukan pelayanan medis baik mencakup rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. Cakupan layanan medis berdasarkan cara pembayaran di RSUD Provinsi NTB tahun 2018-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-38 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO.	CARA PEMBAYARAN	2018				2019				2020			
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH
1.	Askes (Non PBI)	79.120	8.600	7.367	95.087	81.511	9.842	7.042	98.395	53524	6476	4324	64324
2.	Umum	15.667	1.338	4.896	21.901	18.292	1.483	5.048	24.823	10374	842	2867	14083

NO.	CARA PEMBAYARAN	2018				2019				2020			
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	IGD	JUMLAH
3.	Jamkesmas (PBI)	35.743	6.366	4.712	46.821	39.048	6.637	4.555	50.240	30786	4627	3028	38441
4.	Asuransi Lain	315	427	198	940	2.090	714	380	3.184	1226	2103	1404	4733
5.	Dana Bencana Alam (DBA)	262	302	481	1.045	150	47	0	197	12	0	0	12
Jumlah		125.312	131.107	17.033	17.654	141.091	18.723	17.025	176.839	95.922	14.048	11.623	121.593

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel diatas, tahun 2020, terjadi penurunan kunjungan pasien sebanyak 55.246 pasien, baik rawat jalan, rawat inap dan IGD, menjadi sebanyak 121.593 pasien, dibanding dengan tahun 2019, hal ini sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19. Pengembangan pelayanan dan upaya peningkatan pelayanan secara optimal di RSUD Provinsi NTB terus berusaha ditingkatkan, terutama setelah terjadinya pandemi Covid-19 tahun 2020 antara lain: merubah fungsi ruang perawatan pasien untuk Ruang Isolasi pasien Covid-19 (Ruang Sendang Gile, Gili Trawangan, Otak Kokok dan Ruang Isolasi IGD) dan membangun Gedung Covid-19 dan Trauma Centre.

RSUD Provinsi NTB memiliki layanan unggulan yaitu layanan Radioterapi dan Kemoterapi terpadu. Layanan Radioterapi dan Kemoterapi terpadu merupakan layanan yang diperuntukkan bagi pengobatan yang dikhususkan bagi pasien kanker. Adapun layanan untuk radioterapi di tahun 2020 sebanyak 3.397 dengan jumlah tindakan radiasi sebanyak 9.284.

Tahun 2020, ada 3 (tiga) jenis penyakit yang paling banyak dirawat di instalasi rawat jalan yaitu Calculus of kidney, Malignant neoplasm of Breast, unspecified dan Epilepsy, unspecified. Di tahun 2020 penyakit Calculus of kidney menjadi urutan pertama dalam 10 kasus terbanyak. Ditahun 2019, penyakit Calculus of kidney merupakan kasus terbanyak nomor 4 dari 10 penyakit terbanyak. Penyakit terbanyak kedua adalah Malignant neoplasm of Breast. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, Penyakit Malignant neoplasm of Breast ditahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kasus baru sebanyak 3.273 kasus (38,56%). Jumlah kasus baru Malignant neoplasm of Breast tahun 2020 sebanyak 187 kasus baru dan jumlah kunjungan sebanyak 8.489 kunjungan. Kasus ketiga terbanyak Rawat Jalan tahun 2020 adalah Epilepsi, unspecified dengan jumlah kasus baru 165 kasus dan jumlah kunjungan sebanyak 1.739. Bila dibandingkan dengan tahun 2019, kasus Epilepsi, unspecified merupakan kasus nomor urut 5 dari 10 besar kasus terbanyak Rawat Jalan. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat jalan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-39 Sepuluh (10) Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

NO	ICD	DIAGNOSA	KASUS BARU		JUMLAH KASUS BARU	JUMLAH KUNJUNGAN
			L	P		
1	N20.0	Calculus of kidney	141	72	213	1050
2	C50.9	Malignant neoplasm of Breast, unspecified	0	187	187	8489
3	G40.9	Epilepsy, unspecified	92	73	165	1739
4	I25.1	Atherosclerotic heart disease	88	37	125	3879
5	N40	Hyperplasia of prostate	111	0	111	846
6	M54.5	Low back pain	58	51	109	1083
7	N20.1	Calculus of ureter	69	35	104	541
8	D24	Benign neoplasm of breast	0	98	98	403
9	D21.0	Benign neoplasm of Connective and other soft tissue of head, face and neck	55	31	86	433
10	H65.2	Chronic serous otitis media	50	35	85	515

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Pada pelayanan di instalasi rawat inap, ada 3 (tiga) penyakit paling banyak yang dirawat tahun 2020 yaitu malignant neoplasm of breast_unspecified, Coronavirus infection, unspecified, Chronic kidney disease, stage 5. Jumlah kasus malignant neoplasm of breast_unspecified pada Tahun 2020 sebanyak 2.221 kasus tetapi terjadi penurunan sebesar 187 kasus (8,41%). Penyakit yang terbanyak kedua adalah Coronavirus infection sebanyak 837 kasus, dan penyakit ketiga terbanyak adalah Chronic kidney disease, stage 5 dengan jumlah pasien 642 pasien meningkat 122 pasien dibandingkan tahun 2019 (520 pasien). Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat inap tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2-40 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

NO URUT	DIAGNOSA		PASIE KELUAR HIDUP		PASIE KELUAR MATI		TOTAL
	KODE	NAMA PENYAKIT	L	P	L	P	
1	C50.9	Malignant neoplasm of Breast, unspecified	0	2171	0	50	2221
2	B34.2	Coronavirus infection, unspecified	439	358	20	20	837
3	N18.5	Chronic kidney disease, stage 5	298	256	55	33	642
4	D64.9	Anaemia, unspecified	248	248	59	42	597
5	J18.9	Pneumonia, unspecified	200	170	57	57	484
6	D63.0	Anaemia in neoplastic disease (C00-D48+)	104	223	15	25	367
7	I50.0	Congestive heart failure	161	106	34	23	324
8	C11.9	Malignant neoplasm of Nasopharynx, unspecified	250	64	6	2	322
9	C20	Malignant neoplasm of rectum	191	113	4	5	313
10	D63.8	Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere	157	122	16	12	307

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Tahun 2020, ada 3 (tiga) penyakit terbanyak pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, yaitu Fever-*unspecified*, Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis, Open wound of *unspecified body region*. Kunjungan karena penyakit Fever- *unspecified* tahun 2020 sebanyak 233 kunjungan dengan jumlah kasus sebanyak 107 kasus. Penyakit kedua terbanyak adalah Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis, dengan jumlah kunjungan sebanyak 224 kunjungan dan jumlah kasus baru sebanyak 85 kasus, dibandingkan tahun 2019 terjadi penurunan 133 kasus dengan jumlah kunjungan 351 kunjungan dan merupakan kasus terbanyak ke-3 pada tahun 2019. Penyakit ketiga terbanyak adalah Open wound of *unspecified body region* sebanyak 77 kasus dengan jumlah kunjungan sebanyak 93 kunjungan, bila dibandingkan dengan tahun 2019 Open wound of *unspecified body region* merupakan kasus terbanyak ke-2 dengan jumlah kasus sebanyak 232 kasus, dan jumlah kunjungan sebanyak 261 kunjungan. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat Darurat tahun 2020 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2-41 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2020

NO	ICD	DIAGNOSA	KASUS BARU		JUMLAH KASUS BARU	JUMLAH KUNJUNGAN
			L	P		
1	R50.9	Fever, <i>unspecified</i>	60	47	107	233
2	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	42	43	85	224
3	T14.1	Open wound of <i>unspecified body region</i>	55	22	77	93
4	J06.9	Acute upper respiratory infection, <i>unspecified</i>	37	33	70	137
5	K52.9	Noninfective gastroenteritis and colitis, <i>unspecified</i>	36	28	64	165
6	R10.4	Other and <i>unspecified abdominal pain</i>	31	31	62	188
7	T14.0	Superficial injury of <i>unspecified body region</i>	34	20	54	69
8	K30	Dyspepsia	27	27	54	137
9	J20.9	Acute bronchitis, <i>unspecified</i>	30	22	52	84
10	I10	Essential (primary) hypertension	23	17	40	129

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Melalui dana DAK dan DBHCHT, RSUD Provinsi NTB tahun 2020 membeli alat kebutuhan instalasi/unit sehingga total pengadaan alat yang dibeli sebanyak 396 unit. Tahun 2020 RSU Daerah Provinsi NTB mendapatkan Dana BTT yang digunakan untuk Penanggulangan Covid-19 yang diperuntukkan untuk Pembuatan Ruang Isolasi, Alat Kesehatan, Alat Kesehatan dan Reagen PCR, Unit Sumbawa Technopark, APD, Pengadaan CCTV, Rapid Test, VTM (Viral Transport Media), Linen, uang lelah, Extra Fooding, Desinfektasi Sarana Umum, Sarana dan prasarana, perbaikan Ruang Isolasi, Ruang operasi bertekanan negative, Pengadaan vitamin/suplemen, Peti jenazah, pembuatan ruang isolasi bertekanan

negative, media informasi dan promosi/edukasi, bahan habis pakai, alat komunikasi dan Rehab ruang pemeriksaan sampel.

Tahun 2020 dilaksanakan juga kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, SDM RSUD Provinsi NTB yang menempuh studi dengan menggunakan dana BLUD dan dana Kementerian Kesehatan RI dan subsidi sebanyak 34 orang. Sementara untuk kegiatan pelatihan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pelatihan baik berupa pelatihan lebih dari 20 jam pelatihan maupun pelatihan yang kurang dari 20 jam (berupa workshop, symposium dan lain-lain). Adapun SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan yang lebih dari 20 jam pelatihan sebanyak 150 orang, SDM yang mengikuti pelatihan di unit khusus sebanyak 204 orang, namun pelaksanaan pelatihan untuk unit khusus yang dilakukan diluar daerah tertunda karena kasus pandemic Covid-19 tahun 2020.

Sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik pada co-assisten melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sampai bulan Desember 2020 sebanyak 148 orang dan pelayanan kegiatan praktik siswa/mahasiswa non kedokteran sebanyak 175 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Ners) di wilayah Provinsi NTB (UNU 6 orang, Universitas Samawa 22 orang, Polteks 119 orang, Universitas Kamarul Huda Badarudin Bagu 28 orang), dan luar Provinsi NTB. Pada tahun 2020 RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan On Job Training/magang belajar dari luar Provinsi NTB antara lain Akademi Teknik (Atro Bali) 6 orang, UII Yogyakarta 2 orang, FKM Ahmad Dahlan Yogyakarta 4 orang FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta 4 orang dan RSUD Taman Husada Bontang Kaltim 7 orang.

Selama kurun waktu 2020 RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan 3 (tiga) Kerja Sama Operasional (KSO) di bidang pendidikan, antara lain dengan: UNRAM, Stikes Hamzar, Fakultas Ilmu Kesehatan UNU Mataram, Akper Samawa, Universitas Qamarul Huda Badarudin Bagu Loteng. Untuk lebih meningkatkan kemampuan SDM yang memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Provinsi NTB telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo sebagai sister Hospital (RS Kemitraan) di bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. Tabel dibawah ini merupakan tabel kerjasama RSUD Provinsi NTB di bidang Pendidikan tahun 2020.

Tabel 2-42 Kerjasama RSUD Provinsi NTB Di Bidang Pendidikan Tahun 2020

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
1	Fakultas Kesehatan Universitas Samawa Sumbawa Besar	No. 065/5582/RSUDP/2019; No. 065/FK-UNSA/C.06,03/2019	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Samawa Sumbawa Besar di RSUD Prov. NTB	Pendidikan	2 (dua) tahun	2 Januari 2020 s/d 1 Januari 2022
2	Rumah Sakit Bhayangkara Mataram Dan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram	No. 065/22/RSUDP/2020; No. B/2/1/2020/Rumkit; No. 229/UN18.F7/KS/2020	Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, penelitian, Pelayanan Kesehatan Dan pengabdian masyarakat Di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram	Pendidikan	3 (tiga) tahun	16 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong Dan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram	No. 065/21/RSUDP/2020; No. 445/19.1/RSUD/2020; No. 219/UN18.F7/KS/2020	Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan, penelitian, Pelayanan Kesehatan Dan pengabdian masyarakat Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong	Pendidikan	3 (tiga) tahun	14 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Selain bekerjasama dengan dokter paruh waktu di Universitas Mataram, RSUD Provinsi NTB juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan canggih yang dibutuhkan seperti pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium, dan penyediaan gasmedik, kefarmasian dan lain-lain. Tabel dibawah ini merupakan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pelayanan penunjang.

Tabel 2-43 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Penunjang Tahun 2020

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
1	PT. SABA INDOMEDIA	No. 065/12/RSUDP/2020	Penempatan Alat Hematology Analyzer Sysmex Type XS-800i Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang pelayanan Lab	1 (satu) tahun	2 Januari 2020 s/d 1 Januari 2021

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
2	PT. RIZKI EDUCALAB	No. 065/433/RSUDP/2020; No. 030/RE/MOU/II/2020	Penempatan 5 (lima) Unit Alat Label TSC Type TDP-225W Di Instalasi Farmasi RSUD Prov. NTB	Bidang Farmasi	1 (satu) tahun	5 februari 2020 s/d 4 februari 2021
3	PT. ALEXA MEDIKA	No. 065/336/RSUDP/2020; No. 008/AM-MTR/I/2020	Pengadaan Alat kesehatan Habis Pakai	Pelayanan/Farmasi	1 (satu) tahun	1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2021
4	PT. RIDHO ILAHI FARMA	No. 065/208/RSUDP/2020; No. S-022/RIF/I/2020	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrument Pemasangan Alat (Bedah Syaraf, Bedah Urologi, Mata dan Gigi, Bedah, THT, NICU) Pada Pasien BPJS Kesehatan Atau Ketenagakerjaan	Bidang Farmasi	1 (satu) tahun	27 Januari 2020 s/d 26 Januari 2021
5	PT. SINAR RODA UTAMA	No. 065/5949/RSUDP/2019; No. 457/SRU/ADD-1/XI/2019	Addendum I Pelayanan Pasien Haemodialisa (HD) Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Haemodialisa	5 (lima) tahun	28 November 2019 s/d 27 Nov 2024
6	PT. NUSA TRIUTAMA	No. 065/1414/RSUDP/2020; No. S-0478/NTU/IV/2020	Penempatan 1 (satu) Alat Kimia Autoanalyzer Erba Type XL200 Untuk Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov NTB	Bidang LAB	2 (dua) tahun	1 Mei 2020 s/d 30 April 2022
7	PT. ENSEVAL MEDIKA PRIMA	No. 065/1024/RSUDP/2020; No. 046?EMP.KSO-HOSLAB/III-2020	Penempatan Alat Immunology Analyzer Mini Vidas Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov. NTB	Bidang LAB	2 (dua) tahun	2 Februari 2020 s/d 1 Februari 2022
8	PT. CIPTA HUSADA MANDIRI	No. 065/1200/RSUDP/2020; No. 016/PK/CHM-NTB/2020	Penyediaan Alat/ Bahan medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab (Intervensi Kardiologi) Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Cathlab	1 (satu) tahun	1 April 2020 s/d 31 Maret 2021
9	PT. RIZKI EDUCALAB	No. 065/62/RSUDP/2020; No. 023/RE/MOU/I/2020	Penyediaan Alat Habis Pakai Di Instalasi Radiologi RSUD Prov. NTB	Radiologi	1 (satu) tahun	1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2021
10	PT. RIZKI EDUCALAB	No. 065/7798/RSUDP/2020; No. 038/III/PT RE/2020	Penyediaan Alat Habis Pakai Di Instalasi Radio terapi RSUD Prov. NTB	Radioterapi	1 (satu) tahun	6 maret 2020 s/d 5 Maret 2021
11	PT. KARUNIA ABADI INDONESIA	No. 065/361/RSUDP/2020; No. 197/1001/KAI-MTR/2020	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrument pemasangan Alat Pada Pasien BPJS Kesehatan Dan Ketenagakerjaan	Bidang Tulang	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
12	PT. FIRSHA RANA AZZAM MEDIKA	No. 065/2182/RSUDP/2020; No. 0811/MOU/PTFRAME/2020	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Implant Dan Instrument Orthopaedics Di RSUD Prov. NTB	Orthopaedi	1 (satu) tahun	1 April 2020 s/d 31 Maret 2021
13	PT. TRINUSA DARMA SATHA	No. 065/2580/RSUDP/2020; No. 002/TDS/PKS/VII/2020	Penyediaan produk/ Alat medis Habis Pakai (AMHP) Bedah Syaraf Dan Orthopedi Di RSUD Provinsi NTB	Orthopaedi	2 (dua) tahun	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2022
14	PT. DHARMA ASTITI	No. 065/3153/RSUDP/2020; No: 09/DA/IX/2020	Penyediaan Alat / Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUD Provinsi NTB	Cathlab	1 (satu) tahun	27 September 2020 s/d 26 Sept 2021

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
15	PT. REKAMILENIUMINDO SELARAS	No. 065/3442/RSUDP/2020; No. 0044/RS/PKS/IX/2020	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Untuk Layanan Cathlab Pada RSUD Provinsi NTB	Cathlab	2 (dua) tahun	4 September 2020 s/d 3 Sept 2022
16	PT. PELITA SANTOSO JAYA	No. 065/3441/RSUDP/2020; No. 166/PSJ/PKS. INDIKOPLUS/IX/2020	Penempatan 1 9satu) alat Autoanalyzer Kimia Klinik Chemistry System Indiko Plus Di Instalasi laboratorium Klinik RSUD prov. NTB	Lab	2 (dua) tahun	1 Agustus 2020 s/d 31 Juli 2022
17	PT. WIN INDOPERKASA NUSANTARA	No. 065/3154/RSUDP/2020; No. WIN 2020-NTB-0023	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUD Provinsi NTB	Cathlab	1 (satu) tahun	28 oktober 2020 s/d 27 oktober 2021
18	PT. NUSA TRIUTAMA	No. 065/3818/RSUDP/2020; No. S-0921A/NTU/VIII/2020	Penyediaan reagen untuk alat Immunology Analyzer Architect i1000SR Abbott Pada RSUD Prov NTB	Lab	1 (satu) tahun	24 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2021
19	PT RIZKI EDUCALAB	No. 065/3976/RSUDP/2020; No. 016/RE/MOU/XI/2020	Penempatan 1 unit Alat Electrolyte Analyzer I Sens I Smart 30 Pro Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov NTB	Lab	2 (dua) tahun	1 September 2020 s/d 31 Agustus 2022
20	PT SABA INDOMEDIKA	No. 065/4040/RSUDP/2020; No. 10736/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-800i/XI/2020	Penempatan Alat Hematology Analyzer Sysmex Type XS-800i Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov. NTB	Lab	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
21	PT. NUSA TRIUTAMA	No. 065/50/RSUDP/2020/ No. S-001A/NTU/I/2020	Penempatan 1 (satu) Unit Alat Clinical Chemistry Analyzer Type Architect C4000 (Abbott) Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov NTB	Lab	5 (lima) tahun	3 November 2020 s/d 2 November 2025

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Tabel 2-44 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2020

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
1	PT. Asuransi Jiwa INHEALTH Indonesia	No. 4/AJII/KOP-DPS/KTR/1219; No. 065/5856/RSUDP/2019	Pelayanan Kesehatan Dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Bidang Pelayanan	2 (dua) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
2	Dinas Kesehatan Kota Bima	No. 440/27.a/DIKES/I/2020; No. 065/1099/RSUDP/2020	Program Pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2020	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	No. 800/257/DIKES/I/2020; No. 065/411/RSUDP/2020	Program Pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
4	Paguyuban Juang Kencana	No. 065/5948/RSUDP/2019; No. 03/PJK/Prov/II/2020	Pelaksanaan Edukasi Pasien Geriatri Di RSUD Prov. NTB	Geriatri	2 (dua) tahun	22 Agustus 2019 s/d 21 Agustus 2021

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
5	Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI)	No. 065/5840/RSUDP/2020; No. 002/PKS-UDD-PMI/LB/I/2020	Pelayanan Darah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prov. NTB	Bidang Pelayanan Bank Darah	2 (dua) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
6	Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram	No. 03/Y.I/B-4/II/2020; No. 065/780/RSUDP/2020	Rujukan Pasien Dari Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram Ke RSUD Prov NTB	Bidang Pelayanan	2 (dua) tahun	29 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
7	Rumah Sakit H.L MANAMBAI ABDULKADIR	No. 120,23/92,a/UMPEG-RSMA/I/2020; No. 065/969/RSUDP/2020	SISTER HOSPITAL	Bidang Pelayanan	3 (tiga) tahun	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2023
8	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	No. 443,24/94/P3KL/I/2020; No. 065/1338/RSUDP/2020	Pelayanan Kesehatan Pasien TB MDR Di RSUD PROV.NTB	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
9	Rumah Sakit Risa Sentra Medika	No. 010.PKS/MRK/PTRSM/II/2020	Pelayanan laboratorium Patologi Anatomi	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	24 Februari 2020 s/d 23 Februari 2021
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat	No. 442.3/126.1/KESMAS/III/2020; No. 065/1098/RSUDP/2020	Pelayanan Persalinan Bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir (Masyarakat Miskin Yang Tidak memiliki Jaminan Kesehatan) Tahun 2020	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
11	Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima	No. 04/MOU/RSPKUM/J/I/2020; No. 065/106/RSUDP/2020	Rujukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Bidang Pelayanan	2 (dua) tahun	15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2022
12	Rumah Sakit Biomedika Mataram	No. 029/PKS/DIR-UM/RSB/I/2020; No. 065/107/RSUDP/2020	Rujukan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Bidang Pelayanan	2 (dua) tahun	6 Januari 2020 s/d 5 Januari 2022
13	CV Fatahillah 354	No. 065/29/RSUDP/2020; No. 01/FAT.354/I/2020	Pembuatan Slide Dari Seluruh Sediaan Hasil Operasi Di RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 (sudah pemutusan PKS)
14	Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia Chapter NTB	NO. 065/205/RSUDP/2020; NO. 003/I/KK-CHT/2020	Pelayanan Hipnoterapi	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
15	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)	No. 355/SURVEI-REG/KARS/II/2020; No. 065/295/RSUDP/2020	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi	1 (satu) minggu	18 Februari 2020 s/d 22 Februari 2020
16	Pemerintah Kabupaten LOMBOK TIMUR	No. 065/970/RSUDP/2020; No. 800/598/KES/2020	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Dibantu Pembiayaannya Oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020	Pelayanan Bansos	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 desember 2020
17	Pemerintah Kabupaten LOMBOK UTARA	No. 1580.01/01/DIKES-KLU/XII/2019; No. 065/5952/RSUDP/2019	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Program Kartu KLU Sehat Diluar Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020	Pelayanan Bansos	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 desember 2020
18	DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM	No. 440/1824/KES/VI/2020; No. 065/2510/RSUDP/2020	Program Pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Kota Mataram	Pelayanan Jampersal	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 desember 2020

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
19	Dinas Kesehatan Kabupaten SUMBAWA BARAT	No. 033/DIKES/VII/2020; No. 065/2299/RSUDP/2020	Sistem pelayanan Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2020	Pelayanan Jampersal	1 (satu) tahun	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
20	Rumah Sakit Islam YATOFA	127/026/RSIY/0.1/IV/2020; No. 065/2183/RSUDP/2020	RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN	Pelayanan	2 (dua) tahun	17 Maret 2020 s/d 17 Maret 2022
21	PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA	No. 12.5/AJII/KOP-DPS/PKS/0820; No. 065/2931/RSUDP/2020	Pelayanan kesehatan Bagi Peserta Indemnity PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Pelayanan	2 (dua) tahun	1 September 2020 s/d 31 Agustus 2022
22	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. LOMBOK TENGAH	NO. 689.1/RT.01.1-SPj/Sek-Kab/5202/IX/2020; No. 065/3224/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
23	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. LOMBOK UTARA	No. 275/SDM.07.1-SPj/Sek-Kab/IX/2020; No. 065/3225/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
24	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. BIMA	No. 481.a/PL.02.2-NK/5206/KPU-Kab/VIII/2020; No. 065/3226/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati BIMA Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
25	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. SUMBAWA	No. 12/RT.01.2-SPK/5204/Sek-Kab/PPK/IX/2020; No. 065/3228/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati SUMBAWA Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
26	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. DOMPU	No. 16/ SPK/KPU.DPU/IX/2020; No. 065/3227/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati DOMPU Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
27	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. SUMBAWA BARAT	No. 85/RT.01.1-SPK/5207/Sek-Kab/IX/2020; No. 065/3229/RSUDP/2020	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati SUMBAWA BARAT Tahun 2020	Pelayanan		4 September 2020 sampai selesai
28	BIDDOKKES POLDA NTB dan Rumah Sakit Bhayangkara Mataram	No. B/41/X/2020/Biddokkes; No. B/83/X/2020/Rumkit/No. 065/3732/RSUDP/2020	Penanganan PenyakitKronis Dan Menahun Pegawai Negeri Pada POLRI	Pelayanan	2 (dua) tahun	7 oktober 2020 s/d 7 Oktober 2022
29	Dinas Kesehatan Prov. NTB dan SUMBAWA TECHNOPARK	No. 445/31/Yankes/X/2020; No. 065/3755/RSUDP/2020; No. 035/PKS/SBWTP/IV/2020	Pelaksanaan Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) Covid19	Pelayanan	2 (dua) bulan	15 oktober 2020 s/d 31 desember 2020

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
30	Pemerintah Kabupaten SUMBAWA BARAT	No. 045.2/043/DIKES/X/2020; No. 065/3800/RSUDP/2020	Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut Pra Integrasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020	Pelayanan	4(empat) bulan	4 September 2020 s/d 31 Desember 2020
31	BPJS KESEHATAN	No. 269/KTR/XI-03/1219; No. 058/4410/RSUDP/2019	Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan	Pelayanan	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
32	BPJS KETENAGAKERJAAN KACAB NTB	No. PER/15/012020; No. 065/210/RSUDP/2020	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Pelayanan	2 (dua) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM	No. 445/2708/RSUD/XI/2020; No. 065/4398/RSUDP/2020	Pelayanan Rujukan Pasien Dan Pelayanan penunjang Medis	Pelayanan	1 (satu) tahun	23 November 2020 s/d 23 November 2021
34	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	No. 800/120/KES/2020; No. 065/4284/RSUDP/2020	Program Pelayanan jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	Pelayanan Jampersal	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
35	PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH	No. 065/779/RSUD Prov.NTB/2020	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Quota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat, Jaminan kesehatan Nasional NTB Dan Jaminan Kesehatan nasional Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Bersumber Dari Dana Bantuan Sosial (Bansos) Bidang Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020	Pelayanan Bansos	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
36	YAYASAN KESEHATAN PEGAWAI TELKOM	No. 207/HK.630/Yakes-053/2020; No. 065/3951/RSUDP/2020	Pelayanan kesehatan Dan Perawatan Bagi Peserta	Asuransi telkom	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Tabel 2-45 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Jasa Tahun 2020

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
1	PT KONE Indo Elevator	No. 065/68/RSUDP/2020; 40157058	Kontrak Service Maintenance Lift Merk "KONE" Pada RSUD Prov NTB	Bidang pelayanan Lift	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
2	PT JAYA KENCANA	No. 065/5545/RSUDP/2020; 4124/JK/K/ELEV/I/2020	Kontrak Service Maintenance Lift Merk "SIGMA" Pada RSUD Prov NTB	Bidang pelayanan Lift	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
3	UD DINI TEKNIK	NO. 065/10/RSUDP/2020; 0001/SPKK/DT/I/2020	Kontrak Service Maintenance AC Pada RSUD Prov NTB	Bidang pelayanan AC	3 (tiga) bulan	2 Januari 2020 s/d 1 April 2020

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
4	PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA)	NO. 065/5839/RSUDP/2020; 0031/KS/MKT/PRIA-RSUDNTB/B3/I/2020	Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	Bidang Pelayanan Limbah	1 (satu) tahun	2 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
5	PT. Cakra Samawa Sakti-CSS 251	No. 065/01/RSUDP/2020;20/CSS 251-RSUDP/I/2020	Pelayanan Jasa Satpam Front Liner di RSUD Prov. NTB	Bidang pelayanan satpam	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
6	PT Raka Sandy Onecarindo (Onecarew Partner)	No. 008/Onecare/II/2020; No. 065/574/RSUDP/2020	Penyediaan Jasa Administrasi Medis, Evakuasi Medis Dan Klaim Asuransi	Asuransi	2 (dua) tahun	13 Februari 2020 s/d 14 Februari 2022
7	Balai Laboraturum Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi	No. 065/1033/RSUDP/2020; No. 143.3/02/Blkpk/2020	Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada RSUD Prov. NTB	Bidang IKL	2 (dua) tahun	1 Februari 2020 s/d 31 Januari 2022
8	CV. PEDULI LINGKUNGAN	No. 065/602/RSUDP/2020	Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Pada RSUD Prov. NTB	Bidang IKL	1 (satu) Tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
9	PT. ANEKA MIDEKA INDONESIA (AMI)	No. 065/887/RSUDP/2020; No. LH/200281/III/DIR/EK/TAS	Kontrak Service Value Alat MRI Achieva 1,5 T Philips Pada RSUD Prov. NTB	Bidang pelayanan MRI	1 (satu) tahun	16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2021
10	PT. ANEKA MIDEKA INDONESIA (AMI)	No. 065/888/RSUDP/2020; No. LH/200282/III/DIR/EK/TAS	Kontrak Service Primary Alat Philips CT Scan Ingenuity 128 Pada RSUD Prov. NTB	Bidang pelayanan MRI	1 (satu) tahun	16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2021
11	PT. Galih Pusaka Rinjani	No. 065/1056/RSUDP/2020; No. 067,8/PKS.CS.PTGPR/III/2020	Addendum KEDUA Pelayanan Jasa Cleaning Service Pada BLOK A/BLOK I/ GAZEBO dan RUMAH SINGGAH di RSUD Prov. NTB	Bidang IKL	1 (satu) bulan	1 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020
12	PT. Galih Pusaka Rinjani	No. 065/1323/RSUDP/2020; No. 067.9/PKSCS/PTGPR/IV/2020	Pelayanan Jasa Cleaning Service Pada BLOK A/BLOK I/ GAZEBO dan RUMAH SINGGAH di RSUD Prov. NTB	Bidang IKL	9 (sembilan) bulan (naik 10%)	1 April 2020 s/d 31 Desember 2020
13	PT. Sakra Jaya Utama	No. 065/1322/RSUDP/2020; No. 008/PKS-CS/SJU/IV/2020	Pelayanan Jasa Cleaning Service Pada BLOK B/BLOK II di RSUD Prov. NTB	Bidang IKL	9 (sembilan) bulan (naik 10%)	1 April 2020 s/d 31 Desember 2020
14	Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi Dan Lingkungan	No. S-610/JKRL/IV/2020; 065/1229/RSUDP/2020	Evaluasi TLD BARC Beta Gamma	Bidang Radioterapi	1 (satu) tahun	Mei 2020 s/d April 2021
15	PT. MURTI INDAH SENTOSA	No. 065/63/RSUDP/2020; No. 001/MIS/MTNC/I/2020	Kontrak Service maintenance Pesawat Linac Type Clinac CX Merk Varian USA Pada RSUD Prov. NTB	Bidang IPSRS	5 (lima) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2024
16	Aruna Senggigi Resort & Convention	No. 065/2032/RSUDP/2020; No. 001/MOU/ASRC/2020	Paket Layanan Kamar Isolasi mandiri Bagi Tenaga Kesehatan	Bidang Pelayanan Covid19		
17	PT. MULYA HUSADA JAYA	No. 065/16/RSUDP/2020; No. 002/KS/MHJ-LGL/I/2020	Kontrak Service Silver Alat Cathlab Pada RSUD Prov. NTB	IPSRS	1 (satu) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
18	Koperasi Keselamatan Radiasi Dan	065/211/RSUDP/2020; No. S-390/JKRL/II/2020	Evaluasi TLD BARC BETA GAMMA	Radiologi ESWL	1 (satu) tahun	Maret 2020 s/d Februari 2021

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
	Lingkungan (ESWL)					
19	PT. GALIH PUSAKA RINJANI	No. 065/3064/RSUDP/2020; No. 068.1/ADD/PKSCS/PRGPR/VIII/2020	ADDENDUM PERTAMA Pelayanan Jasa Cleaning service Pada Blok A/Blok I, GAZEBO Dan Rumah Singgah Serta Pengawasan Dan Bahan Habis Pakai Kebersihan Gedung Layanan Covid19 Dan Trauma Center RSUD Prov. NTB	IKL	3 (tiga) bulan	1 September 2020 s/d 31 desember 2020
20	PT. GALIH PUSAKA RINJANI	No. 065/2717/RSUDP/2020; No. 073.7/PKS-CS/PTGPR/VI/2020	Pelayanan Jasa Cleaning Service Pada Blok C/Blok 3 Dan pemeliharaan Taman Di RSUD Prov NTB	IKL	1 (satu) tahun	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2021
21	PT. CAKRA SAMAWA SAKTI-CSS 251	No. 065/3067/RSUDP/2020; No. 21/CSS 251-RSUDP/VIII/2020	ADDENDUM PERTAMA Pelayanan jasa satpam Front Liner serta Gedung Layanan Covid19 Dan Trauma center Di RSUD prov. NTB	PKRS	4 (empat) bulan	15 agustus 2020 s/d 31 desember 2020
22	PT. DIAN JAYA BARU	No. 065/3373/RSUDP/2020; No. 165/DJB/KSO/LIS/VII/2020	Laboratory Information System (LIS) Softmedix Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Provinsi NTB	Service Lab	3 (tiga) tahun	1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2023
23	PT. MURTI INDAH SENTOSA	No. 065/3610/RSUDP/2020; No. 025/13/X/20/T/MIST/SPK	ADDENDUM KONTRAK Service Maintenance Pesawat Linac type Clinac CX Merk Varian USA Pada RSUD Prov NTB	Service radioterapi	5 (lima) tahun berjalan	13 Agustus 2020 s/d 31 Desember 2024
24	PT. JEJARING TIGA ARTHA	No. 2/PKS/JTA/RSUDP NTB/IX/2020; No. 065/3368?RSUDP/2020	Penggunaan Sistem Informasi Rumah sakit melalui "Zi. Care"	SIMRS	3 (tiga) tahun	2 Nofember 2020 s/d 1 Nofember 2023
25	Koperasi Jasa keselamatan Radiasi dan Lingkungan (Cathlab)	No. S-709/JKRL/V/2020; No. 065/1229/RSUDP/2020	Evaluasi TLD BARCBETA GAMMA	TLD Cathlab	1 (satu) tahun	Mei 2020 s/d April 2021
26	PT. BANK SYARIAH MANDIRI	065/3909/RSUDP/2020; No. 22/687-PKS/DIR	Tentang iB Supplier Financing (iB-SF)	Kuangan	1 (satu) tahun	10 November 2020 s/d 9 November 2021

Tabel 2-46 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Terkait Sewa Lahan Tahun 2020

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2020	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
1	Koperasi Syariah Putih Taksi	No. 065/663/RSUDP/2020; No. B.025/PKS/SWT.I/III/2020	Penggunaan Lokasi Untuk Penyediaan Transportasi Darat (Kendaraan Taksi Berargo Meter) Di RSUD Prov. NTB	Transportasi	1 (satu) tahun	1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021
2	PT. Lombok Taksi Utama	No. 065/663/RSUDP/2020/ No. 04/LTU-BB/II/2020	Penggunaan Lokasi Untuk Penyediaan Transportasi Darat (Kendaraan Taksi Meter) Di RSUD Prov. NTB	Transportasi	1 (satu) tahun	1 Maret 2020 s/d 28 Februari 2021

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
		2020			LAMA	DARI TANGGAL
3	PT. BANK NTB SYARIAH	No. 065/2090/RSUDP/2020; No. PJ/02.30/027/01A/2020	Penggunaan Lokasi Ruang Penempatan Dan Pengoperasian Mesin Automated Teller Machine	HUMAS	3 (tiga) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022
4	PT. BANK NUSA TENGGARA BARAT	No. 065/2089/RSUD PROV.NTB; No. PJ/02.30/70/153/2016	Penggunaan Lokasi Ruang Untuk layanan Kantor Kas PT. Bank NTB Di RSUD Prov. NTB	HUMAS	3 (tiga) tahun	1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menetapkan Indikator Kinerja Pelayanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-47 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2020

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA RSUD PROVINSI NTB	SAT	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
			2020	2020	
1	Kepuasan Pelanggan (Indeks)	%	90	87,3	97
2	Rasio Likuiditas				
	Current Ratio	%	10,069		
	Cash Ratio	%	7,466		
	Quick Ratio	%	8,719		
3	Rasio Solvabilitas				
	Rasio Perputaran Piutang	%	82,17		
	Rasio rata-rata pengumpulan piutang	Hari	0,03		
	Piutang Turn Over	Kali	88,53		
4	Rasio Rentabilitas				
	Profit Margin Ratio	%	49,83		
	Return on Asset	%	37,22		
5	BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS)	%	60	48,9	81,6
6	ALS (Tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS)	Hari	6,1	5,9	96,72
7	BTO (Frekuensi penggunaan TT)	Orang	42	32	76,19
8	TOI (Interval TT tdk terisi sampai terisi kembali RS)	Hari	2,4	5,5	229
9	NDR (Angka kematian > 48 jam)	Permil	43	38,7	100
10	GDR (Angka kematian umum)	Permil	80	63,4	100
11	Angka Kematian Ibu di RS				
	Akibat Pendarahan	%	1	3,03	-103,00
	Preklamsia	%	30	20,91	130,30
	Sepsis	%	0,2		-274
12	Angka Infeksi Nosokomial	%	1,5	0,55	100
13	Tingkat Penggunaan Obat Generik	%	60	75,11	125
14	Waktu tunggu (Kecepatan penanganan penderita gawat darurat)	Menit	8	8	100
15	Jumlah pasien yang dilayani :				
	Rawat Inap	Orang	18.723	14.048	75,03
	Rawat Jalan	Orang	141.091	95.922	67,98
	Gawat Darurat	Orang	17.025	11.623	68,27
16	Kelengkapan pengisian Rekam Medik	%	100	62,9	62,9
17	Prosentase Baku Mutu limbah cair				
	BOD	mg/lt	>50	13,4	100
	COD	mg/lt	>80	23,8	100

NO	ASPEK/INDIKATOR KINERJA RSUD PROVINSI NTB	SAT	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
			2020	2020	
	TSS	mg/lit	>30	2,50	100
	PH	%	6-9	7,82	100
18	Pendapatan BLUD	Milyar	173	288	166,01
19	Jumlah sarana yang terbangun	Paket	0	0	0,00
20	Jumlah gedung yang terpelihara	Unit	22	22	100
21	Jumlah Alat Kedokteran yang tersedia	Unit/Set	20	396	1980
22	Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis	Orang	2	1	50
23	Jumlah Dokter Umum ke Spesialis	Orang	2	2	100
24	Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS	%	700	150	21,42
25	Prosentase Pelatihan di Unit Khusus	%	60	204	340
26	Jumlah Dokumen Perencanaan RS yang tersusun	Jenis	6	6	100
27	Jumlah Naskah Kerjasama	Jenis	70	90	129
28	Jumlah laporan capaian kinerja	Jenis	5	5	100

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2020

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pada tahun 2020 mencapai 97 persen, artinya mutu pelayanan dalam kategori “Sangat Baik” (88,31–100,00), ini berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Selama kurun waktu tahun 2020, RSUD Provinsi NTB telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu beberapa inovasi telah dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB antara lain:

1. Inovasi RINDU (Registrasi Online Terpadu)

Pendaftaran online RSUD Provinsi NTB memudahkan pasien dalam mendaftar ke Poli tujuan dan tidak perlu mangantre di loket karena pendaftaran dapat dilakukan dirumah melalui website resmi RSUDP NTB dengan sarat dan ketentuan hanya untuk pasien lama yang sebelumnya pernah berkunjung dan merupakan pasien BPJS Kesehatan.

Dengan adanya Inovasi Rindu ini dapat memperlancar proses kesiapan berkas pada Rekam Medis, efektif dan efisien kepada pengunjung yang rutin berkunjung ke RSUDP NTB karna pada saat berkunjung langsung ke loket khusus tanpa antrian untuk proses registrasi.

2. Rumah Sadar Gizi

Rumah sadar gizi adalah program penanganan pada pasien gizi buruk pasca perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, merupakan tempat kegiatan edukasi gizi, konseling dan penyuluhan gizi, bagi orang tua pasien atau keluarga yang merawat dan mengasuh pasien, untuk pasien gizi buruk yang telah memasuki Fase Rehabilitasi.

3. Inovasi RASI (RUMAH SINGGAH)

Inovasi ini bertujuan untuk :

- a. Mempermudah akses pasien kurang mampu yang berasal dari pulau Lombok dan jauh dari Rumah Sakit;

- b. Mencegah terputusnya proses pengobatan pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien untuk datang berobat ke RSUD Provinsi NTB;
- c. Melakukan fungsi sosial Rumah Sakit sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien kurang mampu.

Inovasi RASI dikelola oleh divisi pre hospital instalasi gawat darurat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim RASI adalah membuat bangunan yang permanen, peningkatan fasilitas indoor dan outdoor, peningkatan SDM khusus RASI. Dampak RASI:

1. Memberi harapan bagi pasien untuk menyelesaikan pengobatan tanpa khawatir akan biaya hidup;
2. Meningkatkan kesinambungan pengobatan;
3. Membuat lingkungan di sekitar Rumah Sakit lebih tertib, teratur dan nyaman

Pelajaran yang bisa dipetik:

1. Meningkatkan rasa kepedulian sesama;
2. Pasien punya tempat tinggal sementara;
3. Meningkatkan derajat kesehatan;
4. Aman dan murah;
5. Keberlangsungan pengobatan pasien lebih terjamin;

Selama kurun waktu tahun 2020, RSUD Provinsi NTB telah mendapatkan penghargaan sebagai berikut:

1. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 untuk Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua.
Penghargaan ini diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan yang diberikan langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 Desember 2020.
2. Sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi NTB. Penghargaan ini merupakan penghargaan dibidang keterbukaan informasi. Penetapan penghargaan ini diberikan setelah web RSUD divisitasi dan dinilai oleh komisi informasi NTB dan dinyatakan sebagai badan publik terinformatif. Penilaian ini diikuti oleh seluruh OPD di NTB, parpol dan OPD vertikal di NTB. Beberapa hal yang dilakukan sehingga RSUD meraih penghargaan ini, antara lain: peran serta dari pimpinan sangat aktif terhadap progres kerja PPID, melengkapi dokumen informasi dan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi, memenuhi permintaan dari pemohon informasi publik

- sebelum batas waktu dan meminimalkan adanya komplain dari masyarakat terhadap pemenuhan dokumen (sesuai dengan UU KIP yang berlaku).
3. Sebagai OPD Wajib Pajak Berkontribusi Signifikan Tahun 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara Barat tanggal 12 Februari 2020.
 4. Sebagai *Customer Loyalty Award* Tahun 2020 dari PLN UIW Nusa Tenggara Barat

c. RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI

RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, pada tahun 2020, menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang Kesehatan dalam rangka mendukung pencapaian misi ketiga RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sehat dan Cerdas” dengan salah satu indikatornya adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan selain untuk mencapai target Angka Harapan Hidup, juga untuk mencapai target kinerja RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020 dengan indikator: Status Akreditasi Rumah Sakit dengan target Paripurna. Adapun capaian indikator angka harapan hidup (AHH) dan status akreditasi rumah sakit tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-48 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kesehatan di RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Kesehatan (RSJ Mutiara Sukma)				
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,07	66,28	66,48	66,51
2	Status Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber: RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2020

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas dan 10 (sepuluh) kegiatan.

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam rangka meningkatkan AHH di tahun 2020 adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Jiwa, Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RS Jiwa, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD. Program Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki output:

- Jumlah kunjungan kesehatan jiwa tahun 2020 sebanyak 34.457 orang;
- Jumlah masyarakat miskin yang terlayani dengan bantuan sosial RSJ Mutiara Sukma tahun 2020 sebanyak 86 orang

Dalam rangka meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), RSJ Mutiara Sukma memberikan pelayanan utama pada bidang kesehatan jiwa secara komprehensif dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien gangguan jiwa, untuk itu Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma melaksanakan pelayanan intramural (dalam gedung) dan ektramural (diluar gedung). Pelayanan intramural yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan jiwa baik meliputi rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan pasien rawat jalan tahun 2020 sebanyak 31.599 orang, sedangkan pasien rawat inap sebanyak 1.341 orang sehingga total pasien rawat jalan dan rawat inap adalah sebanyak 32.940 orang, jumlah ini menurun 11,13 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan jumlah pasien yang dilayani pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan jumlah kunjungan karena pandemi Covid 19.

Tahun 2020, pasien layanan kesehatan jiwa baik rawat jalan maupun rawat inap lebih banyak menggunakan BPJS Kesehatan sebagai cara pembayaran, yang mencapai 73,59 persen atau sebanyak 24.242 orang. Sementara pasien yang menggunakan layanan umum (non BPJS Kesehatan) sebesar 24,46 persen atau sebanyak 8.058 orang. Metode pembayaran tidak saja melalui mekanisme layanan BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan, tetapi juga melalui mekanisme bantuan sosial sebanyak 1,94 persen atau 640 orang.

Tabel 2-49 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019-2020

NO	CARA PEMBAYARAN	2019			2020		
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JUMLAH	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	JUMLAH
1	Umum	7.642	232	7.874	7.962	96	8.058
2	BPJS	27.380	1.160	28.540	23.198	1.044	24.242
3	Bansos	443	210	653	439	201	640
Jumlah		35.465	1.602	37.067	31.599	1.341	32.940

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

Pasien IGD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2020 sebanyak 1.517 orang, menurun 10,34 persen dibandingkan tahun 2019. Jika melihat cara pembayaran untuk pasien IGD, sebagian besar menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebesar 73,24 persen atau sebanyak 1.111 orang. Pasien IGD yang menggunakan layanan umum sebesar 12,66 persen atau sebanyak 192 orang dan pasien IGD yang menggunakan bantuan sosial sebesar 14,11 persen atau sebanyak 214 orang.

Tabel 2-50 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019-2020

NO	CARA PEMBAYARAN	2019	PERSENTASE	2020	PERSENTASE
1	Umum	350	20,69	192	12,66
2	BPJS	1.070	63,23	1.111	73,24
3	Bansos	272	16,08	214	14,11
Jumlah		1.692	100	1.517	100,00

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

RSJ Mutiara Sukma memiliki instalasi khusus rehabilitasi penyalahgunaan napza (instalasi rehabilitasi napza) sebagai salah satu institusi pelayanan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) bagi Orang Dengan Penyalahgunaan Napza (ODPGN). Oleh karena itu, RSJ Mutiara Sukma selain memberikan pelayanan pasien rawat inap, rawat jalan dan IGD untuk pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, juga melayani pasien penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza). Sepanjang tahun 2020, sebanyak 239 pasien penyalahgunaan napza telah ditangani oleh unit ini. Jumlah ini menurun 61,82 persen atau 387 pasien dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2-51 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2019-2020

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	JUMLAH YANG DIREHABILITASI DI RSJ
2019	100	100	626
2020	100	100	239

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

Dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien penyalahgunaan napza, RSJ Mutiara Sukma bekerjasama dengan BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram dalam bentuk Tim Assessment Terpadu (TAT), Rehabilitasi Ketergantungan Napza, Rumah Damping Pasca Rehabilitasi, Pemetaan Wilayah, serta Pendampingan dan Penjangkauan Bagi Penyalahgunaan Napza. Selain melayani rehabilitasi Napza, RSJ Mutiara Sukma juga memberikan pelayanan konseling dan tes HIV/AIDS yang tidak hanya berupa pelayanan intramural di RSJ Mutiara Sukma, tapi juga melakukan pelayanan ektramural yaitu kunjungan ke Lapas Mataram dengan jumlah klien di tahun 2020 sebanyak 767 orang.

RSJ Mutiara Sukma tetap berkomitmen untuk NTB Bebas pasung. Salah satu upaya untuk mendorong dan meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat dan untuk mendukung program NTB bebas pasung, RSJ Mutiara Sukma telah melakukan kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam rangka mewujudkan program ini dikedepankan upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Selain itu RSJ Mutiara Sukma juga melakukan penjangkauan dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dengan tujuan menekan jumlah pasien penderita gangguan kejiwaan menuju NTB bebas pasung.

Di tahun 2020, RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB telah menjangkau sebanyak 62 pasien pasung dan seluruhnya tertangani (100%). Penjangkauan pasien pasung tahun 2020 menurun 6 pasien dibandingkan tahun 2019 yaitu 68 pasien yang mana seluruhnya tertangani juga. Namun karena adanya pandemi Covid 19, maka penjangkauan pasien pasung dilaksanakan secara daring saat integrasi online melalui bantuan tim di masing-masing kabupaten/kota. Jumlah pasien pasung hasil penjangkauan tahun 2019-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-52 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2020

NO	WILAYAH PUSKESMAS	2019	2020
1.	Mataram	1	0
2.	Lombok Barat	17	11
3.	Lombok Tengah	6	5
4.	Lombok Utara	6	0
5.	Lombok Timur	16	0
6.	Sumbawa	2	13
7.	Sumbawa Barat	5	4
8.	Dompu	3	10
9.	Bima	7	18
10.	Kota Bima	5	1
	JUMLAH	68	62

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

Instalasi Kesehatan Jiwa Masyarakat (Keswamas) pada RSJ Mutiara Sukma memberikan pelayanan ekstramural dimana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan home visite yaitu kunjungan petugas kesehatan ke rumah pasien yang pernah dirawat di RSJ Mutiara Sukma. Pada tahun 2020 tim Keswamas hanya melakukan 1 kali kunjungan rumah yaitu ke Puskesmas Aikmel Kabupaten Lombok Timur karena adanya pandemi Covid 19.

Selain kegiatan home visite, tim Keswamas juga melakukan kegiatan dropping. Kegiatan dropping pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya setelah selesai menjalani perawatan. Kegiatan dropping ini dilakukan oleh RSJ Mutiara Sukma sebagai bentuk tanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi saat ini banyak keluarga pasien yang enggan untuk menjemput kembali pasien yang sudah di rawat inap di RSJ Mutiara Sukma yang dinyatakan sudah boleh pulang. Selain itu juga ada beberapa pasien yang tidak mampu dijemput kembali oleh keluarganya. Tanggungjawab untuk mengembalikan pasien yang sudah di rawat kepada keluarganya sesungguhnya bukanlah kewajiban RSJ Mutiara Sukma, namun karena kurangnya kepedulian dan pemahaman keluarga dan masyarakat

di lingkungan tempat tinggal pasien serta untuk kelancaran operasional pelayanan, RSJ Mutiara Sukma berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB sehingga kegiatan dropping pasien dibebankan pada APBD dan BLUD RSJ Mutiara Sukma. Kedepannya diharapkan RSJ Mutiara Sukma dapat bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota untuk dapat bersama-sama memberi pemahaman pada keluarga dan masyarakat akan pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses penyembuhan pasien. Namun adanya pandemi covid 19 benar-benar memberikan dampak bagi pelayanan ektramural di RSJ Mutiara Sukma, sehingga pada tahun 2020 tidak ada kegiatan dropping.

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Keswamas adalah kegiatan ACT (*Assertive Community Therapy*) atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. ACT didesain untuk menurunkan hospitalisasi, meningkatkan kemandirian, fungsi dan produktifitas individu serta memberi support pada keluarga. Dalam pelaksanaannya terapi ini membutuhkan tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat dan seorang koordinator. Bentuk layanan yang diberikan adalah:

1. Layanan ACT statis: dilakukan di poliklinik maupun ruang rawat inap RSJ Mutiara Sukma, dengan sasaran pasien yang kriterianya ditentukan oleh profesional pemberi asuhan;
2. Layanan ACT mobile: dengan kunjungan pada pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan dukungan tim Keswamas.

Tabel 2-53 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2019-2020

NO	BENTUK KEGIATAN ACT	2019		2020	
		LOKASI	JUMLAH KLIEN	LOKASI	JUMLAH KLIEN
1	ACT Statis	RSJ Mutiara Sukma	473 orang	RSJ Mutiara Sukma	1830 orang
2	ACT Mobile	Kab. Lombok Timur	20 orang	-	-
		Kab. Dompus	324 orang		
TOTAL		3 lokasi	817 orang	1 lokasi	1830 orang

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2020

RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB tidak hanya melayani pasien gangguan kejiwaan dalam bentuk perawatan intensif kepada pasien baik di rumah maupun di rumah sakit, namun juga memberikan pemberdayaan pasca pasien melalui perawatan intensif dan proses rehabilitasi lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama antar sektor terkait seperti tokoh masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perangkat desa, dan kader sehingga tujuan agar pasien setelah kembali ke keluarga mampu bekerja secara

mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat dapat tercapai. Model pelayanan ini menjadi inovasi RSJ Mutiara Sukma sejak tahun 2018 yang dikenal dengan MODEL LAYANAN SIRUKO GALAR (Sistem Rujukan Komunikasi Tiga Pilar). Meskipun inovasi ini sudah diluncurkan beberapa tahun yang lalu, namun inovasi ini masih relevan dan menjadi unggulan karena mampu meningkatkan kinerja pelayanan RSJ Mutiara Sukma kepada masyarakat. Inti dari terobosan ini adalah:

- a. Berkolaborasi secara sinergis dengan Dinas Kesehatan dalam satu sistem dengan cakupan ke semua kab/kota di NTB. Pada tahap pemberdayaan, kolaborasi dapat melibatkan lebih banyak stakeholder.
- b. Inovasi model terhadap pelayanan yang sudah ada:
 1. Dengan SIRUKOGALAR menjadikan satu sistem yang saling bersinergi melalui komunikasi timbal balik, Sedangkan pada model rujukan konvensional tidak ada hubungan timbal balik antara RSJ Mutiara Sukma, Puskesmas dan pasien/keluarga, sehingga pengobatan pasien pasca rawat tidak dapat dimonitor, dengan demikian ada risiko kambuh atau dipasung lagi.
 2. Mensinergikan tugas Tim ACT RSJMS (Tim Ahli/profesional multi disiplin) dalam memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat/pasien dengan Tim CMHN di Puskesmas yang fungsinya memberikan pelayanan di Puskesmas dan juga langsung ke masyarakat. Tim CMHN terdiri dari dokter dan perawat yang sudah dilatih tentang pelayanan kesehatan jiwa, dan juga dilengkapi oleh kader kesehatan jiwa terlatih yang berasal dari masyarakat sehingga pasien cukup kontrol ke Puskesmas yang aksesnya lebih dekat dengan tetap mendapatkan supervisi Tim Ahli.

Model layanan SIRUKO GALAR dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2- 10 Model layanan SIRUKO GALAR

Pada tahun 2020, RSJ Mutiara Sukma telah mencoba menggambarkan kegiatan SIRUKOGALAR dalam bentuk video pendek dan mengikutsertakan video tersebut dalam kegiatan lomba kesehatan jiwa masyarakat pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (HKJS) pada bulan oktober tahun 2020 dan berhasil memperoleh juara II tingkat Nasional.

Sistem komunikasi yang telah terbentuk dalam upaya penanggulangan tindakan pemasungan di wilayah NTB mengacu pada Peraturan Gubernur NTB nomor 22 tahun 2013. Peraturan Gubernur NTB tersebut berisi tentang pencegahan pemasungan melalui kampanye yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara komunikasi, informasi, dan edukasi sehingga dapat mendorong dan meningkatkan layanan Kesehatan jiwa. Sistem komunikasi yang telah berjalan saat ini dapat ditingkatkan melalui inovasi RSJ Mutiara Sukma "MAKPASOL" (Masyarakat Aktif Klik Pasung Online) dengan sistem pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut berkesinambungan yang lebih baik dalam hal mengatasi kendala biaya, waktu, tenaga, dan geografi.

Inovasi MAKPASOL juga diharapkan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mudah diakses seiring dengan perkembangan teknologi internet saat ini. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat NTB mengenai pemasungan dan gangguan jiwa berat diharapkan akan menurunkan jumlah ODGJ yang mengalami pemasungan di NTB. Kinerja Pemerintah Provinsi NTB pun juga akan meningkat di bidang kesehatan jiwa apabila inovasi MAKPASOL berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

MAKPASOL secara langsung akan menghubungkan komunikasi diantara masyarakat, Puskesmas, Dinas Kesehatan, RSJ Mutiara Sukma, dan Pemerintah Provinsi melalui media internet secara online dalam upaya pembebasan ODGJ yang mengalami tindakan pemasangan di wilayah NTB. MAKPASOL dapat diakses secara mudah dan langsung di alamat website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id. Keluaran yang mendukung keberhasilan MAKPASOL adalah:

- a) Meningkatnya angka temuan ODGJ yang mengalami pemasangan di NTB untuk data dasar (*baseline*) berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*).
- b) Penatalaksanaan/perawatan yang komprehensif terhadap ODGJ yang mengalami pemasangan di NTB.
- c) Melakukan monitoring secara berkala terhadap ODGJ pasca pasung yang telah diberikan terapi, termasuk pemberdayaan ODGJ dan keluarga dalam hal kemandirian ekonomi.
- d) Mempermudah sistem pelaporan dan koordinasi antara pemangku kepentingan atau lintas sektoral.

Manfaat utama dari inovasi MAKPASOL ialah meningkatnya angka temuan ODGJ yang mengalami pemasangan di NTB untuk data baseline berdasarkan nama dan alamat (*by name by address*) yang dapat dijadikan acuan untuk tatalaksana selanjutnya. Semakin banyak ODGJ yang terdeteksi mengalami pemasangan di NTB maka semakin cepat ODGJ tersebut mendapatkan terapi dan monitoring yang adekuat sehingga upaya pemberdayaan secara mandiri dalam terwujud. ODGJ pasca pasung yang berdaya dan mandiri akan berproduktif bagi keluarga dan masyarakat sehingga meningkatkan keberhasilan sumber daya manusia di bidang kesehatan jiwa bagi pemerintah daerah Provinsi NTB. Pada masa pandemi Covid 19, website MAKPASOL juga dimanfaatkan sebagai alat deteksi dini secara online gangguan kesehatan jiwa saat tim kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) melakukan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS).

Dalam kegiatan penjangkauan pasien pasung, instalasi keswamas juga melakukan berbagai kegiatan ekstramural seperti kegiatan integrasi kesehatan jiwa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa. Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan tentang pelayanan kesehatan jiwa. Berikut adalah rincian kegiatan integrasi kesehatan jiwa tahun 2019-2020:

Tabel 2-54 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Integrasi Kesehatan Jiwa Tahun 2019-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	FREKUENSI TAHUN 2019	FREKUENSI TAHUN 2020
1.	Mataram	2	1
2.	Lombok Barat	2	1
3.	Lombok Tengah	2	1
4.	Lombok Utara	2	1
5.	Lombok Timur	2	1
6.	Sumbawa	2	1
7.	Sumbawa Barat	2	1
8.	Dompu	2	1
9.	Bima	2	1
10.	Kota Bima	2	1
JUMLAH		20 kali	10 kali

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

Tim Keswamas juga melakukan kegiatan mobile clinic yang merupakan kegiatan layanan pengobatan dan konsultasi tentang masalah kesehatan jiwa yang dilakukan langsung ke masyarakat. Berikut adalah rincian kegiatan mobile clinic tahun 2019-2020:

Tabel 2-55 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2019-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2019		2020	
		FREKUENSI	JUMLAH KLIEN	FREKUENSI	JUMLAH KLIEN
1	Lombok Barat	2	10 orang	1	15 orang
2	Lombok Tengah	2	26 orang	1	13 orang
3	Lombok Utara	2	3 orang	1	3 orang
4	Lombok Timur	2	28 orang	1	12 orang
5	Sumbawa	2	74 orang	1	34 orang
6	Sumbawa Barat	2	53 orang	1	22 orang
7	Dompu	2	49 orang	1	22 orang
8	Bima	2	70 orang	1	46 orang
9	Kota Bima	2	18 orang	1	58 orang
JUMLAH		18 kali	331 orang	9 kali	225 orang

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2019-2020

Pada tahun 2020 ada 10 penyakit terbanyak dari pasien yang berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-56 10 (sepuluh) Penyakit Terbanyak Pasien yang Berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma Tahun 2020

NO	GOLONGAN DIAGNOSA
1	Skizofrenia, Gg. Skizotifal, Psikotik Akut dan sementara
2	Gg. Ansietas Fobik dan Gg. Ansietas lainnya
3	Gg. Skizoafektif
4	Episode depresif, Gg. depresif berulang, Gg. suasana perasaan (mood afektif) menetap, lainnya atau YTT
5	Epilepsi
6	Episode manik dan Gg. afektik bipolar
7	Gg. Hipernetik, prilaku, emosional, fungsi khas, gg. "tic" dan gg. mental dan emosi lainnya

NO	GOLONGAN DIAGNOSA
8	Demensia
9	Retardasi mental
10	Gg. Perkembangan Psikologis

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSJ Mutiara Sukma tahun 2020 mencapai 80,83 persen. Adapun unsur-unsur dalam survey kepuasan masyarakat antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sudah tergolong baik. Selain itu, upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit telah dilakukan melalui akreditasi rumah sakit.

RSJ Mutiara Sukma telah melaksanakan proses penilaian akreditasi RS oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) versi SNARS Edisi 1 dan mendapat predikat Paripurna. Pada tahun 2020, adanya pandemi covid 19 menyebabkan KARS menerbitkan surat edaran bahwa resurvey akreditasi tidak dapat dilakukan secara langsung sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, melainkan dilakukan assessment internal di masing-masing rumah sakit, maka RSJ Mutiara Sukma melakukan assessment internal oleh tim akreditasi dan hasilnya RSJ Mutiara Sukma dapat mempertahankan akreditasi paripurna seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma meluncurkan aplikasi PPID RSJ Mutiara Sukma yang membawa RSJ Mutiara Sukma memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Informatif, setelah tahun sebelumnya juga mendapat predikat sebagai Badan Publik Menuju Informatif. Aplikasi PPID tersebut selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga memiliki fitur untuk menyampaikan keluhan atau saran. Capaian ini tentu berkat kerjasama seluruh Civitas Hospitalia RSJ Mutiara Sukma yang telah aktif memberikan informasi baik mengenai pelayanan maupun kegiatan di RSJ Mutiara Sukma.

Dalam menyikapi pandemi Covid 19, RSJ Mutiara Sukma mengacu pada Peraturan Gubernur No. 31 Tahun 2020 dimana regulasi tersebut mengatur tentang penanganan dan penanggulangan Covid 19. Adanya pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pelayanan di RSJ Mutiara Sukma terutama pada pelayanan ektramural, dimana pelayanan yang sebelumnya dilaksanakan secara langsung turun ke masyarakat, saat ini frekuensinya dikurangi bahkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring.

Salah satu kebijakan strategis yang menjadi acuan bagi RSJ dalam menghadapi pandemi covid 19 adanya Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 445-541 Tahun 2020 tentang Penunjukan RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB Sebagai RS Rujukan Covid 19 Khusus Jiwa, sehingga tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma menyiapkan ruang perawatan khusus untuk menangani orang dengan masalah kejiwaan yang juga terpapar virus covid 19.

Pada tahun 2020 RSJ Mutiara Sukma mendapat alokasi dana BTT untuk mendukung penanganan covid-19. RSJ Mutiara Sukma memperoleh dana BTT sebesar Rp.1.581.366.097,00 dengan realisasi sebesar RP. 1.548.433.612,00. Adapun peruntukkan dana BTT digunakan untuk membeli alat kesehatan yang mendukung pelayanan pasien covid seperti biosafety cabinet, centrifuge, Mobile X Ray, nebulizer, hepafilter set, trolley emergency, stetoskop, tensimeter, brancard, kursi roda, thermometer scan, tabung oksigen, oxycymeter dan lain-lain. Selain itu dana BTT juga digunakan untuk mengadakan alat pelindung diri, cairan desinfektan, sarana prasarana DKJPS dan insentif tim Covid 19.

d. RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang kesehatan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-57 Capaian Indikator Urusan Bidang Kesehatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Utama	Utama	Utama	Utama

Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2021

Capaian kinerja indikator urusan bidang kesehatan dapat dijelaskan sebagai berikut tahun 2020 merupakan tahun pandemi yang menyebabkan di tahun ini tidak dilaksanakannya survey verifikasi untuk akreditasi, sehingga menyebabkan capaian status

Untuk perhitungan capaian program ini menggunakan aplikasi ASPAK yang menyediakan data sarana dan prasarana yang tercapai dalam tahun 2020. Sedangkan untuk program BLUD, RS H.L Manambai Abdulkadir hampir mendekati target yang ditetapkan, ini dikarenakan klaim yang diterima dari pasien-pasien covid-19 yang dirawat mampu dibayar dengan tepat waktu dan cepat oleh Kementrian Kesehatan. Begitu pula dengan klaim pasien BPJS dan asuransi lainnya. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir memberikan fasilitas

penyediaan prasarana kesehatan bagi masyarakat Provinsi NTB di Pulau Sumbawa. Cakupan rawat jalan dan IGD berdasarkan cara bayar ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2-58 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2019 – 2020

NO	CARA PEMBAYARAN	2019				2020			
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	INSTALASI GAWAT DARURAT	JML	RAWAT JALAN	RAWAT INAP	INSTALASI GAWAT DARURAT	JML
1.	Umum	4.284	685	1.989	6.958	3.153	541	1.429	5.123
2.	BPJS	18.114	6.461	6.099	30.674	10.562	3.994	3.865	18.421
3.	JAMKESMAS/ MOU	47	20	3	70	9	5	15	29
4.	Lainnya/intern	0	0	31	31	0	0	91	91
Jumlah		18.458	22.445	7.166	37.733	13.724	4.540	5.400	23.664

Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB, 2020

Selama tahun 2020, cakupan layanan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mencapai 23.664 orang pasien atau turun sebesar 14.069 orang atau 37% dari total pasien di tahun 2019. Terdapat penurunan kunjungan pasien dikarenakan adanya pandemi Covid 19 selama tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan adanya aturan untuk mengurangi jumlah pasien hamper di setiap lini.

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang telah resmi berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 440- 470 Tahun 2016 Tanggal 10 Mei 2016, tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dan pada Tahun 2019 Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir telah Terakreditasi UTAMA (Bintang Empat) oleh Komisi Akreditasi Nasional (KARS) dengan Nomor : KARS-SERT/120/XII/2018, artinya Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Nasional dalam melayani masyarakat adapun Program unggulan yang diselenggarakan yaitu:

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata.
 - a. PengadaanAlat- alat Kesehatan Rumah Sakit.
 - b. Pengadaan Obat Rumah Sakit.
 - c. Pembangunan Rumah Sakit.
 - d. Pengadaan Pencetakan administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - b. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
 - c. Penyediaan Jasa Keamanan kantor.

3. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata.
 - a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah Sakit.
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
 - a. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.

Program-program ini sangat bermanfaat untuk menunjang Proses Pelayanan terhadap masyarakat di R.S. Manambai Abdulkadir dan menjadikan Rumah Sakit menuju Tipe B. Total anggaran pada tahun 2020 Rp 35.783.609.333,- dan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 61.982.524.557,- Terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 26.198.915.224,- atau sebesar 73,21% yang jika dilihat terdapat pengurangan pada belanja tidak langsung namun ada penambahan anggaran belanja langsung, karena ada penambahan pada anggaran DAK.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-59 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2020

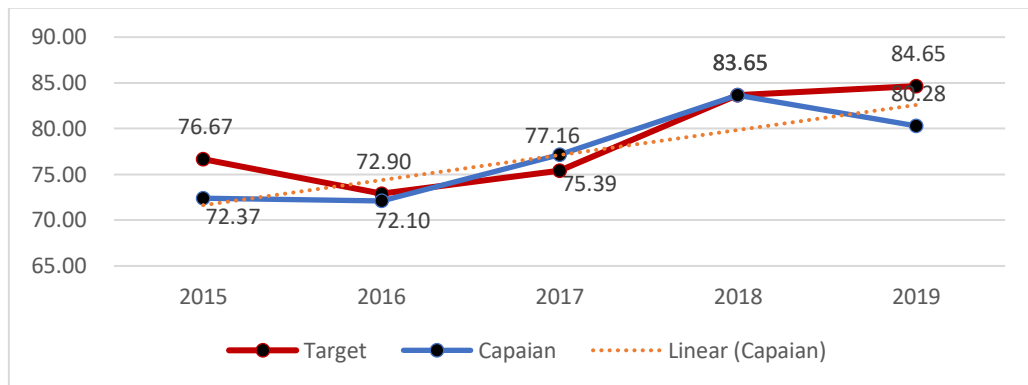
NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	84,65	80,28	80,28	80,05
2	Indek Kinerja Saluran Irigasi (IKSI)	56,18	54,41	57,07	57,07
3	Cakupan Air Minum	74,08	74,69	75,74	74,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja indikator bidang urusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap

Tingkat kemantapan Jalan Provinsi pada akhir Tahun 2020 tercatat sebesar 80,05%, turun sebesar 0,23% dari tingkat kemantapan jalan pada akhir Tahun 2019 yang tercatat sebesar 80,28 % (target kemantapan jalan tahun 2020 pada RPJMD 2019-2023 Revisi). Penurunan tingkat kemantapan jalan yang cukup signifikan ini disebabkan meningkatnya laju penurunan kondisi jalan yang tidak diimbangi dengan upaya peningkatan jalan dan tidak terpenuhinya standar pemeliharaan rutin jalan serta meningkatnya kerusakan jalan akibat bencana alam.

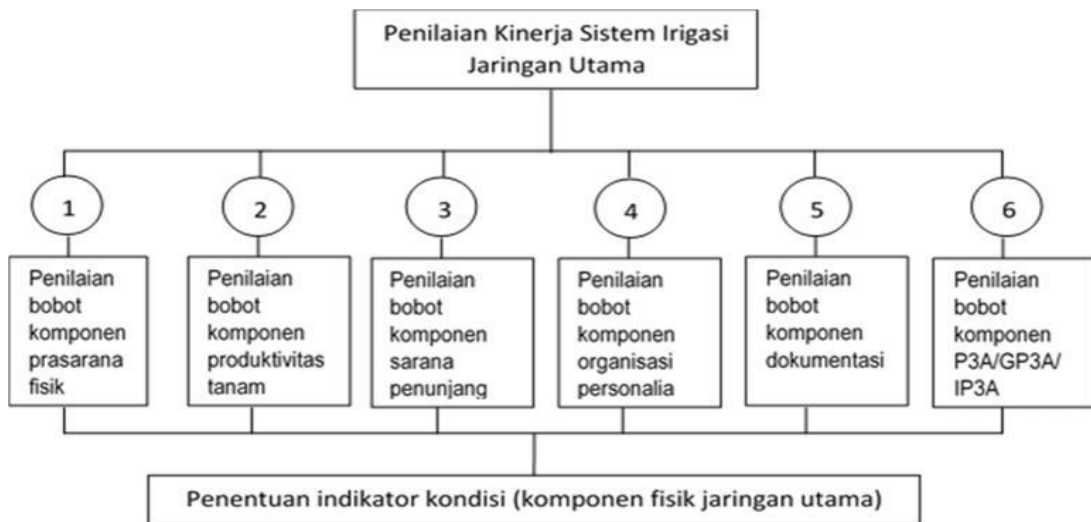


Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

Gambar 2- 11 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB

Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)

Evaluasi indeks kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang memiliki beberapa komponen meliputi : a). Prasarana fisik (45%); b). Produktivitas tanaman (15%); c). Sarana penunjang (10%); d). Organisasi personalia (15%); e). Dokumentasi (5%) dan f). Kondisi kelembagaan P3A/GP3A (10%). Komponen Penilaian IKSI merujuk pada Permen PUPR No. 12/2015.



Pada tahun 2020 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi NTB sebesar 57,07 sesuai target yang direncanakan. angka ini meningkat dari tahun sebelumnya 54,41 pada tahun 2019.

Cakupan Air Minum

Indikator cakupan air minum merupakan salah satu indikator strategis bidang PUPR. Berdasarkan data, Cakupan Air Minum di Provinsi NTB Pada Tahun 2020 mencapai 74,88% dari kurang target RPJMD sebesar 75,74%. Pencapaian

cakupan air minum masih dibawah target RPJMD yang ditetapkan untuk tahun 2020.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB pada tahun 2019 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program prioritas dan 9 (sembilan) kegiatan utama, untuk menunjang indikator bidang urusan perumahan dan permukiman berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1). Presentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi; 2). Cakupan rumah layak huni (RLH); 3) Presentase Permukiman yang tertata. Target dan capaian indikator bidang urusan pangan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-60 Target dan capaian indikator bidang urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sarpras fisik yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase rumah korban gempa yang telah direhabilitasi dan di rekonstruksi	100 %	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas rumah layak huni	Cakupan rumah layak huni	92,74%	92,02%	92,74%	92.09%
3	Menurunnya luasan Kawasan kumuh	Persentase permukiman yang tertata	5,18 %	5,18 %	5,18%	5,18%

Sumber : Dinas Perumahan Perkmukiman Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang Perumahan dan Permukiman dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang juga merupakan program unggulan dari Dinas Perumahan dan Permukiman, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-61 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	2018		2019		2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	2.423	2.171	225	212	973	966

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

Pada tahun 2018 penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB diprioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan seperti

kelengkapan administrasi, kondisi rumah yang dilihat dari kondisi atap, lantai dan dinding (aladin) sedangkan untuk penanganan rumah akibat bencana alam/sosial dengan kriteria rumah rusak berat dan harus sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT). Untuk tahun 2020 capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 966 unit dari target 225 unit. Angka ini tidak melampaui target karena terjadi pembiayaan yang sama yang bersumber dari APBN untuk sasaran yang sama. Selain bersumber dari dana APBD Provinsi penanganan RTLH juga dilakukan oleh kabupaten kota melalui APBD Kabupaten/kota (termasuk dana DAK) dan pemerintah pusat melalui dana APBN sehingga total RTLH yang tertangani di Provinsi NTB sebanyak 8.689 RTLH. Data penanganan RTLH yang bersumber dari APBD provinsi kurun waktu tahun 2017-2019 di kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-62 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	SATUAN	2018	2019	2020	
					TARGET	REALISASI
1	Kota Mataram	Unit	110	-	66	66
2	Lombok Barat	Unit	291	25	105	105
3	Lombok Tengah	Unit	444	15	137	137
4	Lombok Utara	Unit	108	12	2	2
5	Lombok Timur	Unit	651	98	321	321
6	Sumbawa Barat	Unit	61	-	91	91
7	Sumbawa	Unit	156	52	150	150
8	Dompu	Unit	81	-	38	38
9	Kabupaten Bima	Unit	176	10	45	45
10	Kota Bima	Unit	93	-	11	11
Jumlah		Unit	2.171	212	966	966

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat selanjutnya penetapan lokasi ditetapkan oleh bupati/walikota. Tahap selanjutnya adalah kesesuaian terhadap standar teknis berupa a) bangunan gedung; b) jalan lingkungan; c) penyediaan air minum; d) drainase lingkungan; e) pengelolaan air limbah, f) pengelolaan persampahan dan g. proteksi kebakaran.

Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikota se NTB adalah 401,99 Ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2020 baru seluas 95,03 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-63 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN 2020	
		LUAS KAWASAN (HA)	KAWASAN TERTANGANI (HA)
1.	Kota Mataram	5,83	3,86
2.	Kota Bima	4,34	1,55
3.	Lombok Barat	21,79	8,12
4.	Lombok Tengah	42,24	34,79
5.	Lombok Timur	60,00	25,73
6.	Sumbawa	30,76	10,67
7.	Sumbawa Barat	18,72	1,39
8.	Kab. Bima	39,14	5,82
9.	Lombok Utara	27,50	1,80
10.	Dompu	151,67	1,29
	Total	401,99	95,03

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2020

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan bertujuan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang tentram, tertib sesuai dengan norma dan ketentuan bermasyarakat untuk menuju kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2-64 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Gubernur) Tahun 2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET.
1	Persentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik sosial	98,10 %	100 %	101,94 %	
2	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	0.70 %	0,65%	92,86	

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2020

Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja diatas menunjukkan bahwa stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah cukup kondusif, yang ditandai dengan semakin menurunnya persentase konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dari perkiraan akan terjadi konflik sosial sebanyak 6 (enam) kasus atau turun 14,29% dari konflik sosial yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) kasus, ternyata capaiannya jauh lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 57,14 % Ketepatan dan kecepatan langkah deteksi dini dan cegah dini yang

berhasil dilakukan pada tahun 2020 telah dapat menurunkan timbulnya potensi konflik yang lebih banyak dan juga menekan potensi konflik tersebut untuk tidak muncul sebagai konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan hidup sosial masyarakat. Kecepatan mengetahui lebih awal berbagai potensi yang bisa menimbulkan masalah, merupakan langkah penting yang menentukan langkah pencegahan berikutnya. Konflik sosial yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus semuanya terjadi di Kabupaten Bima dengan dilatar belakangi kasus kriminal berupa pembunuhan dan berlanjut pada konflik antar Desa.

Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang kedua adalah Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik yang menjadi pengukurannya adalah persentase masyarakat yang terlibat secara langsung dalam berorganisasi (pengurus), menunjukkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari 12 (dua belas) Parpol dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM) baik yang melaporkan keberadaannya ataupun yang mendapat fasilitasi dari Bakesbangpoldagri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri maupun yang berstatus Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM diperoleh data bahwa terdapat 16.847 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,65% dari 2,603.913 jiwa penduduk NTB usia 21 – 59 tahun.

Terdapat deviasi 0,05 persen dari yang ditargetkan sebesar 0,70% jumlah masyarakat NTB yang terlibat dalam Politik, hal ini dikarenakan pelaksanaan amanat Perda No. 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang membatasi mobilitas dan berkumpul. Aspek pelayanan umum yang merupakan urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, didukung melalui 4 (empat) program prioritas dengan 7 (tujuh) kegiatan utama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); memfasilitasi dan memberikan Hak masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang tentram, tertib sesuai dengan norma dan ketentuan bermasyarakat untuk menuju kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. Pemerintah melalui aspek pelayanan umum menjamin ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, diselenggarakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator Cakupan Komunitas “Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam rangka pendidikan karakter. Dan yang menjadi program unggulan atau prioritas adalah Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dan Penurunan konflik Sosial.

Sekolah Perjumpaan

Kegiatan pengembangan sekolah perjumpaan dilatar belakangi adanya kegelisahan tentang kondisi sosial dimana kurangnya saling menghargai antar sesama, rentannya terjadi perselisihan yang disebabkan hanya persoalan kecil, anak-anak remaja tidak lagi mempedulikan nilai-nilai moral dan etika, terjadi banyak penyimpangan. Komunitas sekolah perjumpaan yang terbentuk dalam rangka pendidikan karakter menjadi sarana dalam perkumpulan remaja, pemuka masyarakat dan warga pada umumnya untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2019 dapat dicapai 10 persen atau 60 komunitas. Anggota komunitas mulai dari anak-anak sampai orang dewasa terutama lintas etnis, semua anggota komunitas berlaku sebagai murid sekaligus sebagai guru. Kegiatan yang dilakukan merupakan pembelajaran berbasis komunitas dengan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan yang baik secara langsung yang dilandasi nilai-nilai kearifan lokal.

Desa Bersinar (Bersih Narkoba)

Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di Desa yang dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat Desa, dengan tujuan (1) untuk meningkatkan pendampingan; masyarakat Desa; (2) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah baik Provinsi maupun kab/kota dan (3) meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas pemangku kepentingan dalam memfasilitasi kegiatan Desa Bersinar. Pemerintah Provinsi NTB dengan target 10 Desa, belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk menangani dampak dari wabah virus corona. Walaupun ada penurunan realisasi Desa Bersinar pada masa pandemi, Pemerintah Prov. NTB tetap melakukan upaya penanganan dan penanggulangan narkoba dengan melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Bersinar tahun 2019 dan menyusun Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hasil monitoring dan evaluasi Desa Bersinar bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan di 10 Desa/Kelurahan Bersinar tahun 2019, mampu memberi efek positif yaitu

menurunnya angka kasus narkoba dari tahun 2018 sebanyak 9 kasus, di tahun 2019 sebanyak 18 kasus, pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang signifikan terhadap penyalahgunaan kasus narkoba di Desa Bersinar sebanyak 5 kasus. Dalam upaya penanggulangan narkoba tersebut membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat dari berbagai lapisan, hal ini diharapkan dapat membentuk daya tangkal yang kuat terhadap ancaman narkoba. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Konflik Sosial

Kondisi keamanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 semakin terkendali dan konflik sosial dapat di tekan, tabel di atas menunjukkan habwa terjadi perubahan target dalam RPJMD indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial tahun 2018 target 38,1 persen atau 27 kasus, dengan realisasi 38,0 persen atau 13 kasus, tahun 2019 target 67,50 persen atau 24 kasus, realisasi 46,15 persen atau 7 kasus dan pada 2020 ditargetkan 14,29 persen atau 21 kasus, realisasi 3 kasus, berarti konflik yang terjadi di Provinsi NTB menurun secara signifikan dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena pernyataan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin kecil capaian kinerja (realisasi) dibandingkan dengan target, berarti itu menunjukkan tingkat capaian kinerja yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-65 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	LATAR BELAKANG KONFLIK						JMLH KASUS	KET.
		POLITIK	EKONOMI	SOSIAL BUDAYA	SARA	BATAS WILAYAH	HANKAM		
1	Kota Mataram	-	-	-	-	-	-	-	Vertikal = 0 Horizontal = 7 Sumber: Komititas Jejaring Kab/Kota se- NTB POLDA NTB
2	Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	
3	Lombok Tengah	-	-	-	-	-	-	1	
4	Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	-	
5	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	
6	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	
7	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	
8	Dompu	-	-	-	-	-	-	-	
9	Bima	-	-	3	-	-	-	3	
10	Kota Bima	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah		-	-	3	-	-	-	3	

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2020

b. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada Satuan Polisi Pamong Praja, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2020 adalah : 1) Persentase penanganan pelanggaran produk hukum daerah; dan 2) Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibmas. Target dan capaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-66 Target dan Capaian Indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah	Persentase penanganan pelanggaran produk hukum daerah	100%	100%
2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran trantibmas	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2020

Terjaminnya rasa aman di masyarakat akan menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat dapat melakukan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Rasa aman yang terjamin di masyarakat dalam skala luas akan menciptakan stabilitas daerah sebagai salah satu prasyarat bagi berjalannya dengan baik program-program pembangunan oleh pemerintahan. Capaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Penanganan pelanggaran Produk Hukum Daerah pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebanyak 8 jenis dengan total kasus sebanyak 11 kasus dengan jumlah pelanggar sebanyak 1.700 orang. Seluruh pelanggaran yang terjadi telah ditangani sehingga dapat digambarkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah tinggi. Data penegakan pelanggaran Perda yang dilaksanakan pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-67 Penegakan Yang Dilaksanakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Provinsi NTB Tahun 2020

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
1.	Peraturan Gubernur NTB nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Ke 2 Peraturan Gubernur NTB No 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemprov. NTB	1. Tidak apel pagi (TAP)	138 pelanggar	Perangkat Daerah Lingkup Pemprov. NTB	-	-	Melakukan teguran lisan kepada penanggung jawab kepegawaian pada Perangkat Daerah	171 orang	Dilaksanakan pada : 1. 8 Januari 2020 2. 9 Januari 2020 3. 22 Mei 2020 4. 6 Juli 2020 5. 25 Agustus 2020 6. 1 Sept 2020 7. 2 Sept 2020 8. 3 Sept 2020 9. 20 Oktober 2020 10. 20 Oktober 2020 11. 20 Oktober 2020
	2. Tidak masuk kantor tanpa keterangan (TK)	33 pelanggar							
Jumlah Penanganan Pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017		2 kasus, 171 pelanggar, 1 jenis tindakan non yustisi							

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
2.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)	Pedagang tembakau iris kemasan yang tidak melekatkan pita cukai	1 pelanggar	Pasar Gerung Lombok Barat	-	-	1. Membuatkan BAP 2. Membuatkan surat pernyataan untuk tidak menjual tembakau kemasan yg tidak menggunakan pita cukai	1 orang	Dilaksanakan 30 s/ 31 Maret 2020.
			1 pelanggar (Toko Anah)	Pasar Pemenang Timur Lombok Utara	-	-	1. Membuatkan BAP 2. Membuatkan surat pernyataan untuk tidak menjual tembakau kemasan yang tidak menggunakan pita cukai	1 pelanggar	
			2 pelanggar	Lombok Tengah : a. Pasar Jelojok b. Pasar Renteng	-	-	1. Membuatkan BAP	1 orang di Pasar Jelojok	Dilaksanakan 15 s/d 16 April 2020
					-	-	2. Membuatkan surat pernyataan untuk tidak menjual tembakau kemasan yg tidak menggunakan pita cukai	1 orang di Pasar Renteng	
						3. Menyita barang bukti	5 bungkus pasar Jelojok merk dua mawar 5 bungkus pasar Renteng merk Kasturi pohon kelapa		
Jumlah Penanganan Pelanggaran Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2010			1 kasus, 4 pelanggar, 3 jenis tindakan non yustisi dan menyita barang bukti 20 bungkus						
3.	Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	1. Belum tersedia tempat khusus merokok sesuai ketentuan pasal 3 dan 4 Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015.	2 kantor	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Provinsi NTB	-	-	Melakukan sosialisasi penerapan Perda NTB Nomor 3 Tahun 2014 dan Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015, yaitu : - Kepala Dinas wajib menyediakan tempat khusus merokok sesuai pasal 3 dan 4 Pergub Prov. NTB Nomor 17 Tahun 2015. - Kepala Dinas wajib memasang tanda/petunjuk di tempat khusus merokok. - Melarang merokok di sembarang tempat	2 lokasi	Sosialisasi Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tempat Khusus Merokok, dilaksanakan Senin, 6 Juli 2020
4.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tempat Khusus Merokok	2. Belum semua tempat terpasang tanda/petunjuk di tempat khusus merokok. 3. Belum dipatuhi larangan merokok di sembarang tempat		b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Provinsi NTB					
Penanganan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2015			3 kasus, 2 Pelanggar, 3 jenis tindakan non yustisi (sosialisasi)						
5.	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Susu kaleng dalam keadaan penyok/rusak tidak layak jual	1 pelanggar	Niaga Sriwijaya Supermarket Mataram	-	-	Memerintahkan untuk mereturn (mengembalikan) barang ke produsen untuk ditukarkan.	8 kaleng	Dilaksanakan oleh Tim Penertiban dan Pengawasan Bahan makanan berbahaya dan kadaluarsa, yaitu : 1. Dinas Perdagangan NTB 1. Satpol PP Prov. NTB 2. BP POM Mataram
			1 pelanggar	Ruby Supermarket Mataram	-	-		20 kaleng	
			1 pelanggar	Jembatan Baru Mataram	-	-		15 kaleng	
			1 pelanggar	MGM Mataram	-	-		6 kaleng	

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KETERANGAN
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
			1 pelanggar	Giant Store Mataram	-	-		4 kaleng	3. Reskrimsus Polda NTB
			1 pelanggar	Toko Cahaya Baru Ampenan	-	-		9 kaleng	4. Reskrimum Polda NTB
			1 pelanggar	Lotte supermarket Mataram	-	-		3 kaleng	5. Polresta Mataram Dimulai 14 September sampai dengan 31 Desember 2020 .
		Makanan yang kadaluarsa tidak boleh diperjual belikan (susu shaset dalam keadaan kadaluarsa)	1 pelanggar	MGM Mataram	-	-	Memusnahkan barang barang sitaan dengan cara ditumpahkan di dalam wadah ember yang berisi air.	36 shaset	
UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen			2 kasus, 8 Pelanggar, 2 jenis tindakan non yustisi, 36 shaset barang yang dimusnahkan, dan 65 kaleng barang direturn (dikembalikan)						
6.	- Peraturan Daerah NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. - Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19	1. Tidak menggunakan masker ditempat/fasilitas umum	1.485 pelanggar	Kota Mataram dan sekitar	1. Menerapkan sanksi denda sebesar Rp. 100.000,- 2. Menerapkan sanksi denda Rp. 200.000,- bagi ASN 3. Menerapkan sanksi sosial dalam bentuk membersihkan fasilitas umum	406 orang 16 orang 1.063 orang			- Pelaksanaan, 14 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) - Memberikan masker bagi yang tidak menggunakan masker
7.		2. Pengelola tempat usaha melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat usaha sesuai dengan Protokol Penanggulangan COVID-19	1 pelanggar	Kabupaten Lombok Timur	-	-	Menerapkan sanksi denda sebesar Rp. 400.000,-	1 orang	- Tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker pada senam Zumba di Lombok Timur)
Jumlah Penanganan Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur NTB Nomor 50 Tahun 2020			2 kasus, 1.486 pelanggar dengan 4 jenis tindakan yustisi,						
8.	Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid-19	Tidak menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain sesuai Protokol Kesehatan Covid-19	29 pelanggar	Lokasi di Kota Mataram dan sekitar	-	-	1. Memberikan arahan untuk tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain dalam setiap aktifitas penerapan. 2. Mengingatkan agar tetap menerapkan protokol covid-19 sesuai Pergub NTB No. 31 Tahun 2020	29 orang	- Pelaksanaan, 14 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020). - Memberikan masker bagi yang tidak menggunakan masker
Jumlah Penanganan Peraturan Gubernur NTB Nomor 31 Tahun 2020			1 kasus, 29 pelanggar, 2 jenis tindakan non Yustisi						
Total aturan yang ditegakkan			8 jenis						
Total kasus			11 kasus						
Total pelanggar			1.700 pelanggar						
Total tindakan non yustisi			11 kali						
Total tindakan yustisi			4 kali						

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2020

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas adalah merupakan jumlah pelanggaran K3 (Kenyamanan, Ketertiban dan Keindahan) yang terjadi pada tahun 2020 mencapai 100%. Pada tahun 2020 jumlah aturan yang ditegakkan sebanyak 10 jenis, jumlah kasus sebanyak 7 kasus, dengan jumlah Pelanggar sebanyak 348 pelanggar. Seluruh pelanggaran yang terjadi dapat diselesaikan sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Penertiban yang dilaksanakan pada Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-68 Data Penertiban Bidang Tibumtran Provinsi NTB Tahun 2020

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KET.
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
1.	Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pecegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang	Tindakan Asusila	Nihil	- Lombok Barat: 1 kali - Mataram: 1 kali	-	-	-	-	Maret s.d April 2020
2.	Perda No. 5 Tahun 2012 Ttg Pemanfaatan Jalan	a. PKL berjualan diatas bahu jalan (Trotoar)	61 Pedagang	- Mataram : 40 PKL - Kab. Lobar : 21 PKL	-	-	- Teguran lisan - Teguran lisan	40 Orang 21 Orang	Januari s.d Desember 2020
		b. Baliho, spanduk yang melanggar ruang milik jalan	8 Tempat	Mataram	-	-	Menertibkan Baliho/ Spanduk	8 Tempat	
3.	Perda No. 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara-an Pendidikan. Pasal 14 ayat (1), Setiap satuan pendidikan harus meyelenggara-kan pendidikan yang bermutu	Berada di luar sekolah pada jam belajar	64 Pelajar	- Mataram : 6 tempat - Kab. Lobar : 2 tempat	-	-	Meberikan teguran secara tertulis	64 Pelajar	Januari s.d Desember 2020 8 kali pener-tiban
4.	Pergub No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemprov. NTB	Mengunjungi dan Mendatangi Lokasi Hiburan Malam	Nihil	- Lombok Barat: 1 kali - Mataram: 1 kali	-	-	-	-	Maret s.d April 2020
5.	a. Pergub No. 22 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penanganan Covid Pemprov. NTB b. Pergub no. 31 Tahun 2020 Tentang Penanggulang-an dan Penanganan covid-19 c. Pergub no. 42 Tahun 2020 tentang Pergub no.	Masyarakat tidak menggunakan masker	215 Orang	- Mataram : 14 kali	-	-	- Memberi-kan sanksi disiplin - Membagi-kan masker	- Mataram : 150 orang - Kab. Lobar : 65 orang	April 2020 s.d Sept 2020
				- Kab. Lobar : 4 kali					

NO	DASAR PELAKSANAAN	PELANGGARAN		LOKASI	TINDAKAN				KET.
		JENIS	JUMLAH		YUSTISI		NON YUSTISI		
					JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH	
	31 Tahun 2020 Tentang Penanggulang-an dan Penanganan covid-19			- Kab. Lobar : 4 kali				- Kab. Lobar : 65 Orang	
6.	Perda No. 11 Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah	- Penunggakan Sewa Tanah/Bangunan Milik Pemda Pemprov. NTB - Penempatan tanah/bangunan tanpa SIUP	12 Kali	Mataram	-	-	Menertibkan tanah/bangunan milik Pemda Pemprov. NTB	12 Kali	Januari s.d Desember 2020
7.	Perda No. 12 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara-an Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	Unjuk Rasa (Demonstrasi)	20 Kali	Kantor Gubernur NTB	-	-	Menertibkan pengunjung rasa	20 Kali	Januari s.d Desember 2020
Total aturan yang ditegakkan		10 jenis							
Total kasus		7 kasus							
Total pelanggar		348 pelanggar							
Total tindakan non yustisi		6 Kali							
Total Pengamanan Demonstrasi		20 Kali							

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2020

c. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2020 salah satunya diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1) Tingkat kapasitas penanggulangan bencana, dan 2) Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana). Target dan capaian indikator bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-69 Capaian Indikator Kinerja Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Mengurangi Daerah Rawan Bencana	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	0,59	0,63
2	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana	Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana)	20 Desa 16,36%	2 Desa 12,21%

Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja indikator Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana pada tahun 2020 telah mencapai 0,63, melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2020 sebesar 0,59. Kemudian indikator Cakupan Desa Tangguh Bencana (Destana) tahun 2020 capaiannya hanya sebesar 12,21 persen (tambahan 2

Desa) atau secara akumulatif sebanyak 41 Desa Tangguh Bencana, belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2020 yakni sebesar 16,36 persen (20 Desa), hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi: a) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan dan pemenuhan masyarakat dan hak pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dan siap pakai; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Mengantisipasi kondisi tersebut Pemerintah Daerah NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, pemerintah provinsi NTB membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah yang mencakup strategi preventif, tanggap darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi. Untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ekstrem seperti kondisi alam yang saat ini tidak dapat diprediksi dan berubah dalam waktu cepat akibat pemanasan global, menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD agar jatuhnya korban jiwa dapat dihindari.

Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Program Destana sendiri merupakan rangkaian kegiatan berupa lokakarya mengenali lebih baik desanya sendiri, mengembangkan kajian risiko, menyusun rencana-rencana Tindakan mengurangi risiko bencana, sosialisasi,

musyawarah, kunjungan verifikasi dilapangan, pembangunan mitigasi bencana, dan latihan peningkatan keterampilan-keterampilan teknis tertentu. Sumber daya pendukung pelaksanaannya dapat berasal dari inisiatif masyarakat, Alokasi Dana Desa, APBD, APBN, lembaga non pemerintah, lembaga asing atau swasta.

Sampai dengan tahun 2020, melalui Program Destana, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk sebanyak 41 Desa Tangguh Bencana sejak diinisiasi pada tahun 2015, berikut adalah daftar Desa Tangguh Bencana yang telah dibentuk:

- a. Tahun 2015
 1. Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
 2. Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah
 3. Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
 4. Kelurahan Kaijawa, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
 5. Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
 6. Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima
 7. Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Punda, Kota Bima
- b. Tahun 2016
 1. Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
 2. Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
 3. Desa Lenting, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur
 4. Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat
 5. Desa Pelat, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa
- c. Tahun 2017
 1. Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
 2. Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur
 3. Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
 4. Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima
 5. Kelurahan Tiwuh Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah
 6. Desa Candi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat
 7. Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
 8. Desa Mereje, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
 9. Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat
 10. Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat
- d. Tahun 2018
 1. Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima
 2. Raba Desa Rite Kota Bima
 3. Kelurahan Panggah, Kecamatan Punda, Kota Bima
 4. Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat
 5. Desa Seteluk Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat

6. Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
 7. Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah
 8. Desa Badrain, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat
 9. Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara
- e. Tahun 2019
1. Desa Lohan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara
 2. Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara
 3. Desa Tempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
 4. Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 5. Desa Sembalun Lumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 6. Desa Sajang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur
 7. Desa Sambu Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara
 8. Desa Ganggalang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara
- f. Tahun 2020
1. Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa
 2. Desa Labuan Badas, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa

Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya



Gambar 2- 12 Kejadian Bencana Tahun 2020

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB menanggulangi bencana, antara lain:

- Memberikan bantuan ketika dan pasca bencana;
- Pemulihan mental korban bencana;
- Melakukan Koordinasi penanggulangan bencana dengan instansi terkait;
- Pembuatan rekomendasi status bahaya gunung berapi dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Geologi Kementerian ESDM;
- Rekomendasi evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang diperlukan saat kejadian berdasarkan kajian teknis;
- Penanganan masalah strategis cepat tanggap darurat;
- Pembangunan sarana dan prasarana penampungan anak terlantar;
- Bantuan bahan bangunan perbaikan rumah masyarakat pascabencana.

Status Bencana

Kewenangan Penetapan "Status Bencana" berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Pemerintah Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan status bencana dilakukan atas rekomendasi BNPB/BPBD. Status bencana meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. BPBD sebagai coordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.



Gambar 2- 13Bantuan Penanggulangan Bencana

Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Provinsi NTB dikategorikan dalam status bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganannya dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Terbitnya Keputusan Gubernur NTB tentang status Transisi Darurat ke Pemulihan antara lain:

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360 – 298 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Maret 2020;
2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360 – 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Maret 2020;
3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360-363 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 3 April 2020;
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360 – 405 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 April 2020;
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360- 441 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 April 2020;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360 – 522 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Mei 2020;
7. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360-634 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 13 Agustus 2020;
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360 – 901 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung di Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Desember 2020;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 360-922 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 29 Desember 2020;

COVID-19

KEWASPADAAN COVID-19 BERDASARKAN KAB./KOTA DI PROV. NTB
(UPDATE : 31 DESEMBER 2020, JAM : 17.00 WITA)

NO	KABUPATEN	PELAKU PERJALANAN			KONTAK ERAT			KASUS SUSPEK				KONFIRMASI				
		MASIH KARANTINA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH KARANTINA	DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	PROBABLE		DISCARDED	JUMLAH	MASIH ISOLASI	SEMBUH	MENINGGAL	JUMLAH
									JUMLAH	MENINGGAL						
1	Kota Mataram	-	2,582	2,582	65	8,424	8,489	8	-	-	2,074	2,082	95	1,241	94	1,430
2	Kab. Lombok Barat	8	4,324	4,332	236	5,834	6,070	34	-	-	3,045	3,079	23	689	50	762
3	Kab. Lombok Tengah	-	11,720	11,720	70	4,564	4,634	12	1	-	918	931	23	260	18	301
4	Kab. Lombok Utara	-	1,079	1,079	4	1,029	1,033	-	-	-	754	754	3	127	5	135
5	Kab. Lombok Timur	78	18,107	18,185	664	5,019	5,683	37	65	-	3,814	3,916	49	636	27	712
6	Kab. Sumbawa Barat	688	12,775	13,463	202	1,141	1,343	1	2	-	194	197	11	164	3	178
7	Kab. Sumbawa	-	10,674	10,674	77	2,752	2,829	37	-	-	969	1,006	212	452	47	711
8	Kab. Dompu	1,518	18,484	20,002	162	4,011	4,173	50	-	-	804	854	43	360	16	419
9	Kab. Bima	620	11,723	12,343	758	4,562	5,320	13	-	-	1,013	1,026	74	270	11	355
10	Kota Bima	4	3,436	3,440	127	4,997	5,124	9	-	-	272	281	91	429	17	537
11	WNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16	1	4	-	5
12	Luar Provinsi	-	10,368	10,368	-	-	-	-	-	-	1	1	88	92	-	180
	JUMLAH	2,916	105,272	108,188	2,365	42,333	44,698	201	68	-	13,874	14,143	713	4,724	288	5,725



Update Data COVID-19 di Provinsi NTB per 31 Desember 2020 di laporkan bahwa 5.725 pasien konfirmasi, 713 konfirmasi masih isolasi, 4.724 pasien sembuh, 288 pasien meninggal, 201 pasien suspek masih isolasi, 2.365 kontak erat masih karantina, 2.916 pelaku perjalanan masih karantina.

Upaya yang telah dilakukan BPBD dalam mengurangi risiko bencana selama tahun 2020 adalah :

1. Pembangunan prasarana Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa pembangunan embung dan DAM penahan serta Terasering di 11 lokasi di Kabupaten Bima yaitu di Desa Entori Kec. Wawo sebanyak 4 paket, di Desa Maria Kec. Wawo sebanyak 3 Paket, di Desa Riamau Kec. Wawo 1 paket, di Desa Pesa Kec. Wawo sebanyak 3 paket;
2. Peningkatan status Desa Tangguh Bencana (Destana) dari pratama ke madya di 2 lokasi Kab. Sumbawa
3. Upaya penegakan hukum untuk menciptakan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protocol kesehatan COVID-19.
4. Pembentukansatuantugas COVID-19.
5. Pendistribusian dan pembagian masker kepada OPD yang membutuhkan dan masyarakat (data terlampir).
6. Pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) dan Hand sanitizer kepada OPD yang membutuhkan (data terlampir).
7. Penyemprotan Desinfektan di berbagai lokasi (data terlampir).
8. Terciptanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara daerah Kab/Kota, Provinsi, dan Pusat.

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2020 telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana antara lain:

1. Menerapkan Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) gempa bumi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang terdampak, yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana dan masuk dalam misi 1 RPJMD 2019-2023;
2. Penyebaran brosur dan leaflet serta pemasangan papan informasi/baliho tentang tata cara evakuasi dan perlindungan dari bahaya bencana;
3. Simulasi penyelamatan dan evakuasi diri dari terjangan tsunami di daerah sepanjang pesisir selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia;
4. Pemetaan lokasi evakuasi pada daerah rawan bencana;
5. Penyebarluasan informasi bencana geologi dan prosedur mitigasinya, berupa baliho dan papan informasi di lokasi rawan bencana gunung berapi, lokasi rawan gempa dan berpotensi tsunami dan beberapa lokasi yang teridentifikasi rawan bencana gerakan tanah;
6. Monitoring dan Evaluasi Rawan Bencana;

7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, dan perdagangan perempuan dan anak;
8. Pengendalian dampak perubahan iklim;
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;
10. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi;
11. Perlindungan mata air dengan vegetasi/civil teknis;
12. Sosialisasi dan mitigasi bencana alam geologi di kabupaten/kota se-NTB;
13. Pendataan daerah berpotensi terkena landasan tsunami 21 lokasi di Pulau Lombok dan 32 lokasi di Pulau Sumbawa;
14. Pemasangan baliho/papan informasi cara menyelamatkan dan mengevakuasi diri dari :
 - Bahaya letusan gunung berapi di 3 lokasi.
 - Bahaya gempa bumi di 7 lokasi
 - Bahaya tanah longsor di 3 lokasi.
15. Memperbanyak iklan layanan masyarakat pada berbagai masmedia tentang tata cara menghadapi bencana, terutama antisipasi dan evakuasi diri;
16. Dana siap pakai penyelamatan (on call);
17. Belanja Tidak Terduga (BTT);
18. Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
19. Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB);
20. Penyiapan bupperstock pada gudang bencana kabupaten/kota;
21. Pembangunan Kolam Tandon Air (KTA) di Kabupaten Bima dan kota Bima di 36 lokasi;
22. Pembuatan sumur bor untuk penanggulangan bencana kekeringan sebanyak 15 titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
23. Penyebarluasan informasi potensi dan mitigasi bencana melalui <http://www.bpdntb.info/>.

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Berdasarkan catatan yang ada bencana alam dan non alam yang melanda Provinsi NTB dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana umum adalah bencana banjir bandang, puting beliung, cuaca buruk/gelombang pasang/rob, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kebakaran pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, kecelakaantransportasidarat, laut, udara dan konflik sosial.

Penduduk beberapa kawasan di Provinsi NTB harus mewaspadaai datangnya bencana alam, yang termasuk rawan bencana untuk daerah NTB, antara lain:

- a. Bencana Tsunami dan gelombang pasang di sepanjang Pantai Selatan dan Utara. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir;
- b. Bencana Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau guncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energy secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik di sekitar Gunung Api Rinjani, Tambora, dan Sangeang api. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuh batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di NTB banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Fisika Mataram merilis kaleidoskop.
- c. Bencana tanah longsor di sekitar bantaran sungai dan tebing. Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan. Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang, beberapa hal yang mendesak untuk tetap dilakukan adalah normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang.
- d. Bencana Siklon Angin Tropis. Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah. Adapun daerah di NTB yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung adalah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kabupaten Dompu.
- e. Bencana Kekeringan, dengan 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut:
 - Kering Langka Terbatas, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter/hari/ orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air 100 s/d 500 meter;

- Kering Langka, dengan criteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air 500 meter s/d 3 kilometer;
- Kering Kritis, dengan criteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer;
- Kekeringan terjadi diseluruh kabupaten/kota di NTB puncaknya pada bulan September tahun 2020

6. Bidang Sosial

Gambaran umum capaian kinerja bidang sosial tahun 2019 seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2-70 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Pemberian Jaminan Sosial bagi Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial	100	100
		Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Ditangani	4,64	27,22

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2020

Penanganan PMKS dilakukan melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem dalam panti dan sistem luar panti. Sistem dalam panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu Panti Sosial, dimana UPTD Dinas Sosial ada 8 (delapan) Panti Sosial milik pemerintah daerah yang menangani permasalahan anak, permasalahan lansia dan permasalahan penyakit sosial lainnya seperti tuna sosial, gelandangan pengemis dan eks psikotik. Sistem dalam panti ini didukung oleh anggaran APBD Provinsi. Selain itu ada juga yang dilaksanakan oleh panti milik masyarakat yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ikut bekerjasama didalam menangani permasalahan sosial di Nusa Tenggara Barat.

Penanganan PMKS melalui sistem luar panti, Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan teknis manajemen usaha dan pemberian bantuan sosial. Sistem luar panti ini didukung oleh anggaran APBN Dekonsentrasi, APBN Pusat dan Tugas Perbantuan. Dalam penanganan PMKS Dinas Sosial Provinsi NTB tidak bergerak sendiri tapi bekerjasama dan didukung oleh Lembaga mitra seperti Yayasan, LSM dan CSR. Adapun jenis dan jumlah PMKS yang telah mendapat pelayanan selama tahun 2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-71 PMKS yang diberikan Pelayanan

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG DIBERIKAN PELAYANAN																	
				APBD PROV		%		APBD KAB/KOTA		%		APBN		%		LEMBAGA MITRA		%		TOTAL	
1	Anak Balita Terlantar	2.308	Jiwa		Jiwa			6	Jiwa	0,26									6	Jiwa	0,26
2	Anak Terlantar	96.333	Jiwa	230	Jiwa	0,24	1.240	Jiwa	1,29	415	Jiwa	0,43						1.885	Jiwa	1,96	
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	859	Jiwa		Jiwa		166	Jiwa	19,32		Jiwa							166	Jiwa	19,32	
4	Anak Jalanan	3.286	Jiwa		Jiwa		15	Jiwa	0,46		Jiwa							15	Jiwa	0,46	
5	Anak Dengan Kedisabilitas	4.830	Jiwa		Jiwa		13	Jiwa	0,27		Jiwa							13	Jiwa	0,27	
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	471	Jiwa		Jiwa		10	Jiwa	2,12		Jiwa							10	Jiwa	2,12	
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	49	Jiwa		Jiwa		43	Jiwa	87,76		Jiwa							43	Jiwa	87,76	
8	Lanjut Usia Terlantar	49.626	Jiwa	133	Jiwa	0,27	1.604	Jiwa	3,23	2.560	Jiwa	5,16						4.297	Jiwa	8,66	
9	Penyandang Disabilitas	27.705	Jiwa	264	Jiwa	0,95	1.054	Jiwa	3,80	803	Jiwa	2,90	6	Jiwa	0,02			2.127	Jiwa	7,68	
10	Tuna Susila	-	Jiwa	72	Jiwa	100	4	Jiwa			Jiwa							76	Jiwa		
11	Gelandangan	94	Jiwa	75	Jiwa	79,79	18	Jiwa	19,15		Jiwa							93	Jiwa	98,94	
12	Pengemis	-	Jiwa		Jiwa		2	Jiwa			Jiwa							2	Jiwa		
13	Pemulung	310	Jiwa		Jiwa	0,00		Jiwa	0,00		Jiwa								Jiwa		
14	Kelompok Minoritas	55	Jiwa		Jiwa	0,00	10	Jiwa	18,18		Jiwa							10	Jiwa	18,18	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	6.430	Jiwa		Jiwa	0,00	32	Jiwa	0,50		Jiwa							32	Jiwa	0,50	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	212	Jiwa		Jiwa			Jiwa	0,00		Jiwa								Jiwa		
17	Korban Penyalahgunaan Napza	551	Jiwa		Jiwa		1	Jiwa	0,18		Jiwa							1	Jiwa	0,18	
18	Korban Trafficking	-	Jiwa		Jiwa		142	Jiwa	100		Jiwa							142	Jiwa	100	
19	Korban Tindak Kekerasan	3.561	Jiwa	469	Jiwa	13,17	25	Jiwa	0,70		Jiwa		67	Jiwa	1,88			561	Jiwa	15,75	
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	5.798	Jiwa	79	Jiwa	1,36	190	Jiwa	3,28		Jiwa							269	Jiwa	4,64	
21	Korban Bencana Alam		KK	20.454	KK	100	571	KK	100	9.142	KK	100						30.167	KK	100	
22	Korban Bencana Sosial		KK		KK		475	KK			KK							475	KK	100	
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	105.140	Jiwa		Jiwa		31	Jiwa	0,03		Jiwa							31	Jiwa	0,03	
24	Keluarga Fakir Miskin	344.018	KK	517	KK	0,15	31.498	KK	9,16	42.838	KK	12,45	62.702	KK	18,23			137.555	KK	39,98	
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	793	KK		KK		43	KK	5,42		KK							43	KK	5,42	
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2.446	KK		KK		78	KK	3,19	153	KK	6,26						231	KK	9,44	
	JUMLAH	654.875		22.293		3,40	37.271		5,69	55.911		8,54	62.775		9,59			178.250		27,22	

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2020

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Bidang Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sejahtera dan Mandiri”. Program dan kegiatan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja formal dan informal dan persentase penurunan kasus hubungan industrial yang didaftarkan.

Tabel 2-72 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,39	3,28	3,35	4,22
2	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja formal dan informal (%)	96,58	96,58	96,60	95,67
3	Persentase penurunan kasus hubungan industrial yang didaftarkan (%)	90	100	85,00	101,70

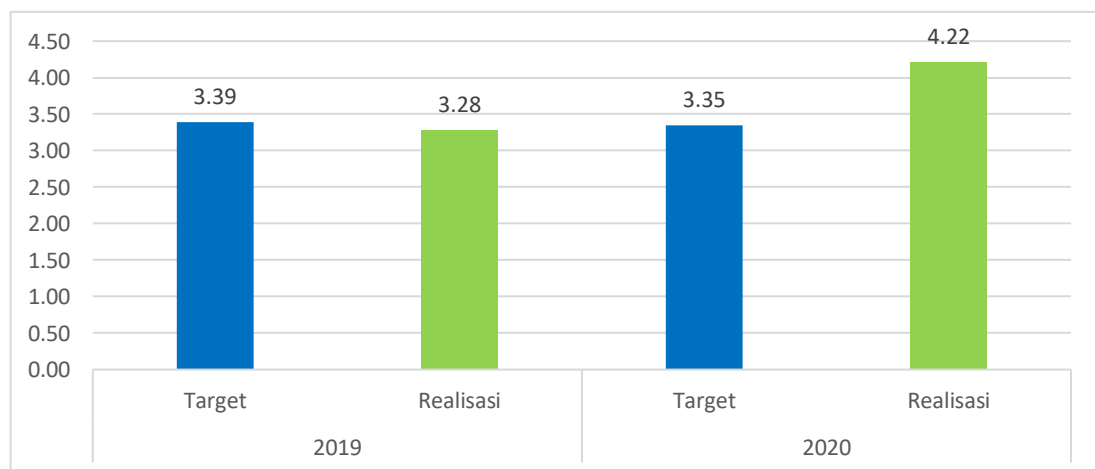
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa TPT tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019. Demikian pula dengan persentase peningkatan

penyerapan tenaga kerja formal dan informal mengalami penurunan di tahun 2020 dibandingkan serapan tenaga kerja tahun 2019. Jumlah kasus hubungan industrial tahun 2020 mengalami kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2019. Capaian ketiga indikator diatas dipengaruhi kuat oleh munculnya pandemic covid-19 yang berdampak pada sector ekonomi dan tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan semua kegiatan ekonomi mengalami tekanan sehingga menyebabkan naiknya angka pengangguran di Provinsi NTB. Adanya pandemi covid 19 juga berpengaruh pada operasional perusahaan/tempat usaha yang banyak merumahkan atau melakukan PHK terhadap tenaga kerjanya. Tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK ini akan menambah jumlah TPT.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 2,69 juta orang, naik sekitar 81,77 ribu orang atau 3,14 persen dibandingkan Agustus 2019. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,98 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 menjadi 70,45 persen.



Sumber: BPS NTB, 2020

Gambar 2- 14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2020

Tahun 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 1.278 orang PMI bermasalah, jika dibandingkan dengan jumlah PMI bermasalah yang ditangani tahun 2018 dan 2019, maka tahun 2020 jumlah PMI bermasalah yang ditangani mengalami penurunan.

Tabel 2-73 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB Tahun 2018-2020 Menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PMI BERMASALAH								
		2018			2019			2020		
		LAKI	PRMPN	JLH	LAKI	PRMP	JMH	LAKI	PRMP	JMH
1.	Kota Mataram	14	9	23	53	0	53	10	9	19
2.	Lombok Barat	197	57	254	294	33	327	138	35	173
3.	LombokTengah	741	206	947	475	74	549	251	99	350
4.	Lombok Timur	972	310	1.282	588	71	659	261	75	336
5.	Lombok Utara	76	31	107	230	23	253	67	20	87
6.	Sumbawa	72	20	92	32	25	57	18	59	77
7.	Sumbawa Barat	29	2	31	12	9	21	4	27	31
8.	Dompu	56	17	73	23	22	45	15	57	72
9.	Bima	81	30	111	42	28	70	31	81	116
10.	Kota Bima	3	0	3	4	7	11	5	12	17
Jumlah		2.241	682	2.923	1.753	292	2.045	800	478	1.278

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2020

Penempatan PMI di luar negeri memberikan dampak ekonomi yaitu adanya penerimaan remittance oleh pemerintah Provinsi NTB yang dikirim melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos. Perkembangan penerimaan remittance yang diterima pemerintah Provinsi NTB tahun 2018-2020 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-74 Rekapitulasi Data Remittance PMI Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO.	NEGARA TUJUAN	REMITTANCE		
		2018	2019	2020
1.	Saudi Arabia	184.969.186.516,59	124.167.424.285,08	151.353.724.016,77
2.	Uni Emirat Arab	14.805.711.657,17	21.104.482.040,33	37.397.727.263,94
3.	Kuwait	3.716.042.542,00	55.790.375,00	129.982.219,00
4.	Qatar	2.939.069.983,01	1.657.694.756,00	941.760.720,00
5.	Jordan	0	0	0,00
6.	Korea	487.346.325,52	240.223.316,00	1.639.184.364,00
7.	Malaysia	11.083.680.795,15	5.334.555.024,56	3.589.982.002,33
8.	Brunei Darussalam	0	0	0,00
9.	Philipina	20.570.680,00	3.246.720,00	0,00
10.	Hongkong	686.556.546,61	408.474.047,00	10.423.485.120,00
11.	Jepang/Tokyo	5.113.238.030,29	10.547.303.650,47	5.531.632.254,11
12.	Singapura	1.489.231.574,98	1.300.535.087,68	1.323.242.438,91
13.	Negara Lain	121.765.071.537,34	97.348.777.348,87	95.370.629.502,04
14.	Weastern union (kantor pos dan pegadaian)	967.094.108.462,00	956.205.800.760	808.717.453.213,00
Jumlah		1.556.142.543.533,21	1.314.169.814.650,68	1.116.418.803.073,73

Sumber : BI, Tahun 2018-2020

Pemerintah Provinsi NTB tahun 2020 melakukan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan sasaran untuk meningkatkan perlindungan kepada tenaga kerja. Adapun indikator dari program tersebut adalah persentase penurunan tenaga kerja yang bermasalah. Dari 60 kasus yang diperselisihkan oleh perusahaan dan pekerja tahun 2020, dapat diselesaikan melalui Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 25 kasus, penyelesaian dengan Bipartit sebanyak 15 kasus dan penyelesaian dengan

anjuan sebanyak 7 kasus dan 31 kasus masih dalam proses penyelesaian di kabupaten/kota.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020 diselenggarakan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD NTB 2019-2023 khususnya misi keenam “NTB Aman dan Berkah” dengan salah satu indikatornya adalah: Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan. Selain indikator tersebut, masih ada indikator kinerja lain yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak, dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan. Adapun capaian indikator kinerja tersebut diatas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-75 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	91,08	90,40	90,43	NA
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	60,43	51,91	57,81	NA
3	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan (%)	18,60	26,50	17,93	NA
4	Cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak (%)	40,0	40,0	40,0	40,0
5	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan (%)	56,74	100	62,41	100

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2020

Masalah gender merupakan masalah global dan menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam rangka pengarusutamaan gender, DP3AP2KB Provinsi NTB tahun 2020 telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan indikator: IPG, IDG, persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan, cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak, dan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa, pada tahun 2020 untuk capaian indikator IPG, IDG dan persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan datanya belum tersedia, sehingga belum bisa diketahui tingkat capaian targetnya. Capaian indikator cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak tahun 2020 sebesar 40% sama dengan target, sementara capaian indikator

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan tahun 2020 sebesar 100 persen, melampaui target (62,41%), hal ini disebabkan karena jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui target dan semua laporan tersebut telah tertangani.

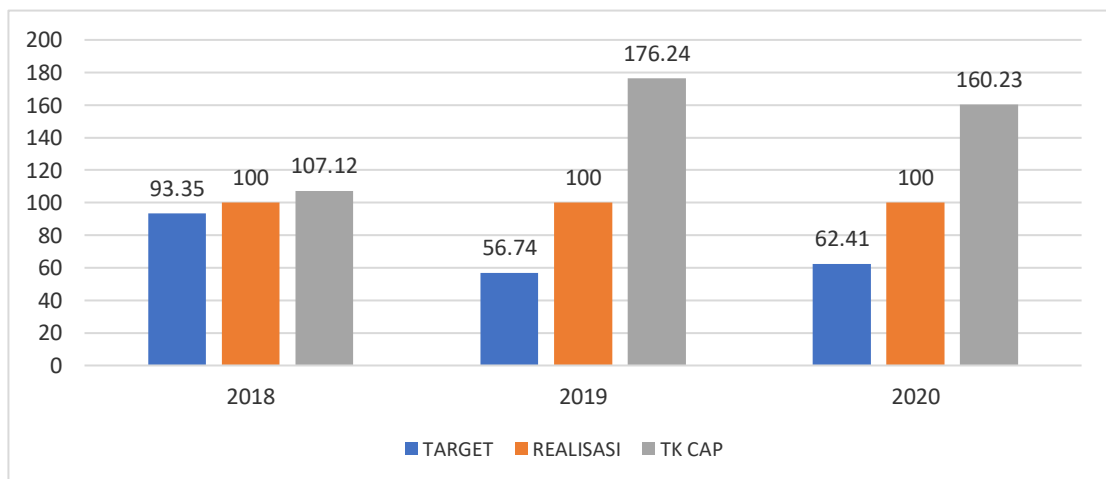
Capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan tahun 2020 adalah 100 persen dari target 62,41 persen, hal ini berarti bahwa semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dapat ditangani. Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2020 sebanyak 845 kasus dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2-76 Data Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa Dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	DATA KASUS	JUMLAH	PERSENTASE
1	Perempuan Dewasa	363	42%
2	Anak	482	58%
	JUMLAH	845	100%

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2020

Cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2018-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2020

Gambar 2-15 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Tahun 2018 - 2020

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kabupaten/kota layak anak merupakan salah satu Program

Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Program unggulan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam rangka mengatasi permasalahan anak untuk mewujudkan masyarakat madani (NTB Aman dan Berkah).

3. Bidang Pangan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1) Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan, 2) Capaian Coefisien Variasi (CV) komoditas pangan pokok strategis, dan 3) Tingkat Konsumsi Protein. Target dan capaian indikator bidang urusan pangan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-77 Target dan Capaian Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Tersedianya komoditas pangan strategis	Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan (%)	100	395,67
2	Stabilnya harga komoditas pangan pokok strategis	Capaian Coefisien Variasi (CV) komoditas pangan pokok strategis	<10	6,16
3	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang aman dan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Tingkat Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)	69,93	74,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2020

Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan

Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan merupakan alat ukur untuk mengetahui ketersediaan pangan strategis. Untuk menghitung rasio ketersediaan terhadap kebutuhan pangan, dibutuhkan data-data seperti produksi, benih, pakan, tercecer, penggunaan industri non pangan, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga. Berdasarkan hasil penghitungan, rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2020 di Nusa Tenggara Barat mencapai 395,67% kategori sangat berhasil melebihi target tahun 2020 sebesar 100%. Perkembangan rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategis tahun 2018-2020 di Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-78 Perkembangan Rasio Ketersediaan terhadap Kebutuhan Pangan Strategis Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	JENIS KOMODITAS	2018			2019			2020*		
		KETER-SEDIAAN (TON)	KEBU-TUHAN (TON)	RASIO	KETER-SEDIAAN (TON)	KEBU-TUHAN (TON)	RASIO	KETER-SEDIAAN (TON)	KEBU-TUHAN (TON)	RASIO
1	Beras	1,471,418	593,321	2.48	1,409,105	599,559	2.35	1,215,278	563,818	2,16
2	Jagung	687,200	7,977	86.15	851,386	7,205	118.17	-	-	-
3	Daging Sapi	26,483	10,525	2.52	27,729	19,544	1.42	18,909	18,324	1,03
4	Daging Ayam	37,793	17,333	2.18	47,057	24,603	1.91	59,906	15,223	3,94
5	Telur Ayam	53,341	40,728	1.31	30,256	29,349	1.03	65,197	25,372	2,57
6	Minyak Goreng	-	-	-	-	-	-	9,782	2,932	3,34
7	Gula Pasir	-	-	-	-	-	-	66,612	35,184	1,89
8	Cabe Rawit	71,580	11,011	6.50	155,623	15,230	10.22	87,427	10,666	8,20
9	Cabe Keriting	11,078	2,127	5.21	17,517	2,132	8.22	11,337	2,819	4,02
10	Bawang Merah	191,161	13,684	13.97	147,530	10,610	13.90	166,909	17,008	9,81
11	Bawang Putih	11,197	7,955	1.41	27,834	7,615	3.66	22,493	8,607	2,61
				13.52			17.87			3,96

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2020

Stabilitas harga pangan tahun 2020 tidak terlepas dari upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan yang secara berkesinambungan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB sejak tahun 2015. Berbagai langkah strategis yang dilaksanakan meliputi: 1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) melalui pemberdayaan lembaga usaha pangan masyarakat Gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI); 2) Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai lembaga yang bertugas untuk membantu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 3) Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagai berikut.

Stok Cadangan Pangan Pemerintah

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya untuk pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65

tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Pada tahun 2020 melalui alokasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diadakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 30 ton beras, namun cadangan pangan tersebut langsung disalurkan dalam rangka meminimalisir dampak Pandemi COVID-19. Perkembangan Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-79 Perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2020

NO	CADANGAN PANGAN	STOK BERAS (KG)
1	Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi	61.579
2	Cadangan Pangan Pemerintah di Kab/Kota	232.624
	Kota Mataram	-
	Lombok Barat	38.304
	Lombok Tengah	54.420
	Lombok Utara	33.010
	Lombok Timur	42.239
	Sumbawa Barat	31.720
	Sumbawa	21.427
	Dompu	-
	Bima	-
	Kota Bima	11.504
3	Cadangan Pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	662.649,39
	Kota Mataram	17.667,00
	Lombok Tengah	111.075,40
	Lombok Barat	6.431,94
	Lombok Timur	34.468,84
	Lombok Utara	31.469,28
	Sumbawa	25.062,84
	Dompu	17.520,66
	Kabupaten Bima	5.397,43
	Kota Bima	392.456,00
	KSB	21.100,00
	Total	956.852,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2020

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pangan diukur dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolute maupun dari pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan

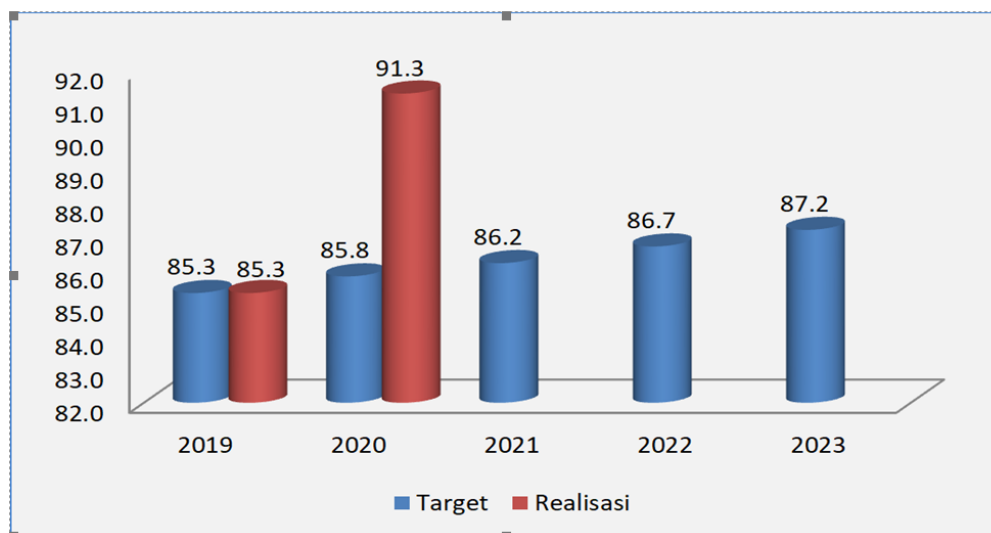
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1) Pola Pangan Harapan Konsumsi dan 2) Pola Pangan Harapan Ketersediaan:

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Analisis PPH Konsumsi menggunakan data Susenas Konsumsi Pangan/ Pengeluaran yang mencakup data rinci tentang seluruh konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan. Data konsumsi/pengeluaran yang digunakan merupakan data konsumsi/pengeluaran Susenas Triwulan I (Bulan Maret). Berdasarkan kesepakatan Widyakara Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional untuk Energi mengalami perubahan dari 2000 menjadi 2150 Kkal/kap/hari dan Protein dari 52 Gram/kap/hari menjadi 57 Gram/kap/hari.

Capaian Skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2020 sebesar 91,3 Point atau 106,78 persen dari target 85,8 Point. Capaian ini bahkan telah melampaui target akhir tahun 2023 sebesar 87,2. Hal ini berarti tingkat konsumsi pangan penduduk NTB terus meningkat dengan kualitas yang semakin membaik. Target dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi NTB Tahun 2019 s.d 2023 disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tahun 2020

Gambar 2-16 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Ketersediaan pangan tersebut harus didasarkan pada standar kecukupan pangan, baik kecukupan energi maupun protein, yang dianjurkan untuk hidup sehat dan produktif. Jumlah pengadaan dan penggunaan pangan di suatu wilayah serta tingkat ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk kandungan zat gizi (kalori dan protein) dapat diketahui melalui Neraca Bahan Makanan (NBM).

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah alat ukur yang dijadikan sebagai Indikator pencapaian tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “terwujudnya ketersediaan pangan yang beragam”. Indikator ini menggambarkan keberagaman ketersediaan pangan yang dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk energi, protein dan lemak. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebesar 91,72 Point atau 97,54% dari target sebesar 93,04 Point. Capaian ini termasuk dalam kriteria Berhasil walaupun masih di bawah target yang ditetapkan. Capaian Skor PPH Ketersediaan berdasarkan target dan capaian tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada garfik di bawah ini.



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2-17 Target dan Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan NTB Tahun 2019 s.d 2023

4. Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pilihan dengan Indikator urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-80 Target dan Capaian Indikator Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI
1	Indeks kualitas air	25.25	50 *
2	indeks kualitas udara	88.53	88.63 *
2	Indeks kualitas tutupan lahan	60.13	NA
4	Neraca pengelolaan sampah	75 %	45.25%

*Dinas LHK 2020 *angka sementara*

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan 5 indikator sasaran yaitu 3 indikator pendukung IKU IKLH: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan serta indikator neraca pengelolaan sampah. dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2-81 Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	TARGET 2020	CAPAIAN 2020
1.	IKLH	56,99	75,16	64,56	57,19	68,05*
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	20,25	74,63	40,23	25,25	50
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,02	87,17	87,40	88,53	88,63
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,27	66,56	65,67	60,13	66,14*
5.	Neraca Pengelolaan Sampah	-	51	60	75	45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

(Data IKLH dirilis resmi oleh Pusat Data dan Informasi KLHK)

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. IKLH menjadi indikator pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep konsep Environmental Performance Index (EPI).

Neraca Pengelolaan Sampah

Tabel 2-82 Capaian Indeks Pengelolaan Sampah (%) Tahun 2018-2019

INDIKATOR	CAPAIAN		
	2019	TARGET 2020	REALISASI 2020
Neraca Pengelolaan Sampah (%)	35	75	45,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bendung, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah, proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi NTB sebesar 2.605,23 ton/hari dan mencapai 2.784,29 ton/hari pada tahun 2025. Jakstranas, Jakstrada Provinsi dan Jakstarada Kabupaten/Kota menargetkan neraca pengelolaan sampah sebesar 30% pengurangan dan 70% penanganan pada tahun 2025.

Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2019 – 2023, mencoba merencanakan akselerasi pencapaian target neraca pengelolaan sampah 2 (dua) tahun lebih maju dari target nasional yaitu 30% pengurangan dan 70% penanganan di tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan Program NTB Zero Waste sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 untuk mencapai Visi NTB Asri dan Lestari.

5. Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah Ratio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk. Target dan capaian indikator bidang urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-83 Capaian Indikator Urusan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang valid	Ratio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	0,82	1,02

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

Selama Tahun 2020, penduduk NTB yang wajib KTP berjumlah 3,774,490 orang, dari jumlah tersebut penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 3,684,469 orang atau rata-rata persentase perekaman di 10 kabupaten/kota se-NTB sebesar 98,85%, masih terdapat 90,021 orang penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan dari 3,684,469 orang yang telah melakukan perekaman, 3,792,345 orang atau 102,93% yang telah dilakukan pencetakan e-KTP. Meskipun target dapat terlampaui, namun evaluasi tetap dilakukan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumen kependudukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti adalah meningkatkan kualitas SDM petugas ASN tersebut. Disamping itu juga diharapkan kabupaten/kota dapat menambah peralatan adminduk dalam bentuk mobil keliling dari dana APBD kabupaten/kota.

Tabel 2-84 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2020

NO	KAB/ KOTA	SMT II 2020		PEREKAMAN		CETAK	
		JML PDDK	WAJIB KTP	KTP	%	KTP	%
01	02	03	04	05	06	07	08
1	KOTA MATARAM	432,451	301,805	305,337	101.17%	303,812	100.66
2	LOMBOK BARAT	722,961	517,736	502,637	97.08%	512,051	98.90
3	LOMBOK UTARA	243,530	180,160	178,298	98.97%	245,186	136.09
4	LOMBOK TENGAH	1,050,725	753,142	735,700	97.68%	821,539	109.08
5	LOMBOK TIMUR	1,304,489	896,173	876,770	97.83%	876,323	97.79
6	SUMBAWA BARAT	141,641	95,788	95,993	100.21%	95,590	99.79
7	SUMBAWA	518,019	379,801	357,746	94.19%	357,600	94.15
8	DOMPU	225,161	163,676	168,401	102.89%	166,724	101.86
9	KAB. BIMA	532,110	380,815	351,789	92.38%	305,315	80.17
10	KOTA BIMA	150,465	105,394	111,798	106.08%	108,205	102.67
11	PROV.NTB						
TOTAL		5,321,552	3,774,490	3,684,469	98.85%	3,792,345	102,93%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah: 1) Persentase Penurunan Desa Tertinggal, dan 2) Persentase jumlah lembaga adat yang aktif, target dan capaian indikator bidang urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-85 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Berkurangnya Desa Tertinggal	Persentase Penurunan Desa Tertinggal	-37,69%	-27,43%
2	Meningkatnya jumlah Lembaga Adat yang aktif	Persentase jumlah lembaga adat yang aktif	55%	67,92%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) bertanggung jawab untuk menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, “Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan”. Secara keseluruhan desa pesisir dan lingkaran hutan berjumlah 410 desa. Sampai dengan tahun 2020 desa pesisir dan lingkaran hutan yang diberdayakan ditargetkan mencapai 110 desa atau 26,74% dari seluruh desa pesisir dan lingkaran hutan, dengan pencapaian sebanyak 159 desa yang telah diberdayakan atau 38,87% dari seluruh desa pesisir dan lingkaran hutan.

Penurunan Jumlah Desa Tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi serta Ketahanan Ekologi Desa yang dikembangkan lebih lanjut melalui 22 variabel dan 52 indikator. IDM ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa serta informasi tentang pembangunan desa. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 status yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Pada tahun 2019 jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal sebanyak 5 desa, sedangkan desa dengan status Tertinggal sebanyak 108 desa. Pada tahun 2020, jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal sebanyak 2 desa atau menurun 3 desa bila dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan jumlah desa dengan status Tertinggal sebanyak 80 desa atau menurun sebanyak 28 desa.

Tabel 2-86 Rincian Status Desa tahun 2018 - 2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH DESA	STATUS DESA														
			SANGAT TERTINGGAL			TERTINGGAL			BERKEMBANG			MAJU			MANDIRI		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	KABUPATEN LOMBOK BARAT	119	0	0	0	21	2	0	79	92	87	19	25	28	0	0	4
2	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	127	0	0	0	10	2	0	103	80	50	14	43	67	0	2	10
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	239	0	0	0	37	6	0	175	160	136	27	72	96	0	1	7
4	KABUPATEN LOMBOK UTARA	43	0	0	0	1	4	0	21	21	16	11	8	15	0	0	2
5	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	57	0	0	0	9	2	0	36	38	28	12	16	25	0	1	4
6	KABUPATEN SUMBAWA	157	1	1	0	43	23	11	89	104	101	23	29	45	1	0	0
7	KABUPATEN DOMPU	72	0	0	0	6	5	0	62	60	57	4	7	15	0	0	0
8	KABUPATEN BIMA	191	7	4	2	81	64	69	90	104	97	13	18	22	0	1	1
JUMLAH		1005	8	5	2	208	108	80	655	659	572	123	218	313	1	5	28

Sumber: IDM Kementerian Desa Tahun 2020

Keterangan :

ST : Sangat Tertinggal

T : Tertinggal

B : Berkembang

M : Maju

Md : Mandiri

Lembaga Adat

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang digunakan untuk mengukur kinerja DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Berdasarkan pencapaian sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 779 lembaga adat dari 1.150 desa/kelurahan di NTB (67,74%) sementara target pembentukan lembaga adat sampai akhir tahun 2020 sesuai RPJMD 2019-2023 adalah 633 lembaga adat atau 55% dari jumlah desa/kelurahan di NTB. Dengan pencapaian 67,74%, indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 55% pada tahun 2020.

Tabel 2-87 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH LEMBAGA ADAT		
				2018	2019	2020
1	Lombok Barat	10	122	23	45	49
2	Lombok Tengah	12	139	109	129	130
3	Lombok Timur	20	254	128	230	232
4	Lombok Utara	5	43	21	32	32
5	Sumbawa Barat	8	64	35	64	64
6	Sumbawa	24	165	78	149	150
7	Dompu	8	81	9	21	21
8	Bima	18	191	35	65	66
9	Kota Mataram	6	50	18	27	27
10	Kota Bima	5	41	1	6	8
Jumlah		116	1.150	457	768	779

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

Meskipun target pembentukan sudah terlampaui namun legalitas dan penyiapan perangkat kelembagaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya legalisasi dan penyiapan perangkat lembaga adat sudah dan sedang berproses sampai dengan saat ini. Pembentukan lembaga adat juga akan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat/budaya lokal atau local wisdom sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai subyek pembangunannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, DPMPD Dukcapil Provinsi NTB berperan melalui program Pemberdayaan BUMDes dimana program ini merupakan salah satu prioritasnya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Dari 1.005 desa yang ada di NTB, sampai tahun 2020 telah terbentuk 984 BUMDes aktif, dari target 884 BUMDes Aktif pada akhir 2020 sesuai RPJMD 2019-2023. Terlampauinya target ini, salah satunya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, dimana salah satu kebijakannya adalah penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes.

Tabel 2-88 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2018-2020

NO.	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUMDES		
				2018	2019	2020
1	LOMBOK BARAT	10	119	106	118	118
2	LOMBOK TENGAH	12	127	115	125	127
3	LOMBOK TIMUR	20	239	137	181	237
4	LOMBOK UTARA	5	43	28	28	33
5	SUMBAWA BARAT	7	57	40	41	54
6	SUMBAWA	24	157	150	157	157
7	DOMPU	8	72	72	72	72
8	BIMA	18	191	148	148	186
JUMLAH		104	1.005	796	870	984

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

Dalam pengembangan BUMDes, selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat kelembagaan BUMDes dengan menyalurkan bantuan guna memperkuat permodalan BUMDes sebesar Rp. 14,282,500,000.- dengan rincian Rp. 3,1 milyar disalurkan pada tahun 2017 untuk 28 BUMDes dan

Rp. 10 milyar disalurkan pada tahun 2019 untuk 100 BUMDes dan Rp.1,182,500,000,- untuk 23 BUMDes pada tahun 2020.

Bantuan penguatan modal yang disalurkan tahun 2019, diarahkan untuk membantu Bank Sampah guna menyukseskan Program Prioritas Pemerintah Provinsi “Zero Waste”, kemudian pada tahun 2020 bantuan yang diberikan berupa Mesin Pengolah Sampah, Motor Listrik Delivery dan Gerobak Warung Pintar. Rincian BUMDes per kabupaten yang telah mendapatkan bantuan guna penguatan permodalan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2-89 BUMDes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN	JUMLAH BUMDES YANG MENDAPAT BANTUAN		JUMLAH
		2019	2020	
1	Lombok Barat	9	8	20
2	Lombok Tengah	8	2	13
3	Lombok Timur	46	5	52
4	Lombok Utara	6	1	13
6	Sumbawa	8	2	13
5	Sumbawa Barat	7	1	12
7	Dompu	7	2	14
8	Bima	9	2	14
Jumlah		100	23	151

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2020

7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 2 (dua) program prioritas dan 3 (tiga) kegiatan utama. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi ketiga RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sehat dan Cerdas” dengan indikator pencapaian: pertumbuhan penduduk dan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Adapun capaian kinerja indikator tersebut sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-90 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pertumbuhan penduduk (%)	1,13	1,13	1,08	1,82
2	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (tahun)	20,42	20,21	20,50	20,35

Sumber: BPS NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, 2020

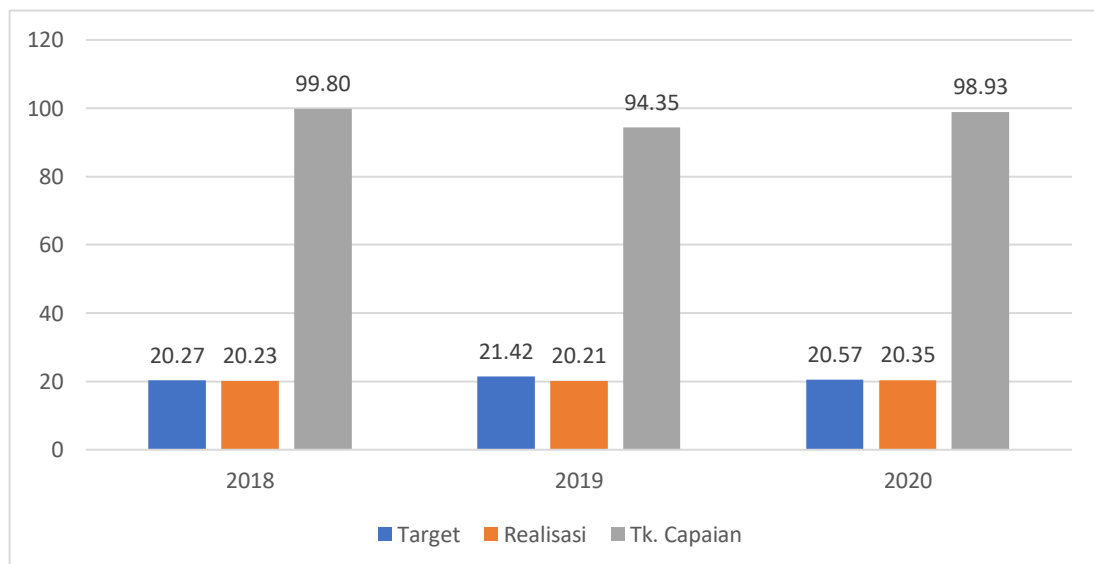
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,82 persen, belum mencapai target yang ditetapkan dan persentase pertumbuhannya melampaui realisasi tahun 2019. Sedangkan untuk rata-rata usia kawin pertama perempuan, tahun 2020 mencapai 20,35 tahun, belum mencapai target yang ditetapkan (20,50 tahun), namun melampaui capaian 2019 (20,21 tahun).

Pertumbuhan penduduk untuk tahun 2020 sebesar 1,82 persen, masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang. Meskipun masuk kategori pertumbuhan penduduk sedang, namun apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan memberikan dampak bagi pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk adalah:

1. Tingkat kematian yang menurun.
2. Tingkat kelahiran yang tinggi.
3. Adanya pernikahan usia dini. Pernikahan dini dapat menyebabkan ledakan penduduk karena nantinya akan turut meningkatkan jumlah kelahiran, terutama jika program keluarga berencana belum berjalan maksimal.

Tahun 2020, upaya pengendalian penduduk dan pelaksanaan KB yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui DP3AP2KB antara lain melalui program pengembangan posyandu Bina Keluarga Balita. Melalui program ini telah diupayakan pembentukan BKB *holistic integrative* untuk mendukung peningkatan ketahanan keluarga. Bimbingan teknis tentang pendewasaan usia perkawinan bagi tenaga pendidik diberikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi tenaga pendidik dan masyarakat akan dampak negative dari pernikahan usia dini. Pemanfaatan posyandu yang sudah ada di masyarakat ditingkatkan fungsinya, tidak saja menjadi posyandu yang melayani ibu hamil dan balita namun juga melayani remaja dan lansia sehingga fungsi posyandu menjadi posyandu keluarga.

Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki keberpihakan terhadap pengendalian penduduk dan KB dengan menerbitkan regulasi terkait Pendewasaan Usia Perkawinan melalui SE Gubernur NTB Nomor 180/1153/Kum tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di tahun 2014, dan surat edaran tersebut masih relevan untuk diberlakukan sampai saat ini dalam rangka pengendalian penduduk dan peningkatan rata-rata usia perkawinan pertama bagi perempuan. Pemerintah Provinsi NTB juga sedang menyusun draft Peraturan Daerah di tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yaitu 20,35 tahun. Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2019 rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,21 tahun. Persentase perempuan pernah kawin diatas umur 20 tahun, tahun 2020 sebesar 98,93 persen, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2019 sebanyak 94,35 persen. Harapannya dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, kasus-kasus perkawinan anak yang marak terjadi dapat diminimalisir.



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2020

Gambar 2-18 Capaian Rata-Rata Usia Kawin Pertama

Dalam rangka mendorong lahirnya awiq-awiq atau peraturan desa terkait pendewasaan usia perkawinan di tingkat desa, DP3AP2KB Provinsi NTB telah mendorong pembentukan dan pembinaan kelompok dialog warga. Jumlah Kelompok Dialog Warga di Provinsi NTB tahun 2020 sebanyak 66 kelompok.

8. Bidang Perhubungan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1) Presentase Sarana Transportasi Dalam Keadaan Baik 2) Presentase Sarana Transportasi

Dalam Keadaan Baik 3) Rasio Fatalitas. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang perhubungan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-91 Capaian Indikator Urusan Bidang Perhubungan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Sarana Transportasi Dalam Keadaan Baik	79.12	70.24	50.83	30.17
2	Persentase Prasarana Transportasi Dalam Keadaan Baik	63.11	63.03	64.00	64.01
3	Rasio Fatalitas	3.24	3.37	3.08	2.44

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja indikator urusan bidang perhubungan sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Presentase Sarana Transportasi Dalam Kondisi Baik

Indikator persentase sarana dalam kondisi baik dihitung dengan jumlah angkutan darat yang beroperasi seperti AKDP, Bus Pariwisata, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Taxi, Angkutan Antar Jemput dan Angkutan Pemadu Moda dimana kriterianya adalah angkutan yang memiliki ijin/kartu pengawasan dibagi jumlah data angkutan yang ada. Kepemilikan ijin/kartu pengawasan mengindikasikan bahwa angkutan tersebut dalam kondisi baik karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan kartu pengawasan adalah mewajibkan kepada pengusaha angkutan untuk memenuhi kriteria bahwa kendaraannya layak jalan. Untuk kewenangan angkutan pariwisata kewenangan telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan akan tetapi berdasarkan revisi perubahan Perda Perhubungan khusus untuk angkutan pariwisata yang hanya beroperasi di dalam wilayah provinsi NTB kewenangan tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Pada tahun 2020 sarana transportasi darat yang sudah memiliki kartu pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-92 Sarana Transportasi Darat yang Sudah Memiliki Kartu Pengawas Tahun 2020

NO	JENIS ANGKUTAN	DATA ANGKUTAN YANG ADA (UNIT)	PENGAWASAN (UNIT)	PERSENTASE (%)
1	Taxi	531	-	-
2	Pariwisata	52	4	7.69
3	AKDP	457	317	69.37
4	Sewa (Travel)	107	21	19.63
5	Antar Jemput	20	1	5
6	Pemandu Moda	18	-	-
7	Angkutan Sewa Khusus	134	55	41.04

NO	JENIS ANGKUTAN	DATA ANGKUTAN YANG ADA (UNIT)	PENGAWASAN (UNIT)	PERSENTASE (%)
	Total	1319	398	30.17

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

Target yang ditetapkan sebesar 50,83 % untuk indikator sarana transportasi yang baik dan pada akhir tahun 2020 hanya tercatat sebanyak 30,17 % angkutan yang ada di NTB yang telah memiliki ijin pengawasan atau sarana dalam kondisi baik. Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap sektor transportasi. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas keluar rumah sehingga perjalanan/ mobilitas orang sangat dibatasi sehingga permintaan pengguna jasa transportasi umum menurun drastis. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan dari usaha angkutan umum.

Selain itu untuk melaksanakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan publik yang layak maka pada BRT (Bus rapid Transit) telah dioperasikan pada 2 (dua) koridor yang diprioritaskan untuk angkutan pelajar sehingga para pelajar diharapkan terbiasa untuk menggunakan angkutan umum. Pada bulan Maret pengoperasian BRT untuk sementara tidak dilakukan karena pandemic Covid-19 yang menyebabkan para pelajar tidak berangkat ke sekolah dan melakukan pembelajaran melalui daring. Agar angkutan umum bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk penyandang disabilitas Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Damri menyediakan Bus Disabilitas yang beroperasi dengan tujuan sekolah luar biasa di Kota Mataram. Capain indikator untuk sarana transportasi dalam kondisi baik dilaksanakan dengan program peningkatan pelayanan angkutan dengan kegiatan pengawasan dan penertiban perijinan angkutan.

Indikator Persentase Prasarana Sarana Transportasi Dalam Keadaan Baik

Indikator presentase prasarana transportasi dalam kondisi baik dihitung dari jumlah penilaian terhadap prasarana transportasi yang terdiri dari terminal tipe B dan pelabuhan pengumpul. Indikator untuk terminal penumpang dihitung menggunakan hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan di terminal tipe B. Secara rinci disajikan seperti data berikut.

Tabel 2-93 Skor Prasarana Transportasi Perhubungan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020

TERMINAL	FASILITAS UTAMA						KESIMPULAN (%)
	JALUR KEBERANGKATAN/ KEDATANGAN (SKOR)	TEMPAT TUNGGU KENDARAAN UMUM (SKOR)	KANTOR (SKOR)	RUANG TUNGGU PENUMPANG (SKOR)	LOKET KARCI/PAPAN INFORMASI (SKOR)	PARKIR KENDARAAN (SKOR)	
Renteng	70	60	70	70	0	70	56.67

TERMINAL	FASILITAS UTAMA						KESIMPULAN (%)
	JALUR KEBERANGKATAN/ KEDATANGAN (SKOR)	TEMPAT TUNGGU KENDARAAN UMUM (SKOR)	KANTOR (SKOR)	RUANG TUNGGU PENUMPANG (SKOR)	LOKET KARCIS/PAPAN INFORMASI (SKOR)	PARKIR KENDARAAN (SKOR)	
Tanah Mira	80	70	80	70	70	70	73.33
Ginte	70	70	75	75	0	70	60.00
	Rata-Rata						63.33

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

0 = Tidak ada

50 = Ada

60-70 = Berfungsi/Kondisi Kurang Baik

80-90 = Berfungsi/kondisi sedang

100 = Berfungsi/kondisi baik

Sedangkan untuk kondisi prasarana dilihat dari hasil updating data-data pelabuhan pengumpul yang ada di NTB pada program pengembangan transportasi laut, kegiatan updating database pelabuhan. Untuk kondisi pelabuhan ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 2-94 Kondisi Pelabuhan di Provinsi NTB Tahun 2020

NO	PELABUHAN	PRASARANA JALAN	DERMAGA	KOLAM DAN ALUR PELAYARAN	FASILITAS BONGKAT MUAT BARANG / PENUMPANG	RIP	PBM	RUMUS PBM	JPT	RUMUS JPT	PELRA	RUMUS PERLA	CALL KAPAL	KESIMPULAN
1	Lembar	100	100	90	90	100	10	100	14	100	2	25	100	89,44
2	Badas	90	100	100	80	100	14	100	12	100	2	25	100	88,33
3	Bima	90	100	100	80	100	11	100	8	75	16	100	100	93,89
4	Labuan Lombok	100	90	100	80	0	9	75	4	25	9	75	75	68,89
5	Pemenang	80	90	80	90	0	2	25	0	0	2	25	100	54,44
6	Sape	70	80	80	70	0	1	25	0	0	0	0	50	41,67
7	Benete	80	90	90	80	100	4	25	3	25	0	0	50	60,00
8	Calabai	80	80	80	80	100	6	75	1	25	1	25	75	68,89
9	Telong Elong	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	16,67
Rata-rata														64,69

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2021

0 = Tidak ada

50 = Ada

60-70 = Berfungsi/Kondisi Kurang Baik

80-90 = Berfungsi/kondisi sedang

100 = Berfungsi/kondisi baik

Secara rata-rata didapat skor kondisi terminal Tipe B di yang ada di NTB adalah 63,33% sementara untuk pelabuhan adalah 64,69% jadi secara total rata-rata kondisi prasarana perhubungan yang ada adalah 64,01% atau melebihi target yang di tetapkan sebesar 64,00%. Kegiatan untuk mendukung indikator capaian strategis ke 1 adalah program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kemudian program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan. Ketiga adalah program peningkatan pelayanan angkutan dengan pengawasan dan penertiban perizinan angkutan melalui pemberian kartu pengawasan (KPS) dan inspeksi

terhadap angkutan yang masuk ke dalam terminal. Dalam rangka pencegahan penularan virus Covid-19 di terminal tipe B selain memberikan himbauan dan menerapkan social distancing, penggunaan masker dan mencuci tangan, Dishub NTB juga menyiapkan masker, sarung tangan, faceshield alat pengukur suhu tubuh dan alat semprot disinfektan.

Pada tahun 2020 terdapat 4 terminal tipe B yang ada yaitu terminal Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah, Terminal Tana Mira di Kabupaten Sumbawa Barat dan Terminal Ginte di Kabupaten Dompu. Untuk Terminal Tanjung tidak dilakukan penilaian karena lokasi terminal tersebut baru selesai dijadikan sebagai rumah sakit sementara untuk Rumah Sakit Tanjung sebagai akibat dari bencana gempa bumi sepanjang bulan Agustus 2018 yang melanda Lombok. Pada tahun 2020 telah dilakukan DED (Detail Engineering Design) untuk Terminal Tanjung. Berdasarkan Perda Pengelolaan Terminal maka telah ditarik retribusi bagi pengguna terminal sebagai Penghasilan Asli Daerah (PAD). Besaran PAD yang diterima pada tahun 2020 sejumlah Rp.394.079.481,00 peningkatan manajemen transportasi dengan kegiatan evaluasi sistem transportasi ASDP. Program yang mendukung sasaran 1 selain itu adalah peningkatan manajemen transportasi ASDP melalui pengawasan terhadap operasional kapal di Pelabuhan Kayangan. Sedangkan indikator kondisi pelabuhan menggunakan updating data pelabuhan yang didukung oleh program pengembangan transportasi laut dengan kegiatan peningkatan/pengembangan kepelabuhanan di NTB.

Rasio Fatalitas

Pengukuran untuk indikator Rasio Fatalitas dihitung berdasarkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan transportasi di NTB tahun 2020 dibagi jumlah kendaraan bermotor tahun 2020 dikali 10.000. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 1.264 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia mencapai 393 jiwa, angka ini turun dari kejadian kecelakaan pada tahun 2019 sebanyak 1.812 kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia mencapai 526 jiwa. Rasio fatalitas pada tahun 2020 adalah sebesar 2.39 dengan jumlah kendaraan di NTB tahun 2020 sebanyak 1.647.061 unit. Capaian ini melebihi dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3.08. Semakin kecil nilai rasio fatalitas maka semakin baik capaiannya.

9. Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2020 dilaksanakan dengan indikator bidang Komunikasi Dan Informatika berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2-95 Capaian indikator bidang Komunikasi Dan Informatika berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Ketersediaan Data	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	70	95,49	80	85,09
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif dan Cepat Tanggap	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	2.0	2,2	2,5	3,31
3.	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	I+	II	Level II	Level III
4.	Meningkatnya Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2020

Indikator Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB dimana hal ini ditujukan dari indikator capaian setiap tahunnya. Untuk menuju indikator kinerja tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Sasaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral;
2. Menyebarnya Publikasi dan Informasi tentang Kegiatan/Kebijakan Pemerintah;
3. Meningkatkan Kinerja Badan Publik untuk Memperbaharui Daftar Informasi Publik Secara Berkala;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Meningkatkan Pengelolaan SPBE yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
6. Meningkatkan Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang diselenggarakan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 4 (empat) program prioritas dan 13 (tiga belas) kegiatan utama.

Tabel 2-96 Capaian Indikator Urusan Bidang Koperasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Dinas dengan Gubernur) Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI
1	Persentase Koperasi Aktif	63%	59,25%
2	Persentase Peningkatan Usaha Kecil ke Menengah	1,67%	1,47%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2020

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 “NTB Sejahtera dan Mandiri” dengan indikator kinerja daerah yang diusung adalah persentase koperasi aktif. Perkembangan jumlah koperasi aktif di NTB dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-97 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	TAHUN 2019 (UNIT)			TAHUN 2020 (UNIT)		
				AKTIF	TIDAK AKTIF	JML	AKTIF	TIDAK AKTIF	JML
1	Mataram	557	504	397	107	504	398	107	505
2	Lombok Barat	503	503	151	360	511	163	357	520
3	Lombok Utara	154	154	119	42	161	123	42	165
4	Lombok Tengah	574	617	299	318	617	315	318	633
5	Lombok Timur	530	507	215	303	518	241	303	544
6	Sumbawa Barat	492	501	329	50	379	316	64	380
7	Sumbawa	398	307	224	86	310	224	86	310
8	Dompu	311	308	150	164	314	150	180	330
9	Bima	270	278	238	50	288	238	50	288
10	Kota Bima	184	185	95	103	198	108	100	208
11	Provinsi	230	246	223	70	293	223	90	335
Jumlah		4.203	4.110	2.440	1.653	4.093	2.499	1.697	4.218

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2020

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (KSPPS/USPPS - Kop)

Salah satu program yang menjadi andalan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah pembentukan “Koperasi Kawasan Bebas Riba” dan penumbuhan serta pengembangan “Koperasi Berbasis Syariah”. Target dan realisasi penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba di Provinsi NTB per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian Pengembangan KSP Pola Syariah Kabupaten/Kota Se NTB Tahun 2020

NO	KAB/KOTA	RENCANA PENGEMBANGAN KSPPS/USPPS 2013-2018	2013-2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	JML	PERSENTASE (%)
1	Kota Mataram	40	25	1	1	27	67,5
2	Lombok Barat	85	33	2	0	35	41,18
3	Lombok Utara	35	16	0	0	16	45,71
4	Lombok Tengah	85	82	15	1	98	115,29
5	Lombok Timur	100	59	2	0	61	61,00

NO	KAB/KOTA	RENCANA PENGEMBANGAN KSPPS/USPPS 2013-2018	2013-2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	JML	PERSENTASE (%)
6	Sumbawa Barat	20	12	0	0	12	60,00
7	Sumbawa	30	11	0	0	11	36,67
8	Dompu	30	16	0	0	16	53,33
9	Bima	35	32	0	1	33	94,29
10	Kota Bima	25	10	0	0	10	40,00
11	Provinsi	15	49	22	7	79	526,67
Jumlah		500	345	42	10	398	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2020

11. Bidang Penanaman Modal

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah Nilai Realisasi Investasi, Target dan capaian indikator bidang urusan bidang penanaman modal tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-98 Capaian Indikator Urusan Bidang Penanaman Modal Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Dinas dengan Gubernur) Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai Realisasi Investasi	16.000	10.023	11.574	11.600

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, 2020

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan target nilai realisasi investasi pada indikator urusan bidang penanaman modal tahun 2019 sebesar 16.000 milyar, namun dengan terjadinya bencana alam gempa bumi dan disusul dengan bencana non alam covid-19 terjadi perubahan target seiring dengan revisi RPJMD dan menyesuaikan dengan target BKPMRI sehingga mulai tahun 2020 terjadi perubahan target nilai realisasi investasi ditetapkan sebesar 11,574 milyar. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp.10.023.792.916.210 menjadi Rp.11.600.614.960.406, mengalami peningkatan jumlah nilai realisasi investasi sebesar Rp.1.577 milyar atau sebesar 11,50%.

Investasi atau penanaman modal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2018-2020, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-99 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB

Tahun 2018 - 2020

TAHUN	JENIS INVESTASI (RUPIAH)				TOTAL (RUPIAH)
	PMDN		PMA		
2018	11.863.726.122.754	75,18%	3.917.628.581.179	24,82%	15.781.354.703.933
2019	5.699.178.997.403	56,85%	4.324.613.918.807	43,14%	10.023.792.916.210
2020	7.117.434.218.089	61,36%	4.483.180.742.308	38,64%	11.600.614.960.406

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018, Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya yang semula Rp.11.863.726.122.754 menjadi Rp.5.699.178.997.403 dan mengalami penurunan proporsi juga (75,18% menjadi 56,85%) dari nilai total investasi, sedangkan untuk kategori PMA, Nilai Realisasi Investasi (Rp.3.917.628.581.179 menjadi Rp.4.324.613.918.807) secara proporsi mengalami kenaikan (24,82% menjadi 43,14%). Kemudian di tahun 2019 Nilai Realisasi Investasi pada PMDN sebesar Rp.5.699.178.997.403 menjadi Rp.7.117.434.218.089 dan mengalami peningkatan 56,85% menjadi 61,36% sedangkan pada PMA sebesar Rp.4.324.613.918.807 menjadi Rp.4.483.180.742.308 namun mengalami penurunan proporsi (43,14% menjadi 38,64%) dengan nilai realisasi investasi secara keseluruhan PMDN/PMA sebesar Rp.11.600.614.960.406

Menurut kategori Kabupaten/Kota se-NTB, Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-100 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2018-2020

NO	BIDANG PERIZINAN				NON IZIN		
		2018	2019	2020		2020	JUMLAH
1.	Penanaman Modal	0	0	0	Penanaman Modal	0	0
2.	Perikanan Dan Kelautan	705	640	636	Perikanan Dan Kelautan	1	637
3.	Pertanian	0	3	3	Pertanian	0	3
4.	Koperasi & Umkm	6	3	11	Koperasi & Umkm	0	11
5.	Pekerjaan Umum	27	20	15	Pekerjaan Umum	0	15
6.	Kehutanan	6	7	10	Kehutanan	4	14
7.	Lingkungan Hidup & Penelitian	18	37	46	Lingkungan Hidup & Penelitian	1	47
8.	Perindustrian	0	0	0	Perindustrian	0	0
9.	Perdagangan	0	1	2	Perdagangan	1	3
10.	Perkebunan	0	1	0	Perkebunan	0	0
11.	Hubkominfo	47	45	59	Hubkominfo	0	59
12.	Pertambangan	421	539	328	Pertambangan	17	345
13.	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0
14.	Kesehatan	51	14	29	Kesehatan	0	29
15.	Pariwisata	0	0	1	Pariwisata	0	1
16.	Pertanahan	0	0	0	Pertanahan	0	0

NO	BIDANG PERIZINAN	2018	2019	2020	NON IZIN	2020	JUMLAH
17.	Peternakan	2.953	2212	2.685	Peternakan	0	2.685
18.	Sosial	2	4	1	Sosial	19	20
TOTAL			3.664	3.826		43	3.869

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2020.

12. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1) Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, 2) Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, dan 3) Proporsi wirausahamuda. Target dan capaian indikator bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-101 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	0	0
2	Meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	15	26
3	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah	Proporsi wirausaha muda	68,07	68,07

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2020

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, pada RPJMD 2019-2023 mengemban tugas untuk mencapai 3 (tiga) indikator kinerja daerah, yakni Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, dan Proporsi wirausahamuda. Pencapaian dua indikator kinerja daerah ini pada tahun 2020 telah melampaui target, dan satu target tidak tercapai yaitu Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional dikarenakan pada masa pandemi covid-19 ajang kompetisi olahraga pelajar tingkat nasional maupun internasional ditiadakan.

Indikator Prestasi Pemuda di tingkat nasional pencapaiannya sebanyak 26 orang, yang merupakan hasil seleksi di tingkat provinsi, untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat di tingkat Nasional. Indikator ini merupakan gabungan dari pemuda yang menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Nasional, dan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI).

Satu orang atas nama Muhammad Adzan dari MAN 2 Kota Bima ditunjuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka pada Upacara Peringatan Detik-detik

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Istana Negara pada tahun 2020. Kemudian Apriliawan Sukma S.P., dari Kabupaten Lombok Tengah karena berperan aktif dalam pembangunan yang menjadi penggerak dan pelopor bagi pemuda lain di daerahnya dalam mengembangkan konsep pertanian yang berkelanjutan yaitu holtikultura organik. Hal ini merupakan terobosan dalam menghasilkan bahan pangan yang sehat dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian konvensional.

Tabel 2-102 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional Tahun 2020

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Zainul Fahmi, SE	Kab. Sumbawa	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pendidikan Tahun 2020
2.	Siti Laila IsmiratulHilali	Kab. Lombok Timur	Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pendidikan Tahun 2020
3.	Nurhidayah Arifah, SE	Kab. Sumbawa Barat	Juara III Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pendidikan Tahun 2020
4.	Yuda Milia Shandi	Kab. Lombok Timur	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Agama,Sosial, dan Budaya.
5.	Nuksin Tohri	Kab. Lombok Tengah	Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Agama,Sosial, dan Budaya.
6.	Syamsi Hubbi Alfi Hariri	Lombok Tengah	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata.
7.	Muhammad Fahrul Hariri	Lombok Barat	Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata.
8.	Ade Susanto	Sumbawa Barat	Juara III Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata.
9.	Apriliawan Sukma,SP	Lombok Tengah	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pangan.
10.	Jamilyadhatus Sholihah	Lombok Timur	Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pangan.
11.	Wahyu Arrahman	Mataram	Juara III Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pangan.
12.	Ni Kadek Dwi Anggraini	Mataram	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
13.	Hudian Yusni Hazmi	Mataram	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
14.	Afriani Komalasari	Lombok Barat	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
15.	Nur AzizihLihamiah	Lombok Tengah	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
16.	Muhammad Asrihul Mawandi	Lombok Tengah	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
17.	Muslimin	Lombok Utara	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
18.	Nahdiatuzzaniyah	Lombok Timur	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
19.	Syamsul Islam	Lombok Timur	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
20.	Eka Nuryati, S.Sn	Sumbawa Barat	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
21.	Eka Ramadhani Putri	Sumbawa	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
22.	Mangam Arjuna	Sumbawa	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
23.	Teguh Wira Sakti	Dompu	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
24.	M. Abrar	Bima	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
25.	Febi Febriyanti	Kota Bima	Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2020
26.	Muhammad Adzan	MAN 2 KOTA BIMA	Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2020

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2020

13. Bidang Statistik

Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid, lengkap, akurat serta terintegrasi, menjadi salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif. Dengan terwujudnya Satu Data NTB diharapkan data statistik sektoral yang ada di tiap OPD mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Sejumlah kegiatan telah dilakukan oleh Bidang Statistik Dinas Kominfo NTB meliputi tahap pengumpulan, verifikasi, validasi, dan pengunggahan data ke dalam portal Satu Data NTB, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi NTB telah terkumpul sejumlah 919 (94,26 %) jenis data. Persentase tersebut belum mencapai angka 100 % disebabkan karena masih terdapat beberapa OPD yang masih belum mengkoordinasikan dan memverifikasi jenis data tertentu dengan kabupaten/kota terkait.

Sementara jumlah jenis data yang sudah terpublikasi ke Portal Satu Data NTB sejumlah 782 (85,09%) jenis data. Persentase jenis data yang sudah dipublikasi ke dalam portal Satu Data NTB juga lebih kecil dibandingkan dengan data yang sudah terkumpul karena beberapa jenis data yang sudah dikumpulkan, masih memerlukan verifikasi dari produsen data/atau OPD terkait. Guna percepatan pelaksanaan Satu Data NTB, Pada Tahun 2020, Dinas Kominfo melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengunggahan data-data sektoral yang ada ke dalam Portal Satu Data NTB oleh masing-masing pengentry data pada setiap OPD.
- b. Verifikasi dataset yang sudah diunggah OPD ke dalam Portal oleh tim bidang statistik.
- c. Mempublikasi dataset yang telah terverifikasi.
- d. Terbentuknya laporan Satu Data NTB Tahun 2020.
- e. Penyusunan tiga buku yang terbagi dalam:
 - 1) Penyusunan buku data Gizi Buruk.
 - 2) Penyusunan buku statistik sektoral bidang sosial.
 - 3) Penyusunan statistik sebaran area Blank Spot di Provinsi NTB

- f. Untuk rapat Konsolidasi Satu data NTB serta penyusunan Buku Statistik Sektorial Bidang Ekonomi ditiadakan atau tidak bias dilaksanakan, dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

14. Bidang Persandian

Bidang Persandian dan Keamanan Informasi sebagai bagian dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB berupaya terus meningkatkan Indeks Kematangan Keamanan Informasi melalui Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian dengan mendorong dan membantu organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah NTB agar dapat membentuk dan menggunakan sebuah sistem otentikasi dokumen di OPD masing-masing.

Ikhtiar lain yang turut dilakukan oleh Dinas Kominfotik NTB dalam meningkatkan tingkat keamanan informasi dan data center provinsi NTB adalah Pemasangan "*honey pot*" pada data center milik Pemprov NTB, guna mencegah serangan siber pada data center Provinsi NTB dan mulai membangun komunikasi jaringan intra pemerintah lingkup pemprov NTB serta melakukan MoU dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) tentang tanda tangan digital dalam mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pengimplementasian tanda tangan elektronik terkait otentikasi dokumen pada tahun 2020 ini, sudah terlaksana pada 26 perangkat daerah (data terlampir).

PUSAT Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopskamsinas BSSN), mencatat selama periode Januari-November 2020 terjadi lebih dari 423 juta serangan siber. Jumlah ini lebih banyak hamper tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019. Adapun serangan siber yang bersifat social dengan target social networking. Target utama dari serangan siber yang bersifat social ini, adalah cara pikir, system kepercayaan, dan sikap tindak dari manusia yang berinteraksi dengan ruangsiber. Senjata utama dari serangan siber yang menargetkansocial networking adalah informasi yang direkayasa untuk mendukung dan memperbesar dampak dari aktivitas lainnya yang dilakukan penyerang. Serangan siber dengan target social networking dapat membahayakan persatuan dan falsafah kekuatan Bangsa Indonesia (center of gravity). Perlunya Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional di ruang siber. SKSN RI terdiri dari lima komponen, yaitu visi, misi, tujuan, landasan pelaksanaan, dan peran pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di tingkat global melalui perwujudan keamanan siber nasional.

Sepanjang Tahun2020, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi ada 127 serangan siber di NTB. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2018–2019, serangan siber terhadap sistem yang digunakan Pemprov NTB sebanyak 22 kali. Percobaan serangan malware yang ditujukan ke data center pemerintah provinsi, contohnya saat demo Undang Undang (UU) Omnibus Law. Pada saat demo UU Omnibus Law Cipta Kerja, ada lima website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB yang kena serangan siber. Dalam waktu dua hari, website lima OPD tersebut mampu dipulihkan terutama yang menggunakan fasilitas wordpress. Website yang menggunakan fasilitas wordpress cukup mudah dilakukan peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap system informasi yang digunakan Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT). CSIRT atau tim yang melakukan identifikasi dan merespons serangan siber dalam system aplikasi atau jaringan computer pemerintah telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.555 Tahun 2020. CSIRT Provinsi NTB memiliki 16 anggota, dengan didukung oleh sejumlah tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD, akan terus diberdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data. Dengan dibentuknya CSIRT maka Pemprov diharapkan melakukan tindakan pencegahan, pemulihan dan penanggulangan insiden siber yang terjadi. Kecenderungan serangan-serangan siber itu mengarah ke web-web pemerintah daerah. Ini karena, web pemerintah daerah itu paling lemah dan rentan diretas. Serangan siber terhadap sistem yang digunakan Pemprov NTB cukup masif. Seluruh aktivitas public sangat bergantung pada penggunaan teknologi informasi. Sehingga harus bias dijamin dari sisi keamanannya. Menurut Data Diskominfotik NTB, saat ini terdapat 160 aplikasi yang digunakan oleh seluruh badan public lingkup Pemprov NTB. 160 aplikasi ini tentu tidak sedikit. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik, baik internal maupun eksternal harus terjamin keamanannya. Sementara itu, SDM yang memiliki keahlian dalam bidang keamanan siber di Pemprov NTB masih belum ada. Sehingga kedepan, SDM harus dididik dan dilatih. Sehingga membantu seluruh sistem yang digunakan dapat terjaga keamanannya.

BSSN menunjuk NTB sebagai salah satu provinsi di Indonesia untuk menjadi pilot project penerapan CSIRT. BSSN telah menetapkan 10 provinsi, dan juga kementerian/lembaga sebagai pilot project CSIRT sesuai surat keputusan Kepala BSSN tentang penunjukan instansi pemerintah sebagai pilot project pembentukan CSIRT. Disinilah fungsi BSSN, membantu dibentuknya CSIRT di daerah. pembentukan CSIRT itu memiliki standarisasi penilaian. NTBProv-CSIRT adalah sebuah Tim yang bertugas untuk mengidentifikasi dan merespon seluruh insiden dan serangan siber dalam system aplikasi dan jaringan computer

pemerintahan di Provinsi NTB. CSIRT juga dapat mendukung Pemerintah NTB agar dapat mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lebih baik untuk mencapai tujuan SPBE diantaranya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel.

NTB terpilih menjadi salah satu provinsi yang dinilai telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia. Walhasil penilaian dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk tahun 2020, menempatkan Provinsi NTB berada pada Level III dari target Level II. Terlampauinya target sasaran meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik pada tahun 2020 dengan Level III dari target II, antara lain dipengaruhi oleh dokumen tata kelola terkait persandian, keamanan informasi yang sudah terpenuhi, adanya penambahan perlengkapan informasi pada data center milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB serta terbentuknya kelembagaan CSIRT di Provinsi NTB.

15. Bidang Kebudayaan

Dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (bahagia), pemerintah Provinsi NTB telah melakukan strategi dalam bentuk pembinaan Lembaga-lembaga social, agama, adat dan kemasyarakatan. Arah kebijakan yang ditempu oleh pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan antara lain: meningkatkan peran Lembaga-lembaga social, agama, adat dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat. Pembangunan kebudayaan di NTB diukur melalui indikator cakupan cagar budaya yang direvitalisasi. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-103 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN (SATUAN)	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Cakupan cagar budaya yang direvitalisasi (%)	20,00	26,00	24,35	17,74

Sumber: Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2020

Dari data diatas diketahui bahwa cakupan cagar budaya yang direvitalisasi tahun 2020 sebesar 17,74 persen, masih belum mencapai target 2020 (24,35%) dan cakupan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2019 (26%). Cakupan cagar budaya yang direvitalisasi belum mencapai target karena seharusnya ada 10 (sepuluh) cagar budaya yang akan direvitalisasi (dipugar) pada DPA murni Tahun 2020, namun karena alokasi dana untuk kegiatan tersebut dilakukan refocusing anggaran akibat pandemic Covid 19 ini, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah nama dan lokasi situs yang telah direvitalisasi sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2-104 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi (dipagar) di Kabupaten/Kota se-NTB tahun 2020

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA CAGAR BUDAYA (SITUS)	KEGIATAN REVITALISASI
1.	Mataram		
2.	Lombok Tengah	Masjid Kuno Gunung Pujut	
3.	Lombok Timur	-	
4.	Lombok Barat	-	
5.	Lombok Utara	Masjid Kuno Sesait Kayangan	
6.	Sumbawa	Situs Batu Gong - Utan Sumbawa	-
7.	Sumbawa Barat	-	-
8.	Dompu	-	-
9.	Bima	Wadu ndocu - Wawo Bima	-
10.	Kota Bima	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2020

UPTD Museum Negeri Provinsi NTB

Pada Museum Negeri Provinsi NTB, kunjungan masyarakat dan wisatawan untuk pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari jumlah pengunjung sebanyak 90.533 orang tahun 2019 berkurang menjadi 9.388 orang pada tahun 2020 atau menurun sebanyak 89,63 persen dari jumlah kunjungan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid 19, yang mana ada anjuran dari pemerintah untuk menjauhi kerumunan. Jumlah pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-105 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2016-2020

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK	3.927	11.438	15.196	19.398	2.199
2	SD	18.263	22.772	19.885	19.983	1.652
3	SLTP	7.767	16.398	11.675	11.022	711
4	SLTA	4.891	10.041	8.449	5.360	789
5	Mahasiswa	1.170	3.666	1.107	1.071	348
6	Peneliti	21	6	12	2	11
7	WTA (Wisatawan Asing)	2.669	1.667	1.323	1.562	391
8	RTD (Rombongan Tamu Daerah)	163	92	25	0	25
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	2.259	15	4	0	0
10	Pengunjung Umum	46.158	21.960	25.120	32.135	3.262
JUMLAH		87.288	88.055	82.796	90.533	9.388

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2020

16. Bidang Perpustakaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah Prosentase Pengolahan Bahan Pustaka yang Berbasis Digital. Target dan capaian

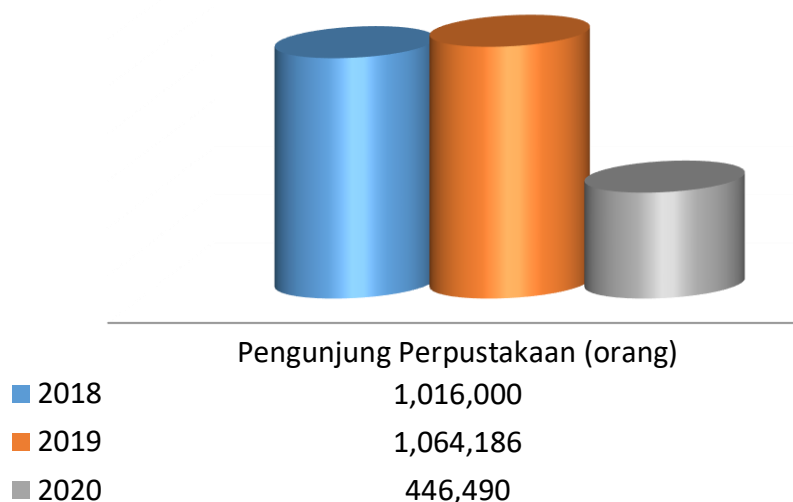
indikator bidang urusan bidang perpustakaan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-106 Capaian Indikator Urusan Bidang Perpustakaan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase bahan pustaka berbasis digital	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kunjungan yang disebabkan pandemi COVID-19, sehingga pelayanan untuk perpustakaan sempat ditutup selama hampir 6 bulan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti perpustakaan keliling, gelar buku baca santai, dan story telling. Perkembangan jumlah pengunjung ke perpustakaan disajikan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Gambar 2-19 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018 - 2020

Untuk menumbuhkembangkan minat baca, peran berbagai pihak sangat dibutuhkan salah satunya ialah upaya dari pihak pengelola perpustakaan untuk menarik minat masyarakat untuk lebih gemar membaca. Salah satunya ialah dengan menambah koleksi dan keanekaragaman jenis buku bacaan maupun buku ilmiah dengan berbagai sumber. Oleh sebab itu maka Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan menyediakan berbagai judul dan jumlah koleksi buku sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-107 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB Tahun 2018 - 2020

NO	URAIAN	2018	2019	2020
1	Judul Buku	100.250	100.546	101.432
2	Eksemplar	328.355	328.651	330.884

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

17. Bidang Kearsipan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tahun 2020 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah Persentase Pengolahan Arsip yang Terselamatkan. Target dan capaian indikator bidang urusan bidang kearsipan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Capaian Indikator Urusan Bidang Kearsipan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase Pengolahan Arsip yang terselamatkan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-108 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2018 - 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	26.000	26.100	-	-	-	-
2.	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	7.250	5.500	14.400	14.400	15.000	15.000
3.	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	1.000	12	-	-	-	-
4.	Record centre (Perangkat Daerah)	-	-	15	15	21	21

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2021

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian.

1. Bidang Kelautan Dan Perikanan

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 5 UPTD dan 3 Cabang Dinas Kelautan dengan indikator bidang urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah 1). Produksi perikanan (Ton); 2). Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/th). Target dan capaian indikator bidang urusan kelautan dan perikanan tahun 2020 berdasarkan perjanjian kinerja perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-109 Capaian Indikator Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2020

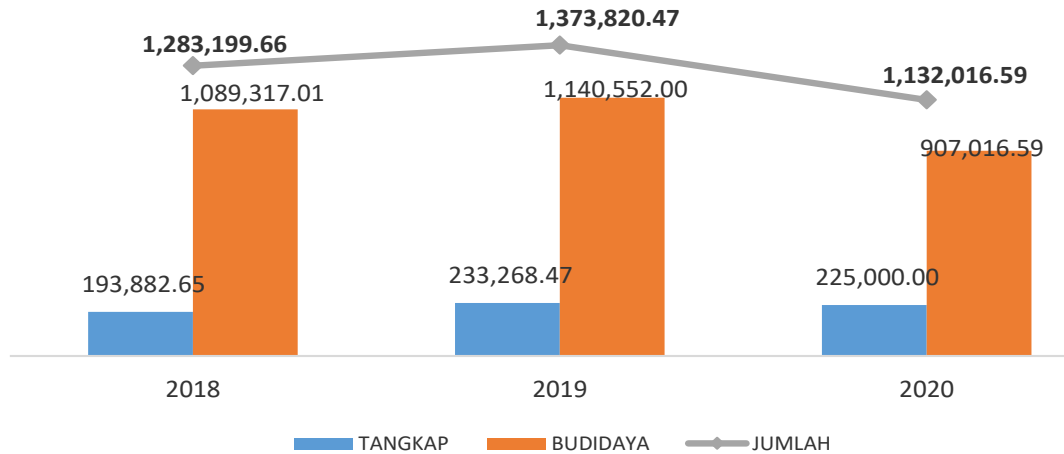
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Produksi Perikanan (Ton)	1.376.657	1.373.820,47	99,79	1.406.469	1.132.016,59 ^{*)}	80,49
Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/ tahun)	40,36	49,52	100	42,40	49,52 ^{*)}	116,79

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2020

Produksi Perikanan

Menurunnya produksi perikanan tahun 2020 dipengaruhi oleh menurunnya produksi perikanan budidaya yang mengalami penurunan 20,48 % dan produksi tangkap menurun 3,35 % dibanding dengan produksi tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi komoditas rumput laut dan beberapa komoditas lainnya baik di air tawar maupun di air payau. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemik Covid-19 yang telah berlangsung sepanjang tahun 2020, dimana sektor kelautan dan perikanan menerima dampak secara tidak langsung dari ketidakstabilan sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi Covid 19. Krisis ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada menurunnya permintaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan, disamping kendala pengiriman produk kelautan dan perikanan ke dalam maupun ke luar negeri akibat pemberlakuan lockdown di beberapa daerah atau negara lainnya. Selain itu, dampak krisis ekonomi menyebabkan menurunnya nilai jual hasil tangkapan nelayan akibat over supply dibanding demand. Oleh sebab itu pelaku usaha baik pembudidaya maupun nelayan membatasi aktivitas budidaya dan penangkapannya

Produksi Perikanan (Ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2020 *) data sementara

Gambar 2-20 Perkembangan Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2020

Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun).

Angka konsumsi ikan dapat dihitung setelah angka ketersediaan ikan yang terdiri dari angka produksi perikanan ditambah jumlah ikan yang masuk dikurangi jumlah ikan yang keluar dihitung menjadi Neraca Bahan Makanan (NBM). Angka konsumsi ikan yang dirilis terakhir adalah tahun 2019 sebesar 49,52 Kg/Kap/tahun meningkat 29,63% dibandingkan tahun 2018 sebesar 38,20 Kg/Kap/Tahun. Sedangkan capaian AKI tahun 2020 akan dirilis paling lambat bulan September 2021. Capaian AKI 49,52 Kg/Kap/Tahun masih rendah jika dibandingkan dengan capaian angka konsumsi ikan nasional yang mencapai angka 54,50 Kg/Kap/Tahun.

Pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir menjadi fokus pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan masyarakat pesisir dan masyarakat lingkaran hutan. Penetapan lokasi desa miskin sesuai dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 400 – 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019 dan Perencanaan Tahun 2020.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan Lokasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2020.

Pada tahun 2020 dilakukan pemberdayaan masyarakat pesisir 140 kelompok masyarakat pesisir dari total 2.193 kelompok. Dan jika dikumulatifkan dengan capaian tahun 2020, pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir sampai dengan tahun 2020 telah mengakomodir sebanyak 218 kelompok meningkat 17,95 % dibanding tahun 2019 sebanyak 78 kelompok masyarakat pesisir dalam kegiatan pemberdayaan ini, pada tahun 2020 Cakupan kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan tercapai 701,5 % meningkat 629,55 % dibanding tahun 2019 sebesar 71,95% dari target.

Peningkatan capaian pemberdayaan masyarakat pesisir ini disebabkan adanya kolaborasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat berupa pemberian bantuan/hibah berupa sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, alat penangkapan ikan bantuan dari KKP dan rumah tunnel garam bagi petambak garam.

Kelompok masyarakat pesisir yang telah diberdayakan pada tahun 2020 terdiri dari:

- a. Pembinaan Kelompok petambak garam sebanyak 3 kelompok yaitu
 - 1) Kelompok Bertong Bangkit Lombok Barat berupa rumah tunnel garam
 - 2) Kelompok Permata Hati, Lombok Barat berupa rumah tunnel garam
 - 3) Kelompok Tembere Bersatu berupa rumah tunnel garam dan rehab gudang garam rakyat
- b. Pembinaan Kelompok pembudidaya ikan sebanyak 6 kelompok yaitu
 - 1) Kelompok budidaya rumput laut Doro O'o kabupaten Bima berupa sarana budidaya rumput laut
 - 2) kelompok pembudidaya ikan di terano sebanyak 5 (lima) kelompok berupa pemberian benih ikan
- c. Kelompok nelayan yang terbina sebanyak 104 kelompok

Bantuan alat penangkapan ikan suport dari kementerian Kelautan dan Perikanan kepada 104 kelompok penerima yaitu Dompu sebanyak 14 kelompok, Bima sebanyak 28 kelompok, Lombok tengah sebanyak 29 kelompok dan Lombok Utara sebanyak 33 kelompok.

- d. Kelompok pengolahan dan pemasaran yang terbina sebanyak 27 kelompok

Pada Tahun 2020 capaian produksi garam sebesar 162.987,15 ton atau tercapai 85,78% dari target sebesar 190.000 ton. meningkat 4,67 % dibanding produksi tahun 2019 dan menurun 45,11 % dibanding produksi tahun 2018. Aktivitas budidaya garam pada tahun 2020 terpengaruhi adanya dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan terhambatnya para pelaku usaha garam dalam memproduksi garam sehingga produksi garam pada tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Bidang Pariwisata

Urusan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB Tahun 2020. Target dan capaian indikator urusan pariwisata Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-110 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Angka kunjungan wisatawan	4.000.000 Orang	3.706.352 Orang	4.400.000 Orang	400.595 Orang
2	Persentase desa wisata yang dikembangkan (target 99 desa)	20 %	20 %	40 %	40 %
3	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	130 Orang	30 Orang	200 Orang	90 orang (45%)
4	Rata-rata lama menginap	2,75 Hari	2,05 Hari	2.95 Hari	3,25 hari
5	Persentase geosite yang tertata	0 %	0 %	12,50 %	0%

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2020

Capaian kinerja indikator bidang urusan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Angka kunjungan wisatawan yang data berkunjung ke NTB

Angka kunjungan wisatawan ke NTB pada tahun 2020 menurun drastis sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Wisatawan yang berkunjung ke NTB tercatat sebesar 400.595 orang terdiri dari 360.613 wisatawan nusantara dan 39,982 wisatawan mancanegara turun sangat jauh dari tahun 2019 sebesar 3.076.352 orang. Diantara penyebabnya adalah pemberlakuan pembatasan perjalanan oleh negara asal wisatawan menuju Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri penguatan promosi, penataan destinasi, penguatan kelembagaan pengelola destinasi dan sertifikasi CHSE untuk meyakinkan wisatawan bahwa daerah kita siap dan aman untuk dikunjungi.

Persentase desa wisata yang dikembangkan (target 99 desa)

Desa wisata adalah suatu daerah tujuan wisata, di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas penunjang dan kemudahan akses. Semuanya disajikan menyatu dengan tata cara dan tradisi warga desa. Telah ditetapkan SK Gubernur NTB Nomor 050.13-366 tahun 2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan 99 lokasi Desa Wisata di Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 sebagai dasar pengembangan Desa Wisata di Provinsi NTB selama 5 tahun.

Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata Prov. NTB melakukan pengembangan 20 desa wisata yaitu: Kec. Selaparang, Kel. Monjok; Kec. Cakranegara, Kel. Sapta Marga; Kec. Sekarbela, Kel. Tanjung Karang; Kec. Cakranegara, Kel. Cakranegara Selatan; Kec. Mataram, Kel. Pagutan Barat; Kec. Mataram, Kel. Pagutan Timur; Kec. Mataram, Kel. Pagesangan Barat; Islamic Center; Wisata Mangrove Sekotong Timur; Wisata Tawun Sekotong Barat; Wisata Taman Narmada; Gili Gede; Desa

Lingsar; Desa Banyumulek; Desa Penujak; Desa Wisata Lingkar Bandara; Desa Mertak; Desa Lantan; Desa Kuta; Desa Bilebante; Bandara Abdul Majid; Kec. Pringgesele, Kel. Pengadangan; Kec. Pringgabaya, Kel. Kembang; Kec. Aikmel, Kel. Kembang; Kec. Wanasaba, Kel. Wanasaba; Kec. Pringgabaya, Kel. Labuhan Lombok; Sembalun; Gili Kondo, Lombok Timur; Dusun Lombok Baru, Kec. Pringgabaya; Desa Labuhan Pandan; Desa Sugian; Desa Labuhan Haji; Desa Senanggih; Sendang Gila, Semeru; Gili Air; Kec. Gangga, Kel. Bentek; Senaru; Desa Bayan, Kec. Bayan; Desa Genggelang; Desa Kertasari; Desa Brang Rea, Kec. Moyo Hulu; Ai Bening; Desa Labuhan Jambu; Kec. Jereweh, Kel. Goa; Desa Beru; Desa Poto Tano; Desa Nangamiro; Desa Malaju; Desa Soro; Desa Risa; dan Pantai Lawata

Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar

Pengembangan SDM penunjang pariwisata dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan/pemberdayaan berlokasi di Sesaot; Lingkar Mandalika, Kuta; dan Lingkar Mandalika, Penunjak yang melibatkan 90 orang. Pada tahun 2020, dinas pariwisata menargetkan dapat melatih SDM Pariwisata sebanyak 200 orang, adapun realisasinya hanya dapat melatih 90 orang (45%). Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran akibat Covid-19. SDM pariwisata dituntut memiliki hospitality serta dapat bekerja secara profesional dalam memberikan layanan kepada wisatawan. Hal ini akan memberikan kesan dan pengalaman yang baik kepada wisatawan sehingga diharapkan dapat untuk melakukan revisiting atau mempromosikan destinasi wisata di NTB secara tidak langsung.

Rata-rata lama menginap

Indikator rata-rata lama menginap dihitung dari rata-rata jumlah hari wisatawan menginap/tinggal di hotel bintang dan non bintang. Pada tahun 2020 ditargetkan rata-rata lama menginap wisatawan di NTB 2,95 hari akan tetapi hanya tercapai 1,65 hari. Disamping penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung disertai dengan penurunan lama menginap semakin memperburuk perputaran roda ekonomi sektor pariwisata. Perlu dilakukan Langkah-langkah strategis untuk mengembalikan minat wisatawan berkunjung dan memperlama masa tinggalnya di NTB, misalnya memberikan diskon penginapa pada para wisatawan. Disamping itu hotel dan restoran diminta untuk melakukan sertifikasi Clean, Health, Safety, and Environment (CHSE) untuk menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan di masa pandemic Covid-19.

Persentase geosite yang tertata

Rinjani Lombok telah ditetapkan sebagai salah satu Geopark Dunia (Unesco Global Geopark) dengan tiga unsurnya yaitu geodiversity (keragaman geologi), biodiversity (keragaman hayati, dan cultural diversity (keragaman budaya). Dalam upaya untuk mendukung hal tersebut, Dinas pariwisata

melakukan penataan terhadap geosite-geosite yang ada. Rinjani Lombok UGG memiliki 22 situs Feologi (Geo Harritage), 8 Situs Biologi (Bio Herritage), dan 17 Situs Budaya (Culture Harritage). Pada tahun 2020 awalnya direncanakan penataan terhadap 50% geosite. Tetapi anggaran untuk kegiatan tersebut di rasionalisasi akibat refocusing Covid-19.

3. Bidang Pertanian

Urusan Pilihan Bidang Pertanian sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan rumpunnya dan berkontribusi dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, peningkatan nilai tukar petani, serta penyerap tenaga kerja dan lainnya.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan uraian sebagai berikut.

a. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Urusan Pilihan Bidang Sektor Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Indikator urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-111 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK Gubernur) Tahun 2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TAHUN 2020		CAPAIAN (%)	KET.
		TARGET	REALISASI		
1	Jumlah Produksi Padi Gabah Kering Giling	1.278.563,14 Ton	1.316.525,00	102,54	Data Potensi
2	Jumlah Produksi Jagung Pipilan Kering	2.170.083 Ton	1.918.180,76	88,40	Data Potensi
3	Jumlah Produksi Kedelai Biji Kering	57.225 Ton	43.918,42	76,75	Data Potensi
4	Jumlah Produksi Cabe Buah Segar	19.253 Ton	119.082	618,51	Asem 2020
5	Jml Produksi Bawang Merah Umbi Kering	199.386 Ton	188.740	94,66	Asem 2020
6	Jumlah Produksi Manggis	7.459 Ton	22.336	299,45	Asem 2020
7	Jumlah Produksi Kopi	4.987 Ton	5.856,97	117,45	Asem 2020
8	Jumlah Produksi Kakao	2.136 Ton	2.505,89	117,32	Asem 2020
9	Jumlah Produksi Jambu Mete	12.990 Ton	10.249,74	78,90	Asem 2020
10	Jumlah Produksi Kelapa	49.337 Ton	47.379,80	96,03	Asem 2020
11	Jumlah Produksi Tembakau	52.211 Ton	52.654,69	101,00	Asem 2020
12	Jumlah Nilai Tukar Petani	>105 %	109,22 %	104,02	BPS NTP
13	Jumlah Petugas, Petani, Pelaku Usaha dan Siswa peserta didik yang ditingkatkan pengetahuannya	31,75 %	38,25 %	120,47	Data Potensi

Sumber: Data potensi produksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2020

Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi setiap bulannya, pada bulan Desember 2020 Nilai Tukar Petani gabung tercatat sebesar 109,22 persen mengalami penurunan sebesar (0,03) dibandingkan NTP pada bulan November sebesar 109,19 persen. Dengan demikian Target nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 sebesar >105 berada di atas 100 (tercatat 109,22) yang berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya, data selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-112 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2018 - 2020

No	NTP	2018	2019	2020
1.	Januari	107,81	110,79	107,18
2.	Februari	106,02	110,32	107,96
3.	Maret	106,66	110,46	107,52
4.	April	106,04	109,36	105,88
5.	Mei	106,69	109,26	105,91
6.	Juni	107,41	110,82	105,70
7.	Juli	107,95	124,81	106,50
8.	Agustus	108,99	125,18	106,99
9.	September	109,76	115,04	107,10
10.	Oktober	110,83	115,27	108,38
11.	November	111,21	115,81	109,19
12.	Desember	110,91	115,35	109,22

Sumber : BPS data diolah kembali

Komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh para petani adalah padi, jagung dan kedelai dengan produksi padi mencapai 1.316.525,00 ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung pipilan kering sebesar 1.918.180,75 ton dan produksi kedelai sebesar 43.918,42 ton biji kering, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-113 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)			
		2018	2019	2020	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Padi (GKG)	2.491.949	2.436.349	1.278.563,14	1.316.525,00
2.	Jagung (Pipilan Kering)	2.061.857	2.003.267	2.170.083	1.918.180,75
3.	Kedelai (Biji Kering)	71.908	80.925	57.225	43.918,42

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, *) Potensi Data Produksi Tanaman Pangan 2020

Hasil potensi data produksi tanaman pangan tahun 2020 produksi padi mencapai 1.316.525,00 ton Gabah Kering Giling/GKG, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019 menurun hal ini disebabkan karena cara perhitungan target

RPJMD yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 perhitungan menggunakan SP sedangkan hasil produksi tahun 2019/2020 menggunakan KSA (Kerangka Sampel Areal), yaitu perhitungan luas lahan baku yang mengacu pada ATR kementerian Badan Pertanahan Nasional. Penurunan produksi padi di tahun 2020 ini sebagian besar disebabkan karena adanya dampak perubahan iklim (kekeringan). Menurut data UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN luas kekeringan tanaman pangan tahun 2020 adalah sebesar 8.416,84 ha atau 7,93 persen dari luas tanam komoditas padi, yaitu 106.156 ha.

Tabel 3. 1. Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	JENIS TANAMAN	2018	2019	PRODUKSI (Ton)	
				2020	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Cabai (buah segar)	234.528	181.926	19.253	119.082
2.	Bawang merah (umbi basah)	212.885	161.411	199.386	188.740
3	Manggis buah segar	11.362	11.556	7.459	22.336

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020 *) ASEM

Dalam menyukseskan program swasembada pangan di NTB. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan memfasilitasi ketersediaan pupuk yang memadai diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan produksi pertanian para petani. Tahun 2020 Pupuk bersubsidi yang tersedia tepat waktu, tepat jumlah dan harga serta sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-114 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2017-2020

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
1	UREA	2017	165.330,00	164.246,45	99,34
		2018	179.815,00	179.726,00	99,95
		2019	161.234,00	161.029,35	99,87
		2020	189.553,00	189.087,20	99,75
2	SP-36	2017	17.069,00	17.069,00	100,00
		2018	19.350,00	18.722,55	96,76
		2019	19.280,00	19.060,05	98,86
		2020	17.547,00	17.099,65	97,45
3	ZA	2017	18.047,00	18.046,50	100,00
		2018	19.181,00	18.637,93	97,17
		2019	18.640,00	18.122,05	97,22
		2020	20.112,00	19.574,63	97,33
4	NPK	2017	59.160,00	54.122,00	91,48
		2018	54.850,00	52.289,03	95,33
		2019	47.620,00	47.571,35	99,90
		2020	53.135,00	52.716,62	99,21
5	ORGANIK	2017	7.927,00	7.765,00	97,96
		2018	7.500,00	7.434,99	99,13
		2019	11.010,00	7.511,20	68,22

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
		2020	8,400,00	6,817,24	81,16

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2020

Faktor utama dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat yang tepat jumlah dan waktunya menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BPSB-P) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-115 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2018-2020

NO	KOMODITI	LUAS LULUS LAPANGAN (Ha)		
		2018	2019	2020
1.	Padi	5.836,94	3.932,85	4.975,88
2.	Jagung	21,00	95,63	329,90
3.	Kedelai	4.777,60	3.403,41	1.663,10

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2020

Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditi unggulan Provinsi NTB di bidang perkebunan adalah jambu mete, kopi, tembakau, kakao, dan kelapa. Produksi perkebunan tersebar di kabupaten/kota. Adapun produksi komoditi perkebunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2-116 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	KOMODITI	PRODUKSI (TON)		PRODUKSI (TON)	
		2018	2019	2020	
				TARGET	REALISASI *)
1	Kopi	5.005,90	6.566,36	4.987	5.856,97
2	Kelapa	45.555,62	48.766,08	49.337	47.379,80
3	Kakao	1.818,90	2.219,35	2.136	2.505,89
4	Jambu Mete	11.554,94	10.410,72	12.990	10249,74
5	Tembakau	44.570,56	43.068,47	52.211	52.654,69

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2020 *) ASEM (Angka Sementara) tahun 2020

Dilihat dari capaian tahun 2020 komoditi perkebunan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, terkecuali komoditi jambu mete dan kelapa yang belum mencapai target yang diharapkan. Produksi Jambu mete tahun 2020 menurun 1,55 persen dibandingkan produksi tahun 2019. Dari target RPJMD produksi jambu mete menurun 21,00 persen. Produksi kelapa tahun 2020 menurun 2,84 persen dibandingkan produksi tahun 2019

Penurunan beberapa komoditi perkebunan yaitu jambu mete dan kelapa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ;

1. Tanaman jambu mete yang ada di NTB rata-rata berumur 15 tahun keatas;
2. Adanya alih fungsi lahan produktif dan penurunan minat petani muda terhadap budidaya jambu mete (petani yang ada adalah petani berumur 40 tahun keatas);
3. Tanaman kelapa banyak yang dijual muda karena harga yang menjanjikan;
4. Adanya tanaman yang rusak akibat hama Bronthispa.

b. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Urusan Pilihan Bidang Sektor Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Indikator urusan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-117 Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR (SATUAN)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Persentase Peningkatan Populasi Dan Produksi Sub Sektor Peternakan	5,5 %	4,1 %	74,54	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB 2020

Capaian Persentase Peningkatan Populasi Dan Produksi Sub Sektor Peternakan yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 telah mencapai 74,54 persen, didukung dengan program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Kontribusi Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb. Capaian PDRB sub sektor Peternakan selama tiga tahun mengalami perkembangan yang positif, pada tahun 2017 sebesar 3.321,70 milyar, tahun 2018 meningkat menjadi 3.402,47 milyar, tahun 2019 mencapai 3.496,14 milyar (data BPS 2019). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan

kontribusi Subkategori Peternakan terhadap struktur perekonomian NTB masih dominan.

Dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani pada sub sektor peternakan perlu dilakukan peningkatan nilai tambah produk peternakan, pengaturan regulasi dan transaksi perdagangan ternak antar pulau. NTPT dalam tahun 2018-2020 menurut analisis BPS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2-118 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2018 - 2020

NO	NTPT	2018	2019	2020
1.	Januari	121,47	127,02	106,53
2.	Februari	120,17	126,62	106,71
3.	Maret	121,39	126,79	105,91
4.	April	122,89	126,15	105,11
5.	Mei	124,26	126,49	105,58
6.	Juni	127,16	128,83	108,00
7.	Juli	128,00	130,82	108,84
8.	Agustus	130,37	133,58	107,47
9.	September	128,36	136,24	107,64
10.	Oktober	128,36	135,90	108,36
11.	November	128,43	137,12	107,02
12.	Desember	127,14	136,25	107,33

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Pada tabel diatas terlihat adanya trend peningkatan Nilai Tukar Petani di NTB adalah 130,98 ponit pada tahun 2019 turun menjadi 107,04 point pada tahun 2020. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Dibayar Petani meningkat sebesar 0,68 persen, lebih besar dari peningkatan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,64 persen. Faktor penyebab menurunnya indeks NTP peternakan adalah adanya pandemic corona disease 19 (covid 19) yang berpengaruh terhadap sektor perekonomian masyarakat secara menyeluruh sehingga sebagian anggaran OPD difocusing untuk menanggulangi dampak covid 19 dan memulihkan perekonomian masyarakat.

Populasi Ternak

Populasi dan produksi ternak di NTB mengalami perkembangan melalui program strategis dan unggulan daerah bertujuan untuk peningkatan ekonomi, sekaligus memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB Sektor pertanian, menurunkan angka kemiskinan, mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penyumbang kebutuhan daging nasional. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Secara sinergi dari keempat program dimaksud menjabarkan

aktifitas dan kegiatan Fungsional Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam mencapai target dan sasaran pembangunan peternakan tahun 2019 – 2023.

Komoditas strategis peternakan yang dikembangkan di NTB digambarkan dalam populasi ternak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-119 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2018 - 2020

NO	TERNAK	POPULASI TERNAK (EKOR)		
		2018	2019	2020
1	Sapi	1.183.570	1.234.357	1.285.746
2	Kerbau	120.149	121.572	115.151
3	Kuda	47.738	47.292	43.705
4	Kambing	672.854	622.039	709.768
5	Domba	26.690	21.862	23.058
6	Babi	56.986	60.066	69.518
7	Ayam Ras Petelur	787.648	1.246.699	1.438.497
8	Ayam Ras Pedaging	9.917.920	15.187.650	15.787.388
9	Ayam Buras	8.262.407	7.870.476	7.697.844
10	Itik	1.118.601	1.169.034	737.703

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Data Sementara 2020

Dari beberapa komoditas peternakan yang tertuang dalam tabel tersebut terdapat 3 komoditas ternak yang termasuk komoditas andalan/ unggulan yaitu Sapi, Kambing dan Unggas. Rata – rata trend pertumbuhan populasi ternak sapi dari 2018 – 2020 adalah sebesar 4,1% dari target pertumbuhan 5 %. Peternakan sapi merupakan usaha peternakan rakyat dengan agroinput dan pembiayaannya masih banyak dilakukan masyarakat peternak oleh karena itu capaian peningkatan populasi melalui dukungan dan pembiayaan pemerintah di tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh calving interval ternak sapi/kerbau yang masih lebih dari 12 bulan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi, selain itu, servis per conception masih 2,5 point yang masih perlu ditingkatkan menjadi 2 point. Untuk mempercepat calving interval perlu dioptimalkan inseminasi buatan dan intensifikasi kawin alam dengan penyediaan Bulls dan Pejantan Pemacek serta ketersediaan semen beku dalam mendukung ketersediaan bibit dan benih melalui kelahiran IB maupun kelahiran Alam. Pencapaian target peningkatan populasi dimaksud merupakan kontribusi dari program peningkatan produksi peternakan melalui Inseminasi Buatan (IB) dan kelahiran dan juga didukung oleh optimalisasi fungsional bidang pengembangan hijauan pakan ternak, peningkatan kelembagaan dan usaha perbibitan, pengembangan teknologi penerapan hasil peternakan serta adanya aktifitas pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit ternak pada masyarakat peternak.

Peningkatan Produksi daging dari tahun 2018-2020 di NTB baik ternak ruminansia maupun ternak unggas, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-120 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO	TERNAK	PRODUKSI DAGING (Ton)		
		2018	2019	2020
1	Kuda	109,35	70,8	391,0
2	Sapi	9.969,0	10.627	22.684,0
3	Kerbau	942,04	1.071	1.502,9
4	Kambing	2.854,25	2.900,3	1.319,7
5	Domba	12,79	10,6	140,1
6	Babi	97,93	87,5	115,9
7	Ayam Ras	66.318,34	66.406,4	65.430,8
8	Ayam Buras	10.873,33	11.225,8	8.236,6
9	Itik	2.013,48	1.167,2	1.036

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Data Sementara Tahun 2020

Produksi daging di Provinsi NTB sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa daging sapi, dan domba dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Untuk daging ayam ras, ayam buras, kambing mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019. Sedangkan untuk daging kerbau, babi dan itik fluktuatif. Permintaan ternak bibit dan ternak potong dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain DKI, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan daerah lainnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menyiapkan data sebagaimana tabel berikut.

Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan

Produk pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani sangatlah penting bagi tubuh, seperti daging, telur dan susu. Kebijakan pemerintah dalam penyedia pangan asal hewan di Indonesia didasarkan atas pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. Peningkatan populasi ternak di NTB juga membawa dampak positif dalam penyediaan daging bagi konsumen lokal maupun regional.

Tabel 2-121 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO.	TERNAK	PRODUKSI DAGING (TON)		
		2018	2019	2020
1	Kuda	109,35	70,80	391,0
2	Sapi	9.908,7	10.627,7	22.684,0
3	Kerbau	942,21	1.071,05	1.502,9
4	Kambing	2.850,21	2.900,34	1.319,7
5	Domba	12,80	10,63	140,1
6	Babi	97,91	87,53	115,9
7	Ayam Ras	62.570,73	66.406,43	65.430,8
8	Ayam Buras	11.220,35	11.225,77	8.236,6
9	Itik	1.107,41	1.167,92	1.036,0

10	Jeroan semua	11.450,34	12.060,38	1.423,6
	Jumlah	100.270,06	105.628,53	102.280,56

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

Tabel di atas menunjukkan bahwa produk daging sapi, Kerbau, Domba dan Babi serta Kuda mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020, namun demikian terdapat beberapa produk daging yang menunjukkan pengurangan seperti daging Kambing, ayam Ras maupun Buras serta daging Itik.

Tabel 2-122 Data Pemasukan DOC Tahun 2018 -2020

NO.	TERNAK	DATA PEMASUKAN (EKOR)		
		2018	2019	2020
1	DOC Ayam Buras	782.000	127.000	1.081.800
2	DOC Ayam Ras Pedaging	39.119.728	40.379.624	34.498.040
3	DOC Ayam Ras Petelur	3.229.000	5.380.000	4.160.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2020

Untuk produksi telur lokal, selain diperuntukkan bagi kebutuhan daerah, juga bisa memenuhi kebutuhan daerah lain.

Tabel 2-123 Produksi Telur di Provinsi NTB Tahun 2018-2020

NO.	TERNAK	PRODUKSI TELUR (TON)		
		2018	2019	2020
1	Ayam Ras	18.795,00	33.904,50	21.288,8
2	Ayam Buras	23.770,94	23.782,43	23.771,6
3	Itik	10.775,48	11.364,24	1.334,6
	Jumlah	42.142,27	53.341,43	56.395,19

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2020

4. Bidang Kehutanan

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu dengan 13 Balai/UPTD KPH yang tersebar di 8 Kab/Kota dengan Indikator urusan bidang kehutanan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-124 Indikator urusan Kehutanan berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	REALISASI (JUTA RUPIAH)	TAHUN 2019 (JUTA RUPIAH)		TAHUN 2020 (JUTA RUPIAH)	
		2018	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Pertambahan Nilai PDRB sektor kehutanan	80,03	820,3	83,84	825,03	114,30
		Realisasi (%)	Tahun 2019 (%)		Tahun 2020(%)	
		2018	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		0,08	21,93	0,08	21,90	0,09

Sumber data BPS 2019

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk menjadi sebuah negara atau daerah yang maju. Pertumbuhan ini ditandai dengan adanya transformasi ekonomi melalui penguatan sektor, berkembangnya industri manufaktur, modernisasi sektor jasa, berkembangnya inovasi dan yang tidak kalah penting adalah meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah, perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat mendukung upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk mengurangi angka kemiskinan. Strategi umum yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB adalah meningkatkan investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB fokus dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Urusan kehutanan berkontribusi terhadap indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 3 tahun terakhir. Jika mengacu pada nilai IKTL beberapa tahun sebelumnya, nilai IKTL menurun 0,89 poin dari tahun 2018 ke 2019, namun diperkirakan nilai IKTL untuk Tahun 2020 akan tetap berada di atas nilai 60. Nilai IKTL NTB Tahun 2018 dan 2019 berturut-turut lebih tinggi 5,53 poin dan dibandingkan dengan IKTL Nasional sebagaimana tabel berikut.

Sebagai dukungan terhadap capaian indikator IKLH di dalam RPJMD 2019-2023, pemerintah NTB menetapkan program NTB Hijau sebagai salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB khususnya bertujuan untuk meningkatkan nilai indeks tutupan lahan. NTB Hijau juga mendukung pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang dilaksanakan melalui berbagai program di Dinas LHK, antara lain:

1. Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial;

- a. Penanaman di dalam dan luar kawasan hutan

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghidupkan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global.

Pada tahun 2020, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas **10.270,5 ha** dalam bentuk kegiatan 1) Pengembangan HHBK, 2) Peremajaan HHBK, 3) Penanaman Hutan Rakyat, 4) Demplot HHBK, 5) Pembuatan Bibit MPTS, dan 6) Kebun Bibit Rakyat melalui APBD, APBN BPDASHL Dodokan Moyosari, dana swasta (kewajiban atas ijin pinjam pakai kawasan hutan), penghijauan, dan dana aspirasi anggota DPRD dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020

NO.	SUMBER DANA	LUASAN (HA)	JUMLAH BIBIT (BATANG)
1.	APBD	1.982,5	901.250
2.	Sumber Dana Swasta, Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Reboisasi)	1.237	807.725
3.	APBN (BPDAS HL DODOKAN MOYOSARI NTB)	6.920	4.314.630
4.	Hibah	131	52.800
TOTAL		10.270,5	6.076.405

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2020

- b. Penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2020, telah dilakukan identifikasi lokasi serta groundcheck untuk pembangunan KTA di Tahun 2021. Sebanyak 256 unit KTA direncanakan akan dibangun di Tahun 2021.
- c. Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
 Capaian kinerja yang telah dilaksanakan antara lain pembentukan kelompok tani hutan (KTH) sebanyak 20 kelompok di KPH/Tahura se-NTB. Jumlah capaian pembentukan KTH belum mencapai target (30 kelompok) karena sebagian anggarannya dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19. Pembentukan KTH pada KPH dan Tahura dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3. Pembentukan Kelompok Tani Hutan pada KPH/Tahura se-NTB Tahun 2020

NO.	NAMA KTH	LOKASI		
		DESA	KECAMATAN	KABUPATEN
KPH Rinjani Barat				
1	Langkah Pakok	Bentek	Gangga	Lombok Utara
2	Sadar Membangun	Bengkaung	Batulayar	Lombok Barat
3	Kertasari Asmaul Husna Blongas	Buwun Mas	Sekotong	Lombok Barat
4	Mekar Sari	Bentek	Gangga	Lombok Utara
5	Poan Sejahtera	Guntur Macan	Gunung Sari	Lombok Barat
6	Pada Pacu	Bentek	Gangga	Lombok Utara
7	Lereng Murmas	Bentek	Gangga	Lombok Utara
8	Harapan Maju Bareng	Bentek	Gangga	Lombok Utara
9	Mur Juring	Bentek	Gangga	Lombok Utara
10	Beriuk Genah	Sedau	Narmada	Lombok Barat
11	Bukit Tembolak	Kekait	Gunung Sari	Lombok Barat
12	Sekar Wangi	Lembah Sari	Batulayar	Lombok Barat
13	Batu Belah	Kekait	Gunung Sari	Lombok Barat
14	Serintes Aur Kowe	Bentek	Gangga	Lombok Utara
15	Tangkur Bila	Bentek	Gangga	Lombok Utara
16	Tama Ulung	Bentek	Gangga	Lombok Utara
KPH Pelangan Tastura				
17	Karya Tani	Batu Jangkih	Praya Barat Daya	Lombok Tengah
KPH Rinjani Timur				
18	Sinar Baru	Batu Jangkih	Praya Barat Daya	Lombok Tengah
Tahura Nuraksa				
19	Lembah Duren	Karang Sidemen	Batu Keliang Utara	Lombok Tengah
20	Rajeng Subur	Karang Sidemen	Batu Keliang Utara	Lombok Tengah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2020

Program Perhutanan Sosial (PS) yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar : lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Di Provinsi NTB program Perhutanan Sosial dijalankan dalam 3 skema yaitu Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, dan Kemitraaan Kehutanan. Kondisinya sampai dengan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Skema Perhutanan Sosial Tahun 2020

NO.	SKEMA PERHUTANAN SOSIAL	LUASAN (HA)	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)
1	Hutan Tanaman Rakyat	3.152,88	2.916
2	Hutan Kemasyarakatan	24.271,6	22.223
3	Kemitraaan Kehutanan	20.205,16	11.968

2. Program Pengelolaan Hutan;

Pemerintah Provinsi NTB menetapkan program unggulan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan “Industrialisasi HHBK Unggul”, upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi NTB. Pengembangan HHBK memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah produk HHBK, mendukung pengelolaan hutan lestari, meningkatkan PAD dan PNPB, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui usaha produktif.

Industrialisasi kehutanan didorong melalui upaya kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah. Bentuk kerjasama dengan Pemerintah antara lain :

- a. Kerjasama BUMDes (Penyediaan peralatan pengolahan)
- b. Kerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten
- c. Kerjasama penyediaan bibit dengan Dinas LH Kab/Kota

Sedangkan kerjasama dengan non pemerintah antara lain :

1. Kerjasama Inkubasi dan pengolahan dengan dunia usaha
2. Kerjasama sumber pakan ternak di Kawasan hutan
3. Kerjasama Pengolahan Walet, HHBK dengan investor (Bambu, Kayu Putih

Industrialisasi kehutanan didukung dengan pengembangan jenis tanaman produktif yang memperhitungkan kesesuaian lahan. Di Tahun 2020, Dinas LHK NTB fokus pada 4 jenis industri pengolah hasil hutan kayu dan bukan kayu, antara lain 1) Industri Pengolahan bamboo, 2) Industri Kayu Lapis, 3) Industri Pengolahan Minyak Atsiri, dan 4) Industri Pakan Ternak. Di Provinsi NTB, telah dipetakan titik-titik potensial yang akan menjadi cikal bakal industrialisasi kehutanan sebagai berikut



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

Gambar 2- 21 Sebaran Potensial Cikal Bakal Industrialisasi Kehutanan

Tanaman Kayu Putih merupakan tanaman Pionir mampu hidup dalam lahan kritis dan tidak dimakan ternak. Saat ini, sudah terdapat pabrik pengolahan minyak kayu putih yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat sebanyak 2 unit di Desa Bentek Kec. Gangga dan Desa Lendang Luar Kec. Malaka. Total kapasitas produksi 2 unit tersebut sudah mencapai 600 kg/hari. Minyak kayu putih yang dihasilkan unit KPH Rinjani Barat sudah menghasilkan kadar sineol di atas SNI. Sedangkan pengolahan minyak kayu putih oleh KPH Batulanteh masih dalam proses uji coba. Kapasitas penyulingan minyak kayu putih masih berkisar 100 kg/hari.

HHBK lainnya yang sedang dikembangkan adalah Rotan. Rotan akan meningkat nilai tambahnya jika jenis Rotan Basah diubah menjadi Rotan awet dengan sedikit upaya pengawetan. KPH Sejorong Mataiyang bersama Bumdes mengelola rotan dengan produksi 200 ton/tahun. Mitra KPH Sejorong Mataiyang adalah KTH Olat Parigi dan BUMDes Orong Kleta Desa Sekongkang Atas Sumbawa Barat.

Potensi HHBK Kemiri tersebar di beberapa KPH antara lain tersebar KPH Batulanteh, KPH Maria Donggomassa, KPH Rinjani Barat, dan KPH Sejorong Mataiyang. Kendala dalam pengembangan kemiri adalah produk kelompok hanya pada tingkat kemiri glondongan dan kemiri kupas karena keterbatasan alat pengolahan kemiri. Terkait

proses pemasaran, masih dibutuhkan off taker (pembeli) dan pasar minyak, meski pasar minyak Kemiri cukup terbuka.

Dalam proses pengembangan industrialisasi HHBK, beberapa upayagencar dilakukan agar prosesnya berjalan maksimal, antara lain secara intensif melakukan pembinaan kelompok/masyarakat pengelola produk HHBK, sosialisasi peraturan dengan pemegang ijin IUPHHK-HTR/IUPHKm, IUPHHBK, Fasilitas sarpras pengembangan produk HHBK, sosialisasi regulasi pengolahan dan peredaran hasil hutan (PPHH), pengembangan luasan penanaman HHBK, (fasilitasi pemungutan PNPB dan PAD, dan meningkatkan sinergitas antara KPH.

Dinas LHK NTB juga berperan aktif pada kegiatan stimulus ekonomi dalam rangka penanggulangan Covid-19 berupa hibah pemberian bantuan sarpras pengolah HHBK sebanyak 118 unit kepada 32 Kelompok Tani Hutan, yang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3. 5. Pemberian Hibah Sarana dan Prasana kepada Pengolah HHBK dan Kelompok Tani Hutan Tahun 2020

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH			
				KELOMPOK	ALAMAT		
1	Tahura Nuraksa	Mesin pengolahan coklat/ kakao	1 Paket	KTH Selendang Rinjani	Desa Karang Sidemen, Kec. Batu Kliang Utara, Kab. Lombok Tengah		
		- Alat pengemas kakao	1 unit				
		- Alat fermentasi coklat	1 unit				
		- Mesin string/ mixer 10 lt	1 unit				
		- Mesin kupas biji coklat	1 unit				
		- Mesin pasta kakao halus	1 unit				
		- Mesin pasta kakao kasar	1 unit				
		- Mesin press biji coklat hidrolik	1 unit				
2	KPH Batulanteh	Mesin pengolahan bambu	1 Paket	KTH Ai Mena	Desa Batudulang, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa		
		- Mesin irat bambu	1 unit				
		- Mesin pembelah bambu	1 unit				
		- Mesin peruncing	1 unit				
		- Mesin poles	1 unit				
		- Mesin potong bambu	1 unit				
		- Mesin potong jeruji bambu	1 unit				
				Mesin pengolahan kelor	1 Paket	BUMDes Batu Petinang	Desa Kerekeh, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa
				- Mesin packing	1 unit		

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH			
				KELOMPOK	ALAMAT		
		- Mesin pembubukan kelor	1 unit				
		- Mesin pengering daun kelor	1 unit				
		- Mesin sortasi serbuk kelor	1 unit				
						KTH Brang Tampu	Desa Batudulang, Kec. Batulanteh, Kab. Sumbawa
		Mesin pengolahan kopi	1 Paket				
		- Alat pengemasan kopi	1 unit				
		- Mesin bubuk kopi	1 unit				
		- Mesin kupas kopi kering	1 unit				
		- Mesin roaster kopi	1 unit				
		- Mesin sangrai kopi kering	1 unit				
3	KPH Rinjani Timur	Mesin pengolahan jahe	1 Paket	KTH Lempe Waris	Desa Perigi, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur		
		- Mesin cacah rempah	1 unit				
		- Mesin mixer tepung	1 unit				
		- Mesin packing	1 unit				
		- Mesin penepung rempah	1 unit				
		- Mesin pengering rempah	1 unit				
		- Mesin peras rempah hidrolik	1 unit				
						HKm Sekaroh Maju	Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur
		Mesin pengolahan dodol sirsak/ srikaya	1 Paket				
		- alat cetak dodol	1 unit				
		- Mesin blender buah	1 unit				
		- Mesin pengaduk pemasak	1 unit				
		- Oven pengering	1 unit			HKm Dongo Baru	Desa Sapit, Kec. Suela, Kab. Lombok Timur
		Mesin pengolahan kopi	1 Paket				
		- Alat pengemasan kopi	1 unit				
		- Mesin bubuk kopi	1 unit				
		- Mesin kupas kopi kering	1 unit				
		- Mesin roaster kopi	1 unit				
- Mesin sangrai kopi kering	1 unit						
4	KPH Brang Beh	Mesin pengolahan umbi gadung	1 Paket	KTH Melati	Desa Lunyuk Rea, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa		
		- Deep fryer	1 unit				
		- Mesin cacah	1 unit				
		- Mesin cuci	1 unit				
		- Mesin kupas	1 unit				
		- Mesin pengering	1 unit				
		- Mesin peniris (spinner)	1 unit				

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH			
				KELOMPOK	ALAMAT		
5	KPH Ampang Riwo	Alat pengolahan pasca panen madu	1 Paket	KTH UD. Putra Pertama	Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa		
		- Alat penyaring madu	1 unit				
		- Mesin spinner madu	1 unit				
				Mesin pengolahan kelor	1 Paket	KTH Rontu Rangge	Desa Banggo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu
				- Mesin packing	1 unit		
				- Mesin pembubukan kelor	1 unit		
				- Mesin pengering daun kelor	1 unit		
		- Mesin sortasi serbuk kelor	1 unit				
6	KPH Toffo Pajo Soromandi	Alat pengolahan pasca panen madu	1 Paket	Kelompok Tani Dore Laju	Desa Daha, Kec. HUU, Kab. Dompu		
		- Alat penyaring madu	1 unit				
		- Mesin spinner madu	1 unit				
				Mesin pengolahan kelor	1 Paket	Kelompok Tani Dompu Juara	Desa Kramat, Kec. Kilo, Kab. Dompu
				- Mesin packing	1 unit		
				- Mesin pembubukan kelor	1 unit		
				- Mesin pengering daun kelor	1 unit		
				- Mesin sortasi serbuk kelor	1 unit		
				Mesin pengolahan kopi	1 Paket	Kelompok Tani So Palampi	Desa Mbawa, Kec. Donggo, Kab. Bima
				- Alat pengemasan kopi	1 unit		
				- Mesin bubuk kopi	1 unit		
				- Mesin kupas kopi kering	1 unit		
				- Mesin roaster kopi	1 unit		
				- Mesin sangrai kopi kering	1 unit		
7	KPH Ropang	Mesin pengolahan kopi	1 Paket	KTH Angin Renas	Desa Lawin, Kec. Ropang, kab. Sumbawa		
		- Alat pengemasan kopi	1 unit				
		- Mesin bubuk kopi	1 unit				
		- Mesin kupas kopi kering	1 unit				
		- Mesin roaster kopi	1 unit				
		- Mesin sangrai kopi kering	1 unit				
				Alat pengolahan pasca panen madu	1 Paket	KTH Pancar Bulaeng	Desa Sepukur, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa
				- Alat penyaring madu	1 unit		
				- Mesin spinner madu	1 unit		
8	KPH Ampang Plampang	Mesin pengolahan bambu	1 Paket	KTH Ai Turang	Desa Teluk Santong, Kec.		
		- Mesin irat bambu	1 unit				

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	
				KELOMPOK	ALAMAT
		- Mesin pembelah bambu	1 unit		Plampang, Kab. Sumbawa
		- Mesin peruncing	1 unit		
		- Mesin poles	1 unit		
		- Mesin potong bambu	1 unit		
		- Mesin potong jeruji bambu	1 unit		
9	KPH Brang Rea Puncak Ngenas	Mesin pengolahan kopi	1 Paket	KTH Bunga Kopi	Desa Marente, Kec. Alas, kab. Sumbawa
		- Alat pengemasan kopi	1 unit		
10	KPH Maria Donggomasa	Mesin pengolahan jahe	1 Paket	KTH Oi Rida	Desa Maria Utara, Kec. Wawo, Kab. Bima
		- Mesin cacah rempah	1 unit		
		- Mesin mixer tepung	1 unit		
		- Mesin packing	1 unit		
		- Mesin penepung rempah	1 unit		
		- Mesin pengering rempah	1 unit		
		- Mesin peras rempah hidrolik	1 unit		
		Mesin pengolahan umbi gadung	1 Paket	KTH Monggo Romo	Desa Sari, Kec. Sape Kab. Bima
		- Deep fryer	1 unit		
		- Mesin cacah	1 unit		
		- Mesin cuci	1 unit		
		- Mesin kupas	1 unit		
		- Mesin pengering	1 unit		
		- Mesin peniris (spinner)	1 unit		
		Mesin pengolahan dodol sirsak/ srikaya	1 Paket	KTH Batawawi	Desa Sari, Kec. Sape, Kab. Bima
		- alat cetak dodol	1 unit		
		- Mesin blender buah	1 unit		
		- Mesin pengaduk pemasak	1 unit		
		- Oven pengering	1 unit		
11	KPH Pelangan Tastura	Alat pengolahan pasca panen madu	1 Paket	KTH Maju Jaya	Desa Pelangan, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat
		- Alat penyaring madu	1 unit		
		- Mesin spinner madu	1 unit		
		Mesin olahan gula semut	1 Paket	KTH Hijau	Desa aik Bual, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah
		- Mesin kemasan sachet gula semut	1 unit		
12	KPH Rinjani Barat	Mesin pengolahan coklat/ kakao	1 Paket	KTH Tioq Ta Tunaq	Desa Rempek, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara
		- Alat pengemas kakao	1 unit		

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	
				KELOMPOK	ALAMAT
		- Alat fermentasi coklat	1 unit		
		- Mesin string/ mixer 10 lt	1 unit		
		- Mesin kupas biji coklat	1 unit		
		- Mesin pasta kakao halus	1 unit		
		- Mesin pasta kakao kasar	1 unit		
		- Mesin press biji coklat hidrolik	1 unit		
		Mesin pengolahan gula aren	1 Paket	KTH Bukit Tembolaq	Desa Kekait, Kec. Gunung Sari, Kab. Lombok Barat
		- Alat cetak gula aren	1 unit		
		- Mesin kristalisasi gula aren	1 unit		
13	KPH Sejorong Mataiyang	Alat pengolahan rotan	1 Paket		
		- Alat poles rotan	1 unit	KTH Taruna Mengadang	Desa Lalar Liang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
		- Mesin serut rotan	1 unit	KTH Sinar Regalu	Desa Mujahidin, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat
		- Tong press rotan	1 unit	KTH Ai Sanger	Desa Mataiyang, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat
		Mesin olahan gula semut	1 Paket	KTH Jalit Lestari	Desa Tongo, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat
		- Mesin kemasan sachet gula semut	1 unit		
		Mesin pengolahan gula aren	1 Paket	KTH Jalit Pamurung	Desa Mataiyang, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat
		- Alat cetak gula aren	1 unit		
		- Mesin kristalisasi gula aren	1 unit		
14	KPH Tambora	Mesin pengolahan kelor	1 Paket	KTH Sinar Tambora	Desa Tambora, Kec. Pekat, Kab. Dompu
		- Mesin packing	1 unit		
		- Mesin pembubukan kelor	1 unit		
		- Mesin pengering daun kelor	1 unit		
		- Mesin sortasi serbuk kelor	1 unit		
15	KPH Madapangga Rompu Waworada	Alat pengolahan pasca panen madu	1 Paket	KTH Mori Sama	Desa Diha, Kec. Belo, Kab. Bima
		- Alat penyaring madu	1 unit		
		- Mesin spinner madu	1 unit		
		Mesin pengolahan mente	1 Paket	KTH Oi Sili	Desa Diha, Kec. Belo, Kab. Bima
		- Alat kupas biji mente	1 unit		

NO	BALAI	JENIS MESIN	JUMLAH	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	
				KELOMPOK	ALAMAT
		- Deep fryer penggorengan	1 unit		
		- Mesin peniris minyak	1 unit		
		- Mesin vacuum sealer	1 unit		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2020

Terkait indikator kinerja jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, terdapat 3 (tiga) unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, CV. Makassar Utama, CV. Veneria, dan CV. Penggergajian H. Syafii.

Dinas LHK juga telah melaksanakan pendampingan dan bantuan fasilitasi penyusunan 9 dokumen RPHJPd. Selain itu, dilaksanakan juga sosialisasi tata batas kawasan hutan se Pulau Lombok dan Sumbawa yang difasilitasi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Denpasar.

3. Program Perlindungan Hutan, Konservasi, Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Upaya lainnya dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, pembinaan Kawasan Eekosistem Esensial (KEE), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 49 titik seluas 658 ha periode Januari – Desember 2020 yang tersebar di 15 unit KPH dan 1 unit Tahura seperti yang dirincikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Perlindungan Hutan, Konservasi, Sumber Daya Alam dan Ekosistem

NO	WILAYAH KERJA	TOTAL (HA)
1	Tahura Nuraksa	-
2	BKPH Rinjani Barat	-
3	BKPH Rinjani Timur	461.06
4	BKPH Pelangan Tastura	0.64
5	BKPH Sejong Mataiyang	-
6	BKPH Brang Beh	7.75
7	BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	-
8	BKPH Ropang	-
9	BKPH Orong Telu	-
10	BKPH Batu Lanteh	1.91
11	BKPH Ampang Plampang	8.08

12	BKPH Ampang Riwo	4.60
13	BKPH Toffo Pajo Soromandi	38.44
14	BKPH Madapangga Rompu Waworada	4.52
15	BKPH Tambora	-
16	BKPH Maria Donggomasa	131.00
Jumlah		658.00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2020

Operasi pengamanan hutan di areal hutan yang dilakukan oleh Dinas Induk, KPH, dan Tahura adalah pada areal seluas 19.043 hektar dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7. Luas Areal Operasi Pengamanan Hutan

NO	WILAYAH KERJA	TOTAL (HA)
1	Tahura Nuraksa	720
2	BKPH Rinjani Barat	98
3	BKPH Rinjani Timur	1.200
4	BKPH Pelangan Tastura	3.626
5	BKPH Sejongong Mataiyang	-
6	BKPH Brang Beh	529
7	BKPH Brang Rea Puncak Ngengas	-
8	BKPH Ropang	4.687
9	BKPH Orong Telu	-
10	BKPH Batu Lanteh	340
11	BKPH Ampang Plampang	2.469
12	BKPH Ampang Riwo	2.326
13	BKPH Toffo Pajo Soromandi	452
14	BKPH Madapangga Rompu Waworada	399
15	BKPH Tambora	56
16	BKPH Maria Donggomasa	2.141
Jumlah		19.043

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2020

Operasi ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh Dinas LHK. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang dapat terselesaikan di tahun 2020 sebanyak 21 kasus.

Penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2020 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Sementara itu upaya dari sisi legalitas, di Tahun 2020 Gubernur NTB mengeluarkan Instruksi Gubernur NTB Nomor 188.4.5-75 Tahun 2020 perihal Moratorium Penebangan dan Peredaran Hasil Hutan Kayu di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya Instruksi Gubernur NTB di atas, diharapkan dapat Mengatasi kondisi darurat illegal logging, menertibkan peredaran hasil hutan kayu, memutus mata rantai peredaran kayu illegal antar pulau, serta memberikan jeda bagi pemulihan kerusakan ekosistem hutan dan sumber daya yang ada di dalamnya. Selain instruksi Gubernur, pengelolaan hutan NTB diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan sebagai upaya untuk : 1) mewujudkan kawasan hutan yang mampu menciptakan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial, 2) mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien, 3) Memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif, dan 4) Menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan serta mencegah kerusakan kawasan hutan.

Tabel 3. 8. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2020

PERMASALAHAN	SOLUSI
Maraknya Pembakaran hutan	Peningkatan pengawasan oleh KPH
Maraknya pencurian kayu di kawasan hutan	Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan ilegalnya
Tingginya aktivitas masyarakat dalam Kawasan Hutan terutama disekitar lokasi RHL	Menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2020

5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan prosentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2019. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN

Tabel 2-125 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RT PROVINSI/ KAB/KOTA	RT BERLISTRIK				JUMLAH TOTAL	RE Non PLN (%)	RE PLN (%)	RE (%)
			PLN	NON PLN / EBT	LTSHE (2017 dan 2019)	JUMLAH NON PLN				
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	9=7/3*100	10=4/3*100	11=8/3*100
	PROV. NTB	1.437.027	1.411.998	15.871	2.709	18.580	1.430.578	1,29	98,26	99,55
1.	Kota Mataram	136.215	141.245	-	-	-	141.245	0,00	103,69	103,69
2.	Kab. Lombok Barat	199.109	193.065	2.134	321	2.455	195.520	1,23	96,96	98,20
3.	Kab. Lombok Tengah	288.373	283.138	2.311	50	2.361	285.499	0,82	98,18	99,00
4.	Kab. Lombok Timur	359.167	344.762	1.161	536	1.697	346.459	0,47	95,99	96,46
5.	Kab. Lombok Utara	62.435	65.276	2.681	537	3.218	68.494	5,15	104,55	109,70
6.	Kab. Sumbawa	121.535	127.330	823	657	1.480	128.810	1,22	104,77	105,99
7.	Kab. Sumbawa Barat	38.934	35.146	3.136	-	3.136	38.282	8,05	90,27	98,33
8.	Kota Bima	44.154	39.734	1.241	-	1.241	40.975	2,81	89,99	92,80
9.	Kab. Bima	124.505	114.399	76	340	416	114.815	0,33	91,88	92,22
10.	Kab. Dompu	62.600	67.903	2.308	268	2.576	70.479	4,12	108,47	112,59

Sumber : (1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2019 (diolah)

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2019

(3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31Desember 2019

Dari tabel diatas, sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 5.722.312 jiwa (1.430.578 KK) atau 99,55% dari Penduduk 5.748.108 jiwa (1.437.027 KK). Dengan kata lain masih ada sekitar 0,45% (25.796 jiwa atau 6.449 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. Namun demikian berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT. PLN masih ada 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik belum secara mandiri, masih menyambung dari tetangga yang memiliki kWh meter.

Realisasi RE sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 99,55%, melampaui 5,09% dari target RE tahun 2019 sebesar 94,46% atau meningkat 0,63% dari tahun 2018 (93,83%) dengan capaian 105,39%. Target ini dicapai melalui layanan listrik konvensional PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Target peningkatan RE direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capain RE sebesar 99,55%, sebesar 98,26% diantaranya merupakan cakupan RE yang berasal dari PLN dengan menggunakan pembangkit konvensional (PLTU dan PLTD). Sedangkan sisanya sebanyak 1,29% berasal dari energi baru terbarukan yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu).

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2019 sebanyak 358 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 28 IUP Mineral Logam, 4 IUP Mineral Bukan Logam, 326 IUP Batuan. Untuk IUP Operasi Produksi Khusus (OPK) hingga akhir tahun 2019 terdapat 21 IUP yang terdiri dari 1 IUP Operasi Produksi Khusus Mineral Logam dan 20 IUP Operasi Produksi Khusus Batuan.

Tabel 2-126 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	PROVINSI	IUP & IPR													TOTAL JML IUP&IPR
		MINERAL LOGAM					MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN					
		EKSP	OP	OPK	IPR	JML	EKSP	OP	JML	EKSP	OP	OPK	IPR	JML	
1.	PROV. NUSA TENGGARA BARAT														
2.	LOBAR	0	3	0	0	3	0	0	0	2	31	2	0	35	38
3.	LOTENG	0	0	0	0	0	1	0	1	3	28	1	0	32	33
4.	LOTIM	0	1	0	0	1	0	0	0	22	111	9	0	142	143

NO	PROVINSI	IUP & IPR													TOTAL JML IUP&IPR
		MINERAL LOGAM					MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN					
		EKSP	OP	OPK	IPR	JML	EKSP	OP	JML	EKSP	OP	OPK	IPR	JML	
5.	SUMBAWA	1	5	0	0	6	0	0	0	11	31	2	0	44	50
6.	DOMPU	0	2	1	7	10	0	0	0	6	14	1	0	21	31
7.	KAB. BIMA	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	12
8.	KSB	1	1	0	0	2	3	0	3	1	15	2	0	18	23
9.	KLU	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	2	0	16	16
10.	MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KOTA BIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	12	12
NTB		2	18	1	7	28	4	0	4	50	256	20	0	326	358

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2019

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,09% naik sebesar 0,41% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 11,68%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan peran sangat penting sektor pertambangan minerba bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

6. Perdagangan

Hingga saat ini IPM masih menjadi salah satu alat ukur pembangunan yang digunakan dalam target pembangunan pemerintah. IPM mengukur pembangunan kualitas hidup manusia yang dituangkan dalam tiga pendekatan dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, Pengetahuan dan dimensi Penghidupan yang layak. Dimensi Umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Adapun Dimensi Penghidupan Layak didekati melalui indikator Pengeluaran Per Kapita. Capaian Pengeluaran Per Kapita Tahun 2019 sebagaimana pada tabel berikut.

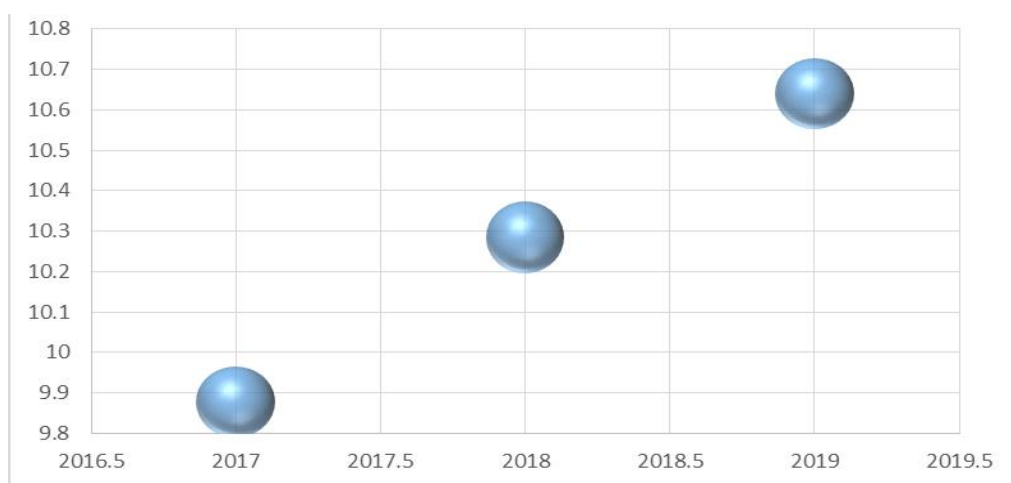
Tabel 2-127 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Pengeluaran Per Kapita	Rp. (000)	9,877	10,284	9,956	10,640

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita disesuaikan (harga

konstan 2012). Pengeluaran per kapita masyarakat NTB pada tahun 2019 telah mencapai Rp 10,64 juta per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya penduduk NTB mengeluarkan sekitar Rp.887 ribu per orang pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019 terjadi peningkatan Pengeluaran per Kapita sebanyak Rp.1,933 juta. Dalam periode yang sama, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi NTB mencapai 2,26% per tahun. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk NTB meningkat sebanyak Rp.356 ribu, atau kurang lebih meningkat sebesar Rp.30 ribu per orang per bulannya dalam setahun terakhir.



Sumber: BPS NTB, 2019

Gambar 2. 1 Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB Tahun 2017-2019 (Rp.000)

Selama periode 2010-2019 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita sebanyak Rp.1,328 juta, dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi NTB mencapai 1,8% per tahun. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk NTB meningkat sebanyak Rp.356 ribu.

Pemantauan Barang Pokok dan Penting serta Barang Strategis baik untuk perdagangan dalam daerah dan antar pulau diantaranya juga terdapat kegiatan Pasar Murah yang merupakan kegiatan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga distributor dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Selama tahun 2019 Dinas Perdagangan menyelenggarakan pasar murah sebanyak 15 (lima belas) kali dan dilaksanakan di pulau Sumbawa sebanyak 7 (tujuh) kali serta dilaksanakan di Pulau Lombok sebanyak 8 (delapan) kali. Pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-128 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahun 2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi/Tempat kegiatan	Sumber Dana
1.	25 Maret 2019	Lapangan merdeka bima	APBD
2.	28 Maret 2019	Desa selat narmada lohar	APBD
3.	29 Maret 2019	Selagas kota mataram	APBD
4.	22 April 2019	Bintaro ampenan kota Mataram	APBN
5.	23 April 2019	Kembang kerang lotim	APBD
6.	29 April 2019	Karang pule kota Mataram	APBN
7.	2 Mei 2019	Sumbawa	APBD
8.	2 Mei 2019	Karang genteng pagutan	APBN
9.	18 Mei 2019	Sesele kab.lombok barat	APBN
10.	23 Mei 2019	Lapangan merdeka kota bima	APBD
11.	29 Juni 2019	Lap.merdeka bima	APBD
12.	19 Juli 2019	Hal.kr.kubu cakra	APBN
13.	30 Juli 2019	Kr.medain	APBN
14.	10 Agustus 2019	Utah Sumbawa	APBD
15.	6 September 2019	Kekalik Jaya	APBD
16.	14 Oktober 2019	Bonder Lombok Tengah	APBN
17.	5 November 2019	Kekalik Jaya	APBN
18.	6 November 2019	Karang Pule	APBD
19.	7 November 2019	Monjok	APBD
20.	11 November 2019	Kebun Sari	APBD
21.	13 November 2019	Karang Geteng Pagutan	APBD
22.	21 November 2019	Tembelok Kota Mataram	APBN
23.	3 Desember 2019	Sumbawa	APBD
24.	10 Desember 2019	KSB	APBD
25.	21 Desember 2019	Kampus Unram Ekonomi	APBN

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB tahun 2019 tercatat sebanyak 23 (Dua puluh tiga) negara dari target dalam RPJMD sebanyak 21 Negara, hal ini berarti ada peningkatan 2 negara sebagai tujuan ekspor dari target yang telah ditentukan dengan nilai ekspor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-129 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019

NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Jepang	38.471.858,26	7,19
Philipina	84.020.010,10	45,97
Korea Selatan	26.174.772,04	14,29
Cina	54.189.616,38	29,53
Australia	1.444.542,09	0,79
USA	5.332.984,08	1,78
Malaysia	33.646,34	0,26
Thailand	5.883,372	0,04
15 (limabelas) negara lainnya	215.889,73	0,15
Total Ekspor	209.889.202,39	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Terdapat sebanyak 5 (Lima) pelabuhan muat yang digunakan sebagai sarana ekspor produk NTB tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-130 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019

PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Benete Sumbawa	201.441.646,37	96,74
Lombok Internasional Airport	1.062.959,78	0,59
Tanjung Perak- Surabaya	2.781.149,28	1,50
Ngurah Rai Denpasar	4.153.957,06	1,05
Soekarno Hatta	449.489,90	0,12
Total Ekspor	209.889.202,39	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Realisasi Ekspor Daerah NTB bulan Desember 2019 tercatat volume sebesar 22.975,37 ton, terjadi peningkatan volume sebesar 1,25% dari bulan Nopember 2019 yakni sebesar 22.691,30 ton. Demikian juga sebaliknya dengan nilai bulan Desember 2019 tercatat sebesar US.\$ 27.604.769,16 terjadi penurunan nilai sebesar 2,30% dari ekspor bulan Nopember 2019 yang tercatat sebesar US.\$ 28.254.072,54.

Realisasi Ekspor Daerah NTB hasil tambang bulan Desember 2019 tercatat sebesar 22.371,01 ton, terjadi peningkatan volume sebesar 0,07% dari bulan Nopember 2019 sebesar 22.354,62 ton dengan nilai bulan mencapai US.\$ 25.089.548,56 atau turun 2,30% dari nilai ekspor bulan November 2019. Sedangkan realisasi ekspor non tambang bulan Desember 2019 tercatat mengalami kenaikan volume sebesar 79,51% dari bulan November 2019, akan tetapi secara nilai mengalami penurunan sebesar US.\$ 2.515.220,60 dari ekspor bulan November 2019 yang tercatat sebesar US.\$ 898.121,76.

Realisasi ekspor berdasarkan komoditi bulan Januari s/d Desember 2019 sebanyak 18 (Delapan Belas) jenis komoditi dengan perolehan devisa Daerah NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-131 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019

KOMODITAS	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Konsentrat Tembaga	201.441.646,37	96,38
Udang Vannamei	150.000,000	0,08
Gerabah	13.016,800	0,07
Kerajinan Buah Kering	251.410,04	0,11
Mutiara	2.095.592,11	0,65
13 (tigabelas) komoditi lainnya	5.937.537,07	2,71
Total Ekspor	209.889.202,39	100,00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Apabila di ambil perbandingan dengan Realisasi antara tahun 2019 dengan tahun 2018, Ekspor Daerah NTB secara komulatif bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat volume sebesar 143.668,06 ton terjadi penurunan volume sebesar 60,00% dari bulan Januari s/d Desember 2018 yang tercatat volume sebesar 362.767,46 ton. Sedangkan untuk nilai ekspor bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat sebesar US.\$ 209.889.202,39 terjadi penurunan nilai sebesar 49,08% dari bulan Januari s/d Desember 2018 yang tercatat sebesar US.\$ 412.255.946,65.

7. Perindustrian

Program industrialisasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di NTB yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat NTB. Program industrialisasi diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya potensial terlatih yang dihasilkan oleh SMK maupun BLK sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Tahun 2019, unit usaha pada industri formal mengalami penurunan sekitar 11,55% atau 951 Unit usaha jika dibandingkan dengan tahun 2018. Tenaga kerja meningkat sekitar 8,64% atau sebesar 5.076 orang, namun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 1.433.217.206 (000). Perkembangan industri formal sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2-132 Perkembangan Industri Formal Tahun 2019

Kabupaten / Kota	Perusahaan (unit)	Tenaga Kerja (jiwa)	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
Lombok Barat	549	5.602	142.346.956	258.388.034
Lombok Tengah	174	-	-	-
Lombok Timur	2.465	23.818	71.483.564	154.265.609
Lombok Utara	274	1.451	9.972.886	24.114.947
Sumbawa	835	4.890	280.015.465	3.365.974
Dompu	421	2.345	52.472.478	71.869.965
Bima	1.003	4.616	48.042.785	107.360.606
Sumbawa Barat	71	306	2.173.000	9.636.306
Kota Mataram	2.442	15.734	185.983.425	619.942.172
Kota Bima	-	-	-	-
Jumlah / Total	8.234	58.762	792.490.559	1.248.943.612

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Pada industri non formal, unit usaha juga mengalami penurunan 0,27% dari tahun 2018 atau sekitar 196 unit usaha. Begitu juga halnya pada penyerapan tenaga tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,12% atau

sekitar 7.298 orang. Perkembangan industri non formal sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2-133 Perkembangan Industri Non Formal Tahun 2019

Kabupaten / Kota	Perusahaan (unit)	Tenaga Kerja (jiwa)	Investasi (Rp.000)
Lombok Barat	11.054	22.992	382.789.933
Lombok Tengah	35.942	58.549	54.606.371
Lombok Timur	17.298	53.102	57.861.036
Lombok Utara	157	184	2.798.536
Sumbawa	271	523	5.327.608
Dompu	2.052	4.238	151.089.298
Bima	1.344	5.976	11.542.262
Sumbawa Barat	521	1.284	3.919.315
Kota Mataram	2.517	8.972	27.236.337
Kota Bima	2.600	6.929	22.134.570
Jumlah / Total	73.756	162.749	719.305.266

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Tabel 2-134 Perkembangan Industri Tahun 2015-2019

Tahun	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai/Value)	
			Investasi	Produksi
2015	82,697	221,413	2,133,861,391	4,920,764,965
2016	83,319	223,968	2,199,763,421	5,105,043,716
2017	80,843	219,12	2,248,712,646	5,125,505,880
2018	83,137	223,733	2,471,774,029	5,407,608,339
2019	81.990	221.511	1.511.795.825	3.568.866.083

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Penurunan industri formal maupun industri non formal pada tahun 2019 disebabkan bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang mengakibatkan banyaknya industri kecil menengah terpuruk dan belum pulih benar pada tahun 2019. Untuk itu industrialisasi harus lebih terarah guna menumbuhkan industri-industri kecil yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat NTB.

8. Transmigrasi

Daerah tujuan transmigrasi keluar Provinsi NTB periode 2019 telah dilaksanakan pengiriman transmigran ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 Kepala Keluarga atau sekitar 39 jiwa sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-135 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah

NO	PROV/KAB/ LOK/UPT	2018			2019		
		TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL	TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL
		KAB /KOTA	KK	JUMLAH KK	KAB/ KOTA	KK	JUMLAH KK
A	Gorontalo				Sulawesi Tenggara		
1.	Kab. Pohuwato				Kab. Muna		
	UPT. Sandalan				UPT. Raemuna		
		Kota Mataram	5	5 KK = 18 jiwa	Kab. Loteng	5	5 KK = 21 jiwa
					Kab. Lombok Utara	2	2 KK = 7 jiwa
					Kab. Lotim	3	3 KK = 11 jiwa
B	Sulawesi Barat						
1.	Kab. Mamasa						
	UPT Kim Rano				-		
		Kab. Lobar	2	2 KK = 6 Jiwa			
		Kab. Lotim	3	3 KK = 12 jiwa			
JUMLAH TPA			10 KK	10 KK=36 JIWA			10 KK = 39 Jiwa

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019

D. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan Pembangunan diukur dengan melihat ketersediaan dokumen perencanaan dan konsistensi antar dokumen perencanaan yakni RTRW, RPJMD, dan RKPD. Provinsi NTB telah memiliki dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 dimana pada tahun 2020 telah dilakukan Revisi. Sementara itu untuk dokumen RPJMD juga telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2018 dan pada tahun 2020 juga telah dilakukan Perubahan yakni Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021. Sedangkan untuk RKPD merupakan dokumen penjabaran dari kedua dokumen perencanaan jangka menengah tersebut yakni RTRW dan RPJMD.

Sementara itu untuk kinerja tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-136 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	2017		2018		2019	
	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	100	100	100	100	95,09

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019 indikator ini mencapai 95,09%, artinya belum mencapai target. Dalam rangka menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan hingga ke tahapan penganggaran maka melalui Permendagri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pemerintah daerah diminta untuk menggunakan aplikasi tersebut di setiap tahapan perencanaan seperti penyusunan RKPD dan KUA – PPAS hingga terjabarkan melalui APBD.

2. Keuangan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan dan barang daerah dengan baik, benar dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun 2018 meningkat sebesar 17,88% dibandingkan tahun 2017, dan pada tahun 2019 mengalami perkembangan sebesar 6,98% dibandingkan tahun 2018. Secara lengkap tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-137 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2019

URAIAN	2017 (Rp. Juta)	2018 (Rp. Juta)	PENINGKATAN (%)	2019 (Rp. Juta)	PENINGKATAN (%)
Belanja Tidak Langsung	1.380.184,67	1.627.098,38	17,88	1.740.690,39	6,98

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

APBD Provinsi NTB Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017 dengan perbandingan komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap APBD sebesar $\pm 2,46\%$. Sementara itu pada Tahun 2019 APBD Provinsi NTB mengalami penurunan sebesar $5,07\%$ dibandingkan Tahun 2018, dimana perbandingan komposisi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap APBD sebesar $\pm 6,35\%$.

Tabel 2-138 Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap APBD Provinsi Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung (BTL)	2.757.512.955.077,84	3.015.515.004.599,90	3.219.248.730.182,43
Belanja Langsung (BL)	2.788.893.149.537,92	2.763.339.825.176,83	2.280.506.035.946,06
APBD	5.546.406.104.615,76	5.778.854.829.776,73	5.499.754.766.128,49
Perbandingan Terhadap APBD BTL	49,72	52,18	58,53
Perbandingan BL Terhadap APBD	50,28	47,82	41,47

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Penetapan APBD Provinsi NTB dalam 5 tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-139 Penetapan APBD Provinsi NTB Dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
MURNI						
2016	04-11-2015	30-11-2015	No. 903-6194 Tahun 2015, Tgl 18-12-2015	Nomor 11 Tahun 2015, Tgl 28-12-2015	Nomor 50 Tahun 2015, Tgl 29-12-2015	Tepat Waktu
2017	11-11-2016	30-11-2016	No.903-10295 Tahun 2016, Tgl 16-12-2016	Nomor 12 Tahun 2016, Tgl 21-12-2016	Nomor 47 Tahun 2016, Tgl 22-12-2016	Tepat Waktu
2018	21-11-2017	30-11-2017	No. 903-9031 Tahun 2017, Tgl 22-12-2017	Nomor 13 Tahun 2017, Tgl 29-12-2017	Nomor 67 Tahun 2017, Tgl 29-12-2017	Tepat Waktu
2019	05-11-2018	27-11-2018	No. 903-8688 Tahun 2018, Tgl 10-12-2017	Nomor 13 Tahun 2018, Tgl 17-12-2018	Nomor 47 Tahun 2018, Tgl 17-12-2018	Tepat Waktu
2020	13-08-2019	29-08-2019	No. 903-4055 Tahun 2019, Tgl 16-09-2019	Nomor 10 Tahun 2019, Tgl 26-09-2019	Nomor 33 Tahun 2019, Tgl 30-09-2019	Tepat Waktu
PERUBAHAN						
2015	19-07-2015	11-08-2015	No. 903-5023 Tahun 2015, Tgl 31-08-2015	Nomor 6 Tahun 2015, Tgl 04-09-2015	Nomor 33 Tahun 2015	Tepat Waktu
2016	09-09-2016	30-09-2016	No. 903-9936 Tahun 2016, Tgl 18-10-2016	Nomor 7 Tahun 2016, Tgl 19-10-2016	Nomor 32 Tahun 2016, Tgl 20-10-2016	Terlambat
2017	20-07-2017	11-08-2017	No. 903-7656 Tahun 2017, Tgl 31-08-2017	Nomor 8 Tahun 2017, Tgl 07-09-2017	Nomor 29 Tahun 2017, Tgl 07-09-2017	Tepat Waktu

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
2018	03-09-2018	14-08-2018	No. 903-7421 Tahun 2018, Tgl 25-09-2018	Nomor 11 Tahun 2018, Tgl 28-09-2018	Nomor 33 Tahun 2018 Tgl 28-09-2018	Tepat Waktu
2019	17-07-2019	02-08-2019	No. 903-3737 Tahun 2019, Tgl 19-08-2019	Nomor 8 Tahun 2019, Tgl 28-08-2019	Nomor 28 Tahun 2019, Tgl 28-08-2019	Tepat Waktu

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan Asset daerah yang dituangkan menjadi indikator kinerja pembangunan daerah sebagai standar pencapaian kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun pelaporan 2019 dengan LKPD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) = “kejujuran untuk/ dalam menjelaskan“;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018 menyebutkan bahwa penilaian opini yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB adalah WTP. Penilaian itu sendiri menjadi yang ke-delapan kali secara berturut-turut diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB. Trend Opini BPK dengan WTP ini diikuti seluruh Kabupaten/Kota untuk terus membenahi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan pencapaian predikat yang sama selama kurun waktu tahun 2011-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-140 Opini BPK Tahun 2015-2018

Tahun Pelaporan	Opini
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian, untuk kabupaten/kota pada tahun pelaporan 2018 seluruh kabupaten/kota se-NTB telah

mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dimana seluruh kabupaten/kota mendapatkan opini WTP.

Tabel 2-141 Opini BPK-RI Kabupaten/Kota Tahun 2015-2018

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD			
		2015	2016	2017	2018
1.	Kota Mataram	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

3. Kepegawaian

Capaian program yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS sebanyak 2 kegiatan (periode April dan Oktober) dan telah dilaksanakan tepat waktu.
- b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur dengan Jumlah ASN yang mengikuti, Workshop, Seminar, *Short Course* sebanyak 50 orang dengan realisasi 25 orang untuk pengembangan kemampuan bahasa Inggris bagi ASN.
- c. Pemetaan Kompetensi ASN berbasis sistem merit guna melihat kompetensi dan kualifikasi ASN untuk mengampu jabatan tertentu melalui Penilaian Kompetensi pada Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) sebanyak 416 orang.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Sebagai Institusi yang diberikan otoritas penuh untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di daerah, beberapa jenis diklat yang ada pada BPSDMD Provinsi NTB telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-142 Akreditasi Jenis Diklat Tahun 2019

No	Jenis Diklat	Akreditasi 2019
1.	Diklat Dasar/Latsar CPNS	A
2.	Diklat PIM III	B
3.	Diklat PIM IV	B

Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2019

Dari 4 Jenis Diklat yang dilaksanakan, Diklat Dasar/Latsar CPNS mendapatkan akreditasi A, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. Sementara Diklat PIM III dan IV mendapatkan akreditasi B, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. Dengan telah terakreditasinya Diklat Dasar/Latsar CPNS, Diklat PIM III dan Diklat Pim IV artinya BPSDMD Provinsi NTB telah mendapatkan pengakuan untuk menyelenggarakan diklat yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

BPSDMD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang bersifat manajerial/dasar maupun teknis/fungsional, peningkatan kapasitas kompetensi widyaiswara/tenaga pengajar serta fasilitasi sertifikasi kompetensi keahlian. Peserta diklat tahun 2019 berjumlah 1.696 orang mencapai 11,85% dari total ASN Provinsi NTB sebanyak 14.311 Orang. Jenis dan Jumlah Peserta Diklat pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2-143 Jenis dan Jumlah Peserta Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
A	Diklat Dasar/Latsar CPNS	1.119	1.133	
B	Pendidikan dan Pelatihan Struktural	90	94	
1	Diklat PIM II	10	14	Termasuk 1 orang Diklat PIM I
2	Diklat PIM III	40	40	
3	Diklat PIM IV	40	40	
C	DiklatFungsional	30	30	
1	Diklat Dasar Satpol PP	30	30	
D	DiklatTeknisUmum	90	90	
1	Diklat Zero Waste	30	30	
2	Diklat Industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu	30	30	
3	Diklat Analisis Jabatan	30	30	
E	DiklatTeknis Inti Jabatan Bagi ASN Daerah	90	90	

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
1	Diklat Manajemen Pengelolaan Program Prioritas Kesehatan	30	30	
2	Diklat Manajemen Sekolah	30	30	
3	Diklat Manajemen Bencana	30	30	
F	Diklat Teknis Perangkat Daerah Penunjang	95	85	
1	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (2 angkatan)	60	50	
2	Diklat TOC (<i>Training Officer Course</i>)	20	20	
3	Diklat MOT (<i>Management Of Training</i>)	15	15	
G	Sertifikasi Kompetensi	140	140	RSUP, RSJ, RS Mata, RSJ Mutiara Sukma, RS Manambai, Dikes, Dinas Sosisl
1	Sertifikasi Perawat	105	105	
2	Sertifikasi Terapis Gigi	5	5	
3	Sertifikasi Perekam Medis	14	14	
4	Sertifikasi Radiografer	10	10	
5	Sertifikasi Teknis Elektromedik	6	6	
H	Pengelolaan Sumber Belajar	30	30	
I	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	4	4	Orasi ilmiah untuk peningkatan jenjang WI
	TOTAL (orang)	1.598	1.696	

Sumber : BPSDM Provinsi NTB, 2019

5. Penelitian Dan Pengembangan

Pada urusan penelitian dan pengembangan indikator yang digunakan adalah persentase pemanfaatan hasil penelitian (lokus NTB), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-144 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	2017		2018		2019	
	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	12	12	15	15	18	18

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2019

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB) pada Tahun 2019 mencapai 18 persen sesuai dengan target. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari penerapan *research base policy*, dimana hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

E. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pengawasan

Hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi NTB, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-145 Hasil Audit Penyelenggaraan Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH	KEMBALI	%	SALDO	%
2017	147.312.788.020,26	109.977.877.681,78	74,66	37.334.910.338,48	25,34
2018	187,285,025,005.20	151,381,908,186.33	80,83	35.903.116.818,87	19,17
2019	178.791.282.847,35	149.730.174.916,01	83,75	29.061.107.931,34	16,25
TOTAL	513.409.095.872,81	411.089.960.784,12	80,07	102.229.135.088,69	19,93

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2019

Tindak lanjut hasil temuan yang telah audit oleh Inspektorat selama tiga tahun mencapai Rp.411.089.960.784,12 atau 80,07% dari total Rp.513.409.095.872,81 dengan demikian saldo kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan dan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.102.299.135.088,69, atau sebesar 19,93%.

Total sisa kerugian negara/daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui kegiatan operasi tindak lanjut dan apabila tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil sidang majelis (TP-TGR) akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh Majelis untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Pencapaian pada tahun 2019, Inspektorat Provinsi NTB antara lain Opini BPK: WTP 8 (delapan) kali, Tingkat Kapabilitas APIP Level III (Integreted), Tingkat Maturitas SPIP Level III (Terdefinisi), Indeks Integritas Daerah Posisi 6 untuk Provinsi dan urutan 7 untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah, LPPD masuk 3 besar, Realisasi pencapaian rencana aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi KPK melalui Program MCP (*Monitoring Center For Prevention*) mencapai 82% (tertinggi secara Nasional), serta Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi NTB Predikat BB.

F. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Indikator kinerja daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023 yaitu Cakupan Komunitas “Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam rangka pendidikan karakter. Dan yang menjadi program unggulan atau prioritas adalah Desa Bersih Narkoba (Bersinar) capaian kinerja dapat diukur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-146 Pencapaian Indikator Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2017-2019

INDIKATOR	TAHUN					
	2017		2018		2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Cakupan Komunitas “Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam rangka pendidikan Karakter (%)	0	0	0	0,41	10	10 / 60 komunitas
Terwujudnya Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba)	0	0	0	0	10	14
Penurunan Konflik Sosial (Kasus)	32	21	27	13	24	7

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019

- **Sekolah Perjumpaan**

Capaian indikator Cakupan Komunitas “Sekolah Perjumpaan” yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter dengan target 10% yang diampu oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dapat dicapai 10% atau 60 komunitas, kegiatan yang dilakukan merupakan pembelajaran berbasis komunitas dengan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan yang baik secara langsung yang dilandasi nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan pengembangan Sekolah perjumpaan dimulai tahun 2017 dan sampai dengan 2019 sudah terbentuk 60 komunitas di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

- **Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba)**

Mewujudkan Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) adalah merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 10 Desa, realisasinya tercapai 10 desa. Hal ini sebagai upaya untuk membentengi dan mengantisipasi generasi muda dan anak-anak bangsa dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran dari peredaran narkoba tidak terbatas di perkotaan saja, namun masyarakat pedesaan saat ini menjadi tempat tujuan peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019, melalui Bakesbangpoldagri mengawali inisiasi melawan narkoba dalam bentuk Program Desa/Kelurahan Bersinar (Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba) dengan hasil 14 Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai Desa/Kelurahan Bersinar, terdiri dari : 10 Desa/Kelurahan merupakan Program Desa/Kelurahan Bersinar yang diinisiasi dari Pemerintah Provinsi, sementara 4 Desa/Kelurahan lainnya merupakan pengembangan dari Kabupaten/Kota melalui APBD-nya masing-masing, yaitu Desa Pasir Putih di Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Lembar, Desa Taman Ayu dan Desa Labuapi di Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar selain mampu memberi efek yang positif bagi

Pemerintah Daerah, juga mampu menggugah hati pengguna narkoba itu sendiri.

• **Penurunan Jumlah Konflik Sosial**

Secara umum kondisi keamanan di Provinsi NTB semakin terkendali dan konflik sosial dapat di tekan setiap tahunnya. Seperti yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 target 32 kasus, dengan realisasi 21 kasus, tahun 2018 target 27 kasus, realisasi 13 kasus dan pada 2019 ditargetkan 24 kasus, realisasi 7 kasus, berarti konflik yang terjadi di Provinsi NTB menurun secara signifikan dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena pernyataan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin kecil capaian kinerja (realisasi) dibandingkan dengan target, berarti itu menunjukkan tingkat capaian kinerja yang lebih baik. Tahun 2019 potensi konflik yang terjadi di Provinsi NTB dipicu oleh konflik sosial budaya dan terkait dengan batas wilayah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-147 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	LATAR BELAKANG KONFLIK						JMLH KASUS	KET.
		POLITIK	EKONOMI	SOSIAL BUDAYA	SARA	BATAS WILAYAH	HANKAM		
1.	Kota Mataram	-	-	2	-	-	-	2	Vertikal = 0 Horisontal = 7
2.	Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Lombok Tengah	-	-	-	-	1	-	1	
4.	Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dompu	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Bima	-	-	2	-	-	-	2	
10.	Kota Bima	-	-	2	-	-	-	2	
	Jumlah	-	-	6	-	1	-	7	

- Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019, Komunitas Jejaring Kab/Kota se-NTB POLDA NTB

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2-148 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019		2020	2021	2022
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Kriminalitas	Point	16,45	12,71	15,65	14,85	14,05
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Point	75,76	74,92			
3	Indeks Aksesibilitas	Point	75,76	74,92	77,14	78,56	79,84
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	57,09	76,16	77,16	78,16	79,16
5	Ketaatan Terhadap RTRW	%	87,79	88,08	88,45	89,03	89,69
6	Indeks Risiko Bencana	Point	172,18	129,02	126,91	123,11	119,41
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	B	B	BB
8	Indeks Pelayanan Publik	Point	97,78	97,88	3,93	4,23	4,53

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Dari 8 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 4 indikator (50,00%) tercapai dan atau melebihi target yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ketaatan Terhadap RTRW, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik, sementara itu terdapat 4 indikator belum memenuhi target yaitu indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur, Indeks Aksesibilitas dan Indeks Resiko Bencana.

2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2020

Kinerja pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur dari rata-rata realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2020 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2019 yaitu:

- < 50% Sangat Rendah;
- 51% < 65% Rendah;
- 66% < 75% Sedang;
- 76% < 90% Tinggi; dan
- 91% < 100% Sangat Tinggi.

Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2020 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-149 Rekapitulasi Rata – Rata Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	URUSAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Pendidikan	85,00	90,46	TINGGI	TINGGI
2	Kesehatan	104,91	94,30	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99,66	93,05	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	96,79	90,17	SANGAT TINGGI	TINGGI
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	100,94	91,74	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Sosial	91,15	84,28	SANGAT TINGGI	TINGGI
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	Tenaga Kerja	84,25	95,96	TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82,43	85,83	TINGGI	TINGGI
3	Pangan	94,58	96,24	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Pertanahan	100,00	16,59	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH
5	Lingkungan Hidup	102,41	94,25	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	100,00	94,14	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00	91,24	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
9	Perhubungan	90,36	95,92	TINGGI	SANGAT TINGGI
10	Komunikasi dan Informatika	102,03	96,54	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
11	Koperasi dan UKM	119,90	90,34	SANGAT TINGGI	TINGGI
12	Penanaman Modal	97,24	96,52	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
13	Kepemudaan dan Olahraga	88,86	94,32	TINGGI	SANGAT TINGGI
14	Statistik	121,56	99,95	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

NO	URUSAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
15	Persandian	164,69	95,08	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
16	Kebudayaan				
17	Perpustakaan	100,00	88,69	SANGAT TINGGI	TINGGI
18	Kearsipan				
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
1	Kelautan dan Perikanan	102,41	89,78	SANGAT TINGGI	TINGGI
2	Pariwisata				
3	Pertanian	99,51	90,78	SANGAT TINGGI	TINGGI
4	Kehutanan	80,70	65,55	TINGGI	RENDAH
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	101,91	93,22	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Perdagangan	91,36	89,77	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	Perindustrian	87,62	82,04	TINGGI	TINGGI
8	Transmigrasi				
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Sekretariat DPRD	100,00	86,85	SANGAT TINGGI	TINGGI
2	Sekretariat Daerah	87,37	95,87	TINGGI	SANGAT TINGGI
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Perencanaan	74,63	97,05	SEDANG	SANGAT TINGGI
2	Keuangan	99,83	90,18	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	Kepegawaian	80,68	91,05	TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Pendidikan dan Pelatihan	99,00	90,10	SANGAT TINGGI	TINGGI
5	Penelitian dan Pengembangan	80,95	96,42	TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Penghubung	93,18	96,09	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
1	Inspektorat	84,87	93,71	TINGGI	SANGAT TINGGI
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	91,05	98,98	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
KATEGORI		96,81	89,81	SANGAT TINGGI	TINGGI

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021 (diolah)

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2019-2023 yang digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2-150 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2020

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Awal		2020		Interpretasi Capaian Tahunan Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	Kondisi Akhir (2023)
				2018	2019	Target	Capaian		
Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			139,40	129,02	126,91			115,83
		Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	0,55	0,57	0,59	0,59	=	0,65
Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			74,60	76,02	77,14			81,17
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	83,65	3,35	80,65	3,35	<	86,60
			Kemantapan Sistem Irigasi	50,63	50,76	2,01	2,38	>	54,50
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	74,76	78,64	78,64	NA		84,47
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	NA		BB
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	=	WTP
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	B (62,53)	BB	BB (70,05-73,00)	NA		A (80,01 - 90,00)
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	0,60	0,54	0,66	0,66	=	0,72
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4,56	3,92	3,93	2,00	<	4,55
Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			70,57	71,20	71,51			73,05
		Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,75	66,28	66,48	66,51	>	67,48
			Persentase Balita <i>Stunting</i> (%)	33,49	25,50	31,99	1,08	>	30,49
				60,85	61,68	2,59		63,10	

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Awal		2020		Interpretasi Capaian Tahunan Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	Kondisi Akhir (2023)
				2018	2019	Target	Capaian		
Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,51	13,48	13,49	13,70	>	13,52
			Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	6,93	7,27	7,37	7,31	<	7,66
Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		75,16	76,16	77,16			80,45
			Indeks Kualitas Air	74,63	75,63	76,63	NA		80,00
			Indeks Kualitas Udara	87,17	88,17	89,17	NA		92,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	66,56	67,56	68,56	NA		72,00
	Neraca pengelolaan sampah (%)	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		30,00	41,71	55,00			100,00
			Persentase Penanganan Sampah	30,00	34,91	40,00	NA		70,00
		Persentase Pengurangan Sampah	0,00	6,80	15,00	NA		30,00	
Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)			70,99	72,30	72,91			75,56
		Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	14,00	10,024	11,574	7,990	<	68,202
		Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (%)	23,51	23,06	23,29	23,81	>	23,88
		Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	=	100,00
		Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	78,30	85,30	85,80	NA		87,20
		Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	70,48	72,59	75,74	74,88	<	80,59
			Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	69,53	78,80	79,36	78,84	<	82,46
			Rasio Elektrifikasi	93,83	99,55	99,66	99,55	<	99,99
			Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	92,01	92,02	92,74	92,09	<	93,82

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Awal		2020		Interpretasi Capaian Tahunan Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	Kondisi Akhir (2023)
				2018	2019	Target	Capaian		
		Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	3,16	1,87	3,0 - 4,0	0,18	>	3,0 - 4,0
		Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	9,917	10,640	10,952	10,351	>	11,944
Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB (%)			-4.59	-0.08	-0.1			4,50
		Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	76,13	117,21	116,04	116,04	=	137,24
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	33.77	34.77	34.06	34,06	=	38.65
Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)			2,00	4,57	5,50			9,00
		Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	56,28	164.96	160,02	410164.9	>	179.91
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,72	3,42	3,35	4,22	<	3,17
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			17,25	12,71	15,65			13,25
		Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	38,10	46,15	14,29	14,29	=	0,00
		Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	4,65	4,88	5,13	5,13	=	6,07
	Partisipasi politik masyarakat (%)			77,50	82.80	82.80			85,20
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,50	0,60	0,70	0,70	=	1,00
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			60,06	55.81	57.81			61,40
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	17,93	18,60	17,93	NA		20,47	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Awal		2020		Interpretasi Capaian Tahunan Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	Kondisi Akhir (2023)
				2018	2019	Target	Capaian		
			Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	10,00	40,00	40,00	NA		100,00

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021 (diolah)

Tabel 2-151 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2020

Indikator	Jumlah Indikator	Tercapai (Capaian Tahun 2020 ≥ Target Akhir RPJMD)		Belum Tercapai (Capaian Tahun 2020 < Target Akhir RPJMD)		NA	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Indikator Tujuan	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indikator Sasaran (IKU)	36	17	47,22	9	25,00	10	27,78

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2021 (diolah)

Mendasarkan kondisi diatas maka kinerja pelaksanaan RKPD pada tahun 2020 dikategorikan Sangat Tinggi atau Sangat Baik dengan rata – rata realisasi mencapai 96,81%. Sementara itu capaian RPJMD pada tahun 2020 untuk indikator yang tercapai atau melampaui target akhir periode mencapai 47,22% atau terdapat 17 indikator dari 36 indikator yang ada. Jumlah indikator yang belum tercapai sebanyak 9 atau 25% dari jumlah Indikator Sasaran diantaranya Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Elektrifikasi, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Pelayanan Publik, Rata rata Lama Sekolah, Nilai Realisasi Investasi, Cakupan Air Minum dan Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan usaha dan kerja yang giat dalam mencapai target akhir akhir RPJMD Tahun 2023 dan perhatian pada pelaksanaan tahun 2022 dan 2023. Terhadap indikator kinerja yang telah tercapai atau melampaui, diperlukan penyesuaian target kembali dengan mempertimbangkan pada isu strategis dan permasalahan yang akan diatasi serta capaian pada tahun-tahun sebelumnya, sebagai dasar rencana target pada RKPD Tahun 2022.

Pembangunan tahun 2020-2021 dihadapi dengan kejadian bencana non alam yakni pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dimana telah dilakukan beberapa kali refocussing alokasi anggaran untuk mendukung penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19, serta vaksinasi. Selain itu penyesuaian juga dilakukan terhadap penurunan

pendapatan dan kondisi ekonomi, sosial serta keadaan masyarakat yang memburuk ditandai utamanya dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya penduduk miskin dan jumlah pengangguran. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali target tahun 2022 yang secara keseluruhan cenderung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2021. Rencana target 2021 yang kemudian akan menjadi baseline perhitungan kembali rencana target tahun 2022 disamping tetap memperhatikan capaian tahun 2020 dan target RPJMD Tahun 2019-2023 serta target dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *“gap expectation”* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

1. Masih banyaknya daerah di Provinsi NTB yang merupakan daerah rawan bencana;
2. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan ketersediaan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah;
3. Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan yang ditandai Rata-rata lama sekolah masih dibawah angka nasional, masih tingginya angka buta huruf;
5. Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, balita stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
6. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah serta terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut;
7. Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat;
8. Wabah Covid-19 menyebabkan Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka meningkat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi;
9. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Mandalika, SAMOTA, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluku. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan;
10. Belum optimalnya industrialisasi produk unggulan daerah;

11. Pertanian/Agribisnis dan Investasi yang mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh ketergantungan pada sektor pertambangan, rendahnya realisasi investasi, terbatasnya akses modal yang murah dan berkelanjutan, serta masih rendahnya peranan UMKM dan BUMDes;
12. Masih tingginya permasalahan sosial dan keamanan;
13. Belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten dan kota.
14. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar, sementara itu, sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal hal ini juga diperparah dengan adanya dampak pandemi Covid-19 di NTB.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB yang diurutkan menurut urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan, sesuai dengan hasil identifikasi dari hasil evaluasi dan perkembangan kondisi terkini di Provinsi NTB.

I. Urusan Wajib

1. Urusan Bidang Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi NTB mengalami peningkatan pada kurun waktu 2013-2017 sebesar 0,23 tahun yaitu dari angka 6,67 tahun menjadi 6,90 tahun pada tahun 2017. Sementara itu pada tahun 2019 telah mencapai 7,27 tahun dan jauh melampaui target jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 7,07 tahun. Meskipun Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan lama sekolah selama 0,37 tahun, angka rata-rata lama sekolah 7,27 tahun masih menunjukkan angka yang relatif rendah bilang dibandingkan dengan angka rata-rata nasional yang sudah mencapai 8,34 tahun. Angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar yaitu kelas 1 SMP, artinya program wajib belajar 9 tahun masih belum tuntas dilaksanakan.

Pendidikan diarahkan untuk menysasar tiga sasaran utama yaitu partisipasi pendidikan, mutu, serta daya saing dan tata kelola. Nilai partisipasi pendidikan yang diukur oleh indikator APK dan APM pada jenjang sekolah menengah menunjukkan tren yang meningkat, meskipun demikian masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah. Selain itu Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%, artinya pendidikan luar biasa masih menjadi permasalahan dalam sektor pendidikan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi NTB pada dimensi partisipasi pendidikan (APK, APM dan APS) antara lain:

1. Angka *drop out* jenjang pendidikan menengah masih tinggi, pada tahun 2016/2017 angka drop out SD Sederajat 0,15%, SMP Sederajat 0,24%, dan SMA 0,66%, SMK 1,36%. Sedangkan pada tahun 2018/2019, angka *drop out* dapat terus ditekan sehingga menjadi untuk SD Sederajat 0,09%, SMP Sederajat 0,15%, dan SMA 0,37%, SMK 0,65%.
2. Partisipasi Pendidikan jenjang menengah atas masih rendah (Data BPS Tahun 2016/2017 APM 83,35% (masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah) dan APK 93,89%). Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%. Adapun pada tahun 2018/2019 telah berhasil ditingkatkan menjadi 88,22% dan APK sebesar 98,55%.
3. Permasalahan lainnya adalah tidak meratanya penempatan guru antar daerah. Meskipun secara keseluruhan angka rasio murid-guru sudah memenuhi standar nasional, namun pada beberapa kabupaten masih menunjukkan kondisi yang di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, rasio murid-guru SMP 1:36 dan pada jenjang SMA 1:29.
4. Persentase buta huruf pada penduduk usia 45+ masih cukup tinggi (di atas 30%), pendidikan masyarakat belum berjalan dengan optimal.

Pada dimensi mutu dan daya saing, beberapa indikator menunjukkan pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing. Berikut ini permasalahan yang dihadapi terkait dengan mutu dan daya saing pendidikan antara lain:

1. Masih ada sekolah yang mendapat akreditasi C dan bahkan masih ada yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, 11% sekolah masih terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%.
2. Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 53,75.
3. Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK masih rendah dan di bawah nilai nasional SMA sebesar 56,30 (nasional 61,47) dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30).
4. Masih ada guru dengan kualifikasi <D4/S1 yaitu 2,3% pada SMA dan 5,7% pada jenjang SMK.
5. Pendidikan belum berhasil menghasilkan SDM siap kerja (pendidikan vokasi), hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran yang berpendidikan SMA/SMK. Pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%.

6. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya proses pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi dirumah melalui media pembelajaran daring, namun tidak efektifitas pelaksanaan akibat: (a) penguasaan teknologi yang masih rendah; (b) kepemilikan perangkat teknologi yang terbatas; (c) Tidak semua sekolah sudah terkoneksi jaringan internet; (d) Biaya menjadi mahal untuk menyediakan kuota untuk kebutuhan internet.

B. Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah angka harapan hidup yang dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013-2017, Provinsi NTB berhasil meningkatkan 0,65 tahun harapan hidup penduduk dari 64,90 tahun menjadi 65,55 tahun, sedangkan tahun 2019 menjadi 66,28 dan hampir mencapai target akhir RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebesar 66,82 tahun. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan kondisi nasional, angka harapan hidup NTB masih berada di bawah nilai capaian nasional yang sudah berada pada angka 73,34 tahun. Oleh karena itu meskipun sudah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih perlu adanya perbaikan dalam sektor kesehatan.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam sektor kesehatan sebagai berikut:

1. Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan, Kasus kematian bayi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut menurun menjadi 866 kasus pada tahun 2018 dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 7,7 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 dan cenderung meningkat menjadi 93,92 pada tahun 2019; (2) masih adanya kelahiran ditolong non tenaga kesehatan, pada tahun 2019 masih sekitar 4,60%. Terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan rutin ibu dan anak serta menurunnya ketersediaan pangan akibat pandemi akan berdampak pada peningkatan kematian ibu dan anak yang signifikan.
2. Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 33,49% tahun 2018 menjadi 26,41%. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya masalah gizi kurang pada anak (*wasting*), akibat dari dampak ekonomi yang meluas, dimana angka kemiskinan meningkat sehingga ketersediaan pangan dan akses terhadap makanan yang bergizi berkurang.

3. Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%. Penyakit Kardiovaskular menjadi satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, selain itu orang dengan komorbiditas Penyakit Tidak Menular (PTM) beresiko tinggi mengalami sakit yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga orang dengan PTM harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat pandemi ini.
4. Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%; (2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3) Masih cukup rendahnya Posyandu yang aktif yaitu 51,11% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61,4% tahun 2019;
5. Sistem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi NTB (71,42% pada tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 86,47%).
6. Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya: (1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63% pada tahun 2017 menjadi 63,9% tahun 2019; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil.
7. Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) hingga tahun 2019 baru mencapai 88,6%, Sarana air minum memenuhi syarat baru mencapai 39,3%.

C. Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain: 1). Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau, 2). Meningkatnya permintaan fungsi ruang seiring meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi; 3). Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah; 4). Belum optimalnya pengembangan kawasan pesisir dan pulau2 kecil; 5). Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dan rencana pembangunan

sektoral; 6). Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal.

D. Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan aman di Provinsi NTB pada tahun 2016 sebesar 96,52% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 93,73% bahkan di tahun 2019 telah meningkat menjadi. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. rendahnya kualitas keselamatan bangunan.
2. kurangnya luas lantai per kapita.
3. kurangnya penyediaan sanitasi dan pengolahan limbah rumah tangga di kawasan perumahan.
4. Rendahnya keterjangkauan perumahan untuk MBR.

E. Urusan Wajib Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan yang baik. Pada 4 tahun terakhir IDI Provinsi NTB naik sebesar 8,19 poin atau tumbuh 14,31% dari 62,62 tahun 2014 menjadi 76,04 tahun 2017, pertumbuhan ini di atas nilai pertumbuhan tingkat nasional yaitu bertambah 6,37 poin dan tumbuh 9,99%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 76,64, bahkan nilai capaian ini sudah berada di atas nilai nasional 74,92. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Aspek kebebasan sipil masih di bawah nasional yaitu sebesar 65,06 (nasional sebesar 76,45).
2. Aspek hak-hak politik masih di bawah nasional, 62,08 (nasional 70,11).
3. Adanya angka kejahatan atau kriminalitas yang masih tinggi meskipun sudah berhasil diturunkan dari 17,25 (2018) menjadi 12,71 sampai dengan tahun 2019.
4. Beberapa daerah rawan konflik sosial (2017 terjadi 21 kasus konflik sosial) dan kondisi terakhir berhasil diturunkan menjadi 7 kasus pada tahun 2019.
5. Meningkatnya gangguan tibumtranmas dan pelanggaran peraturan daerah (2017 terjadi 32 kasus pelanggaran, terhadap 14 Perda dan pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pelanggaran terhadap 5 Perda dan 2 Pergub).
6. Peranan Bale Mediasi sebagai mediator sengketa hukum belum optimal.
7. NTB masuk dalam kawasan rawan bencana.

F. Urusan Wajib Bidang Sosial

Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada September 2017 mencapai 748,12 ribu orang (15,05%), angka ini jauh berkurang dari

kondisi tahun 2013 sebesar 815,50 ribu orang (17,25%). Pemerintah Provinsi NTB berhasil menurunkan 67,38 ribu penduduk miskin pada lima tahun terakhir, namun Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat pada Maret 2020 tercatat sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Pada September 2019, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 705,68 ribu orang (13,88 persen). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode September 2019 – Maret 2020 yaitu sebesar 0,09 persen poin. Meskipun demikian kemiskinan masih menjadi permasalahan utama pembangunan, posisi tingkat kemiskinan masih berada di angka dua digit dan jauh di atas angka kemiskinan nasional. Selain kemiskinan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan ini antara lain:

1. Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum terpadu.
2. Penanganan PMKS (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, konflik sosial, komunitas adat terpencil) masih belum optimal (Cakupan penanganan PMKS pada 2017 sebesar 5,07%, dari 658.398 jiwa, yang diberikan penanganan 33.412 jiwa), sedangkan tahun 2019 mencapai 1,90%).
3. Belum terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas.
4. Beberapa prasarana dasar belum optimal diberikan (akses air minum layak 73,98%, sanitasi layak 69,76%, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban, rumah tidak layak huni masih ditemui).

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tahun 2013-2017 terjadi peningkatan pemerataan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik yang ditandai dengan adanya peningkatan nilai capaian indikator IPG dan IDG. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. IDG Provinsi NTB tahun 2017 baru mencapai angka 59,95 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 71,74 dan tahun 2018 meningkat menjadi 60,19, sedangkan IPG meningkat dari 90,36 tahun 2017 menjadi 90,40 tahun 2019;
2. Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,38%;
3. Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 44,10%;
4. Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,69%;
5. Rendahnya TPAK perempuan (BPS, Agustus 2017 TPAK Laki-laki 82,11%, TPAK Perempuan 56,18% dan pada tahun 2019 menjadi TPAK Laki-laki 82,10%, TPAK Perempuan 56,46%);

6. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga.

B. Urusan Wajib Bidang Pangan

Hasil evaluasi pola pangan harapan - PPH target tercapai, tetapi belum optimal 100%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan ini antara lain:

1. Masih adanya desa dengan kategori rentan dan rawan pangan;
2. Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar;
3. Belum terpetakannya ketersediaan pangan, bahkan ada kecenderungan menurunnya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yg berimbang dan bergizi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi masyarakat;
4. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari pada tahun 2017 sebesar 5,60% masih di bawah nilai nasional sebesar 7,90%.

C. Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB pada tahun 2016 adalah 56,53 poin dan tahun 2019 meningkat menjadi 57,09 atau masuk dalam kategori kurang baik, angka ini di bawah nilai IKLH nasional yaitu 65,73 poin (cukup baik). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya peningkatan lahan kritis;
2. Rendahnya kualitas air yang tercermin dari indeks kualitas air sebesar 22,75 poin jauh di bawah nasional 60,38 poin;
3. Pengelolaan persampahan belum optimal.

D. Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini adalah masih ada penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan atau dokumen catatan sipil, permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum semua wajib KTP ber-KTP. Dari total wajib KTP 3.704.007 orang, yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 3.666.347 (98,98%);
2. Persentase yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 41,11% (0-4 tahun) dan 24,72% (0-17 tahun).

E. Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini sebagai berikut:

1. Mayoritas desa masih menjadi desa berkembang sebanyak 659 desa (65,57%) dan masih ada yang sangat tertinggal sebanyak 5 desa dan tertinggal 108 desa;

2. Aspek pelayanan umum pedesaan masih dibawah capaian nasional (NTB 51,31% dan Nasional 51,72%);
3. Kondisi infrastruktur masih terbatas dengan nilai dimensi IPD 44,65%.

F. Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 adalah 1,17% pertahun, ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan ini antara lain:

1. Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%);
2. Persentase peserta KB aktif baru mencapai 88%;
3. Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,27 tahun).

G. Urusan Wajib Bidang Perhubungan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan sebagai berikut:

1. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada periode 2015-2017 mengalami penurunan sebesar 43,75 persen, namun pada periode 2017-2019 cenderung naik sebesar 23,92 persen dari 1.463 kasus menjadi 1.813 kasus;
2. Meningkatnya jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan;
3. Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun;
4. Frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan dari negara potensial asal wisatawan masih kurang dan bahkan ditutup akibat lamanya pandemic covid-19.

H. Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi NTB sudah cukup rendah 3,32% pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,42%, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja dilihat dari pendidikan (menengah 22% dan pendidikan rendah 67%);
2. Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal (73,61%) dan paling banyak di sektor pertanian;
3. Tingginya setengah penganggur 16,70%;
4. Kemampuan pekerja migran untuk berusaha sendiri (mandiri) masih rendah;
5. Masih rendahnya minat untuk berwirausaha;
6. Pengawasan ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan hubungan industrial belum optimal;

7. Dampak dari covid-19 menyebabkan banyak PHK dan tidak berjalan dengan baik roda perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yg mengalami kontraksi sehingga memicu bertambahnya pengangguran baru.

I. Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK) masih rendah (tahun 2015 sebesar 3,67 dan nasional sebesar 4,83). Ada beberapa permasalahan pada urusan ini antara lain:

1. Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet yaitu 17,69% sedangkan nasional sudah mencapai angka 25,37%;
2. Akses dan infrastruktur TIK belum merata;
3. Konektivitas telekomunikasi belum merata;
4. Pengelolaan *E-Gov* dilingkungan NTB belum optimal;
5. Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

J. Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan urusan ini antara lain:

1. Masih tingginya persentase koperasi tidak aktif (59,61% tahun 2019);
2. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lambat (90% usaha masih tergolong usaha mikro), bahkan banyak diantaranya yang perlu dilakukan pemulihan akibat dampak covid-19;
3. Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.

K. Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata (selama periode 2013-2017 PMDN diluar sektor pertambangan dan pariwisata 26,71%. Beberapa penyebabnya adalah: kesiapan data dan informasi investasi yang belum sesuai dengan trend permintaan investor nasional maupun internasional dan lemahnya pengendalian dan pengawasan perizinan.

L. Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya keterlibatan dalam berwirausaha, sedangkan terkait dengan olahraga adalah minimnya prestasi olah raga pada tingkat nasional/internasional. Hal ini dipengaruhi oleh: tidak tersedianya sarana olah raga yang mumpuni, pembinaan olah raga prestasi kurang optimal dan SDM olah raga relatif terbatas.

M. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Permasalahan pada urusan ini adalah mulai lunturnya nilai nilai budaya di masyarakat Provinsi NTB, yang ditandai dengan: (1) makin berkurangnya peran dan jumlah lembaga adat; (2) kurangnya perlindungan kebudayaan, (3) kurangnya pemanfaatan kebudayaan, dan (4) kurangnya pengembangan kebudayaan.

N. Urusan Perpustakaan

Permasalahan pada urusan ini adalah rendahnya literasi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

O. Urusan Kearsipan

Permasalahan pada urusan ini adalah masih banyaknya koleksi Deposit Perpustakaan yang belum terdigitalisasi.

II. Urusan Pilihan**A. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Ada beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan antara lain:

1. Penanganan kawasan konservasi laut dan pesisir belum optimal;
2. Terbatasnya jangkauan penangkapan ikan;
3. Makin mahalnya harga pakan ikan budidaya;
4. Potensi tambak yang belum optimal pengembangannya (potensi tambak yang belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton);
5. Kurangnya industri pengolah hasil perikanan.

B. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal dalam perekonomian NTB, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Akses dan infrastruktur penunjang pada destinasi pariwisata masih terbatas;
2. Rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan cenderung masih rendah (Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM) di hotel bintang pada tahun 2019 mencapai 2,13 hari, sedangkan untuk hotel non bintang hanya selama 1,72 hari);
3. Belum tersertifikasinya destinasi wisata dan sektor pendukung, terutama pada sektor wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dan lain-lain);
4. Belum berkembangnya desa-desa yang memiliki potensi pariwisata untuk menjadi desa wisata.

C. Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. Dimana pada tahun 2019 angkanya 22,94% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 23,51%. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain:

1. Diversifikasi Budidaya tanaman eksotik belum dilakukan secara optimal;
2. Penggunaan teknologi (permesinan maupun budidaya) masih relatif rendah;
3. Ketersediaan pakan ternak yang masih tergantung dari luar NTB;

4. Peternakan masih berskala kecil dengan kepemilikan hewan ternak yang relatif kecil;
5. Nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih terbatas.

D. Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Permasalahan pada urusan bidang kehutanan adalah berkurangnya luas tutupan hutan, tingginya degradasi kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani.

E. Urusan Pilihan Bidang ESDM

Permasalahan pada urusan energi, sumber daya mineral adalah masih rendahnya peningkatan nilai tambah ekspor bahan tambang, akses masyarakat terhadap listrik belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan energi terbarukan.

F. Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir periode 2015-2019 terjadi defisit perdagangan, dimana nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, dengan nilai defisit Rp.5.341,19 Miliar. Ada beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain:

1. Nilai ekspor masih tergantung pada komoditas pertambangan (persentase nilai ekspor pertambangan sampai tahun 2019 masih tinggi sebesar 99%) dan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah.
2. Akses pasar komoditas dan produk unggulan daerah belum optimal.
3. Banyaknya peredaran produk usaha mikro kecil yang belum memenuhi standar (SNI, Halal, kadaluarsa).
4. Pasar tradisional masih belum terkelola dengan baik.

G. Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berfluktuasi, tahun 2013 ke 2014 menurun dari 5,07% menjadi 4,20% dan di tahun 2017 naik menjadi 4,44%. Sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 4,72%. Ada beberapa permasalahan dalam urusan perindustrian antara lain:

1. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal.
2. Research and development industri komoditas unggulan masih kurang.
3. Kawasan industri terintegrasi belum ada.
4. Industri yang berkembang di masyarakat dan berorientasi ekspor tidak didukung ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.
5. Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi.
6. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal.

III. Urusan Penunjang

A. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan pada urusan ini adalah Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya menggambarkan pengelolaan kinerja yang berkualitas dan efektif.

B. Bidang Perencanaan

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Belum optimalnya perencanaan kinerja birokrasi; (2) Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja.

C. Bidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi NTB sudah sangat baik, dimana opini BPK atas laporan keuangan sudah mendapatkan WTP sejak tahun 2011. Meskipun demikian, ada permasalahan terkait dengan kemandirian keuangan daerah. NTB masih cenderung bergantung kepada dana yang bersumber dari dana perimbangan, dan PAD masih cenderung minim.

Permasalahan pada urusan ini antara lain: (1) Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergali (retribusi, IGU dari OPD dll); (2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rendah; (3) Pola belanja daerah belum seragam.

D. Bidang Pengawasan

Pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda belum optimal. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa permasalahan seperti: (1) Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal; (2) Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah; dan (3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.

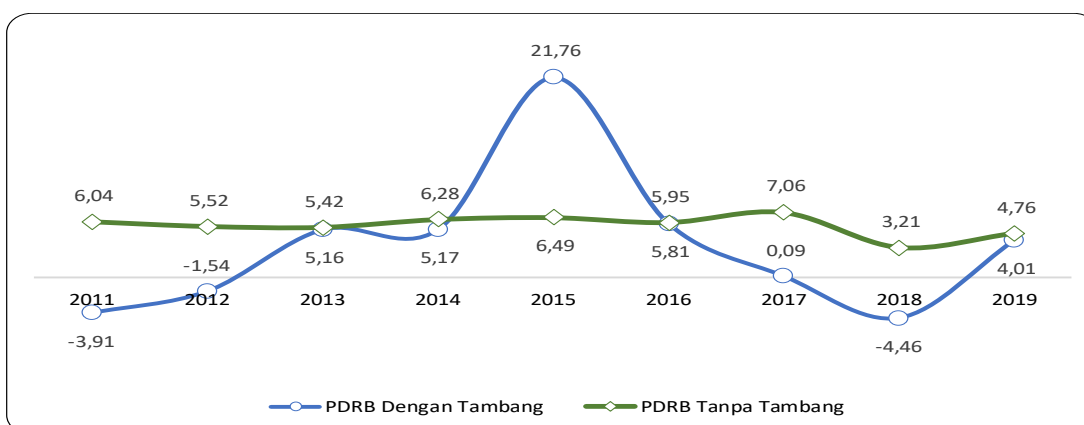
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2019, PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.132,67 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,01 triliun. Nilai PDRB 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, masing-masing Rp.123.97 triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp.90,4 triliun (atas dasar harga konstan 2010). Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya, kinerja perekonomian NTB di tahun 2019 mulai meningkat kembali setelah mengalami kontraksi sebesar 4,46% tahun 2018. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi NTB 2019 terjadi karena kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai penopang utama perekonomian daerah mulai membaik dengan laju pertumbuhan mencapai 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menurun hingga 33,71%.

Fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi NTB sangat dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terutama sub kategori Pertambangan Biji Logam. Jika tanpa sub kategori Pertambangan Biji Logam, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 mencapai 4,76%. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,21%. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi NTB pada kegiatan ekonomi di luar pertambangan biji logam menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi NTB sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019

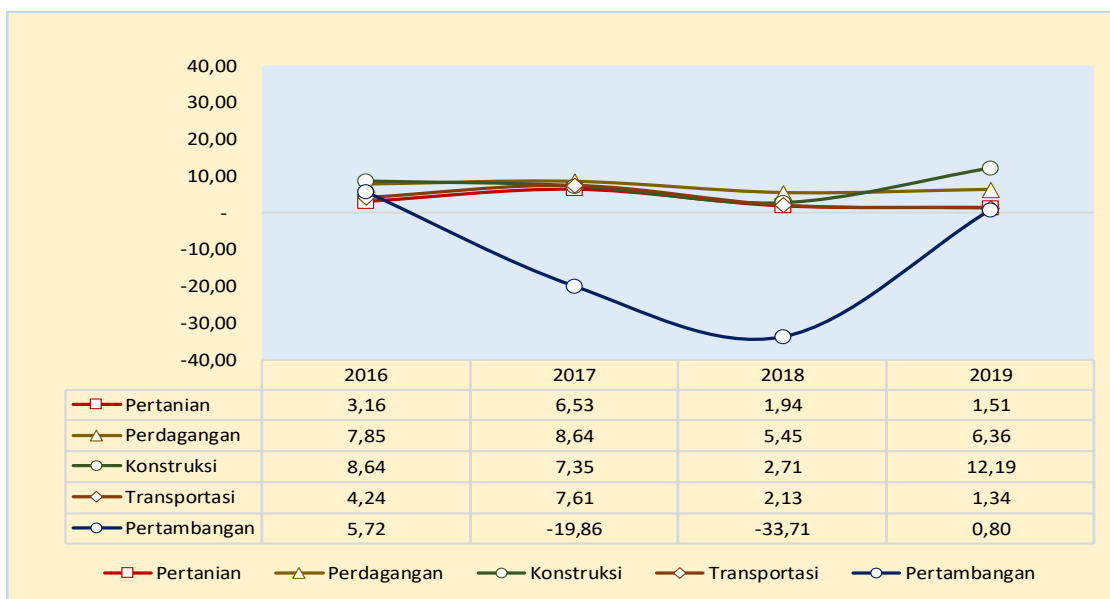
Peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB selama 2019 juga dimungkinkan karena semua lapangan usaha menunjukkan kinerja positif kecuali Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih menunjukkan sedikit kontraksi sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2018 meskipun mulai membaik. Beberapa lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tinggi selama tahun 2019 secara berturut-turut adalah: konstruksi (12,19%); pengadaan listrik dan gas (11,01%); jasa Pendidikan (7,04%); Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (6,36%); jasa lainnya (5,65%); jasa perusahaan (5,01 %); real estate (4,76%). Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27.183,24	29.067,12	30.368,89	20.843,23	21.248,28	21.569,97
2	Pertambangan dan Penggalian	24.108,62	17.317,57	17.995,65	19.635,14	13.016,91	13.121,22
3	Industri Pengolahan	4.918,19	5.111,38	5.442,72	4.213,75	4.276,28	4.441,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	90,62	97,49	106,27	78,06	79,27	88,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,62	101,75	105,46	72,45	69,82	72,32
6	Konstruksi	10.961,23	11.809,06	13.986,70	9.032,56	9.277,10	10.408,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.387,95	17.955,03	19.795,66	12.111,62	12.771,36	13.583,10
8	Transportasi dan Pergudangan	9.000,93	9.312,57	9.650,36	6.371,85	6.507,49	6.594,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.747,48	2.660,23	2.696,56	1.657,81	1.581,68	1.580,49
10	Informasi dan Komunikasi	2.303,21	2.456,65	2.598,25	2.157,77	2.274,53	2.368,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.245,90	4.692,48	4.840,13	3.065,62	3.273,29	3.319,08
12	Real Estate	3.793,67	4.099,76	4.363,71	2.678,34	2.803,02	2.936,50
13	Jasa Perusahaan	211,10	226,62	245,13	157,59	165,59	173,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.437,79	7.818,22	8.174,65	4.640,84	4.688,82	4.859,12
15	Jasa Pendidikan	5.680,64	6.122,06	6.700,49	4.062,12	4.274,00	4.574,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.186,65	2.450,13	2.685,38	1.827,61	1.975,37	2.096,05
17	Jasa Lainnya	2.459,70	2.667,80	2.918,13	2.001,85	2.108,65	2.227,81
	PDRB dengan Tambang	123.822,76	123.965,94	132.674,15	94.608,21	90.391,46	94.014,74
	PDRB tanpa Tambang	99.713,92	106.648,35	114.678,49	74.973,13	77.374,55	80.893,52

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

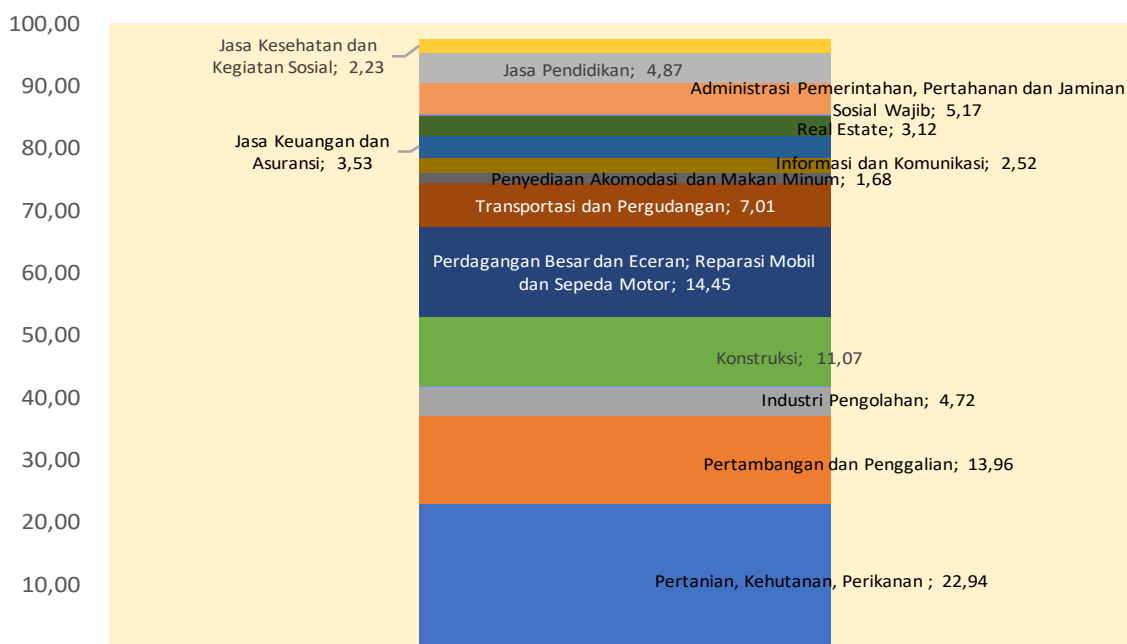
Pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 12,19%. Selanjutnya, kategori pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 11,01% dan kategori jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,04%. Selain itu, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,36% dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,11%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi setelah gempa tahun 2018. Berikut grafik perbandingan kinerja lapangan usaha sebagai sumber pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2016-2019 seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Gambar 3.2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019

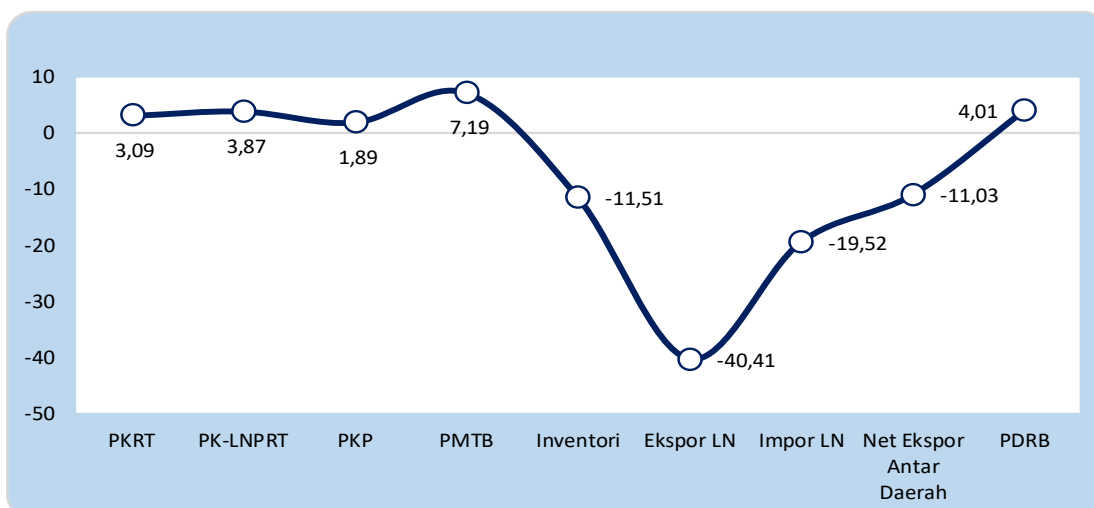
Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha mengalami peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, masing-masing: perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara, laju pertumbuhan 2 (dua) sektor lainnya yakni pertanian dan transportasi menurun. Jika dilihat dari strukturnya, perekonomian NTB selama tahun 2019 masih didominasi oleh sektor primer. Kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB NTB (atas dasar harga konstan 2010) secara berturut-turut adalah: Pertanian, Kehutanan, Perikanan (22,94%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,45%); Pertambangan dan Galian (13,96%); Konstruksi (11,07%). Adapun gambaran dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB NTB tahun 2019 sebagaimana pada grafik berikut.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Gambar 3. 3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 4,01% dipengaruhi oleh meningkatnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,19%, peningkatan pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,87% dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 3,09%. Pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,89%. Sedangkan, komponen ekspor luar negeri pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 40,41% dibandingkan dengan tahun 2018. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB menurut pengeluaran pada tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDRB NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2019

Menurut pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, struktur ekonomi NTB didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (63,05%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (39,22%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (15,32%). Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019, komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,39 poin, diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang menyumbang pertumbuhan sebesar 1,93 poin. Sementara, komponen ekspor luar negeri menyumbang kontraksi tertinggi sebesar 2,91 poin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%. Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut pengeluaran berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 10 PDRB Provinsi NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019

Komponen	ADH Berlaku (Miliar Rp)			ADH Konstan (Miliar Rp)		
	2017	2018*	2019**	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah Tangga	74.854,23	79.034,02	83.656,39	55.313,39	56.523,35	58.269,57
Konsumsi LNPRT	1.810,76	2.067,61	2.201,69	1.319,66	1.457,37	1.513,76
Konsumsi Pemerintah	19.218,41	19.768,79	20.329,97	12.051,87	12.176,37	12.406,01
PMTB	43.826,44	47.243,91	52.029,61	28.526,82	30.007,15	32.163,88
Perubahan Inventori	993,75	881,91	801,99	384,01	332,28	294,02
Ekspor Luar Negeri	17.534,34	10.017,15	5.980,84	13.239,10	6.518,75	3.884,71

Komponen	ADH Berlaku (Miliar Rp)			ADH Konstan (Miliar Rp)		
	2017	2018*	2019**	2017	2018*	2019**
Impor Luar Negeri	3.903,93	5.097,31	4.305,76	2.573,73	3.223,14	2.594,12
Net Ekspor Antar Daerah	-30.511,25	-29.950,15	-28.020,58	-13.652,91	-13.400,66	-11.923,09
PDRB	123.822,76	123.965,94	132.674,15	94.608,21	90.391,46	94.014,74

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

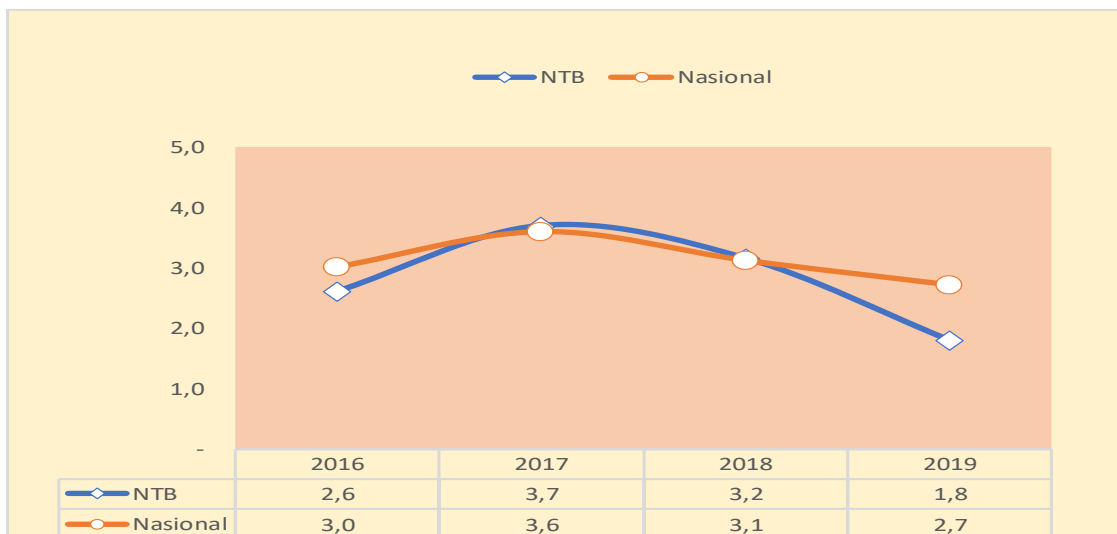
*Angka sementara ** Angka sangat sementara

3.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel kinerja ekonomi sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Salah satu implikasinya adalah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang pada akhirnya makin memperberat upaya peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah terus menerus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dapat mengendalikan inflasi. Grafik berikut menyajikan inflasi tahunan di Provinsi NTB periode tahun 2016-2019.



Sumber: BPS Provinsi NTB 2019, dan Bank Indonesia 2020

Gambar 3. 5 Inflasi Tahun 2016-2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa inflasi tahun 2019 lebih rendah 1,4 poin dibandingkan dengan tahun 2018 dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,7%. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (2019), inflasi di NTB dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas bahan makanan, terutama pada sub komoditas sayur-sayuran dan ikan segar. Selain bahan makanan, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas kesehatan, terutama pada komoditas obat dengan resep dokter serta kelompok komoditas sandang, terutama pada komoditas emas perhiasan sejalan dengan menguatnya harga emas global. Pasca gempa, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama Satgas Pangan NTB secara intensif memantau dan pengendalian harga, terutama komoditas bahan makanan dan bahan bangunan. Upaya-upaya yang telah dilakukan TPID Provinsi NTB untuk memperkuat pengendalian harga pasca bencana gempa bumi, antara lain sebagai berikut.

a) Aspek Ketersediaan Pasokan:

- Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian inflasi oleh TPID di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok untuk tahun 2019;
- Menjaga ketahanan pasokan beras oleh Bulog Divre NTB yakni dengan total stok sebanyak 79.089 ton dan tingkat ketahanan mencukupi untuk 19,03 bulan ke depan;
- Perluasan pemasaran Bulog Divre melalui memanfaatkan jaringan 119 unit Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah beroperasi di Kota Mataram dan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Dinas Ketahanan Pangan.

- b) Kelancaran Distribusi
 - Meningkatkan waktu operasional bongkar muat di Pelabuhan Lembar menjadi 24 jam;
 - Meningkatkan prioritas bongkar muat untuk komoditas semen di pelabuhan Lembar;
 - Menjalani kerjasama dengan pelaku usaha baik produsen, distributor, retail modern, asosiasi, Bulog, dan
 - Perusahaan Perdagangan Indonesia guna memangkas rantai distribusi.
- c) Keterjangkauan Harga
 - Menggelar pasar murah di sejumlah titik di wilayah NTB sebagai langkah mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka menyambut HBKN;
 - Sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga, menggelar pasar murah untuk komoditas semen di sejumlah titik di Pulau Lombok;
 - Penjualan komoditas sembako bekerjasama dengan Rumah Pangan Kita, Toko Tani Indonesia Centre, dan Retail Modern.
- d) Komunikasi
 - Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada publik untuk mencegah terjadinya panic buying dari masyarakat melalui talkshow;
 - Pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama dan organisasi wanita se-Provinsi NTB.

3.1.3 Ketenagakerjaan

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal tersebut.

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang telah tersedia sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kesempatan kerja diharapkan aktivitas ekonomi makin meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan maupun tingkat ketimpangan. Selama tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan perhatian cukup besar terhadap hal tersebut. Paparan data ketenagakerjaan berikut khususnya tahun 2018 tidak termasuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) karena pada bulan Agustus 2018 BPS NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan sehubungan dengan kejadian gempa bumi.

Data BPS (2019) mencatat bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada bulan Agustus 2019 sebanyak 2.471.552 orang, meningkat sebanyak 234.171 orang

dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.387.036 orang, bertambah 232.915 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran kondisi Agustus 2019 sebanyak 84.516 orang, mengalami kenaikan sebanyak 1.256 orang dibanding Agustus 2018.

TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 68,65%, naik sebesar 2,74 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK selama setahun terakhir ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja, disisi lain terjadi pengurangan jumlah bukan angkatan kerja yaitu pada penduduk dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 82,09% sementara TPAK perempuan hanya 56,46%. Jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,26% poin dan TPAK perempuan meningkat sebesar 2,21% poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 3,72% pada Agustus 2018 menjadi 3,42% pada Agustus 2019. Berbagai terobosan pemerintah daerah seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja yang mendukung sektor pariwisata dan industri kreatif harus terus dilanjutkan. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding perdesaan. TPT di perkotaan dan perdesaan menunjukkan trend yang menurun. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,05% sedangkan TPT di perdesaan 2,84%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,20% poin dan 0,40% poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 - 2019

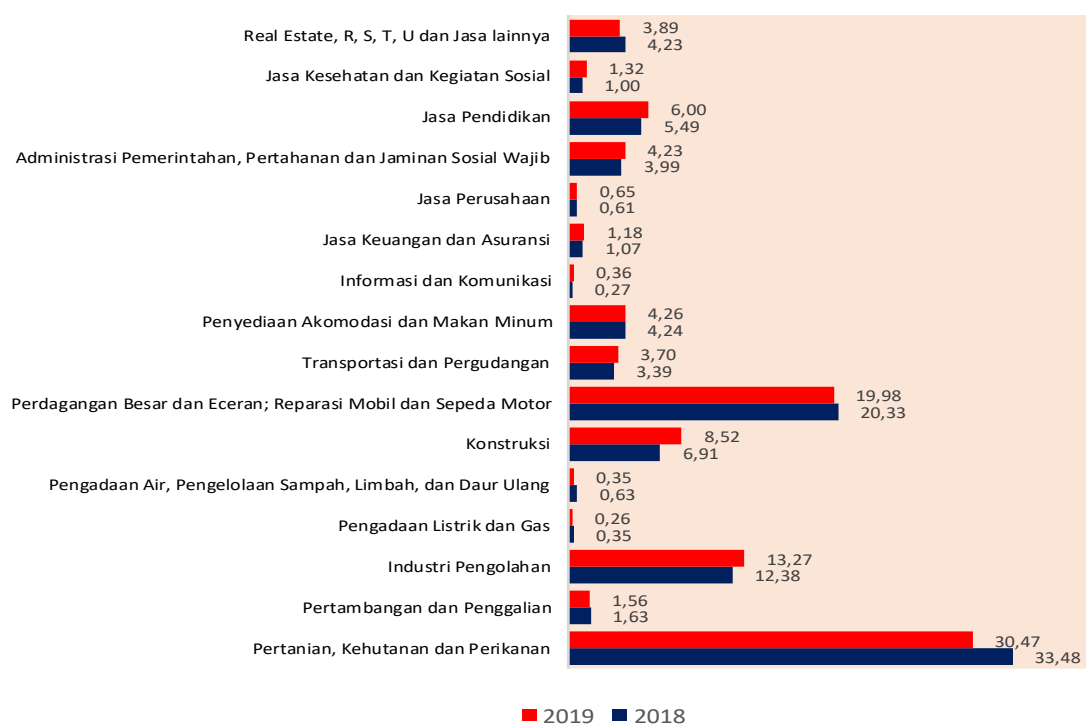
NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja	2.396.169	2.237.381	2.471.552
	Laki-Laki	1.342.716	1.363.798	1.405.339
	(%)	(54,49)	(56,92)	(56,86)
	Perempuan	1.121.615	1.032.371	1.066.213
	(%)	(45,51)	(43,08)	(43,14)
	r (%)	-2,77	-6,63	10,47
2	Pengangguran	79.449	83.260	84.516

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
	Laki-Laki (%)	51.471 (64,78)	51.199 (61,50)	47.866 (56,64)
	Perempuan (%)	27.978 (35,22)	32.058 (38,50)	36.650 (43,36)
	r (%)	-18,11	4,80	1,51
	TPT (%)	3,32	3,72	3,42
	Target TPT (%)	4,82	4,55	3,39

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, penduduk NTB paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 727,41 ribu orang (30,47%), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 476,99 ribu orang (19,98%) dan Industri Pengolahan 316,65 ribu orang (13,27%).

Berdasarkan tren menurut kategori/lapangan usaha, BPS (2019) melaporkan hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi penyerapan tenaga kerja bergerak secara fluktuatif. Dalam kurun waktu 2018 – 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (naik 3,62% poin), konstruksi (naik 1,61% poin), industri pengolahan (naik 0,89% poin), jasa pendidikan (naik 0,51% poin), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (naik 0,32% poin), transportasi dan pergudangan (naik 0,31% poin), jasa keuangan dan asuransi (naik 0,11% poin), informasi dan komunikasi (naik 0,09% poin dan penyediaan akomodasi makan dan minum (naik 0,02% poin), dan jasa perusahaan (naik 0,04% poin). Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah lapangan real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya (turun 3,72% poin), usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (turun 3,01% poin), perdagangan besar dan eceran (turun 0,35% poin), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (turun 0,28% poin), pengadaan listrik dan gas (turun 0,09% poin), dan pertambangan dan penggalan (0,07% poin).



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020 *) Tidak termasuk Data Kabupaten Lombok Utara

Gambar 3. 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018*-2019

3.1.4 Kemiskinan

Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai kebijakan telah diambil terutama kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan baik yang bersifat moneter maupun non moneter.

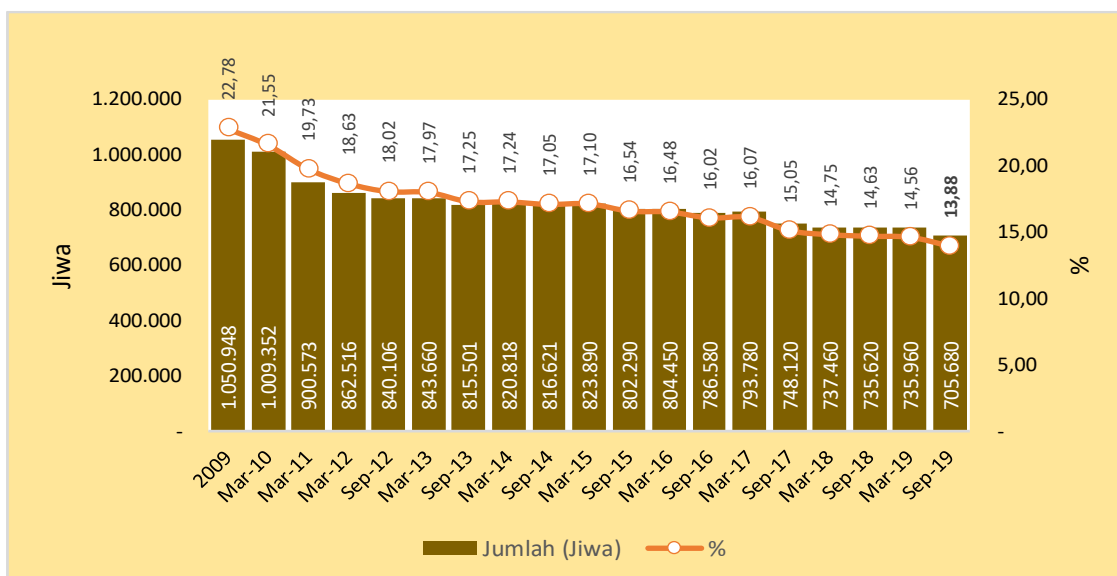
Perwujudan Visi “NTB Gemilang” melalui aktivitas pembangunan di segala bidang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk merealisasikan visi tersebut baik bersifat moneter maupun non moneter. Salah satu ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Data BPS NTB (2019) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang atau berkurang 29.940 orang dari periode September 2018. Persentase penduduk miskin September 2019 mencapai 13,88% atau mengalami penurunan sekitar 0,75 poin dari 14,63% pada periode September 2018 atau menurun 0,68 poin dari angka kemiskinan periode Maret 2019 sekitar 14,56%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 15,74% dan turun menjadi 14,85% pada September 2019. Sejalan dengan hal tersebut,

persentase penduduk miskin daerah perdesaan juga turun dari 13,45% pada Maret 2019 menjadi 12,97% pada September 2019. Jika merujuk grafik di bawah tampak perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi NTB selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan antara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Berdasarkan pada paparan di atas terindikasi bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian jumlah penduduk miskin belum mencapai target RPJMD. Grafik berikut menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 2016 - 2018.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Gambar 3. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 - 2019

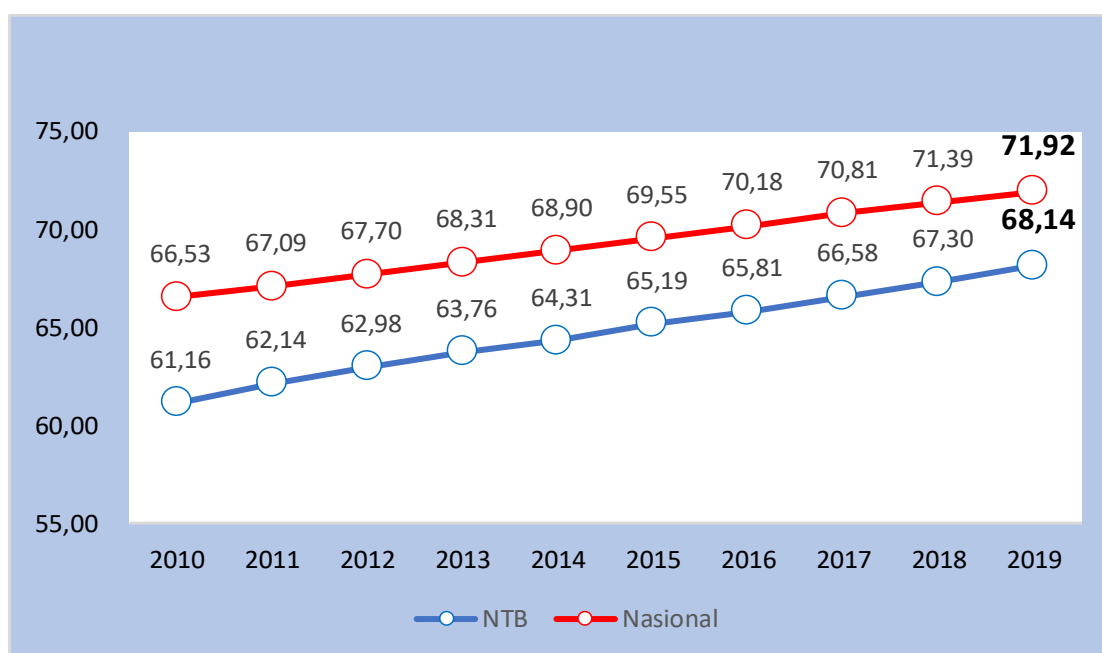
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2019 - September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati Garis Kemiskinan. Sedangkan untuk Indeks Keparahhan Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Di daerah perkotaan, P1 2,500 pada Maret 2019 turun menjadi 2,169 pada September 2019. Di daerah perdesaan, P1 mengalami penurunan dari 2,166 pada Maret 2019 menjadi 2,073 pada September 2019. Untuk nilai Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan, P2 Maret 2019 sebesar 0,451 meningkat menjadi 0,533 pada September 2019. Sedangkan di daerah perdesaan, P2 juga mengalami kenaikan dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019.

3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam setiap periode pemerintahan selama lima tahun, pembangunan manusia menjadi prioritas pemerintah dengan indikator pencapaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM dijadikan sebagai salah satu target bagi perwujudan Visi “NTB Gemilang” kaitannya dengan pembangunan manusia melalui program unggulan di sejumlah sektor terkait.

Capaian IPM Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 68,14 pada tahun 2019. Dengan capaian IPM tahun 2019 ini telah membawa NTB berada di posisi 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Selama periode 2010-2019, IPM Provinsi NTB telah bertambah 6,98 poin dengan status capaian “IPM sedang”. Laju pertumbuhan IPM NTB di tahun 2019 mencapai 1,25%. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1,08%. Laju pertumbuhan IPM NTB sejak tahun 2010 hampir selalu bernilai lebih dari 1%. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka setidaknya tiga tahun yang akan datang IPM Provinsi NTB akan mencapai level tinggi.



Sumber: BPS NTB, 2020

Gambar 3. 8 Perbandingan IPM NTB dan Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2010- 2019

Meski laju pertumbuhan IPM NTB selalu berada di atas laju pertumbuhan IPM Nasional, namun level capaian IPM Provinsi NTB masih berada di bawah level Nasional. Selisih IPM Provinsi NTB dengan Nasional pada tahun 2010 masih cukup lebar yaitu sebesar 5,37 poin. Seiring dengan berjalannya waktu, selisih ini semakin menipis menjadi 3,84 poin pada tahun 2019. Artinya, NTB semakin berbenah dan berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan manusia agar

paling tidak bisa sejajar dengan Nasional. Ke depan, upaya yang lebih keras diperlukan agar jarak ketertinggalan dengan rata-rata IPM nasional semakin menipis. Adapun perkembangan komponen IPM Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Tabel 3. 12 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010 – 2019

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	63,82	64,13	64,43	64,74	64,90	65,38	65,48	65,55	65,87	66,28
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,66	11,97	12,21	12,46	12,73	13,04	13,16	13,46	13,47	13,48
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,73	6,07	6,33	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90	7,03	7,27
Pengeluaran Per Kapita	Rp 000/ Tahun	8.707	8.759	8.853	8.950	8.987	9.241	9.575	9.877	10.284	10.640
IPM		61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14
Pertumbuhan IPM	%	-	1,60	1,34	1,23	0,88	1,36	0,95	1,17	1,08	1,25

Sumber: BPS NTB, 2020

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 13 Target dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2021-2022

NO URUT	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		PERUBAHAN APBD 2021	RAPBD 2022	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
4	PENDAPATAN	5.739.963.964.315,00	5.136.768.836.000,00	(603.195.128.315,00)	(10,51)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.258.283.418.223,00	2.309.324.613.300,00	51.041.195.077,00	2,26
4.1.1	Pajak Daerah	1.601.353.821.000,00	1.661.922.688.000,00	60.568.867.000,00	3,78
4.1.2	Retribusi Daerah	47.219.957.500,00	44.103.870.600,00	(3.116.086.900,00)	(6,60)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.263.633.123,00	60.349.184.000,00	14.085.550.877,00	30,45
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	563.446.006.600,00	542.948.870.700,00	(20.497.135.900,00)	(3,64)
4.2	Pendapatan Transfer	3.426.899.642.148,00	2.819.432.315.100,00	99.784.914.837,00	2,91
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.425.156.711.263,00	2.817.770.229.100,00	(550.480.915.000,00)	(16,07)
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.425.156.711.263,00	2.817.770.229.100,00	(611.902.489.000,00)	(17,86)
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	246.773.431.263,00	248.456.218.100,00	1.682.786.837,00	0,68
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.475.675.853.000,00	1.478.509.073.000,00	2.833.220.000,00	0,19
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	393.373.318.000,00	488.642.226.000,00	95.268.908.000,00	24,22
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.240.811.862.000,00	592.228.819.000,00	(648.583.043.000,00)	(52,27)

4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	68.522.247.000,00	9.933.893.000,00	(58.588.354.000,00)	(85,50)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.742.930.885,00	1.662.086.000,00	(80.844.885,00)	(4,64)
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.742.930.885,00	1.662.086.000,00	(80.844.885,00)	(4,64)
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.780.903.944,00	8.011.907.600,00	(46.768.996.344,00)	(85,37)
4.3.1	Pendapatan Hibah	54.780.903.944,00	8.011.907.600,00	(46.768.996.344,00)	(85,37)
5	BELANJA DAERAH	6.380.316.797.911,00	5.361.228.836.000,00	(1.019.087.961.911,00)	(15,97)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(640.352.833.596,00)	(224.460.000.000,00)	415.892.833.596,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	645.352.833.596,00	224.460.000.000,00	(420.892.833.596,00)	(65,22)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	119.812.833.596,00	-	(119.812.833.596,00)	(100,00)
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	525.540.000.000,00	224.460.000.000,00	(301.080.000.000,00)	(57,29)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.2.3	Penyertaan Modal PT. GNE	5.000.000.000,00	-	(5.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	640.352.833.596,00	224.460.000.000,00	(415.892.833.596,00)	(64,95)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	#DIV/0!

Sumber : TAPD Prov. NTB, 2021

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

- a. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
 - c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
 - d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
 - e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian.
 - g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.
 - h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.
 - i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
 - k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
 - m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
 - n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.

2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
 - b. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
 - b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja pegawai yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
2. Mengalokasikan kebutuhan *belanja fixedcost, regularcost, dan variablecost* secara terukur dan terarah, yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional perangkat daerah dan Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan

koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;

3. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
4. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
5. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
7. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19, baik penanganan di bidang kesehatan maupun untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
8. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur baik jalan, irigasi, komunikasi, perumahan dan pertanian serta program-program strategis dan unggulan lainnya serta program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB (*committed budget*);
9. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau, melalui pemberdayaan dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis;
10. Pemenuhan Pelaksanaan SPM;
11. Alokasi Belanja Tidak Terduga yang diarahkan pada keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah

meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

b. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan

kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

- a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
- b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
- c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
- d. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
- e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*).
- b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
- c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment/AP* Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (*tourism information center*); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat,

pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPd Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk pencapaian target pada Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya. Substansi dokumen RKPd Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun ketiga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2022.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah **“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”**, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.

3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Akhir (2023)
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana			115.83
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	0.65
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			81.17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	86.60
					Kemantapan Sistem Irigasi	54.50
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	84.47				
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	A (80,01 - 90,00)
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	0.72
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	4.55
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			73.05
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67.48
					Persentase Balita <i>Stunting</i> (%)	30.49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan	Indeks Pendidikan			63.10
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			13.52		

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Akhir (2023)
		untuk SDM yang berdaya saing		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	7.66
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			80.45
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	80.00
					Indeks Kualitas Udara	92.00
			Neraca pengelolaan sampah (%)			100.00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	70.00
					Persentase Pengurangan Sampah	30.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)			75.56
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	68,202
			Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (%)	23.88	
			Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100	
			Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.20	
			Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	80.59	
				Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	82.46	
				Rasio Elektrifikasi	99.99	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Akhir (2023)	
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	93.82	
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	3,0 - 4,0	
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	11,944	
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) terhadap PDRB (%)				4.5
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	137.24	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	38.65	
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)				9.00
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	179.91	
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.17	
		6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas		
Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial				0.00		
Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah				6.07		
Partisipasi politik masyarakat (%)						85.20	
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik				1.00		

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Kondisi Akhir (2023)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			61.40
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	20.47
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	100

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”.

Arah kebijakan nasional di wilayah Nusa Tenggara yang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 yakni:

1. Pemulihan Ekonomi
Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19
2. Komoditas Unggulan
Optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau
3. Transformasi Ekonomi
Mendorong transformasi perekonomian berbasis komoditas mentah ke arah hilirisasi komoditas
4. Pemerataan Wilayah
Memperkuat peran Wilayah Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis
5. Pengelolaan Lingkungan dan Resiko Bencana
Melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi bencana, serta mengoptimalkan pemulihan kembali pasca bencana.

Sedangkan strategi pembangunan nasional tahun 2022 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. **Penguatan Sektor Unggulan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah** meliputi:
 - a. Penguatan rantai nilai industri pariwisata secara hulu-hilir melalui pengembangan DPP Lombok - Mandalika/KEK Mandalika;
 - b. Pengembangan Food Estate;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal masyarakat berbasis komoditas unggulan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal, perbatasan serta pulau kecil terluar;
 - d. Optimalisasi pengembangan komoditas unggulan wilayah pada sentra-sentra pertumbuhan diantaranya SKPT dan KPPN serta Perkuatan UMKM dan IKM berbasis komoditas unggulan;

- e. Peningkatan produktivitas usaha perikanan serta pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pelabuhan ikan;
 - f. Pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi seperti kerajinan mutiara & kain tenun tradisional.
- 2. Peningkatan Pelayanan dan Infrastruktur** meliputi:
- a. Percepatan penerapan SPM;
 - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi);
 - c. Penguatan teknologi telekomunikasi dan infomasi digital dalam mendukung ekonomi lokal;
 - d. Pengembangan sumber - sumber EBT.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Pemerintahan** meliputi:
- a. Penyiapan SDM untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan industri berbasis komoditas unggulan melalui penguatan sekolah vokasi;
 - b. Pemerataan akses rumah tangga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat pembangunan manusia;
 - c. Perkuatan sarpras kesehatan untuk menjangkau wilayah kepulauan disertai Laboratorium penunjang.
- 4. Penguatan Konektivitas Intrapulau dan Antarpulau** meliputi:
- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi darat, laut, dan udara antar gugus pulau di Wilayah Nusa Tenggara Barat;
 - b. Penguatan konektivitas wilayah kepulauan dan transportasi dengan hub pariwisata internasional;
 - c. Pemulihan sosial ekonomi dampak gempa di Nusa Tenggara Barat.

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Jaring Pengaman Sosial (JPS); serta
 - c. Penanganan dampak ekonomi masa pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang memadai, dengan strategi:
 - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
 - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;

- c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
- a. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah;
 - b. Mendorong pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat;
 - c. Memperluas akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
 - d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan strategi:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan.
- d. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.
- e. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
- f. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
- g. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Prioritas Nasional 2

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan strategi:

- a. Pengembangan wilayah pulau sumatera.
- b. Pembangunan wilayah pulau jawa-bali.
- c. Pembangunan wilayah kepulauan nusa tenggara
- d. Pembangunan wilayah pulau kalimantan
- e. Pembangunan wilayah pulau sulawesi

- f. Pembangunan wilayah pulau maluku
 - g. Pembangunan wilayah pulau papua.
- Untuk mendukung strategi tersebut maka kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan kawasan strategis
 - b. Pengembangan sektor unggulan
 - c. Pengembangan kawasan perkotaan
 - d. Pemenuhan pelayanan dasar
 - e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.
 - f. Kelembagaan dan keuangan daerah.

3. Prioritas Nasional 3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan strategi:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
- f. Pengentasan kemiskinan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Prioritas Nasional 4

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan strategi:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila.
- b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
- c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial.
- d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional 5

Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan strategi:

- a. Infrastruktur pelayanan dasar.
- b. Infrastruktur ekonomi.
- c. Infrastruktur perkotaan.
- d. Energi dan ketenagalistrikan.
- e. Transformasi digital.

6. Prioritas Nasional 6

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan strategi:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.

c. Pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transpormasi Pelayanan Publik, dengan strategi:

- a. Konsolidasi demokrasi
- b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
- c. Penegakan hukum nasional.
- d. Reformasi birokrasi dan tata kelola
- e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022

RKPd Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pembangunan dan pemulihan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing serta reformasi struktural sosial dan ekonomi yang mencakupantisipasi dan penanganan pasca pandemi Covid-19. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPd 2022 yaitu :

1. **Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana**, mendukung **Prioritas Nasional 6**;
2. **Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi**, mendukung **Prioritas Nasional 2** dan **Prioritas Nasional 5**;
3. **Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik** mendukung **Prioritas Nasional 7**
4. **Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM**, mendukung **Prioritas Nasional** dan **Prioritas Nasional 3**;
5. **Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM**, mendukung **Prioritas Nasional 3**;
6. **Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan**, mendukung **Prioritas Nasional 6**;
7. **Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi**, mendukung **Prioritas Nasional 1**;

8. **Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;**
9. **Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;**
10. **Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.**

Masing-masing Prioritas Daerah Provinsi NTB dijabarkan ke dalam Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB yang merupakan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program Strategis dan Program Unggulan ini merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dan 75 (tujuh puluh lima) program unggulan yang dijabarkan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 2 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi NTB

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
I	(Misi I) NTB TANGGUH DAN MANTAP					
PRIORITAS DAERAH I						
1	KETANGGUHAN MENGHADAPI RESIKO BENCANA					
	1 Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Penanganan Pascabencana Provinsi Penyusunan Rencana Kontijensi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2 Sekolah Aman Bencana	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
	3 Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SIAGA)	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
PRIORITAS DAERAH 2						
2	PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS dan AKSESIBILITAS WILAYAH					
1	NTB Terkoneksi	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
				Program Pengelolaan Pelayaran	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
					Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik
2	Percepatan Jalan Mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan
						Pembangunan Jalan
						Rehabilitasi Jalan
						Pemeliharaan Berkala Jalan
						Pemeliharaan Rutin Jalan
						Rehabilitasi Jembatan
						Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
3	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
4	Irigasi Cukup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
						Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
						Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
						Rehabilitasi Bendung Irigasi
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
						Operasional Unit Pengelola Irigasi
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
5	Nusa Terang Benderang	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
					Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
					Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
						Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
6	SPAM Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
						Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2	(Misi II) NTB BERSIH DAN MELAYANI					
PRIORITAS DAERAH 3						
1	REFORMASI BIROKRASI					
1	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
2	eNTeBe Plan/SIPD	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Biro Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
						Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
3	NTB SDG's Center	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
4	Research Based Policy	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
						Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
						Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
						Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
5	NTB Satu Peta	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
						Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
6	NTB Satu Data	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
						Membangun Metadata Statistik Sektoral
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
7	NTB Care	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
8	e-Pendapatan	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9	NTB WTP	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Kerjasama Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga
						Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
						Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
						Penatausahaan Barang Milik Daerah
						Inventarisasi Barang Milik Daerah
						Pengamanan Barang Milik Daerah
						Penilaian Barang Milik Daerah
						Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
10	SAKIP Level A	Inspektorat		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
		Biro Organisasi		Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
						Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-
11	Agen Perubahan	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
						Pengelolaan Assessment Center
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
						Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
12	Manajemen Talenta	Badan Kepegawaian Daerah		Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				Pengelolaan Assessment Center
						Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
						Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
						Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
						Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
						Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN
						Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
						Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
						Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
						Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
						Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
					Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
						Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
						Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
						Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
						Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
						Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
						Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	(Misi III) NTB SEHAT DAN CERDAS					
PRIORITAS DAERAH 4						
1	PENGLOLAAN KESEHATAN UNTUK DAYA SAING SDM					
	1 Revitalisasi Posyandu	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
						Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
2	NTB Berolahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
3	Generasi Emas NTB	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
4	Jamban Keluarga/Stop BABS	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
						Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
5	Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan dan Permukiman		Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PRIORITAS DAERAH 5						
11	PENGLOLAAN PENDIDIKAN UNTUK DAYA SAING SDM					
1	1000 Cendikia/Beasiswa	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
2	Re-Engineering SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
						Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
				Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
3	PAUD Holistik Integratif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
4	Literasi Digital	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
						Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5	Rumah Bahasa	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat		Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
6	NTB Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
						Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
7	Ayo Bercita - Cita	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
					Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
4	(Misi IV) NTB ASRI DAN LESTARI					
PRIORITAS DAERAH 6						
1	PENGLOLAAN LINGKUNGAN BERSIH DAN BERKELANJUTAN					
	1 NTB Hijau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	2 NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
			Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-
			Biro Administrasi Pimpinan	-	-	-
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3	Taman Asri/Indah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
4	Tata Ruang Berkelanjutan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
						Sistem Informasi Penataan Ruang
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Fasilitasi Penataan Wilayah

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
5	(Misi V) NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI					
PRIORITAS DAERAH 7						
1	PERTANIAN/AGRIBISNIS DAN INVESTASI PROGRESIF					
	1 Pertanian Lestari/Modern	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan			
	2 BUMDES Maju/Mahadesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Biro Administrasi Pemerintahan			

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
3	Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
			Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
						1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
4	Kampung Unggas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
5	Budidaya Lobster	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
6	Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)	Dinas Ketahanan Pangan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
7	Mall Investasi dan Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
						Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
				Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
					Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
						Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
					Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
8	Ramah Investasi/Online Services	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Biro Administrasi Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
						Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
			Badan Penghubung Daerah			
9	Revitalisasi BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
					Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
PRIORITAS DAERAH 8						
11	PARIWISATA ANDALAN					
1	KEK Mandalika	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, an RKPD) Bidang Perekonomian
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

RKPd PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
2	Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3	Wisata Halal dan Sehat	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengembangan Rumah Sakit
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
						Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	Penataan 99 Desa Wisata	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
						Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
						Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
						Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
						Perencanaan Pengelolaan TAHURA

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
					Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
						Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
						Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
6	Kawasan Samota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
PRIORITAS DAERAH 9						
1II	INDUSTRIALISASI UNGGUL					
1	Industri Peralatan dan Permesinan	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
2	Industri Peternakan/ Pakan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Pertanian dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3	Industri Motor Listrik	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4	Industri Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
5	Industri Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
						Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
					Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
7	Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
8	Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
9	Rumah Kemas	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
10	Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
11	Science Technology and Industrial Park (STIPark)	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
12	Koperasi Berprestasi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
						Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
13	UMKM Bersaing	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
14	Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall	Dinas Perdagangan		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
			Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
			Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6	(Misi VI) NTB AMAN DAN BERKAH					
PRIORITAS DAERAH 10						
1	MERAIH MASYARAKAT MADANI (BAHAGIA)					
	1	Kampung Madani dan Sehat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
	2	Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)	Biro Administrasi Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
	3	Bale Mediasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
						Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
			Biro Hukum	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
4	Desa Bersinar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
			Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
5	Kampung Digital	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
6	Kota Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

NO	MISI/PROGRAM STRATEGIS/PROGRAM UNGGULAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		UTAMA	PENDUKUNG			
7	Ramah Difabel	Dinas Sosial		Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
			Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8	Revitalisasi Islamic Center	Dinas Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
			Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
9	Sekolah Perjumpaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Sumber: RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, diolah

Tabel 4. 3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2022

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara Barat	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0	4,5 – 5,3	3,5 – 4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 – 6,2	3,77 - 3,08	3,19
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	13,96	11,98
Rasio Gini (Indeks)	0,376 – 0,378	-	0,329
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 – 73,48	-	69,61

Sumber : Rancangan RKP 2022 dan RPJMD 2019-2023

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Perumusan program prioritas tahun 2022 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2022 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 4 Keselarasan Tema, Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Daerah (PD) Tahun 2022

Tema Nasional	Tema Daerah
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"
Prioritas Nasional (PN)	Prioritas Daerah (PD)
PN 1	PD 6
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir agribisnis dalam mendukung investasi
	PD 7
	Optimalisasi pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19
	PD 8
	Industrialisasi produk unggulan daerah
PN 2	PD 2
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 3	PD 3
Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pendidikan
	PD 4
	Meningkatkan kualitas kesehatan
PN 4	PD 3
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan
PN 5	PD 2
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar	Memperkuat infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar
PN 6	PD 1
Membangun Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
	PD 5
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan
PN 7	PD 9
Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik
	PD 10
	Penguatan stabilitas ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di setiap Provinsi, demikian halnya dengan keberhasilan pembangunan di Provinsi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan provinsi maka perlu dukungan dari Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran untuk menyelaraskan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota dengan prioritas pembangunan Nasional dan program prioritas pembangunan pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022 yang disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota terdiri atas arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dan arah kebijakan kewilayahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD Provinsi NTB Tahun 2022

5.1.1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
6. Sosial.

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota :

SPM Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

1. Pendidikan menengah;
2. Pendidikan khusus.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Provinsi :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan

petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sementara itu laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

5.1.2. Percepatan Penurunan dan Penanggulangan Kemiskinan

Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali di Provinsi NTB yang turut terkena imbasnya. Di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang mengalami masa-masa sulit dan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup, mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya, kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin.

Ketahanan pangan selama masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu krusial. Keterjangkauan akses pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan mesti dipastikan pemerintah, sebab tanpa ada jaminan akses pangan yang mudah, maka semakin banyak masyarakat yang akan mengalami kelaparan yang akan menyebabkan jumlah penduduk miskin yang selama ini ditekan oleh pemerintah bisa semakin bertambah, terlebih mereka yang masuk dalam kategori miskin maupun rentan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin dua kelompok itu untuk mendapatkan akses pangan dengan mudah dan menjamin ketersediaan pangan masyarakat dan berbagai program bantuan sosial.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, khususnya akibat dari kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah mewabahnya Covid-19

ini. Beberapa potret kemiskinan yang terjadi akibat dampak dari badai Covid-19 yang terus menerjang kehidupan kita semua seperti kematian akibat kelaparan, pencurian makanan atau bahkan PHK oleh perusahaan menunjukkan bahwa dampak Covid-19 benar-benar menghantam kondisi perekonomian masyarakat.

Pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sehingga target di Provinsi NTB juga akan dilakukan penyesuaian walaupun masih pada kisaran 5 persen. penyesuaian target pertumbuhan perekonomian akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 akan didorong pada pemulihan struktur perekonomian dan peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, serta pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Dari sisi pemerataan pembangunan di Provinsi NTB, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antar wilayah terutama untuk pembangunan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dari percepatan penurunan angka kemiskinan telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin sesuai dengan pengelompokan 4 (empat) Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang berujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis kewilayahan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, maka perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk itu, penganggaran penanggulangan kemiskinan perlu memanfaatkan potensi anggaran yang tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikolaborasikan dengan penganggaran dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan bahkan *stakeholders* lainnya.

Pola penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dengan pendekatan spasial. Adapun 13 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan hasil kesepakatan (MOU) Pemerintah provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu : (1) Pengembangan Bumdes, (2) Jamban Keluarga, (3) Rumah Layah Huni , (4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), (5) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (6) Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), (7) Pembangunan Sarana Air Bersih, (8) Pengembangan Desa Wisata, (9) Pengembangan Pertanian Konservasi, (10) Sambungan Listrik Murah dan Hemat, (11) Desa Berdaya, (12) Motorisasi nelayan atau budidaya udang panani, (13) Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan dan Revitalisasi POSYANDU.

Selain itu untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB, sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat dapat diharapkan berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengembangan pariwisata kerakyatan diperlukan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. Terdapat 99 desa wisata yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan dan berkelanjutan yang lebih optimal.

5.1.3. Penanganan dan Pemulihan Dampak COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengontraksi kinerja pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dampaknya sudah terasa pada berbagai sektor. Kinerja pada sektor-sektor tersebut mulai menurun pada akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2020. Namun demikian, dibalik menurunnya kinerja pada sektor-sektor tersebut masih ada sektor-sektor lain yang tumbuh seperti pertanian dan IKM yang besar peranannya dalam upaya pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Nusa Tenggara Barat terus digalakan oleh Pemerintah melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi “*new normal*” atau adaptasi kebiasaan baru (AKB).

Pada tingkat nasional diharapkan untuk meningkatkan permintaan dalam negeri baik sektor konsumsi maupun sektor investasi dengan harapan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2022, terutama setelah vaksinasi

yang dilakukan pada tahun 2021 ini, dimana dengan mendapatkan *herd immunity* di akhir tahun ini, maka diharapkan akan pulih kembali kepercayaan untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk untuk melakukan investasi maupun belanja. Demikian halnya di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dengan adanya vaksinasi diharapkan kegiatan perekonomian menjadi hidup kembali namun tetap dengan disiplin memberlakukan protokol kesehatan, menjalankan Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaringan Pengaman Sosial dan pemberian stimulus bagi masyarakat dan usaha kecil dan menengah.

Kebijakan penanganan Covid – 19 adalah meningkatkan kapasitas dalam *testing, tracing dan treatment* untuk mendeteksi kasus baru, mencegah penularan dan memberikan penanganan medis terbaik bagi pasien. Oleh karena itu dengan semangat dan optimisme, Tahun 2021 akan menjadi titik balik penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi apabila seluruh kebijakan pemerintah dalam penanganannya dipatuhi seluruh masyarakat, dengan demikian Tahun 2022 akan menjadi momen untuk pemulihan dan penguatan struktur perekonomian yang berfokus pada industri manufaktur, pariwisata dan investasi sebagai pengungkit pertumbuhan serta reformasi sosial yang mencakup pelayanan dasar, infrastruktur, sistem kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana.

5.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2022 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Perencanaan dengan pendekatan wilayah diperlukan sebagai strategi pengembangan ruang yang mengatur hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia agar kinerja ruang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan menggunakan pendekatan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah.

Arah kebijakan kewilayahan pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi NTB adalah berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai berikut:

1. Pulau Lombok Sebagai Pulau Kota Berkelanjutan dan Tangguh Berbasis Sistem Satu Pulau (*Eco City & Resilient Island*)
Penataan dan pemulihan satu pulau melalui pengaturan secara selektif bagi peruntukan terbangun dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung.

2. Pulau Sumbawa sebagai Zona Pengembangan Potensi-potensi Kawasan Berbasis *Green Economy (Sustainable Zone)*
Pemanfaatan SDA dan keanekaragaman hayati secara lestari untuk memberikan kontribusi di bidang ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat secara merata

1.2.1. Pengembangan Wilayah

1.2.1.1. Struktur Ruang

Fungsi Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2020-2040 adalah sebagai kawasan unggulan agrobisnis, pariwisata dan Industri, yang diwujudkan melalui:

1. Revitalisasi sektor-sektor unggulan, meliputi pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri, dan pertambangan;
2. Akselerasi kawasan unggulan, pada kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan pariwisata dan budaya;
3. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
4. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

Struktur ruang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2040 sebagai berikut:

A. RENCANA SISTEM PUSAT PERKOTAAN

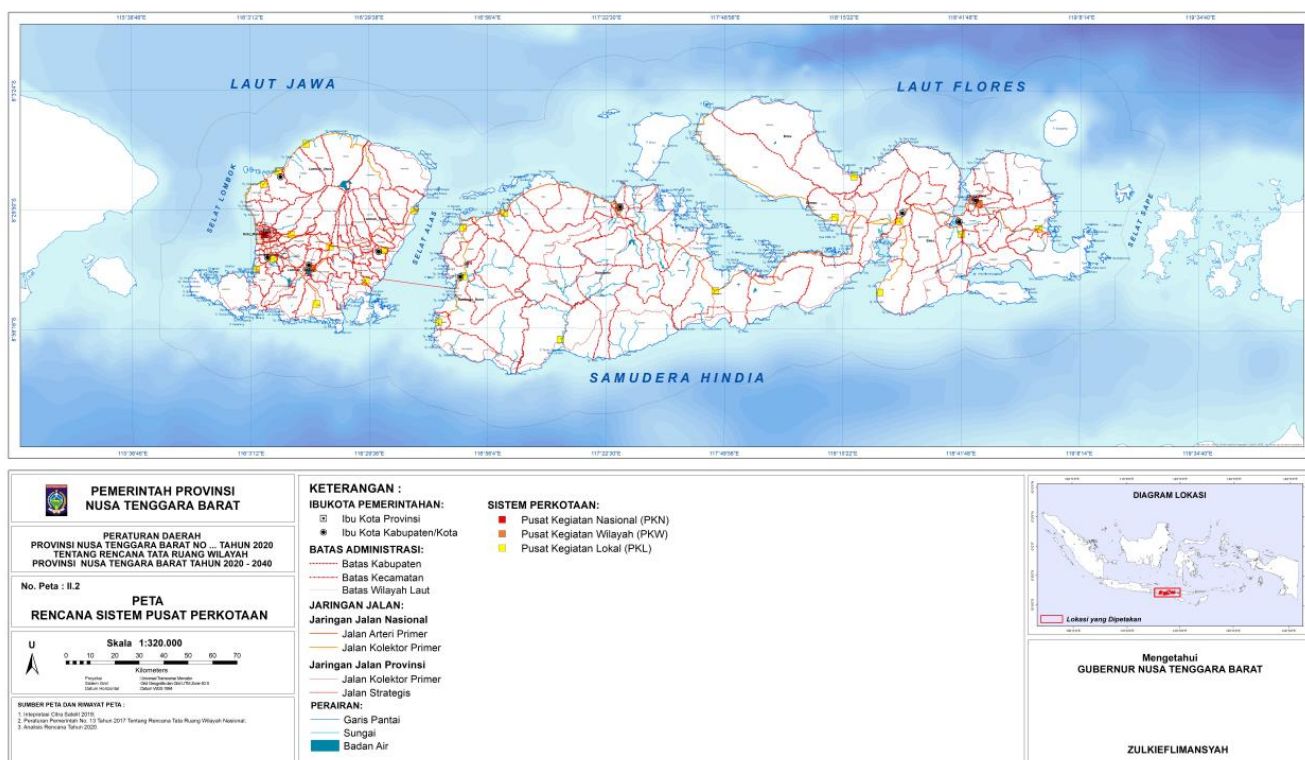
Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan: *pertama*, Wilayah Pengembangan Pulau Lombok mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Pulau Lombok dengan pusat pengembangan di Kota Mataram sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Praya, *kedua* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat mencakup Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan pusat pengembangan di Kota Sumbawa Besar sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), *ketiga* Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Tabel 5.1 Keselarasan Rencana Sistem Pusat Perkotaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

PUSAT KEGIATAN	SKALA PELAYANAN	LOKASI	SEKTOR UTAMA
PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Internasional - Nasional - Beberapa Provinsi 	Perkotaan Mataram Raya, meliputi <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Mataram b. Sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Narmada) 	Perdagangan dan Jasa, Industri, Pendidikan, Pariwisata
PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi - Beberapa Kabupaten/ Kota 	a. Perkotaan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	Industri, Pariwisata
		b. Perkotaan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa	Agribisnis, Pariwisata, Pertambangan
		c. Raba, Kota Bima	Perdagangan dan Jasa, Pendidikan
PKL	<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten/ Kota - Beberapa Kecamatan 	a. Perkotaan Gerung	Perdagangan dan Jasa
		b. Perkotaan Lembar	Perdagangan dan Jasa, Industri, Perikanan, Kelautan
		c. Perkotaan Narmada	Pertanian, Pariwisata
		d. Perkotaan Tanjung	Pariwisata, Perkebunan, Agroindustri
		e. Perkotaan Pemenang	Pariwisata, Perdagangan dan Jasa
		f. Perkotaan Kayangan	Pariwisata, Perdagangan dan Jasa, Industri
		g. Perkotaan Kopang	Perdagangan dan Jasa
		h. Perkotaan Sengkol	Perdagangan dan Jasa, Pariwisata
		i. Perkotaan Selong	Pertanian, Perdagangan dan jasa, Industri
		j. Perkotaan Keruak	Pertanian, Perdagangan dan jasa, Industri
		k. Perkotaan Labuhan Lombok	Perdagangan dan jasa, Industri, Pariwisata
		l. Perkotaan Taliwang	Perdagangan dan Jasa
		m. Perkotaan Poto Tano	Perdagangan dan Jasa, Industri, Perikanan dan Kelautan, Agorindustri
		n. Perkotaan Maluk	Pariwisata, Pertambangan, Industri

PUSAT KEGIATAN	SKALA PELAYANAN	LOKASI	SEKTOR UTAMA
		o. Perkotaan Alas	Perdagangan dan Jasa, Perikanan dan Kelautan, Agorindustri
		p. Perkotaan Lunyuk	Perdagangan dan Jasa, Perikanan dan Kelautan, Agorindustri
		q. Perkotaan Plampang	Perdagangan dan Jasa, Perikanan dan Kelautan, Industri, Agorindustri
		r. Perkotaan Dompu	Pertanian, Industri, Perdagangan dan jasa
		s. Perkotaan Kempo	Industri, Perdagangan dan jasa, Pariwisata
		t. Perkotaan Hu'u	Perikanan dan kelautan, Pariwisata, Industri, Pertambangan dan Energi
		u. Perkotaan Woha	Pertanian, Peternakan, Perikanan, Wisata Bahari
		v. Perkotaan Kore	Industri, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan dan jasa, Pariwisata
		w. Perkotaan Sape	Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata

Sumber: Revisi RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040



Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

B. RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat yakni Jaringan Jalan dan Jaringan ASDP, sistem jaringan transportasi laut yakni Pelabuhan dan sistem jaringan transportasi udara yakni Bandar Udara Umum yang terdiri dari:

1. **Jaringan Jalan:** jaringan jalan yang dikembangkan jalan arteri primer, jalan kolektor, jalan strategis, terminal penumpang dan jembatan timbang
2. **Jaringan ASDP:** Untuk pengembangan jaringan ASDP Lintas penyeberangan antarprovinsi diarahkan pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas I dan/atau Pelabuhan Penyeberangan Kelas II ke seluruh pelabuhan penyeberangan lainnya di Indonesia, yakni:
 - a. Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - d. Pelabuhan Sape di Kabupaten Bima.

Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi diarahkan pada Pelabuhan Penyeberangan Kelas II dan/atau Pelabuhan Penyeberangan Kelas III. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, yakni:

- a. Pelabuhan Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
- b. Pelabuhan Tawun di Kabupaten Lombok Barat;
- c. Pelabuhan Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
- d. Pelabuhan Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur;
- e. Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
- f. Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa;
- g. Pelabuhan Empang di Kabupaten Sumbawa;
- h. Pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
- i. Pelabuhan Cempi di Kabupaten Dompu;
- j. Pelabuhan Bima di Kota Bima;
- k. Pelabuhan Labuan Kenanga di Kabupaten Bima; dan
- l. Pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima.

Sementara Pelabuhan penyeberangan kelas III terdiri dari:

- a. Pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa; dan
- b. Pelabuhan Lua Air di Kabupaten Sumbawa.

3. Pelabuhan Laut

Pelabuhan Laut yang dikembangkan terdiri atas Pelabuhan Pengumpul yang dikembangkan Pelabuhan Lembar dilengkapi dengan Terminal Umum Gilimas di Kabupaten Lombok Barat; Pelabuhan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur; Pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa

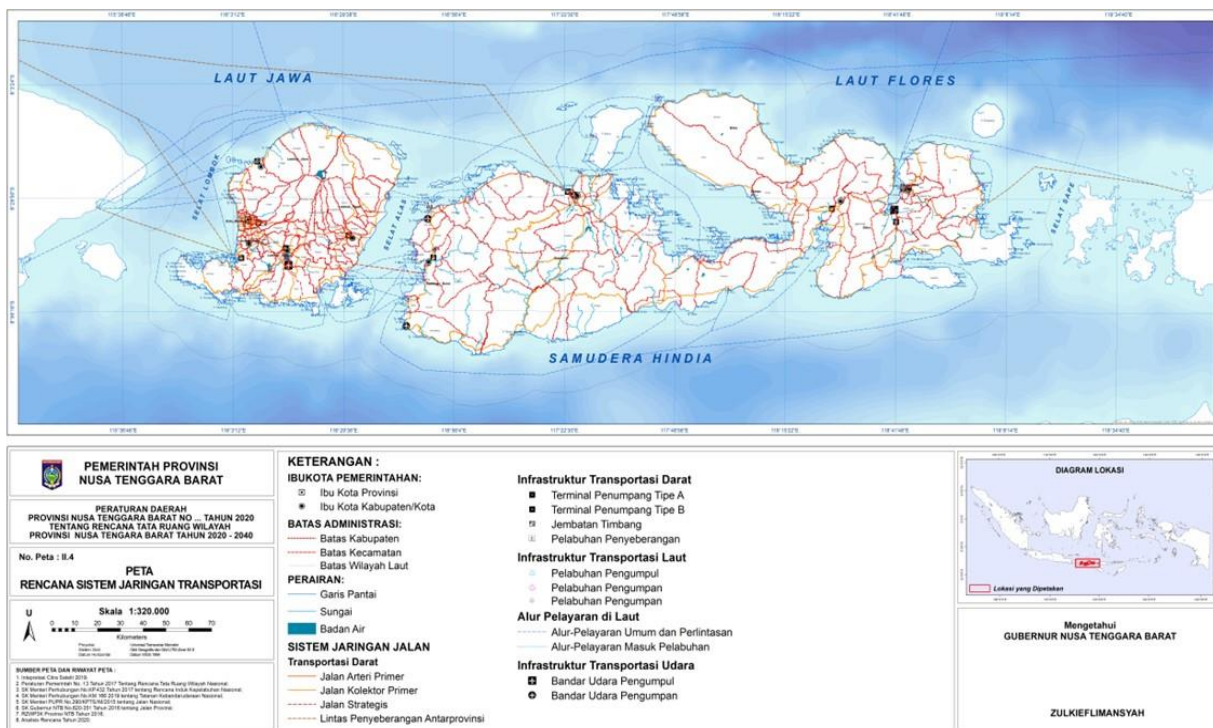
Barat; Pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa; dan Pelabuhan Bima di Kota Bima.

Selain itu juga terdapat Pelabuhan Pengumpulan diantaranya Pelabuhan Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat; Pelabuhan Khayangan di Kabupaten Lombok Utara; Pelabuhan Kartasari di Kabupaten Sumbawa Barat; Pelabuhan Akik Bari di Kabupaten Sumbawa; Pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa; Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu; Pelabuhan Oituiwera di Kabupaten Bima.

4. Bandar Udara Umum

Bandar udara sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Bandar udara pengumpul terdiri dari Bandar Udara Lombok Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah; dan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima; dan
- b. Bandar udara pengumpulan yang terdiri dari Bandar Udara Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, Bandar Udara Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat dan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa.



Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

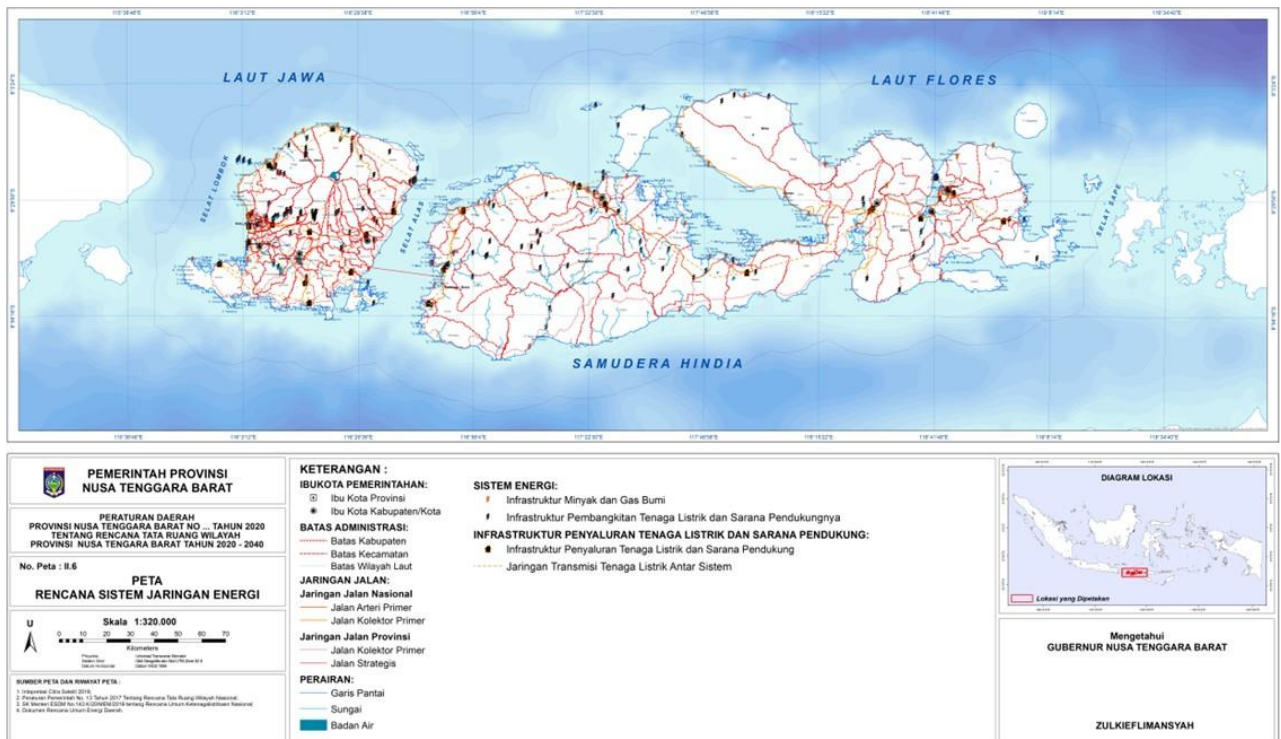
C. SISTEM JARINGAN ENERGI

- 1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a. Terminal bahan bakar minyak dan/atau gas terdiri atas terminal bahan bakar minyak dan/atau gas Ampenan di Kota Mataram; terminal bahan

- bakar minyak dan/atau gas Lembar di Kabupaten Lombok Barat; terminal bahan bakar minyak dan/atau gas Sekotong di Kabupaten Lombok Barat; terminal bahan bakar minyak dan/atau gas Kayangan di Kabupaten Lombok Utara; terminal bahan bakar minyak dan/atau gas Badas di Kabupaten Sumbawa; terminal bahan bakar minyak dan/atau gas Plampang di Kabupaten Sumbawa; dan terminal bahan bakar minyak dan gas Rasanae Barat di Kota Bima
- b. Pengolahan migas (kilang) dan/atau wilayah penunjang migas diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, sementara wilayah penunjang migas diarahkan di Kabupaten Bima.
 - c. Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima, dan seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.
2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik yang berasal dari sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya, meliputi: PLTP dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; PLTA dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa; PLTMH dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain Kota Bima; PLTM dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota selain Kota Bima; PLTS dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, termasuk desa-desa terpencil dan pulau-pulau kecil di seluruh Kabupaten/Kota berdasarkan potensi radiasi matahari; PLTGL dan PLTAL dikembangkan di Selat Lombok, Selat Alas, dan seluruh Kabupaten/ Kota berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; PLTB dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur; PLTBm dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu; PLTBg dan PLTSa dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya; PLTD dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; PLTU dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima; PLTG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; PLTMGU dikembangkan di Kota Mataram; dan PLTMG dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup:

- pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi: SUTT dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; SKTT dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa; Gardu Induk (GI) dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; Jaringan kabel laut diarahkan di seluruh Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten/Kota lainnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya.
- Jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi: jaringan distribusi pada pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan serta kawasan-kawasan tertentu di seluruh Kabupaten/ Kota dan jaringan distribusi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



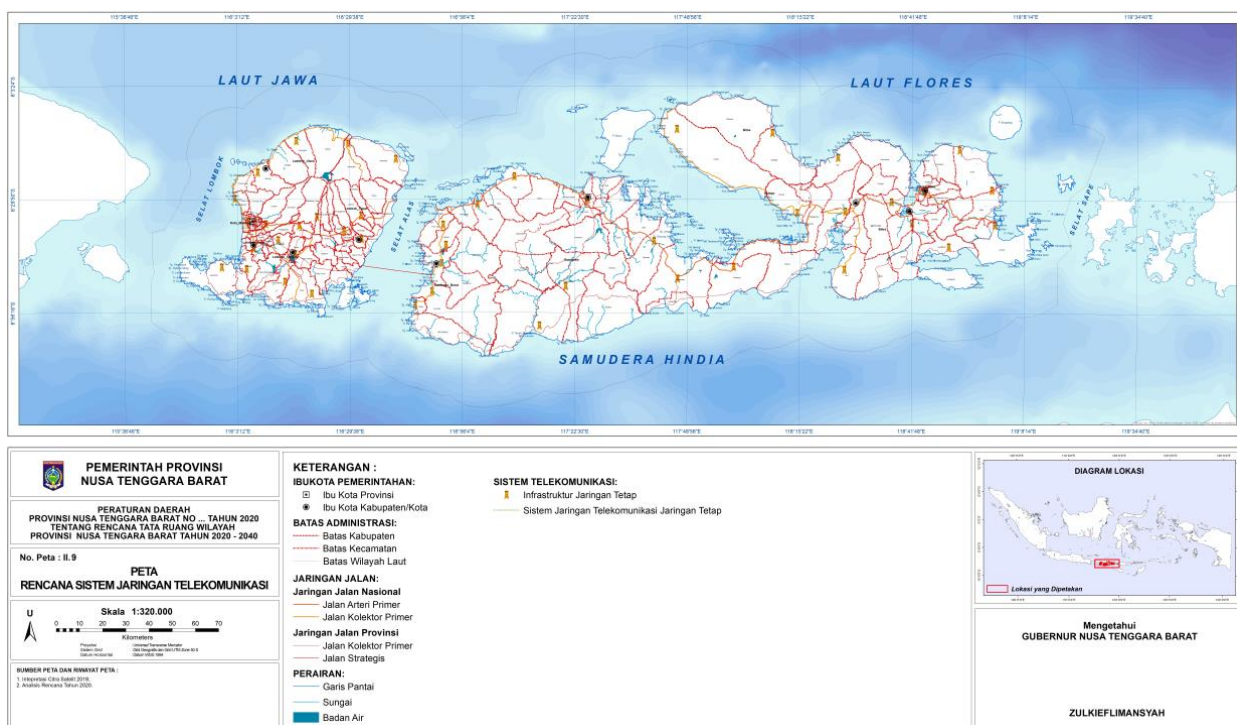
Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

D. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

1. Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a terdiri dari: STO diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota; jaringan serat optik diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota; dan kabel laut antarsistem Provinsi dengan Provinsi Bali diarahkan Kabupaten Lombok Barat,

antarsistem Provinsi dengan Provinsi Sulawesi Selatan, dan antarsistem Provinsi dengan Provinsi NTT di Kota Bima; jaringan tetap lainnya diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota hingga ke Pulau-Pulau Kecil.

2. Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat ayat (1) huruf b terdiri dari: jaringan mikro digital terpusat di Kota Mataram dengan distribusi ke masing-masing Ibukota Kabupaten/Kota; dan jaringan bergerak lainnya diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota hingga ke Pulau-Pulau Kecil Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini



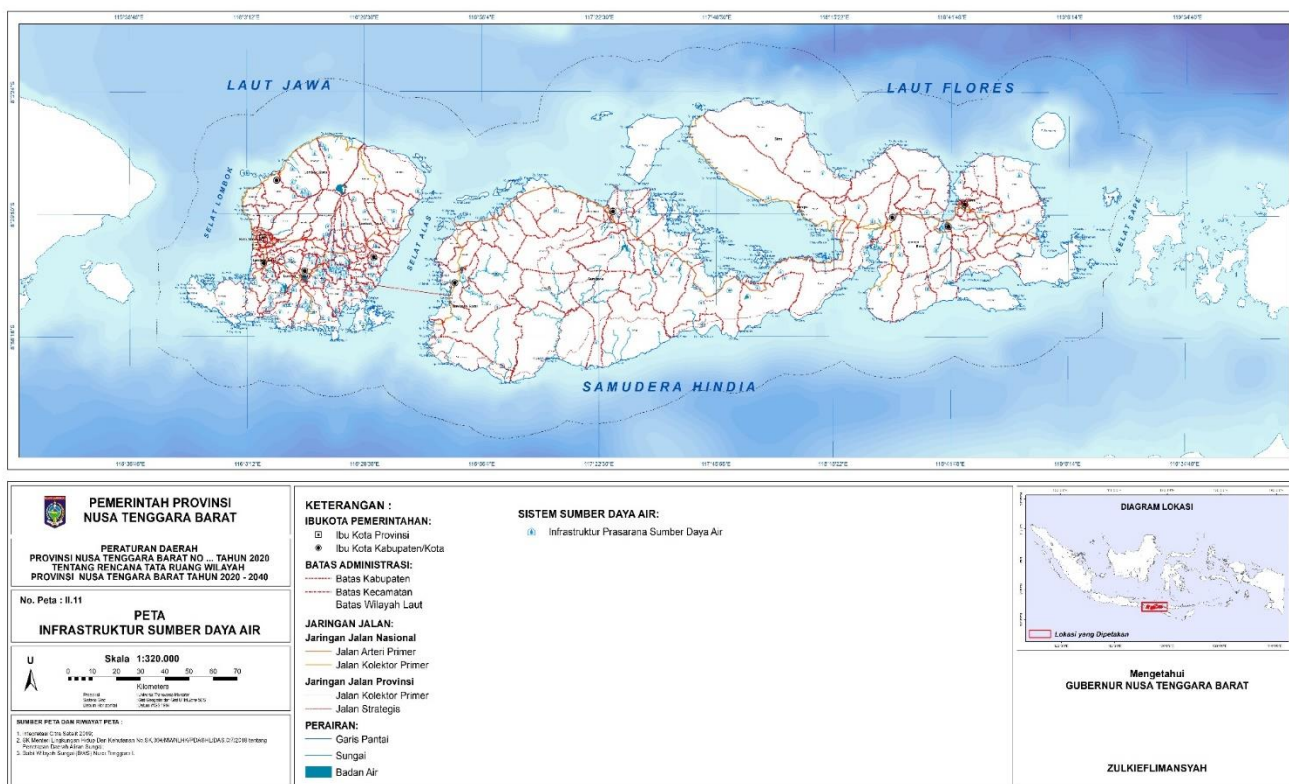
Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

E. SISTEM JARINGAN SUMBERDAYA AIR

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota, meliputi sumber air lintas Kabupaten/Kota yakni Air Permukaan dan Air Tanah, sedangkan prasarana sumber daya air lintas Kabupaten/Kota terdiri atas Bendungan, Embung, Sistem Jaringan Irigasi dan Sistem Pengendalian Banjir

1. Air Permukaan, meliputi :
 - a. WS Strategi Nasional di Pulau Lombok dan WS Strategis Nasional di Pulau Sumbawa yang di dalamnya terdapat DAS dan sumber air baku;
 - b. Danau berada di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu;

- c. Mata Air yang diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota
2. Air Tanah berada di CAT diarahkan menjadi kawasan resapan air yang merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air yang meliputi CAT Mataram - Selong; CAT Tanjung - Sambelia; CAT Sumbawa Besar; CAT Empang; CAT Pekat; CAT Sanggar - Kilo; CAT Dompus; CAT Bima; dan CAT Tawali - Sape.
3. Bendungan berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompus.
4. Embung sebagaimana diarahkan di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram
5. Sistem jaringan irigasi yang terdiri DI Nasional yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompus, dan Kabupaten Bima dengan luas lebih besar dari 3000 (tiga ribu) hektar. Selain itu juga terdapat DI Provinsi yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompus, Kabupaten Bima dengan luas antara 1000 (seribu) hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) hektar.
6. Sistem pengendalian banjir terdiri atas:
 - a. bangunan pengendali banjir diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota yang rawan bencana banjir;
 - b. bangunan pengendali sedimen diarahkan di seluruh Kabupaten/ Kota yang rawan banjir dan longsor; dan
 - c. bangunan pengamanan pantai diarahkan di seluruh wilayah pesisir Kabupaten/ Kota yang rawan bencana tsunami, gelombang pasang, abrasi, dan banjir bandang.

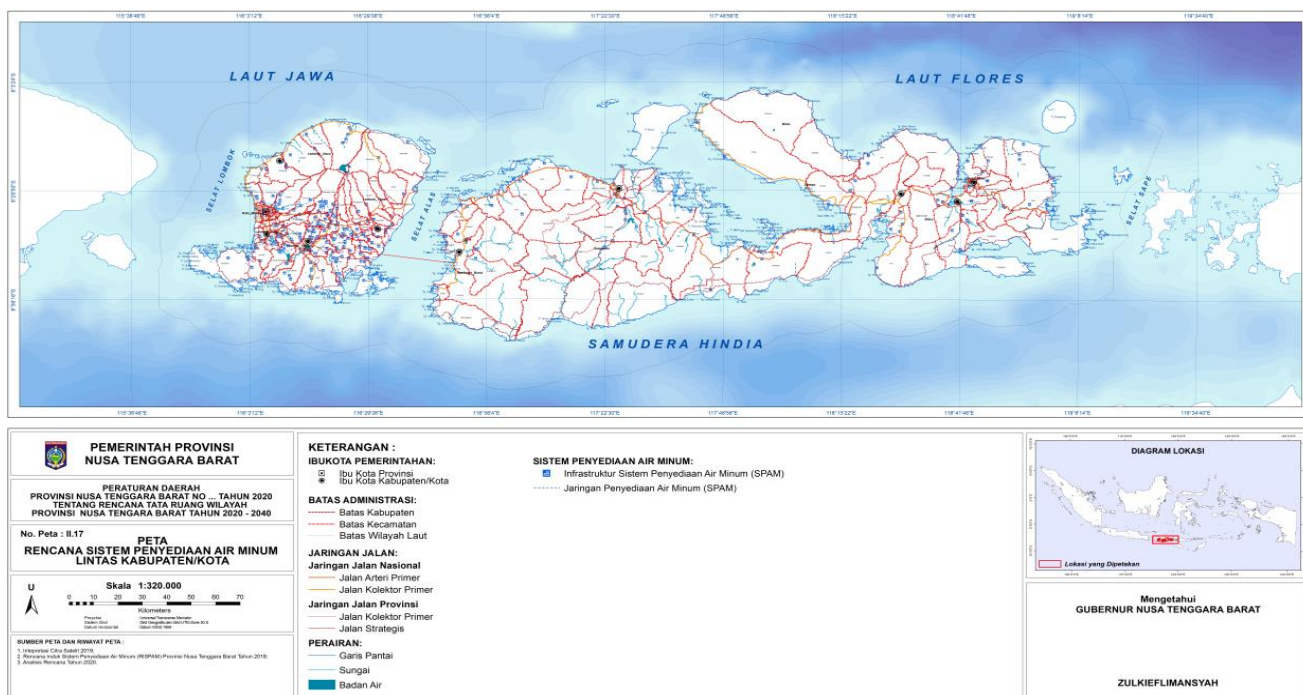


Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

F. SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

1. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota terdiri dari SPAM Regional Pulau Lombok, SPAM Regional Sumbawa, dan SPAM Regional Bima yang meliputi jaringan perpipaan regional dan bukan jaringan perpipaan. SPAM lintas Kabupaten/Kota juga dapat dikembangkan teknologi instalasi reverse osmosis, meliputi Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) lintas Kabupaten/Kota SPAL meliputi sistem pembuangan air limbah termasuk sistem pengolahan berupa IPAL regional dan/atau sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal berupa IPLT. SPAL diarahkan dengan sistem klaster Pulau Lombok, Pulau Sumbawa Bagian Barat, Pulau Sumbawa Bagian Tengah, dan Pulau Sumbawa Bagian Timur.
3. Sistem pengelolaan limbah B3 lintas Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Instalasi Pengolahan Limbah B3 Buwun Mas di Kabupaten Lombok Barat;

- b. Instalasi Pengolahan Limbah B3 Raberas di Kabupaten Sumbawa;
 - c. Instalasi Pengolahan Limbah B3 Waduwni di Kabupaten Bima.
4. Sistem jaringan persampahan wilayah lintas Kabupaten/Kota meliputi TPST Regional yang berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu, sementara TPA Regional diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima.



Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

1.2.1.2. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi meliputi rencana pengelolaan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi.

A. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung, meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung yang berada di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari:
 - kawasan sempadan pantai diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota pada wilayah pesisir pulau utama dan pulau-pulau kecilnya;
 - kawasan sempadan sungai yang diarahkan pada WS baik di dalam perkotaan maupun di luar perkotaan di Kabupaten/Kota;

- kawasan sekitar danau atau waduk diarahkan pada 50 meter dari tepi muka tertinggi yang pernah terjadi (batas badan danau, bendungan, dan embung) di seluruh Kabupaten/Kota
- c. Kawasan konservasi merupakan kawasan lindung Nasional, terdiri atas:
 - Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Cagar Alam di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima;
 - Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; Taman Hutan Raya (TAHURA) di Kabupaten Lombok Barat; TWA di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan TWAL di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;
 - Taman Buru berada di Kabupaten Sumbawa;
 - Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi taman pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan TPK di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
 - Kawasan Konservasi Perairan meliputi SAP di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu; serta TWP di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
- d. kawasan ekosistem mangrove berada pada pesisir pantai di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.

B. Kawasan Peruntukan Budidaya

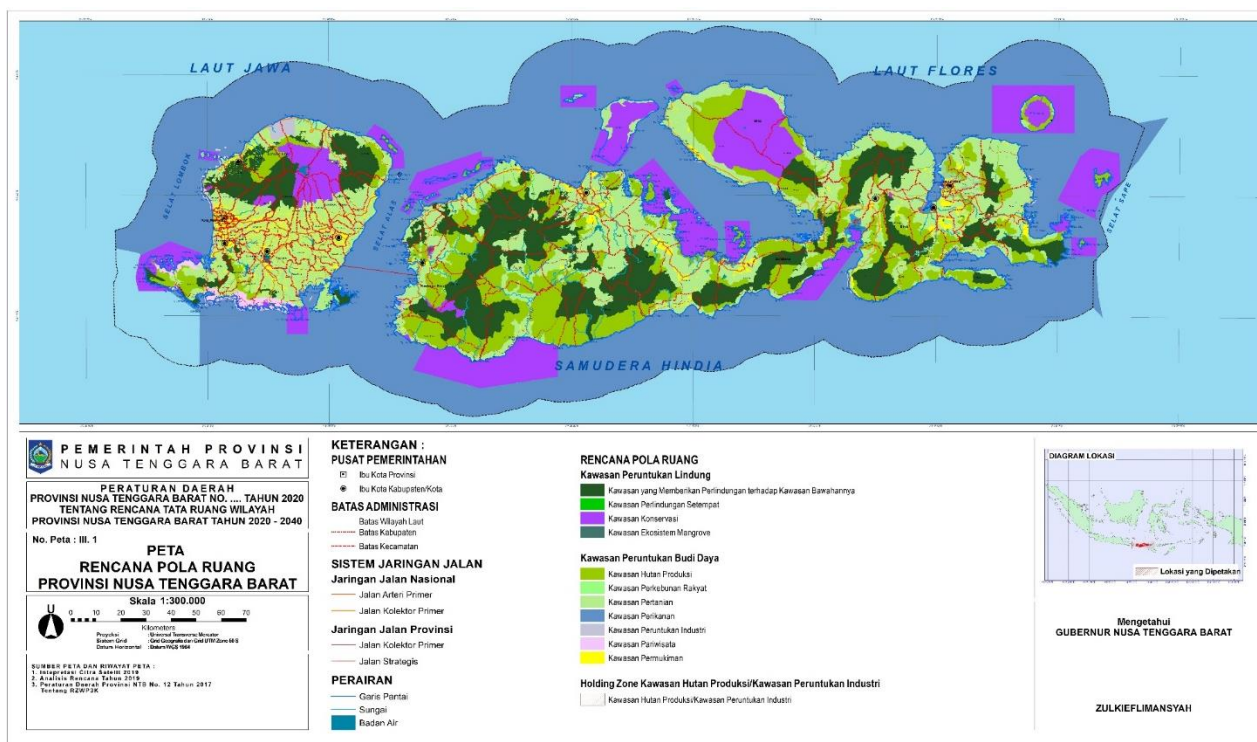
Kawasan budidaya Nasional merupakan Kawasan Andalan Nasional di dalam wilayah Provinsi NTB, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi terdiri atas kawasan HP berada di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram dan kawasan HPT berada di Kabupaten/Kota selain Kota Mataram.
- b. kawasan perkebunan rakyat diarahkan di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Bima;
- c. kawasan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan dan hortikultura, dan/atau peternakan yang diarahkan di Kabupaten/Kota;
- d. kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada perairan wilayah laut; dan kawasan perikanan budi daya meliputi kawasan budi daya air laut

dan kawasan budi daya air payau yang diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang berada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Dompu;

- e. kawasan peruntukan industri diarahkan menjadi industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu;
- f. kawasan pariwisata terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima, dan wilayah laut di Kabupaten/Kota yang memiliki destinasi pariwisata daerah yang memiliki potensi wisata alam, budaya dan/atau buatan di wilayah darat dan wilayah laut;
- g. kawasan permukiman diarahkan di PKN, PKW, PKL dan kawasan yang berpotensi dikembangkan permukiman di Kabupaten/ Kota.



Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

1.2.2. Pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh jalur "Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit

dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah “Segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Dengan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan kawasan strategis yang ada di Nusa Tenggara Barat, antara lain:

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika

Kawasan ini merupakan satu diantara 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional. Ground Breaking telah dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Berlokasi di Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lahan seluas 1,250 ha. Kawasan ini merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7.5 km menghadap ke Samudera Hindia. Dalam kawasan ini juga sedang dibangun lintasan balap yang rencananya akan dipergunakan untuk gelaran internasional MotoGP pada tahun 2021.

Beberapa fasilitas yang telah dibangun hingga saat ini di antaranya seperti masjid, Kuta Beach Park, dan 538 lot dan kios untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberi nama kawasan Bazaar Mandalika. Sementara pembangunan fisik untuk infrastruktur besar seperti akses jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika hingga rencana pembuatan sirkuit jalanan (*street circuit*) dalam proses pelaksanaan.

2. Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA)

SAMOTA berada dalam Kawasan Andalan Nasional Sumbawa dan Kawasan Andalan Nasional Bima, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Memiliki sumber daya alam potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan (Taman Buru, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Gunung Tambora, Kelautan dan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata). Teluk Saleh merupakan “Akuarium Terbesar di Dunia”, diapit Pulau Moyo dan Gunung Tambora, dengan 49 pulau kecil yang mengitarinya. Dengan luas 2.132 km², sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi maritim unggulan. Pulau Moyo tempat berlibur Putri Diana, Mick Jagger, Maria Sharapova hingga Ronaldo, menunjukkan kelas Moyo sebagai destinasi dunia, dengan luas 350 km², Moyo punya segalanya: pantai indah, alam menawan dan hutan perawan. Bentangan Gunung Tambora menyimpan keragaman hayati yang unik dan sangat cocok bagi pengembangan agro industri pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Proses percepatan pembangunan SAMOTA sebagai berikut:

- a. Inisiasi (Tahun 2017-2018), mencakup: Kerjasama Pemda Pembentukan Korporasi PT. SAMOTA RAYA (Komposisi Saham), Penjajakan Mitra Bisnis Utama, Inisiasi Koordinasi pembangunan Infrastruktur-Konektifitas (Luar

Kawasan), Memastikan lokasi utama dan pendukung investasi SAMOTA, dan Pembuatan Master Plan.

- b. Konsolidasi (Tahun 2019), mencakup: Penyusunan status kawasan, Promosi Investasi, Penyiapan SDM dan Lingkungan, dan Konsolidasi Mekanisme Perizinan.
- c. Aksi (Tahun 2020), mencakup: Penetapan status kawasan, Penyiapan Infrastruktur Dasar dalam Kawasan, dan Penyiapan Fasilitas dan Mekanisme Perizinan.

3. Global Hub Bandar Kayangan

Bandar Kayangan terletak di salah satu dari sepuluh lokasi lintasan strategis dunia (UNCTAD, 2009). Terletak di Jalur Laut II Kepulauan Nusantara, “Jalur Tol Laut” yang didedikasikan bagi dunia, sehingga kapal kapal dari Eropa, Afrika, Asia Tengah, Australia, Asia Tenggara dan Asia Timur Jauh bahkan dari negaranegara Pasifik dapat melalui jalur-jalur tersebut dengan aman. Berada di jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi “highway” bagi kapal kapal “extra large” dunia, rata-rata 40 kapal melewati selat Lombok per hari. Hasil kajian Bappenas 2009, Indonesia berpeluang mengembangkan global hub baru, untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal extra large dunia, dan Pulau Lombok merupakan lokasi paling potensial. Lombok Utara merupakan lokasi terbaik, karena memenuhi persyaratan pelabuhan laut dalam.

Progres pembangunan Bandar Kayangan hingga saat ini masih penguatan pada aspek regulasi diantaranya Bandar Kayangan sudah ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); sudah tersedia ijin lokasi dari Kementerian Agraria dan Tata ruang seluar 7.373 ha; serta telah ditetapkan sebagai prioritas pusat pertumbuhan baru berbasis investasi swasta sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2029-2024.

4. Kawasan Industri Sumbawa Barat (SMELTER dan Industri Turunannya)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengamanatkan bahwa, tahun 2021 perusahaan tambang harus tuntas melakukan konstruksi Smelter, dan tahun 2022 Smelter ini harus beroperasi aktif. Kehadiran Smelter akan berdampak luar biasa bagi NTB sebab, selain Smelter, di kawasan tersebut akan dibangun pula industri pendukung seperti industri pupuk, industri semen dan lainnya. Sehingga akan banyak putra-putri NTB yang diserap, dan secara ekonomis akan berdampak pula bagi masyarakat NTB secara umum.

Smelter akan dibangun di Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kapasitas: 2 juta konsentrat per tahun. Konstruksi ditargetkan Selesai akhir 2022. Produksi 500.000 ton per-tahun dengan Luas: 850 hektar. Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan lahan di Wilayah Benete, kecamatan Maluk sebagai lokasi pembangunan Smelter. Lahan tersebut termasuk kawasan pemukiman masyarakat, pelabuhan Benete dan lahan milik Pemerintah Daerah.

Adapun tahapan pembangunan Industri (SMELTER) PT. AMNT sebagai berikut:

- a. Tahun 2017-2019: Perencanaan Lokasi dan Perijinan (Ijin Pemanfaatan Ruang, FS, DED, AMDAL, Kontraktor EPC, dan lainnya).
- b. Tahun 2019-2022: Konstruksi/Investasi Pabrik Industri Pertambangan dan berbagai jenis Industri Turunannya.
- c. Tahun 2023: Operasional Industri Pertambangan (SMELTER) dan Industri Turunannya.

5. Kawasan Lambu Sape Komodo Sangiang (La SAKOSA)

La SAKOSA merupakan konsep integrasi yaitu Sape yang mewakili Sape, Lambu, Teluk Waworada. Kemudian Komodo yang mewakili Pulau Gilibanta, Pulau Kelapa (Lambu), Pulau Rinca, dan Pulau Komodo. Sementara Sangiang menggambarkan Wera, Ambalawi, Pulau Sangiang, dan Asakota (Kota Bima). Hubungan dari tiga wilayah besar (Kabupaten Bima, NTT, dan Kota Bima), terkoneksi pada segala aspek pembangunan, perdagangan, pariwisata, perikanan, pertanian, perhubungan, dan lain-lain.

Kalau SAMOTA merupakan konsep ruang Pulau Sumbawa bagian barat, maka LASAKOSA adalah konsep ruang Pulau Sumbawa bagian timur. Jaringan dan hubungan antara barat dan timur ini akan dibangun secara berimbang dan adil, sehingga wilayah tengah Pulau Sumbawa juga akan mendapat keuntungan dari lalu lintas konektivitas timur-barat tersebut.

Dalam skala nasional, Kawasan LASAKOSA merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Komodo. Sebagai wilayah yang menjadi *core* pertumbuhan dan kegiatan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Kawasan Sape-Sangiandan sekitarnya menyimpan potensi sangat besar. Sebagai salah satu simpul pergerakan utama laut, orientasi utama masyarakat dan keragaman potensi yang ada, kawasan ini diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan menyeimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB.

Strategi Pengembangan Kawasan LASAKOSA sebagai berikut:

- a. Pengembangan Pariwisata, mencakup:
 - 1) Pengembangan industri pariwisata.
 - 2) Pengembangan destinasi pariwisata.

- 3) Pengembangan pemasaran.
- 4) Pengembangan kelembagaan kepariwisataan.
- b. Pengembangan Konektivitas, mencakup:
 - 1) Pengembangan Bandara Salahuddin Bima Dengan Rute Baru Pengembangan Rute Bima-Labuhan Bajo.
 - 2) Pengembangan Rute Penyebrangan Pelabuhan Sape - Labuhan Bajo Dan Pengembangan Jalan Lingkar Utara Pulau Sumbawa.
 - 3) Pengembangan Rute Langsung Gilimas Lembar -Komodo Melalui Jalur Wisata Terkoneksi Dan Pengembangan Rute Sumbawa- Moyo-Tambora-Huu-Kilo-Sape Dalam Rangka Linkage Wisatawan.
- c. Pengembangan Komoditas, mencakup:
 - 1) Pengembangan perikanan tangkap.
 - 2) Pengembangan perikanan budidaya.
 - 3) Pengembangan komoditi agro (kopi, bawang, jagung, gula, tambang).
- d. Pengembangan manajemen, mencakup:
 - 1) Pengembangan kerjasama dgn NTT dan swasta.
 - 2) Pengembangan branding kawasan, investasi, dan SDM.
 - 3) Adopsi dalam dokumen perencanaan spasial dan non spasial.
 - 4) Pengembangan desa wisata (community based tourism).
 - 5) Penyiapan masterplan, DED dan FS kawasan.

Sampai saat ini, kawasan Lambu Sape Komodo Sangiang (La SAKOSA) telah disusun masterplan pengembangan kawasan tersebut.

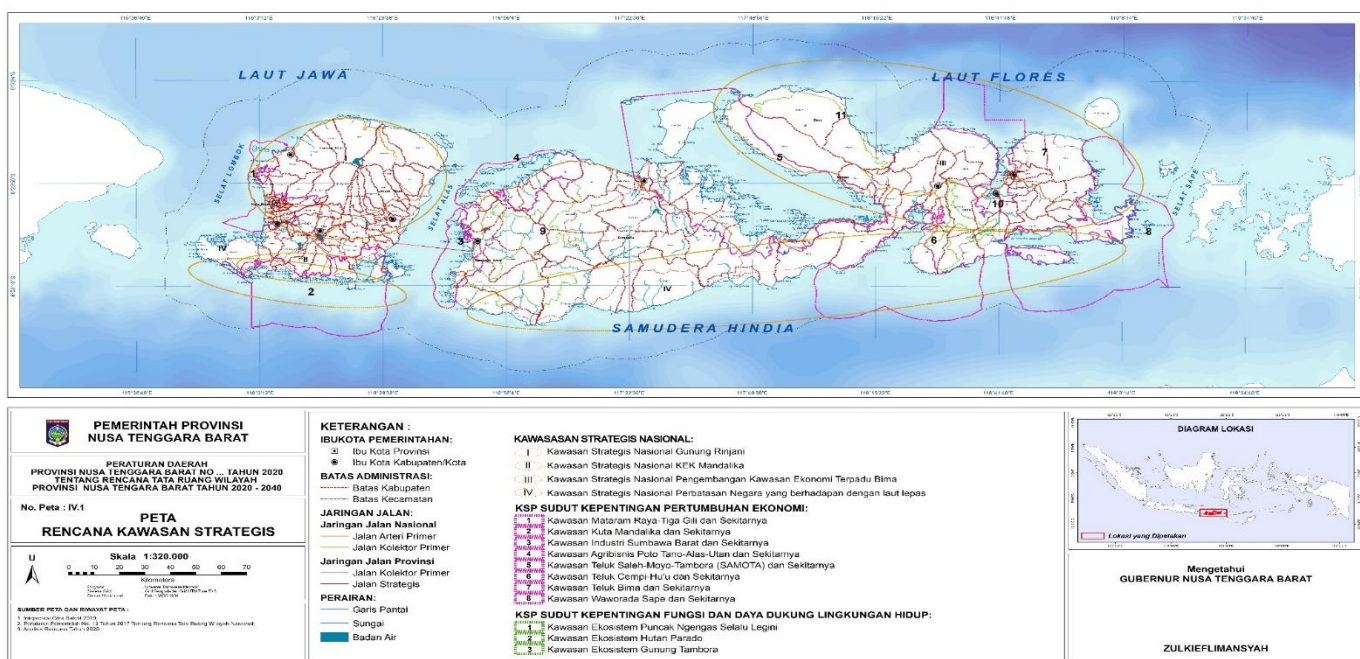
6. Kawasan Geopark Rinjani

Geopark Rinjani Lombok diinisiasi kedalam program Geopark sejak 2008, dalam perkembangannya diakui sebagai Geopark Nasional pada 7 Oktober 2013, dan pada tahun 2016 diusulkan menjadi Unesco Global Geopark (UGG). Tahun 2017 diharapkan akan dapat mendapat pengakuan sebagai bagian dari UGG. Potensi Geopark Rinjani Lombok dari yang sudah diidentifikasi terdiri dari 22 situs Geologi (Geo heritage), 8 Situs Biologi (Bio heritage), dan 17 situs budaya (Culture Heritage). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Dukungan pengembangan Geopark Rinjani Lombok juga telah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan kerjasama dan sinkronisasi program guna mendukung Geopark Rinjani sebagai Geopark Dunia. Salah satu pesona unggulan Geopark Rinjani adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut, Kaldera Samalas memiliki ukuran sekitar 6 km x 8,5 km dan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Samalas pada 1257.

Selain sebagai jaringan UGG, Geopark Rinjani juga merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sekaligus sebagai Kawasan

Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Dengan pembangunan KSPN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas serta dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya: Survey dan rakor dengan 3 koordinator APGN, Pengembangan Desa Geowisata, Internship, Penguatan Pokja, Pelatihan, Promosi dan publikasi Geopark, Gerakan pelajar menanam pohon, dan Penguatan data pusat informasi geologi.



Sumber : Revisi RTRW Prov NTB 2020-2040

Sementara itu isu strategis pengembangan wilayah provinsi NTB sesuai Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI NTB TH 2019-2023

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1 Penetapan Mataram Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p> <p>2 Pengembangan Global Hub Kayangan di Lombok Utara</p> <p>3 Pengembangan Kawasan Selatan Pulau Lombok (KEK Mandalka, Sekotong, dan Jerowaru)</p> <p>4 Konservasi dan pengelolaan Global Geopark Rinjani Pulau Lombok</p> | <p>5 Pembangunan Kawasan Industri Sumbawa Barat (Pertambangan dan Industri Turunannya) di Sumbawa Barat.</p> <p>6 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)</p> <p>7 Pengembangan wilayah bagian selatan Pulau Sumbawa sebagai bagian dari pemerataan</p> <p>8, 9, 10 Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Santong sebagai bagian dari Kawasan Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA)</p> | <p>11 Pengembangan Kawasan Bima sebagai Kawasan Ekonomi Terpadu</p> <p>12 Pengembangan kawasan pariwisata dengan atraksi bertaraf internasional dan pengembangan potensi energi dan mineral</p> <p>13 Pengembangan wilayah timur NTB yang terintegrasi dengan Provinsi berbatasan untuk mendukung ekonomi wilayah</p> <p>14 Pembangunan jembatan penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa</p> |
|---|--|--|



Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2022 merupakan turunan dari perencanaan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2022 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta mensinkronkan dari hasil pembahasan substansi substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan seperti Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, daerah diminta untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPd Provinsi NTB Tahun 2022 disusun melalui sistem SIPD (<https://ntbprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) pada tahapan proses perencanaan. Rancangan awal Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan disusun melalui SIPD dirangkum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini. Sebagai gambaran program kegiatan prioritas/program unggulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1 Program Strategis dan Program Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

NO	PROGRAM STRATEGIS /PROGRAM UNGGULAN	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN 2022	
			UTAMA	PENDUKUNG					Kinerja	Rp.
1	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi Destana Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi S/MAB	10 Desa, 10 Sekolah	399.787.600,00
							Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Jitupasna	30 orang	148.804.200,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

							Penyusunan Rencana Kontijensi	umlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun	2 Dokumen	83.964.800,00
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergera k di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pember	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Adat yang telah mengeluarkan awiqawiq	30 Lembaga Adat	140.000.000,00

						dayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat				
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang telah mengeluarkan produk hukum terkait pelaksanaan posyandu, Jumlah Desa yang telah menginput data posyandu pada aplikasi SIP, Jumlah Pokja Posyandu	100 Desa, 240 Desa, 100 Desa, 3 Posyandu, 5 Program	699.999.940,00	

								yang telah melaksanakan tupoksinya dengan benar, Jumlah posyandu juara, Jumlah program OPD yang telah terintegrasi dengan Program Revitalisasi Posyandu		
2	Air Bersih/Air Minum untuk Semua	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan	9 Dokumen	428.493.700,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

						Kabupaten/Kota		n Air Minum		
							Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan SPAM	Terlaksananya Pembangunan Baru Jaringan Perpipaan SPAM	16 Lokasi	1.381.818.260,00
				Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dicetak (Jenis)	0 Jenis	-

						Tingkat Daerah Provinsi				
3	SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	2 Dokumen	21.980.000,00
							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data	46 OPD	734.200.000,00
							Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	23 OPD	187.500.000,00

							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	3 Aplikasi	1.320.000,00
4	Revitalisasi Posyandu	Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	40 Puskesmas	444.980.000,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi	10 Kabupaten/Kota	16.291.570.588,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

								Terstandar (kab/kota)		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah	11 Kelompok	1.250.000.000,00
							Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	10 Dokumen	649.660.000,00
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat yang telah mengeluarkan awiqawiq	30 Lembaga Adat	140.000.000,00

						<p>Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/kota</p>				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

				Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	3 Dokumen	37.585.700,00
5	PAUD Holistik Integratif	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik)	13 Ruang	1.946.340.000,00
				Dinas Pemberdayaan	Program Pemenuhan Hak	Pelembagaan PHA pada	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak			253.370.900,00

				Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anak (PHA)	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			577.868.200,00
6	NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Sampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	25%	2.213.918.000,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	10 Kabupaten/Kota	78.581.460,00
							Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	12 kali	821.817.300,00
							Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Penanganan	15 Kasus	100.000.000,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

							dan Peraturan Gubernur	Pelanggaran Perda/Per gub		
				Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman	814 Paket	164.452.606.270,00
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			
				Biro Admini	-	-	-			

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

				strasi Pimpin an						
				Dinas Pendi kan dan Kebuda yaan	Progra m Pengem bangan Kurikul um	Penetap an Kurikul um Muatan Lokal Pendi kan Meneng ah	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Penyusuna n Silabus Muatan Lokal SMK Terlaksana nya Workshop Penyusuna n Silabus Muatan Lokal SMK 100 orang	100 orang, 3 dokumen	182.766.0 00,00
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksana nya Kegiatan workshop Penyusuna n Kurikulum SMK 100 orang	3 dokumen	102.940.0 00,00
						Penetap an Kurikul	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan	-	-	-

						um Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Lokal Pendidikan Khusus			
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyara	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan Bantuan Mesin Pengolahan Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Mesin	13 Desa, 60 Orang	820.000.000,00

						kat Hukum Adat yang Masyara kat Pelakun ya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupat en/kota		dengan benar			
							Fasilitasi Pemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Guna	Desa Tepat	umlah Pengurus Posyantek /Aparat Desa dan Petani Tembakau yang bisa mendayag unakan Mesin	50 orang	71.998.60 0,00

								Rajang Tembakau		
				Dinas Pariwis ata	Progra m Peningk atan Daya Tarik Destinas i Pariwis ata	Pengelo l aan Destinas i Pariwis ata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tertatanya jumlah destinasi pariwisata yang berkemban g	11 SKPD	2.558.536 .000,00
7	Pertanian Lestari/Modern	Pertani an	Dinas Pertani an dan Perkebu nan		Progra m Penyedi aan dan Pengem bangan Prasara na Pertania n	Penataa n Prasara na Pertania n	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			7.730.090 .000,00
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			7.331.750 .000,00

							Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			32.430.800.000,00
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pengambilan sampel dan Pengujian Parameter Lingkungan	282 titik sampel	205.716.600,00
							Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji dan Penambahan Parameter Terakredit	5 paramter	599.705.652,00

								asi KAN Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Balai Laboratorium Lingkungan		
8	BUMDES Maju/Mahadesa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang telah mengeluarkan produk hukum terkait pelaksanaan posyandu Jumlah Desa yang telah menginput data posyandu	100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	699.999.940,00

						Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/	pada aplikasi SIP Jumlah Pokja Posyandu yang telah melaksanakan tupoksinya dengan benar Jumlah posyandu juara Jumlah program OPD yang telah terintegrasi dengan Program Revitalisasi Posyandu		
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan	13 Desa 60 Orang	820.000.000,00

							dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bantuan Mesin Pengolah Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Mesin dengan benar		
9	Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Berggerak di Bidang	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna), Lembaga	Jumlah Desa yang telah mengeluarkan produk hukum terkait pelaksanaan posyandu	100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	699.999.940,00

			dan Pencata tan Sipil		a Adat dan Masyara kat Hukum Adat	Pember dayaan Desa dan Lembag a Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pember dayaan Masyara kat Hukum Adat yang Masyara kat Pelakun ya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah	Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang telah menginput data posyandu pada aplikasi SIP Jumlah Pokja Posyandu yang telah melaksana kan tupoksinya dengan benar Jumlah posyandu juara Jumlah program OPD yang telah terintegras i dengan Program Revitalisasi Posyandu		
--	--	--	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--

						Kabupaten/				
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan Bantuan Mesin Pengolah Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan	13 Desa 60 Orang	820.000.000,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

								Mesin dengan benar		
				Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	5 dokumen	422.096.854,00
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi	4 dokumen	221.049.600,00
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah hasil monev	4 dokumen	371.197.600,00

							Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisa si	3 dokumen	935.034.7 00,00
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi	2 dokumen	480.907.9 00,00
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi	2 dokumen	132.878.5 00,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil monev	2 dokumen	869.722.600,00
				Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	-	-
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM TKSK kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	-	-

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

							1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola LK3 kewenanga n provinsi yang ditingkatka n kemampua n	-	-
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola dan bantuan lembaga kewenanga n provinsi yang ditingkatka n kemampua n	150 lembaga	1.656.650 .000,00
1 0	Penataan 99 Desa Wisata	Pariwi sata	Dinas Pariwis ata		Progra m Peningk atan Daya	Pengelol aan Daya Tarik	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah kunjungan wisata	1000 orang	121.000.0 00,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

					Tarik Destinasi Pariwisata	Wisata Provinsi				
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	-	-	-
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	-	-	-
							Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarpras yang terpelihara	1 Tahun	35.723.000,00

				Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergera k di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan Bantuan Mesin Pengolahan Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Mesin dengan benar	13 Desa 60 Orang	820.000.000,00
--	--	--	--	---	---	--	--	--	---------------------	----------------

						Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/				
1 1	Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Motor Listrik	Perindustrian	Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih	80 IKM	2.024.198.000,00
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan	200 IKM	6.339.375.500,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

1 2	Industri Peternakan / Pakan Ternak	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit ternak Sapi/Kerbau/ Kambing /Unggas yang diadakan	1226 eko r	13.668.47 1.500,00
							Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolahan pakan yang diadakan JUmlah Kelompok Pakan	10 Unit 25 Kelom pok	130.200.0 00,00
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pemban	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pemban	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih	80 IKM	2.024.198 .000,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

					gunan Industri	gunan Industri Provinsi				
13	Industri Pangan dan Holtikultura	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Tanaman	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	-	-	17.568.378.115,00
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	-	-	613.914.200,00
							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	-	-	50.000.000,00
			Dinas Perindustrian		Program Perencanaan dan Pembinaan	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih	80 IKM	2.024.198.000,00

					gunan Industri	Pembangunan Industri Provinsi				
14	Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya Pembudayaan HHBK-Kayu putih	1 Kegiatan	212.168.200,00
							Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya pengolahan HHBK di tingkat tapak dan Cakupan Luas Pengembangan Tanaman HHBK	1 Kegiatan	129.956.100,00
						Pemanfaatan Hutan di Kawasa	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu	Pengembangan Pemanfaatan Hasil	1 Kegiatan	54.000.000,00

						n Hutan Produks i dan Hutan Lindung	dan/atau Lingkungan Jasa	Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkunga n Terlaksana nya Pengolaha n Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkunga n		
						Pelaksa naan Perlindu ngan Hutan di Hutan Lindung	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Pencegaha n dan Pembatasa n Kerusakan	1 Kegiatan	389.420.6 00,00

						dan Hutan Produksi		Kawasan Hutan terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih	80 IKM	2.024.198.000,00
15	Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	3 dokumen	12.805.000,00

					Perikanan	Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Lintas Daerah Kabupaten /Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
						Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1135 unit usaha	72.805.000,00

RKPD PROVINSI NTB TAHUN 2022

						Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapatkan insentif dan fasilitas	40 Unit usaha	32.815.000,00
				Dinas Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan	200 IKM	6.339.375.500,00

1 6	UMKM Bersaing	Kopera si dan UKM	Dinas Koperas i Usaha Mikro Kecil dan Meneng ah		Progra m Pember dayaan Usaha Meneng ah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pember dayaan Usaha Kecil yang dilakuka n Melalui Pendata an, Kemitra an, Kemuda han Perijina n, Penguat an Kelemb agaan dan Koordin asi Dengan Para Pemang ku Kepenti ngan	Menumbuhkemban gkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkata n aksesperm odalan/ pembiayaa n, akses teknologi informasi,s erta akses sumber daya Produktif	40 UKM	3.047.000 .000,00
--------	------------------	-------------------------	--	--	--	---	---	---	--------	----------------------

					Progra m Pengem bangan UMKM	Pengem bangan Usaha Kecil dengan Orientas i Peningk atan Skala Usaha Menjadi Usaha Meneng ah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang difasilitasi peningkata n akses pemasaran dan jaringan usaha melalui Promosi/E xpo, danPamera n di Provinsi Lainnya	30 UKM	607.493.5 00,00
				Dinas Perind ustrian	Progra m Perenca naan dan Pemban gunan Industri	Penyusu nan, Penerap an, dan Evaluasi Rencana Pemban gunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayak an	200 IKM	6.339.375 .500,00

17	Desa Bersinar	Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Pembekalan Satgas/Mentor Fasilitator Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Peserta rapat dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Mentor, dll Desa bersinar	100 Orang 210 Orang 300 Orang	176.040.000,00
----	---------------	-------------------	--	--	--	---	---	--	-------------------------------------	----------------

				Satuan Polisi Pamong Praja	Progra m Peningk atan Ketente raman dan Ketertib an Umum	Penanga nan Gangua n Ketente raman dan Ketertib an Umum Lintas Daerah Kabupat en/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konfli k di Masyarakat Jumlah Kegiatan pencegaha n pelanggara n melalui patroli tibusman Jumlah Lokasi Pengaman an, Pengawala n Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota Jumlah Sekolah	10 Kegiat an 12 Kali 10 Kabup aten/Kota a 10 Sekola h	625.588.3 00,00
--	--	--	--	-------------------------------------	---	---	--	--	---	--------------------

								yang diberikan Penyuluha n Bahaya Penyalahg unaan Narkoba		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 telah ditetapkan sebanyak 33 Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
1	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	0,57	0,59	0,61	0,63
2	Persentase Kemantapan jalan	80,28	80,65	83,95	85,36
3	Kemantapan Sistem Irigasi	50,76	48,11	50,04	52,17
4	Persentase konektivitas transportasi publik	78,64	78,64	80,58	82,52
5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Nilai SAKIP	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)
7	Indeks Profesionalisme ASN	0,54	0,66	0,68	0,7
8	Indeks Pelayanan Publik	3,92	3,93	4,23	4,53
9	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,28	66,48	66,78	67,08
10	Persentase Balita Stunting (%)	25,50	31,99	31,49	30,99

No	Indikator	Kondisi 2019	Target Tahun		
			2020	2021	2022
11	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,48	13,49	13,5	13,51
12	Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	7,27	7,368	7,466	7,564
13	Indeks Kualitas Air	75,63	76,63	77,63	78,63
14	Indeks Kualitas Udara	88,17	89,17	90,17	91,17
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,56	68,56	69,56	70,56
16	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	10.023,79	11.574,00	13.362,00	15.428,00
17	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (%)	23,06	23,29	23,52	23,71
18	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,30	85,80	86,20	86,70
20	Cakupan Air Minum	72,59	75,74	76,48	78,45
21	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	78,80	79,36	80,10	80,91
22	Rasio Elektrifikasi	99,55	99,66	99,77	99,88
23	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	92,02	92,74	93,10	93,46
24	Inflasi	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
25	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	10.640,00	10.951,94	11.273,02	11.603,52
26	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	117,21	116,04	122,71	129,78
27	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	34,77	34,06	35,41	36,97
28	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	164,96	160,02	166,39	173,02
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,42	3,35	3,30	3,19
30	Persentase penurunan konflik sosial	46,15	14,29	16,67	20,00
31	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	4,88	5,13	5,41	5,72
32	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,60	0,70	0,80	0,90
33	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	18,60	17,93	18,60	19,27

Sumber: Perubahan RPJMD Prov. NTB 2019-2023

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyak 105. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	4,76	2,5-2,75	2,75-3,5	3,5-4,5
2	Inflasi	%	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	13,88	13,88	13,42	12,77
4	Gini Ratio	Point	0,379	0,379	0,353	0,329
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	68,14	68,44	68,84	69,39
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
6	Indeks Kriminalitas	Point	12,71	15,65	14,85	14,05
7	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Point	74,92			
8	Indeks Aksesibilitas	Point	74,92	77,14	78,56	79,84
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	76,16	77,16	78,16	79,16
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	88,08	88,45	89,03	89,69
11	Indeks Risiko Bencana	Point	129,02	126,91	123,11	119,41
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B	B	BB
13	Indeks Pelayanan Publik	Point	97,88	3,93	4,23	4,53
C	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1.01	Pendidikan					
14	Indeks Pendidikan	Point	61,68	62,03	62,39	62,74
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,62	13,68	13,73
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	7,37	7,47	7,56
1.02	Kesehatan					
17	Indeks Kesehatan	Point	71,20	71,51	71,97	72,43
18	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	86,47	75,00	77,00	80,00
19	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	78,8	79,36	80,10	80,91

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
20	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi Aman	%	4,29	4,66	5,67	7,21
21	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,28	66,48	66,78	67,08
22	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	25,5	31,99	31,49	30,99
23	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
24	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	50,00	100,00	-	-
25	Persentase Kemantapan jalan	%	80,28	80,65	83,95	85,36
26	Cakupan Air Minum	%	72,59	75,74	76,48	78,45
27	Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,76	48,11	50,04	52,17
28	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0,00	18,18	36,36	54,55
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
29	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	84,88	100,00	-	-
30	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	92,02	92,74	93,10	93,46
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
31	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	33,21	100,00	-	-
32	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	11,48	100,00	-	-
33	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	11,75	16,36	20,97	25,58
36	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	10,00	20,00	30,00	40,00
37	Tingkat kapasitas penanggulangan bencana	%	0,57	0,59	0,61	0,63
38	Persentase penurunan konflik sosial	%	46,15	14,29	16,67	20,00

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
39	Partisipasi politik masyarakat (%)	%	82,80	82,80	83,74	84,57
40	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,60	0,70	0,80	0,90
41	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,88	5,13	5,41	5,72
1.06	Sosial					
42	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,29	4,64	4,87	5,12
44	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
2.01	Tenaga Kerja					
45	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,42	3,35	3,3	3,19
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
46	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55,81	57,81	59,81	61,16
47	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,4	90,43	90,46	90,49
48	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,21	20,50	20,70	20,90
49	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	18,60	17,93	18,60	19,27
50	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	40,00	40,00	60,00	80,00
2.03	Pangan					
51	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Point	85,30	85,80	86,20	86,70
2.05	Lingkungan Hidup					
52	Indeks Kualitas Air	Point	75,63	76,63	77,63	78,63
53	Indeks Kualitas Udara	Point	88,17	89,17	90,17	91,17
54	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	34,91	55,00	70,00	85,00
55	Persentase Penanganan Sampah	%	34,91	40,00	50,00	60,00
56	Persentase Pengurangan Sampah	%	35,91	15,00	20,00	25,00
2.04	Pertanahan					
57	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
2.03	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
58	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,99	0,82	0,84	0,86
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa					
59	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	33,29	26,74	29,01	31,28
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
60	Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	1,08	1,04	1,00
2.09	Perhubungan					
61	Persentase konektivitas transportasi publik	%	78,64	78,64	80,58	82,52
2.10	Komunikasi dan Informatika					
62	Kualifikasi Layanan Badan Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi		Interaksi	Interaksi	Transaksi
63	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%		15	50	65
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
64	Persentase Koperasi Aktif	%	61,77	63,00	65,00	67,00
2.12	Penanaman Modal					
65	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	10.024	11.574	13.362	15.428
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga					
66	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	35	30	35	40
67	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	23	15	15	15
68	Proporsi wirausaha muda	%	68	68,07	68,18	68,28
2.14	Statistik					
69	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%		15,00	30,00	50,00
2.15	Persandian					
70	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level		II	II+	III
2.16	Kebudayaan					
71	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	1,98	7,05	4,46	4,67
72	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	26,00	24,35	28,70	33,04
2.17	Perpustakaan					
73	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
74	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	26,57	27,90	31,89	35,87
2.18	Kearsipan					
75	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	33,33	50,00	66,67	83,33
3	URUSAN PILIHAN					
3.01	Kelautan dan Perikanan					
76	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,57	4,76	4,75	4,75
	Produksi Perikanan	Ton	1.370.346	1.405.469	1.436.947	1.468.104
	Nilai Tukar Nelayan			>110	>110	>110
3.02	Pariwisata					
77	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	20,00	40,00	60,00	80,00
78	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,05	2,95	3,10	3,25
79	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.706.352	4.400.000	4.650.000	4.850.000
80	Persentase Geosites yang Tertata	%	0,06	12,50	25,00	37,50
81	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	117,21	116,04	122,71	129,78
3.03	Pertanian					
82	Kontribusi PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	%	23,06	23,29	23,52	23,71
83	Nilai Tukar Petani	Point	115,27	>105	>105	>105
3.04	Kehutanan					
84	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	67,56	68,56	69,56	70,56
85	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	2,13	5,08	10,08	15,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral					
86	Rasio Elektrifikasi	%	99,55	99,66	99,77	99,88
3.06	Perdagangan					
87	Indeks Pengeluaran		72,03	72,91	73,80	74,68
88	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.640	10.952	11.273	11.604
3.07	Perindustrian					
89	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	165	160,00	166,39	173,02

No	Aspek/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun		
			2019	2020	2021	2022
90	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	1,90	2,20	2,69	3,14
91	Pertumbuhan Industri	%	4,57	5,5	6,5	7,5
3.08	Transmigrasi					
92	Cakupan Penempatan Transmigran	%	80,00	85	90	95
4	URUSAN FUNGSI PENUNJANG					
4.01	Administrasi Pemerintahan					
93	Skor EKPPD	Point	3,2048	3,0462	3,0557	3,0652
94	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	144,05	100,00	100,00	100,00
95	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	36,00	36,16	36,53	36,89
96	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2
97	Persentase Kerjasama Daerah	%	150	100	100	100
4.02	Pengawasan					
98	Nilai SAKIP	Kategori	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)
4.03	Perencanaan					
99	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	95,09	100,00	100,00	100,00
4.04	Keuangan					
100	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
101	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,5	0,48	0,5	0,52
102	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	34,77	34,06	35,41	36,97
4.05	Kepegawaian					
103	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,54	0,66	0,68	0,70
4.06	Pendidikan dan Pelatihan					
104	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	0,23	0,24	0,25	0,27
4.07	Penelitian dan Pengembangan					
105	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	21,00	21,00	24,00	27,00

Sumber: Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023

BAB VIII PENUTUP

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang.

Perencanaan Tahun 2022 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kebijakan yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2022, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2021.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01						1,462,804,874,583						2,147,858,312,253						
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Nilai SAKIP Minimal Nilai SAKIP Minimal B	Nilai Nilai Point		Nilai Nilai Point	B Nilai B Nilai B Point	837,047,163,503				B Nilai B Nilai B Point	1,619,133,284,633		
1	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	%	100 %	687,070,000				100 %	1,198,642,757			
1	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan			2 dokumen	82,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	2 dokumen	438,971,661	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			4 Dokumen	50,625,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	76,808,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	56,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	76,808,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			4 Dokumen	54,865,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	86,228,632	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen	53,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	76,808,798	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja			4 Dokumen	50,795,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	147,664,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja				4 Dokumen	338,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Dokumen	295,351,327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	830,744,104,263						100 %	1,608,377,413,512	
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji Jumlah ASN yang menerima TPP Jumlah Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang menerima Tunjangan Sertifikasi Jumlah Guru yang menerima Tunjangan Tamsil Jumlah PPPK yang menerima gaji				7288 orang 1108 orang 5946 orang 839 orang 202 orang	828,158,262,863	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7288 orang 1108 orang 5946 orang 839 orang 202 orang	859,093,781,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				270 OB	383,802,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	270 OB	1,594,715,313	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah berkas SPP/SPM yang diuji dan diverifikasi				1650 dokumen	16,800,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1650 dokumen	23,050,923	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Akuntansi SPKD terlaksana				544 Dokumen	2,125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	544 Dokumen	747,517,897,639	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	13,073,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 Dokumen	29,388,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SKPD							Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-5)				
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan disiapkan				25 dokumen	27,751,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	25 dokumen	67,088,143	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Jumlah Laporan Keuangan Triwulan				12 dokumen 4 dokumen	10,846,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	12 dokumen 4 dokumen	26,893,870	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi disusun				1 dokumen	8,567,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	24,597,347	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Milik Daerah	%		%	100 %	225,785,600						100 %	651,821,409	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD disusun				1 dokumen	12,648,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	69,731,260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun				544 dokumen	78,094,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	544 dokumen	233,975,817	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD disusun				1 dokumen	135,043,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	348,114,332	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi	%		%	100 %	18,751,200						100 %	81,479,244	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah													
1 01 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah frekuensi laporan Data Retribusi Daerah				480 frekuensi	9,762,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	480 frekuensi	61,041,455	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah dilaporkan				1 dokumen	8,989,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 dokumen	20,437,789	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	440,298,000						100 %	1,414,088,950	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kenaikan Gaji Berkala ASN Jumlah Data Kenaikan Pangkat ASN				50 orang 1045 orang	224,639,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	50 orang 1045 orang	402,046,858	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	46,457,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah pegawai yang monev dan dinilai				250 orang	8,551,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	250 orang	78,989,308	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Produk Hukum yang disusun				2 dokumen	160,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	2 dokumen	667,636,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	lingkup Dinas Dikbud Provinsi NTB	0	265,415,960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	769,554,200						100 %	3,170,759,637	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik				9 Jenis	20,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	9 Jenis	12,209,163	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang diadakan				7 unit	32,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7 unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang tersedia				17 jenis	110,657,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	17 jenis	1,278,738,236	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan				4 jenis	65,482,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	97,689,441	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				720 eksemplar	140,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	720 eksemplar	149,540,008	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang tersedia				4 jenis	84,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	71,553,738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas tamu yang tersedia				2 jenis	102,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	2 jenis	151,764,137	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinatif				4 kegiatan	136,475,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 kegiatan	663,913,587	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	0	295,351,327	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah				250 pegawai	76,355,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	250 pegawai	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	205,849,500						100 %	418,273,427	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan				7 unit	70,849,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	7 unit	248,273,427	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud				4 Aplikasi	135,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 Aplikasi	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	3,304,698,500						100 %	2,734,569,149	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi jasa pengiriman				240 Kali	34,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	240 Kali	35,264,011	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 jenis	787,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	387,517,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor				4 jenis	184,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	203,225,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pegawai Tidak Tetap Jumlah Jasa Petugas Kebersihan Jumlah Jasa Satpan / Pengaman Jumlah Jasa Sopir / Pengemudi Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor				28 OB 156 OB 108 OB 60 OB 348 OB	2,298,370,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	28 OB 156 OB 108 OB 60 OB 348 OB	2,108,562,624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpeliharaan	%		%	100 %	651,052,240						100 %	1,086,236,548	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				35 unit	396,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	35 unit	744,004,058	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				120 unit	163,837,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	120 unit	63,126,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud (aplikasi)				1 aplikasi	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	1 aplikasi	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	.				0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	0	218,051,921	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				4 jenis	50,845,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dinas Dikbud Prov. NTB	4 jenis	61,054,538	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Angka Partisipasi Kasar SLB Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	% % %			99.95 % 70 % 94.38 %	525,784,636,400						99.95 % 70 % 94.38 %	455,376,886,275	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Penurunan DO SMA	%			0.3 %	264,603,802,000						0.3 %	203,445,743,112	
1 01 02 1.01 01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	6,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Hibah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik) Jumlah Ruang Kelas Baru SMA				20 Lembaga 44 Ruang 10 Paket	16,477,879,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	20 Lembaga 44 Ruang 10 Paket	779,005,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Tata usaha				2 Ruang	588,444,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	2 Ruang	3,832,735,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	jumlah Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi				15 Ruang	7,406,284,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	15 Ruang	2,837,168,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Pemb Laboratorium Fisika				23 Ruang	11,355,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	23 Ruang	1,011,551,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang terbangun				26 Ruang	12,878,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	26 Ruang	1,472,291,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yg terbangun				2 Ruang	624,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	2 Ruang	153,145,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	.				0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	1,043,879,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang terbangun				3 Ruang	885,446,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	2,547,519,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun				4 ruang	1,608,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan							
1 01 02 1.01 13	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah ruang asrama yang dibangun				1 ruang	663,185,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang dibangun Jumlah Ruang Bimbingan Konseling yang dibangun Jumlah Ruang OSIS yang dibangun Jumlah Toilet yang dibangun				1 ruang 1 ruang 1 ruang 25 Paket	7,051,466,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 ruang 1 ruang 1 ruang 25 Paket	796,984,382	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah dinas Guru yang dibangun				2 ruang	821,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	2 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang terpenuhi				111 ruang	15,988,927,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	111 ruang	108,727,924	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Ruang Guru yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Tata Usaha yang terpenuhi				6 Ruang 4 Ruang 3 Ruang	2,536,183,210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	6 Ruang 4 Ruang 3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium yang terpenuhi				10 Ruang	2,314,665,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	10 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Fisika yang terpenuhi				4 Ruang	944,807,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kimia yang terpenuhi				4 ruang	937,436,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Komputer yang terpenuhi				3 Ruang	427,726,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Rehabilitasi Laboratorium Bahasa yang terpenuhi				1 Ruang	158,128,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang UKS yang terpenuhi				4 Ruang	522,525,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Perpustakaan yang terpenuhi				8 Ruang	1,484,360,910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	8 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Asrama Sekolah yang terpenuhi				3 Ruang	989,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	3 Ruang	183,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.01 31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Bimbingan Konseling yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Ibadah yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang OSIS yang terpenuhi Jumlah Rehabilitasi Ruang Toilet yang terpenuhi				6 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 40 Ruang	5,976,558,270	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	6 Ruang 2 Ruang 3 Ruang 40 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 36	Pengadaan Mebel Sekolah	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0.	3,739,606,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku dan Alat Tulis Siswa SMA Pemenuhan SPM)y yang diadakan				1 Paket	453,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	1 Paket	1,066,106,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Media Pendidikan yang terpenuhi Jumlah Peralatan Pendidikan yang terpenuhi Jumlah Peralatan TIK yang terpenuhi				4 Paket 10 Paket 5 Paket	2,155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	4 Paket 10 Paket 5 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0.	381,991,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	.				0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0.	53,293,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	0	247,090,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMA				104.771 siswa	169,352,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB	104.771 siswa	177,109,633,738	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	SMA Negeri, SMA Swasta, dan MA se NTB		82,012,168	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						244,245,900,000							235,710,725,573	
1 01 02 1.02 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik) Jumlah Ruang Kelas Baru SMK Jumlah SMK mendapatkan Hibah				64 Ruang 6 Paket 1 Lembaga	24,344,432,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		64 Ruang 6 Paket 1 Lembaga	1,656,317,704	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	jumlah ruang peraktik siswa yang terbangun				30 paket	33,286,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		30 paket	46,769,314,387	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	jumlah ruang kelas sekolah (bangunan sekolah) yang direhabilitasi				5 paket	5,237,514,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		5 paket	2,513,551,492	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 02 1.02 28	Pengadaan Mebel Sekolah					0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	651,579,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,084,008,705	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	125,037,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 38	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	jumlah paket alat yang diadakan				25 paket	36,824,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		25 paket	38,000,409,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	54,338,410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	216,912,209	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	75,499,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kejuruan														
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	207,436,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	BIMTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI SMK BURSA KERJA (BKK SMK) 100 orang BIMTEK KEGIATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) P1 100 orang BINTEK KEGIATAN BLUD SMK 100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUK / TEACHING FACTORY 100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN BERBASIS PROJEK / KELAS START UP (KELAS WIRUSAHA) 100 orang BINTEK KEGIATAN IMPLEMENTASI PENYELARASAN IDUKA / LINK AND MATCH 100 orang INTEK KEGIATAN REFOCUSING CORE SMK 100 orang PROGRAM BIMTEK KEGIATAN MAGANG GURU SMK DI INDUSTRI 100 orang PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN GURU TAMU DI SMK 100 orang				3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	448,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen	695,957,874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN KUNJUNGAN INDUSTRI (WISATA BELAJAR) 100 orang PROGRAM IMPLEMENTASI BIMTEK KEGIATAN SMK BUDAYA KERJA (SABTU BUDAYA SMK) 100 orang													
1 01 02 1.02 46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK				81829 Siswa	144,104,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		81829 Siswa	143,582,617,251	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	.				0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	77,745,650	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						16,934,934,400							16,220,417,590	
1 01 02 1.03 02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru (DAK Fisik)				13 Ruang	1,946,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		13 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	.				0.	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	jumlah perpustakaan yang dibangun				1 Ruang	194,630,800		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					0.	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 10	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dibangun				8 Unit	2,001,921,600	Semua Kab/Kota, Semua	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		8 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02 1.03 12	Pembangunan Ruang Laboratorium						0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri Tuna Grahita (C) yang dibangun				1 Ruang	176,940,400	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah					0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	jumlah ruang Tata Usaha yang di rehab				2 ruang	219,405,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS SLB yg di rehab				1 Ruang	104,217,470	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan SLB yg di rehab				1 Ruang	130,285,730	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Ibaadah di SLB yang di Rehab				1 Ruang	104,217,470	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	jumlah ruang laboratorium yang di rehab				1 ruang	130,285,730	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)						0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 35	Pengadaan Mebel Sekolah					0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik					0	0		Dana Insentif Daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	274,429,280	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Media pendidikan SLB				1 Paket	2,544,030,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			6,941,141,746	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					0	0		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	108,727,924	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	54,363,962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah siswa penerima dana BOS				3609 orang	9,282,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		3609 orang	8,828,707,436	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	jumlah laporan dana BOS				4 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		4 dokumen	13,047,242	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						285,706,000							991,925,987	
1 01 03 1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						285,706,000							870,975,000	
1 01 03 1.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Penyusunan Silabus Muatan Lokal SMK Terlaksananya Workshop Penyusunan Silabus Muatan Lokal SMK 100 orang				100 orang 3 dokument	182,766,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		100 orang 3 dokument	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Kegiatan workshop Penyusunan Kurikulum SMK 100 orang				3 dokument	102,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		3 dokument	370,975,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 03 1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						0							120,950,987	
1 01 03 1.02 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	120,950,987	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						99,446,517,780							71,965,967,591	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi						99,446,517,780						71,965,967,591		
1 01 04 1.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Analisis Kebutuhan Pendidik pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Data Analisis Kebutuhan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Guru Non PNS SMA, SMK dan SLB yang dibayarkan Jasa Jam Mengajar Jumlah Guru Non PNS Yayasan yang dibayarkan Jasa Jam Mengajar Jumlah operator dapodik yang mengikuti Bimbingan Teknik Operator Dapodik Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Tenaga Administrasi (Tata Usaha) Non PNS SMA, SMK dan SLB Negeri yang dibayarkan Jasa				6 dokumen 1 dokumen 1580178 orang/jam /pelajaran 5000 orang 280 orang 3150 orang	99,207,901,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		6 dokumen 1 dokumen 1580178 orang/jam /pelajaran 5000 orang 280 orang 3150 orang	70,829,184,768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 04 1.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha yang di evaluasi kinerja Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan				315 orang 3 dokumen	238,616,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		315 orang 3 dokumen	1,136,782,823	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						240,850,900						68,331,278		
1 01 05 1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan						140,850,900						51,464,633		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	oleh Masyarakat														
1 01 05 1.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SMA Swasta yg dinilai				5 Sekolah	112,572,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		5 Sekolah	37,120,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah SMA yg diriview				5 Sekolah	28,278,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		5 Sekolah	14,344,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						100,000,000							16,866,645	
1 01 05 1.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	3,935,551	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 05 1.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah sekolah swasta yang dievaluasi kelayakan perizinannya				32 sekolah	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		32 sekolah	12,931,094	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						0							321,916,489	
1 01 06 1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							321,916,489	
1 01 06 1.01 07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			321,916,489	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						909,997,800						2,232,920,926		
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						510,000,000							663,354,180	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0							333,806,743	
2 22 02 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	169,928,836	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	163,877,907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						510,000,000							329,547,437	
2 22 02 1.03 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						0			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	23,187,685	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 02 1.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah				3 .Lembaga	510,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 .Lembaga	71,096,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 02 1.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	235,263,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						125,000,000							528,538,892	
2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						125,000,000							528,538,892	
2 22 03 1.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta peningkatan SDM Pentas Seni Budaya Keluar Daerah				100 orang 5 Kegiatan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 orang 5 Kegiatan	528,538,892	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						124,998,000							283,007,304	
2 22 04 1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						124,998,000							283,007,304	
2 22 04 1.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pemberdayaan SDM dari Lembaga Sejarah				100 peserta	62,498,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 peserta	30,896,009	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04 1.01 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 paket	62,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		5 paket	252,111,295	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						149,999,800							758,020,550	
2 22 05 1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						149,999,800							758,020,550	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 05 1.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	328,475,462	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02 02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				10 Kegiatan	149,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		10 Kegiatan	341,780,487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05 1.02 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	.				0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	87,764,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						396,650,560					1,163,701,742			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						295,602,560							479,599,620	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							9,342,606	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0				00	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		00	2,196,048	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0				00	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		00	2,133,369	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0				00	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		00	2,157,301	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0				00	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		00	2,186,931	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	323,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	345,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	28,416,000						100 %	75,450,822	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Kertas dan Cover yang tersedia Jumlah Penyimpan Barang/ Pengurus Barang Pembantu yang tersedia Jumlah PPK Keuangan yang tersedia				2 Jenis 2 Jenis 1 orang 1 orang	28,416,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Provinsi NTB	2 Jenis 2 Jenis 1 orang 1 orang	73,513,468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Provinsi NTB	0 0	1,937,354	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							1,593,188	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	814,828	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	778,360	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	159,812,000						100 %	113,594,928	
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia				23 Jenis 7 Jenis 10 Kali	20,556,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	23 Jenis 7 Jenis 10 Kali	21,350,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Kertas dan Cover yang tersedia Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia Jumlah Toner/tinta printer yang tersedia				17 Buah		Semua Kelurahan				17 Buah			
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Fotocopy bahan HVS 70 gr pulau lombok 1 muka yang tersedia Jumlah Map Kop OPD/ UPT yang tersedia				10066 lembar 500 Buah	8,019,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	10066 lembar 500 Buah	14,769,475	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BTIDP Prov. NTB	0 0	8,205,264	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Spanduk/Baliho dan sejenisnya (bahan Vinyl) yang tersedia				10 Buah	1,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	10 Buah	1,367,544	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				18 orang	2,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	18 orang	2,943,638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Data Pendidikan yang tersedia				1 Dokumen	127,336,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	BTIDP Prov. NTB	1 Dokumen	64,958,340	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							30,052,691	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	30,052,691	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	72,614,560						100 %	209,735,666	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia				751 Keping	7,510,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	751 Keping	7,806,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang tersedia Langganan Zoom Meeting yang tersedia				2 orang 1 Tahun	65,104,560	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	2 orang 1 Tahun	201,929,269	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	34,760,000						100 %	39,829,719	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) yang terpelihara				3 Unit 1 Unit	29,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	3 Unit 1 Unit	33,539,017	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Air Kondisioner (AC) split yang terpelihara				2 Unit	1,220,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB	2 Unit	1,390,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan Personal Computer/Laptop				3 Unit 2 Unit	4,110,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Balai Pengembangan Teknologi	3 Unit 2 Unit	4,900,366	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang terpelihara Jumlah Printer yang terpelihara						Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-5)	Informasi dan Data Pendidikan Prov. NTB			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%		%	70.00 %	101,048,000						70.00 %	684,102,122	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						51,048,000							345,239,191	
1 01 02 1.01 38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 0	7,759,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0				0 0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 0	1,289,689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	0 .	125,485,324	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Media Pembelajaran yang tersedia				16 Judul	51,048,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	isi	16 Judul	210,704,902	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						50,000,000							269,877,025	
1 01 02 1.02 30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	7,759,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	784,833	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	71,208,400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Media Pembelajaran yang tersedia				16 Judul	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		16 Judul	190,124,516	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						0							68,985,906	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0				0 0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0	68,985,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2,918,148,400					2,959,122,783			
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,100,218,400							1,365,294,179	
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							6,855,334	
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 .	0						0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 .	0						0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0 .	3,427,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0 .	3,427,667	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							10,619,129	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	10,619,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0						94,332,858		
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	18,842,957	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	16,363,161	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0.	0			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	8,547,635	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	9,223,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0.	13,410,193	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0.	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat		0.	27,945,316	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan			(PD-10)				
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	918,148,400						100 %	1,132,751,509	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat dan Benda Pos				720 Buah/lembar	1,096,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	720 Buah/lembar	2,442,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	159,252,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	3 Rekening	256,644,930	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga PTT, Pendukung Administrasi/Teknis, Kebersihan dan Keamanan				312 Orang/Bulan	757,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Taman Budaya Provinsi NTB	312 Orang/Bulan	873,664,397	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Taman Budaya	%		%	100 %	182,070,000						100 %	120,735,349	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		0	27,932,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				16 Buah 33 Unit/tahun	56,070,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		16 Buah 33 Unit/tahun	92,802,898	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang				4 Unit/tahun	126,000,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan	Penguatan stabilitas ketenteraman,		4 Unit/tahun	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dipelihara						Kecamatan, Semua Kelurahan		Kebudayaan	keterbiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)				
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1,817,930,000							1,593,828,604	
2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						547,580,000							433,116,531	
2 22 02 1.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah pertunjukan Olah Seni dan Eksperimentasi Seni				4 kegiatan	547,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, keterbiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	4 kegiatan	433,116,531	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2 22 02 1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						1,270,350,000							1,160,712,073	
2 22 02 1.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pertunjukan Tetap dan Pameran Tetap yang dilaksanakan				18 Kegiatan	1,270,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, keterbiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	18 Kegiatan	1,160,712,073	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						2,778,383,225							3,196,169,791	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	B Nilai	1,188,554,725						B Nilai	1,562,135,356	
2 22 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	0					100 %	9,263,280		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0.	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,635,498	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,635,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,644,111	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Provinsi NTB	0.	1,078,158	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							28,387,078	
2 22 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	22,499,906	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,585,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,090,031	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,576,297	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,635,607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							2,709,067	
2 22 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	543,876	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,086,913	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,078,278	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0							1,090,151	
2 22 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,090,151	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	95,102,600						100 %	233,424,864	
2 22 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik				235 Buah	17,042,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	235 Buah	17,701,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				309 Buah	8,831,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	309 Buah	17,784,380	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 22 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0.	5,449,118	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah media promosi museum				800 buah	24,880,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	800 buah	64,617,942	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0.	5,494,908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materi Publikasi/Dokumentasi				1199 Lembar	44,349,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	1199 Lembar	46,063,468	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0.	10,898,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	0.	65,415,576	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	25,000,000						100 %	62,144,798	
2 22 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud				1 Aplikasi	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Provinsi NTB	1 Aplikasi	62,144,798	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	938,092,125						100 %	1,077,442,199	
2 22 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				200 Surat	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	200 Surat	3,746,132	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
2 22 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana dan prasarana				5 Rekening	114,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	5 Rekening	178,093,907	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan				324 Orang/Bulan	822,092,125	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	324 Orang/Bulan	895,602,160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	130,360,000						100 %	147,673,919	
2 22 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas /operasional				7 unit	25,620,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	7 unit	49,595,910	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur				25 unit/tahun	6,250,000	Kota Mataram, Ampenan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	25 unit/tahun	4,497,321	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				28 unit/tahun	29,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	28 unit/tahun	35,956,761	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya				500 Eksemplar	4,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	500 Eksemplar	2,156,970	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 22 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara				288 m2/tahun	64,750,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Museum Negeri Prov. NTB	288 m2/tahun	55,466,957	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						1,589,828,500							1,634,034,435	
2 22 06 1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						1,589,828,500							1,634,034,435	
2 22 06 1.01 01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan				2000 Koleksi	636,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2000 Koleksi	604,575,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06 1.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM Permuseuman yang dibina				15 Orang	34,316,800	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		15 Orang	43,121,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06 1.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Program Publik				37 Kegiatan	822,817,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		37 Kegiatan	886,502,515	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06 1.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum				1 unit	64,661,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 unit	67,159,992	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06 1.01 05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum				20 unit	31,459,000	Kota Mataram, Ampenan, Taman Sari	DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		20 unit	32,675,080	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							474,608,475						1,330,000,065	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						186,408,875							469,730,396	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						60,145,325		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	29,507,155	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	8,398,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	5,599,081	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	5,599,081	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	4,042,536	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	6,998,851	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0						23,824,088		
1 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	5,627,076	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	9,798,391	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	8,398,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0						9,238,483		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,679,724	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	3,359,448	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	4,199,311	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							27,995,404	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	27,995,404	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	78,658,800						100 %	179,272,346	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik				5 Buah	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	5 Buah	3,844,329	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				41 Buah	18,865,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	41 Buah	36,387,166	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				597 Orang	15,093,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	597 Orang	17,133,187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				23000 Lembar	6,900,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	23000 Lembar	10,856,897	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Exp.	1,800,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	12 Exp.	3,443,435	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	0	4,878,199	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Dokumen	35,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobar dan Mataram	2 Dokumen	102,729,133	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	76,930,075						100 %	105,579,205	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				100 Lembar	1,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	100 Lembar	2,617,570	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Rekening	14,931,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	12 Rekening	15,508,054	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				24 OB	60,999,075	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	24 OB	87,453,581	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	30,820,000						100 %	63,675,545	
1 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	30,820,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram	4 Unit	63,675,545	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						288,199,600						860,269,669		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						136,533,400						473,779,290		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas				62 Sekolah	108,533,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		62 Sekolah	175,598,848	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	273,005,148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				50 Dokumen	27,999,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 Dokumen	25,175,294	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						140,790,600						357,814,262		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Hasil Laporan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				70 Sekolah	115,790,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		70 Sekolah	175,747,450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	156,910,489	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				50 Dokumen	25,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	50 Dokumen	25,156,323	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						10,875,600						28,676,117		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Persiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				6 Dokumen	10,875,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	6 Dokumen	20,714,933	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0.	7,961,184	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						518,438,000						1,471,234,747		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	317,938,000					B Nilai	545,476,185		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	10,000,000					100 %	38,855,696		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	7,863,279	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	4,684,705	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	2,895,367	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 0.	2,854,967	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi kinerja				1 dokumen	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 dokumen	10,679,462	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	2 Dokumen	9,877,916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0						55,625,800		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	24,907,567	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	8,577,156	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	22,141,077	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	1,999,000						100 %	9,423,680	
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi BMD				2 dokumen	1,999,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	2 dokumen	9,423,680	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	25,000,000						100 %	54,873,273	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.				0 0.	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	0 0.	7,795,272	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen				6 dokumen	25,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	6 dokumen	47,078,001	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	9,170,000						100 %	21,228,296	
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK				500 buah	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	500 buah	10,496,044	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	porsi makanan				100 orang	2,995,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	100 orang	7,806,719	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan fotocopy				1500 lembar	1,175,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	1500 lembar	2,925,533	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							5,386,730	
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	5,386,730	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	240,999,000						100 %	317,716,077	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				100 buah	1,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	100 buah	1,723,754	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening				2 rekening	39,999,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	2 rekening	51,712,609	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor non PNS				8 orang	200,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah	8 orang	264,279,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	30,770,000						100 %	42,366,633	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas				4 unit	29,430,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	4 unit	39,632,867	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				3 unit	1,340,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Tengah	3 unit	2,733,766	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						200,500,000							925,758,562	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						91,000,000							540,556,315	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	laporan hasil evaluasi				40 sekolah	81,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		40 sekolah	240,650,518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0.				00.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM		0 0.	271,498,968	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kecamatan, Semua Kelurahan								
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dupak				80 PAK	10,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		80 PAK	28,406,829	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						98,000,000							335,716,682		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	laporan hasil evaluasi				50 sekolah	88,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 sekolah	174,352,528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0.				0 0.	0	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 0.	142,069,139	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dupak				80 PAK	10,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		80 PAK	19,295,015	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						11,500,000							49,485,565		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	laporan hasil evaluasi				2 sekolah	6,500,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 sekolah	35,463,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	DUPAK				10 PAK	5,000,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		10 PAK	14,021,822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							568,306,400						2,861,604		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	387,215,000					B Nilai	2,861,604		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	6,148,000					100 %	0		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	.				0.	0					0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	714,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD disusun				1 Dokumen	2,610,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun				1 Dokumen	1,535,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1,289,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.				0.	0					0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	7,318,600					100 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan ASN				60 orang/bulan	2,679,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobok Timur	60 orang/bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi				100 Dokumen	2,774,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobok Timur	100 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun				1 Dokumen	1,865,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lobok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	4,455,000						100 %	2,861,604	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun				1 Dokumen	2,440,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	2,861,604	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun				2 Dokumen	2,015,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	.				0.	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	20,743,500						100 %	0	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun				1 Dokumen	1,605,900	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	14,067,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	5,070,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	19,764,700						100 %	0	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia				25 Buah	435,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	25 Buah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia				80 Buah	2,467,300	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	80 Buah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				5000 Lembar	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	5000 Lembar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				300 exemplar	1,260,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	300 exemplar	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia				10 Jenis	900,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	10 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi				1 Dokumen	10,325,600	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata				15 Dokumen	2,876,800	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	15 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0	0						0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	284,115,200						100 %	0	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	.				0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia				6 rekening	61,315,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	6 rekening	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia				88 OB	222,800,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur	88 OB	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	44,670,000					100 %	0		
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia				7 unit	44,670,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	7 unit	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0.	0					Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur	0.	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						181,091,400						0		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						83,512,700						0		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas yang disusun				67 sekolah	71,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		67 sekolah	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0						0.	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai				492 Dokumen	12,512,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		492 Dokumen	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						97,578,700						0		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport				94 sekolah	85,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		94 sekolah	0 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengawas) Lombok Timur						Semua Kelurahan							
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0					0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				300 Dokumen	12,578,700	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		300 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						0						0		
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0					0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						406,966,960						1,347,285,884		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	339,966,960					B Nilai	613,497,864		
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	30,914,200					100 %	64,486,878		
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	6,221,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 Dokumen	13,058,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun				1 dokumen	6,641,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	10,237,686	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD disusun				1 dokumen	6,825,900	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	9,429,356	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD disusun				1 dokumen	6,825,900	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	9,429,356	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun				4 laporan	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	10,179,852	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun				2 laporan	2,398,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	2 laporan	12,152,528	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	13,805,200						100 %	38,409,816	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0.	5,835,177	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi				200 dokumen	1,609,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	200 dokumen	1,671,939	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan yang disusun				1 dokumen	6,265,600	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	1 dokumen	11,984,810	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0.	4,480,114	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Jumlah laporan yang disusun				4 laporan	5,929,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	8,236,362	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	/Semesteran SKPD							Semua Kelurahan							
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0.	6,201,414	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,000,000							16,926,787	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	3,366,070	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan yang disusun				2 laporan	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 laporan	11,144,199	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	2,416,518	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	4,278,800						100 %	13,204,837	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0.	3,359,615	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan yang disusun				7 laporan	4,278,800	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	7 laporan	9,845,222	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	23,647,600						100 %	131,922,978	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen yang disediakan				5 laporan	1,338,000	Kab. Lombok Utara, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	5 laporan	5,786,220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Bangunan Kantor							Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-5)				
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				150 buah	12,899,600	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	150 buah	19,917,113	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang				120 orang	4,060,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	120 orang	12,871,418	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				10500 lembar	3,050,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	10500 lembar	7,584,520	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0	9,683,825	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material publikasi				5 buah	300,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	5 buah	4,048,377	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0	6,065,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi				4 laporan	2,000,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	4 laporan	65,965,665	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	32,599,000						100 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	.				0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop dan Printer				3 Unit	32,599,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas Dikbud Lombok Utara	3 Unit	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	203,292,160						100 %	229,329,966	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	.				0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	0 .	4,277,023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				4 rekening	51,300,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	4 rekening	53,664,531	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor				60 orang	151,992,160	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	60 orang	171,388,412	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	29,430,000						100 %	119,216,602	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				4 unit	29,430,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	4 unit	45,558,362	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	0 .	8,595,740	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Cabang Dinas Pendidikan dan		65,062,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Kebudayaan Lombok Utara				
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						67,000,000						733,788,020		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						32,000,000						365,803,102		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah laporan pengawasan				12 laporan	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		12 laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5) Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	250,058,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah dupak yang dinilai Jumlah peserta bimtek pengembangan karir GTK				50 dokumen 30 orang	12,500,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 dokumen 30 orang	42,677,440	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	73,067,162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						32,000,000						333,049,880		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah laporan pengawasan				13 laporan	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		13 laporan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	216,676,105	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah dupak yang dinilai Jumlah peserta pembinaan				50 dokumen 30 orang	12,500,000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 dokumen 30 orang	41,683,336	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	74,690,439	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						3,000,000							34,935,038	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah laporan hasil pengawasan				3 dokumen	3,000,000						3 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	23,364,826	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	11,570,212	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						423,559,500					1,362,895,642			
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0 Nilai Sakip	0 Nilai		0 Nilai	0 0 B Nilai	281,559,500						0 0 B Nilai	541,745,710	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%		%	100 %	0						100 %	81,848,116	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	13,600,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	18,307,187	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	17,634,128	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	17,903,352	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	12,249,662	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	2,153,787	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	24,285,800						100 %	25,818,518	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan				60 OB	6,583,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	60 OB	6,838,273	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SLPD				70 Dokumen	1,036,600	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	70 Dokumen	1,076,893	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun				1 Dokumen	3,239,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	3,365,292	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Hasil				1 Dokumen	1,943,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	2,019,175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen Hasil				4 Dokumen	9,538,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Dokumen	10,499,710	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Hasil				4 Dokumen	1,943,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Dokumen	2,019,175	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	12,749,100						100 %	13,191,944	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil				1 Dokumen	7,565,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	7,807,477	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Hasil				12 Dokumen	5,184,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Dokumen	5,384,467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	9,107,200						100 %	7,880,974	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Set				4 Set	3,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	4 Set	1,890,755	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	1,684,800	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,749,952	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen				1 Dokumen	1,490,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	1 Dokumen	1,548,034	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				12 Dokumen	2,592,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Dokumen	2,692,233	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	68,107,400						100 %	131,438,600	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah				60 Buah	5,442,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	60 Buah	5,653,690	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	0	13,606,278	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Porsi				182 Porsi	8,615,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	182 Porsi	8,951,676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lembar				26249 Lembar	7,549,200	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	26249 Lembar	7,841,130	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksamplar				350 Eksamplar	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	350 Eksamplar	9,692,040	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jensi				8 Jensi	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	8 Jensi	1,534,573	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kali				12 Kali	6,300,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	12 Kali	6,622,894	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT				30 OT	40,201,100	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa Barat	30 OT	77,536,319	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							7,792,535	
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	7,792,535	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	145,500,000						100 %	220,428,420	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat		4,381,610	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening				4 Rekening	22,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	4 Rekening	23,373,970	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor				24 OB 24 OB	120,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	24 OB 24 OB	192,672,840	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	21,810,000						100 %	53,346,603	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Pakai Jasa Suku Cadang Kendaraan Pajak / STNK Servis Kendaraan				3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit	21,810,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit	34,487,509	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0 .	12,128,511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat	0 .	6,730,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						142,000,000							821,149,932	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						95,500,000							513,200,013	
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Dokumen Hasil				180 Dokumen	70,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		180 Dokumen	177,957,396	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0 .	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0 .	292,018,239	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi				50 Orang 60 Orang	25,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		50 Orang 60 Orang	43,224,378	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						39,000,000							266,936,972	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Dokumen Hasil				18 Dokumen	39,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		18 Dokumen	119,356,062	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	144,994,812	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	2,586,098	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						7,500,000							41,012,947	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	dokumen				2 dokumen	7,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 dokumen	38,944,127	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	2,068,820	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						461,009,800							1,439,635,157	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	265,759,800						B Nilai	469,853,813	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	0						100 %	57,399,225	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	23,653,182	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,720,198	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,720,198	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	3,967,782	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	684,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							22,414,212	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	5,393,514	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	594,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	4,194,447	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	662,878	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	10,587,293	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	981,452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							15,952,679	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	1,435,872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	5,358,626	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	9,158,181	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	5,421,800						100 %	4,867,683	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,297,068	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	569,116	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,421,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	565,627	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	1,435,872	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	34,745,000						100 %	130,367,684	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				20 buah	640,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	20 buah	1,976,205	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	3,812,420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	9,267,207	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,616,623	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar				20 eksemplar	2,100,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	20 eksemplar	2,126,006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	1,145,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	0.	2,780,162	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen SKPD				1 Dokumen	32,005,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	1 Dokumen	106,643,743	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	196,163,000						100 %	210,919,879	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah				500 buah	2,958,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	500 buah	3,074,532	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening Listrik, air dan internet				12 bulan	43,205,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	12 bulan	42,247,560	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	0.	1,471,850	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis				2 jenis	150,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa	2 jenis	164,125,937	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	29,430,000						100 %	27,932,451	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				5 unit	29,430,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Sumbawa	5 unit	27,932,451	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						195,250,000							969,781,344	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						129,250,000							677,637,837	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Sekolah				28 sekolah	93,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		28 sekolah	287,523,361	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	324,818,487	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	orang				100 orang	36,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		100 orang	58,033,526	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	7,262,463	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						59,500,000							252,503,508	
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen				19 Dokumen	59,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		19 Dokumen	191,289,556	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	56,946,318	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	4,267,634	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						6,500,000							39,639,999	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen				2 dokumen	6,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		2 dokumen	26,950,408	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	10,320,420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	2,369,171	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						439,080,900						1,330,180,943		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	313,356,600						B Nilai	664,125,204	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disyahkan	%		%	100 %	7,341,800						100 %	26,434,652	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Jumlah dokumen RKA - SKPD disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1,500,900	Kab. Domp, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Domp	1 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun				1 Dokumen	1,393,800	Kab. Domp, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Domp	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD disusun				1 Dokumen	1,421,000	Kab. Domp, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Domp	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan perubahan DPA-SKPD disusu				1 Dokumen	1,716,600	Kab. Domp, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Domp	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan tahunan yang disusun				1 Dokumen	1,309,500	Kab. Domp, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Domp	1 Dokumen	26,434,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	1,658,000						100 %	4,641,235	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan yang tersusun				12 Bulan	1,127,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	12 Bulan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun				1 Dokumen	531,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	4,641,235	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	1,271,500						100 %	16,553,957	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah tersusun				1 Dokumen	583,500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	1,753,683	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun				1 Dokumen	688,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	14,800,274	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	985,000						100 %	11,851,121	
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Kepegawaian yang tersusun				1 Dokumen	985,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Dompu	1 Dokumen	11,851,121	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	122,435,300						100 %	317,795,084	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				10 Buah	1,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Cabang Dinas Dikbud Dompu	10 Buah	11,000,174	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang tersedia						Semua Kelurahan			(PD-5)				
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia				50 Jenis	3,125,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Jenis	26,434,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia				5 Jenis	1,050,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	5 Jenis	15,645,225	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				30500 lembar	1,089,600	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	30500 lembar	10,902,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia				300 exp	1,260,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	300 exp	9,223,596	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material Kantor yang tersedia				50 Jenis	1,600,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Jenis	6,105,454	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor yang terfasilitasi				12 kali	3,150,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	12 kali	17,880,258	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi				50 Dokumen	110,160,700	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Dompu	50 Dokumen	220,603,129	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	3,500,000						100 %	68,821,765	
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung				4 Dokumen	3,500,000	Kab. Dompu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Cabang Dinas Dikbud Dompu	4 Dokumen	68,821,765	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan						Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-5)				
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	148,715,000						100 %	175,180,188	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat Kantor yang terkirim				800 Surat	3,400,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	800 Surat	13,137,628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				2 Rekening	45,300,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	2 Rekening	47,753,371	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor Kebersihan, Keamanan dan Alat				10 Jenis	100,015,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	10 Jenis	114,289,189	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	27,450,000						100 %	42,847,202	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas tersedia				4 Unit	21,810,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	4 Unit	32,086,340	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang terlaksana				5 Jenis	5,640,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu	5 Jenis	10,760,862	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						125,724,300							666,055,739	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						59,872,000						425,663,904		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas yang di susun				18 Sekolah	46,802,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	18 Sekolah	279,235,039	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	92,011,780	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				50 Orang	13,070,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	50 Orang	54,417,085	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						47,987,000						178,121,661		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang di susun				9 Sekolah	39,610,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	9 Sekolah	151,960,013	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0 .	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0 .	18,083,574	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02 43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				50 Orang	8,377,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	50 Orang	8,078,074	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						17,865,300						62,270,174		
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus				1 Sekolah	14,360,300	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	1 Sekolah	48,910,495	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang di susun						Kelurahan							
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	8,809,276	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Dupak Guru dan Tenaga Kependidikan yang dinilai pada Satuan Pendidikan				10 Orang	3,505,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		10 Orang	4,550,403	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						732,834,800						1,350,249,399		
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Nilai		Nilai	B Nilai	435,546,800						B Nilai	733,711,758	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja yang telah disahkan	%		%	100 %	1,430,000						100 %	1,520,605	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dok	1,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	1,520,605	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	20,758,800						100 %	49,317,052	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Kali Bulan				60 OB	1,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	60 OB	5,217,035	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen				100 Dok	712,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	100 Dok	741,759	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	6,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	20,215,392	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dok	476,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	494,506	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				4 Dok	10,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	19,978,029	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				4 Dok	2,570,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	4 Dok	2,670,331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah (BMD)	%		%	100 %	5,632,000						100 %	23,024,184	
1 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	200,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	667,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dok	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	2 Dok	21,906,601	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				12 Dok	432,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dok	450,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah dikelola	%		%	100 %	30,000,000						100 %	35,862,417	
1 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dok	2,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	13,846,159	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dok	25,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	1 Dok	6,686,582	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen				12 Dok	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima	12 Dok	15,329,676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	67,611,000						100 %	181,328,551	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Buah				25 Buah	1,060,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	25 Buah	1,674,643	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				10 Jenis	8,001,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	10 Jenis	18,692,314	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				23000 lembar	5,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	23000 lembar	9,679,948	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				300 Eksemplar	3,150,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	300 Eksemplar	6,675,827	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-5)				
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				10 Jenis	3,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	10 Jenis	3,956,045	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi				456 Porsi	5,100,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	456 Porsi	15,206,049	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	40,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	1 Dok	123,873,670	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis				15 Jenis	1,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Dikud Bima dan Kota Bima	15 Jenis	1,570,055	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	268,680,000						100 %	379,189,146	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				715 Surat	4,680,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	715 Surat	4,870,881	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				4 Rekening	54,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	4 Rekening	66,758,265	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah Keamanan Kantor				48 OB 36 OB	210,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	abang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	48 OB 36 OB	307,560,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	41,435,000						100 %	63,469,803	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional				4 Unit 4 Unit	29,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	4 Unit 4 Unit	36,383,255	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis				8 Jenis	1,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	8 Jenis	1,236,264	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				6 Unit	6,500,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	6 Unit	9,840,663	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				2 Unit	4,505,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima	2 Unit	16,009,621	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						297,288,000						616,537,641		
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						176,288,000						399,168,152		
1 01 02 1.01 48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen				240 Dok	139,588,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	240 Dok	349,973,269	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Orang Jumlah PAK				60 Org 80 Pak	36,700,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	60 Org 80 Pak	49,194,883	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas					0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						81,000,000						175,126,512		
1 01 02 1.02 40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen				40 Dok	81,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	40 Dok	175,126,512	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						40,000,000							42,242,977	
1 01 02 1.03 47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen				12 Dok	40,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		12 Dok	42,242,977	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	.				0.	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.03 51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	.				0.	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							2,842,852,000						10,959,258,100	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,487,723,500							8,084,296,500	
1 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							39,415,000	
1 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	.				0.	0				Meningkatkan kualitas		0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	RKA-SKPD										pendidikan SDM (PD-5)				
1 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 dokumen	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 dokumen	39,415,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen administrasi keuangan	%		%	100 %	1,964,900						100 %	1,964,900	
1 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN tercapainya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah				1 dokumen 1 dokumen	1,964,900	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 dokumen 1 dokumen	1,964,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							0	
1 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	231,733,600						100 %	916,176,600	
1 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				1 paket 1 paket	12,175,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 paket 1 paket	73,561,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis				966 Jenis	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	966 Jenis	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Berdaya Saing					
1 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah penyediaan bahan logistik kantor tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				4 paket 4 paket	22,758,600	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	4 paket 4 paket	76,315,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	.				0 .	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				48 exemplar 48 exemplar	7,200,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	48 exemplar 48 exemplar	7,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Prangkat Daerah jumlah penyediaan bahan/material				450 kg 450 kg	11,100,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	450 kg 450 kg	11,100,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah penyediaan fasilitas kunjungan tamu tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				3000 orang 3000 orang	87,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	3000 orang 3000 orang	348,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tercapainya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				1 kegiatan 1 kegiatan	91,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 kegiatan 1 kegiatan	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	16,500,000						100 %	3,297,435,000	
1 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	.				0 .	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0 .	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	.				0.	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	.				0.	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.					0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park		0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	.				0.	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				1 kegiatan 1 kegiatan	16,500,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	1 kegiatan 1 kegiatan	3,297,435,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	2,130,840,000						100 %	3,106,977,000	
1 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	,				0.	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	0.	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				4 rekening 4 rekening	227,760,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	4 rekening 4 rekening	227,760,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				68 orang 68 orang	1,903,080,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	68 orang 68 orang	2,879,217,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan	%		%	100 %	106,685,000						100 %	722,328,000	
1 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2 unit 2 unit	106,685,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Science Technology and Industrial Park	2 unit 2 unit	722,328,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						355,128,500							2,874,961,600	
1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0							1,437,480,800	
1 01 02 1.01 49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				1 kegiatan	0	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		1 kegiatan	1,437,480,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.01 52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						355,128,500							1,437,480,800	
1 01 02 1.02 41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa				6 kegiatan 6 kegiatan	355,128,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)		6 kegiatan 6 kegiatan	1,437,480,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah													
1 01 02 1.02 45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TOTAL							1,476,675,711,403							2,178,003,829,036	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pelaksanaan Kegiatan DAK				1 Dokumen	457,826,230	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Perencanaan Provinsi, Kabupaten/Kota	1 Dokumen	460,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	19,686,901,568						6 Jenis	32,950,078,026	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji				350 Orang	19,440,022,268	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	350 Orang	32,692,078,026	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan ASN				6 Orang	239,254,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	6 Orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 Dokumen	7,624,800	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Dinas Kesehatan	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	Jenis		Jenis	1 Jenis	121,041,700						1 Jenis	150,000,000	
1 02 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan BMD				1 Dokumen	121,041,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	6 Jenis	1,232,509,391						6 Jenis	1,284,493,097	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik				12 Jenis	39,451,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	12 Jenis	41,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan				15 Jenis	650,296,891	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	15 Jenis	651,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Rapat yang diadakan				12 Kali	81,250,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	12 Kali	82,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan				2 Jenis	51,888,300	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pajak Rokok		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	2 Jenis	52,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Jenis	7,879,200	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	1 Jenis	8,493,097	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Pusat dan Koordinasi ke Kab/Kota				6 Kali	401,744,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pajak Rokok		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Administrasi Umum	6 Kali	450,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	64,200,000						7 Jenis	69,273,830	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan				7 Jenis	64,200,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	7 Jenis	69,273,830	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	4,091,749,000						3 Jenis	4,255,550,003	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat				1000 Dokumen	5,149,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Jasa Penunjang Urusan	1000 Dokumen	5,550,003	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Rekening				3 Jenis	704,400,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pajak Rokok		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Jasa Penunjang Urusan	3 Jenis	750,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Jenis	3,382,200,000	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM	Jasa Penunjang Urusan	4 Jenis	3,500,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Mataram Timur			(PD-4)				
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	2,057,221,910					3 Jenis	1,985,387,905		
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pemelihara Rutin/Berkala				25 Unit	336,840,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	25 Unit	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				10 Unit	135,810,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	10 Unit	35,387,905	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana				2 Lokal	1,584,571,910	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Negara	2 Lokal	1,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting Persentase fasilitas keehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas keehatan yang terakreditasi Persentase fasilitas pelayanan keehatan yang menggunakan obat rasional Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80% Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase RS yang memenuhi sarana	% 85 % % % % % % % %		% 0 % % % % % % %	11.41 % 85 % 85 % 100 % 90 % 97 % 75 % 97 % 100 %	226,284,857,313						11.41 % 85 % 85 % 100 % 90 % 97 % 75 % 97 % 100 %	245,827,014,587	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		<p>prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar</p> <p>Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan</p> <p>Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB</p>													
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	<p>Jumlah Dan Jenis Obat Program Yang diadakan</p> <p>Jumlah dan Jenis Obat Program Yang Diadakan dan Distribusikan</p> <p>Jumlah Jenis Obat Program Yang Diadakan</p> <p>Jumlah Jenis Obat Yang Diadakan dan Distribusikan</p> <p>Jumlah Obat yang diadakan dan Distribusikan</p> <p>Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar</p>	Jenis Jenis Jenis Jenis Persen		Jenis Jenis Jenis Jenis Persen	3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 70 Persen	96,025,096,000					3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 70 Persen	103,925,809,016		
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit				3 Lokal	24,819,422,325	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Lokal	24,819,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan Yang diadakan				3 Paket	61,901,418,675	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol Kota Mataram, Mataram, Mataram	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Paket	61,901,418,675	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Timur							
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Sarana di Gudang Instalasi Farmasi Dikes Provinsi NTB				0 Jenis	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Jenis	301,135,341	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan				0 Jenis	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Jenis	7,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat Program Yang Didistribusikan				3 Jenis	171,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Jenis	171,624,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan Jenis obat Program yang diadakan				3 Jenis	9,132,631,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Jenis	9,132,631,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab		Kab	10 Kab	129,630,287,891						10 Kab	141,228,155,614	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana				27707 Orang	258,312,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	27707 Orang	278,390,392	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak				4200 Orang	7,673,900,969	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	DBH CHT DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	4200 Orang	7,673,900,969	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Biasa (KLB)	dan berisiko pada situasi KLB Provinsi						Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 02 02 1.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				40 Puskesmas	444,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 Puskesmas	799,514,749	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET				40 Puskesmas	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 Puskesmas	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia				35 Puskesmas	189,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	35 Puskesmas	200,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kab/kota)				10 Kabupaten / Kota	16,291,570,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	16,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga				3 Kabupaten / Kota	233,311,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	3 Kabupaten / Kota	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina Jumlah Keluarga Menggunakan Jamban Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya				40 kelompok 52000 KK 150 lokasi 35 lokasi 94 persen	1,967,276,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	40 kelompok 52000 KK 150 lokasi 35 lokasi 94 persen	4,264,283,048	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan (Pasar Sehat, sarana pendidikan, Hotel dan Sarana Tempat Ibadah) KK Dengan Akses Jamban Sehat													
1 02 02 1.02 09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi Jumlah Posyandu yang diaktifkan Jumlah Puskesmas yang dibina Pengembangan Posyandu Keluarga				1855 Kader 280 orang 377 posyandu 30 Puskesmas	796,752,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	1855 Kader 280 orang 377 posyandu 30 Puskesmas	796,752,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%				9 Kabupaten / Kota	446,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	9 Kabupaten / Kota	982,932,303	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan				4996 Orang	46,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	4996 Orang	50,316,240	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa				0 Puskesmas	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Puskesmas	260,853,194	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA				0 Puskesmas	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Puskesmas	155,319,562	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah				11 Kelompok	1,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	11 Kelompok	1,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional				10 Kabupaten / Kota	98,786,939,721	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok - Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	98,786,939,721	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan				10 Dokumen	23,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	267,716,329	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota				10 Dokumen	101,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	115,390,349	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan				10 Dokumen	649,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Dokumen	402,308,057	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	64,059,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	1 Dokumen	69,038,561	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota"				10 Kab	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kab	374,315,027	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit				0 Layanan	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	0 Layanan	7,000,000,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.02 23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC				10 Kabupaten / Kota	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Kabupaten / Kota	106,075,526	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUITE				45 RS	54,716,500	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	45 RS	101,000,841	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional				20 Kali	9,011,763	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	20 Kali	9,712,204	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang dibina				10 Tim	61,750,010	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat, Fasyankes, ASN	10 Tim	133,396,542	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	408,571,089						1 Dokumen	409,886,957	
1 02 02 1.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah				1 Dokumen	370,571,089	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	370,687,096	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan				1 Paket	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Paket	39,199,861	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	RS		RS	35 RS	220,902,333						35 RS	263,163,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit				35 RS	118,450,633	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit	35 RS	118,450,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL				10 Kabupaten / Kota	102,451,700	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Rumah Sakit	10 Kabupaten / Kota	144,713,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		%	2.5 %	783,672,984						2.5 %	1,391,381,436	
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	89,943,700						11 Dokumen	199,772,218	
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	inamJumlah dokumen rencana pemenuhan Minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB				11 Dokumen	29,983,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	SDM Kesehatan	11 Dokumen	49,337,098	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.01 02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minimal 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas Provinsi NTB				11 Dokumen	59,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	SDM Kesehatan	11 Dokumen	150,435,120	Dinas Kesehatan
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang		Orang	500 Orang	693,729,284						500 Orang	1,191,609,218	
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya				500 Orang	654,249,284	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	500 Orang	1,072,747,376	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 1.02 02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan				1 Dokumen	39,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	118,861,842	Dinas Kesehatan
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	%		%	90 %	100,229,000						90 %	113,156,458	
1 02 04 1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	18 Sarana	96,200,500						18 Sarana	96,200,500	
1 02 04 1.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi				18 Sarana	96,200,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pedandang Besar Farmasi Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	18 Sarana	96,200,500	Dinas Kesehatan
1 02 04 1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	Sarana		Sarana	3 Sarana	4,028,500						3 Sarana	16,955,958	
1 02 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi				3 Sarana	4,028,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	16,955,958	Dinas Kesehatan
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	0		0	0 0	0						0 0	1,987,436,144	
1 02 05 1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Kebijakan Germas (Kab/Kota)	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	0						0 Kabupaten/Kota	1,678,323,098	
1 02 05 1.01 01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi penyusunan				0 Kabupaten / Kota	0	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM	Kabupaten / Kota	0 Kabupaten / Kota	1,678,323,098	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Regulasi Kebijakan Germas (Kab/Kota)						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	(PD-4)				
1 02 05 1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Saluran Media yang digunakan dalam penyebarluasan informasi Kesehatan (Jenis)	Jenis		Jenis	0 Jenis	0					0 Jenis	103,576,070		
1 02 05 1.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dicetak (Jenis)				0 Jenis	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	0 Jenis	103,576,070	Dinas Kesehatan
1 02 05 1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang dibina Germas dan PHBS dan UKBM (Persen)	Persen		Persen	0 Persen	0						0 Persen	205,536,976	
1 02 05 1.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Puskesmas yang Dibina Germas dan PHBS (Puskesmas)				0 Puskesmas	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Kabupaten / Kota	0 Puskesmas	205,536,976	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,869,119,689						5,619,078,045		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						3,342,869,619							3,453,000,000	
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							0	
1 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0							0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	2,419,479,619						6 Jenis	2,508,000,000	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Tunjangan				60 Orang	2,411,799,860	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN Lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis	60 Orang	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen yang disusun				1 Dokumen	7,679,759	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis	1 Dokumen	8,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0					ASN Lingkup Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian kalibrasi dan Penunjang Medis		0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0							0	
1 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						0							0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0							0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0							0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0							0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0							0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material						0							0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0						0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	0 Jenis	903,390,000					0 Jenis	920,000,000		
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0				Jasa Penunjang Urusan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	213,690,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Penunjang Urusan	3 Rekening	220,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				254 OB	689,700,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jasa Penunjang Urusan	254 OB	700,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	3 Jenis	20,000,000					3 Jenis	25,000,000		
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara				7 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	7 Unit	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						0				Barang Milik Daerah		0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lainnya														
1 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0					Barang Milik Daerah		0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0		0	0 0	526,250,070						0 0	2,058,305,521	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	Fasyankes		Fasyankes	0 Fasyankes	422,250,070						0 Fasyankes	1,954,305,521	
1 02 02 1.01 02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun				0 Unit	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Falitas Pelayan Kesehatan	0 Unit	1,532,056,521	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						0					Falitas Pelayan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat Laboratorium kesehatan yang diadakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Falitas Pelayan Kesehatan	0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan yang dibuat				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Falitas Pelayan Kesehatan	0 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						0					Falitas Pelayan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan habis pakai kesehatan yang diadakan				300 Jenis	400,561,120		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Falitas Pelayan Kesehatan	300 Jenis	400,561,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium	Jumlah alat Labkes yang dipelihara				50 Alat	21,688,950	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Falitas Pelayan Kesehatan	50 Alat	21,688,000	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kesehatan							Mataram Timur							
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Faskes yang dibina	Fasyankes		Fasyankes	0 Fasyankes	0					0 Fasyankes	0		
1 02 02 1.02 19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						0				Fasilitas Pelayanan Kesehatan		0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Akreditasi yang diperoleh	Jenis		Jenis	2 Jenis	104,000,000					2 Jenis	104,000,000		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Akreditasi yang diperoleh				2 Jenis	104,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur			Jumlah RS yang dibina	2 Jenis	104,000,000	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0						107,772,524		
1 02 03 1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0						107,772,524		
1 02 03 1.02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah ASN yang ikut pelatihan/Magang				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Orang	107,772,524	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,518,372,129					1,705,847,677			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN	Persen		Persen	100 Persen	1,518,372,129					100 Persen	1,705,847,677		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		TEKNIS PERANGKAT DAERAH													
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	6 Jenis	736,323,738					6 Jenis	759,808,348		
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan				27 Orang	727,222,770	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Balai Pelatihan Kesehatan	27 Orang	750,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				1 Orang	9,100,968	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Balai Pelatihan Kesehatan	1 Orang	9,808,348	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Umum	Jenis		Jenis	3 Jenis	132,053,200						3 Jenis	133,493,097	
1 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yang diadakan Kertas HVS 70 gr				12 Bulan 200 Rim	60,221,200	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	12 Bulan 200 Rim	61,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak map kop unit kerja Fotocopy pulau lombok Jilid Pulau Lombok				140 Buah 21000 Lembar 120 Dokumen	64,032,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	140 Buah 21000 Lembar 120 Dokumen	64,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	7,800,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Administrasi umum	12 Bulan	8,493,097	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	562,743,291						3 Jenis	731,188,141	
1 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos/ Materai				500 Buah	5,130,291	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	500 Buah	5,532,309	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja tagihan Internet Belanja tagihan listrik Belanja tagihan telepon				12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	39,240,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	87,762,005	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor				16 Orang	518,373,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	jasa Penunjang Urusan	16 Orang	637,893,827	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Jenis		Jenis	2 Jenis	87,251,900						2 Jenis	81,358,091	
1 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara				8 Jenis	33,251,900	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	8 Jenis	26,358,091	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana				10 Gedung	54,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Barang Milik Daerah	10 Gedung	55,000,000	Dinas Kesehatan
TOTAL							260,708,262,684							298,273,502,158	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening yang dibayarkan				3 Jenis	300,000,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat NTB pada Umumnya dan RS Mata NTB pada Khususnya	3 Jenis	389,252,802	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Keamanan				38 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat NTB pada Umumnya dan RS Mata NTB pada Khususnya	38 Orang	1,344,740,398	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							368,034,214	
1 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				2 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)		2 jenis	368,034,214	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD	Tahun		Tahun	1 Tahun	10,775,500,000						1 Tahun	10,941,350,491	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Mutu Pelayanan BLUD				1 Tahun	10,775,500,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB Pada Umumnya dan RS Mata NTB pada Khususnya	1 Tahun	10,941,350,491	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%		%	75 %	194,258,000						75 %	9,361,138,950	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen		Persen	70 Persen	194,258,000						70 Persen	8,865,413,378	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				2 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	2 Paket	647,060,769	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Berdaya Saing					
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan				4 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	4 Paket	7,854,561,663	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Diadakan				1 Paket	194,258,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	1 Paket	223,396,700	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dan Jenis Obat-obatan yang diadakan				20 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat NTB pada umumnya	20 Jenis	140,394,246	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0							495,725,572	
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah			Rumah Sakit		495,725,572	Dinas Kesehatan
TOTAL							22,525,710,906							36,625,259,466	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rupiah		Rupiah	196312300000	199,355,352,000					196312300000	Rupiah	0	
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD				196312300000	199,355,352,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	RSUD Prov. NTB	196312300000	rupiah	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%		%	85 %	229,460,000,000					85 %		0	
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis sarpras yang tersedia	Jenis		Jenis	7 Jenis	227,068,004,600					7 Jenis		0	
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah bangunan yang terbangun				2 unit	164,400,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Instalasi/unit yang ada RSUD Prov. NTB	2 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia				200 unit	62,668,004,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Instalasi/unit yang ada RSUD Prov. NTB	200 unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang		orang	132403 orang	2,391,995,400					132403 orang		0	
1 02 02 1.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang yang diperiksa CD4, Viralload dan Meso ARV				90 orang	214,330,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Pasien yang berkunjung ke RSUD Prov NTB (ODHA dan masyarakat)	90 orang		0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan				40 orang 30 orang	2,177,665,000	Semua Kab/Kota,		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM	Pasien yang berkunjung ke RSUD Prov NTB	40 orang 30 orang		0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		<p>masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan kesehatan</p> <p>Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani ambulan</p> <p>Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani mobil jenazah</p> <p>Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani rumah singgah</p>				180 orang 500 orang		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		(PD-4)	(ODHA dan masyarakat)	180 orang 500 orang			
TOTAL							518,177,077,699						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional				1 Unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit	487,682,114	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	peresen		peresen	100 peresen	145,000,005						100 peresen	0		
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Sumber Daya				3 jenis	145,000,005	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		operasional rumah sakit		3 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1 02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase realisasi pendapatan BLUD	persen		persen	77.81 persen	20,500,000,000						77.81 persen	0		
1 02 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah Pendapatan BLUD				23426982332	23426982332 rupiah	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pendapatan dari BLUD		operasional rumah sakit		23426982332	23426982332 rupiah	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	presentasi SPM yang mencapai target	persen		persen	75 persen	5,890,920,213						75 persen	3,040,744,169		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	presentasi ketersediaan fasilitas pelayanan sarana, prasarana dan alat kesehatan	persenen		persenen	91 persenen	5,499,996,013						91 persenen	3,040,744,169		
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung				1 Unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	1 Unit	1,028,085,000	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Unit Gedung				1 Unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	1 Unit	1,300,736,768	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah unit Alkes				35 Unit	1,498,396,013	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	35 Unit	0	Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Unit				81 Unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	81 Unit	107,574,072	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Unit				40 Unit	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Pajak Rokok	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	40 Unit	604,348,329	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah jenis				13 Jenis	4,001,600,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatkan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan	13 Jenis	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Presentasi masyarakat yang terlayani	persen		persen	100 persen	390,924,200						100 persen	0	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Orang Terlayani				4320 orang	50,189,200	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatnya layanan kesehatan jiwa	4320 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Terlayani				35460 orang	75,020,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatnya layanan kesehatan jiwa	35460 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Orang Terlayani				310 orang	31,265,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatnya layanan kesehatan jiwa	310 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Orang Terlayani				80 orang	224,285,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatnya layanan kesehatan jiwa	80 orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Orang Terlayani				540 orang	10,165,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		meningkatnya layanan kesehatan jiwa	540 orang	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	persen		persen	80 persen	0					80 persen	0		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi				2 dokumen	0	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	DBH CHT		Rumah Sakit	2 dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	presentase kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mencapai target	persen		persen	100 persen	5,460,000,000					100 persen	0		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	presentase pembayaran gaji pegawai Non ASN	persen		persen	100 persen	5,460,000,000					100 persen	0		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai Non ASN/Kontrak				143 orang	5,460,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Jumlah Non ASN	143 orang	0	Dinas Kesehatan	
TOTAL							54,741,216,731						3,654,359,181		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02																70,938,756,387				97,595,635,061		
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	angka		angka	67 angka	49,540,260,565									67 angka	18,009,704,451	
1	02	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang	orang		orang	130 orang	10,895,622,565									130 orang	15,400,524,291	
1	02	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang				150 orang	10,895,622,565	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN				150 orang	15,400,524,291	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis	Jenis		Jenis	2 Jenis	3,285,250,000									2 Jenis	2,609,180,160	
1	02	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis				3 jenis	1,275,250,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat				3 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang				54 OB	2,010,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		masyarakat				54 OB	2,609,180,160	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	Rupiah		Rupiah	35359388000	5,359,388,000									35359388000	0	
1	02	01	1.10	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pendapatan BLUD				41896788470.65	5,359,388,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Pendapatan dari BLUD		Masyarakat					41896788470.65	0	Dinas Kesehatan
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	jumlah elemen akreditasi sesuai standar Jumlah elemen elemen akreditasi sesuai standar	elemen elemen		elemen elemen	1330 elemen 1330 elemen	4,628,495,822									1330 elemen 1330 elemen	59,050,780,166	
1	02	02	1.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah jenis prasarana dan sarana yang tersedia	Jenis		Jenis	6 Jenis	4,454,098,822									6 Jenis	8,316,721,496	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
	Provinsi															
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia				200 unit	298,161,622	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	200 unit	8,316,721,496	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia				12 jenis	3,507,632,200	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	12 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.01 19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara				5 unit	648,305,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	5 unit	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang		orang	40 orang	174,397,000						40 orang	50,734,058,671		
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani				50 Orang	174,397,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	masyarakat miskin/tidak mampu	50 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pendapatan BLUD				418967884	70.65 Rupiah	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Pendapatan dari BLUD			masyarakat miskin/tidak mampu	418967884	70.65 Rupiah	50,734,058,671	Dinas Kesehatan
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih	%		%	100 %	16,770,000,000						100 %	20,535,150,444		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah orang	orang		orang	350 orang	16,770,000,000						350 orang	20,535,150,444		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah orang				320 OB	16,770,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Tenaga Non ASN	320 OB	20,535,150,444	Dinas Kesehatan	
TOTAL							70,938,756,387							97,595,635,061		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02						5,516,591,783						13,639,039,711		
1	02	01					1,575,451,400						1,703,785,290		
1	02	01	1.02				0						0		
1	02	01	1.02	01				200 Orang	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	200 Orang	0 Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.05				0						0		
1	02	01	1.05	09				200 Orang	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	200 Orang	0 Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06					5 Jenis					5 Jenis	546,751,090	
1	02	01	1.06	02				11 Jenis	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		SDM Administrasi Umum	11 Jenis	529,962,340 Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.06	05				20 Laporan	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		SDM Administrasi Umum	20 Laporan	16,788,750 Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07					3 Jenis					3 Jenis	484,418,000	
1	02	01	1.07	02				7 Unit	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT		SDM Rumah Sakit Mandalika	7 Unit	484,418,000 Dinas Kesehatan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Alat Penunjang	Jenis		Jenis	6 Jenis	333,100,000					6 Jenis	336,410,000		
1 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis sumber daya				6 Jenis	333,100,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Operasional Rumah Sakit	6 Jenis	336,410,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang				54 OB	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Operasional Rumah Sakit	54 OB	0	Dinas Kesehatan
1 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Pemeliharaan Barang	Jenis		Jenis	12 Jenis	305,642,000					12 Jenis	336,206,200		
1 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat dan Kendaraan Dinas				61 Unit	305,642,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Unit Operasional Rumah Sakit	61 Unit	336,206,200	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%		%	75 %	2,630,036,983					75 %	10,493,040,681		
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	Persen		Persen	70 Persen	1,678,748,991					70 Persen	9,446,623,890		
1 02 02 1.01 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit				1 lokal	0		DBH CHT		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	1 lokal	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung				1 Unit	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Unit	0	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan				104 Unit	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat	104 Unit	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 12	Pengadaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana yang diadakan				4 Jenis	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	Masyarakat	4 Jenis	7,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah orang terlayani				30.384 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			Masyarakat	30.384 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit				40 Unit	1,160,748,991	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT			Masyarakat	40 Unit	1,276,823,890	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.01 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis				3 Jenis	518,000,000	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	DBH CHT			Masyarakat	3 Jenis	569,800,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Monev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab / Kota		Kab / Kota	10 Kab / Kota	951,287,992						10 Kab / Kota	1,046,416,791	
1 02 02 1.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang terlayani				4300 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4300 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang terlayani				80 Orang	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	80 Orang	0	Dinas Kesehatan
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang terlayani				1 tahun	951,287,992	Kab. Lombok Tengah, Pujut,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 tahun	1,046,416,791	Dinas Kesehatan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1 02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0						0		
1 02 02 1.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemen akreditasi yang tepenuhi				2 Dokumen	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik			2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		%	2.5 %	1,311,103,400					2.5 %	1,442,213,740		
1 02 03 1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi	Orang		Orang	200 Orang	1,311,103,400					200 Orang	1,442,213,740		
1 02 03 1.01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai non ASN/Kontrak				200 Orang	1,311,103,400	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	SDM Kesehatan	200 Orang	1,442,213,740	Dinas Kesehatan		
TOTAL							5,516,591,783						13,639,039,711		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	03						262,451,323,354						543,528,337,701		
1	03	01					46,920,559,595						47,075,859,000		
1	03	01	1.01				350,000,140						512,977,000		
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan							2 Dokumen	172,160,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA-SKPD							2 Dokumen	57,523,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD							2 Dokumen	41,825,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD							1 Dokumen	40,265,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan SKPD							1 Dokumen	36,116,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen LKPJ dan LKjIP							2 Dokumen	50,303,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	119,645,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4 Dokumen	114,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	bulan		bulan	12 bulan	40,496,781,375					12 bulan	46,478,588,000		
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	40,269,781,555	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	45,967,881,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 tahun	34,589,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 tahun	79,494,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	48,489,220	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	117,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas PUPR				12 Bulan	20,119,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	50,035,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR				12 Bulan	39,157,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	66,827,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				12 Bulan	20,721,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Bulan	55,613,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran Dinas PUPR				12 Bulan	32,574,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan	66,173,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselenggaranya Penyusunan dan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Bulan	31,349,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Bulan	75,255,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						78,158,000							84,294,000	
1 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	24,357,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	14,142,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen laporan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	23,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	25,448,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	18,066,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	42,331,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	12,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	2,373,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,122,910							0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Tahun	13,193,910	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya ASN yang kompeten sesuai tugas dan fungsi SKPD				1 Tahun	36,929,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	459,305,300						1 Tahun	0	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan				1 Tahun	16,447,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor				1 Tahun	93,090,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				1 Tahun	12,685,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	54,802,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan				1 Tahun	27,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan & minuman kunjungan Tamu				1 Tahun	50,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah dan ke luar daerah				1 Tahun	204,175,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatus PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,437,374,500							0	
1 03 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 Unit	1,432,419,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin				4 Unit	4,955,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	2,887,530,450						1 Tahun	0	
1 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat Kantor				1 Tahun	4,578,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 Tahun	496,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	155,107,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	2,231,145,450	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,161,286,920							0	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	719,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Tahun	198,196,140	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	201,214,780	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	42,626,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	75,37 %	33,264,132,639						75,37 %	23,969,943,000	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Lokasi Lokasi		Lokasi Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi	29,202,881,592						2 Lokasi 4 Lokasi	8,086,136,000	
1 03 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya				1 Dokumen	636,979,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	56,389,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	343,324,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	37,144,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Provinsi Nusa Tenggara Barat				26 Lokasi	7,355,582,592	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	26 Lokasi	1,894,422,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Volume Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing di Provinsi Nusa Tenggara Barat				618 Kubik	2,136,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	618 Kubik	2,142,520,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 02 1.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Volume Tampungan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat				148000 Kubik	18,205,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	148000 Kubik	3,224,782,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	1 Dokumen	205,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi				5 Kegiatan	524,584,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	5 Kegiatan	525,119,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Lokasi		Lokasi	19 Lokasi	4,061,251,047						19 Lokasi	15,883,807,000	
1 03 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Pengukuran dan Penggambaran Pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan AKNOP Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Provinsi				0 Dokumen 0 Dokumen	1,925,627,047	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	0 Dokumen 0 Dokumen	444,493,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan di Provinsi				3299 Meter	777,097,000	Semua Kab/Kota, Semua	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk	3299 Meter	13,674,537,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Nusa Tenggara Barat						Kecamatan, Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	mendukung pendayagunaan sumber daya air			
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi				11693 Meter	1,358,527,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	11693 Meter	1,433,527,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan				7 DI	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air	7 DI	331,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1,810,311,960							3,950,082,000	
1 03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						1,810,311,960							3,950,082,000	
1 03 03 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya dokumen perencanaan, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum				9 Dokumen	428,493,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		9 Dokumen	545,489,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 1.01 03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan				16 Lokasi	1,381,818,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan		16 Lokasi	3,404,593,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						0						100,000,000		
1 03 04 1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						0						100,000,000		
1 03 04 1.01 07	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						0						100,000,000		
1 03 05 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						0						100,000,000		
1 03 05 1.01 08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota				4 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	4 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						9,076,247,460						14,097,802,000		
1 03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						9,076,247,460						14,097,802,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 06 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				4 Dokumen	369,699,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	4 Dokumen	197,802,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 06 1.01 05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Terlaksananya Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perkotaan				172 Lokasi	8,706,548,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	172 Lokasi	13,900,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						144,000,000						1,442,666,000		
1 03 07 1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						144,000,000						1,442,666,000		
1 03 07 1.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman				2 Kawasan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	2 Kawasan	1,442,666,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07 1.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						19,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 07 1.01 03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 03 07 1.01 04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi							Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)			0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													42,552,834,000	
1 03 08 1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi													42,552,834,000	
1 03 08 1.01 01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Tersusunnya Laporan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1 Paket 2 Dokumen		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Paket 2 Dokumen	42,552,834,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Daya tumbuh wilayah strategis XXX	% %		% %	29,08 % 29,08 %	5,302,871,700						29,08 % 29,08 %	1,886,627,000	
1 03 09 1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	ABC	Dok		Dok	1 Dok	5,302,871,700						1 Dok	1,886,627,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota														
1 03 09 1.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	5,302,871,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	PNS	3 Kegiatan	1,886,627,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Jaringan Jalan Provinsi yang terkoneksi	% %		% %	85,36 % 89,22 %	165,645,200,000						85,36 % 89,22 %	405,698,823,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	Km		Km	22.81 Km	165,645,200,000						22.81 Km	405,698,823,000	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Lingkungan Penanganan Jalan/Jembatan yang disusun. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan NTB yang disusun. Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan NTB yang disusun.				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	569,369,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	795,757,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	Terlaksananya pekerjaan Leger Jalan Provinsi NTB				50 km	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	50 km	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data Base Jalan Provinsi NTB yang disusun. Jumlah Dokumen Data Base Jembatan Provinsi NTB yang disusun.				1 Dokumen 1 Dokumen	1,139,986,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen	1,103,398,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 10 1.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Berkala.				168 km	119,998,939,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	168 km	235,603,749,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan pelebaran jalan menambah lajur.				5.3 km	0	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	5.3 km	165,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Rekonstruksi.				4 km	10,946,489,000	Kab. Bima, Sanggar, Piong Kab. Bima, Sanggar, Boro	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	4 km	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Provinsi NTB yang mendapat penanganan Rehabilitasi.				0 km	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	0 km	2,031,175,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan NTB yang diganti.				15 m	32,967,872,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	15 m	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 1.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan NTB yang direhab.				0 m	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	Masyarakat Provinsi NTB	0 m	358,124,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		Pelayanan Dasar	dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 03 10 1.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan NTB. Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan bagian- bagian jalan dan SK Jalan Nasional.				2 Dokumen 175 orang	22,544,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Provinsi NTB	2 Dokumen 175 orang	76,620,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						144,000,000							1,289,618,000	
1 03 11 1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						108,000,000							992,990,000	
1 03 11 1.01 03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	tersedianya SOP penyelenggaraan tenaga kerja konstruksi				2 kegiatan	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		2 kegiatan	285,441,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	terlaksananya fasilitasi sertifikasi tenaga ahli konstruksi				2 kegiatan	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		2 kegiatan	493,361,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.01 08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan komstruksi				2 kegiatan	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		2 kegiatan	214,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						36,000,000							296,628,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 11 1.02 05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	tersedianya penyediaan data dan informasi jasa konstruksi				1 dokumen	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 dokumen	296,628,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang	persen		persen	5 persen	144,000,000						5 persen	1,364,083,701	
1 03 12 1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Meningkatnya penetapan regulasi penataan ruang di Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	72,902,700	
1 03 12 1.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				400 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN dan Masyarakat	400 Orang	72,902,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penyelengraan penataan ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	556,314,000	
1 03 12 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi ranperda RTR Kabupaten/kota				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 Kabupaten/kota	1 Dokumen	424,064,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.02 04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang				500 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan	10 Kabupaten/kota	500 Orang	132,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 12 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	125,000,000				ekonomi (PD-2)	1 Dokumen	588,580,000		
1 03 12 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang				1 Dokumen	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 kabupaten/Kota	1 Dokumen	347,795,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi/Database Pemanfaatan Ruang (kawasan)				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 kabupaten/Kota	1 Dokumen	240,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	19,000,000					1 Dokumen	146,287,001		
1 03 12 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang				2 Dokumen	19,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 1.04 03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus Pelanggaran Penataan Ruang				1 Kasus	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 Kabupaten/Kota	1 Kasus	46,287,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					403,896,000							8,321,270,650		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penyusunan perencanaan perangkat daerah Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 100 %	403,896,000						1 Dokumen 100 %	1,305,221,650	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan perencanaan perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	39,456,600						1 Dokumen	45,120,000	
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	13,022,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	14,238,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	terlaksananya koordinasi penyusunan RKA- SKPD				1 Dokumen	13,531,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	15,332,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA- skpd				1 Dokumen	12,903,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	15,549,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga NON PNS	OB		OB	45 OB	8,573,600						45 OB	133,519,000	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8,573,600	Kab. Lombok Barat, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	133,519,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4,152,000						1 Dokumen	0	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4,152,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	38,428,800						12 Bulan	74,839,650	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				12 Bulan	4,486,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	14,135,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ersedianya peralatan & perlengkapan kantor				1 Tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Aparatu PNS	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS		8,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				1 Bulan	8,046,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	1 Bulan	12,064,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				12 Bulan	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	5,290,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah				12 Bulan	25,896,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatu PNS	12 Bulan	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	246,475,000						1 Tahun	265,823,000	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 Tahun	57,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	123,635,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	6,419,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor				1 Tahun	183,056,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur PNS	1 Tahun	142,188,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	66,810,000						12 Bulan	785,920,000	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	66,810,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	222,564,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	132,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Aset -aset Tetap Kantor				12 Bulan	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	12 Bulan	30,756,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						0							7,016,049,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						0							7,016,049,000	
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				1 Tahun	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	6,288,674,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan				1 Tahun	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Tahun	727,375,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						31,398,000,100						9,672,385,210		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen RKA Tahun 2022 Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	1,389,840,100						100 %	2,583,411,210	
1 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	21,676,400						1 Dokumen	89,535,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Perangkat Daerah	RKA Tahun 2022													
1 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	24,084,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	21,676,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,815,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan RKA SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,815,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing					
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Dokumen	21,820,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56,163,200						1 Dokumen	21,388,000	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas				12 tahun	56,163,200	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Reformasi birokrasi dan transformasi	Pegawai Negeri Sipil	12 tahun	21,388,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	ASN	ASN						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing	pelayanan publik (PD-3)				
1 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							15,600,000	
1 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	15,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	72,000,000						1 Tahun	164,983,460	
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				1 Tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	8,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor				1 Tahun	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	9,864,530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat				1 Tahun	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	6,815,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Tahun	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	11,638,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan				1 Tahun	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	3,150,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				1 Tahun	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	9,257,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	72,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Negeri Sipil	1 Tahun	115,758,430	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,240,000,500						1 Tahun	1,630,287,200	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Tersedianya jasa komunikasi, sumber				1 Tahun	70,000,500	Kab. Bima, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan	Pegawai Non PNS	1 Tahun	132,308,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daya Air dan Listrik	daya listrik dan air						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			transformasi pelayanan publik (PD-3)				
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Tahun	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Non PNS	1 Tahun	22,779,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	1,170,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pegawai Non PNS	1 Tahun	1,475,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0						661,617,350	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Tahun	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Tahun	273,425,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Mesin				1 Tahun	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Tahun	268,192,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				1 Tahun	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Tahun	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	85,36 %	30,008,160,000						85,36 %	7,088,974,000	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan provinsi yang di pelihara Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Provinsi	Km Km		Km Km	956 Km 956 Km	30,008,160,000						956 Km 956 Km	7,088,974,000	
1 03 10 1.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				1 Tahun	30,008,160,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Masyarakat Pulau Sumbawa	1 Tahun	6,741,724,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 10 1.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat Pulau Sumbawa	347,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						17,611,767,000						29,637,731,350		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG						2,202,741,000							1,099,288,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,760,000						14,717,000		
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				1 Dokumen	11,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	14,717,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33,703,900						143,617,000		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan				6 Jenis	3,132,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Jenis	16,648,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor				5 Jenis	19,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	69,071,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan				2 Jenis	3,829,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	14,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya penyediaan makanan & minuman kunjungan Tamu				1 tahun	2,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 tahun	12,849,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah				1 tahun	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	30,649,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,130,867,100						59,287,000		
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air				1 tahun	24,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	34,418,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	4,314,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 Jenis	15,818,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan umum kantor Tersedianya jumlah tenaga pelayanan teknis dan perlengkapan pendukungnya				4 Jenis 70 Orang	2,101,843,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 Jenis 70 Orang	9,051,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26,410,000						881,667,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional				1 tahun	21,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 tahun	144,084,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 tahun	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 tahun	37,583,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						15,409,026,000							28,538,443,350	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						315,839,000							16,510,679,750	
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan penampung Air Lainnya yang terpelihara				78 Embung	310,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		78 Embung	16,327,267,400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing Sungai Yang Diperbaiki				2 Lokasi	4,989,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		2 Lokasi	183,412,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						15,093,187,000							12,027,763,600	
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya Jaringan Irigasi Permukaan Pekerjaan DAK				2 Lokasi	15,085,767,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan		2 Lokasi	2,615,377,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 03 02 1.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara				1200 Ha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1200 Ha	9,109,193,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi				1 tahun	7,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 tahun	303,192,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						13,394,950,000				20,964,513,004					
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	2,324,034,000						100 %	543,092,001		
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	bulan		bulan	12 bulan	54,000,000						12 bulan	112,286,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun				1 Dokumen	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1 Dokumen	112,286,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	111,692,000					1 Tahun	116,783,001		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan yang disediakan				12 bulan	872,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	12,263,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan				12 bulan	55,595,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	41,075,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				12 bulan	10,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	16,100,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung				12 bulan	5,225,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	5,025,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah dan ke luar daerah yang				12 bulan	40,000,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	42,320,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang disediakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	2,021,650,000						1 Tahun	208,002,001	
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air yang digunakan				12 bulan	55,200,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	90,669,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				12 bulan	16,450,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	32,693,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan pendukungnya yang				66 Orang	1,950,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Aparatur	66 Orang	84,640,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
		disediakan						Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan								
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	Tahun		Tahun	1 Tahun	136,692,000						1 Tahun	106,021,000		
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				12 bulan	92,100,000	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	12 bulan	52,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				2 Unit	44,592,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	2 Unit	53,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	%		%	75,37 %	11,070,916,000						75,37 %	20,421,421,003		
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	4,520,058,000						1 Tahun	6,799,949,002		
1 03 02 1.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara				100 buah	3,120,058,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kelompok Masyarakat/ P3SA	100 buah	4,542,579,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 02 1.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara				106 lokasi	1,400,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kelompok Masyarakat/ P3SA	106 lokasi	2,257,370,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	6,550,858,000					12 Bulan	13,621,472,001		
1 03 02 1.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab				30 Km	6,306,858,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	30 Km	8,796,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 02 1.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhab				1200 Ha	235,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	1200 Ha	4,489,370,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 03 02 1.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi				19 DI	9,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur	19 DI	336,102,001	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						737,995,700						981,543,600		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kelancaran tugas aparatur	100 %		100 %	100 %	580,102,600						100 %	775,783,600	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20,377,600						1 Dokumen	12,500,000	
1 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersusun				1 Dokumen	20,377,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	12,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		Orang	2 Orang	6,780,000					2 Orang	8,000,000		
1 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	6,780,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	2 Orang	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah yang dilaksanakan	Bulan		Bulan	12 Bulan	85,948,100					12 Bulan	96,128,500		
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan				7 Buah	336,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	7 Buah	294,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				1 Tahun	6,439,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	6,439,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Tahun	1,050,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	3,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah				1 Tahun	78,122,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Penguatan stabilitas ketenteraman, keterlibatan dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	86,145,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan	Orang		Orang	12 Orang	416,874,000					12 Orang	421,165,100		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah	pendukungnya yang disediakan													
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah beban jasa komunikasi, Sumber daya Listrik dn Air yang digunakan				1 Tahun	56,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	60,649,100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor dan Pendukungnya yang disediakan				1 Tahun	360,824,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Tahun	360,516,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	50,122,900						12 Bulan	237,990,000	
1 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				1 Tahun	45,372,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	33,240,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara		200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala				1 Tahun	4,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Sipil Negara	1 Tahun	4,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%		%	75,37 %	73,813,100						75,37 %	205,760,000	
1 03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengujian kualitas air Terpenuhinya jumlah laporan kegiatan pengujian kualitas air	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	60 Dokumen 60 Dokumen	73,813,100						60 Dokumen 60 Dokumen	205,760,000	
1 03 02 1.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS						73,813,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya	Reformasi birokrasi dan	Pengelolaan SDA dan		205,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewenangan Provinsi									Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	transformasi pelayanan publik (PD-3)	Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%		%	85,36 %	84,080,000						85,36 %	0	
1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	jumlah laporan kegiatan pengujian tanah dan bahan bangunan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	75 Dokumen	84,080,000						75 Dokumen	0	
1 03 10 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						84,080,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi (PD-2)	Persentase Jalan Mantap		0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
TOTAL							325,997,932,154							613,105,781,515	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	04						176,591,756,581							0					
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%		%	100 %	9,087,316,658			100 %	0			
1	04	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	193,247,640			12 Dokumen/Laporan	0			
1	04	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan					3 Dokumen	76,109,640		Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	3 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1	04	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	21,614,200		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1	04	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA				1 Dokumen	20,652,000			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	18,621,000		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA				1 Dokumen	19,525,600			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan & Laporan Bulanan				5 Laporan	36,725,200		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan	5 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat	Dokumen administrasi dan laporan keuangan	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	Dokumen/Laporan	5,931,747,398					4 Dokumen//Laporan	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah														
1 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen				1 Dokumen	5,771,256,518	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi keuangan				1 Dokumen	109,076,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	23,920,840	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	27,493,840	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Laporan administrasi keuangan	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya barang milik daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	9,867,720						1 Dokumen	0	
1 04 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan barang milik daerah				1 Laporan	9,867,720	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	104,464,080						2 Dokumen	0	
1 04 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen perencanaan				1 Dokumen	2,464,080	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dokumen kepegawaian	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Dokumen pendidikan dan pelatihan ASN				2 Dokumen	102,000,000	Kota Mataram,		Memperkuat Infrastruktur Untuk	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan	Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Fungsi							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	dalam menghadapi bencana (PD-1)				
1 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit		Unit	2 Unit	803,844,040						2 Unit	0	
1 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen				3 jenis	17,902,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	3 jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor				4 unit	86,150,340	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	4 unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis belanja				2 Jenis	28,345,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksemplar				96 eksemplar	23,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	96 eksemplar	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis				2 Jenis	141,100,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi yang dihadiri				4 Kali	506,945,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Administrasi umum kantor	4 Kali	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah	Buah		Buah	4 Buah	19,200,000						4 Buah	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 04 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah buah				4 Buah	19,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pengadaan barang milik daerah	4 Buah	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis belanja	%		%	100 %	1,418,084,180						100 %	0	
1 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis belanja				2 Jenis	3,575,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis belanja				4 Jenis	320,209,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang jasa umum kantor				28 Orang	1,094,299,680	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	28 Orang	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan, AC,laptop, computer, printer dan gedung kantor	Unit		Unit	10 Unit	606,861,600						10 Unit	0	
1 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan				19 Unit	471,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pemeliharaan Kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	19 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, Computer & printer				48 Unit	28,330,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pemeliharaan Kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	48 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya				2 Paket	106,811,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pemeliharaan Kendaraan, peralatan mesinnya dan rehabilitasi gedung kantor	2 Paket	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%		%	100 %	1,303,227,000						100 %	0	
1 04 02 1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan rumah terdampak bencana yang terdata dan terverifikasi	%		%	100 %	438,687,600						100 %	0	
1 04 02 1.01 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen pendataan rumah terdampak bencana				1 Dokumen	221,609,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persentase penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi				100 %	217,077,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	100 %	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan masyarakat terdampak bencana/terdampak relokasi program provinsi yang tersosialisasi	%		%	100 %	356,460,900						100 %	0	
1 04 02 1.02 01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi rehabilitasi rumah terdampak bencana				70 OK	151,911,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	70 OK	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
1 04 02 1.02 03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mengenai program perumahan				75 OK	204,549,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua			Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	Meningkatnya hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan	75 OK	0	Dinas Perumahan dan Permukiman

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		bencana (PD-1)	Rendah (MBR)				
1 04 02 1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Cakupan penanganan rumah terdampak bencana yang tertangani	%		%	100 %	508,078,500					100 %	0		
1 04 02 1.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase rumah yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana dan relokasi permukiman				60 Unit	508,078,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	60 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga dengan hunian layak pada kawasan permukiman	%		%	65,8 %	774,363,600					65,8 %	0		
1 04 03 1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tangga yang ditingkatkan huniannya	Unit		Unit	538 Unit	774,363,600					538 Unit	0		
1 04 03 1.02 03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah tangga yang ditangani				1770 Unit	774,363,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1770 Unit	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha		Ha	84487,8 Ha	165,426,849,323					84487,8 Ha	0		
1 04 05 1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Perencanaan dan penanganan PSU permukiman yang terlaksana	Ha		Ha	84 Ha	165,426,849,323					84 Ha	0		
1 04 05 1.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan PSU permukiman				1 Dokumen	974,243,053	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 04 05 1.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah penanganan PSU permukiman				814 Paket	164,452,606,270	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	814 Paket	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
TOTAL							176,591,756,581						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05						20,375,295,002						26,053,642,126							
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP PD	BB Nilai		0 Nilai	BB Nilai	17,772,067,442			BB Nilai	21,405,458,356				
1	05	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	906,033,300			10 Dokumen	365,181,405				
1	05	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	641,862,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	43,878,911	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	27,053,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	31,974,464	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	27,053,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	31,974,464	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD				1 Dokumen	4,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	5,509,416	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4,184,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	5,509,416	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	40,213,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	33,109,153	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	161,267,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Laporan	213,225,581	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	13,523,790,142						15 Dokumen	18,681,068,168	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan				180 Orang	13,337,495,442	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	180 Orang	18,514,058,831	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				8 Orang	91,422,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	8 Orang	13,053,609	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	29,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen	29,758,016	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD				4 Laporan	65,802,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	4 Laporan	124,197,712	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	26,286,700						2 Dokumen	16,713,918	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen 1 Laporan	26,286,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Dokumen 1 Laporan	16,713,918	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	Orang		Orang	0 Orang	0						0 Orang	213,415,799	
1 05 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				300 Stel	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	300 Stel	171,567,942	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat				50 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	50 Orang	41,847,857	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	389,108,500						8 Jenis	895,389,903	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia				5 Jenis	2,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Jenis	31,735,176	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				20 Unit/Buah	188,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	20 Unit/Buah	167,532,160	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia				5 Jenis	3,891,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Jenis	46,659,947	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia				30 Jenis	25,392,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	30 Jenis	39,881,600	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia				9 Jenis	21,009,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Jenis	29,850,368	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia				5600 Exemplar	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5600 Exemplar	23,322,323	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia				1200 Kotak	20,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1200 Kotak	39,512,867	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas				5 Jenis	120,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	5 Jenis	516,895,462	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Tersedia	Unit		Unit	9 Unit	1,902,986,000						9 Unit	60,000,000	
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Tersedia				3 Unit	1,902,986,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	3 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Penguatan stabilitas ketenteraman,	ASN		60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	Jenis		Jenis	9 Jenis	641,742,800						9 Jenis	430,352,137	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia				1000 Surat	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1000 Surat	6,257,192	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6 Rekening	131,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Rekening	34,073,749	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia				9 Orang	509,022,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	9 Orang	390,021,196	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	Unit		Unit	171 Unit	382,120,000						171 Unit	743,337,026	
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara				6 Unit	182,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	6 Unit	232,037,819	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara				40 Unit	167,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	40 Unit	376,106,922	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara				73 Unit	31,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	73 Unit	75,135,924	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara				1 Gedung	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	1 Gedung	60,056,361	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%		%	100 %	2,603,227,560						100 %	4,648,183,770	
1 05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus		Kasus	16 Kasus	1,552,828,700						16 Kasus	2,359,606,379	
1 05 02 1.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba				10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 10 Sekolah	625,588,300			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 10 Sekolah	975,204,551	Satuan Polisi Pamong Praja

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 05 02 1.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum				16 Kasus	145,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	16 Kasus	409,449,308	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Linmas yang dilaksanakan Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan				1 Kali 1 Kali	33,385,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat	1 Kali 1 Kali	116,707,334	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Simulasi Jumlah Anggota Satlinmas Yang Mengikuti Gelar Pasukan				100 Orang 600 Orang	232,993,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	100 Orang 600 Orang	275,368,211	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina				60 Orang 725 Orang	403,620,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	60 Orang 725 Orang	417,453,937	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama				1 Perjanjian Kerjasama	59,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	1 Perjanjian Kerjasama	81,025,036	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia				12 Kali	51,410,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	12 Kali	84,398,002	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus		Kasus	15 Kasus	1,000,398,760						15 Kasus	2,021,248,214	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 02 1.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat				10 Kabupaten/Kota 10 Kali	78,581,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	10 Kabupaten/Kota 10 Kali	568,329,921	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub				12 Kali 12 Kali	821,817,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	12 Kali 12 Kali	1,128,345,084	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub				15 Kasus	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat	15 Kasus	324,573,209	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang		Orang	43 Orang	50,000,100						43 Orang	267,329,177	
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor				3 Orang 40 Orang	29,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	3 Orang 40 Orang	186,186,159	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 1.03 02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat				2 Berkas 4 Jenis 2 Kali	20,000,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN	2 Berkas 4 Jenis 2 Kali	81,143,018	Satuan Polisi Pamong Praja
TOTAL							20,375,295,002							26,053,642,126	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05						9,549,333,928							14,658,455,059				
1	05	01					6,503,184,328						100 %	8,601,834,085				
1	05	01	1.01				110,009,520						1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	162,838,431				
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja tahunan yang tersusun				1 Dokumen	7,074,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	14,915,030	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun				1 Dokumen	28,373,360	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,460,751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA perubahan yang tersusun				1 Dokumen	27,166,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	43,279,316	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKJIP) yang tersusun				1 Dokumen	23,873,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	37,933,060	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang tersusun				1 Dokumen	23,522,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Provinsi NTB	1 Dokumen	23,250,274	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun Jumlah keuangan laporan keuangan triwulan SKPD yang disusun Jumlah tenaga administrasi keuangan	dokumen Bulan Laporan Orang		dokumen Bulan Laporan Orang	4 dokumen 12 Bulan 4 Laporan 10 Orang	4,147,885,308						4 dokumen 12 Bulan 4 Laporan 10 Orang	5,438,334,319	
1 05 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulan dalam satu tahun				12 Bulan	4,090,391,108	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	12 Bulan	5,384,838,481	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				10 Orang	25,892,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	10 Orang	30,214,148	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen yang disusun				4 Dokumen	12,743,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	4 Dokumen	1,297,864	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan triwulanan SKPD yang disusun				4 Laporan	18,858,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pegawai BPBD Prov. NTB	4 Laporan	21,983,825	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang	dokumen		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	25,446,394	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang disusun													
1 05 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang yang disusun				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pemerintah Daerah Provinsi	1 Dokumen	25,446,394	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan digandakan Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Laporan hasil rakor dan konsultasi keluar daerah	Eksampler Jenis Jenis Jenis Laporan		Eksampler Jenis Jenis Jenis Laporan	3.3 Eksampler 30 Jenis 10 Jenis 50 Jenis 20 Jenis 10 Laporan	203,438,000						3.3 Eksampler 30 Jenis 10 Jenis 50 Jenis 20 Jenis 10 Laporan	549,449,066	
1 05 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				10 Jenis	11,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Jenis	6,477,341	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				50 Jenis	58,872,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	50 Jenis	94,215,632	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				20 Jenis	808,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	20 Jenis	949,504	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah jenis dokumen yang dicetak dan				30 Dokumen	18,857,600	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan	Kantor BPBD Provinsi NTB	30 Dokumen	16,509,633	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Penggandaan	digandakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)				
1 05 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3300 Eksemplar	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	3300 Eksemplar	9,584,229	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil rakor dan Konsultasi daerah				10 Laporan	105,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Laporan	421,712,726	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis perlengkapan mebel yang diadakan Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan bencana	Jenis Jenis		Jenis Jenis	2 Jenis 5 Jenis	170,048,300						2 Jenis 5 Jenis	345,880,158	
1 05 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	3 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diadakan				5 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	5 Unit	266,228,580	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan yang diadakan				2 Jenis	39,117,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	BPBD Prov. NTB	2 Jenis	9,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang diadakan untuk mendukung penanggulangan				5 Jenis	130,931,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	BPBD Prov. NTB	5 Jenis	15,651,578	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		bencana						Semua Kelurahan			bencana (PD-1)				
1 05 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BPBD Prov. NTB	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air per bulan dalam satu tahun Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah surat keluar yang dibuat	Orang Jenis Jenis Surat		Orang Jenis Jenis Surat	18 Orang 5 Jenis 10 Jenis 1.25 Surat	974,441,200						18 Orang 5 Jenis 10 Jenis 1.25 Surat	1,143,964,241	
1 05 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar yang dibuat				1250 Lembar	5,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	1250 Lembar	15,035,259	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, internet dan air per bulan dalam satu tahun				4 Jenis	270,061,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	4 Jenis	323,467,725	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				10 Orang	78,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	10 Orang	59,089,433	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor				20 Orang	620,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Kantor BPBD Provinsi NTB	20 Orang	746,371,824	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	21 Unit 21 Unit	897,362,000						21 Unit 21 Unit	935,921,476	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara													
1 05 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				14 Unit	366,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	14 Unit	208,044,324	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang dipelihara				21 Unit	277,050,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	21 Unit	722,877,152	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang dipelihara				3 Jenis	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	3 Jenis	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara				10 Jenis	45,972,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	10 Jenis	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/ direhabilitasi				2 Unit	199,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Semua Peralatan dan Perlengkapan BPBD prov. NTB	2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	% %		% %	32,78 % 67,34 %	3,046,149,600						32,78 % 67,34 %	6,056,620,973	
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun	dokumen Lokasi		dokumen Lokasi	10 dokumen 10 Lokasi	0						10 dokumen 10 Lokasi	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Lokasi Sosialiliasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana													
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Lokasi Sosialiliasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Bencana				10 Lokasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	0	10 Lokasi	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah dokumen penguatan kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi DESTANA Jumlah dokumen Renkon penanggulangan Bencana yang disusun Jumlah peserta pelatihan jitupasna	Sekolah dokumen Orang		Sekolah dokumen Orang	10 Sekolah 5 dokumen 30 Orang	632,556,600						10 Sekolah 5 dokumen 30 Orang	1,477,345,519	
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi Destana Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitasi S/MAB				10 Desa 10 Sekolah	399,787,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	10 Desa 10 Sekolah	828,307,397	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Jitupasna				30 Orang	148,804,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	30 Orang	329,723,830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun				2 Dokumen	83,964,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	2 Dokumen	319,314,293	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.02 10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peserta gladi kesiapsiagaan bencana				500 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi	Lembaga Pendidikan dan Masyarakat	500 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		Bencana Dan Perubahan Iklim	bencana (PD-1)				
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis logistik yang tersedia dan didistribusikan Jumlah kejadian bencana yang tertangani Jumlah paket kebutuhan korban yang terpenuhi	jenis Bencana Paket		jenis Bencana Paket	25 jenis 95 Bencana 100 Paket	2,175,159,500						25 jenis 95 Bencana 100 Paket	3,999,305,283	
1 05 03 1.03 02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Paket Kebutuhan Korban yang Terpenuhi				100 Paket	185,225,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	100 Paket	99,207,684	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani Jumlah korban bencana yang tertolong dan terevakuasi				95 Kejadian Bencana 100 Orang	1,829,250,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	95 Kejadian Bencana 100 Orang	1,561,446,729	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah jenis Logistik yang tersedia dan didistribusikan				25 Jenis	160,683,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Dunia Usaha dan Masyarakat NTB	25 Jenis	2,338,650,870	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penyusunan regulasi Jumlah kerjasama yang dikelola	dokumen Aplikasi		dokumen Aplikasi	1 dokumen 1 Aplikasi	238,433,500						1 dokumen 1 Aplikasi	579,970,171	
1 05 03 1.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah sistem regulasi yang disusun				1 regulasi	126,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Masyarakat NTB	1 regulasi	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 1.04 03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola				1 Kerjasama	111,733,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	Masyarakat NTB	1 Kerjasama	320,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		(PD-10)					
1 05 03 1.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola				1 Aplikasi	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Masyarakat NTB	1 Aplikasi	59,970,171	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TOTAL							9,549,333,928						14,658,455,059		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	06						35,441,954,892						37,048,342,346			
1	06	01					24,287,289,592						2,793,745,204			
1	06	01	1.01				154,207,000						137,471,821			
1	06	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			1 Dok	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dok	97,088,409	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dok	24,647,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dok	40,383,412	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dok	48,310,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dok	0	Dinas Sosial
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dok	54,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dok	0	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21,537,907,967						0		
1 06 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				320 ASN	21,462,407,967	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		320 ASN	0 Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54,240,000							0 Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	21,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Dok	0 Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						505,128,625						897,461,716		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis				45 Jenis	4,556,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		45 Jenis	12,715,149 Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				3 Unit	12,210,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 Unit	28,869,986 Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				60 Jenis	29,454,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung		60 Jenis	35,327,652 Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						116,281,000						435,784,432		
1 06 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Jabatan bertambah				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Unit	101,623,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Lapangan bertambah				2 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	2 Unit	189,247,961	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit meubelair kantor bertambah				25 Unit	106,782,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	25 Unit	91,207,003	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin bertambah				4 Unit	9,498,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	4 Unit	53,706,468	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						814,200,000						848,677,222		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis				35 Jenis	9,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	35 Jenis	8,789,516	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasar pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				28 Layanan	333,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	28 Layanan	317,516,023	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	5 Jenis	31,588,638	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak yang ditugaskan				15 Orang	466,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	15 Orang	490,783,045	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,159,565,000						474,350,013		
1 06 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas dan operasional terpelihara				35 Unit	359,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	35 Unit	403,434,597	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin di pelihara				13 Unit	51,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	13 Unit	24,023,977	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang di pelihara				1 Unit	748,765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Unit	46,891,439	Dinas Sosial	
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						1,656,650,000						13,148,208,779		
1 06 02 1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0						39,976,003		
1 06 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						0						39,976,003	Dinas Sosial	
1 06 02 1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						1,656,650,000						13,108,232,776		
1 06 02 1.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				100 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	103,500,000	Dinas Sosial	
1 06 02 1.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM TKSK kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				117 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	117 Orang	85,000,000	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 02 1.02 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola LK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				50 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		50 Orang	50,970,784	Dinas Sosial
1 06 02 1.02 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Pengelola dan bantuan lembaga kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan				150 Lembaga	1,656,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		150 Lembaga	12,868,761,992	Dinas Sosial
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						545,521,400							803,377,044	
1 06 03 1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						545,521,400							803,377,044	
1 06 03 1.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Orang KPO,KTK,PMB dan OT yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal				400 Jiwa	545,521,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		400 Jiwa	803,377,044	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						5,018,665,850							4,446,527,615	
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						657,198,000							1,150,027,896	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.01 04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang diberikan alat bantu				400 Jiwa	589,617,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		400 Jiwa	825,962,211	Dinas Sosial
1 06 04 1.01 12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Penyandang disabilitas yang tertangani				400 Jiwa	67,581,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		400 Jiwa	324,065,685	Dinas Sosial
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						4,361,467,850							2,865,434,919	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti dan penanganan kasus anak dan perempuan korban tindak kekerasan				5500 Anak	4,361,467,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5500 Anak	2,865,434,919	Dinas Sosial
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						0							431,064,800	
1 06 04 1.05 11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)			431,064,800	Dinas Sosial
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN						2,812,190,000							12,912,702,446	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	SOSIAL														
1 06 05 1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						0						93,141,643		
1 06 05 1.01 01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah pengangkatan anak antar WNI				10 Anak	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Anak	93,141,643	Dinas Sosial	
1 06 05 1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						2,812,190,000						12,819,560,803		
1 06 05 1.02 01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Data Fakir Miskin Daerah cakupan provinsi yang terverifikasi dan validasi				301100 KK	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		301100 KK	633,602,100	Dinas Sosial	
1 06 05 1.02 02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial				2000 KK	2,489,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		2000 KK	9,127,206,992	Dinas Sosial	
1 06 05 1.02 03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi				1200 KK	323,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1200 KK	3,058,751,711	Dinas Sosial	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						900,500,000						2,572,056,524		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 06 1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						900,500,000						2,572,056,524		
1 06 06 1.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan				15000 Jiwa	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	15000 Jiwa	655,954,460	Dinas Sosial	
1 06 06 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan sandang				4000 Jiwa	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	4000 Jiwa	366,930,768	Dinas Sosial	
1 06 06 1.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana alam				3000 Jiwa	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3000 Jiwa	299,642,604	Dinas Sosial	
1 06 06 1.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani				900 Jiwa	398,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	900 Jiwa	676,958,986	Dinas Sosial	
1 06 06 1.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan				900 Jiwa	427,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	900 Jiwa	572,569,706	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						221,138,050						371,724,734		
1 06 07 1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						221,138,050						371,724,734		
1 06 07 1.01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana TMP/MPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi				2 Unit	85,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	2 Unit	9,280,299	Dinas Sosial	
1 06 07 1.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Sarana dan prasarana TMPN dan MPN kewenangan provinsi yang dipelihara				1 Unit	66,285,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Unit	227,206,791	Dinas Sosial	
1 06 07 1.01 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah pengamanan TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan				200 Orang	69,852,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	200 Orang	135,237,644	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							1,890,616,350						2,564,012,335	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						528,100,100						791,306,806		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18,960,000						4,226,538		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						18,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung		4,226,538	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan			elayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,150,100						138,748,297		
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11,335,300				Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)			0 Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				11000 Lembar	4,198,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	11000 Lembar	4,298,136	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksamplar				4 Eksamplar	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	4 Eksamplar	5,677,438	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 Jenis	17,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	20 Jenis	23,634,967	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan	10 Laporan	105,137,756	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333,800,000				ekonomi (PD-2)		343,832,003		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Layanan				28 Layanan	58,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	28 Layanan	59,960,062	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Yang Ditugaskan				9 Orang	270,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	9 Orang	283,871,941	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						137,190,000						304,499,968		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Umur Fungsional Kendaraan Bertambah				10 Unit	79,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 Unit	83,710,681	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Dipelihara				5 Unit	9,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	5 Unit	10,513,775	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
								Semua Kelurahan										
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang Direhabilitasi/Dipelihara				1 Unit	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial				
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,362,516,250						1,772,705,529					
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1,362,516,250						1,772,705,529					
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Yang Diberikan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dalam Panti				120 Jiwa	783,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				120 Jiwa	879,161,916	Dinas Sosial				
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah Anak Yang Diberikan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Dalam Panti				120 Jiwa	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				120 Jiwa	63,082,653	Dinas Sosial				
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Asrama dan Kelengkapannya yang Disediakan Dalam Panti				120 Jenis	72,946,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				120 Jenis	72,397,858	Dinas Sosial				
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Kelengkapan Kesehatan yang Disediakan Dalam				120 Jenis	11,138,650	Semua Kab/Kota, Semua				120 Jenis	11,565,899	Dinas Sosial				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Panti						Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Anak yang Mengikuti Bimbingan Dalam Panti				120 Anak	434,831,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	120 Anak	641,359,447	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan				5500 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	5500 Laporan	105,137,756	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,149,927,490					2,445,700,069			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						640,292,790						794,855,834		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						55,280,000						55,817,634		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah orang				3 Orang	55,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Orang	55,218,349	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dok	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dok	599,285	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,288,000						2,335,109		
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				1 Laporan	2,288,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Laporan	2,335,109	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						71,185,540						101,950,083		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	10,545,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40 Jenis	10,744,658	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	12,981,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40 Jenis	14,601,111	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar				11000 Lembar	8,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11000 Lembar	9,162,755	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksampul				4 Eksampul	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		4 Eksampul	7,569,918	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				40 Jenis	10,358,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40 Jenis	17,816,539	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah mebelair kantor bertambah				5 Jenis	21,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Jenis	42,055,102	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95,624,500							40,577,496	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebelur kantor bertambah				5 Jenis	95,624,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Jenis	40,577,496	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						303,844,750							318,346,610	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar				100 Lembar	3,753,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		100 Lembar	3,821,757	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis layanan				3 layanan	30,091,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 layanan	30,652,912	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 orang	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan		9 orang	283,871,941	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112,070,000							275,828,902	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah umur fungsional kendaraan bertambah				10 unit	51,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 unit	53,872,586	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin dipelihara				5 unit	12,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	5 unit	11,680,804	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan kantor yang rehabilitasi/dipelihara				1 unit	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 unit	210,275,512	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,509,634,700							1,650,844,235	
1 06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						1,509,634,700							1,650,844,235	
1 06 04 1.05 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan				100 orang	564,654,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	100 orang	592,757,627	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
		permakanaan di dalam panti						Semua Kelurahan								
1 06 04 1.05 02	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sandang di dalam panti				100 orang	78,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	95,044,531	Dinas Sosial		
1 06 04 1.05 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama wisma dalam panti				100 orang	45,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	46,195,847	Dinas Sosial		
1 06 04 1.05 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama/wisma di dalam panti				100 orang	55,276,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	67,875,463	Dinas Sosial		
1 06 04 1.05 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	jumlah PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti				100 orang	57,289,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	69,971,279	Dinas Sosial		
1 06 04 1.05 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah PMKS lainnya diluar HAIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti				100 o	3,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 o	3,784,959	Dinas Sosial		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.05 07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	jumlah PMKS lainya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan ketrampilan dasar dalam panti				100 orang	555,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	588,069,324	Dinas Sosial	
1 06 04 1.05 10	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume bagi PMKS lainya diluar HAIV/AIDS dan NAPZA yang teridetikasi dan dipulangkan kedaerah asal				100 orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 orang	187,145,205	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,269,826,130					2,646,361,053			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						770,836,850						985,119,322		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						59,040,000						70,268,819		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang				3 Orang	59,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Orang	70,268,819	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						111,224,850						123,571,135		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				45 Jenis	9,607,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	45 Jenis	15,424,129	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 Jenis	15,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		40 Jenis	17,890,450	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 Lembar	4,629,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10000 Lembar	4,715,428	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksamplar				4 eksamplr	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		4 eksamplr	6,939,091	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 Jenis	9,153,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		20 Jenis	9,496,042	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	67,156,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Laporan	69,105,995	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						465,332,000							489,281,678	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	1,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		100 Lembar	1,261,653	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Layanan				3 Layanan	95,842,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 Layanan	100,766,128	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				50 Jenis	8,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		50 Jenis	8,757,975	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 Orang	360,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		9 Orang	378,495,922	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135,240,000							301,997,690	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit umur Fungsional kendaraan dinas bertambah				10 Unit	87,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Unit	91,722,178	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/Bangunan Kantor yang direhabilitasi/ di pelihara				1 Unit	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,498,989,280						1,661,241,731		
1 06 04 1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						1,498,989,280						1,661,241,731		
1 06 04 1.03 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam panti				100 Orang	1,077,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	1,150,396,300	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 02	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam panti				100 Orang	54,197,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	87,749,443	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan kelengkapan pendukung dalam panti				100 Orang	162,701,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	180,799,196	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Lansia terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam panti				100 Orang	75,660,380	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan	100 Orang	77,072,809	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah orang				3 orang	92,680,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 orang	80,661,686	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 dok	437,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 dok	445,784	Dinas Sosial
1 06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,787,900							1,821,511	
1 06 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	1,787,900	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Laporan	1,821,511	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75,601,290							81,754,380	
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				45 jenis	4,518,400	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		45 jenis	4,603,456	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				40 jenis	8,801,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		40 jenis	13,463,730	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 lembar	13,351,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10000 lembar	13,602,197	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksamplar				4 Eksamplar	7,200,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		4 Eksamplar	7,569,918	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis				20 jenis	8,704,890	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		20 jenis	8,872,049	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	33,025,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Laporan	33,643,030	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60,200,000						61,541,334		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubel kantor bertambah				5 jenis	60,200,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 jenis	61,541,334	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin bertambah				5 Unit	0	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Unit	0	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						235,826,000							248,766,443	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 lembar	3,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		100 lembar	4,815,309	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis layanan				3 layanan	76,008,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 layanan	77,433,957	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				50 Jenis	1,500,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		50 Jenis	8,810,543	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang ditugaskan				9 orang	154,818,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		9 orang	157,706,634	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,810,000						41,855,340		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah umur fungsional kendaraan bertambah				10 unit	39,810,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 unit	41,855,340	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung di pelihara				1 Unit	17,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Unit	0	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,189,845,000						2,022,226,116		
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1,189,845,000						2,022,226,116		
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti				540 orang	520,880,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		540 orang	769,766,081	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti				540 Anak	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		540 Anak	145,615,792	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar di penuhi kebutuhan				540 Anak	24,954,000	Semua Kab/Kota,		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar		540 Anak	21,011,780	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti				540 Anak	57,001,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	540 Anak	58,067,792	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam panti				540 Anak	334,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	540 Anak	593,018,999	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang di berikan layanan reunifikasi keluarga di dalam panti				540 Anak	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	540 Anak	346,954,595	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan				10 Laporan	12,449,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	10 Laporan	87,791,077	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,365,415,600				2,780,894,584				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						556,447,500						661,942,995		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21,220,000						57,321,104		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang				3 orang	15,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 orang	34,611,349	Dinas Sosial
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 dok	5,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dok	22,709,755	Dinas Sosial
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						57,434,500						69,385,029		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis				20 jenis	6,224,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 jenis	6,341,909	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				100 jenis	10,720,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 jenis	10,940,214	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar				10000 lembar	6,917,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					10000 lembar	7,045,070	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah eksamplass				4 eksamplass	2,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					4 eksamplass	2,649,471	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan				20 bahan	15,051,900	Semua Kab/Kota, Semua					20 bahan	15,808,513	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan				4 laporan	16,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 laporan	26,599,852	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						74,295,000						81,756,695		
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel				10 unit	74,295,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				10 unit	15,770,663	Dinas Sosial	
1 06 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin				100 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 unit	65,986,032	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301,238,000						326,194,092		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lembar				100 lembar	1,788,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 lembar	1,839,910	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan				3 layanan	114,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 layanan	120,330,161	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang				6 orang	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 orang	204,024,021	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102,260,000						127,286,075		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				6 unit	43,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 unit	32,045,988	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit				100 unit	10,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100 unit	13,573,284	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan gedung				1 unit	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 unit	81,666,803	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,808,968,100						2,118,951,589		
1 06 04 1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti						1,808,968,100						2,118,951,589		
1 06 04 1.02 01	Pengasuhan	Jumlah anak terlantar				80 orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	63,082,653	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 02	Penyediaan Makanan	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan sandang di dalam panti				80 orang	1,026,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	1,158,476,136	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 03	Penyediaan Sandang						41,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan		0	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 04 1.02 04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan sarana prasarana asrama /wisma di dalam panti				80 orang	44,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				80 orang	75,825,349	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang dipenuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti				80 orang	14,178,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	12,826,806	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial di dalam panti				80 orang	208,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	294,448,799	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberik layanan reunifikasi keluarga didalam panti				80 orang	309,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			80 orang	394,434,805	Dinas Sosial	
1 06 04 1.02 13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah laporan				10 laporan	104,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 laporan	119,857,041	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						2,420,259,900					2,566,217,074			
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						884,860,900						820,043,686		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						97,153,400						50,182,500		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah orang				3 Orang	90,200,000	Semua Kab/Kota, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	3 Orang	36,182,500	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	ASN							Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	6,953,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dokumen	14,000,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173,635,500						182,567,189		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	7,398,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	20 Jenis	7,507,361	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	18,043,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	20 Jenis	23,130,306	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				35 Jenis	5,337,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	35 Jenis	5,434,991	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan				10000 Lembar	6,191,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	10000 Lembar	6,304,900	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											dasar pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksamplar				576 eksemplar	6,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)		576 eksemplar	7,569,918	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan				20 Bahan	82,165,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)		20 Bahan	83,730,657	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				4 Laporan	48,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)		4 Laporan	48,889,056	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65,145,000							65,432,233	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel bertambah				10 Unit	65,145,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Unit	65,432,233	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						499,702,000							521,861,764	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	2,952,000	Semua Kab/Kota, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar		100 Lembar	3,006,939	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	106,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Layanan	108,817,577	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				13 Orang	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	13 Orang	410,037,248	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						49,225,000						0		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	29,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	5 Unit	0	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/bangunan kantor terpelihara				1 Unit	19,795,000	Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Unit	0	Dinas Sosial	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,535,399,000						1,746,173,388		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti						1,535,399,000						1,746,173,388		
1 06 04 1.01 01	Penyediaan Permakanaan	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dasar dalam Panti				100 Jiwa	1,281,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Jiwa	1,457,209,300	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 02	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti				100 Jiwa	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Jiwa	100,000,000	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti				100 Jiwa	109,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Jiwa	111,446,021	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Panti				100 Orang	48,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	51,475,445	Dinas Sosial	
1 06 04 1.01 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti				100 Jiwa	25,564,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Jiwa	26,042,622	Dinas Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2,046,074,060							2,499,463,416		
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						531,863,300						839,896,007		
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17,600,000						36,293,552		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				3 Orang	17,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Orang	27,461,981	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dokumen	8,831,571	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29,873,300						120,143,960		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	9,053,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	20 Jenis	10,000,000	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				30 Jenis	12,120,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	30 Jenis	8,903,380	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetakan dan penggandaan				10000 Lempar	1,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10000 Lempar	2,738,417	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				576 eksemplar	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		576 eksemplar	7,569,918	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				10 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10 Laporan	90,932,245	Dinas Sosial
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						421,380,000							369,117,633	
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	2,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		100 Lembar	3,238,242	Dinas Sosial
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	28,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 Layanan	18,924,796	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				11 Orang	390,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		11 Orang	346,954,595	Dinas Sosial
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63,010,000							314,340,862	
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	58,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Unit	99,660,079	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				5 Unit	4,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Unit	4,405,271	Dinas Sosial
1 06 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung/bangunan kantor terpelihara				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Unit	210,275,512	Dinas Sosial
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1,514,210,760							1,659,567,409	
1 06 04 1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						1,514,210,760							1,659,567,409	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 04 1.04 01	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Panti				100 Orang	958,125,000	Kab. Lombok Timur, Lenek, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	1,018,758,572	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 02	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Panti				100 Orang	33,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	51,228,371	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dan sarana/ prasaranan dalam Panti				100 Orang	8,406,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	16,480,343	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Panti				100 Orang	3,591,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	7,845,905	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Panti				100 Orang	129,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	104,086,378	Dinas Sosial	
1 06 04 1.04 06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Panti				100 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	100 Orang	1,545,525	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						25,560,000						34,384,251		
1 06 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				5 Orang	19,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		5 Orang	26,530,461	Dinas Sosial	
1 06 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	6,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		1 Dokumen	7,853,790	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160,815,000						175,485,637		
1 06 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 Jenis	6,355,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		20 Jenis	6,340,858	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				3 Jenis	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		3 Jenis	26,137,246	Dinas Sosial	
1 06 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Kantor				20 Jenis	10,421,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		20 Jenis	11,035,469	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Lembar Bahan Cetak dan Penggandaan				10000 Lempar	8,060,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		10000 Lempar	8,249,108	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				36 eksemplar	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		36 eksemplar	5,677,438	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan				15 Jenis	5,578,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		15 Jenis	5,548,119	Dinas Sosial
1 06 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				30 Laporan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		30 Laporan	112,497,399	Dinas Sosial
1 06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						69,948,890							94,308,567	
1 06 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit meubelair Kantor bertambah				25 Unit	69,948,890	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		25 Unit	94,308,567	Dinas Sosial

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
1 06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593,275,000						592,493,309		
1 06 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lembar				100 Lembar	4,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Lembar	4,089,858	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan				3 Layanan	48,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Layanan	52,200,895	Dinas Sosial	
1 06 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang tenaga kontrak				17 Orang	540,000,000	Kota Bima, Asakota, Jatiwangi			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	17 Orang	536,202,556	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						226,612,000						297,413,683		
1 06 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas terpelihara				5 Unit	79,620,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	5 Unit	79,631,336	Dinas Sosial	
1 06 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				5 Unit	6,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	5 Unit	7,506,835	Dinas Sosial	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan			dasar pengembangan ekonomi (PD-2)				
1 06 04 1.03 05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar				50 Orang	86,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	50 Orang	89,494,309	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti				50 Orang	75,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	50 Orang	74,016,980	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					7,569,918	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk				50 Orang	47,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	50 Orang	56,406,406	Dinas Sosial	
1 06 04 1.03 12	Pemusararaan	Jumlah Lansia terlantar dalam panti yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis				100 Orang	18,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar pengembangan ekonomi (PD-2)	100 Orang	13,714,168	Dinas Sosial	
TOTAL							52,382,533,002						57,520,855,951		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	07						21,700,294,719							25,918,356,125					
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	19,536,094,379			BB Nilai	23,197,426,890			
2	07	01	1.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	257,235,500			23 Dokumen	284,329,700			
2	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	119,828,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	131,844,405	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	15,252,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	16,777,761	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	17,114,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	18,826,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	10,095,460	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	11,105,094	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	7,015,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	8,047,578	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen			5 Dokumen	11,721,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	5 Dokumen	13,657,644	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	76,207,040	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	84,070,718	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	16,802,091,529						9 Dokumen	20,489,028,753	
2 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				215 Orang	16,677,651,629	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	215 Orang	20,352,144,566	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Orang	106,670,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Orang	117,337,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				2 Dokumen	11,057,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	2 Dokumen	12,163,888	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	6,712,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	7,383,299	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah BMD	Laporan		Laporan	1 Laporan	10,133,200						1 Laporan	25,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	10,133,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Laporan	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelatihan	Orang		Orang	182 Orang	25,546,200						182 Orang	38,363,160	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang di diklat Formal				177 Orang	25,546,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	177 Orang	38,363,160	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi umum	Dokumen		Dokumen	28 Dokumen	189,673,750						28 Dokumen	270,963,751	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				11 Jenis	6,629,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Jenis	7,301,866	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				8 Jenis	74,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	8 Jenis	82,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				30 Jenis	20,373,250	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	30 Jenis	26,504,251	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				7 Eksemplar	8,578,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	7 Eksemplar	10,294,284	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				7 Eksemplar	9,306,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	7 Eksemplar	10,236,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				263 Orang	12,840,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	263 Orang	14,126,750	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				15 Orang/Tahun	56,995,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	15 Orang/Tahun	120,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Unit		Unit	1 Unit	845,000,000						1 Unit	600,000,000	
2 07 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				1 Unit	845,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	600,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah	Orang		Orang	62 Orang	1,266,869,200						62 Orang	1,334,444,076	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				139 Surat	1,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	139 Surat	1,548,800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				4 Rekening	314,060,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 Rekening	352,351,454	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				38 Orang	951,403,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	38 Orang	980,543,822	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	139,545,000						64 Unit	155,297,450	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan				12 Unit	83,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa	12 Unit	92,250,400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Semua Kelurahan		Berdaya Saing	(PD-3)	Tenggara Barat			
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	39,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Gedung	44,171,050	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				11 Jenis	16,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 Jenis	18,876,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%		%	85 %	99,145,600						85 %	115,431,603	
2 07 02 1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	99,145,600						2 Dokumen	115,431,603	
2 07 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan				1 Dokumen	74,334,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang dihasilkan				1 Dokumen	24,811,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Dokumen	30,431,603	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	17 %	480,684,940						17 %	576,712,742	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Bebas Kompetensi	%		%	17 %	427,685,700						17 %	518,712,742	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti				300 Orang	379,999,900	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan	Meningkatkan kualitas	Pencari Kerja	300 Orang	466,025,748	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pemagangan Luar Negeri						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pendidikan SDM (PD-5)				
2 07 03 1.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan pemagangan				2 Dokumen	47,685,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pencari Kerja	2 Dokumen	52,686,994	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi	LPK		LPK	40 LPK	52,999,240						40 LPK	58,000,000	
2 07 03 1.02 01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang di Akreditasi				40 LPK	52,999,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	40 LPK	58,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	51,09 %	1,004,928,400						51,09 %	1,284,310,533	
2 07 04 1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja AKAD/AKL Yang Dibina	Orang		Orang	160 Orang	258,870,400						160 Orang	303,566,600	
2 07 04 1.01 04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja AKAD/AKL Yang Dibina				30 Orang	258,870,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pencari Kerja	30 Orang	303,566,600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Orang		Orang	1750 Orang	124,658,000						1750 Orang	129,658,000	
2 07 04 1.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair				1750 Orang	124,658,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pencari Kerja	1750 Orang	129,658,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 07 04 1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	Orang		Orang	23310 Orang	589,401,300						23310 Orang	794,085,933	
2 07 04 1.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah PMI Yang Bermasalah Ditangani				1750 Orang	156,116,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	1750 Orang	281,120,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke Luar Negeri Yang Dilayani DI LTSA				21500 Orang	329,005,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	21500 Orang	398,336,833	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.04 04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari Kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan				60 Orang	104,280,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Pekerja Migran Indonesia	60 Orang	114,629,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 04 1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani	Orang		Orang	60 Orang	31,998,700						60 Orang	57,000,000	
2 07 04 1.06 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan TKA Yang Dilayani				60 Orang	31,998,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Tenaga Kerja Asing	60 Orang	57,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%		%	22 %	324,349,300						22 %	388,419,557	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan		Perusahaan	90 Perusahaan	232,938,500						90 Perusahaan	282,999,200	
2 07 05 1.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Industrial Dan Jamsosteknya				90 Perusahaan	134,184,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan dan Pekerja	90 Perusahaan	169,210,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian Kerjasama Tripartit				11 Lembaga	98,754,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan dan Pekerja	11 Lembaga	113,788,700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMPK/UMK Yang Disahkan	Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	91,410,800						11 Dokumen	105,420,357	
2 07 05 1.03 01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah UMP/ UMK Yang Disahkan				11 Dokumen	91,410,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Provinsi dan Kab/Kota	11 Dokumen	105,420,357	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	255,092,100						22 %	356,054,800	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	255,092,100					1055 Perusahaan	356,054,800		
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya				75 Perusahaan	84,638,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	75 Perusahaan	102,101,462	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang dibina pelaksanaan norma ketenagakerjaan				65 Perusahaan	82,083,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	65 Perusahaan	121,049,753	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya				85 Perusahaan	88,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	85 Perusahaan	132,903,585	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						224,802,620						0		
3 32 02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan baru transmigrasi	%		%	95 %	103,979,320						95 %	0	
3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	103,979,320						1 Dokumen	0	
3 32 02 1.01 02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen NKSAD				1 Dokumen	49,999,840	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi (PD-2)	Calon Warga Transmigrasi	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3 32 02 1.01 03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi SKHPL dan IPPKH				1 Dokumen	53,979,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Calon Warga Transmigrasi	1 Dokumen	0	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		dan Berkeadilan	pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yang dibangun	%		%	100 %	60,000,000						100 %	0	
3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan dalam 1 provinsi	KK		KK	20 KK	60,000,000						20 KK	0	
3 32 03 1.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah yang ditempatkan ke luar provinsi				20 kk	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Warga Transmigran	20 kk	0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3 32 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yang dikembangkan	%		%	75 %	60,823,300						75 %	0	
3 32 04 1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Peserta Bimtek	Orang		Orang	60 Orang	60,823,300						60 Orang	0	
3 32 04 1.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Transmigran Peserta Bimbingan Teknis				60 Orang	60,823,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		60 Orang	0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						1,945,708,390						2,390,744,112		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	1,300,615,540						BB Nilai	1,547,708,257	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	35,511,000					23 Dokumen	39,063,024		
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	8,877,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	8,877,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	8,877,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	8,877,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	9,765,756	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	49,131,400					1 Dokumen	54,046,344		
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	41,197,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Dokumen	45,319,461	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	7,933,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Laporan	8,726,883	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	10,054,940						2 Dokumen	15,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	10,054,940	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan	Orang		Orang	5 Orang	4,366,000						5 Orang	6,550,500	
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat Formal				5 Orang	4,366,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN UPTD BLKDLN	5 Orang	6,550,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	259,341,700						1 Dokumen	471,971,880	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				25 Jenis	16,126,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	25 Jenis	17,739,447	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				15 Jenis	122,797,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	15 Jenis	285,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				15 Jenis	16,558,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	15 Jenis	21,526,791	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				5 Eksemplar	11,980,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	5 Eksemplar	14,376,252	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				6 Eksemplar	9,568,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	6 Eksemplar	10,525,185	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				250 Orang	28,710,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	250 Orang	31,581,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				5 Orang/Tahun	53,600,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	5 Orang/Tahun	91,223,205	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	731,575,500						54 Orang	738,736,309	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				146 Surat	1,760,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	146 Surat	1,936,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				6 Rekening	122,759,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BLKDLN	6 Rekening	135,036,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa pelayanan Umum Kantor				13 Orang	607,056,100	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	BLKDLN	13 Orang	601,764,309	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(PD-3)				
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	210,635,000						64 Unit	222,340,200	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				7 Unit	87,240,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	7 Unit	96,340,200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	98,430,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	1 Gedung	98,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				23 Jenis	24,965,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPTD BLKDLN	23 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%		%	17 %	645,092,850						17 %	843,035,855	
2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang		Orang	128 Orang	613,191,200						128 Orang	811,134,065	
2 07 03 1.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				128 Orang	613,191,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pencari Kerja/ Calon Tenaga Kerja	128 Orang	811,134,065	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Yang Dimonev Pasca Pelatihan Berbasis	OT		OT	20 OT	31,901,650						20 OT	31,901,790	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Provinsi	Kompetensi dan Jumlah Dokumen Monevi Pasca Pelatihan.													
2 07 03 1.04 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)				20 OT	31,901,650	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pencari Kerja	20 OT	31,901,790	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,124,855,500						1,379,616,492		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	2,519,134,800						BB Nilai	681,819,716	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	17,263,000						23 Dokumen	19,987,220	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,023,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,704,545	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2,118,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,058,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,828,130	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,064,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,704,545	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	15,894,300						1 Dokumen	17,489,340	
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	10,779,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	11,858,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	5,115,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Dokumen	5,631,340	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	4,678,200						2 Dokumen	10,000,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	4,678,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Mendapat Pelatihan	Orang		Orang	9 Orang	170,297,000						9 Orang	187,450,780	
2 07 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang di diklat formal				9 Orang	170,297,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	9 Orang	187,450,780	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	89,178,300						1 Dokumen	116,752,986	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				5 Jenis	1,759,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	5 Jenis	1,940,840	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				5 Jenis	24,998,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	5 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				10 Jenis	16,998,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	10 Jenis	22,330,022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				1 Eksemplar	4,135,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Eksemplar	5,090,316	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				6 Eksemplar	7,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Eksemplar	8,712,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				150 Orang	3,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	150 Orang	5,263,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				8 Orang/Tahun	30,587,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	8 Orang/Tahun	45,916,308	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	277,040,000						54 Orang	258,860,490	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				115 Surat	2,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	115 Surat	2,582,490	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	34,740,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Rekening	38,478,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa (elayanan Umum Kantor				6 Orang	240,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	6 Orang	217,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	1,944,784,000						64 Unit	71,278,900	
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				3 Unit	18,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Unit	21,780,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	1,916,944,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	1 Gedung	38,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				3 Jenis	9,840,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok	3 Jenis	10,998,900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	605,720,700						22 %	697,796,776	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	605,720,700						1055 Perusahaan	697,796,776	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma				105 Perusahaan	105,506,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Penguatan stabilitas ketenteraman,	Perusahaan	105 Perusahaan	121,527,257	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kerjanya Di Pulau Lombok						Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)				
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok				500 Orang	500,214,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	500 Orang	576,269,519	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						591,682,650						705,775,961		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	366,871,150						BB Nilai	446,825,791	
2 07 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Perencanaan Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	23 Dokumen	17,499,800						23 Dokumen	19,250,000	
2 07 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2,499,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	2,750,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3,777,400						1 Dokumen	3,778,830	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	3,777,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Dokumen	3,778,830	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	841,500						2 Dokumen	7,500,000	
2 07 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah BMD				1 Laporan	841,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Laporan	7,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	70,993,450						1 Dokumen	128,446,585	
2 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik				5 Jenis	1,489,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Jenis	1,650,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor				5 Jenis	24,877,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	5 Jenis	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK				18 Jenis	3,200,150	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	18 Jenis	41,650,585	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				3 Eksemplar	4,435,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	3 Eksemplar	5,346,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				1 Eksemplar	8,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	1 Eksemplar	8,800,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				200 Orang	3,991,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	200 Orang	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat				8 Orang/Tahun	25,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	8 Orang/Tahun	37,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Orang		Orang	54 Orang	203,902,000						54 Orang	206,988,166	
2 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				96 Surat	1,874,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	96 Surat	2,063,050	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Rekening	20,030,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	3 Rekening	22,052,250	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor				5 Orang	181,998,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaa n dan K3 Pulau Sumbawa	5 Orang	182,872,866	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit	64 Unit	69,857,000						64 Unit	80,862,210	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah														
2 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				4 Unit	40,860,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	4 Unit	48,945,710	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Gedung	24,997,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	1 Gedung	27,500,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				2 Jenis	4,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPDT Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa	2 Jenis	4,416,500	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%		%	22 %	224,811,500						22 %	258,950,170	
2 07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan		Perusahaan	1055 Perusahaan	224,811,500						1055 Perusahaan	258,950,170	
2 07 06 1.01 01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa				85 Perusahaan	76,576,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	85 Perusahaan	88,204,125	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 07 06 1.01 02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Ditangani Di Pulau Sumbawa				30 Perusahaan	72,118,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perusahaan	30 Perusahaan	83,069,402	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2 07 06 1.01 03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa				110 Perusahaan	76,116,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Perusahaan	110 Perusahaan	87,676,643	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
TOTAL							27,587,343,879							30,394,492,690	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 08 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	119,425,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 dokumen	48,348,244	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	1 dokumen	6,554,194,861						1 dokumen	8,310,714,529	
2 08 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang				59 Orang	6,533,085,461	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	59 Orang	8,287,623,828	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang				1 Orang	16,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang	17,783,877	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	4,364,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,306,824	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,159,400						1 Dokumen	3,387,278	
2 08 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah unit				1 Unit	6,159,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	3,387,278	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	1 dokumen	381,521,700						1 dokumen	353,354,563	
2 08 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				20 jenis	12,447,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 jenis	8,200,848	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis				25 jenis	94,245,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 jenis	30,434,704	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis				15 jenis	97,358,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 jenis	49,289,838	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKH				4 SKH	19,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 SKH	26,467,285	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang				150 orang	57,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	150 orang	41,171,332	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen				1 Dokumen	100,170,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	197,790,556	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang	unit		unit	16 unit	354,979,800						16 unit	310,412,596	
2 08 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				8 unit	76,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 unit	267,493,354	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit				8 Unit	278,869,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Unit	42,919,242	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	jenis		jenis	4 jenis	681,288,000						4 jenis	681,346,116	
2 08 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				275 surat	1,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	275 surat	1,650,863	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis				2 jenis	124,746,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 jenis	125,366,707	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis				2 Jenis	5,998,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis	13,365,311	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum				11 orang	549,293,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 orang	540,963,235	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan	jenis		jenis	4 jenis	417,116,000						4 jenis	359,754,567	
2 08 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan				30 Unit	256,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	294,348,291	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis				15 jenis	136,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	15 jenis	35,597,162	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah jenis				1 jenis	24,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 jenis	29,809,114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%		%	52.17 %	1,056,316,200						52.17 %	2,440,478,339	
2 08 02 1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2. Jumlah Perencana PPRG di Perangkat Daerah Provinsi NTB 3. Jumlah Desa Model PPRG di Provinsi NTB	Orang Orang		Orang Orang	20 Orang 46 Orang	266,343,500						20 Orang 46 Orang	2,399,214,653	
2 08 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB				20 orang	192,665,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 orang	2,218,627,294	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB				46 Orang	73,678,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46 Orang	180,587,359	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 02 1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Inisiator Pemimpin Perempuan	Orang		Orang	16 Orang	754,898,700						16 Orang	41,263,686	
2 08 02 1.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Perempuan Partai Politik Ikut FGD Jumlah Peserta Bimtek Inisiator Pemimpin Perempuan				16 Orang 20 Orang	754,898,700	Kota Mataram, Cakranegara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Orang 20 Orang	41,263,686	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 02 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2. Jumlah Peserta Pertemuan Sekolah perempuan	Orang		Orang	30 Orang	35,074,000						30 Orang	0	
2 08 02 1.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta FGD Puspa Jumlah Peserta pertemuan Sekolah Perempuan				30 Orang 25 Orang	35,074,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1. Anggota Puspa Provinsi NTB 2. Sekolah perempuan Kab Kota	30 Orang 25 Orang		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		%	75,52 %	641,693,000						75,52 %	757,546,401	
2 08 03 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/fgd /rakor	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	155,170,900						4 kegiatan	111,895,897	
2 08 03 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah keluarga PMI yang mendapatkan pembinaan jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO jumlah peserta yang mengikuti FGD jumlah peserta yang mengikuti rakor				60 orang 150 orang 30 orang 135 orang	155,170,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	60 orang 150 orang 30 orang 135 orang	111,895,897	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan/fgd/rakor /penerima bantuan	orang		orang	280 orang	486,522,100						280 orang	645,650,504	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 03 1.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah peserta yang mengikuti bimtek SDM layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak jumlah sekolah perempuan yang terbentuk				30 orang 4 kabupaten	325,986,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 orang 4 kabupaten	485,114,904	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03 1.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah perempuan penyintas yang mendapatkan pelatihan jumlah perempuan penyintas yang menerima kebutuhan spesifik jumlah peserta yang mengikuti FGD P3AKS jumlah peserta yang mengikuti Rakor Pokja P3AKS				60 orang 90 orang 60 orang 40 orang	160,535,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Senggigi Kab. Lombok Tengah, Pujut, Kuta Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	0	60 orang 90 orang 60 orang 40 orang	160,535,600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Index Ketahanan Keluarga	%		%	5 %	480,700,000						5 %	525,129,408	
2 08 04 1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa		Desa	3 Desa	480,700,000						3 Desa	525,129,408	
2 08 04 1.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih				60 Orang	304,006,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	60 Orang	363,018,623	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 04 1.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota yang memiliki PUSPAGAewenangan Provinsi				50 persen	176,693,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 persen	162,110,785	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender	-		-	1 -	74,517,100						1 -	90,540,440	
2 08 05 1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	74,517,100						1 Dokumen	90,540,440	
2 08 05 1.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak				1 dokumen	74,517,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	90,540,440	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						831,239,100							618,134,169	
2 08 06 1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						831,239,100							618,134,169	
2 08 06 1.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						253,370,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						292,754,857	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 06 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						577,868,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						325,379,312	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						844,078,400						834,988,306		
2 08 07 1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						153,550,000						17,000,000		
2 08 07 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi						153,550,000						17,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						69,555,000						176,788,651		
2 08 07 1.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						69,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					176,788,651	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07 1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						620,973,400						641,199,655		
2 08 07 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						350,401,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					477,930,107	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 08 07 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						270,571,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					163,269,548	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						1,877,693,400						1,213,386,743		
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pendewasaan Usia Perkawinan	tahun		tahun	20.23 tahun	1,100,168,900					20.23 tahun	439,459,838		
2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen		persen	80 persen	1,012,314,300					80 persen	366,316,710		
2 14 02 1.01 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi GDPK				60 Orang	143,891,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	60 Orang	95,975,765	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 1.01 07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat				160 Orang	868,422,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	160 Orang	270,340,945	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 02 1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Model Strategi yang dikembangkan	model		model	1 model	87,854,600					1 model	73,143,128		
2 14 02 1.02 04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	jumlah Peserta Bintek Kampung KB				40 orang	87,854,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	40 orang	73,143,128	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	0		0	0 0	374,050,600					0 0	380,755,483		
2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE KKBPk Yang dihasilkan	desain		desain	1 desain	218,532,200					1 desain	223,562,375		
2 14 03 1.01 05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPk	Jumlah mitra kerja yang difasilitasi				4 mitra	218,532,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	4 mitra	223,562,375	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 03 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan KKA dan KMS	persen		persen	80 persen	155,518,400					80 persen	157,193,108		
2 14 03 1.02 02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kader yg ikut Bintek				500 orang	155,518,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	500 orang	157,193,108	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak	%		%	71,15 %	403,473,900					71,15 %	393,171,422		
2 14 04 1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program	Jumlah kader yang mendapat bimbingan	orang %		orang %	240 orang 50 %	280,990,900					240 orang 50 %	207,096,218		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	penguatan peyiapan pengasuh 100 HPK Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memiliki 1000 HPK													
2 14 04 1.01 14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kader yang mendapat bimbingan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK				240 orang	280,990,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	240 orang	207,096,218	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 04 1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah BKB yang holistik integratif dengan posyandu dan PAUD	%		%	80 %	122,483,000						80 %	186,075,204	
2 14 04 1.02 04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan program ketahanan keluarga melalui Tribina, UPPKS dan Pemberdayaan ekonomi keluarga				300 Orang	122,483,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	300 Orang	186,075,204	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						558,161,000				1,022,826,690				
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	nilai saki	%		%	80 %	306,931,000						80 %	398,058,474	
2 08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bahan yang di fotocopy	lembar		lembar	5246 lembar	12,044,500						5246 lembar	20,154,381	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kelancaran tugas perkantoran				95 %	10,244,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		fotocopy dan penggandaan	95 %	11,921,371	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya foto copy bahan updt ppa				60000 lembar	1,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		fotocopy dan penggandaan	60000 lembar	8,233,010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan peralatan,meubleir kantor dan kendaraan dinas yang disediakan	paket		paket	1 paket	25,516,500						1 paket	39,583,533	
2 08 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kelancaran tugas kantor				95 %	25,516,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			barang dan jasa	95 %	39,583,533	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jasa pelayanan umum yang memberikan pelayanan terhadap korban	orang		orang	8 orang	269,370,000						8 orang	338,320,560	
2 08 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kelancaran tugas dinas				95 %	29,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		tenaga teknis administrasi	95 %	7,228,836	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase klien yang dilayani				100 %	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		tenaga teknis administrasi	100 %	331,091,724	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%		%	75,52 %	188,230,000						75,52 %	564,407,923	
2 08 03 1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	jumlah perempuan yang di rujuk oleh kabupaten kota	orang orang		orang orang	50 orang 50 orang	188,230,000						50 orang 50 orang	564,407,923	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perempuan yang diterima dari kabupaten kota tersedianya bahan penunjang adminstrasi UPTD PPA	paket		paket	1 paket						1 paket			
2 08 03 1.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dari Kabupaten/Kota dan Polda nTB				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	perempuan korban kekerasan	0 Orang	376,271,949	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah klien yang diterima dari Kab/kota dan polda ntb				50 Orang	188,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		perempuan korban kekerasan	50 Orang	188,135,974	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan anak perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	persen		persen	75.52 persen	63,000,000					75.52 persen	60,360,293		
2 08 07 1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	jumlah anak perlindungan khusus yang diterima di kabupaten/kota	orang		orang	70 orang	63,000,000					70 orang	60,360,293		
2 08 07 1.02 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah klien yang diterima dari Kabuapten/Kota dan Polda nTB				70 Orang	63,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Anak dengan perlindungan khusus	70 Orang	60,360,293	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
TOTAL							15,324,626,861						17,706,071,825		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
										Nasional	Daerah												
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09																11,659,613,740				15,119,969,983		
2	09	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	8,202,473,840									7 Jenis	10,157,152,801	
2	09	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselarasn dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD	Jenis		Jenis	7 Jenis	361,670,300									7 Jenis	564,355,000	
2	09	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				1 DOKUMEN	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0			1 DOKUMEN	88,930,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 DOKUMEN	41,002,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0			1 DOKUMEN	59,280,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD				1 DOKUMEN	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0			1 DOKUMEN	50,980,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0				50,980,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan SKPD				1 DOKUMEN	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0			1 DOKUMEN	53,350,000	Dinas Ketahanan Pangan	
2	09	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi				4 DOKUMEN	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0			4 DOKUMEN	82,990,000	Dinas Ketahanan Pangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 09 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 DOKUMEN	130,668,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 DOKUMEN	177,845,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Akhir Tahun	DOKUMEN		DOKUMEN	1 DOKUMEN	6,328,094,840						1 DOKUMEN	7,624,818,801	
2 09 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				62 ORANG	6,290,124,640	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	62 ORANG	7,546,668,801	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				1 ORANG	9,970,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 ORANG	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 DOKUMEN	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	46,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran				14 DOKUMEN	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	14 DOKUMEN	11,850,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset	DOKUMEN		DOKUMEN	1 DOKUMEN	10,000,000						1 DOKUMEN	29,460,000	
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset				1 DOKUMEN	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	29,460,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan	Persen		Persen	100 Persen	273,569,400						100 Persen	438,624,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		fungsiional													
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan				12 JENIS	6,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	9,318,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor				24 JENIS	14,752,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	24 JENIS	22,526,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis logistik kantor				1 JENIS	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 JENIS	5,640,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan				6 JENIS	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	7,110,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan				3 JENIS	26,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 JENIS	29,370,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu				1 JENIS	28,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 JENIS	29,160,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 KALI	132,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 KALI	237,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Daokumen Arsip				1 DOKUMEN	0	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 09 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Publikasi				4 KALI	57,857,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 KALI	85,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan Fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	192,124,800						2 Jenis	387,940,000	
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				5 JENIS	68,679,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor				5 JENIS	92,642,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	275,940,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				5 UNIT	30,802,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 UNIT	32,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	632,759,500						4 Jenis	654,740,000	
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1000 SURAT KELUAR	5,577,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1000 SURAT KELUAR	9,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik				6 JENIS	152,532,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	170,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
2 09 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Sarana Publikasi				4 JENIS	24,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 JENIS	23,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor				13 ORANG	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	13 ORANG	452,240,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	404,255,000						100 Persen	457,215,000	
2 09 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan dinas jabbatan yang dipelihara				18 JENIS	158,996,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	18 JENIS	172,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara				26 UNIT	11,490,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	26 UNIT	13,490,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang rehab				1 GEDUNG	218,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	256,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 GEDUNG	15,725,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	15,725,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%		%	79,62 %	197,260,500						79,62 %	209,908,418	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN														
2 09 02 1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen		Persen	79.62 Persen	197,260,500						79.62 Persen	209,908,418	
2 09 02 1.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun				2 UNIT	197,260,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 UNIT	164,908,418	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02 1.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangu				1 UNIT	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 UNIT	45,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%		%	100 %	2,820,830,000						100 %	4,170,261,154	
2 09 03 1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	Persen		Persen	100 Persen	295,534,600						100 Persen	440,000,000	
2 09 03 1.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan NBM dan Prognosa Ketersediaan Pangan				2 DOKUMEN	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 DOKUMEN	110,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)				10 TON	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	10 TON	130,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
2 09 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan				2 DOKUMEN	65,251,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	2 DOKUMEN	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM /Pasar Mintra Tani yang dibina				1 UNIT	60,283,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 UNIT	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Stock Cadangan Pangan Pemerintah	PERSEN		PERSEN	4.98 PERSEN	289,000,000						4.98 PERSEN	405,000,000	
2 09 03 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi				15 TON	289,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	15 TON	405,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rasio Konsumsi Sayur dan Buah terhadap Konsumsi Ideal	PERSEN		PERSEN	90 PERSEN	2,236,295,400						90 PERSEN	3,325,261,154	
2 09 03 1.04 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti				1 EVENT	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 EVENT	100,001,154	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan				40 P2L	2,186,295,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	40 P2L	3,225,260,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%		%	5,77 %	319,049,400						5,77 %	424,967,902	
2 09 04 1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	DESA		DESA	17 DESA	319,049,400						17 DESA	424,967,902	
2 09 04 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan				3 KELOMPOK/SEKOLAH	141,876,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	3 KELOMPOK/SEKOLAH	174,967,902	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04 1.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Balita yang difasilitasi bantuan hibah pangan				500 BALITA	177,173,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	500 BALITA	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		%	85 %	120,000,000						85 %	157,679,708	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	ORANG		ORANG	50 ORANG	120,000,000						50 ORANG	157,679,708	
2 09 05 1.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				4 KALI	70,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	4 KALI	74,692,553	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 1.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji				20 KOMODITI	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	20 KOMODITI	82,987,155	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					570,510,580					798,519,182				
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Serapan Anggaran	PERSEN		PERSEN	95 PERSEN	270,511,800					95 PERSEN	317,118,706		
2 09 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran	PERSEN		PERSEN	95 PERSEN	11,978,800					95 PERSEN	21,506,000		
2 09 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				1 ORANG	4,479,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 ORANG	4,479,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 DOKUMEN	7,499,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	17,027,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Aset	LAPORAN		LAPORAN	1 LAPORAN	5,350,000					1 LAPORAN	5,300,000		
2 09 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset				1 DOKUMEN	5,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 DOKUMEN	5,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	7,365,500					100 Persen	6,358,000		
2 09 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan				12 JENIS	3,165,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	2,158,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat tulis kantor				12 JENIS	4,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	12 JENIS	4,200,000	Dinas Ketahanan Pangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
2 09 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan Fungsional	Jenis		Jenis	2 Jenis	34,069,800						2 Jenis	44,142,506	
2 09 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel				1 JENIS	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 JENIS	27,500,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor				5 JENIS	9,069,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 JENIS	16,642,506	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	205,197,500						100 Persen	233,262,000	
2 09 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				100 SURAT KELUAR	2,260,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	100 SURAT KELUAR	3,975,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik				6 JENIS	40,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	6 JENIS	50,175,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor				5 ORANG	162,287,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 ORANG	179,112,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang baik dan fungsional	Persen		Persen	100 Persen	6,550,200						100 Persen	6,550,200	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara				5 UNIT	3,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 UNIT	3,300,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 GEDUNG	3,250,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 GEDUNG	3,250,200	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%		%	85 %	299,998,780						85 %	481,400,476	
2 09 05 1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	ORANG		ORANG	50 ORANG	299,998,780						50 ORANG	481,400,476	
2 09 05 1.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)				50 ORANG	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	50 ORANG	125,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 05 1.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi				65 SERTIFIKAT	149,998,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	65 SERTIFIKAT	356,400,476	Dinas Ketahanan Pangan
TOTAL							12,230,124,320							15,918,489,166	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11						63,409,846,291						77,339,338,786						
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	58,995,085,091			BB poin	65,937,015,435			
2	11	01	1.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	571,854,300			100 %	489,944,246			
2	11	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	73,147,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	40,248,956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA				1 Dokumen	90,202,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	104,942,090	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA				1 Dokumen	90,110,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	96,969,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA				1 Dokumen	83,065,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	96,993,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA				1 Tahun	84,488,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	97,598,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja				1 Dokumen	75,420,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	26,595,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen LAKIP				1 Dokumen	75,420,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	26,595,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	51,701,522,091						100 %	61,165,620,132	
2 11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN				491 ASN	51,547,783,491	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	491 ASN	60,988,114,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Administrasi Pelaksana Tugas ASN				1 Orang	83,979,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Orang	96,743,856	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	28,718,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	33,418,990	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Dokumen	41,041,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	47,343,186	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	187,948,100						100 %	205,000,000	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen	10,461,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Dinas LHK NTB	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan			(PD-6)				
2 11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	terlaksananya kegiatan pengamanan aset				1 Tahun	53,801,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	42,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	26,254,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	55,350,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	95,928,100						100 %	110,570,647	
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Retribusi Daerah				1 Laporan	95,928,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Laporan	110,570,647	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	326,199,800						100 %	335,483,390	
2 11 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan				1 Tahun	31,128,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	32,997,250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengaplikasian sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan				1 Tahun	46,246,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	44,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	terlaksananya monev kinerja pegawai yang dilaksanakan				1 Tahun	79,314,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	82,499,890	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan				30 Orang	116,895,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	30 Orang	121,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan				1 Tahun	52,613,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	1 Tahun	54,986,250	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	172,053,800						100 %	274,772,953	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan				10 Jenis	8,029,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	10 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,733,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga				6 Jenis	12,323,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	6 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				15 Jenis	12,042,200	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas LHK NTB	15 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya kelengkapan administrasi perkantoran				4 Jenis	10,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	4 Jenis	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				4 Jenis	14,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	4 Jenis	17,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				450 Orang	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	450 Orang	27,272,953	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				8 Kali	78,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	8 Kali	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	650,107,900						100 %	560,624,067	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya Kendaraan dinas operasional atau lapangan				13 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	13 Unit	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumla kelengkapan mebeleur kantor yang tersedia				11 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	11 Unit	35,624,067	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya Pengadaan peralatan				5 Jenis	650,107,900	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Dinas LHK NTB	5 Jenis	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
		dan mesin lainnya						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	4,167,388,000						100 %	2,195,000,000			
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				2500 Lembar	10,708,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	2500 Lembar	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terselesaikannya pembayaran rekeing listrik, internet dan telepon				12 Bulan	151,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	12 Bulan	175,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya tenaga kontrak				12 Bulan	4,005,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Dinas LHK NTB	12 Bulan	2,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,122,083,000							600,000,000			
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				43 Jenis	342,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		43 Jenis	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin				25 Jenis	29,140,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		25 Jenis	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
2 11 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	terpeliharanya aplikasi sistem informasi				1 Jenis	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan		1 Jenis	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kecamatan, Semua Kelurahan								
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Jenis	650,743,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		1 Jenis	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%		%	24.24 %	300,729,200						24.24 %	410,673,866		
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen IKPLHD dan IKLH yang disusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	161,289,200						2 Dokumen	216,779,593		
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen Materi Teknis RPPLH				1 Dokumen	93,454,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen	160,322,288	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Dokumen IKLH Dokumen IKPLHD				1 Dokumen 1 Dokumen	67,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen 1 Dokumen	56,457,306	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	139,440,000						5 Dokumen	193,894,273		
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rekomendasi Validasi KLHS Kab. Kota				2 Rekomendasi	96,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	2 Rekomendasi	71,933,199	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rekomendasi Validasi				2 Rekomendasi	41,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	2 Rekomendasi	43,978,224	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Rekomendasi Validasi KLHS Kab. Kota				1 Rekomendasi	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Rekomendasi	22,982,850	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	1,038,734,500						10 lokasi	3,125,000,000	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha		unit usaha	30 unit usaha	422,942,800						30 unit usaha	1,815,000,000	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah desa yang dibina pada lokasi sungai Ancar dan Sungai Jangkok jumlah unit usaha yang dibina				5 desa 30 unit usaha	208,327,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha	5 desa 30 unit usaha	1,265,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kelompok Kampung Iklim yang dibina				15 kelompok	214,615,000		DBH CHT		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha	15 kelompok	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang tertangani	Titik		Titik	2 Titik	456,035,200					2 Titik	650,000,000		
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	tersedianya informasi tentang kualitas air laut tersedianya informasi tentang kualitas air sungai tersedianya informasi tentang kualitas udara				23 titik 60 titik 30 titik	328,435,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	23 titik 60 titik 30 titik	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	jumlah sumber pencemara yang diterbitkan				3 lokasi	127,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	3 lokasi	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi tercemar yang dilakukan pemulihan	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	159,756,500					2 Lokasi	660,000,000		
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Identifikasi dan inventarisasi lokasi pencemaran/kerusakan				1 Lokasi	159,756,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	1 Lokasi	660,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi		lokasi	1 lokasi	161,257,500					1 lokasi	4,339,889,355		
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi		lokasi	1 lokasi	161,257,500					1 lokasi	4,339,889,355		
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kegiatan pendukung Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan				1 Kegiatan	161,257,500		DBH CHT		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Taman Kehati	1 Kegiatan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Kehati di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang dibangun				1 Unit	0					Taman Kehati	1 Unit	4,239,889,355	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit		unit	210 unit	59,763,000					210 unit	150,000,000		
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	Unit Usaha		Unit Usaha	14 Unit Usaha	59,763,000					14 Unit Usaha	150,000,000		
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengkangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan				5 Perusahaan	59,763,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3	5 Perusahaan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/kegiatan		usaha/kegiatan	25 usaha/kegiatan	199,138,000					25 usaha/kegiatan	217,743,995		
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha		unit usaha	25 unit usaha	199,138,000					25 unit usaha	217,743,995		
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya				20 Usaha/kegiatan	100,320,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Pelaku usaha/kegiatan	20 Usaha/kegiatan	109,693,698	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi				20 Usaha/Kegiatan	98,817,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		(PD-6)	Pelaku usaha/kegiatan	20 Usaha/Kegiatan	108,050,297	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli lingkungan yang meningkat kapasitasnya	%		%	10 %	230,211,400						10 %	227,528,687	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah peduli lingkungan yang dibina	Kelompok		Kelompok	10 Kelompok	230,211,400						10 Kelompok	227,528,687	
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina				10 Kelompok	230,211,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Sekolah peduli lingkungan	10 Kelompok	227,528,687	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	% pengaduan yang terselesaikan	%		%	100 %	211,009,600						100 %	230,724,632	
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Kasus		Kasus	20 Kasus	211,009,600						20 Kasus	230,724,632	
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti				20 Pengaduan	105,133,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Aduan lingkungan hidup dari masyarakat	20 Pengaduan	114,955,772	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang difasilitasi				10 Kasus	105,876,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Aduan lingkungan hidup dari masyarakat	10 Kasus	115,768,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%		%	85 %	2,213,918,000					85 %	2,700,762,816		
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengurangan sampah	%		%	25 %	2,213,918,000					25 %	2,700,762,816		
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Rumah Tangga dan TPA/TPST	8 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah				25 Persen	2,213,918,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Rumah Tangga dan TPA/TPST	25 Persen	1,200,762,816	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						35,054,478,640					7,109,254,483			
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	10 %	1,983,882,540					10 %	6,304,355,207		
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	34 Km	109,789,900					34 Km	1,875,000,000		
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kawasan hutan yang difasilitasi				1 Tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	Blok/Petak Pengelolaan Hutan	1 Tahun	262,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani										pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)				
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi				15 KPH	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15 KPH	375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah rencana pengelolaan hutan yang dinilai				15 Rencana Pengelolaan	97,999,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15 Rencana Pengelolaan	107,155,714	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	1780 ha	362,575,700						1780 ha	388,319,894	
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen Perencanaan RTn-RHL				1 Dokumen	66,242,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan	1 Dokumen	74,234,751	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Hutan rakyat yang dimonev				16 KPH/Tahura	62,664,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan	16 KPH/Tahura	68,931,390	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Sumber benih teridentifikasi				10 Kabupaten	64,545,400	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	Kawasan Hutan	10 Kabupaten	70,999,940	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Pembudidayaan HHBK yang dimonitoring dan dievaluasi				11 Lokasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	11 Lokasi	302,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Perizinan Pengolahan HHBK yang diawasi				5 Izin Usaha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	5 Izin Usaha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri		industri	11 industri	134,862,460						11 industri	650,083,145	
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Industri HHK yang tertib administrasi				19 Izin Usaha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	19 Izin Usaha	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Izin Usaha IPHHK yang dibina				19 Izin Usaha	134,862,460	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	19 Izin Usaha	165,083,145	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Usaha IPHHK yang difasilitasi				5 Izin Usaha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun	5 Izin Usaha	85,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.08	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi	Jumlah kegiatan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	0						1 kegiatan	229,234,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.08 01	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah tempat ibadah dan wisata rohani di Kawasan Hutan				1 tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	1 tahun	107,734,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.08 02	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani	Jumlah KHDTK untuk tempat ibadah dan wisata rohani				1 tahun	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	1 tahun	121,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	299,041,500						30503 ha	329,290,342	
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	Penangkar		Penangkar	24 Penangkar	113,253,400						24 Penangkar	124,209,771	
3 28 04 1.02 01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan				23 Penangkar	113,253,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Penangkar TSL	23 Penangkar	124,209,771	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang dikelola	Kelompok		Kelompok	8 Kelompok	185,788,100						8 Kelompok	205,080,571	
3 28 04 1.03 05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya				16 Kelompok	64,113,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KEE, Cagar Biosfer dan Geopark	16 Kelompok	70,465,598	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi							Semua Kelurahan		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	persampahan (PD-6)				
3 28 04 1.03 06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya				8 Kelompok/Lembaga	121,674,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KEE, Cagar Biosfer dan Geopark	8 Kelompok/Lembaga	134,614,973	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	17.70 %	32,331,519,700						17.70 %	149,998,900	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	70 orang	32,331,519,700						70 orang	149,998,900	
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya				70 orang	45,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	70 orang	33,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok tani yang di tingkatkan kelasnya dari blue/ pemula ke gold/ madya				8 kelompok	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	8 kelompok	48,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang di fasilitasi pembentukannya				8 kelompok	32,221,519,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Kelompok Tani Hutan	8 kelompok	68,498,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	4 DAS	440,034,900						4 DAS	325,610,034	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	247 unit	440,034,900						247 unit	325,610,034		
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Dokumen RTn RHL KTA yang tersusun				1 dokumen	132,066,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	1 dokumen	118,118,657	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS yang meningkat fungsi dan daya dukungnya				4 DAS	125,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	4 DAS	91,897,295	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bangunan KTA				300 unit	105,670,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	300 unit	115,594,082	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan DAS yang dikembangkan				1 kegiatan	76,777,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	1 kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3,075,811,602							5,149,766,229		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	2,270,389,350							BB poin	4,424,049,342	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan	%		%	100 %	32,946,560							100 %	36,989,810	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja													
2 11 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Balai Laboratorium Lingkungan				1 Dokumen	10,571,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Balai Laboratorium				1 Dokumen	5,283,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	5,779,409	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Kordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Balai Laboratorium Lingkungan				1 Dokumen	9,585,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						7,506,160	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan		8,091,585	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	21,555,500						100 %	34,703,622	
2 11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Orang	5,684,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Orang	17,364,510	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun				1 Laporan	10,585,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semester/pada Balai Laboratorium Lingkungan				18 Laporan	5,285,600					Balai Laboratorium Lingkungan	18 Laporan	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	8,451,600						100 %	13,871,289	
2 11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Dokumen	2,114,000					Balai Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	2,311,881	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang milik daerah pada Balai Laboratorium				1 Kegiatan	2,110,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Laboratorium Lingkungan	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah				2 Laporan	4,227,500					Balai Laboratorium Lingkungan	2 Laporan	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,167,100						100 %	3,457,822	
2 11 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	3,167,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	3,457,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	68,200,000						100 %	88,467,822	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Laboratorium dan Kelengkapan K3				10 Jenis	13,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Jenis	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersusunnya sistem informasi Kepegawaian				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Laporan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersertifikasi SDM Balai Laboratorium Lingkungan				5 Orang	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Orang	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	53,707,590						100 %	98,985,772	
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik				38 buah	5,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	38 buah	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	6,922,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga Pada Balai Laboratorium Lingkungan				10 Jenis	4,057,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Jenis	6,935,645	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor Pada Laboratorium				1 Tahun	6,994,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Lingkungan						Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan pada Balai Laboratorium Lingkungan				8 Jenis	3,391,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	8 Jenis	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum Rapat/Kegiatan Pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Tahun	10,587,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	5,490,719	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	16,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	1,039,820,000						100 %	2,270,000,000	
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Operasional Lapangan (Double cabin) Pada Balai Laboratorium Lingkungan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	550,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel pada Balai Laboratorium Lingkungan				11 Unit	39,445,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	11 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan (Sampling dan Pengujian) Pada Balai Laboratorium Lingkungan				10 Unit	845,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Unit	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Bangunan TPS B3 dan Kelengkapan K3				1 Unit	97,020,000		DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
									Penugasan- Lingkungan Hidup		persampahan (PD-6)				
2 11 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				15 Unit	58,354,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	15 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	650,610,000						100 %	1,726,573,205	
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1 Jenis	3,141,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				5 Rekening	77,469,000	Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	5 Rekening	130,431,739	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				21 Orang/Bulan	570,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	21 Orang/Bulan	1,592,673,644	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	391,931,000						100 %	151,000,000	
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor				6 Unit	54,011,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	6 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional Lapangan				1 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel pada Balai Laboratorium Lingkungan				15 Buah	3,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	15 Buah	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin (Alat-alat Laboratorium)				10 Unit	115,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	10 Unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung Laboratorium Lingkungan				1 Unit	198,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Laboratorium Lingkungan	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi		lokasi	10 lokasi	805,422,252						10 lokasi	725,716,887	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel yang dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	sampel		sampel	282 sampel	805,422,252						282 sampel	725,716,887	
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pengambilan sampel dan Pengujian Parameter Lingkungan				282 Titik sampel	205,716,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	282 Titik sampel	105,716,887	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji dan Penambahan Parameter Terakreditasi KAN Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Balai Laboratorium Lingkungan				5 Parameter	599,705,652	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Provinsi NTB	5 Parameter	620,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,512,380,900							1,341,815,654	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,171,636,600						BB poin	1,183,814,154	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	31,503,300						100 %	31,997,204	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	10,571,600	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	10,571,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	5,285,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	8,245,900	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	8,245,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	7,400,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Golong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	7,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	35,676,900						100 %	35,676,900	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	22,145,400	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan		Balai Tahura Nuraksa	1 Orang	22,145,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Bencana Dan Perubahan Iklim					
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	8,245,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	8,245,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun				1 Dokumen	5,285,700	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	9,091,000						100 %	9,091,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	2,114,300	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	2,114,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun				1 Dokumen	5,285,700	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	5,285,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 Orang	1,691,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Orang	1,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,171,500						100 %	3,171,500	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun				1 Dokumen	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Dokumen	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,361,500						100 %	6,361,500	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan				1 Sistem	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Sistem	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	3,190,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Kegiatan	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	49,741,800						100 %	56,425,450	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				7 Jenis	5,285,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	7 Jenis	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				11 Jenis	5,285,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		Balai Tahura Nuraksa	11 Jenis	5,285,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				9 Jenis	5,285,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	9 Jenis	5,285,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia				2 Kegiatan	20,600,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	2 Kegiatan	20,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				4 Jenis	3,171,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	4 Jenis	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0					Balai Tahura Nuraksa		3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0					Balai Tahura Nuraksa		3,215,827	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi, dan koordinasi ke luar daerah				5 OT	10,113,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	5 OT	10,113,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,002,432,000						100 %	1,007,432,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				200 Lembar	3,171,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	200 Lembar	3,171,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telepon				2 Rekening	29,260,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	2 Rekening	29,260,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen							
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, administrasi, dan pengamanan hutan yang tersedia				35 Orang	970,000,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	35 Orang	975,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	33,658,600						100 %	33,658,600	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				4 Unit	29,430,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	4 Unit	29,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara				1 Unit	4,228,600	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Balai Tahura Nuraksa	1 Unit	4,228,600	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha		ha	30503 ha	340,744,300						30503 ha	158,001,500	
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	Unit		Unit	1 Unit	340,744,300						1 Unit	158,001,500	
3 28 04 1.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diamankan				3.155 Ha	192,742,800	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tahura Nuraksa	3.155 Ha	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen							
3 28 04 1.01 03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya				1 Jenis	105,715,000	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tahura Nuraksa	1 Jenis	105,715,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 04 1.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan				122 Ha	42,286,500	Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tahura Nuraksa	122 Ha	42,286,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,935,388,940						1,089,688,633		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	3,080,248,840						BB poin	412,460,687	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	24,064,400						100 %	7,047,240	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2,424,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Lembah Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	547,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,285,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,567,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	999,740	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,787,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Pusuk Lestari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	31,035,200						100 %	2,836,800	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 orang	21,543,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 orang	299,730	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 OB	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	12 OB	2,037,830	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	4,221,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				4 Dokumen	5,271,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	4 Dokumen	499,240	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	12,140,400						100 %	0	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,113,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen Aset/Barang Milik Daerah				4 Kegiatan	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	4 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	5,284,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Orang	4,742,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Orang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,167,900						100 %	299,730	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				4 Dokumen	3,167,900	Kab. Lombok Barat, Gunungsari,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Rinjani Barat	4 Dokumen	299,730	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengelolaan Retribusi Daerah						Kekait							
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,336,000								1,882,890
3 28 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian				1 Tahun	3,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	1,241,390	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Kegiatan	3,166,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Kegiatan	641,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	36,530,000								6,245,117
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	5,284,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	499,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	3,165,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	5,745,417	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1 Tahun	5,278,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				1 Tahun	2,400,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				1 Tahun	3,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Tahun	4,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya koordinasi dan konsultasi SKPD				1 tahun	12,391,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Rinjani Barat	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	638,742,040						100 %	107,500,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Patroli Pengamanan Hutan				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Trsedianya Perlengkapan Keamanan Kantor dan Meubel Kantor Resort				3 Pakaet	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	3 Pakaet	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3 Unit	638,742,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	3 Unit	47,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	2,288,552,900						100 %	216,648,910	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	3,152,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	298,910	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				1 Tahun	125,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Tahun	2,160,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	204,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	39,680,000						100 %	70,000,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	35,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpelihara dan Tersedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Tahun	4,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Rinjani Barat	1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	839,140,100						0,67 %	204,227,946	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	53,595,200						100 %	5,412,880	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun				1 Dokumen	53,595,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Dokumen	5,412,880	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	54,000,000						1 kegiatan	154,532,650	
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Terlaksananya Pengolahan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				1 Tahun 1 kegiatan	54,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun 1 kegiatan	154,532,650	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	36500 ha	389,420,600						36500 ha	44,282,416	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				1 kegiatan 1 Tahun	389,420,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		KPH Rinjani Barat	1 kegiatan 1 Tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya kegiatan patroli pengamanan hutan Terlaksananya kegiatan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan				1 Tahun 1 kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Barat	1 Tahun 1 kegiatan	44,282,416	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	3 unit	342,124,300						3 unit	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya Pembudidayaan HHBK- Kayu putih				1 kegiatan	212,168,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	1 kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Terlaksananya pengolahan HHBK di tingkat tapak dan Cakupan Luas Pengembangan Tanaman HHBK				1 kegiatan	129,956,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Unit pengelolaan HHBK di tingkat tapak	1 kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	16,000,000					1 DAS	473,000,000		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	6 unit	16,000,000					6 unit	473,000,000		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS				1 Kegiatan 1 Unit	16,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	1 Kegiatan 1 Unit	473,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,623,303,400						10,529,130,000		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,133,458,000					BB poin	4,194,806,000		
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	6,110,400					100 %	50,000,000		
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	2,014,400	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Bencana Dan Perubahan Iklim					
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1 Dokumen	1,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	1,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	17,873,700						100 %	40,000,000	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				2 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	2 Orang	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang tersedia				1 orang	477,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 orang	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	1,927,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang				18 Dokumen	15,469,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Ampang Riwo	18 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	/Semesteran SKPD	tersusun						Semua Kelurahan			persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	10,976,500						100 %	22,500,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				1 Dokumen	875,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				2 Dokumen	9,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	2 Dokumen	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 orang	601,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 orang	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	0						100 %	5,000,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Laporan informasi kepegawaian				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Riwo	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	76,051,800						100 %	386,786,000	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	1,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Ampang Riwo	2 Jenis	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup			KPH Ampang Riwo	5 Jenis	291,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				4 Jenis	1,125,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	4 Jenis	5,586,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				23 Jenis	20,565,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	23 Jenis	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				2 Jenis	790,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Ampang Riwo	2 Jenis	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				115 orang	4,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Ampang Riwo	115 orang	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				12 OT	46,985,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	12 OT	58,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	0						100 %	2,789,000,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0					KPH Ampang Riwo		1,180,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gegung Kantor dan Bangunan Lainnya				5 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup			KPH Ampang Riwo	5 Unit	1,609,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan	%		%	100 %	847,168,800						100 %	849,400,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemerintahan Daerah	pemerintahan daerah													
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				400 Lembar	2,768,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KPH Ampang Riwo	400 Lembar	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon				2 Rekening	14,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	2 Rekening	14,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				30 orang	830,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	30 orang	830,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	175,276,800					100 %	52,120,000		
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				4 Unit	46,388,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	4 Unit	43,620,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang terpelihara				1 Unit	128,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		KPH Ampang Riwo	1 Unit	8,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Nilai Sakip OPD Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	poin %		poin %	BB poin 10 %	456,174,400					BB poin 10 %	6,109,324,000		
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	168,397,000					1 kegiatan	5,827,824,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan				6 Ha	168,397,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	KPH Ampang Riwo	6 Ha	5,827,824,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	600 ha	0						600 ha	220,000,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				900 Ha	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup			KPH Ampang Riwo	900 Ha	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	19500 ha	287,777,400						19500 ha	61,500,000	
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				12 Kegiatan	287,777,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Ampang Riwo	12 Kegiatan	61,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,44 %	33,671,000						0,44 %	5,000,000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	3 orang	33,671,000						3 orang	5,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang dikembangkan				2 Kelompok	33,671,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	kelompok tani hutan	2 Kelompok	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	0						1 DAS	220,000,000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	24 unit	0						24 unit	220,000,000	
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				47 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Lingkungan Hidup			Daerah Aliran Sungai	47 Unit	220,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,089,716,915						7,461,819,026		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,402,735,389						BB poin	1,973,916,577	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	37,000,907						100 %	39,924,918	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,094,918	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,285,840	Kab. Dompu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	KPH Tambora	1 Dokumen	6,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
								Semua Kelurahan										
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	10,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	9,680,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,571,689	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	36,387,751						100 %	23,126,730				
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	20,530,219	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	5,590,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	10,571,688	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	12,097,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Dokumen	5,285,844	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	5,438,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	12,114,338						100 %	20,813,210				
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya dokumen Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,114,338	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	2,365,550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Tambora	1 Dokumen	9,977,660	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		(PD-6)					
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	8,470,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,171,507						100 %	3,623,950	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	tersedianya laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	3,171,507	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	3,623,950	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,343,013						100 %	7,097,822	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	tersusunnya Laporan informasi kepegawaian				1 Dokumen	3,171,506	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan				1 Kegiatan	3,171,507	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	0						100 %	48,061,442	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	7 Jenis	5,902,380	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga				7 Unit		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	7 Unit	3,788,752	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya ATK				15 Jenis		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	15 Jenis	6,050,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	5 Jenis	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4 Jenis		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	4 Jenis	3,575,550	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	terfasilitasinya jumlah tamu				150 Orang/Kali		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	150 Orang/Kali	5,754,760	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasidan koordinasi ke luar daerah				4 Kali		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	4 Kali	19,360,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,284,460,160						100 %	1,772,086,800	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat				3 Jenis	3,171,506	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Jenis	3,630,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Jenis	23,257,714	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Jenis	19,456,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tetrersediaan jasa tenaga kontrak pengamanan hutan sebanyak 50 Orang, 1 Tenaga administrasi, 1 Tenaga Kebersihan Kantor dan 1 Tenaga Keamanan Kantor.				47 Orang	1,258,030,940	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	47 Orang	1,749,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	23,257,713						100 %	59,181,705	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas				3 Unit	19,029,039	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Unit	54,450,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				2 Unit	4,228,674	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	2 Unit	4,731,705	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelo	%		%	0,67 %	404,133,297						0,67 %	4,148,583,059	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	7 Km	0						7 Km	0	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbentuknya blok pengelolaan pada balai kph				300 Ha	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	300 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana dasar				10 Unit	0	Kab. Dompu, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	KPH Tambora	10 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Operasionalisasi KPH	operasionalisasi pada balai kph						Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%		%	100 %	0						100 %	0	
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunya dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada balai kph				1 Dokumen	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	0						1 kegiatan	0	
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya data dan informasi pemanfaatan pada hutan hutan di balai kph				1 Dokumen	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Terfasilitasinya pembinaan kepada pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan pada balai kph				1 Kegiatan	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Terfasilitasinya proses pemanfaatan pada balai kph				1 Kegiatan	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	500 ha	42,240,000					500 ha	3,752,877,472		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya hutan rakyat di luar kawasan hutan pada balai kph seluas 20 Ha				20 Ha	42,240,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	20 Ha	3,752,877,472	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya bibit tanaman penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan sebanyak 120.000 batang				120000 Batang	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	120000 Batang	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	24500 ha	309,035,297					24500 ha	337,908,662		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya operasi pengamanan hutan gabungan, operasi rutin pengaman hutan, penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan penyediaan amunisi untuk kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan pada balai kph				1 Kegiatan	233,348,878	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	1 Kegiatan	255,150,813	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah pada balai kph				6 Titik	75,686,419	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	6 Titik	82,757,849	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	52,858,000					1 unit	57,796,925		
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Tersedianya bantuan alat produksi hasil hutan bukan kayu pada balai kph				3 Unit	0	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	3 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan				15 Ha	52,858,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Tambora	15 Ha	57,796,925	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	0,88 %	110,828,549					0,88 %	57,797,157		
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	2 orang	110,828,549					2 orang	57,797,157		
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terfasilitasinya pendampingan pemberdayaan masyarakat pada 14 KTH binaan di wilayah kerja KPH Tambora				14 Kelompok	57,970,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	14 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				3 Kelompok	52,858,549	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	3 Kelompok	57,797,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	1,172,019,680					1 DAS	1,281,522,233		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	110 unit	1,172,019,680					110 unit	1,281,522,233		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Tersedianya bangunan konservasi tanah dan air pada wilayah balai				8 Unit	1,172,019,680	Kab. Dompu, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Tambora	8 Unit	1,281,522,233	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kph						Semua Kelurahan				persampahan (PD-6)			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						3,212,445,300							3,502,326,022	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,746,888,000						BB poin	1,915,471,500	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	37,099,000						100 %	40,457,928	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	10,610,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	5,275,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	10,644,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang tersusun				1 Dokumen	10,570,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	11,559,408	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
										Nasional	Daerah						
								Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	10,571,600						100 %	40,897,186			
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Orang	23,558,074		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	10,571,600	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	11,559,408		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun				1 Dokumen	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	5,779,704		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	18,183,000						100 %	19,882,182			
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah				1 Dokumen	2,114,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	2,311,882		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	10,571,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	11,559,408		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah tersusun				1 Dokumen	5,497,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	6,010,892	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	3,171,200						100 %	3,467,822	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya laporan pengelolaan retribusi sektor LHK				1 Dokumen	3,171,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Dokumen	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	3,171,200						100 %	6,935,644	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersebar nya informasi kepegawaian yang ada				1 Tahun	3,171,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Tahun	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan				1 Kegiatan	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Kegiatan	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	36,625,200						100 %	43,635,377	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	0	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	2 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa		0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia				7 Unit	3,170,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	7 Unit	3,466,435	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia				3 Jenis	5,277,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	3 Jenis	5,779,704	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 Jenis	3,171,600	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan tersedia				1 Jenis	3,071,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Jenis	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya pelayanan kunjungan tamu				1 Tahun	5,021,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Tahun	5,490,719	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya konsultasi, dan koordinasi kegiatan SKPD				1 Tahun	16,914,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Tahun	18,495,053	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	4,515,000						100 %	4,646,882	
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor				6 Unit	4,515,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	6 Unit	4,646,882	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,585,071,800						100 %	1,706,999,774	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				400 Lembar	3,171,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	KPH Maria Donggomassa	400 Lembar	3,467,822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-6)				
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon				1 Tahun	43,800,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Tahun	41,867,021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, sopir, tenaga administrasi, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				53 Orang	1,538,100,400	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	53 Orang	1,661,664,931	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	48,480,000						100 %	48,548,705	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				5 Unit	48,480,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	5 Unit	48,548,705	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	1,254,127,300						0,67 %	1,355,666,358	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	%		%	100 %	51,645,000						100 %	55,973,544	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)														
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah RPHJP/RPHJPD dan Core Business yang tersusun				2 Dokumen	51,645,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	2 Dokumen	55,973,544	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	29,981,000						1 kegiatan	32,782,482	
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi				1 Tahun	29,981,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	1 Tahun	32,782,482	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	650 ha	481,087,200						650 ha	526,036,302	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan				39000 Batang	211,393,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	39000 Batang	231,144,239	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit yang disediakan untuk penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan				28500 Batang	269,694,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomassa	28500 Batang	294,892,063	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	29000 ha	306,574,100					29000 ha	320,399,747		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				1 Tahun	43,694,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomasa	1 Tahun	47,776,884	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah perjalan pelaksanaan perlindungan hutan				1 Tahun	262,880,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Maria Donggomasa	1 Tahun	272,622,863	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	384,840,000					1 unit	420,474,283		
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				27 Unit	384,840,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	27 Unit	420,474,283	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	211,430,000					1 DAS	231,188,164		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	32 unit	211,430,000					32 unit	231,188,164		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				32 Unit	211,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Maria Donggomassa	32 Unit	231,188,164	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					2,732,394,140							3,000,055,972		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,906,910,040						BB poin	1,564,473,304	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	17,159,500						100 %	18,763,346	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 Dokumen	9,759,500	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Dokumen	10,671,761	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang tersusun				1 Dokumen	7,400,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	0	1 Dokumen	8,091,585	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	24,657,800						100 %	25,037,677	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	9,340,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Orang	8,230,298	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun				18 Dokumen	15,317,800	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	18 Dokumen	16,807,379	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	3,911,300						100 %	4,276,981	
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				1 Dokumen	3,911,300	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Dokumen	4,276,981	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	90,020,440					100 %	74,058,583		
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	5,308,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	2 Jenis	5,794,731	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				17 Jenis	35,802,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	17 Jenis	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				7 Jenis	12,722,440	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	7 Jenis	4,847,437	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK				17 Jenis	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	17 Jenis	23,282,960	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				3 Jenis	3,261,600	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 Jenis	3,755,998	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				120 OH	12,085,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	120 OH	13,258,641	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				3 OT	20,840,900	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 OT	23,118,816	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	331,096,000					100 %	0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan				0 Unit	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	0 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kelengkapan mebeleur kantor				22 Buah	0	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	22 Buah	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya				5 Unit	48,096,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	5 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	283,000,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,374,375,000						100 %	1,379,257,028	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				400 Lembar	2,455,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	400 Lembar	3,462,042	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon				3 Rekening	31,920,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	3 Rekening	34,903,633	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Sambelia, Senanggalih Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh							
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, pengamanan hutan dan administrasi yang tersedia				42 Orang	1,340,000,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	42 Orang	1,340,891,353	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	65,690,000						100 %	63,079,689	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara				5 Unit	54,290,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	5 Unit	40,735,354	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara				9 Unit	6,210,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	9 Unit	6,380,793	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya				6 Unit	5,190,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan	KPH Rinjani Timur	6 Unit	15,963,542	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lingkungan	dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan									(PD-6)				
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	120 ha	149,250,000					120 ha	46,237,632		
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Tersedianya penghijauan diluar kawasan hutan				120 Ha	0	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	120 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan				4000 Batang	149,250,000	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	4000 Batang	46,237,632	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	31500 ha	403,327,300					31500 ha	464,537,937		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	265,914,800	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Rinjani Timur	1 Kegiatan	311,930,630	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang- gulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani				20 Titik	137,412,500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Rinjani Timur	20 Titik	152,607,307	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	62,181,500					1 unit	469,122,630		
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				4 Unit	62,181,500	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	Unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	4 Unit	469,122,630	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kelurahan Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan								
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	36,011,900						1,77 %	40,238,877		
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	6 orang	36,011,900						6 orang	40,238,877		
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya				4 Kelompok	36,011,900	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	kelompok tani hutan	4 Kelompok	40,238,877	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	0						1 DAS	231,188,164		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	27 unit	0						27 unit	231,188,164		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat				27 Unit	0	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Daerah Aliran Sungai	27 Unit	231,188,164	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Lombok Timur, Suwela, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Semua Kelurahan							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,504,384,000							2,749,539,200	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,163,178,000						BB poin	1,134,539,200	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	20,700,000						100 %	28,155,000	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				5 Dokumen	10,565,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	3,520,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				5 Dokumen	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	8,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				5 Dokumen	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				7 Dokumen	10,135,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	7 Dokumen	3,635,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	28,852,800						100 %	35,553,400	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				1 Orang	23,527,800	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Orang	17,568,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				7 Dokumen	0	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	7 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun				7 Dokumen	5,325,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	7 Dokumen	4,985,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	12,951,000						100 %	21,555,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD				5 Dokumen	2,084,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	1,680,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				5 Dokumen	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	5 Dokumen	13,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 Orang	10,867,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Orang	6,875,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	80,614,200						100 %	52,095,800	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia				2 Jenis	5,214,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	2 Jenis	2,091,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				1 Jenis	4,477,300	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Jenis	4,477,300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia				20 Jenis	16,505,500	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	20 Jenis	11,159,500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia				2 Jenis	4,422,400	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	2 Jenis	2,118,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				100 Orang	4,995,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	100 Orang	2,250,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah				23 OT	45,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	23 OT	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	973,300,000						100 %	920,750,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat				200 lembar	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	200 lembar	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon				3 Rekening	33,300,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	3 Rekening	30,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia				32 Orang	940,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	32 Orang	885,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	46,760,000						100 %	76,430,000	
3 28 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara				4 Unit	42,860,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	4 Unit	26,430,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara				1 Unit	3,900,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	341,206,000						0,67 %	1,615,000,000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km		Km	18 Km	0						18 Km	250,000,000	
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan				10 Km	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	10 Km	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	150 ha	167,604,000						150 ha	1,305,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Negara														
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	pengkayaan pada hutan rakyat				150 Ha	167,604,000	Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Maluk, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Kehutanan		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	150 Ha	1,305,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	19000 ha	173,602,000						19000 ha	60,000,000	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan				1 Kegiatan	173,602,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Kegiatan	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	unit		unit	1 unit	0						1 unit	0	
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi				1 Unit	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Sejorong Mataiyang	1 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,111,055,800						1,602,439,497		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,372,300,200						BB poin	1,071,840,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	34,645,000						100 %	14,611,300	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,566,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,917,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5,269,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,302,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	8,428,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,555,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,382,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,836,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	20,493,000						100 %	17,654,450	
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	6,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Tahun	6,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Dokumen	9,998,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	7,495,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan				1 Dokumen	4,495,000	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	3,559,050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	/Semesteran SKPD	/Semesteran SKPD						Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	17,626,000						100 %	10,639,200	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1,981,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	1,936,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	tersedianya Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	8,246,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	6,228,200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Tahun	7,399,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Tahun	2,475,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%		%	100 %	995,000						100 %	1,767,700	
3 28 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	tersedianya laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	995,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	1,767,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	3,000,000						100 %	2,200,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	tersusunnya Laporan informasi kepegawaian				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Dokumen	2,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	43,885,200						100 %	31,981,950	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	4,878,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	5 Jenis	1,648,900	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor				3 Jenis	5,730,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Batulanteh	3 Jenis	2,153,580	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	316,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	5 Jenis	720,610	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya ATK				24 Jenis	5,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	24 Jenis	2,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya alat tulis kantor				4 Jenis	3,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	4 Jenis	1,366,860	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2 Jenis	2,955,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	2 Jenis	2,442,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	terfasilitasinya jumlah tamU				82 Orang	4,756,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	82 Orang	3,190,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terfasilitasinya jumlah tamU				82 Orang	17,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	82 Orang	17,600,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,162,024,000						100 %	935,968,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Jasa Surat Menyurat				33 lembar	3,160,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	33 lembar	2,530,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya Jasa Surat Menyurat				3 line	16,080,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	3 line	17,688,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tetrersediaan jasa tenaga kontrak				30 Orang	1,142,784,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	30 Orang	915,750,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	89,632,000						100 %	57,017,400	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan dinas				2 Unit	85,720,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	2 Unit	53,691,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1 Unit	3,912,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 Unit	3,326,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	738,755,600						0,67 %	530,599,497	
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan		kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	48,251,700						1 kegiatan	52,017,337	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lindung	Jumlah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan													
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan				2 Unit	48,251,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kawasan Hutan wilayah KPH Batulanteh	2 Unit	52,017,337	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	30 ha	239,896,400						30 ha	297,000,000	
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Tertanamnya lahan kritis luar kawasan hutan				30 Ha	239,896,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			KPH Batulanteh	30 Ha	297,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	15500 ha	450,607,500						15500 ha	181,582,160	
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan				1 kegiatan	293,191,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 kegiatan	66,000,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan karhutla				1 kegiatan	157,415,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KPH Batulanteh	1 kegiatan	115,582,060	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1,826,017,800						3,048,670,700		
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,504,333,500						BB poin	1,725,154,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	35,647,900					100 %	19,628,000		
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10,520,800	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,285,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	9,341,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,014,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	38,851,000					100 %	9,674,000		
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Tugas ASN				1 Orang	17,363,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Orang	60,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	8,780,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	2,400,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD				1 Dokumen	12,708,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	7,214,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	18,084,400						100 %	5,612,000	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,120,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	520,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10,560,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	4,800,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Data Aset Barang				1 Dokumen	5,404,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	292,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		%	100 %	6,000,000						100 %	5,000,000	
3 28 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%		%	100 %	35,166,000						100 %	39,613,000	
3 28 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediaanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2 Jenis	5,864,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	2 Jenis	632,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				6 Jenis	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	6 Jenis	826,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK				11 Jenis	5,004,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	11 Jenis	2,809,800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				1 Jenis	2,425,500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	1 Jenis	480,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Konsumsi Tamu				82 Orang	4,872,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	82 Orang	4,756,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Untuk Konsultasi Keluar Daerah				3 OT	17,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	3 OT	30,108,400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	0						100 %	299,000,000	
3 28 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				7 Unit	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	7 Unit	299,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	1,304,864,200						100 %	1,303,767,000	
3 28 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				500 Lembar	3,164,200	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup		500 Lembar	2,067,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			dan persampahan (PD-6)				
3 28 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				5 Line	34,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		5 Line	34,200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak				46 Orang	1,267,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)		46 Orang	1,267,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	65,720,000						100 %	42,860,000	
3 28 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas				7 Unit	65,720,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	7 Unit	42,860,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola	%		%	0,67 %	285,430,600						0,67 %	917,384,000	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	ha		ha	100 ha	0						100 ha	857,384,000	
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksannya Monitoring Hutan Rakyat				100 Hektar	0	Kab. Sumbawa, Lape, Lape Kab. Sumbawa, Maronge, Maronge Kab. Sumbawa, Tarano, Banda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6) Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	100 Hektar	857,384,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang terlindungi	ha		ha	25000 ha	285,430,600					25000 ha	60,000,000		
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan				20000 Hektar	285,430,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Ampang Plampang	20000 Hektar	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		%	1,77 %	36,253,700					1,77 %	36,253,700		
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ditingkatkan kompetensinya	orang		orang	1 orang	36,253,700					1 orang	36,253,700		
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial				3 Kelompok	36,253,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	kelompok tani hutan	3 Kelompok	36,253,700	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS		DAS	1 DAS	0					1 DAS	369,879,000		
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	unit		unit	35 unit	0					35 unit	369,879,000		
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Terlaksananya Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS				35 Unit	0	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Daerah Aliran Sungai wilayah KPH Ampang Plampang	35 Unit	369,879,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Sumbawa, Maronge, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Tarano, Semua Kelurahan							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						2,011,036,900							7,658,562,870	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD	poin		poin	BB poin	1,488,402,500						BB poin	3,940,591,870	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	27,012,400						100 %	62,000,000	
3 28 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	9,946,400	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	4,181,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	10,178,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun				1 dokumen	2,707,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	16,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%		%	100 %	29,402,400						100 %	48,925,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 28 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia				15 orang	17,729,900	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	15 orang	27,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun				1 dokumen	8,603,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	12,925,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran yang tersusun Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Triwulan				12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	3,069,500	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	12 dokumen 2 dokumen 4 dokumen	8,500,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%		%	100 %	20,735,800						100 %	37,687,100	
3 28 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun				1 dokumen	5,586,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun				2 dokumen	8,800,000	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	2 dokumen	15,687,100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3 28 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia				1 orang	6,349,800	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	KPH Orong Telu	1 orang	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
																		Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
																							Nasional	Daerah			
2																											
2	12																										
2	12	02																									
2	12	02	1.01																								
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah aparat dukcapil yang melakukan pelayanan pendaftaran kependudukan dengan baik					0 Orang											0 Orang	192,940,049	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					0 Kabupaten/Kota											0 Kabupaten/Kota	42,744,168	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pelayanan pendaftaran penduduk	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	55,429,000										12 Dokumen	110,660,376				
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah kabupaten/Kota yang memahami kebijakan pendaftaran penduduk					0 Kabupaten/Kota											Dukcapil Kabupaten/Kota	0 Kabupaten/Kota	82,164,264	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Balnko KTP-EL yang tersedia sesuai dengan jumlah wajib E-KTP yang sudah melakukan perekaman					100 %	55,429,000										Dukcapil Kabupaten/Kota	100 %	28,496,112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %				0 %												100 %	257,461,800			
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan Pelayanan Pencatatan	Dokumen			Dokumen	12 Dokumen	28,944,700											12 Dokumen	257,461,800			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Sipil													
2 12 03 1.01 01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah aparat dukcapil yang memahami kebijakan bidang pencatatan sipil				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kabupaten/Kota	0 Orang	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 03 1.01 03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah peserta Bimtek di Bidang Pencatatan Sipil				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kabupaten/Kota	0 Orang	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 03 1.01 04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil				100 %	28,944,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kabupaten/Kota	100 %	85,820,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %		0 %	100 %	206,607,300					100 %	1,181,583,569		
2 12 04 1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan adminduk	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	25,475,400					10 Kabupaten/Kota	272,541,087		
2 12 04 1.02 01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan informasi adminduk				0 %	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0 %	12,562,083	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 1.02 02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi peraturan terkait dukcapil di media cetak dan elektronik				8 Kali	25,475,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	8 Kali	169,448,282	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 1.02 03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah peserta Rakor dalam rangka Komunikasi, informasi dan edukasi kepada				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			0	0 Orang	74,549,533	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pemangku kepentingan dan masyarakat						Semua Kelurahan							
2 12 04 1.02 04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah pegawai lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang memahami kebijakan pengelolaan informasi adminduk				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0 Orang	15,981,189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Meningkatnya kedisiplinan dan pemahaman aparat dukcapil dalam pengelolaan informasi adminduk	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	181,131,900					10 Kabupaten/Kota	909,042,482		
2 12 04 1.03 01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Pembinaan terkait pengelolaan Adminduk				10 Kabupaten/Kota	60,788,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dukcapil Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	195,198,366	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 04 1.03 02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah aparat Dukcapil yang terbina terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				40 Orang	120,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Dukcapil Kabupaten/Kota	40 Orang	713,844,116	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan bidang catatan sipil	0		0	0 0	19,479,000					0 0	60,000,000		
2 12 05 1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase OPD memperoleh informasi dara agregat kependudukan	%		%	100 %	19,479,000					100 %	60,000,000		
2 12 05 1.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah buku data profil kependudukan yang tersusun setiap semester				0 Buku	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	0 Buku	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 12 05 1.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta	Jumlah buku profil data kependudukan yang tersusun				50 Buku	19,479,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	50 Buku	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kebutuhan yang lain							Kecamatan, Semua Kelurahan							Pencatatan Sipil
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						14,448,589,660						22,999,644,566		
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip OPD Persentase Realisasi Keuangan	Nilai %		Nilai %	A Nilai 95 %	10,208,590,220					A Nilai 95 %	12,961,166,399		
2 13 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPM LS dan GU yang diajukan	Dokumen		Dokumen	70 Dokumen	8,064,276,370					70 Dokumen	10,665,856,780		
2 13 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjingannya				78 Orang	7,855,205,370	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	78 Orang	10,521,224,765	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun				9 Dokumen	62,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	9 Dokumen	143,107,473	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pembayaran Uang Lembur				100 %	146,101,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	100 %	1,524,542	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kabupaten yang dilakukan koordinasi penyelarasan program/kegiatan	Kabupaten		Kabupaten	8 Kabupaten	502,603,050						8 Kabupaten	321,223,868	
2 13 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				8 Jenis	7,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	8 Jenis	9,909,950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				28 Jenis	31,297,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	28 Jenis	10,684,581	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				415 Porsi	30,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	415 Porsi	36,759,984	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Bahan yang dicetak				4 Jenis	24,163,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	4 Jenis	21,479,799	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan				36 Eksemplar	5,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	36 Eksemplar	5,385,765	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan Material yang disediakan				3 Jenis	38,262,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	3 Jenis	42,744,310	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelarasan Perencanaan Program dan Kegiatan				100 Orang	323,656,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	100 Orang	150,999,756	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang tertata				60 Arsip	1,954,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	60 Arsip	11,914,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Online				32 Kali	39,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			PMD Kabupaten	32 Kali	31,345,723	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan yang diadakan untuk mendukung kegiatan ASN	Unit		Unit	18 Unit	120,928,200						18 Unit	426,354,862	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 13 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan				0 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN DPMPD DUKCAPIL	0 Unit	357,433,169	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Barang yang diadakan				18 Unit	120,928,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN DPMPD DUKCAPIL	18 Unit	68,921,693	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aplikasi yang diadakan				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ASN DPMPD DUKCAPIL	0 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Tenaga yang di Kontrak	Orang		Orang	21 Orang	850,489,600					21 Orang	1,145,545,831		
2 13 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat				1 Jenis	1,530,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	1 Jenis	1,823,751	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang dibayar				4 Jenis	162,039,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	4 Jenis	162,053,826	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang dipekerjakan				21 Orang	686,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tenaga Kontrak DPMPD DUKCAPIL	21 Orang	981,668,254	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dirawat/pelihara untuk menunjang kinerja ASN	Unit		Unit	76 Unit	670,293,000					76 Unit	402,185,058		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 13 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki				35 Unit	307,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	35 Unit	276,355,292	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dirawat				20 Set	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	20 Set	7,124,028	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang dirawat				24 Unit	16,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	24 Unit	13,193,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luasan Gedung yang direhab				540 M2	340,763,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN DPMPD DUKCAPIL	540 M2	105,512,038	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	25 %		0 %	20 %	250,000,000						20 %	119,143,304	
2 13 03 1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa yang telah difasilitasi untuk melakukan kerjasama antar desa/pihak ketiga	Desa		Desa	40 Desa	250,000,000						40 Desa	119,143,304	
2 13 03 1.01 01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang telah melakukan kerjasama antar desa				80 Desa	84,164,300	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	80 Desa	31,689,519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 03 1.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah desa yang telah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga				40 Desa	65,835,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	40 Desa	31,689,519	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 03 1.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang telah membentuk kawasan perdesaan				64 Desa	100,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Desa	64 Desa	55,764,266	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa yang mampu melaksanakan penata usaha administrasi umum, keuangan dan aset desa dengan baik dan benar	%		%	72 %	658,000,900						72 %	334,829,314	
2 13 04 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Kali		Kali	5 Kali	658,000,900						5 Kali	334,829,314	
2 13 04 1.01 02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumah Desa yang telah membentuk rumah desa sehat				12 Desa	134,914,000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			0	12 Desa	71,484,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 13 04 1.01 03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang telah menetapkan batas desa dan menghasilkan produk hukum desa				96 Desa	149,999,900	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			0	96 Desa	94,043,296	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam penanganan covid-19 dengan benar				60 Desa	131,671,800	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	60 Desa	47,949,822	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 04 1.01 08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang tertib administrasi				20 Desa	133,414,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua	DBH CHT			0	20 Desa	71,484,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2 13 04 1.01 09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Operator Profil Desa yang Aktif mengisi dan atau mengupdate data pada Aplikasi Profil Desa				20 Desa	108,001,200	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			0	20 Desa	49,868,196	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase BUMDes Berprestasi Persentase Lembaga Adat Aktif Persentase Pokja Posyandu aktif Persentase Posyantek yang aktif	% % % %		% % % %	65 % 65 % 80 % 56,41 %	3,331,998,540						65 % 65 % 80 % 56,41 %	9,584,505,549	
2 13 05 1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	%		%	27 %	3,331,998,540						27 %	9,584,505,549	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2 13 05 1.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Adat yang telah mengeluarkan awiq-awiq				30 Lembaga Adat	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Lembaga Kemasyarakatan Desa	30 Lembaga Adat	911,311,217	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 05 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang telah mengeluarkan produk hukum terkait pelaksanaan posyandu Jumlah Desa yang telah menginput data posyandu pada aplikasi SIP Jumlah Pokja Posyandu yang telah melaksanakan tupoksinya dengan benar Jumlah posyandu juara Jumlah program OPD yang telah terintegrasi dengan Program Revitalisasi Posyandu				100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	699,999,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Lembaga Kemasyarakatan Desa	100 Desa 240 Desa 100 Desa 3 Posyandu 5 Program	416,990,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2 13 05 1.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa yang dapat mendayagunakan Bantuan Mesin Pengolah Sampah dan Komoditi Unggulan Jumlah Pengurus BUMDes yang dapat membuat Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Mesin dengan benar				13 Desa 60 Orang	820,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Lembaga Kemasyarakatan Desa	13 Desa 60 Orang	6,290,659,155	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 05 1.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengurus Posyantek/Aparat Desa dan Petani Tembakau yang bisa mendayagunakan Mesin Rajang Tembakau				50 Orang	71,998,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Lembaga Kemasyarakata n Desa	50 Orang	284,961,118	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				0 Kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Lembaga Kemasyarakata n Desa	0 Kali	244,592,030	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kader Dasawisma yang dapat menjalankan 10 Program Pokok PKK Jumlah paralegal yang mampu menyelesaikan kasus/perselisihan antar warga ditingkat desa/Kel				70 Orang 20 Paralegal	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Kemasyarakata n Desa	70 Orang 20 Paralegal	244,592,029	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 13 05 1.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hibah uang yang diserahkan				1 Tahun	1,500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Lembaga Kemasyarakata n Desa	1 Tahun	1,191,400,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
TOTAL							14,759,049,660							24,845,034,528	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi				1 Dokumen	24,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dinas Perhubungan Provinsi NTB	1 Dokumen	17,410,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	Orang/ bulan		Orang/ bulan	1139 Orang/ bulan	6,269,495,771						1139 Orang/ bulan	7,597,606,153	
2 15 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terbayarkan				1139 Orang/ bulan	6,238,193,971	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		1139 Orang/ bulan	7,554,898,853	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga administrasi keuangan ASN				108 Orang/ bulan	20,964,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		108 Orang/ bulan	28,804,600	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid				1 Dokumen	10,337,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		1 Dokumen	13,902,700	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10,113,000						1 Dokumen	18,612,500	
2 15 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif				1 Dokumen	3,563,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		1 Dokumen	5,043,500	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi Aset Dishub				1 Dokumen	6,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0		1 Dokumen	13,569,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan SDM	Orang		Orang	4 Orang	54,500,000						4 Orang	100,000,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti dilkat				4 Orang	54,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	4 Orang	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan adminitasi umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	559,475,700					7 Kegiatan	648,799,500		
2 15 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				6 Jenis	21,244,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	6 Jenis	13,200,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	37,662,475	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	5 Unit	53,048,100	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor				43 Jenis	39,647,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	43 Jenis	54,818,700	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				6 Jenis	25,271,725	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	6 Jenis	62,772,500	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksplar bahan bacaan (surat kabar)				1460 Eksemplar	5,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1460 Eksemplar	11,738,200	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan				2440 Orang/ kali	61,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2440 Orang/ kali	135,487,000	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat				47 Dokumen	369,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	47 Dokumen	317,735,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Unit		Unit	1 Unit	27,000,000					1 Unit	134,750,000		
2 15 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				1 Unit	27,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel kantor yang memadai				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	3 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	8 Unit	84,750,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	1,005,527,500					4 Kegiatan	1,234,508,650		
2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar & masuk				2300 Surat	2,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	2300 Surat	2,398,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik				180 Rekening	302,767,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	180 Rekening	378,458,300	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis perlengkapan dan peralatan kantor				4 Jenis	29,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	4 Jenis	43,631,600	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor Jumlah penceramah (Dai) dan pemandu senam				258 Orang/ bulan 0 Orang/ bulan	670,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	258 Orang/ bulan 0 Orang/ bulan	810,020,750	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	242,070,000					3 Kegiatan	253,899,700		
2 15 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1 Unit	29,975,000	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional				32 Unit	192,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	32 Unit	223,924,700	Dinas Perhubungan	
2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor				1 Paket	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1 Paket		0 Dinas Perhubungan	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	% % %		% % %	35 % 98.59 % 80.40 % 49.39 %	2,825,015,900					35 % 98.59 % 80.40 % 49.39 %	4,784,756,500		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik													
2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis		Jenis	2 Jenis	444,368,000					2 Jenis	0		
2 15 02 1.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan				1 Jenis	299,618,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) 0	1 Jenis	0	Dinas Perhubungan		
2 15 02 1.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan				1 Paket	144,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) 0	1 Paket	0	Dinas Perhubungan		
2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah fasilitas pengelolaan terminal yang memadai	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	861,806,250				6 Dokumen	1,020,170,500			
2 15 02 1.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal				1 Dokumen	22,153,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) 0	1 Dokumen	102,768,600	Dinas Perhubungan		
2 15 02 1.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana				4 Dokumen	686,160,900	Semua Kab/Kota, Semua		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar 0	4 Dokumen	715,559,900	Dinas Perhubungan		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
		Terminal						Kecamatan, Semua Kelurahan									
2 15 02 1.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara				1 Paket	153,492,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	1 Paket	201,842,000	Dinas Perhubungan			
2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen		Dokumen	21 Dokumen	707,152,000					21 Dokumen	909,790,200				
2 15 02 1.05 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah orang yang meninggal akibat kecelakaan berkurang				18 Dokumen	355,663,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	18 Dokumen	550,091,300	Dinas Perhubungan			
2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah pelanggaran angkutan umum berkurang				3 Dokumen	351,489,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	3 Dokumen	359,698,900	Dinas Perhubungan			
2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit		Unit	9 Unit	160,947,750					9 Unit	298,710,500				
2 15 02 1.07 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina				9 Unit	46,987,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0	9 Unit	119,898,900	Dinas Perhubungan			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 15 02 1.07 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan				78 Unit Kendaraan	113,959,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	78 Unit Kendaraan	178,811,600	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan umum subsidi	Trayek		Trayek	2 Trayek	512,702,000					2 Trayek	2,196,385,300		
2 15 02 1.08 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek Bus Disabilitas yang bersubsidi				2 Taryek	462,272,000				0	2 Taryek	1,836,701,000	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas				5 Kab/ Kota	50,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	5 Kab/ Kota	359,684,300	Dinas Perhubungan	
2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	unit		unit	520 unit	74,840,000					520 unit	239,800,000		
2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum				520 Unit	74,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	520 Unit	239,800,000	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Kendaraan		Kendaraan	846 Kendaraan	63,199,900					846 Kendaraan	119,900,000		
2 15 02 1.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)				846 Unit Kendaraan	63,199,900			0		846 Unit Kendaraan	119,900,000	Dinas Perhubungan	
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%		%	61.61 %	294,984,100					61.61 %	507,448,950		
2 15 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Perizinan Angkutan Laut	Dokumen		Dokumen	68 Dokumen	49,372,900					68 Dokumen	74,110,000		
2 15 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Dokumen Perizinan Angkutan Laut				38 Dokumen	49,372,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	38 Dokumen	74,110,000	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	unit		unit	23 unit	30,793,300					23 unit	174,672,700		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional														
2 15 03 1.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi				23 Unit	30,793,300				0	23 Unit	174,672,700	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit		Unit	22 Unit	136,992,400					22 Unit	216,691,750		
2 15 03 1.05 02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi				22 Unit	136,992,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	22 Unit	216,691,750	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 15 03 1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Dokumen		Dokumen	119 Dokumen	23,158,700					119 Dokumen	41,974,500		
2 15 03 1.06 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan usaha dipelabuhan yang diawasi				119 Dokumen	23,158,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	119 Dokumen	41,974,500	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.07	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						0						0		
2 15 03 1.07 01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyeberangan				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan		1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota										dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
2 15 03 1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						0						0		
2 15 03 1.08 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen RIP Pelabuhan Regional				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pelabuhan yang Diawasi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	54,666,800					1 Dokumen	0		
2 15 03 1.09 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah data pelabuhan				1 Dokumen	54,666,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	1 Dokumen	0 Dinas Perhubungan	
TOTAL							11,361,593,971						15,360,543,703		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							16,038,051,155		23,107,744,608			
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai LKJIP (SAKIP) OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	8,990,000,955			BB Nilai	13,940,918,219		
2	16	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD	Dokumen Jenis	Dokumen Jenis	1 Dokumen 1 Jenis		15,146,500			1 Dokumen 1 Jenis	62,123,402		
2	16	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	6,922,726	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	1,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 Dokumen	102,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,729,022	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1,198,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,584,696	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	16	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD			1 Dokumen	2,160,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1,736,671	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen	9,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7 Dokumen	48,565,591	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan Persentase Pengelolaan Keuangan Dinas (%)	orang %		orang %	65 orang 100 %	4,803,151,155						65 orang 100 %	8,960,676,010	
2 16 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan				65 ASN	4,781,051,155	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	65 ASN	8,941,249,774	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan				6 ASN	16,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 ASN	12,614,064	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5,390,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	6,812,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah (jenis) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	jenis %		jenis %	1 jenis 75 %	11,426,000						1 jenis 75 %	2,092,722	
2 16 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah				1 Dokumen	11,426,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	2,092,722	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19,524,000							38,967,934	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				5 orang	19,524,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	5 orang	38,967,934	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						439,523,800						799,333,637		
2 16 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia				15 Jenis	12,095,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	15 Jenis	17,886,282	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				79 Jenis	72,897,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	79 Jenis	118,356,006	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia				3 Jenis	43,616,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 Jenis	59,173,529	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				9 Jenis	21,020,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	9 Jenis	34,134,467	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia				5700 eksemplar	59,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	5700 eksemplar	122,619,098	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi				55 orang	39,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	55 orang	57,326,160	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi				150 orang	190,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		150 orang	389,838,095	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						115,152,500							443,235,421	
2 16 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				1 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	288,651,360	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				6 Unit	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Unit	44,436,145	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli				8 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		8 Unit	63,503,299	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli				3 Unit	111,152,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Unit	46,644,617	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening yang dibayarkan (rekening)	buah		buah	15 buah	2,661,687,000						15 buah	2,944,496,881	
2 16 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar				880 surat	1,695,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		880 surat	8,359,776	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan				15 rekening	457,932,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	Reformasi birokrasi dan transformasi		15 rekening	660,913,474	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%		%	70 %	6,103,050,200					70 %	6,702,957,549		
2 16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	%		%	80 %	6,103,050,200					80 %	6,702,957,549		
2 16 02 1.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi				2 Dokumen	413,050,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	2 Dokumen	361,052,338	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik				701 informasi	3,387,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	701 informasi	1,587,444,652	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah				690 informasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	690 informasi	114,738,050	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi				5 Lembaga/pers	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	5 Lembaga/pers	36,081,131	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi				480 aparatur/orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	480 aparatur/orang	109,720,279	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan				4 kasus	858,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya Persentase Perangkat	4 kasus	1,551,207,649	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)	Daerah yang Informatif			
2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi				15 kelompok/komunitas	445,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	15 kelompok/komunitas	509,787,788	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik				10 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	10 Unit	432,925,661	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK	%		%	55 %	945,000,000						55 %	2,463,868,840	
2 16 03 1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Kualifikasi/Level Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	%		%	3 %	945,000,000						3 %	2,463,868,840	
2 16 03 1.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government				2 Dokumen	21,980,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	2 Dokumen	634,750,115	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data				46 OPD	734,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	46 OPD	1,185,635,464	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi				23 OPD	187,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	23 OPD	539,633,718	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 16 03 1.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan				3 aplikasi	1,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat	3 aplikasi	103,849,543	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan			(PD-3)	Daerah			
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						150,000,000							605,446,228	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%		%	25 %	150,000,000						25 %	605,446,228	
2 20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Data yang Tervalidasi (%)	%		%	50 %	150,000,000						50 %	605,446,228	
2 20 02 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia				530 Jenis	21,244,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	530 Jenis	54,019,082	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman				55 aparatur/orang	51,000,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	55 aparatur/orang	377,189,970	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun				15 Jenis	13,786,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	15 Jenis	26,548,709	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah				46 OPD	19,468,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	46 OPD	31,506,296	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik				6 OPD	44,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Kualitas Data Perangkat Daerah	6 OPD	116,182,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						150,000,000							590,292,031	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%		%	40 %	150,000,000						40 %	590,292,031	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PENGAMANAN INFORMASI	pada Perangkat Daerah													
2 21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%		%	40 %	97,550,000					40 %	463,574,084		
2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi				1 Dokumen	20,918,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	1 Dokumen	56,950,913	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber				5 orang	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	5 orang	262,297,491	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah				16 insiden	54,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	16 insiden	111,852,402	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah				30 OPD	2,192,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	30 OPD	32,473,278	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	%		%	65 %	52,450,000						65 %	126,717,947	
2 21 02 1.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi				30 OPD	52,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya Indeks Kematangan Keamanan Informasi	30 OPD	126,717,947	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
TOTAL							16,338,051,155							24,303,482,867	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17						18,746,952,494							21,214,851,274					
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	10,242,459,494			BB Nilai	15,521,391,178			
2	17	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	840,000,000			6 Dokumen	1,595,270,404			
2	17	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun				5 Dokumen	398,707,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	5 Dokumen	627,164,450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun				1 Dokumen	28,098,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	35,508,733	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	29,259,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	31,753,095	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	13,033,820	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	19,379,277	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	10,887,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	1 Dokumen	13,114,895	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun				2 Dokumen	27,073,320	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	2 Dokumen	37,231,381	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				5 Laporan	332,940,140	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, Kab/Kota se-NTB	5 Laporan	831,118,573	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,852,459,494							11,894,539,702	
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan administrasi keuangan				6 Laporan	7,722,459,494	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar		6 Laporan	11,797,301,121	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN pelaksana tugas				8 Orang	102,350,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	8 Orang	62,101,209	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	11,144,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	1 Dokumen	16,748,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				3 Laporan	16,504,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	3 Laporan	18,389,180	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	27,511,200					1 Dokumen	8,831,903		
2 17 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen aset/barang daerah yang tersusun				1 Dokumen	27,511,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Dokumen	8,831,903	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM berdasarkan Tugas dan Fungsi	SDM		SDM	5 SDM	29,997,500					5 SDM	74,780,731		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat				5 Orang	29,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	5 Orang	74,780,731	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	291,898,700					7 Kegiatan	662,201,766		
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Rekening				3 Rekening	20,385,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Rekening	24,644,738	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	14,504,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Jenis	15,703,953	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terisinya Tabung Pemadam Kebakaran dan Gas Elpiji				1 Tahun	7,907,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1 Tahun	11,665,794	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan kebutuhan kantor				4 Jenis	52,960,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	4 Jenis	52,906,619	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan				6 Jenis	12,732,500	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	6 Jenis	11,696,604	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		penggandaan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar bahan bacaan (surat kabar)				3 Eksemplar	17,520,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	3 Eksemplar	101,223,197	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu kedinasan				1300 Orang/Kali	39,325,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	1300 Orang/Kali	55,728,096	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD dalam daerah dan luar daerah program pemerintah Kab/Kota, Provinsi dan Pusat				24 Dokumen	101,441,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	24 Dokumen	315,434,993	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Akuisi Arsip Inaktif				2000 Berkas	25,122,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB	2000 Berkas	73,197,772	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang OPD	Paket		Paket	5 Paket	138,213,000						5 Paket	277,311,028	
2 17 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0		0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia				14 unit	138,213,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	14 unit	277,311,028	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan OPD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	762,518,000						3 Kegiatan	628,988,204	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Keluar				2500 Surat	4,551,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	2500 Surat	7,949,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	193,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	1 Tahun	310,519,506	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah sumber daya air, listrik, telpon dan internet yang dibayar				1 Tahun	564,567,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	1 Tahun	310,519,506	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Pemeliharaan BMD	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	299,861,600						3 Kegiatan	379,467,439	
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas yang dipelihara				27 Unit	213,054,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	0	27 Unit	343,931,536	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Operasional atau Lapangan							Kelurahan		pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)					
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara				30 Unit	51,807,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	30 Unit	35,535,803	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 gedung	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	1 gedung	100	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	%		%	50 %	670,000,000					50 %	384,495,139		
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terwujudnya Koperasi Mandiri, Sehat, Akuntabel dan Transparan	Kop		Kop	40 Kop	670,000,000					40 Kop	384,495,139		
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat						420,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Koperasi Binaan Provinsi di Kab/Kota	309,793,226	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 03 1.01 02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya						250,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan		Koperasi Binaan Provinsi di Kab/Kota	74,701,913	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel									Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kesehatan KSP/USP Berkualitas	%		%	35 %	2,679,999,500					35 %	1,582,179,296		
2 17 04 1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya KSP/USP Syariah Yang Berkualitas	Kop		Kop	35 Kop	2,679,999,500					35 Kop	1,582,179,296		
2 17 04 1.01 01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi						2,379,999,500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Provinsi/Kab/Ko ta se-NTB		1,393,824,618	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 04 1.01 02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi						300,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Provinsi/Kab/Ko ta se-NTB		188,354,678	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Modern	Kop		Kop	20 Kop	1,500,000,000					20 Kop	753,418,713		
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya FGD, Penguatan kelemb. Rapat pembinaan, & Gerakan Manajemen Kop, Temu Konsult. Standarisasi Produk dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Kop		Kop	20 Kop	1,500,000,000					20 Kop	753,418,713		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						260,500,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pembina/Dinas Kop., Gerakan Koperasi UMKM Kab/Kota se-NTB	339,038,421	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						1,239,500,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pembina/Dinas Kop., Gerakan Koperasi UMKM Kab/Kota se-NTB	414,380,292	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Capaian Usaha kecil menjadi Menengah Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	PUK %		PUK %	5 PUK 6.35 %	3,047,000,000						5 PUK 6.35 %	1,929,200,188	
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan Akses Permodalan/Pembiayaan, Akses Teknologi Informasi, serta Akses Sumber Daya Produktif	PUK		PUK	5 PUK	3,047,000,000						5 PUK	1,929,200,188	
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan akses permodalan/ pembiayaan, akses teknologi informasi, serta akses sumber daya Produktif				40 UKM	3,047,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		Provinsi/Kab/Kota se-NTB	40 UKM	1,929,200,188	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						607,493,500							1,044,166,761	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						607,493,500						1,044,166,761		
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran dan jaringan usaha melalui Promosi/Expo, dan Pameran di Provinsi Lainnya				30 UKM	607,493,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)		30 UKM	1,044,166,761	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						3,269,964,000						4,966,886,808		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	%		%	100 %	850,000,000						100 %	1,422,684,637	
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	66,173,500						1 Dokumen	105,606,701	
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan				1 Dokumen	66,173,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Dokumen	105,606,701	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola Administrasi keuangan	Orang		Orang	4 Orang	14,039,900						4 Orang	16,355,967	
2 17 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jasa Pengelola keuangan				4 Orang	14,039,900	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	ASN	4 Orang	16,355,967	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	ASN							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2) Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan	buah		buah	1 buah	17,290,500					1 buah	1,236,360		
2 17 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	17,290,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Dokumen	1,236,360	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	37,665,450					1 Tahun	35,740,806		
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Yang Tersedia				1 Tahun	7,704,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Tahun	882,533	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik yang tersedia				1 Tahun	18,539,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Tahun	19,449,052	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia				1 Tahun	6,020,750	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Tahun	7,272,299	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Koran yang tersedia				1 Tahun	5,400,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	ASN	1 Tahun	8,136,922	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	11 Unit	112,940,700						11 Unit	150,000,000	
2 17 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						112,940,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0		150,000,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	440,937,950						1 Tahun	987,770,181	
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Surat Yang Keluar				1000 Surat	6,743,950	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	1000 Surat	8,130,895	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Tahun	126,780,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 Tahun	92,218,450	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga PTT, Tenaga Administrasi, Petugas Kebersihan, Penjaga Malam dan Tenaga Pengamanan kantor yang dibayar Jumlah tenaga penceramah yang dibayarkan				15 Orang 12 kali	307,414,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	15 Orang 12 kali	887,420,836	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	160,952,000					1 Tahun	125,974,622		
2 17 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				6 Unit	51,240,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	6 Unit	77,210,350	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				40 Unit	12,052,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	40 Unit	5,728,996	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara				1 Tahun	25,274,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Tahun	15,080,429	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2 17 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang dipelihara				1 Tahun	72,386,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Tahun	27,954,848	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kapasitas SDM Koperasi Yang Ditingkatkan	%		%	13,8 %	741,132,800					13,8 %	1,390,651,369		
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat	Orang		Orang	480 Orang	741,132,800					480 Orang	1,390,651,369		
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diDiklat				480 Orang	741,132,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pengurus, Pengelola dan Pengawas Koperasi Konvensional/S yariah	480 Orang	1,390,651,369	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kapasitas SDM UMKM Yang Ditingkatkan	%		%	4,74 %	1,678,831,200					4,74 %	2,153,550,801		
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM Yang diDIKLAT	Orang		Orang	420 Orang	1,678,831,200					420 Orang	2,153,550,801		
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM dan Tenaga Pendamping Diklat KUKM yang di Diklat				420 Orang	1,678,831,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- PK2UKM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	UMKM, Tenaga Pendamping Diklat KUKM	420 Orang	2,153,550,801	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
TOTAL							22,016,916,494						26,181,738,082		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	18						10,347,361,485							11,578,353,390					
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Lakip Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	Nilai A Nilai	7,924,143,785			Nilai A Nilai	7,496,026,794			
2	18	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evluasi kinerja	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	206,077,300			2 Dokumen	463,771,200			
2	18	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	79,302,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Dokumen	160,113,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				2 Dokumen	82,403,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Dokumen	131,847,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	44,371,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Dokumen	171,810,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	6,166,849,385					100 Persen	3,916,968,153	
2	18	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	6,111,153,485	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Tahun	3,796,465,418	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	1.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	20,051,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Tahun	77,176,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah ASN				1 Tahun	35,644,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	1 Tahun	43,325,935	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen BMD	%		%	100 %	8,636,900						100 %	24,746,800	
2 18 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen				2 Dokumen	8,636,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	2 Dokumen	24,746,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sumber daya yang disiplin dan berkapasitas	Persen		Persen	100 Persen	5,280,000						100 Persen	24,400,000	
2 18 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah jenis/unit				2 Jenis/Unit	5,280,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah	2 Jenis/Unit	24,400,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	422,869,200						100 Persen	1,407,439,041	
2 18 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/unit				4 Jenis	168,823,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	4 Jenis	232,957,120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				1 Tahun	65,776,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Tahun	194,251,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				1 Jenis	44,923,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 Jenis	73,697,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				2 Jenis	9,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Jenis	15,510,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu				2 fasilitas	36,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 fasilitas	280,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				12 %	97,985,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	12 %	610,523,121	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	833,081,000						100 Persen	888,361,600	
2 18 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				2 Jenis	10,305,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Jenis	23,110,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				4 Jenis	177,670,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	4 Jenis	153,769,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis/unit				25 Unit	45,106,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	25 Unit	111,481,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah orang				19 Orang	600,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	19 Orang	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	281,350,000					100 Persen	770,340,000		
2 18 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit				25 Unit	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	25 Unit	173,340,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit				25 Unit	194,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	25 Unit	222,300,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				4 Jenis	61,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	4 Jenis	374,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio peningkatan iklim investasi	%		%	55 %	633,418,460					55 %	673,709,100		
2 18 02 1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan	Kebijakan		Kebijakan	2 Kebijakan	451,979,400					2 Kebijakan	273,596,900		
2 18 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah insentif/kebijakan yang diberikan kepada investor				2 Insentif/Kebijakan	349,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7) Memperkuat integrasi hulu-	Pemerintah dan Dunia Usaha	2 Insentif/Kebijakan	161,548,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)				
2 18 02 1.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Rekomendasi yang diberikan				1 Rekomendasi	102,109,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Rekomendasi	112,048,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah peta dan dokumen RUPM	Jenis		Jenis	2 Jenis	181,439,060						2 Jenis	400,112,200	
2 18 02 1.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi RUPM				1 Dokumen	100,915,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Dokumen	187,849,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02 1.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah peta potensi				1 Peta	80,523,340	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	1 Peta	212,263,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi penanaman modal	Persen		Persen	Nasional/Internasional 80 Persen Persen	421,937,840						Nasional/Internasional 80 Persen Persen	1,117,895,400	
2 18 03 1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen promosi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	421,937,840						2 Dokumen	1,117,895,400	
2 18 03 1.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah buku/vidio/film				1 buku/vidio/film	139,662,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	1 buku/vidio/film	480,398,300	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03 1.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah event				2 Event	282,274,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah, UMKM dan Dunia Usaha	2 Event	637,497,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	%		%	90 %	413,595,800					90 %	985,604,376		
2 18 04 1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perizinan kewenangan provinsi lintas kab/kota	izin		izin	4 izin	97,957,800					4 izin	120,058,076		
2 18 04 1.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkupnya lintas Kab/Kota				4 izin/non izin	97,957,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan aparatur pemerintah dan dunia usaha	4 izin/non izin	120,058,076	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dok layanan perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	315,638,000					3 Dokumen	865,546,300		
2 18 04 1.02 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah layanan yang menjadi kewenangan provinsi				3600 Izin/nonizin	156,360,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	3600 Izin/nonizin	328,222,600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen				10 Perusahaan	91,992,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	10 Perusahaan	465,058,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 1.02 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen				2 Dokumen	67,284,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Investor, UMKM dan Aparatur Pemerintah dan Dunia usaha	2 Dokumen	72,264,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio realisasi investasi dengan target daerah	%		%	55 %	876,208,000					55 %	1,188,167,720		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	perusahaan		perusahaan	500 perusahaan	876,208,000					500 perusahaan	1,188,167,720		
2 18 05 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen realisasi investasi				4 Dokumen	152,303,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	4 Dokumen	285,072,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina				5 Perusahaan	473,937,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	5 Perusahaan	358,792,320	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi				20 Perusahaan	249,967,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	20 Perusahaan	544,303,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rasio izin investasi yang ditindaklanjuti	%		%	55 %	78,057,600						55 %	116,950,000	
2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang diterbitkan melalui DPMPPTSP	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	78,057,600						2 Dokumen	116,950,000	
2 18 06 1.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPPTSP				2 Dokumen	78,057,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Pemerintah dan Dunia Usaha	2 Dokumen	116,950,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TOTAL							10,347,361,485							11,578,353,390	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	(PD-3)				
2 19 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	11,903,500	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	8,277,559	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	3,195,458,714						19 Dokumen	7,836,892,453	
2 19 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				63 Orang	3,070,458,754	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	63 Orang	7,707,635,141	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	95,651,560	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	71,856,569	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	3,835,560	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	11,076,569	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	8,738,900	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	15,302,469	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	3,143,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Dokumen	4,810,147	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				19 Dokumen	8,491,640	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	19 Dokumen	17,934,275	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				12 Dokumen	5,139,300	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	12 Dokumen	8,277,283	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2 19 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Asset	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2,445,400						1 Dokumen	4,954,588	
2 19 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2,445,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Asset/BMD Dispora NTB	2 Dokumen	4,954,588	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	Dokumen		Dokumen	61 Dokumen	1,819,100						61 Dokumen	3,746,499	
2 19 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang				65 Orang	1,819,100	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	65 Orang	3,746,499	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Baik	%		%	100 %	204,168,840						100 %	870,431,402	
2 19 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	5 Jenis	5,932,152	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	5 Jenis	8,423,656	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				35 Jenis	57,513,840	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	35 Jenis	92,043,406	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis				4 Jenis	18,955,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	4 Jenis	130,574,940	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Eksemplar				384 Eksemplar	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	384 Eksemplar	32,309,534	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Orang				300 Orang	29,000,000	Kota Mataram,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya	Reformasi birokrasi dan	Dispora NTB dan	300 Orang	49,319,635	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Sekarbela, Kekalik Jaya		Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	transformasi pelayanan publik (PD-3)	Stakeholder Terkait			
2 19 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang/Trip				75 OT	91,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas keehatan SDM (PD-4)	Dispora NTB dan Stakeholder Terkait	75 OT	551,828,079	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Baik	Unit		Unit	10 Unit	0						10 Unit	277,059,083	
2 19 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				1 Unit	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Dispora NTB	1 Unit	277,059,083	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	1,101,360,000						19 Dokumen	1,376,121,272	
2 19 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1200 Nomor	2,460,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasio nal Kantor	1200 Nomor	6,208,066	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				3 Jenis	247,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasio nal Kantor	3 Jenis	355,929,111	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang				26 Orang	851,400,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasio nal Kantor	26 Orang	1,013,984,095	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	18 Unit	225,910,000						18 Unit	505,681,456	
2 19 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasio nal Kantor	1 Unit	34,696,190	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				26 Unit	171,100,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	26 Unit	236,044,461	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit				1 Unit	29,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	93,424,494	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit				1 Unit	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	141,516,311	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	% %		% %	100 % 100 %	2,185,249,670						100 % 100 %	4,339,378,734	
2 19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Berprestasi Jumlah Pemuda Peserta Pelatihan Yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah Peserta Peringatan HSP 2022 Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Jumlah Sarana Prasarana Terlaksananya pelatihan kecakapan pemuda	Lembaga Orang Orang Orang Unit 0 Orang		Lembaga Orang Orang Orang Unit 0 Orang	52 Lembaga 70 Orang 700 Orang 300 Orang 3 Unit 160 Orang	2,185,249,670						52 Lembaga 70 Orang 700 Orang 300 Orang 3 Unit 160 Orang	4,339,378,734	
2 19 02 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi yang Berprestasi				15 Orang	94,464,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	15 Orang	206,979,400	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda yang di Latih				100 Orang	83,244,600	Kab. Lombok Barat, Batu Layar, Senggigi	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Kelompok Pemuda	100 Orang	185,751,677	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional				400 Orang	203,470,870	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	400 Orang	697,258,231	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan				2 Unit	250,000,000	Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	2 Unit	376,675,639	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan				20 kelompok	1,533,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	20 kelompok	2,780,806,545	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 02 1.01 09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda				120 orang	20,569,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Kelompok Pemuda	120 orang	91,907,242	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%		%	100 %	5,043,122,544						100 %	7,675,298,572	
2 19 03 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Presentase sarana prasarana olahraga yang terstandar	%		%	45 %	199,141,000						45 %	199,141,000	
2 19 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang di Pelihara				3 Unit	199,141,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Atlit Pelajar	3 Unit	199,141,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Olahraga Provinsi									Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					
2 19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh	Medali		Medali	40 Medali	393,981,400					40 Medali	1,936,955,599		
2 19 03 1.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemassalan Olahraga				5 Event	199,986,600	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Masyarakat Umum	5 Event	132,543,034	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional				150 Orang	193,994,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Masyarakat Umum	150 Orang	1,804,412,565	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlit yang DiBina Jumlah cabor yang dibina	Atlit Cabor		Atlit Cabor	12 Atlit 2 Cabor	600,000,144						12 Atlit 2 Cabor	0	
2 19 03 1.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit Pelajar yang di Bina				12 Orang	600,000,144	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Atlet PPLPD	12 Orang	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
2 19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi Keolahragaan Jumlah organisasi olahraga yang di bina	Lembaga Lembaga		Lembaga Lembaga	25 Lembaga 10 Lembaga	3,850,000,000						25 Lembaga 10 Lembaga	5,539,201,973	
2 19 03 1.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan				10 Kelompok	3,850,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan stabilitas ketenteraman, keterlibatan dan perlindungan masyarakat (PD-10)	Lembaga	10 Kelompok	5,539,201,973	Dinas Pemuda dan Olahraga
TOTAL							12,043,946,648							23,132,276,672	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
																Nasional	Daerah			
2																				
2	23																			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2	23																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										30,477,818,135										32,735,142,949
2	23	01																		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					Nilai SAKIP OPD	Nilai			Nilai	BB Nilai	14,063,593,535							BB Nilai	16,161,065,724	
2	23	01	1.01																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen %			Dokumen %	10 Dokumen 100 %	104,103,400							10 Dokumen 100 %	148,635,434	
2	23	01	1.01	01																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen					1 Dokumen	16,161,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,577,836	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	1.01	02																
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen					1 Dokumen	19,363,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,475,014	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	1.01	03																
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah Dokumen					1 Dokumen	16,153,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,918,248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	1.01	04																
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen					1 Dokumen	11,908,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,715,385	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	01	1.01	05																
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen					1 Dokumen	10,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	18,831,465	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	30,436,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Dokumen Laporan Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	49,117,486	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan	%		%	100 %	12,194,902,435						100 %	12,589,475,236	
2 23 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				107 orang	11,993,140,335		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	107 orang	12,492,057,577	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan				4 orang	160,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	4 orang	25,583,050	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan keuangan				12 bulan	19,664,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	55,552,063	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	5,127,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	8,475,776	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	9,158,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	4,512,257	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan				1 laporan	1,626,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 laporan	1,926,376	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan				18 laporan	4,921,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat	18 laporan	684,069	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							Kecamatan, Semua Kelurahan				Daerah			
2 23 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan				2 laporan	683,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Laporan Keuangan Perangkat Daerah	2 laporan	684,069	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	%		%	100 %	3,206,800						100 %	14,210,643	
2 23 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	160,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 Dokumen	160,821	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	1,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	2 laporan	12,061,574	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	127,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 Laporan	127,452	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan				1 laporan	1,859,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aset perangkat daerah	1 laporan	1,860,796	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen kepegawaian	%		%	100 %	43,109,000						100 %	62,835,817	
2 23 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah ASN				107 orang	25,026,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	25,026,897	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	16,375,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	2 Dokumen	35,903,169	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN				107 orang	1,083,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	1,086,121	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN				107 orang	408,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	336,009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				107 orang	215,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			aparatur perangkat daerah	107 orang	483,622	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	311,621,900						100 %	792,146,926	
2 23 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik				11 Jenis	13,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	11 Jenis	14,808,739	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				35 Jenis	26,107,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	35 Jenis	23,533,973	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				30 jenis	17,497,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	30 jenis	17,507,009	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				2 Jenis	21,300,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	2 Jenis	35,050,980	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan				130 Eksemplar	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	130 Eksemplar	353,437,248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu				700 orang	45,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	700 orang	44,631,299	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				30 laporan	181,086,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			peralatan dan perlengkapan perangkat daerah	30 laporan	303,177,678	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	10,000,000						100 %	689,701,642	
2 23 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				0 Unit	0				Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				7 Jenis	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sarana dan prasarana perangkat daerah	7 Jenis	676,771,079	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis sarana dan prasarana				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Sarana dan prasarana perangkat daerah	0 Jenis	12,930,563	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang umum	%		%	100 %	1,055,250,000						100 %	1,153,416,666	
2 23 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat				2 Jenis	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	2 Jenis	2,346,272	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, air, listrik dan internet				4 Jenis	316,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	4 Jenis	315,797,723	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi				24 Orang	738,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	24 Orang	835,272,672	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	341,400,000						100 %	710,643,361	
2 23 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas				7 Unit	133,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana perangkat daerah	7 Unit	154,100,798	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas				41 Unit	184,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana perangkat daerah	41 Unit	235,496,144	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin				6 Jenis	24,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			sarana dan prasarana perangkat daerah	6 Jenis	68,360,504	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				0 Gedung	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Gedung	222,097,486	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor				0 Gedung	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			0 Gedung	30,588,429	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	%		%	100 %	16,173,269,200				100 %	16,365,960,618			
2 23 02 1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Perpustakaan		Perpustakaan	75 Perpustakaan	253,071,900				75 Perpustakaan	967,591,044			
2 23 02 1.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah kunjungan pemustaka				75000 Orang	105,931,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	75000 Orang	148,752,779	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dibina				10 perpustakaan	765,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	10 perpustakaan	659,569,679	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek				150 orang	88,527,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	150 orang	78,339,444	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 23 02 1.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka				4500 judul	35,685,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	4500 judul	35,765,529	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan							
2 23 02 1.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang di data				10 kab/kota	22,162,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	10 kab/kota	45,163,612	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca	kegiatan		kegiatan	8 kegiatan	15,920,197,300						8 kegiatan	15,398,369,574	
2 23 02 1.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta lomba dan pameran buku				1000 orang	601,538,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	1000 orang	79,709,955	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya sarana dan prasarana				1 Gedung	15,230,723,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	1 Gedung	15,230,723,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 02 1.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan				12 perpustakaan	87,935,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	12 perpustakaan	87,936,619	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	%		%	100 %	240,955,400						100 %	208,116,607	
2 23 03 1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Judul		Judul	500 Judul	52,981,100						500 Judul	56,981,939	
2 23 03 1.01 01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia				500 Judul	52,981,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penerbit, swasta dan instansi di 10 Kab/Kota	500 Judul	56,981,939	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03 1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar		Eksemplar	750 Eksemplar	69,783,600						750 Eksemplar	74,785,671	
2 23 03 1.02 01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah katalog induk daerah yang dilayankan				550 Judul	37,288,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dan Perguruan Tinggi di 10 Kab/Kota	550 Judul	42,289,051	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.02 02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah bibliografi daerah yang tersedia di deposit				230 judul	32,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perpustakaan dan Perguruan Tinggi di 10 Kab/Kota	230 judul	32,496,620	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerah	Naskah		Naskah	10 Naskah	118,190,700						10 Naskah	76,348,997	
2 23 03 1.03 01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan				10 Naskah	32,743,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di 10 Kab/Kota	10 Naskah	34,161,060	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 23 03 1.03 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (online)				10 Naskah	85,447,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat di 10 Kab/Kota	10 Naskah	42,187,936	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						384,445,200						420,768,429		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	%		%	100 %	313,036,000						100 %	331,878,600	
2 24 02 1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis	Berkas		Berkas	152462 Berkas	143,957,800						152462 Berkas	167,593,459	
2 24 02 1.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis aktif dan inaktif				158459 berkas	51,405,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	158459 berkas	51,342,996	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 24 02 1.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip yang terpelihara				94000 berkas	92,552,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	94000 berkas	116,250,464	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan	Berkas		Berkas	5000 Berkas	38,463,500						5000 Berkas	39,022,118	
2 24 02 1.02 02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dinilai, disimpan dan dilestarikan				5000 Berkas	38,463,500	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	OPD, Swasta dan Masyarakat	5000 Berkas	39,022,118	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional	Berkas		Berkas	500 Berkas	130,614,700						500 Berkas	125,263,023	
2 24 02 1.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah pengunjung layanan kearsipan Jumlah Penyiapan Informasi Kearsipan				150 orang 500 berkas	69,471,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	150 orang 500 berkas	86,277,641	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 02 1.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang Terbina				31 OPD	61,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Aparatur, masyarakat, pelajar dan mahasiswa	31 OPD	38,985,381	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Prosentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	%		%	100 %	71,409,200						100 %	88,889,829	
2 24 03 1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dinilai	Berkas		Berkas	10000 Berkas	71,409,200						10000 Berkas	88,889,829	
2 24 03 1.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh)	Jumlah Arsip dipermanenkan dan dimusnahkan				10000 berkas	71,409,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	Pengelolaan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip	10000 berkas	88,889,829	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Tahun							Kelurahan							
TOTAL							30,862,263,335						33,155,911,378		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							43,427,468,292		39,759,507,259					
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	23,480,169,145				A nilai	27,275,909,798			
3	25	01	1.01			Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	dokumen		dokumen	43 dokumen	289,970,530				43 dokumen	423,010,642			
3	25	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				1 dokumen	27,085,930	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	23,946,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokemen RKA SKPD yang tersusun				1 dokumen	67,709,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	141,674,051	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P yang tersusun				1 dokumen	26,550,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	35,919,803	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun				1 dokumen	28,685,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	35,885,919	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-P yang tersusun				1 dokumen	33,081,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	35,909,626	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun				1 dokumen	26,389,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	35,929,262	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		dan Berkeadilan					
3 25 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tersusun				1 dokumen	80,469,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Yang tersusun	1 dokumen	113,745,446	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	19,828,267,315						1 dokumen	24,037,787,831	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 dokumen	19,778,728,215	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 dokumen	23,957,472,351	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPTB/ BP/ STS yang terverifikasi selama 1 Tahun				2 dokumen	14,633,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen	31,100,443	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD				4 kali	3,108,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	4 kali	3,899,453	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen laporan keuangan SKPD yang tersusun				1 dokumen	7,622,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 dokumen	9,080,047	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Prov. NTB				2 dokumen	18,571,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen	28,770,565	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang tersusun				12 dokumen	1,023,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	12 dokumen	1,130,515	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis				2 dokumen	4,580,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	2 dokumen	6,334,457	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	255,184,300						1 dokumen	58,971,684	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	934,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen laporan pengamanan aset				1 dokumen	246,700,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	23,946,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian BMD				1 dokumen	6,700,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	23,946,535	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsiliasi BMD				1 dokumen	850,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	9,578,614	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	13,157,200						1 dokumen	17,544,427	
3 25 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dibuat				1 dokumen	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1 dokumen	6,169,824	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang dibuat				1 dokumen	3,019,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 dokumen	2,394,653	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen SKP				1 dokumen	8,137,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 dokumen	8,979,950	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	10 jenis	458,680,200						10 jenis	275,246,208	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan				10 jenis	3,143,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	3,472,247	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan				10 jenis	65,119,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	11,898,255	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				20 jenis	30,028,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	20 jenis	12,006,793	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan				2 jenis	5,016,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	2 jenis	6,005,791	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan				2 jenis	9,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	2 jenis	11,638,016	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah bahan/material yang disediakan				5 jenis	27,106,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 jenis	29,915,329	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum Rapat dan Kegiatan				2 jenis	29,192,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	2 jenis	34,952,363	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas luar daerah				1 tahun	231,492,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	1 tahun	85,599,286	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen laporan arsip				1 dokumen	15,363,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	1 dokumen	18,395,130	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	PPID				3 kegiatan	42,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	3 kegiatan	61,362,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	2,173,869,460						6 jenis	2,339,509,498	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				1000 surat	2,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	1000 surat	2,107,295	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi air, listrik dan internet				4 jenis	225,148,560	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	4 jenis	263,464,576	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				2 jenis	12,520,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 jenis	13,817,151	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan dan Keamanan				43 orang	1,933,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	43 orang	2,060,120,476	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	80 unit	461,040,140						80 unit	123,839,508	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				10 unit	126,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	10 unit	95,846,009	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah unit mebel yang diservis				15 unit	10,849,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	15 unit	11,973,267	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang diservis				10 unit	13,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	10 unit	16,020,232	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit bangunan yang direhab				5 unit	310,380,240	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		jumlah unit BMD yang dipelihara	5 unit	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang	%		%	8,74 %	7,296,829,747						8,74 %	3,898,497,367	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		berlaku													
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas Ruang Laut yang terkelola	Ha		Ha	333.961 Ha	2,549,099,965					333.961 Ha	500,000,000		
3 25 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen yang tersusun				1 dokumen	50,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Luas Ruang Laut yang terkelola	1 dokumen	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	J Luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri				244926.54 Ha	7,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Luas Ruang Laut yang terkelola	244926.54 Ha	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi				4 kawasan	2,291,999,968	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Luas Ruang Laut yang terkelola	4 kawasan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.01 04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen laporan mitigasi bencana wilayah pesisir				1 dokumen	199,999,997	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Luas Ruang Laut yang terkelola	1 dokumen	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Pertek yang terbit	dokumen		dokumen	15 dokumen	68,440,000					15 dokumen	60,156,999		
3 25 02 1.02 02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertek izin lokasi dan pengelolaan Ruang Laut yang diterbitkan				50 dokumen	68,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Persetujuan Teknis /Rekomendasi Pemanfaatan ruang laut	50 dokumen	60,156,999	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02 1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau	Jumlah Produksi Garam	ton		ton	3025201219 ton	4,679,289,782					3025201219 ton	3,338,340,368		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kecil														
3 25 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok petambak garam yang terfasilitasi				2 kelompok	4,679,289,782	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang terfasilitasi	2 kelompok	3,338,340,368	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	249099 ton	3,202,153,000						249099 ton	3,795,839,662	
3 25 03 1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia	unit		unit	45 unit	3,187,579,900						45 unit	3,555,957,842	
3 25 03 1.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	dokumen produksi perikanan tangkap				1 dokumen	124,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	1 dokumen	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah unit sarana perikanan tangkap yang tersedia				50 unit	3,062,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	50 unit	3,495,957,842	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah pelabuhan yang terbina	unit		unit	1 unit	4,573,100						1 unit	60,000,000	
3 25 03 1.06 01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	jumlah WKOPP yang ditetapkan				1 dokumen	4,573,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Pelabuhan Yang terbina	1 dokumen	60,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	izin pengadaan kapal	unit		unit	10 unit	10,000,000						10 unit	119,724,941	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 03 1.07 02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah surat Persetujuan Pengadaan KapalPenangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan DenganUkuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan				50 unit	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Izin pengadaan kapal	50 unit	119,724,941	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	kapal sampai dengan 10 GT yang terdaftar	unit		unit	0 unit	0						0 unit	60,156,879	
3 25 03 1.10 02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda daftar kapal perikanan dengan ukuransampai dengan 10 GT yang terbit				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		kapal sampai dengan 10 GT yang terdaftar	0 unit	60,156,879	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	1219005 Ton	9,121,891,400						1219005 Ton	2,894,515,652	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	unit		unit	15 unit	9,121,891,400						15 unit	2,894,515,652	
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya ikan yangtersedia				5 unit	3,587,171,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5 unit	416,075,885	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit sarana pembudidayaan ikan di laut yangtersedia				10 unit	5,164,509,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10 unit	733,434,135	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia				10 unit	370,210,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	10 unit	360,941,153	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	jumlah kelompok pembudidaya yang dibina				0 kelompok	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	0 kelompok	1,384,064,479	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,92 %	208,000,000						99,92 %	166,793,114	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan	%		%	99,92 %	208,000,000						99,92 %	166,793,114	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang terawasi				10 pelaku usaha	208,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya Produksi Perikanan	10 pelaku usaha	166,793,114	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton		Ton	214373 Ton	118,425,000						214373 Ton	1,727,951,666	
3 25 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan	Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan	izin		izin	5 izin	12,805,000						5 izin	120,301,967	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi Penerbitannya													
3 25 06 1.01 03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				3 dokumen	12,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang difasilitasi Penerbitannya	3 dokumen	120,301,967	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	unit		unit	7 unit	72,805,000						7 unit	1,547,427,610	
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				1135 unit usaha	72,805,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1135 unit usaha	1,547,427,610	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	ton		ton	54573206 ton	32,815,000						54573206 ton	60,222,089	
3 25 06 1.03 01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						0		Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan		0	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 06 1.03 02	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapatkan insentif dan fasilitas				40 unit usaha	32,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Jumlah Stok Ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan	40 unit usaha	60,222,089	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,145,717,300						2,146,442,439		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	375,707,300					A nilai	517,944,102		
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,010,000					1 dokumen	18,624,606		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				2 orang	2,010,000	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Laporan Keuangan yang tersusun	2 orang	18,624,606	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,508,000					1 dokumen	2,400,000		
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1,254,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun				2 dokumen	1,254,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Jumlah laporan BMD yang tersusun	2 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	2 jenis	4,019,800					2 jenis	4,726,962		
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	1,019,800	Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	1,226,962	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	2 jenis	351,399,500						2 jenis	475,240,293	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	46,399,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 jenis	108,282,598	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				10 orang	305,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	10 orang	366,957,695	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	51 unit	15,770,000						51 unit	16,952,241	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				1 unit	9,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	1 unit	8,806,984	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	6,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	10 unit	8,145,257	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Benih Ikan	ekor		ekor	650000 ekor	1,770,010,000						650000 ekor	1,628,498,337	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	unit		unit	5 unit	1,770,010,000						5 unit	1,628,498,337	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		di Laut yang tersedia													
3 25 04 1.05 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya ikan dilaut				5 unit	1,765,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Benih Ikan	5 unit	1,508,184,339	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Budidaya ikan Payau				1 unit	5,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Benih Ikan	1 unit	120,313,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						246,997,380						398,954,995		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	156,980,900						A nilai	198,181,618	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,520,000						1 dokumen	3,031,912	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	2,520,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	3,031,912	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	8,610,900						3 jenis	10,500,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	2,616,800	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bahan cetak dan penggandaan				10000 lembar	2,994,100	Kota Mataram, Selaprang,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10000 lembar	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(PD-3)				
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	136,850,000						6 jenis	164,649,706	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	37,650,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	3 jenis	45,298,220	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				3 orang	99,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	3 orang	119,351,486	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	6 unit	9,000,000						6 unit	20,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	9,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		jumlah unit BMD yang dipelihara	3 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang teruji dan terawasi	%		%	100 %	90,016,480						100 %	200,773,377	
3 25 06 1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Laporan Hasil Uji	dokumen		dokumen	21 dokumen	90,016,480						21 dokumen	200,773,377	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 06 1.02 02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Ragam produk hasil perikanan yang diawasi				100 sampel	90,016,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang teruji dan terawasi	100 sampel	200,773,377	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,370,734,800					840,325,184			
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	159,344,800						A nilai	342,405,702	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,000,000						1 dokumen	4,492,228	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	4,492,228	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,528,000						1 dokumen	2,400,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1,264,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen rekonsiliasi BMD tersusun				1 dokumen	1,264,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	8,616,800						3 jenis	7,700,000	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik yang disediakan				10 jenis	2,616,800	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	3,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)				
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				7500 lembar	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	7500 lembar	1,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	3,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	79,200,000						6 jenis	107,813,474	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	19,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 jenis	17,968,912	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	60,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 orang	89,844,562	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	1 unit	66,000,000						1 unit	220,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	9,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	3 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor yang dipelihara				0 unit	57,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan		jumlah unit BMD yang dipelihara	0 unit	200,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kecamatan, Semua Kelurahan			Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Benih Ikan	ekor		ekor	451214213	ekor	2,211,390,000					451214213	ekor	497,919,482	
3 25 04 1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang tersedia	unit		unit	3 unit		2,211,390,000					3 unit		497,919,482	
3 25 04 1.05 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	jumlah prasarana budidaya air payau atau air tawar yang diadakan				2 unit		2,211,390,000	Kab. Bima, Palibelo, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Labuhan Lalar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Benih Ikan	2 unit	120,313,998	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 04 1.05 04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah sarana usaha budidaya ikan di laut yang tersedia				0 unit		0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Produksi Benih Ikan	0 unit	377,605,484	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6,755,567,400							4,692,538,675	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai		633,997,400						A nilai	745,096,538	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen		4,620,000						1 dokumen	5,558,506	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				2 orang		4,620,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	2 orang	5,558,506	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,508,000					1 dokumen	3,000,000		
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun				1 dokumen	1,254,000	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah yang tersusun				2 dokumen	1,254,000	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	2 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	12,685,400					3 jenis	15,152,891		
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				35 jenis	8,227,400	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	35 jenis	9,898,713	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				20500 lembar	1,458,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	20500 lembar	1,754,178	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi				5 kali	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 kali	3,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	6 jenis	557,200,000					6 jenis	642,717,380		
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	180,200,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 jenis	225,227,805	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				11 orang	377,000,000	Kab. Lombok Timur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	11 orang	417,489,575	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)				
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	56,984,000						4 unit	78,667,761	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				2 unit	7,620,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	2 unit	9,167,926	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	49,364,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi (PD-2)	jumlah unit BMD yang dipelihara	10 unit	54,499,835	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit Sarana bangunan yang dipelihara				2 unit	0	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	2 unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan	ton		ton	8173 ton	6,121,570,000						8173 ton	3,947,442,137	
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah kunjungan kapal	unit		unit	5779 unit	6,121,570,000						5779 unit	3,947,442,137	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan				3 unit	6,111,565,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi (PD-2)	Jumlah Kunjungan Kapal	3 unit	2,484,965,327	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	jumlah fasilitas pemerintahan dan pengusahaan pelabuhan perikanan yang tersedia				3 unit	10,005,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Jumlah Kunjungan Kapal	3 unit	1,462,476,810	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,797,495,840						980,088,268		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	296,985,840						A nilai	360,088,268	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,000,000						1 dokumen	3,609,419	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	3,000,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	3,609,419	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	2,242,000						1 dokumen	2,697,439	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	2,242,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	2,697,439	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	11,127,600						3 jenis	16,624,437	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				10 jenis	3,745,600	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	5,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				3000 lembar	1,382,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	3000 lembar	3,600,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				6 kali	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	6 kali	7,524,437	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	262,930,000						5 jenis	304,330,357	
3 25 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar masuk				100 surat	430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	100 surat	550,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				2 jenis	44,700,000	Kab. Bima, Sape, Bugis Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 jenis	53,780,357	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				7 orang	217,800,000	Kab. Bima, Sape, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	7 orang	250,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	10 unit	17,686,240						10 unit	32,826,616	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				1 unit	9,000,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	1 unit	20,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				3 unit	2,500,000	Kab. Sumbawa, Plampang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	jumlah unit BMD yang dipelihara	3 unit	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Teluk Santong		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 25 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara				1 unit	6,186,240	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	jumlah unit BMD yang dipelihara	1 unit	6,826,616	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan	ton		ton	3218 ton	3,500,510,000						3218 ton	620,000,000	
3 25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	jumlah kunjungan kapal	unit		unit	6214 unit	3,500,510,000						6214 unit	620,000,000	
3 25 03 1.06 02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	jumlah sarana dan prasarana pelabuhan yang diadakan				1 unit	3,439,505,000	Kab. Bima, Sape, Bugis Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Jumlah Kunjungan Kapal	1 unit	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 03 1.06 03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	jumlah layanan pemerintahan dan perusahaan pelabuhan perikanan yang tersedia				2 jenis	61,005,000	Kab. Sumbawa, Plampang, Teluk Santong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Jumlah Kunjungan Kapal	2 jenis	120,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						2,500,133,594							1,617,036,985	
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	356,873,594						A nilai	161,148,178	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	3,000,000					1 dokumen	3,609,500		
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	3,000,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	3,609,500	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1,264,000					1 dokumen	1,500,000		
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1,264,000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	9,500,200					3 jenis	11,414,160		
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				10 jenis	2,551,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	3,069,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah bahan cetak dan penggandaan				5500 lembar	1,949,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5500 lembar	2,345,160	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				5 kali	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5 kali	6,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit BMD yang diadakan	unit		unit	4 unit	263,679,894					4 unit	50,000,000		
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana yang diadakan				2 unit	263,679,894	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Unit BMD yang diadakan	2 unit	50,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										dan Berkeadilan					
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	67,999,500						5 jenis	79,624,518	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	7,999,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	3 jenis	9,624,518	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 orang	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	11,430,000						4 unit	15,000,000	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				3 unit	11,430,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	3 unit	15,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	8,74 %	884,255,000						8,74 %	600,000,000	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	884,255,000						2 kawasan	600,000,000	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				3 kawasan	884,255,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Luas Ruang Laut dan Pesisir yang dikelola	3 kawasan	600,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,92 %	1,259,005,000						99,92 %	855,888,807	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan	%		%	99,92 %	1,259,005,000						99,92 %	855,888,807	
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Operasi Pengawasan				20 operasi	30,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Meingkatnya Produksi Perikanan	20 operasi	500,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pembangunan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Pokmaswas Yang terbina				7 kelompok	1,229,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meingkatnya Produksi Perikanan	7 kelompok	355,888,807	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						433,107,000						1,770,762,862		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	97,507,000						A nilai	620,762,862	
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,620,000						1 dokumen	5,558,506	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	4,620,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	5,558,506	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		dan Berkeadilan					
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,384,000						1 dokumen	5,200,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	4,384,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	5,200,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	4 jenis	12,471,000						4 jenis	15,004,356	
3 25 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan				10 Komponen	1,972,000	Kab. Sumbawa Barat, Poto Tano, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 Komponen	2,372,592	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				15 jenis	2,514,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	15 jenis	3,024,693	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				5000 lembar	1,985,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5000 lembar	2,388,232	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				6 kali	6,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	6 kali	7,218,839	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							400,000,000	
3 25 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah prasarana gedung kantor yang diadakan				0 unit	0	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 unit	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	5 jenis	69,060,000					5 jenis	170,000,000		
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	9,060,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	3 jenis	70,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	60,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 orang	100,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	3 unit	6,972,000					3 unit	25,000,000		
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				4 unit	6,972,000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	4 unit	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku	%		%	5.97 %	120,595,000					5.97 %	450,000,000		
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas Ruang Laut yang terkelola	Ha		Ha	2 Ha	120,595,000					2 Ha	450,000,000		
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola				2 kawasan	120,595,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Luas Ruang Laut dan Pesisir yang terkelola	2 kawasan	150,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 02 1.01 03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi				0 kawasan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Luas Ruang Laut dan Pesisir yang terkelola	0 kawasan	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,92 %	215,005,000						99,92 %	700,000,000	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan	%		%	99,92 %	215,005,000						99,92 %	700,000,000	
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				10 pelaku usaha	27,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya Produksi Perikanan	10 pelaku usaha	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Operasi Pengawasan				20 kali	10,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya Produksi Perikanan	20 kali	400,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbentuk dan terbina				5 kelompok	177,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya Produksi Perikanan	5 kelompok	300,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						3,357,606,950						1,156,950,990		
3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	nilai		nilai	A nilai	118,486,950						A nilai	146,813,995	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,020,000						1 dokumen	4,836,622	
3 25 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				1 orang	4,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Laporan Keuangan yang tersusun	1 orang	4,836,622	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD yang tersusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1,254,000						1 dokumen	1,500,000	
3 25 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen RKBMD				1 dokumen	1,254,000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah laporan BMD yang tersusun	1 dokumen	1,500,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	jenis		jenis	3 jenis	25,770,450						3 jenis	31,951,140	
3 25 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik				10 jenis	4,002,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	10 jenis	4,815,447	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan				5500 lembar	1,768,050	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	5500 lembar	2,135,693	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				12 kali	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi	12 kali	25,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	jenis		jenis	4 jenis	72,202,500						4 jenis	86,869,714	
3 25 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa yang disediakan				3 jenis	12,202,500	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	3 jenis	14,681,315	Dinas Kelautan dan Perikanan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	pelayanan publik (PD-3)				
3 25 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				2 orang	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Jenis Jasa Penunjang yang tersedia	2 orang	72,188,399	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit BMD yang dipelihara	unit		unit	4 unit	15,240,000						4 unit	21,656,519	
3 25 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				4 unit	15,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	jumlah unit BMD yang dipelihara	4 unit	21,656,519	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%		%	8,74 %	1,607,615,000						8,74 %	604,187,939	
3 25 02 1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	jumlah kawasan konservasi yang dikelola	kawasan		kawasan	2 kawasan	1,607,615,000						2 kawasan	604,187,939	
3 25 02 1.01 02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas Kawasan Konservasi yang dikelola				37643 Ha	1,607,615,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Luas Ruang Laut dan Pesisir yang terkelola	37643 Ha	604,187,939	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	99,92 %	1,631,505,000						99,92 %	405,949,056	
3 25 05 1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai	Persentase kepatuhan pelaku usaha	%		%	99,92 %	1,631,505,000						99,92 %	405,949,056	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	dengan 12 Mil														
3 25 05 1.01 01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				10 pelaku usaha	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Produksi Perikanan	10 pelaku usaha	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Di Awasi				10 pelaku usaha	10,005,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatnya Produksi Perikanan	10 pelaku usaha	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
3 25 05 1.01 04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang terbentuk dan terbina				10 kelompok	1,601,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan (PD-6)	Meningkatnya Produksi Perikanan	10 kelompok	405,949,056	Dinas Kelautan dan Perikanan
TOTAL							65,034,828,556							53,362,607,657	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14,446,988,831	14,534,546,172						
3	26	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Nilai		Nilai	BB Nilai	9,190,011,531				BB Nilai	9,926,568,872			
3	26	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen		dokumen	2 dokumen	168,286,000				2 dokumen	168,286,000			
3	26	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 dokumen	41,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8) Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	2 dokumen	41,360,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan				1 tahun	76,306,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1 tahun	76,306,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kerja				1 tahun	21,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1 tahun	21,630,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan				4 dokumen	28,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	4 dokumen	28,990,000	Dinas Pariwisata
3	26	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	7,085,228,111						1 Tahun	7,734,228,111	
3	26	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 tahun	6,840,913,111	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1 tahun	7,489,913,111	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan	Perjanjian Kerja						
3 26 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi keuangan Jumlah tenaga keamanan kantor				48 bulan/orang	244,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	48 bulan/orang	244,315,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	12,635,000						12 dokumen	12,635,000	
3 26 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah				12 dokumen	12,635,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	12 dokumen	12,635,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang didiklat formal	orang		orang	0 orang	0						0 orang	87,557,341	
3 26 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang diklat formal				4 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	4 orang	87,557,341	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah instalasi listrik	unit		unit	1 unit	308,824,300						1 unit	308,824,300	
3 26 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik				1 unit	6,681,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1 unit	6,681,300	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor				4800 Jenis/Buah	59,096,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	4800 Jenis/Buah	59,096,900	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				1000 lembar	34,940,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1000 lembar	34,940,100	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan				30 exp	30,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	30 exp	30,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minuman				60 kegiatan	104,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	60 kegiatan	104,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat				60 kali	73,506,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	60 kali	73,506,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	692,659,000						48 Orang/ Bulan	692,659,000	
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				1500 surat	10,572,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1500 surat	10,572,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				12 bulan	213,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	213,150,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor				7 jenis	83,625,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	7 jenis	83,625,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PNS/ Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor				31 orang	385,312,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	31 orang	385,312,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah surat keluar	surat		surat	1500 surat	922,379,120						1500 surat	922,379,120	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah														
3 26 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan				26 unit	674,079,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	26 unit	674,079,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/ Jumlah Rumah atau Gedung Kantor yang Direhabilitasi				1 unit	210,190,120	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	1 unit	210,190,120	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor				120 buah	38,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	120 buah	38,110,000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						2,725,163,400							2,376,163,400	
3 26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						92,741,600							92,741,600	
3 26 02 1.02 03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Jumlah Kawasan destinasi yang dikembangkan				11 Kawasan Pariwisata	92,741,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)		11 Kawasan Pariwisata	92,741,600	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Daya Tarik Destinasi	%		%	85.86 %	2,558,536,000						85.86 %	2,209,536,000	
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2. Tertatanya jumlah destinasi pariwisata yang berkembang				11 KSPD	2,558,536,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	-	11 KSPD	2,209,536,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Daya Tarik Desa Wisata	%		%	85.86 %	73,885,800						85.86 %	73,885,800	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah Provinsi														
3 26 02 1.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi				2000 tempat usaha	73,885,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	Destinasi Pariwisata	2000 tempat usaha	73,885,800	Dinas Pariwisata
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang		Orang	3000000 Orang	1,650,413,900						3000000 Orang	1,350,413,900	
3 26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah media promosi pariwisata dalam dan luar negeri Presentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Media %		Media %	50 Media 20 %	1,650,413,900						50 Media 20 %	1,350,413,900	
3 26 03 1.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event pemasaran pariwisata yang terlaksana				3 Event	1,049,149,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	3 Event	749,149,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi pariwisata dalam dan luar negeri				50 Media	300,634,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Media	300,634,900	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data publikasi pariwisata				12 publikasi	150,135,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 publikasi	150,135,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 1.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kemitraan Pemasaran Pariwisata yang terjalin				15 Perjanjian	150,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	15 Perjanjian	150,495,000	Dinas Pariwisata
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Prosentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	%		%	10 %	780,300,000						10 %	780,300,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	INTELEKTUAL														
3 26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah ruang kreasi dan jaringan orang kreatif yang terbina	pelaku ekraf		pelaku ekraf	12 pelaku ekraf	780,300,000						12 pelaku ekraf	780,300,000	
3 26 04 1.01 02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri				10 produk	386,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	10 produk	386,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah usaha kreatif pemula yang terdata				10 per sub sektor	261,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	10 per sub sektor	261,600,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah ruang kreasi dan jaringan orang kreatif yang terbina				12 pelaku ekraf	132,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	12 pelaku ekraf	132,100,000	Dinas Pariwisata
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentse SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilatih	%		%	70 %	101,100,000						70 %	101,100,000	
3 26 05 1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih	Orang		Orang	50 Orang	101,100,000						50 Orang	101,100,000	
3 26 05 1.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata yang berkompeten				50 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	50 orang	0	Dinas Pariwisata
3 26 05 1.01 02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah pokdarwis yang di latih				30 pokdarwis	49,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	30 pokdarwis	49,600,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 05 1.01 03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih				50 orang	51,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	50 orang	51,500,000	Dinas Pariwisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1,538,172,600							1,568,618,181	
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						1,381,449,600							1,386,302,391	
3 26 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3,147,900						2 Dokumen	3,147,000	
3 26 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	3,147,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	2 Dokumen	3,147,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							4,854,191	
3 26 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)			4,854,191	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	50,034,200						1 Tahun	50,034,200	
3 26 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK, peralatan dan perlengkapan kantor				74 buah	23,774,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	74 buah	23,774,200	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang tersedia				12 Bulan	1,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	12 Bulan	1,260,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan dan minum				500 orang	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 orang	25,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum kantor	tahun		tahun	1 tahun	1,299,250,000						1 tahun	1,299,250,000	
3 26 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				500 surat	1,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 surat	1,150,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bulan	558,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	12 bulan	558,100,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gaji				74 orang	740,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	0	74 orang	740,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						29,017,500							29,017,000	
3 26 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				3 unit	29,017,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 unit	29,017,000	Dinas Pariwisata
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang Presentase daya tarik destinasi pariwisata yang berkembang	% %		% %	85,8 % 85,86 %	156,723,000						85,8 % 85,86 %	182,315,790	
3 26 02 1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						121,000,000							121,000,000	
3 26 02 1.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah kunjungan wisata				1000 orang	121,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Destinasi Pariwisata	1000 orang	121,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						35,723,000							61,315,790	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 26 02 1.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi						0						25,592,790	Dinas Pariwisata	
3 26 02 1.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarpras yang terpelihara				1 tahun	35,723,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 tahun	35,723,000	Dinas Pariwisata	
TOTAL							15,985,161,431						16,103,164,353		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	(PD-9)	Daerah			
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						37,829,307,871							36,016,367,000	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Terbayar Gaji dan Tunjangan				380 Orang	37,622,133,671				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		380 Orang	36,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				10 Orang	206,143,200				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 Orang	14,034,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1,031,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Dokumen	2,333,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18,500,000							16,276,000	
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 Dok	18,500,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 Dok	16,276,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22,689,900							170,398,500	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 jenis	1,754,400				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 jenis	5,364,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang diadakan				3 jenis	11,236,100				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	14,409,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 Jenis	6,699,400				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 Jenis	17,165,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			8,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				100 orang	3,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		100 orang	15,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				10 buah	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 buah	110,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Yang Ditatausahakan				1000 arsip	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1000 arsip	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							550,000,000	
3 27 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan				1 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	450,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 3				1 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah rak arsip yang diadakan				10 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan				15 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		15 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana gedung kantor yang diadakan				1 Paket	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	100,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						829,566,000							955,177,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				4070 buah	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4070 buah	1,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	177,566,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	225,297,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT Jumlah tenaga administrasi				3 orang 2 orang 7 orang	652,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 orang 2 orang 7 orang	728,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				9 orang						9 orang			
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						192,910,000						3,764,435,434		
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara/difasilitasi				1 unit	25,000,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	25,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				35 unit	167,910,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		35 unit	275,250,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				31 unit	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		31 unit	20,950,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi				1 unit	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 unit	3,443,235,434	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						20,217,036,315						18,944,094,688		
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						1,984,744,000						4,333,527,388		
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						1,984,744,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			4,333,527,388	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih						18,232,292,315						14,610,567,300		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Tanaman														
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						613,914,200				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2,140,175,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						50,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		940,900,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						17,568,378,115				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		11,529,492,300	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						47,492,640,000						80,076,571,722		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						47,492,640,000						80,076,571,722		
3 27 03 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						7,730,090,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		47,585,946,511	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						7,331,750,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		11,750,570,947	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03 1.01 09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						32,430,800,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		20,740,054,264	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						943,945,730						968,073,262		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						365,900,130						468,073,262		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						4,460,000		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,811,200						4,811,200		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	3,841,200				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	3,841,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 dokumen	970,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 dokumen	970,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,303,200						4,303,200		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 dokumen	1,303,200				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 dokumen	4,303,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18,465,730						42,914,700		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	2,322,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Jenis	2,344,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6,507,630				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7,473,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 jenis	4,226,100				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 jenis	6,526,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3,960,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3,960,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				45 orang	1,450,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	45 orang	2,610,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				2 buah	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 buah	20,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						284,480,000						306,024,162		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah														
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				1027 buah	800,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1027 buah	2,400,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	73,680,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	93,624,162	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 3 orang	210,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 orang 3 orang	210,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,840,000							105,560,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				17 unit	54,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		17 unit	99,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				8 unit	2,840,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		8 unit	5,840,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0							500,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0							500,000,000	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96 %	578,045,600						96 %	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah peralatan AWS yang diadakan	Unit		Unit	2 Unit	578,045,600					2 Unit	0		
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						0			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UPTD BPTP- Pertanain NTB		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peralatan AWS yang diadakan				2 Unit	578,045,600			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		UPTD BPTP- Pertanain NTB	2 Unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						282,297,425						842,105,300		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						282,297,425							342,105,300	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							0	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11,333,000							20,556,600	
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	11,333,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	9,369,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			11,187,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,858,000							5,418,900	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 dok	3,858,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 dok	5,418,900	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35,230,125							33,836,100	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	4,876,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Jenis	4,864,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan				3 Jenis	13,154,125				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 Jenis	13,011,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			8,460,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				10 buah	10,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 buah	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165,396,300							149,423,700	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				2617 buah	6,496,300				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2617 buah	6,023,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	68,900,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	53,400,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				5 orang 3 orang	90,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		5 orang 3 orang	90,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66,480,000							132,870,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				20 unit	66,480,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		20 unit	118,770,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				19 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	19 unit	14,100,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,212,204,300						1,262,958,900	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						662,401,900						247,170,500		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						4,000,000		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Tahunan				1 Lap	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Lap	4,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,529,400						10,359,500		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	989,400				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	9,694,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 dokumen	540,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 dokumen	665,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8,865,900						17,374,000		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 Dokumen	8,865,900				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 Dokumen	17,374,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30,572,700						62,962,000		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	3,185,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Jenis	9,102,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				4 Jenis	10,642,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	4 Jenis	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				2 jenis	4,905,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 jenis	9,580,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				5 Buah	4,640,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	5 Buah	44,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						536,183,900						70,755,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				735 buah	1,200,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	735 buah	2,205,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	42,075,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 jenis	68,550,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan Jumlah tenaga PTT				7 orang 7 orang 2 orang	492,908,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	7 orang 7 orang 2 orang	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						85,250,000						81,720,000		
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				31 unit	81,720,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	31 unit	81,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Operasional atau Lapangan														
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				10 unit	3,530,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		10 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						549,802,400						515,788,400		
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						549,802,400						515,788,400		
3 27 02 1.02 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			195,421,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 02 1.02 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan						549,802,400			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			320,366,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						474,739,600						1,123,238,100		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						357,331,900						445,830,400		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						0		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7,693,400						9,469,400		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah tenaga administrasi keuangan				1 orang	7,693,400				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	7,136,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 dokumen	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 dokumen	2,333,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3,034,000						10,000,000		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Aset Yang Dibuat				2 Dok	3,034,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	2 Dok	10,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16,375,000						78,345,500		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				2 jenis	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 jenis	5,851,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				3 jenis	16,375,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	3 jenis	16,294,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		12,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				5 Buah	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	5 Buah	40,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279,749,500						283,415,500		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				226 buah	600,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	226 buah	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	39,149,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	39,150,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				2 orang 6 orang	240,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 orang 6 orang	244,265,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,480,000							64,600,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				12 unit	50,480,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		12 unit	64,600,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				12 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		12 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						117,407,700							177,407,700	
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						117,407,700							177,407,700	
3 27 02 1.02 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						73,291,700				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			133,291,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						44,116,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			44,116,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0							500,000,000	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0							500,000,000	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,365,000,000						1,466,629,400		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH PROVINSI						805,000,000						988,252,400		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0						0		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,020,000						4,941,600		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	4,020,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	4,941,600 Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62,530,000						162,946,800		
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang diadakan				5 Jenis	31,638,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		5 Jenis	62,968,800 Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,916,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			19,561,000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						8,460,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			8,460,000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 buah	16,515,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 buah	71,957,000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						630,310,000						627,344,000		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				553 buah	1,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		553 buah	2,985,000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	89,310,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	84,050,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	JUmlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				6 orang 12 orang	540,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		6 orang 12 orang	540,309,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108,140,000							193,020,000	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						81,120,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			113,120,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				109 unit	27,020,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		109 unit	79,900,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0							0	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0							0	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						560,000,000							478,377,000	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan						560,000,000							478,377,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pertanian														
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						560,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		478,377,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,281,701,400						1,450,603,900		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						481,699,900						627,745,900		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7,450,800						7,433,000		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan tahunan yang dibuat				1 Dok	7,450,800	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Dok	7,433,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,165,500						21,502,700		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	12,732,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 orang	12,762,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat				1 Laporan	1,433,500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Laporan	8,740,700	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2,648,000						8,373,000		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang disusun				2 dokumen	2,648,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	2 dokumen	8,373,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32,996,500						84,927,000		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 jenis	3,750,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 jenis	5,190,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang diadakan				2 jenis	7,696,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	953,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			1,200,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			10,007,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				20 buah	14,350,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		20 buah	67,577,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							32,729,600	
3 27 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			32,729,600	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						351,189,100							373,773,600	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				370 buah	2,040,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		370 buah	3,904,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				2 jenis	45,999,100				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 jenis	45,999,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 6 orang	303,150,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 orang 6 orang	323,870,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73,250,000							99,007,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				6 unit	38,620,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		6 unit	56,727,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lapangan														
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				34 unit	34,630,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		34 unit	42,280,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0							0	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0							0	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						800,001,500							822,858,000	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						800,001,500							822,858,000	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						800,001,500				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			822,858,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4,760,979,000					4,773,211,100			
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						711,330,000							874,102,000	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							0	
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0							5,310,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 orang	5,310,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0							125,477,000	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Jenis	4,239,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		5 Jenis	37,020,800	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			26,866,400	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			7,350,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 Buah	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 Buah	50,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				48 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		48 unit	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						569,700,000							553,245,000	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses dan ditindaklanjuti				204 buah	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		204 buah	3,345,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik				3 jenis	119,700,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 jenis	129,750,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				4 orang 11 orang	450,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		4 orang 11 orang	420,150,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah						141,630,000							190,070,000	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				26 unit	141,630,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		26 unit	141,780,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				87 unit	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		87 unit	48,290,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang direhabilitasi				1 UPTD	0			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 UPTD	500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						4,049,649,000						3,399,109,100		
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						2,500,000,000						1,399,109,100		
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN						1,490,000,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			1,145,504,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 07 1.01 02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta						1,010,000,000			Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			253,605,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						1,549,649,000						2,000,000,000		
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						637,386,900						2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						912,262,100						0	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						590,627,050						1,608,101,500		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						388,242,050						455,001,500		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,842,000						959,100		
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja				1 Dok	1,842,000					1 Dok	959,100	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,447,000						11,409,000		
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	1,542,000					1 orang	7,404,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 tahun	1,905,000					1 tahun	4,005,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Barang Milik Daerah yang dibuat	Jenis		Jenis	2 Jenis	36,085,000						36,755,000		
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat				2 dokumen	36,085,000					2 dokumen	36,755,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,580,050						107,018,400		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 Jenis	1,950,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Jenis	12,450,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis				3 Jenis	17,271,650				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		3 Jenis	17,174,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13,670,400				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			8,634,200	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7,200,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			7,200,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi				50 orang	5,400,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50 orang	7,500,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti				7 buah	22,088,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		7 buah	54,060,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246,048,000							227,060,000	
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34,800,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)			46,800,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan				2 orang 4 orang	211,248,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		2 orang 4 orang	180,260,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33,240,000							71,800,000	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				50 unit	33,240,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50 unit	63,720,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				8 unit	0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		8 unit	8,080,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						160,000,000						319,001,500		
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						160,000,000						319,001,500		
3 27 02 1.02 04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan						160,000,000				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		319,001,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						0						500,000,000		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian						0						500,000,000		
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0				Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		500,000,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%		%	96 %	42,385,000					96 %	334,098,500		
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengendalian OPT yang diadakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	42,385,000					1 kegiatan	334,098,500		
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diadakan				1 keg	42,385,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 keg	334,098,500	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	0	0	Dinas Pertanian dan Perkebunan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
TOTAL							117,580,741,491						154,046,805,556		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	27						34,585,363,812						59,937,151,327							
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	17,358,003,662			BB Nilai	16,812,756,514				
3	27	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	929,835,200			5 Dokumen	854,269,990				
3	27	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)				2 Dokumen	247,555,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Dokumen	195,779,130	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen penyusunan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	67,098,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Dokumen	69,394,338	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan RKA yang dihasilkan				2 Dokumen	76,387,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Dokumen	70,192,541	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dokumen penyusunan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	64,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Dokumen	65,587,059	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen penyusunan Perubahan DPA yang dihasilkan				2 Dokumen	67,498,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak,	2 Dokumen	69,539,259	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											Kelompok Usaha				
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja yang dihasilkan (Laporan)				5 Laporan	163,843,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	5 Laporan	135,689,438	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Statistik Sektoral Yang Dihasilkan (Buku)				1 Dokumen	242,753,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	1 Dokumen	248,088,225	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	14,369,341,662						5 Laporan	14,100,181,509	
3 27 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN (Orang)				165 Orang	13,990,209,062	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	165 Orang	13,792,140,130	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pengelola Keuangan (Orang)				5 Orang	262,362,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	5 Orang	192,974,807	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi (Kali)				12 Kali	46,470,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	12 Kali	42,838,721	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				2 Laporan	13,045,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok	2 Laporan	13,451,765	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan				Peternak, Kelompok Usaha			
3 27 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil pemeriksaan yang dihasilkan (Laporan)				1 Laporan	14,498,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	1 Laporan	14,849,216	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester yang dihasilkan (Laporan)				12 Laporan	42,756,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	12 Laporan	43,926,870	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	74,754,000						5 Laporan	77,837,016	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	11,538,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	11,937,342	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	13,072,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	14,090,452	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	13,745,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	14,228,127	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan penatausahaan RKBMD				2 Laporan	36,399,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	2 Laporan	37,581,095	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan PAD	Laporan		Laporan	1 Laporan	17,353,000					1 Laporan	17,590,292		
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pelaksanaan PAD (Bulan)				1 Bulan	17,353,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Masyarakat, Stake holder lainnya	1 Bulan	17,590,292	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai Yang Dibina dan diawasi	Orang		Orang	165 Orang	104,165,000					165 Orang	100,870,121		
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan ASN (Dokumen)				1 Dokumen	10,232,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	1 Dokumen	14,090,452	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Frekwensi koordinasi (Kali)				4 Kali	32,169,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	4 Kali	22,948,224	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan penilaian kinerja ASN (Laporan)				1 Laporan	9,307,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	1 Laporan	9,592,728	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti diklat (Orang)				2 Orang	13,977,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	2 Orang	22,687,367	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi (Orang)				175 Orang	8,480,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak,	175 Orang	8,778,066	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Semua Kelurahan			(PD-3)	Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi				
3 27 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN mengikuti Bimtek (Orang)				2 Orang	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha, Perguruan Tinggi	2 Orang	22,773,284	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengawai Yang Dilayani	Orang		Orang	165 Orang	449,516,700						165 Orang	283,514,708		
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen listrik (Jenis)				10 Jenis	9,828,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	10 Jenis	9,009,215	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				20 unit	178,579,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	20 unit	17,608,510	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor (Jenis)				20 Jenis	18,374,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	20 Jenis	23,432,416	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengadaan (Buku)				20 Buku	18,178,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	20 Buku	18,816,944	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa (Media)				2 Media	9,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	2 Media	9,347,398	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan (Orang)				750 Orang	31,099,000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi	ASN, Stekholder, Perguruan	750 Orang	26,581,598	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)	Tinggi, Kelompok Masyarat			
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				10 Kali	179,364,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	10 Kali	174,042,444	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen arsip (Dokumen)				1 Dokumen	4,493,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarat	1 Dokumen	4,676,183	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	10 Unit	450,000,000						10 Unit	393,588,602	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 (Unit)				10 unit	450,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	10 unit	186,704,701	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun (Unit)				1 unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 unit	206,883,901	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	745,714,100						1 layanan	760,129,890	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di distribusikan				1000 Surat	9,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	1000 Surat	10,040,948	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Rekening				3 Jenis	233,010,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	3 Jenis	243,011,646	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				16 Orang	503,304,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok ternak, masyarakat, stakeholder lainnya	16 Orang	507,077,296	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD terpelihara	Unit		Unit	36 Unit	217,324,000						36 Unit	224,774,386	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				16 unit	182,550,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	16 unit	188,966,502	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				20 unit	14,310,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	20 unit	14,683,593	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor direhab (Unit)				1 unit	20,464,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 unit	21,124,291	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak Pertumbuhan Populasi Ternak	Persen %		Persen %	9 Persen 9.5 %	13,861,363,500						9 Persen 9.5 %	40,585,609,803	
3 27 02 1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah Distributor Obat Hewan Yang Diawasi (Toko/Depo)	Toko/Depo		Toko/Depo	10 Toko/Depo	62,692,000						10 Toko/Depo	63,125,608	
3 27 02 1.06 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang diambil				10 Sampel	37,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Toko Obat Hewan, Kelompok Peternak	10 Sampel	36,586,113	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.06 02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan	Laporan pengawasan obat yang beredar				1 laporan	25,672,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem	Stekholder, Toko Obat Hewan,	1 laporan	26,539,495	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Peredaran Obat Hewan							Kecamatan, Semua Kelurahan			agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Kelompok Peternak			
3 27 02 1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Alat Pengolah Pakan yang diadakan Jumlah bibit ternak yang diadakan	Unit ekor		Unit ekor	10 Unit 1226 ekor	13,798,671,500						10 Unit 1226 ekor	40,522,484,195	
3 27 02 1.07 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing /Unggas yang diadakan				1226 ekor	13,668,471,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT Dana Insentif Daerah			Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha Peternakan, Masyarakat	1226 ekor	37,075,699,230	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.07 02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan JUmlah Kelompok Pakan				10 Unit 25 Kelompok	130,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha Peternakan, Masyarakat	10 Unit 25 Kelompok	3,446,784,965	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan Pertumbuhan Populasi Ternak	% Persen		% Persen	100 % 9 Persen	835,900,000						100 % 9 Persen	582,135,105	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pelayanan yang terpelihara (Unit)	unit		unit	4 unit	200,000,000						4 unit	206,477,480	
3 27 03 1.01 05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah gedung RSH/Klinik Hewan yang dibangun/pelihara				1 Unit	200,000,000	Kota Mataram, Mataram, Punia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder,Mas yarakat	1 Unit	206,477,480	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03 1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak yang dikembangkan (Lokasi)	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	635,900,000						2 Lokasi	375,657,625	
3 27 03 1.02 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak				1 Laporan	511,950,000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung	Stekholder, Kelompok Masyarakat	1 Laporan	219,957,384	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		dan Berkeadilan	investasi (PD-7)				
3 27 03 1.02 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pengawasan				12 Kali	123,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Stkholder, Kelompok Masyarakat	12 Kali	155,700,241	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	2,008,591,050						<1 %	1,520,728,273	
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	614,956,250						5 Penyakit	430,123,958	
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan				30000 dosis	226,282,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	30000 dosis	125,076,197	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah dokumen pemetaan yang dihasilkan				1 Dokumen	163,951,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	1 Dokumen	130,191,176	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah obat dan peralatan pelayanan kesehatan hewan				15 Jenis	224,722,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	15 Jenis	174,856,585	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 04 1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah RPH/RPU/TPH di awasi (Unit)	unit		unit	73 unit	373,862,500						73 unit	273,251,722	
3 27 04 1.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	laporan hasil penilaian resiko keamanan produk hewan				1 Laporan	179,508,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	1 Laporan	105,810,143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi pengawasan penerapan persyaratan teknis produk ternak				10 Kali	113,704,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	10 Kali	92,848,569	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.02 03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan dan pemasuka produk hewan				12 Kali	80,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Ternak Masyarakat	12 Kali	74,593,010	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi (Unit)	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	748,547,100						5 Unit Usaha	552,062,720	
3 27 04 1.03 01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV				5 Unit	137,876,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Ternak, Pelaku Usahadan Masyarakat	5 Unit	132,164,505	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.03 02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk ternak ber NKV dibina/diawasi				5 unit	610,670,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Ternak, Pelaku Usahadan Masyarakat	5 unit	419,898,215	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.05	Kesejahteraan Hewan	Persentase pemotongan betina produktif yang dikendalikan	persen		persen	1 persen	271,225,200						1 persen	265,289,873	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 04 1.05 01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV				50 orang	127,694,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Stekholder, Pelaku Usaha, Masyarakat	50 orang	131,250,886	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 04 1.05 02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH/TPH/TPU diawasi				73 Unit	143,531,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Stekholder, Pelaku Usaha, Masyarakat	73 Unit	134,038,987	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%		%	100 %	521,505,600						100 %	435,921,632	
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan (Kegiatan)	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	373,458,000						10 Kegiatan	260,536,230	
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Frekwensi expo/ pameran				2 Kegiatan	373,458,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Peternak, Kelompok Usaha	2 Kegiatan	260,536,230	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelompok berbasis Korporasi (Korporasi)	Korporasi		Korporasi	1 Korporasi	148,047,600						1 Korporasi	175,385,402	
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah korporasi tersosialisasi				3 Korporasi	58,532,100	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Korporasi	93,330,599	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Korporasi dievaluasi				3 Lembaga	44,044,000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Lembaga	44,498,718	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 07 1.03 03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani	Dokumen yang dihasilkan				3 Dokumen	45,471,500	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	ASN, Stekholder, Kelompok Masyarakat, Peternak	3 Dokumen	37,556,085	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2,324,222,450							2,893,978,714	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	657,880,450						BB+ point	783,101,485	
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	30,948,000						5 Dokumen	21,051,967	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan(Dokumen)				2 Dokumen	30,948,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake holder lainnya	2 Dokumen	21,051,967	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	2 Laporan	37,757,100						2 Laporan	11,703,647	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis)				8 Jenis	17,421,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	8 Jenis	1,034,895	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				2 Laporan	20,336,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	2 Laporan	10,668,752	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina dan diawasi	orang		orang	50 orang	67,700,000						50 orang	57,339,430	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik (Jenis)				1 Jenis	15,200,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	1 Jenis	404,945	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan (Lembar)				1000 Lembar	2,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	1000 Lembar	579,591	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				2 Kali	50,500,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	2 Kali	56,354,894	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah banguna/gedung yang diadakan	Unit		Unit	0 Unit	0						0 Unit	207,664,281	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun (Unit)				1 unit	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stake holderlainnya	1 unit	207,664,281	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	456,734,100						1 layanan	441,623,637	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (surat)				300 Surat	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	300 Surat	1,038,321	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening	54,484,100	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	4 Rekening	56,120,857	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				12 Orang	401,250,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	kelompok peternak, masyarakat, stakeholder lainnya	12 Orang	384,464,459	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	5 Unit	64,741,250						5 Unit	43,718,523	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				3 unit	54,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	3 unit	37,379,571	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dipelihara (Unit)				2 unit	10,741,250	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	2 unit	6,338,952	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	Persen		Persen	100 Persen	1,666,342,000						100 Persen	2,110,877,229	
3 27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Bibit Ternak Unggul Yang Dihasilkan	ekor		ekor	100 ekor	1,304,164,500						100 ekor	1,735,256,154	
3 27 02 1.03 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah ternak				100 ekor	1,304,164,500	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, Kelompok peternak, masyarakat, Stakeholder lainnya	100 ekor	1,735,256,154	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	16 Ha	318,177,500						16 Ha	351,049,199	
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi HMT				10 Ton	318,177,500	Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stkeholder, UPTD	10 Ton	351,049,199	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan	Ton		Ton	2 Ton	44,000,000						2 Ton	24,571,876	
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah produksi HMT				10 Ton	44,000,000	Kab. Dompu, Pekat, Doro Peti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Ton	24,571,876	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,579,943,040						1,778,725,043		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	518,844,980					BB+ point	467,330,401		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	28,349,600					5 Dokumen	29,980,804		
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen penyusunan perencanaan (Dokumen)				3 Dokumen	10,495,600	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Dokumen	13,481,565	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Kinerja yang dihasilkan (Laporan)				1 Laporan	6,854,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	4,746,998	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				3 Laporan	11,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Laporan	11,752,241	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	14,309,180					5 Laporan	14,799,610		
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jenis ATK yang diadakan (Jenis)				25 Jenis	2,033,980	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	25 Jenis	3,250,361	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Keuangan (Orang)				1 Orang	4,355,800	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	1 Orang	4,729,554	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekwensi koordinasi (Kali)				4 Kali	1,107,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 Kali	2,395,407	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	Laporan Keuangan yang dihasilkan (Laporan)				4 Laporan	6,812,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	ASN	4 Laporan	4,424,288	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	/Semester SKPD							Kelurahan			(PD-3)				
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Laporan		Laporan	5 Laporan	4,285,500					5 Laporan	6,136,480		
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	637,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	793,693	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1,904,500	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	3,255,138	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian RKBMD (Dokumen)				1 Dokumen	1,137,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Dokumen	1,180,571	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan RKBMD (Laporan)				1 Laporan	607,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	1 Laporan	907,078	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan Sumber PAD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4,237,000					1 Dokumen	10,210,852		
3 27 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen perencanaan PAD (Dokumen)				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Dokumen	5,076,353	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pelaksanaan PAD (Laporan)				1 Laporan	237,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Laporan	5,134,499	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibina dan diawasi	orang		orang	50 orang	2,054,000					50 orang	2,629,549		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai diawasi (orang)				45 Orang	607,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT,	45 Orang	949,026	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Anjab				1 Dokumen	1,447,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, PTT,	1 Dokumen	1,680,523	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan ASN	orang		orang	40 orang	22,389,700						40 orang	25,951,911	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik (Jenis)				10 Jenis	2,112,400	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	10 Jenis	3,187,024	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				2 unit	1,650,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 unit	694,118	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik kantor (Jenis)				25 Jenis	2,466,300	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	25 Jenis	3,088,176	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (Buah)				5 Buah	1,011,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	5 Buah	2,803,468	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa (Media)				1 Media	5,400,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Media	5,606,936	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum yang disediakan (Orang)				170 Orang	2,250,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	170 Orang	2,784,778	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				1 Kali	7,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	0	1 Kali	7,787,411	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
	Jabatan															
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas pelihara (Unit)				3 unit	14,120,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	3 unit	14,661,098	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				7 unit	11,670,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	7 unit	10,362,448	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor direhab (Unit)				3 unit	37,500,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stekholder	3 unit	15,751,336	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	Persen		Persen	9 Persen	1,061,098,060						9 Persen	1,311,394,642		
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah HPT yang dihasilkan Jumlah Semen Beku yang dihasilkan	Ton Straw		Ton Straw	60 Ton 125000 Straw	1,061,098,060						60 Ton 125000 Straw	1,311,394,642		
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Semen Beku yang diproduksi				125000 Straw	873,906,850	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	125000 Straw	1,120,612,376	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 02 1.05 02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	sampel straw yang diperiksa				200 Sampel	177,481,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	200 Sampel	180,247,820	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 02 1.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Frekwensi pengawasan yang dilakukan				10 kali	9,709,510	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Peternak, Masyarakat	10 kali	10,534,446	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,066,826,618							1,037,772,636	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	568,617,800					BB+ point	533,417,200		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	23,521,560					5 Dokumen	23,521,560		
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang di Hasilkan				4 Dokumen	13,791,760	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN, Stakeholder lainnya	4 Dokumen	13,791,760	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan /Triwulan /Semesteran (Laporan)				3 Dokumen	9,729,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ASN, Stakeholder lainnya	3 Dokumen	9,729,800	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	19,500,600					1 Laporan	0		
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Petugas Pengelola Keuangan				1 Orang	19,500,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	1 Orang	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan publik	orang		orang	30 orang	70,823,000					30 orang	55,123,000		
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di Sediakan				7 Jenis	51,440,200	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	7 Jenis	51,440,200	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan				8015 Lembar	2,422,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	8015 Lembar	2,422,800	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media massa yang di sediakan (Exeplar)				1 Exemplar	1,260,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Exemplar	1,260,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekwensi rapat dan konsultasi (Kali)				11 Kali	15,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	11 Kali	0	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	1 Unit	165,431,240					1 Unit	165,431,240		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Gedung yang di Pelihara				2 Gedung	165,431,240	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Gedung	165,431,240	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	256,602,300						1 layanan	256,602,300	
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di sediakan				300 Surat	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		300 Surat	1,740,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang di bayarkan				4 Rekening	49,950,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Rekening	49,950,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dipelihara				3 Jenis	12,420,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	12,420,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Petugas Kebersihan,keamanan dan tenaga pendukung administrasi yang di bayarkan				8 orang/bulan	192,492,300	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		8 orang/bulan	192,492,300	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	2 Unit	32,739,100						2 Unit	32,739,100	
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang di Pelihara				2 Unit	21,977,100	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	2 Unit	21,977,100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara				4 Unit	10,762,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 Unit	10,762,000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%		%	<1 %	498,208,818					<1 %	504,355,436		
3 27 04 1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah PHMS yang dikendalikan (Penyakit)	Penyakit		Penyakit	5 Penyakit	289,249,818					5 Penyakit	292,081,223		
3 27 04 1.01 01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah obat dan peralatan keswan yang diadakan				50 jenis	132,737,118	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	50 jenis	133,732,986	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04 1.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	jumlah pelayanan kesehatan yang diadakan				1000 ekor	156,512,700	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stkholder, Kelompok Peternak, Ternak	1000 ekor	158,348,237	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3 27 04 1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil peternakan yang tersertifikasi (Unit)	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	208,959,000					5 Unit Usaha	212,274,213		
3 27 04 1.03 03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	jumlah sampel penyakit diperiksa				5000 sampel	208,959,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Stekholder, Kelompok Peternak, Ternak	5000 sampel	212,274,213	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,798,853,050						2,042,235,175		
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI LAKIP OPD	point		point	BB+ point	303,660,750					BB+ point	322,502,629		
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	24,932,200					5 Dokumen	25,772,279		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 27 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang dihasilkan				5 dokumen	24,932,200	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	5 dokumen	25,772,279	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	Laporan		Laporan	1 Laporan	16,240,000						1 Laporan	18,598,828	
3 27 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Keuangan yang dihasilkan				3 dokumen	16,240,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 dokumen	18,598,828	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	4,236,900						5 Dokumen	4,369,776	
3 27 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen perencanaan				3 Dokumen	4,236,900	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, Stakeholder lainnya	3 Dokumen	4,369,776	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan publik	Orang		Orang	38 Orang	43,584,100						38 Orang	38,244,285	
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik				6 Jenis	6,575,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	6 Jenis	3,673,581	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor diadakan (Unit)				3 Jenis	36,000,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	3 Jenis	33,530,306	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan				2 Jenis	1,009,100	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	2 Jenis	1,040,398	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit		Unit	0 Unit	0						0 Unit	20,766,428	
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan				1 unit	0	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	ASN	1 unit	20,766,428	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan publik	layanan		layanan	1 layanan	144,292,000					1 layanan	137,832,183		
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di distribusikan				300 Surat	2,760,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	300 Surat	2,844,689	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening (Jenis)				3 Jenis	12,600,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	3 Jenis	9,344,893	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan keamanan kantor (Orang)				15 Orang	128,932,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN, kelompok peternak, masyarakat, stake holder lainnya	15 Orang	125,642,601	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD OPD	Unit		Unit	11 Unit	70,375,550						11 Unit	76,918,850	
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas dipelihara (Unit)				7 unit	55,050,000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	7 unit	61,115,598	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin dipelihara (Unit)				4 unit	15,325,550	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN	4 unit	15,803,252	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%		%	9.5 %	1,458,192,300						9.5 %	1,649,002,403	
3 27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan	Luas Lahan HPT yang dikelola (Ha)	Ha		Ha	16 Ha	960,947,500						16 Ha	926,229,938	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
3 27 02 1.04 01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pakan yang dihasilkan				5000 kg	780,352,500	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	5000 kg	805,060,426	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.04 02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Tani Ternak Yang Dilatih				150 Kelompok	180,595,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	150 Kelompok	121,169,512	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 02 1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						497,244,800							722,772,465	
3 27 02 1.05 01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pakan ternak yang dihasilkan				50 Ton	497,244,800	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stekholder, Kelompok Masyarakat	50 Ton	722,772,465	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan Pertumbuhan Populasi Ternak	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 9 Persen	37,000,000						100 Persen 9 Persen	70,730,143	
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Pelayanan yang terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	37,000,000						1 Unit	70,730,143	
3 27 03 1.01 10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung/Bangunan UPT yang dipelihara				5 Unit	37,000,000	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN, Kelompok peternak, masyarakat, Stake holder lainnya	5 Unit	70,730,143	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
TOTAL							41,355,208,970							67,689,862,895	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	29					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							11,452,109,989		21,066,964,039					
3	29	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	9,680,403,689				BB Nilai	13,743,907,053			
3	29	01	1.01			Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	358,889,200				7 Sub Kegiatan	672,552,712			
3	29	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	101,411,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	173,918,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	29,321,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	63,324,421	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	26,092,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	55,944,323	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	24,822,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	52,091,988	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	16,567,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	57,099,699	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LAKjP				1 Dokumen	17,110,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	56,712,359	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen monitoring, evaluasi dan Alporan Tahunan				2 Dokumen	143,563,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Dokumen	213,461,048	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersusunnya administrasi keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	7,869,813,759						1 Tahun	10,925,357,309	
3 29 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				76 Orang	7,782,750,219	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	76 Orang	10,793,233,289	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan ASN				1 Dokumen	27,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	58,779,539	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	5,499,370	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,090,441	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	22,064,180	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	27,145,460	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	19,101,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	23,494,145	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1,283,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	1,413,649	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	5,725,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,070,339	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan				1 Laporan	5,789,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	7,130,447	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	25,331,400						1 Laporan	56,326,434	
3 29 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	12,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	4,013,492	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	3,259,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	20,386,944	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	3,213,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	21,204,740	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	4,808,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Dokumen	8,196,480	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan				1 Laporan	2,051,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	2,524,778	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	1 Orang	26,660,400						1 Orang	98,948,667	
3 29 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan				1 Laporan	5,351,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	6,581,951	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN				76 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	76 Orang	16,963,792	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan				1 Laporan	3,837,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	4,720,458	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan				1 Laporan	17,470,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Laporan	70,682,466	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	231,350,880						5 Kegiatan	515,538,824	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		administrasi umum kantor													
3 29 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sarana dan Prasarana disiplin pegawai				20 Unit	11,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Unit	14,122,781	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan				20 Unit	23,770,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Unit	35,327,379	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga				20 Unit	1,716,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Unit	8,210,475	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor				20 Unit	16,321,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Unit	51,151,487	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan				10 Buah	19,116,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Buah	23,511,250	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan matrial				20 Buah	11,151,480	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk		Meningkatnya layanan perencanaan,	20 Buah	13,773,044	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		keuangan dan administrasi perkantoran			
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu				50 Orang	22,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	50 Orang	28,253,195	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				24 Laporan	125,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	24 Laporan	341,189,213	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	535,495,950						3 Sub Kegiatan	598,375,594	
3 29 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				1 Unit	488,169,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	436,803,506	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel				10 Buah	10,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Buah	12,469,970	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya				6 Unit	36,766,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Unit	149,102,118	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
										Pelayanan Dasar	dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	390,747,200						4 Sub Kegiatan	504,962,608	
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				2500 Surat	1,347,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2500 Surat	6,142,306	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				5 Rekening	146,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Rekening	226,042,528	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa				10 Buah	3,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Buah	18,320,895	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan jasa				6 Orang	240,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	6 Orang	254,456,879	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya BarTerpeliharanya Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	242,114,900						3 Sub Kegiatan	371,844,905	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				1 Unit	47,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	67,657,257	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				8 Unit	128,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	8 Unit	206,392,802	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang di pelihara				15 Unit	9,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	15 Unit	27,495,479	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara				1 Unit	57,154,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 Unit	70,299,367	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLoGIAN	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	260,834,200						1 Zona	784,681,659	
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi	CAT		CAT	1 CAT	150,682,600						1 CAT	522,160,494	
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah CAT yang dievaluasi				1 Zona	31,452,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Zona	86,084,122	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Peta Pengendalian dan Air Tanah				1 Peta	93,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Peta	393,480,966	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah sumur yang dibangun				1 Dokumen	26,105,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	42,595,406	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin engeboran, penggalian, pemakaian, serta pengusahaan air tanah	Izin		Izin	30 Izin	58,747,600						30 Izin	141,925,052	
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				30 Rekomendasi	31,368,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	30 Rekomendasi	85,176,613	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Izin yang dikendalikan dan diawasi				30 Izin	27,379,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	30 Izin	56,748,439	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah Dokumen NPA	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	51,404,000						4 Dokumen	120,596,113	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Provinsi														
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data NPA				10 Dokumen	20,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	56,748,439	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA				10 Dokumen	10,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	21,252,268	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah pemanfaatan NPA				10 Dokumen	20,624,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pengguna sumur bor	10 Dokumen	42,595,406	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%		%	6.25 %	150,149,100						6.25 %	400,343,852	
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang	Izin		Izin	10 Izin	58,456,500						10 Izin	166,071,961	
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				10 Rekomendasidasi	30,781,900	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Meningkatnya pengendalian usaha	10 Rekomendasidasi	106,488,088	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut							Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	pertambangan mineral dan batubara			
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				10 Izin	27,674,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 Izin	59,583,873	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah laporan koordinasi	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	68,398,400						5 Dokumen	127,783,377	
3 29 03 1.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah laporan koordinasi				1 Dokumen	41,720,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Dokumen	70,989,503	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.04 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan	Jumlah IPR yang dikendalikan				5 IPR	26,678,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan	5 IPR	56,793,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat							Semua Kelurahan		Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	mineral dan batubara			
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	23,294,200						1 Dokumen	106,488,514	
3 29 03 1.07 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan				1 Dokumen	23,294,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	1 Dokumen	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	%		%	5.64 %	190,563,600						5.64 %	4,001,047,803	
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	29,367,300						2 Izin	3,338,508,073	
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				2 Rekomendasi	18,547,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	52,327,902	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				2 Rekomendasi	10,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	2 Rekomendasi	3,286,180,171	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun dan direhab (Unit)	Unit		Unit	0 Unit	161,196,300						0 Unit	662,539,730	
3 29 05 1.04 01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan				1 Dokumen	76,997,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	1 Dokumen	141,455,934	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04 03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi				130 Orang	52,419,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	130 Orang	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05 1.04 04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun				6 Unit	31,779,600	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan	6 Unit	414,595,282	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	%		%	99.88 %	1,170,159,400						99.88 %	2,136,983,672	
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan	Jumlah Izin	Izin		Izin	0 Izin	0						0 Izin	113,586,613	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
3 29 06 1.01 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				0 Rekomendasi	0			Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Rekomendasi	70,992,201	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				0 Izin	0				Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Izin	42,594,412	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin operasi ketenagalistrikan yang dikendalikan (izin)	Izin		Izin	20 Izin	39,727,500					20 Izin	113,564,037		
3 29 06 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				40 Rekomendasi	17,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pelayanan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Pemegang izin ketenagalistrikan	40 Rekomendasi	70,983,824	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi				40 Izin	22,717,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pelayanan Ekonomi Dan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan	Pemegang izin ketenagalistrikan	40 Izin	42,580,213	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan		Pelayanan Dasar	dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Sasran	RTS		RTS	99 RTS	1,130,431,900						99 RTS	1,909,833,022	
3 29 06 1.06 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK penerima listrik murah dan hemat				0 Buah	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	0 Buah	106,488,514	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 06 1.06 06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun				500 RTS	1,130,431,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat	500 RTS	1,803,344,508	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						460,640,000					629,432,809			
3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	345,361,000						BB Nilai	372,150,094	
3 29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0						0 Dokumen	9,370,989	
3 29 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen				0 Dokumen	0	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	0	0 Dokumen	9,370,989	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang administrasi umum kantor	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	42,451,000					7 Kegiatan	68,206,319		
3 29 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				10 Unit	3,375,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Unit	4,151,916	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak				10 Buah	4,246,700	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 Buah	5,284,102	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu				24 Orang	1,531,200	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	24 Orang	1,976,427	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan				20 Laporan	33,298,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	20 Laporan	56,793,874	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	281,100,000					4 Sub Kegiatan	263,605,926		
3 29 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				500 Buah	540,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi	500 Buah	681,526	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan			perkantoran				
3 29 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				3 Buah	39,384,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 Buah	48,476,979	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				5 Buah	1,176,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Buah	1,470,393	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa				5 Orang	240,000,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 Orang	212,977,028	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perkatoran yang berkualitas	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	21,810,000						1 Sub Kegiatan	30,966,860	
3 29 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara				2 Unit	21,810,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 Unit	30,966,860	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	Zona		Zona	1 Zona	35,370,000						1 Zona	89,752,100	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 02 1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah CAT yang dievaluasi	Zona		Zona	1 Zona	35,370,000					1 Zona	89,752,100		
3 29 02 1.02 02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan				50 Izin	24,435,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	50 Izin	40,855,263	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 02 1.02 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah zona konservasi yang diawasi dan dikendalikan				1 Zoma	10,935,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah	1 Zoma	48,896,837	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase IUP yang melaksanakan kaidah usaha pertambangan yang baik dan benar	%		%	6.52 %	31,818,400					6.52 %	57,959,614		
3 29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang	Izin		Izin	65 Izin	31,818,400					65 Izin	57,959,614		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 29 03 1.03 03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)				30 Rekomendasi	15,935,000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	30 Rekomendasi	38,424,860	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 03 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)				10 Izin	15,883,400	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	Meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara	10 Izin	19,534,754	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik (%)	%		%	5.64 %	16,321,400						5.64 %	43,441,634	
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin	Izin		Izin	2 Izin	16,321,400						2 Izin	43,441,634	
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)				25 Izin	6,232,600	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk	0	25 Izin	15,044,697	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
	Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun							Kecamatan, Semua Kelurahan									
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina				1 Izin	10,088,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Izin	28,396,937	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	%		%	99.88 %	31,769,200						99.88 %	66,129,367			
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	Izin		Izin	10 Izin	31,769,200						10 Izin	66,129,367			
3 29 06 1.01 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)				5 Izin	16,407,600	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Izin	30,633,196	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
3 29 06 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)				10 Izin	15,361,600	Kab. Sumbawa, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Izin	35,496,171	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi							Kecamatan, Semua Kelurahan			mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)	masyarakat			
TOTAL							11,912,749,989							21,696,396,848	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							24,768,530,999		30,980,212,117				
3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	9,150,412,999				BB Nilai	8,981,528,701		
3	30	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	330,387,700				8 Dokumen	237,864,576		
3	30	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	162,517,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Dokumen	121,831,387	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				1 Dokumen	10,345,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10,350,900			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Dokumen	10,877,693	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD				1 Dokumen	10,351,100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	10,341,800			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Dokumen	10,877,802	Dinas Perdagangan
3	30	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10,344,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	1 Laporan	10,877,802	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja				2 Laporan	116,136,800				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	ASN	2 Laporan	61,644,288	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	6,101,637,819						1 Dokumen	6,578,476,171	
3 30 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				58 ASN	6,021,321,419	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			ASN	58 ASN	6,425,055,975	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Administra si Pelaksana an Tugas ASN				12 Bulan	62,820,000					ASN	12 Bulan	134,384,371	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	2,500,000					ASN	12 Bulan	2,719,450	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD				12 Bulan	2,496,600					ASN	12 Bulan	2,719,341	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP				1 Laporan	5,000,000					ASN	1 Laporan	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2,499,800					ASN	1 Dokumen	2,719,233	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				12 Dokumen	2,500,000					ASN	12 Dokumen	2,719,450	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				12 Dokumen	2,500,000					ASN	12 Dokumen	2,719,450	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	18,630,400					1 Dokumen	19,580,043		
3 30 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	5,175,300				BMD	1 Dokumen	5,438,901	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	5,175,000				BMD	12 Bulan	5,438,901	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	5,175,000				BMD	12 Bulan	5,438,901	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	3,105,100				BMD	12 Bulan	3,263,340	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	ASN		ASN	58 ASN	10,350,600					58 ASN	10,877,802		
3 30 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				1 ASN	10,350,600				ASN	1 ASN	10,877,802	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	520,285,080					12 Bulan	450,899,921		
3 30 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	10,351,000				ASN	12 Bulan	10,877,802	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan				12 Bulan	102,900,000				ASN	12 Bulan	97,834,085	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan				2 Unit	5,174,700				ASN	2 Unit	5,438,901	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	38,596,080				ASN	12 Bulan	40,562,999	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16000 Lembar	20,644,500				ASN	16000 Lembar	21,695,668	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				4000 Eksampul	26,600,000				ASN	4000 Eksampul	48,950,111	Dinas Perdagangan	
3 30 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan				12 Bulan	21,970,000				ASN	12 Bulan	21,581,560	Dinas Perdagangan	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	281,110,000					ASN	12 Bulan	190,361,542	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	12,938,800					ASN	12 Bulan	13,597,253	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan BMD	Unit		Unit	8 Unit	197,371,000						8 Unit	228,433,851	
3 30 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				5 Unit	187,020,000					ASN	5 Unit	217,556,049	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebel				1 Unit	10,351,000					ASN	1 Unit	10,877,802	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	Bulan		Bulan	12 Bulan	848,580,700						12 Bulan	891,370,643	
3 30 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				600 surat keluar	5,170,000					ASN	600 surat keluar	5,438,901	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				4 Rekening	187,810,700					ASN	4 Rekening	197,366,847	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung				21 Orang	655,600,000					ASN	21 Orang	688,564,895	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Unit		Unit	29 Unit	1,123,169,700						29 Unit	564,025,694	
3 30 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				24 Kendaraan	183,214,000					ASN	24 Kendaraan	192,537,103	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24 Kendaraan	99,888,100					ASN	24 Kendaraan	104,970,793	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan				12 Bulan	10,360,000					ASN	12 Bulan	10,877,802	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
3 30 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan				12 Bulan	31,054,000					ASN	12 Bulan	32,634,495	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				12 Bulan	20,720,000					ASN	12 Bulan	21,777,360	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung				2 Gedung	752,056,500					ASN	2 Gedung	174,034,070	Dinas Perdagangan
3 30 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan				12 Bulan	25,877,100					ASN	12 Bulan	27,194,071	Dinas Perdagangan
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%		%	70 %	399,146,900						70 %	304,578,469	
3 30 02 1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis		Pertimbangan Teknis	6 Pertimbangan Teknis	99,621,300						6 Pertimbangan Teknis	70,705,717	
3 30 02 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah distributor minuman beralkohol (MB) terfasilitasi melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				6 Distributor	99,621,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Distributor dan Masyarakat	6 Distributor	70,705,717	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan	Jumlah Pengecer Yang Terfasilitasi Secara Elektronik	Persen		Persen	5 Persen	99,908,400						5 Persen	81,583,518	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi														
3 30 02 1.02 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengecer bahan berbahaya (B2) difasilitasi melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				5 Pengecer	99,908,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Distributor dan Masyarakat	5 Pengecer	81,583,518	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha		Usaha	5 Usaha	199,617,200						5 Usaha	152,289,234	
3 30 02 1.03 02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah toko sarana distribusi bahan berbahaya yang diperiksa				6 Toko	99,924,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Distributor dan Masyarakat	6 Toko	81,583,518	Dinas Perdagangan
3 30 02 1.03 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan				6 pengawasan	99,692,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Distributor dan Masyarakat	6 pengawasan	70,705,716	Dinas Perdagangan
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen		Persen	100 Persen	5,061,388,300						100 Persen	4,029,002,054	
3 30 03 1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota		Kab/Kota	10 Kab/Kota	5,061,388,300						10 Kab/Kota	4,029,002,054	
3 30 03 1.01 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Jenis Bantuan Sarana Prasarana				4 Jenis	4,885,082,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	4 Jenis	3,865,835,018	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 1.01 03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana				2 Kali	176,305,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	2 Kali	163,167,036	Dinas Perdagangan
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen		Persen	4 Persen	330,996,600						4 Persen	1,804,083,316	
3 30 04 1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi		Komoditi	22 Komoditi	79,986,300						22 Komoditi	87,022,418	
3 30 04 1.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan				7 Koordinasi	40,007,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Membangun infrastruktur dan konektivitas antar wilayah untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi (PD-2)	Masyarakat dan Distributor	7 Koordinasi	43,511,209	Dinas Perdagangan
3 30 04 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Penting yang dilaksanakan				7 Koordinasi	39,978,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan Distributor	7 Koordinasi	43,511,209	Dinas Perdagangan
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Komoditi		Komoditi	22 Komoditi	251,010,300						22 Komoditi	1,717,060,898	
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di				32 komoditi	93,010,300	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Membangun infrastruktur dan konektivitas antar	Pelaku Usaha	32 komoditi	97,900,004	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi						Kecamatan, Semua Kelurahan			wilayah untuk mendukung pelayanan dasardan pengembangan ekonomi (PD-2)				
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar/Pasar Murah Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilisasi Harga Bapok				11 Operasi Pasar	158,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pelaku Usaha	11 Operasi Pasar	1,619,160,894	Dinas Perdagangan	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Presentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	% %		% %	5 % 3 %	1,825,118,700					5 % 3 %	1,417,874,663		
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM		UKM	5 UKM	1,825,118,700					5 UKM	1,417,874,663		
3 30 05 1.01 01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah UKM yang ikut Pameran				10 UKM	1,055,495,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	UKM	10 UKM	602,039,482	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara				1 Pameran	285,440,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	1 Pameran	326,334,073	Dinas Perdagangan
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang				10 UKM	168,763,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UKM	10 UKM	163,167,036	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
3 30 05 1.01 04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Ekspor Terpilih				3 Produk	160,262,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UKM	3 Produk	163,167,036	Dinas Perdagangan	
3 30 05 1.01 05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina				38 Pelaku Usaha	155,156,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UKM	38 Pelaku Usaha	163,167,036	Dinas Perdagangan	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%		%	85 %	2,084,124,500					85 %	1,363,532,098		
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Orang		Orang	150 Orang	1,760,340,600					150 Orang	1,022,513,102		
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				150 Orang	92,499,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	150 Orang	97,900,004	Dinas Perdagangan	
3 30 06 1.01 02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama				4 Lembaga	1,564,329,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	4 Lembaga	815,835,074	Dinas Perdagangan	
3 30 06 1.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota				55 Kasus	103,511,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Masyarakat	55 Kasus	108,778,024	Dinas Perdagangan	
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah	Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi		Komoditi	2 Komoditi	76,001,400					2 Komoditi	79,952,065		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kabupaten/Kota														
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu				10 Komoditi Unggulan	76,001,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Toko/Retail	10 Komoditi Unggulan	79,952,065	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen	Konsumen		Konsumen	15 Konsumen	247,782,500						15 Konsumen	261,066,931	
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen				105 Barang	154,622,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Toko/Retail	105 Barang	163,166,927	Dinas Perdagangan
3 30 06 1.03 02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Konsumen/Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Untuk Mendapat Perlindungan Konsumen				15 Konsumen	93,159,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Toko/Retail	15 Konsumen	97,900,004	Dinas Perdagangan
3 30 07	PROGRAM PENGUNAAN DAN Pemasaran PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen		Persen	100 Persen	5,917,343,000						100 Persen	13,079,612,816	
3 30 07 1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk		Produk	40 Produk	4,245,337,500						40 Produk	12,046,221,585	
3 30 07 1.01 01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Promosi				3 Promosi	4,245,337,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan UKM	3 Promosi	12,046,221,585	Dinas Perdagangan
3 30 07 1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk		Jenis Produk	12 Jenis Produk	1,465,199,900						12 Jenis Produk	935,491,010	
3 30 07 1.02 01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah Fasilitasi Pemasaran				3 Pemasaran	1,465,199,900	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk		UKM dan Masyarakat	3 Pemasaran	935,491,010	Dinas Perdagangan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tingkat Provinsi	Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 30 07 1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM		UKM	25 UKM	206,805,600					25 UKM	97,900,221		
3 30 07 1.03 02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana				2 Sosialisasi	114,310,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UKM	2 Sosialisasi	81,583,518	Dinas Perdagangan	
3 30 07 1.03 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing				35000 Orang	92,495,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	UKM	35000 Orang	16,316,703	Dinas Perdagangan	
TOTAL							24,768,530,999						30,980,212,117		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	31						25,793,621,683						37,316,728,516							
3	31	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	persen		persen	100 persen	12,636,087,083				100 persen	17,878,348,735			
3	31	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	persen		persen	100 persen	769,313,100				100 persen	833,476,380			
3	31	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	119,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	475,834,721	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	34,004,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	61,568,362	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	45,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	51,401,963	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	12,729,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	14,470,691	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	12,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	14,235,912	Dinas Perindustrian
3	31	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah				1 Dokumen	14,995,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	14,996,361	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 31 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah				1 Dokumen	529,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	200,968,370	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	persen		persen	100 persen	8,037,467,383						100 persen	10,776,188,440	
3 31 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terfasilitasi pembayaran gaji				70 Orang	7,989,549,383	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	70 Orang	10,711,774,668	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	10,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	11,843,818	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun				1 Dokumen	22,471,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	36,296,333	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun				1 Dokumen	15,007,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	dokumen	1 Dokumen	16,273,621	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD	dokumen		dokumen	1 dokumen	30,652,600						1 dokumen	30,917,075	
3 31 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	22,778,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Dokumen	21,750,335	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	7,874,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	0	1 Dokumen	9,166,740	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang memiliki sertifikasi pendidikan	dokumen		dokumen	1 dokumen	97,700,000						1 dokumen	1,291,873,178	
3 31 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia				100 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	100 Orang	1,181,128,092	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah fasilitasi Pendidikan Dan Pelatihan ASN				66 Orang	97,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	66 Orang	110,745,086	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD Tersedianya bahan penunjang kegiatan kantor	persen paket		persen paket	100 persen 1 paket	940,809,000						100 persen 1 paket	1,359,505,888	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah sistem kelistrikan yang tersedia				20 Jenis	23,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	20 Jenis	36,439,563	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya peralatan dan perlengkapan kantor				50 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	50 unit	0	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik OPD yang tersedia				10 Jenis	98,867,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	10 Jenis	210,273,414	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan yang tersedia				200000 Lembar	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	200000 Lembar	42,829,998	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan OPD yang tersedia				5 Rekening	93,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	5 Rekening	20,465,692	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan minum tamu yang tersedia				250 Paket	142,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	250 Paket	138,505,188	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi OPD yang terfasilitasi				12 kali	550,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Paket	12 kali	910,992,033	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel	dokumen		dokumen	1 dokumen	846,915,000						1 dokumen	1,416,845,760	
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas				3 unit	320,069,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	3 unit	485,618,680	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang tersedia				10 unit	398,846,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	10 unit	670,927,990	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat dan permesinan yang diadakan				30 unit	128,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	30 unit	260,299,090	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Rekening penyediaan jasa yang dibayar	persen		persen	100 persen	1,662,510,000						100 persen	1,874,989,617	
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat OPD				1500 Surat	30,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1500 Surat	34,884,702	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik				4 Rekening	229,770,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	4 Rekening	211,354,782	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa layanan umum kantor				22 Orang	1,401,960,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	22 Orang	1,628,750,133	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD Tersusunnya laporan BMD yang disusun	persen dokumen		persen dokumen	100 persen 1 dokumen	250,720,000						100 persen 1 dokumen	294,552,398	
3 31 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang tersedia				13 Unit	250,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Jumlah kendaraan bermotor OPD	13 Unit	294,552,398	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang terlatih	dokumen		dokumen	1 dokumen	10,812,377,400						1 dokumen	17,361,176,878	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi	IKM		IKM	40 IKM	10,812,377,400						40 IKM	17,361,176,878	
3 31 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	254,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	174,086,846	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 31 02 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terfasilitasinya Pembentukan Sentra IKM				3 sentra	880,422,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	3 sentra	3,117,355,165	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terlaksananya Bimtek/ Magang/ Pelatihan Terkait Pengembangan Industri				100 IKM	864,341,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	834,396,302	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih				80 IKM	2,024,198,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	80 IKM	8,549,487,601	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang diberdayakan				200 IKM	6,339,375,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	200 IKM	4,379,772,218	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah				1 Dokumen	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	306,078,746	Dinas Perindustrian
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Industri Kewenangan Provinsi	IKM		IKM	1400 IKM	1,544,957,300						1400 IKM	1,279,102,934	
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan	IKM		IKM	1400 IKM	1,544,957,300						1400 IKM	1,279,102,934	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Perizinan Dan Perluasan Usaha Untuk Industri				800 IKM	970,247,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	800 IKM	1,058,448,377	Dinas Perindustrian
3 31 03 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi Pengawasan Perizinan Untuk Industri				100 IKM	574,710,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	220,654,557	Dinas Perindustrian
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	% Unit		% Unit	1 % 1 Unit	800,199,900						1 % 1 Unit	798,099,969	
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen		dokumen	1 dokumen	800,199,900						1 dokumen	798,099,969	
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Analisis Data Industri				1 Dokumen	306,060,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	293,542,402	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 04 1.01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah dokumen Analisis Data Industri				1 Dokumen	247,389,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Dokumen	224,983,811	Dinas Perindustrian
3 31 04 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	jumlah IKM yang dipantau dan evaluasi				100 IKM	246,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	279,573,755	Dinas Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						6,072,060,400							6,537,351,246	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	2,824,975,700						BB Nilai	4,391,677,308	
3 31 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	45,109,000						1 Dokumen	50,896,965	
3 31 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pembangunan sarana prasarana industri				5 Dokumen	45,109,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	5 Dokumen	50,896,965	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7,972,000						1 Dokumen	6,268,024	
3 31 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun				1 Dokumen	7,972,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Dokumen	1 Dokumen	6,268,024	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terbentuknya sistem penganggaran dan evaluasi OPD	persen		persen	100 persen	606,979,700						100 persen	1,205,783,489	
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penerangan kantor yang tersedia				1 Paket	4,870,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	524,798,814	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan		Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				1 Paket	294,172,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	327,298,243	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia				1 Paket	18,887,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	21,333,933	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia				1 Paket	9,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	11,044,090	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan perundang- undangan yang tersedia				1 Paket	6,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	7,973,646	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi				12 kali	22,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	12 kali	25,397,539	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia				1 Paket	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	rekening	1 Paket	287,937,224	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralataan dan mesin kantor	unit		unit	20 unit	1,261,302,000						20 unit	2,080,516,254	
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia				5 unit	223,412,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	5 unit	456,254,989	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin dan peralatan yang tersedia				1 paket	1,037,890,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	unit	1 paket	1,624,261,265	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa komunikasi , air listrik	rekening		rekening	4 rekening	741,415,000						4 rekening	847,911,630	
3 31 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat				1000 Surat	11,569,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1000 Surat	12,521,577	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				1 Paket	51,606,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Rekening	1 Paket	71,780,535	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor				1 Paket	678,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta		Mengoptimalkan pengelolaan pariwisata pasca pandemi Covid-19 (PD-8)	Rekening	1 Paket	763,609,518	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya gedung kantor OPD	Unit		Unit	1 Unit	162,198,000						1 Unit	200,300,946	
3 31 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Surat Menyurat Kendaraan Operasional Dinas				5 unit	53,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	Gedung Kantor OPD	5 unit	78,947,957	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor Dan Bangunan Pendukung Industrialisasi				1 paket	108,268,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua				Gedung Kantor OPD	1 paket	121,352,989	Dinas Perindustrian

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah IKM yang terlatih	IKM		IKM	100 IKM	3,247,084,700					100 IKM	2,145,673,938		
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah IKM yang mendapat sertifikasi	IKM		IKM	60 IKM	3,247,084,700					60 IKM	2,145,673,938		
3 31 02 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Sarana Prasana Industri Di Rumah Kemasan				1 Paket	1,214,855,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	1 Paket	1,142,546,571	Dinas Perindustrian
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Kemasan Produk Untuk Industri Olahan Pangan				100 IKM	2,032,228,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	IKM	100 IKM	1,003,127,367	Dinas Perindustrian
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0						24,851,765,430		
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						0						5,733,992,316		
3 31 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0						223,621,889		
3 31 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya bahan logistik kantor				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	188,939,481	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan				50000 Lembar	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		50000 Lembar	34,682,408	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0						2,590,263,189		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penerangan gedung kantor				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	39,464,381	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	2,023,398,222	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang- undangan				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	10,631,528	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan Dan Minuman Tamu OPD				100 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	100 Orang	369,108,943	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan Dan Minuman Rapat OPD				30 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	30 Orang	147,660,115	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						1,352,609,475		
3 31 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan operasional dinas				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	789,667,099	Dinas Perindustrian	
3 31 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Mesin- mesin Pendukung Industrialisasi				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Paket	97,824,826	Dinas Perindustrian	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 31 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap OPD				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	59,064,046	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasarana pendukung industrialisasi				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	406,053,504	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							1,470,883,750	
3 31 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	248,068,993	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	1,222,814,757	Dinas Perindustrian
3 31 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0							96,614,013	
3 31 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya				1 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)		1 Paket	96,614,013	Dinas Perindustrian
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						0							19,117,773,114	
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan						0							19,117,773,114	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
Industri Provinsi															
3 31 02 1.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	1 Dokumen	4,775,288,252	Dinas Perindustrian	
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Industri Motor Listrik NTB				50 IKM	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	50 IKM	12,130,427,071	Dinas Perindustrian	
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Industri Motor Listrik NTB				50 IKM	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Industrialisasi produk unggulan (PD-9)	50 IKM	2,212,057,791	Dinas Perindustrian	
TOTAL													68,705,845,192		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	01						491,358,519,344							196,370,387,284				
4	01	01					491,358,519,344						100 %	196,370,387,284				
4	01	01	1.01				200,900,700						100 %	151,362,073				
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				2 Dokumen	49,064,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	40,826,488	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun				1 dokumen	65,044,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 dokumen	39,270,790	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	49,865,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	41,436,096	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun				1 Dokumen	36,926,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	29,828,699	Sekretariat Daerah
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						455,432,679,714						150,723,186,239	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan				1062 Orang	455,113,561,554	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1062 Orang	150,380,487,210	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas				5 Orang	102,328,960	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Orang	107,404,133	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 berkas	133,079,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3000 berkas	109,216,470	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	41,989,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Dokumen	93,798,133	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun				2 Dokumen	41,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Dokumen	32,280,293	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						440,921,300							638,638,756	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	19,841,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	52,993,421	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	315,855,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	389,207,728	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	14,105,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	55,935,039	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD				1 Dokumen	50,860,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	67,756,875	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD SKPD				1 Dokumen	40,259,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Dokumen	72,745,693	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2,367,128,700						3,995,558,689		
4 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen/Peralatan Listrik yang disediakan				11 jenis	82,506,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	11 jenis	49,830,350	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				24 Jenis	258,502,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	24 Jenis	486,028,310	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan				25 jenis	107,105,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	25 jenis	236,894,641	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	132,197,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Jenis	239,817,239	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Jenis	40,983,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Jenis	61,810,894	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				6 Jenis	67,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Jenis	74,444,720	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi				17000 orang/kali	1,093,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		17000 orang/kali	1,896,980,912	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				15 kali	487,146,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		15 kali	712,783,534	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola				3000 berkas	98,176,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3000 berkas	236,968,089	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,558,259,300							1,057,306,959	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan				1 unit	840,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 unit	234,572,842	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				50 buah/urid	168,047,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		50 buah/urid	185,676,034	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan/Mesin				50 unit/buah	495,211,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		50 unit/buah	581,695,128	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya				5 unit	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	5 unit	55,362,955	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,106,558,100						13,499,570,441		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola				3000 surat	49,862,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3000 surat	106,250,369	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa / rekening yang dibayarkan				4 jasa/rekening	1,876,411,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 jasa/rekening	2,475,616,069	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				16 Jenis	492,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	16 Jenis	677,353,457	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak untuk Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				270 Orang	8,687,409,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	270 Orang	10,240,350,546	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,688,452,500						6,748,755,347		
4 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dikelola				20 unit	719,854,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 unit	1,025,711,937	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dikelola				217 unit	2,062,658,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		217 unit	3,275,700,587	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara				14 Jenis	160,934,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		14 Jenis	349,426,369	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Area Gedung Kantor dan Rumah Jabatan yang terpelihara				6000 m2	1,590,605,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6000 m2	1,854,171,815	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Area Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				18000 m2	154,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		18000 m2	243,744,639	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%		%	100 %	6,444,357,180						100 %	7,998,627,655	
4 01 01 1.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan				28 OB	2,982,645,348	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 OB	3,654,039,368	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan				60 Stel	450,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 Stel	541,138,688	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 kali	80,000,000					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 kali	196,846,064	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH yang terbayar				24 OB	2,931,511,832					Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 OB	3,606,603,535	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	%		%	100 %	9,119,261,850						100 %	11,557,381,125	
4 01 01 1.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah pelayanan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah				12 kali	4,392,691,275					Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	4,746,574,854	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah pelayanan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah				12 kali	2,611,049,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	3,177,754,784	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah pelayanan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah				12 kali	2,115,520,875	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	12 kali	3,633,051,487	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,623,000,000						2,124,661,805		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	464,844,700						BB Nilai	712,399,438	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD, Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD, jumlah dokumen DPA-SKPD dan dokumen perubahan DPA-SKPD, Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD, Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	dokumen		dokumen	38 dokumen	55,451,500						38 dokumen	60,861,114	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang tersusun													
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD				4 dokumen	9,925,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	4 dokumen	10,924,957	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				4 dokumen	9,626,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	4 dokumen	10,580,476	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				4 dokumen	8,146,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	4 dokumen	8,973,720	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	jumlah dokumen DPA- SKPD				4 dokumen	8,841,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	4 dokumen	9,673,139	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD				4 dokumen	7,862,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	4 dokumen	8,565,880	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD				1 dokumen	5,301,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	5,806,959	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun				1 dokumen	5,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 dokumen	6,335,983	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58,076,600							64,074,377	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat penatausahaan keuangan yang terbayar				12 OB	17,147,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 OB	19,006,964	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan				4 dokumen	9,041,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 dokumen	10,018,603	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun				1 dokumen	21,012,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	23,175,548	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik				12 dokumen	6,104,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 dokumen	6,724,015	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan				12 dokumen	4,770,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 dokumen	5,149,247	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Biro Organisasi	dokumen		dokumen	82 dokumen	11,655,500						82 dokumen	12,831,041	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang	jumlah DKBMD dan DKPBMD, laporan aset				2 dokumen	2,901,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan	2 dokumen	3,127,146	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Milik Daerah SKPD							Kecamatan, Semua Kelurahan				kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB			
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun				1 laporan	4,399,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 laporan	4,868,864	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset yang terlaksana				1 laporan	4,355,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penyusunan perencanaan dan laporan kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 laporan	4,835,031	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						220,171,100							315,992,064	
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				25 jenis	3,446,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 jenis	8,628,255	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor				50 jenis	36,210,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50 jenis	46,480,646	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan				20 dokumen	12,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20 dokumen	28,973,895	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				3600 eksemplar	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3600 eksemplar	22,145,182	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu				500 porsi	39,090,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500 porsi	43,060,076	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah dan luar daerah				1 tahun	110,914,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 tahun	166,704,010	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105,600,000						245,316,824		
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				6 paket	105,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6 paket	122,288,034	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud yang diadakan				3 aplikasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3 aplikasi	123,028,790	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,920,000						2,140,701		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar				1200 surat	1,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1200 surat	2,140,701	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						11,970,000						11,183,317		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				42 unit	11,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42 unit	11,183,317	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	- %		0 %	- %	1,158,155,300						- %	1,412,262,367	
4 01 02 1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang- undangan, Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi, Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi, Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun, Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	dokumen		dokumen	77 dokumen	421,818,800						77 dokumen	498,328,606	
4 01 02 1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang- undangan Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi				3 dokumen 3 dokumen	173,549,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kot a dan Analisis Jabatan	3 dokumen 3 dokumen	215,079,792	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.01 02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi				22 dokumen	94,139,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kot a dan Analisis Jabatan	22 dokumen	103,733,324	Sekretariat Daerah
4 01 02 1.01 03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun				3 dokumen 46 dokumen	154,130,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kot a dan Analisis	3 dokumen 46 dokumen	179,515,490	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun						Kelurahan			Jabatan				
4 01 02 1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						736,336,500						913,933,761		
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kab/Kota yang Nilai PMPRB baik Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi				10 Kab/Kota 80 poin	148,128,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	10 Kab/Kota 80 poin	236,215,400	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik				43 dokumen 43 laporan	283,068,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	43 dokumen 43 laporan	225,755,369	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menerapkan Budaya Kerja baik				43 OPD	77,976,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	43 OPD	98,332,852	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan				43 OPD	91,242,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			43 OPD	89,390,873	Sekretariat Daerah	
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan Jumlah perangkat daerah termonitoring pelaksanaan pelayanan publik Jumlah unit kerja pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan				20 Inovasi 43 OPD 43 OPD	135,920,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	20 Inovasi 43 OPD 43 OPD	264,239,267	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						4,250,000,000						6,115,002,429		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP PD	Nilai		Nilai	BB Nilai	4,250,000,000					BB Nilai	6,115,002,429		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun Jumlah Laporan Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	78,189,400					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	86,120,153		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun				3 Dokumen	11,170,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	3 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun				1 Dokumen	11,169,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	11,169,800	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun				1 Dokumen	11,169,800	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun				1 Dokumen	11,169,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				2 Dokumen	11,170,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun				2 Dokumen	11,170,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Penyusunan Perencanaan dan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB	2 Dokumen	12,302,879	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Pelaksana Tugas Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	orang Dokumen Dokumen		orang Dokumen Dokumen	2 orang 1 Dokumen 18 Dokumen	15,490,000						2 orang 1 Dokumen 18 Dokumen	25,059,242	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN pelaksana Tugas				2 OB	6,840,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	2 OB	5,683,930	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan koordinasi dan keuangan akhir tahun SKPD				1 Dokumen	5,475,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	6,895,764	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran				18 Dokumen	3,175,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Penatausahaan Keuangan Biro Administrasi Pimpinan	18 Dokumen	12,479,548	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan administrasi BMD pada PD Dokumen Penatausahaan BMD pada PD	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen	8,924,600					4 Dokumen 4 Dokumen	11,493,350		
4 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD				1 Dokumen	8,924,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemeliharaan Barang Nilik Daerah Pada Biro Administrasi Pimpinan	1 Dokumen	11,493,350	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian PD Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	146 Dokumen 146 Dokumen	62,058,300					146 Dokumen 146 Dokumen	68,348,644		
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian				1 Dokumen	62,058,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi NTB	1 Dokumen	68,348,644	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jenis Logistik kantor yang tersedia Jumlah bahan bacaan Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah rapat koordinasi luar daerah Jumlah tamu	jenis jenis exemplar jenis kali orang		jenis jenis exemplar jenis kali orang	20 jenis 65 jenis 150 exemplar 15 jenis 120 kali 1500 orang	408,143,100					20 jenis 65 jenis 150 exemplar 15 jenis 120 kali 1500 orang	551,975,186		
4 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				15 Jenis	94,347,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	17,599,268	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis logistik yang disediakan				50 Jenis	70,304,200	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	50 Jenis	89,533,095	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				10 Jenis	22,098,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	24,342,722	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan				4 Jenis	97,920,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	107,847,037	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu				1500 OK	43,473,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	1500 OK	61,944,996	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		penyediaan Bahan Bacaan, peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	250,708,068	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan	unit		unit	0 unit	0						0 unit	246,057,580	
4 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan				8 Unit	0	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor	8 Unit	246,057,580	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa layanan Umum kantor yang tersedia	surat		surat	1150 surat	232,200,000						1150 surat	284,836,254	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola				1000 Surat	6,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kegiatan Surat menyurat lantor dan Penyediaan makan minum rapat	1000 Surat	7,283,304	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak untuk pelayanan umum				8 OB	225,600,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Surat menyurat lantor dan Penyediaan makan minum rapat	8 OB	277,552,950	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit		unit	150 unit	55,300,000						150 unit	61,071,491	
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				5 Jenis	55,300,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Aset Daerah di Biro Administrasi Pimpinan	5 Jenis	61,071,491	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi pimpinan Jumlah Koordinasi dan Informasi Kegiatan Pimpinan Jumlah materi pimpinan	kegiatan kegiatan Materi		kegiatan kegiatan Materi	1100 kegiatan 740 kegiatan 1100 Materi	1,427,244,600						1100 kegiatan 740 kegiatan 1100 Materi	2,186,870,451	
4 01 01 1.13 01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah materi pimpinan				1100 Dokumen	357,514,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKDH)	1100 Dokumen	538,140,230	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah koordinasi dan informasi kegiatan pimpinan				760 Kali	432,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKDH)	760 Kali	670,506,905	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.13 03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi pimpinan				1200 Dokumen	637,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kegiatan Pimpinan (KDH/WKDH)	1200 Dokumen	978,223,316	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan Jumlah jadwal layanan keprotokolan Jumlah penerimaan/kunjungan tamu pimpinan	kegiatan kegiatan tamu		kegiatan kegiatan tamu	1100 kegiatan 1100 kegiatan 180 tamu	1,962,450,000						1100 kegiatan 1100 kegiatan 180 tamu	2,593,170,078	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.14 01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah acara pimpinan				1200 Kali	350,875,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKDH) Tamu Pimpinan (KDH/WKDH)	1200 Kali	596,671,177	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14 02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah penerimaan/kunjungan tamu pimpinan				200 Kali	289,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKDH) Tamu Pimpinan (KDH/WKDH)	200 Kali	397,124,631	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.14 03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah jadwal layanan keprotokolan				1200 Kali	1,322,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan (KDH/WKDH) Tamu Pimpinan (KDH/WKDH)	1200 Kali	1,599,374,270	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,423,000,000						0		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						231,755,600						0		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54,290,000						0		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia				2 Dokumen	11,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	10,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	10,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersedia				1 Dokumen	10,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia				1 Dokumen	6,230,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia				1 Dokumen	4,535,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,380,000						0		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Orang	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya				1 Laporan	5,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Laporan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,964,100						0		
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD				1 Dokumen	973,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD yang tersedia				2 Dokumen	991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						144,372,500						0		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kantor yang tersedia				25 Jenis	27,462,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				25 Jenis	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan				11500 Explor	20,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				11500 Explor	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ketersediaan bahan bacaan				72 Explor	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				72 Explor	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi				700 porsi	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				700 porsi	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi				1 Tahun	64,884,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Tahun	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,000,000						0		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat masuk dan surat keluar				280 surat	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua				280 surat	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Pelayanan Umum Kantor				6 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				6 orang	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24,749,000						0		
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38 unit	24,749,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				38 unit	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1,191,244,400						0		
4 01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang- Undangan						978,585,400						0		
4 01 05 1.01 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk				100 persen	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk				100 persen	186,797,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.01 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang tersosialisasi kepada masyarakat dan persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun				100 persen	221,823,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				100 persen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Nasional					Daerah	
4 01 05 1.01 04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi				100 persen	384,965,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						212,659,000							0		
4 01 05 1.02 01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase Penanganan masalah hukum litigasi				100 persen	122,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 05 1.02 02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	persentase penanganan masalah hukum non litigasi dan HAM				100 persen	90,449,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					100 persen	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,415,000,000							4,075,289,286	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	522,897,200						BB Nilai	589,083,983		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	dokumen		dokumen	7 dokumen	45,509,200						7 dokumen	54,090,344		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	5,815,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	7,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	7,015,600	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	7,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	7,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	7,015,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen				1 dokumen	4,615,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,727,192	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan administrasi keuangan	dokumen		dokumen	1 dokumen	24,349,500						1 dokumen	28,798,578	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah tenaga administrasi keuangan				1 orang	7,714,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 orang	6,316,298	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	4,825,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,095,070	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	6,840,500	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	7,534,283	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	jumlah dokumen				4 dokumen	4,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen	7,852,927	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan administrasi Barang Milik Daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	10,906,300						1 dokumen	13,450,491	
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	jumlah dokumen				1 dokumen	1,735,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen	5,876,593	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen				4 dokumen	9,171,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen	7,573,898	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan administrasi Kepegawaian	dokumen		dokumen	1 dokumen	4,695,000						1 dokumen	9,446,150	
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen				1 dokumen	4,695,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Biro Pemerintahan dan Otda	1 dokumen	9,446,150	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi Umum	dokumen		dokumen	1 dokumen	274,377,800						1 dokumen	362,824,079	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK				25 jenis	36,643,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	25 jenis	40,396,872	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				15000 eksemplar	30,535,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	15000 eksemplar	34,499,241	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan				4000 eksemplar	13,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	4000 eksemplar	20,152,115	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu				50 kali	17,869,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	50 kali	21,085,904	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat dan konsultasi				90 kali	175,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Perangkat daerah	90 kali	246,689,947	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	unit		unit	6 unit	72,028,400						6 unit	34,354,190	
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya				5 unit	72,028,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	5 unit	34,354,190	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan	dokumen		dokumen	1 dokumen	64,351,000						1 dokumen	44,708,662	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar				250 surat	2,447,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	250 surat	7,295,607	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum				1 orang	61,904,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 orang	37,413,055	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit		unit	45 unit	26,680,000					45 unit	41,411,489		
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	0 unit	1,845,431	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya				42 unit	26,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Barang Milik Daerah	42 unit	39,566,058	Sekretariat Daerah
4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%		%	100 %	892,102,800						100 %	3,486,205,303	
4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	230,049,800						1 dokumen	1,021,138,956	
4 01 03 1.01 01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah yang telah dilaksanakan dengan baik persentase penyelesaian masalah pertanahan yang difasilitasi dengan bai				4 dokumen 100 %	50,004,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	4 dokumen 100 %	292,036,145	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.01 02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dokumen Hasil identifikasi daerah rawan bencana yang disusun dengan valid. jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM yang dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai ketentuan				1 dokumen 6 SPM	79,994,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana (PD-1)	Pemerintah Provinsi NTB	1 dokumen 6 SPM	264,929,950	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 03 1.01 03	Fasilitasi Penataan Wilayah	jumlah desa yang difasilitasi untuk dimekarkan sampai menjadi desa persiapan jumlah rupa bumi yang bisa difasilitasi untuk dibakukan jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti				30 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	100,050,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	30 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	464,172,861	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	485,072,800						1 dokumen	1,811,502,353	
4 01 03 1.02 01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dokumen administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang difasilitasi sampai selesai				20 dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	20 dokumen	710,814,581	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	jumlah usulan DOB dan penataan urusan yang ditindaklanjuti sampai rekomendasi				1 DOB/urusan	50,313,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	1 DOB/urusan	239,906,140	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.02 03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dokumen EPPD Kab/Kota yang dievaluasi jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ yang terselesaikan tepat waktu				10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	334,759,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi NTB	10 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	860,781,632	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dokumen		dokumen	1 dokumen	176,980,200						1 dokumen	653,563,994	
4 01 03 1.03 01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	jumlah dokumen naskah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi sampai selesai				10 dokumen	59,926,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	10 dokumen	280,719,096	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 03 1.03 02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	jumlah dokumen naskah kerjasama badan usaha/ swasta yang difasilitasi sampai selesai				10 dokumen	59,989,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	10 dokumen	173,982,885	Sekretariat Daerah
4 01 03 1.03 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah				15 dokumen	57,063,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah dan Badan Usaha/Swasta	15 dokumen	198,862,013	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						46,801,000,000								0
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	621,000,100						BB Nilai	0	
4 01 01 1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	78,195,000						8 Dokumen	0	
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Disusun				1 Dokumen	11,271,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	11,168,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	11,147,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	11,156,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	11,158,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD Yang Disusun				1 Dokumen	11,165,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun				2 Dokumen	11,126,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov.NTB	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	99,842,100						18 Dokumen	0	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayar				24 OB	77,575,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	24 OB	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Tersedia				1 Dokumen	11,102,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Yang Tersedia				16 Dokumen	11,164,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	16 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	16,750,900					2 Dokumen	0		
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 Dokumen	5,583,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD Yang Disusun				1 Dokumen	11,167,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Negeri Sipil Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah	Orang		Orang	45 Orang	5,583,500					45 Orang	0		
4 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah				45 Orang	5,583,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	45 Orang	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	336,366,600					100 Persen	0		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia				40 Jenis	55,849,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	40 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7 Jenis	55,837,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	7 Jenis	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Diadakan				720 Exempar	18,180,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	720 Exempar	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu Yang Dilayani				1510 Orang/Kali	37,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	1510 Orang/Kali	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordnasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan				75 Orang/Tahun	169,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	75 Orang/Tahun	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dan Peralatan Yang Diadakan	Unit		Unit	20 Unit	0						20 Unit	0	
4 01 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan Yang Diadakan				5 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				15 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	15 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	47,132,000						100 Persen	0	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				500 Surat	6,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	500 Surat	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Yang Dibayar				14 Orang/Bulan	40,532,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	14 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	37,130,000						100 Persen	0	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemerintahan Daerah														
4 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Terpelihara				12 Set	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	12 Set	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara				50 Unit	37,130,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Lingkup Biro Kesra Setda Prov. NTB	50 Unit	0	Sekretariat Daerah
4 01 04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%		%	100 %	46,179,999,900						100 %	0	
4 01 04 1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali		Kali	795 Kali	5,413,681,600						795 Kali	0	
4 01 04 1.01 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				790 Kali	4,568,188,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	790 Kali	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.01 02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						845,493,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda		0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	40,622,303,200						15 Dokumen	0	
4 01 04 1.02 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja				4 Dokumen	40,419,833,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Meningkatkan kualitas pendidikan SDM (PD-5)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama,	4 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						Semua Kelurahan		Berdaya Saing		Masyarakat, Budaya, dan Pemuda			
4 01 04 1.02 02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				8 Dokumen	164,883,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	8 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.02 03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial				3 Dokumen	37,585,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas kesehatan SDM (PD-4)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	144,015,100						3 Dokumen	0	
4 01 04 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata				1 Dokumen	48,201,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 04 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				1 Dokumen	37,339,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 04 1.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan				1 Dokumen	58,474,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Tokoh Agama, Masyarakat, Budaya, dan Pemuda	1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						3,106,893,000						0		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						417,907,300						0		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34,443,500						0		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah				1 dokumen	13,352,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4,384,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dukumer	4,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dukumer	0	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD				1 Dokumen	4,176,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,					1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja				1 Dokumen	3,031,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14,116,000						0		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Tunjangan kinerja				1 Dokumen	5,124,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	3,663,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	5,329,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,591,400						0		
4 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	1,591,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						274,440,400						0		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia				15 Dokumen	12,741,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				15 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				4 Dokumen	8,300,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				4 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia				2 Dokumen	8,460,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang terfasilitasi				275 Dokumen	5,453,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				275 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi				45 Dokumen	239,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						84,216,000						0		
4 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				2 Dokumen	84,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,000,000						0		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				550 Dokumen	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				550 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						6,100,000						0		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Pemerintahan Daerah														
4 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Aset tetap Yang Terpelihara				35 Dokumen	6,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				35 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2,688,985,700						0		
4 01 06 1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						908,618,000						0		
4 01 06 1.01 01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	368,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				2 Dokumen	540,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						820,600,100						0		
4 01 06 1.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan				2 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.02 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				2 Dokumen	153,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.02 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air				2 Dokumen	167,050,100	Semua Kab/Kota, Semua				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Energi dan Air							Kecamatan, Semua Kelurahan							
4 01 06 1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						959,767,600						0		
4 01 06 1.03 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				2 Dokumen	490,995,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				2 Dokumen	162,099,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				2 Dokumen	83,774,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				2 Dokumen	97,305,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 06 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				2 Dokumen	125,591,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH						1,214,000,000						2,263,815,400		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						244,709,900						310,118,500		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	DAERAH PROVINSI														
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29,407,900						31,535,700		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA				1 dokumen	7,964,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	7,964,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	4,133,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,552,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4,133,000							4,552,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD						3,993,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						4,398,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	3,575,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 dokumen	4,398,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAPKIN dan LKJIP				1 dokumen	5,609,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	5,671,100	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28,057,400							30,892,400	
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pelaksanaan Perangkat Daerah				100 persen	4,500,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	4,945,700	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Presentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan				100 persen	15,235,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		100 persen	16,781,100	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Akuntasnsi SKPD						Semua Kelurahan			(PD-3)				
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	4,160,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan KeuanganBulanan/Triwulan /Semester SKPD				3 dokumen	4,160,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,160,800							4,582,800	
4 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah				1 dokumen	4,160,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	4,582,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						126,498,400							180,719,800	
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100 persen	43,959,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	48,417,900	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan				100 persen	10,173,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	11,204,800	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Media Surat Kabar	9,720,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Media Surat Kabar	10,408,200	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Pelaksanaan Fasilitas Kunjungan Tamu				100 persen	10,745,500	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi		100 persen	11,835,300	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 persen	51,900,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	98,853,600	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56,585,400							62,387,800	
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Pelaksanaan Surat Menyurat Perangkat Daerah				100 persen	2,915,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 persen	3,211,000	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				13 jasa	15,870,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 jasa	12,671,900	Sekretariat Daerah
4 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor				1 Orang	37,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Orang	46,504,900	Sekretariat Daerah
4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	Persentase		Persentase	100 Persentase	969,290,100						100 Persentase	1,953,696,900	
4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBN siap analisis Persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan di Wilayah siap analisis	Persentase Persentase		Persentase Persentase	100 Persentase 100 Persentase	536,896,100						100 Persentase 100 Persentase	1,180,982,100	
4 01 08 1.01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBD siap				100 Persentase	172,939,500	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Reformasi birokrasi dan transformasi	0	100 Persentase	582,062,900	Sekretariat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
	Pembangunan APBD	analisis						Kecamatan, Semua Kelurahan		Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	pelayanan publik (PD-3)					
4 01 08 1.01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBN siap analisis				100 Persentase	83,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	300,559,900	Sekretariat Daerah	
4 01 08 1.01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan di Wilayah siap analisis				100 Persentase	280,456,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	298,359,300	Sekretariat Daerah	
4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan	Persentase Persentase		Persentase Persentase	100 Persentase 100 Persentase	432,394,000						100 Persentase 100 Persentase	772,714,800		
4 01 08 1.02 01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan				100 Persentase	93,832,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	393,169,800	Sekretariat Daerah	
4 01 08 1.02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase data laporan yang digunakan untuk rekomedasi				100 Persentase	249,798,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	181,549,600	Sekretariat Daerah	
4 01 08 1.02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan				100 Persentase	88,763,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	100 Persentase	197,995,400	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4 01	SEKRETARIAT DAERAH							1,217,000,000							4,535,591,576	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						217,000,000						0		
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,236,200						0		
4 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	6,329,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2,709,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2,722,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2,771,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	2,702,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja				2 Dokumen	2,999,600	Kota Mataram, Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kinerja SKPD	SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)						Pejanggik			(PD-3)				
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23,768,600						0		
4 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				5 orang	18,689,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	5 orang	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	1,878,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	3,201,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83,554,200						0		
4 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dokumen LKJIP, Renstra, Rencana Kerja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)				2 Dokumen	14,071,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daera				2 jenis	11,917,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 jenis	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daera				2 jenis	9,420,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 jenis	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2. Penyediaan Administrasi Umum				2 jenis	9,935,000	Kota Mataram,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	2 jenis	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Perangkat Daerah						Mataram, Pejanggik			pelayanan publik (PD-3)				
4 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2. Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 jenis	38,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 jenis	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89,441,000						0		
4 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1000 surat	19,441,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1000 surat	0	Sekretariat Daerah	
4 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0 bulan	70,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0 bulan	0	Sekretariat Daerah	
4 01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						1,000,000,000						4,535,591,576		
4 01 07 1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						391,527,400						3,405,754,198		
4 01 07 1.01 01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebijakan pengadaan barang dan jasa				2 Dokumen	101,240,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 Dokumen	182,991,054	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.01 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase penyelesaian tender sesuai pengajuan perangkat daerah				100 Persen	208,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 Persen	3,222,763,144	Sekretariat Daerah	
4 01 07 1.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase jumlah pemantauan dan evaluasi PBJ di Kabupaten Kota				100 persen	81,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 persen	0	Sekretariat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
4 01 07 1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan system informasi pengadaan barang/jasa	STANDAR		STANDAR	17 STANDAR	302,175,400					17 STANDAR	703,054,664		
4 01 07 1.02 01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah peralatan aplikasi layanan system pengadaan secara elektronik yang dapat berfungsi dengan baik				3 aplikasi	123,622,600	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	3 aplikasi	236,420,366	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peralatan aplikasi pengadaan barang dan jasa yang sesuai standar LPSE				2 aplikasi	110,161,100	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	2 aplikasi	236,420,366	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.02 03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase jumlah layanan informasi PBJ yang sesuai dengan standar LPSE				100 persen	68,391,700	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	system pelayanan secara elektronik	100 persen	230,213,932	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						306,297,200							426,782,713	
4 01 07 1.03 01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	4. Terlatihnya SDM Pengadaan Barang Dan Jasayang berkualitas				100 orang	101,777,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 orang	200,465,571	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03 02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5. Terbinanya Kelembagaan Pengadaan Barng dan Jasa di Kab/Kota				10 Kab/Kota	103,423,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Kab/Kota	171,570,783	Sekretariat Daerah
4 01 07 1.03 03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	6. Terlatihnya Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa				200 orang	101,096,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		200 orang	54,746,359	Sekretariat Daerah
TOTAL							552,408,412,344							215,484,747,779	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kinerja SKPD							Semua Kelurahan			(PD-3)				
4 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah				16 dokumen	79,123,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	16 dokumen	33,506,769	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	Jenis		Jenis	5 Jenis	11,901,466,165						5 Jenis	15,306,423,685	
4 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan				129 orang	11,488,543,565	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 orang	14,803,029,165	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang pengelola keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa				4 orang	206,544,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 orang	263,475,352	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi				7500 dokumen	176,659,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	7500 dokumen	209,793,547	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Dokumen Keuangan				1 dokumen	3,387,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	3,684,741	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan				3 dok	26,330,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Sekretariat DPRD Provinsi NTB	3 dok	26,440,880	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	19,825,000						7 Dokumen	24,556,271	
4 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan				5 Dok	1,625,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan	Sekretariat DPRD Provinsi	5 Dok	2,012,809	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	kebutuhan BMD						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			transformasi pelayanan publik (PD-3)	NTB			Daerah
4 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD				2 dokumen	6,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2 dokumen	7,586,742	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah jenis bahan penatausahaan BMD				2 jenis	12,075,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2 jenis	14,956,720	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian	Jenis		Jenis	4 Jenis	212,890,700						4 Jenis	363,180,545	
4 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik				129 orang	74,553,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 orang	74,511,593	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut				0 Item	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 Item	8,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaianya				129 Orang	29,437,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	129 Orang	36,523,877	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 Orang	8,400,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan				100 Orang	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi	100 Orang	30,967,533	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan		Pelayanan Publik	(PD-3)	NTB			
4 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek				20 Orang	83,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN dan Non ASN di Sekretariat DPRD Provinsi NTB	20 Orang	204,377,542	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum OPD	0		0	90	1,142,188,080						90	1,125,180,120	
4 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik yang disediakan				4 jenis	93,488,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 jenis	115,677,689	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan				1 jenis	202,427,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 jenis	104,005,873	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan				22 jenis	201,369,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	22 jenis	185,798,633	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan				7 jenis	65,205,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	7 jenis	80,517,815	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan				3 Jenis	206,477,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	3 Jenis	255,756,818	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang difasilitasi				2200 orang	199,494,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	2200 orang	124,321,001	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan			(PD-3)				
4 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				36 kali	34,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	36 kali	42,200,866	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis bahan arsip				3 Jenis	64,697,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	3 Jenis	124,064,476	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				14 orang	74,959,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	14 orang	92,836,950	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	0						2 Jenis	883,956,649	
4 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang tersedia				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	50,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang tersedia				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	355,230,534	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah pengadaan alat angkut darat tak bermotor				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	jumlah mebel yang tersedia				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	224,605,597	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
4 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesinyang diadakan				0 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 jenis	67,784,594	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain yang diadakan				0 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 jenis	86,335,924	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	4,257,093,200					3 Jenis	4,537,377,161		
4 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar				1500 surat	9,430,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1500 surat	11,298,357	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				4 jenis	737,863,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 jenis	813,333,419	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah orang jasa pelayanan umum				112 orang	3,509,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	112 orang	3,712,745,384	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	6 Jenis	1,434,236,000					6 Jenis	2,554,390,542		
4 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan jabatan				4 unit	167,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	4 unit	186,204,396	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Jabatan														
4 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional				66 unit	984,706,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	66 unit	1,331,050,351	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	jumlah jenis mebel				6 jenis	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	6 jenis	27,775,118	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin				10 jenis	221,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	10 jenis	389,184,964	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lain				1 jenis	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	1 jenis	13,887,559	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	311,611,547	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	0 unit	294,676,607	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	Jenis		Jenis	3 Jenis	45,368,409,588						3 Jenis	42,473,097,432	
4 02 01 1.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani				65 Orang	45,368,409,588	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	65 Orang	40,929,614,114	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 01 1.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD				0 stel	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	0 stel	1,219,106,418	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Midical check Up				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	0 Orang	324,376,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	Jenis		Jenis	3 Jenis	1,415,033,700					3 Jenis	1,190,233,424		
4 02 01 1.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi fraksi DPRD				180 kali	140,420,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	180 kali	73,333,305	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 kali	722,510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	48 kali	596,607,879	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 01 1.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	jumlah jenis kebutuhan rumah tangga DPRD				3 jenis	552,103,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 jenis	520,292,240	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%		%	100 %	15,771,113,100					100 %	54,816,750,719		
4 02 02 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan perda dan peraturan DPRD	0		0	9 0	914,323,300					9 0	3,945,967,791		
4 02 02 1.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Perda (Propemperda)				6 Raperda	344,610,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Raperda	413,404,098	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 02 1.01 02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas				12 Raperda	297,518,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	12 Raperda	425,573,045	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perda				0 kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	0 kali	2,719,612,834	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik				6 Naskah	251,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	6 Naskah	361,180,328	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib				1 dokumen	21,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Provinsi NTB dan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	26,197,485	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	0		0	4 0	469,006,300						4 0	835,575,696	
4 02 02 1.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS				14 kali	136,767,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	14 kali	184,462,647	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS				15 kali	103,134,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	15 kali	201,144,503	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat pembahasan APBD				14 kali	96,225,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	14 kali	184,386,160	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 02 1.02 04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat pembahasan perubahan APBD				10 kali	79,260,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	10 kali	132,791,193	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD				10 kali	53,618,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB	10 kali	132,791,193	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	0		0	5 0	519,814,800						5 0	460,054,931	
4 02 02 1.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				36 kali	95,820,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				36 Kali	93,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 Kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				36 Kali	89,135,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 Kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				36 kali	85,058,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Bidang Sumber Daya Alam				36 kali	82,724,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	36 kali	78,324,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
4 02 02 1.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 dok	73,667,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Komisi I, II, III, IV, V DPRD Provinsi NTB dengan Mitra OPD Provinsi NTB	1 dok	68,431,734	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	0		0	65 0	2,298,847,600						65 0	5,044,839,125	
4 02 02 1.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bintek				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	0 Orang	2,068,121,150	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi				36 kali	1,461,235,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	36 kali	1,388,094,366	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli				200 Orang	290,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	200 Orang	510,549,454	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 orang	436,101,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	9 orang	433,069,814	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi				480 Orang	62,448,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	480 Orang	74,916,096	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD				1 dokumen	48,482,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, Tenaga Ahli dan Masyarakat	1 dokumen	570,088,244	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	0		0	5 0	9,377,395,600						5 0	30,218,112,442	
4 02 02 1.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD				975 kali	2,000,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	975 kali	10,391,034,136	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan pokok-pokok pikiran DPRD				1 dokumen	130,149,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	1 dokumen	149,008,569	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses				3 kali	7,246,696,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB	3 kali	19,678,069,736	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	0		0	2 0	53,477,200						2 0	41,131,166	
4 02 02 1.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD				1 dok	28,848,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	1 dok	18,585,103	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan pengawasan Kode Etik DPRD				2 dok	24,628,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	2 dok	22,546,063	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	0		0	4 0	2,138,248,300						4 0	14,271,069,569	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 1.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah SPPD				975 kali	1,000,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	975 kali	12,320,557,920	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD				1 dokumen	11,530,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	1 dokumen	13,832,630	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 dokumen	100,909,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	12 dokumen	136,525,279	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 1.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Pimpinan Yang Difasilitasi				4 orang	1,025,258,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Anggota DPRD	4 orang	1,800,153,741	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL							81,866,702,663							123,634,034,875	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN				157 orang	2,610,898,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	157 orang	2,014,469,645	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jenis bahan				5 jenis	27,314,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 jenis	31,305,822	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen				4 dokumen	30,841,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 dokumen	49,569,945	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen				3 dokumen	46,182,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 dokumen	65,389,536	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah jenis bahan				4 jenis	36,408,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 jenis	56,669,720	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD	laporan		laporan	2 laporan	62,769,200						2 laporan	79,533,240	
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan BMD				2 laporan	62,769,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 laporan	79,533,240	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah data	Orang		Orang	95 Orang	201,310,100						95 Orang	173,552,499	
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah data pegawai				1 dokumen	78,352,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 dokumen	37,965,320	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah data				1 dokumen	23,939,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 dokumen	45,684,857	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				15 orang	76,020,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	15 orang	89,902,322	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				80 orang	22,998,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	80 orang	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan	unit		unit	65 unit	670,654,300						65 unit	763,388,327	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen				2 jenis	128,645,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 jenis	86,941,119	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				11 unit	39,089,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	11 unit	43,358,440	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelayanan				65 kali	296,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	65 kali	221,113,995	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis				2 jenis	87,211,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	2 jenis	276,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah jenis pengelolaan arsip				3 jenis	119,708,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 jenis	135,974,773	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan	unit		unit	10 unit	907,064,200						10 unit	844,499,491	
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				10 unit	473,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan				5 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	5 unit	233,651,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel				3 jenis	138,853,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3 jenis	171,920,718	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan				10 jenis	282,921,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 jenis	381,718,372	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset				1 aplikasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 aplikasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor				1 jenis	11,930,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 jenis	57,208,901	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat	eksemplar		eksemplar	3100 eksemplar	2,441,693,300						3100 eksemplar	2,915,138,244	
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat				3100 eksemplar	108,285,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	3100 eksemplar	121,777,705	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening				36 rekening	558,772,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	36 rekening	507,951,221	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara				102 unit	49,692,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	102 unit	64,258,496	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis pelayanan				4 jenis	1,724,943,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	4 jenis	2,221,150,822	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan	unit		unit	79 unit	1,472,510,000						79 unit	1,725,128,561	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan				79 unit	632,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	79 unit	860,177,642	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel				105 unit	52,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	105 unit	64,139,709	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan				10 jenis	162,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	10 jenis	131,550,544	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung				1 unit	624,640,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya layanan perencanaan, keuangan dan administrasi perkantoran	1 unit	669,260,666	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	100 %		0 %	100 %	3,881,781,660						100 %	5,430,842,600	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah Jumlah hasil analisis	dokumen dokumen		dokumen dokumen	14 dokumen 3 dokumen	2,075,417,500						14 dokumen 3 dokumen	3,334,137,950	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah hasil analisis				3 dokumen	155,282,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	3 dokumen	192,278,919	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen	Jumlah dokumen				2 laporan	236,075,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	1,554,255,757	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kebijakan Lainnya							Kelurahan							
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan				2 laporan	89,352,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	87,761,210	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah laporan				2 laporan	205,167,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 laporan	192,418,615	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah laporan				1 laporan	798,005,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 laporan	794,511,279	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan (provinsi)				4 dokumen	591,533,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	4 dokumen	512,912,171	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan	laporan		laporan	8 laporan	971,662,960						8 laporan	1,168,059,071	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan				4 laporan	491,941,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	4 laporan	552,195,611	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah laporan				3 laporan	287,452,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	3 laporan	267,905,793	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah laporan				1 laporan	192,268,660	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya dokumen perencanaan	1 laporan	347,957,667	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)	yang berkualitas			Pengembangan Daerah
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen				1 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 22 dokumen	834,701,200						2 dokumen 22 dokumen	928,645,579	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah dokumen				2 dokumen	214,230,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	2 dokumen	183,906,329	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan				1 laporan	77,608,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	1 laporan	102,623,535	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil monev				14 dokumen	353,045,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	14 dokumen	411,213,146	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi				5 dokumen	189,816,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya dokumen perencanaan yang berkualitas	5 dokumen	230,902,569	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %		0 %	100 %	9,394,620,254						100 %	14,224,639,322	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah hasil Koordinasi Jumlah hasil monev	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 2 dokumen	1,588,205,000					2 dokumen 2 dokumen	3,184,165,910		
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	71,656,280	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	283,020,516	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	23,878,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	77,202,292	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil monev				2 dokumen	47,981,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	177,801,339	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				1 dokumen	27,159,920	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen	90,902,512	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				4 dokumen	1,012,992,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	1,748,433,062	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	64,922,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	196,585,573	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah hasil monev				4 dokumen	115,497,700	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam	Reformasi birokrasi dan transformasi	Meningkatnya konsistensi program	4 dokumen	343,990,794	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							Kecamatan, Semua Kelurahan		Dan Transformasi Pelayanan Publik	pelayanan publik (PD-3)	perencanaan pembangunan daerah			Pengembangan Daerah
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	224,115,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	266,229,823	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah hasil koordinasi	dokumen		dokumen	5 dokumen	5,588,620,154						5 dokumen	7,511,084,832	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				5 dokumen	422,096,854	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	543,328,191	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	221,049,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	284,751,336	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah hasil monev				4 dokumen	371,197,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	422,179,240	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				3 dokumen	935,034,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	1,338,370,582	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	480,907,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya konsistensi program perencanaan	2 dokumen	561,671,435	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							Semua Kelurahan			(PD-3)	pembangunan daerah			
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	132,878,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	160,349,273	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah hasil monev				2 dokumen	869,722,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	1,282,794,186	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	2,155,732,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	2,917,640,590	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah hasil koordinasi 1	dokumen		dokumen	4 dokumen	2,217,795,100						4 dokumen	3,529,388,579	
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				4 dokumen	569,405,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	981,054,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil asistensi				4 dokumen	192,962,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	335,160,150	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah hasil monev				4 dokumen	275,829,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	467,988,092	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	399,538,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	365,918,237	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah hasil koordinasi				2 dokumen	230,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	525,727,926	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil asistensi				2 dokumen	126,044,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	262,575,270	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah hasil monev				4 dokumen	243,966,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	4 dokumen	275,456,192	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi				2 dokumen	179,676,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	315,508,012	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3,422,171,100						4,670,569,976	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE KAJIAN KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %		0 %	65,22 %	3,422,171,100						65,22 %	4,670,569,976	
5 05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kajian dan Ijin Penelitian	dokumen		dokumen	325 dokumen	596,050,400						325 dokumen	711,683,581	
5 05 02 1.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Jenis Data				2 jenis	324,620,200	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam	2 jenis	372,459,615	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)	pembangunan				
5 05 02 1.01 14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Kajian dan Ijin Penelitian				325 dokumen	271,430,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	325 dokumen	339,223,966	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil penelitian	kajian		kajian	17 kajian	899,889,500							17 kajian	1,505,364,697	
5 05 02 1.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Hasil Penelitian				5 kajian	442,768,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	5 kajian	1,141,563,615	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	121,768,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	121,826,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	112,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Hasil Penelitian				3 kajian	148,492,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	3 kajian	162,005,489	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	65,034,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	89,795,593	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian	kajian		kajian	9 kajian	491,335,800							9 kajian	880,642,142	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 05 02 1.03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Hasil Penelitian				2 kajian	130,310,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	2 kajian	224,488,983	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	73,669,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	158,798,503	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	76,622,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	153,935,302	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Hasil kajian				0 kajian	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	0 kajian	97,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	68,331,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	89,412,166	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	77,712,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	156,107,188	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.03 10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Hasil Penelitian				1 kajian	64,690,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1 kajian	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah peserta sosialisasi	orang		orang	850 orang	1,434,895,400						850 orang	1,572,879,556	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 05 02 1.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah peserta diseminasi				850 orang	914,638,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	850 orang	973,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5 05 02 1.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi				1500 orang	520,257,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan	1500 orang	599,879,556	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
TOTAL							38,104,500,921							49,867,897,485	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	02						890,185,026,656						866,166,801,485					
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	28,789,807,152			80 A	29,394,957,764		
5	02	01	1.01			Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersedia	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	141,923,800			12 Dokumen	540,583,893		
5	02	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja yang tersusun				2 Dokumen	23,351,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	82,386,379	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	18,187,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	82,386,379	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun				1 Dokumen	35,559,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	88,116,187	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	18,827,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	69,848,436	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	16,562,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 Dokumen	63,318,265	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun				2 Dokumen	13,813,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	2 Dokumen	83,183,146	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan realisasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun				3 Dokumen	15,621,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	3 Dokumen	71,345,101	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	24,388,316,077						6 Dokumen	20,133,005,445	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Tunjangan dan Gaji				157 Orang	24,169,622,477	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	157 Orang	19,258,191,954	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang dibutuhkan				12 Jenis	14,808,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Jenis	32,977,429	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				35 Orang	167,839,300	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	658,006,790	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun				4 Dokumen	20,725,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	79,456,277	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan / Semesteran yang tersusun				17 Dokumen	8,483,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	17 Dokumen	80,235,642	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi yang tersusun				4 Dokumen	6,838,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	24,137,353	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	29,554,500						1 Dokumen	196,342,040	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun				1 Dokumen	22,875,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	41,809,153	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	3,628,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	77,473,524	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang tersusun						Semua Kelurahan							
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun				2 Dokumen	3,051,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	77,059,363	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	390,350,000						3 Dokumen	526,081,877	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Kegiatan Sarana dan Prasarana Disiplin ASN yang dilaksanakan				4 Kegiatan	71,700,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Kegiatan	100,331,271	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal				23 Orang	64,950,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	23 Orang	76,567,590	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi				555 Orang	248,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	555 Orang	178,269,073	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				300 Orang	5,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	300 Orang	170,913,943	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan/ Badan dan Peralatan Kantor yang tersedia	jenis		jenis	8 jenis	885,282,975						8 jenis	4,782,841,105	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia				12 Jenis	19,416,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Jenis	35,506,479	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia				27 Paket/Jenis	36,187,375	Kota Mataram, Mataram,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	27 Paket/Jenis	35,506,479	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Pejanggik							
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan tersedia				1000 Dokumen	33,375,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1000 Dokumen	85,287,943	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia				5477 Eksmpler	31,860,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5477 Eksmpler	39,961,264	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu				240 Kali	278,600,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	240 Kali	675,306,424	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah				70 Kali	275,291,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Kali	532,048,463	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD				10000 Dokumen	104,943,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10000 Dokumen	340,184,467	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Upgrade Website				2 Kali	105,610,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kali	3,039,039,586	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD yang dilaksan	Unit		Unit	2 Unit	23,040,000						2 Unit	396,112,103	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan				1 Unit	680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	233,183,116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				10 Unit	22,360,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	162,928,987	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Jasa		Jasa	2 Jasa	2,417,079,800					2 Jasa	2,086,966,845		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				6500 Surat	67,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		0	6500 Surat	109,340,839	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				4 Rekening	476,815,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	4 Rekening	525,085,453	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Unit	134,836,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	8 Unit	208,600,279	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia				16 Orang	1,738,428,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	16 Orang	1,243,940,274	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	jenis		jenis	4 jenis	514,260,000					4 jenis	733,024,456		
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				21 Unit	231,010,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	21 Unit	331,328,845	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara				1 Unit	77,910,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	101,127,225	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				70 Mebel	27,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	70 Mebel	23,202,300	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara				75 Unit	50,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	75 Unit	11,775,167	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara				0 M2	0					0	0 M2	87,600,284	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor lainnya yang Terpelihara				155 M2/Unit	72,160,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	155 M2/Unit	118,865,383	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasaran Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara				4 Unit	56,180,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	59,125,252	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %		0 %	100 %	860,636,307,104						100 %	835,559,023,954	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah tersusun	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	1,703,836,100						8 Dokumen	13,781,779,432	
5 02 02 1.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun				1 Dokumen	39,107,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	10,358,202,829	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang tersusun				1 Dokumen	64,704,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	108,390,281	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang diverifikasi				136 Dokumen	26,305,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	136 Dokumen	111,695,293	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 1.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi				136 OPD	40,332,900	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	136 OPD	1,084,814,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun dan terverifikasi				268 Dokumen	20,429,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	268 Dokumen	67,571,827	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun dan terverifikasi				136 Dokumen	17,362,800	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	136 Dokumen	37,084,236	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Penjabaran APBD				2 Dokumen	363,637,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	2 Dokumen	1,084,814,840	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Perubahan Penjabaran APBD tersusun				2 Dokumen	241,525,000	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Pajak Rokok			NTB WTP	2 Dokumen	346,406,048	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun				1 Regulasi	724,236,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Regulasi	103,855,815	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Dokumen Anggaran Pendapatan				0 Dokumen/ Kali	0					NTB WTP	0 Dokumen/ Kali	34,470,497	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Dokumen Anggaran Belanja Daerah				0 Dokumen/ Kali	0					NTB WTP	0 Dokumen/ Kali	87,184,419	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Dokumen Anggaran Pembiayaan				0 Dokumen/ Kali	0					NTB WTP	0 Dokumen/ Kali	26,173,471	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.01 13	Pembinaan Perencanaan Penggangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penggangan Daerah Pemerintah Provinsi				4 Kegiatan	166,196,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	4 Kegiatan	331,115,036	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RaPERDA APBD/ APBDP Kab/Kota dan Raperda Pertanggungjawaban APBD/APBD Kab/Kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	425,036,500					12 Dokumen	1,218,120,755		
5 02 02 1.02 02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota				10 Dokumen	85,178,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	10 Dokumen	129,954,691	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota				10 Dokumen	53,988,100	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	10 Dokumen	221,651,109	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen keputusan gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota				10 Dokumen	107,151,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	10 Dokumen	223,956,257	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina				10 Kab/Kota	40,394,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	10 Kab/Kota	68,642,264	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana				1 Kali	45,402,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	1 Kali	216,298,222	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 1.02 11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kab/Kota				0 kali	0				0	0 kali	36,512,648	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.02 12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	92,922,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	2 Dokumen	321,105,564	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersusun tepat Waktu	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	473,217,640					6 Dokumen	1,075,227,881		
5 02 02 1.04 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	0 Dokumen	122,747,476	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen BA rekonsiliasi				1 Dokumen	90,169,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		NTB WTP	1 Dokumen	160,608,873	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, Semesteran yang tersusun				17 Dokumen	8,982,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	17 Dokumen	160,608,873	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan				136 Dokumen	175,205,400	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	136 Dokumen	228,996,841	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang				2 Dokumen	115,375,800	Kota Mataram, Mataram,	Pajak Rokok		NTB WTP	2 Dokumen	229,426,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun						Pejanggik							
5 02 02 1.04 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun				0 Dokumen	0				NTB WTP	0 Dokumen	26,936,363	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun				1 Dokumen	25,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	1 Dokumen	43,174,144	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	23,970,240	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		NTB WTP	1 Dokumen	27,826,983	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				20 Orang	34,514,400	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		NTB WTP	20 Orang	39,929,186	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.04 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan BLUD Provinsi				0 Orang	0				NTB WTP	0 Orang	34,972,827	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah Jumlah Dokumen Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Ke	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	857,879,231,964					1 Dokumen	819,194,611,640		
5 02 02 1.05 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok Utang Pinjaman Daerah				100 %	53,334,762,864	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 %	63,900,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 02 1.05 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan				35 Kali	858,087,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan			0	35 Kali	41,542,269	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Kegiatan Darurat yang dilaksanakan				50 Kali	4,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	50 Kali	11,601,150,045	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.05 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Persentase Pencairan Dana Bagi Hasil				90 Persen	799,686,381,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	90 Persen	807,488,019,326	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	154,984,900						1 Dokumen	289,284,246	
5 02 02 1.06 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Tersedia Data Analisis Bidang Keuangan Daerah Provinsi				1 Dokumen	40,972,900	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	66,658,468	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Tingkat terpeliharaan SIPD bidang Keuangan Daerah				85 Persen	74,834,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	85 Persen	132,202,762	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.06 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah OPD yang terbina				136 OPD	39,178,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	136 OPD	90,423,016	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	75 %		0 %	70 %	758,912,400						70 %	1,212,819,766	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	758,912,400						7 Dokumen	1,212,819,766	
5 02 03 1.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standart Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang yang Tersusun				1 Dokumen	28,370,900	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	38,161,983	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah standar Kebutuhan Barang Milik Daeah dan Standart Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	15,988,800	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	2 Dokumen	38,161,983	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Milik Daerah yang tersusun				1 Dokumen	55,712,600	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	125,034,875	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun				3 Dokumen	8,375,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	3 Dokumen	27,913,527	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Terdigitalisasinya Dokumen Barang Milik Daerah				70 Persen	382,285,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	70 Persen	566,211,530	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarasi yang dilaksanakan				12 Kali	65,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	12 Kali	62,102,116	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah				5 Dokumen	16,249,000	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	5 Dokumen	56,549,806	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset				1 Dokumen	31,035,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	58,742	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD Jumlah Sk penghapusan BMD				12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	52,786,500	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	74,757,811	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi				132 Dokumen	76,923,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			NTB WTP	132 Dokumen	113,375,720	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				48 Dokumen	19,075,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Bantuan Keuangan			NTB WTP	48 Dokumen	85,923,918	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota				10 Dokumen	6,120,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	10 Dokumen	24,567,755	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						474,072,148						1,166,984,604		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	279,970,148						80 A	381,240,104	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	45,430,800						6 Dokumen	75,585,602	
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	5,523,300	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	17,084,898	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	12,965,600	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	15,197,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	15,246,500	Kota Mataram, Mataram,	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	18,038,628	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Pejanggik							
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun				1 Dokumen	7,681,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	15,601,043	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun				1 Dokumen	4,014,200	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	9,663,990	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	75,311,800						0 Dokumen	76,878,382	
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				1 orang	67,940,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 orang	6,887,600	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun				1 Dokumen	3,286,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	18,986,094	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran/SKPD				17 Dokumen	2,785,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	17 Dokumen	46,161,556	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi yang tersusun				2 Dokumen	1,300,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	2 Dokumen	4,843,132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	21,265,653	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD yang tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	5,348,826	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0		Pajak Rokok			0	0 Dokumen	6,970,020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		yang tersusun													
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik			0	0 Dokumen	8,946,807	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan diterbitkan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	0					6 Dokumen	21,378,599		
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Orang	21,378,599	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan, Barang yang tersedia	Jenis		Jenis	4 Jenis	69,654,000					4 Jenis	72,376,094		
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia				2000 Dokumen	6,444,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		0	2000 Dokumen	9,463,058	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia				25 Exsampler	15,660,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	25 Exsampler	18,167,401	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu				100 kali	9,000,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		0	100 kali	10,464,237	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah				25 Kali	38,550,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok		0	25 Kali	34,281,398	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yang tersedia	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0					0 Dokumen	12,181,208		
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				0 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Pajak Rokok		0	0 Unit	12,181,208	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang tersedia	Jasa		Jasa	2 Jasa	67,920,000						2 Jasa	78,795,012	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia				450 Surat	6,720,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	450 Surat	7,795,973	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia				1 Rekening	61,200,000	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	1 Rekening	70,999,039	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Saranan dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor yang tersusun	Unit		Unit	5 Unit	21,653,548						5 Unit	22,779,554	
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasaran Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara				5 Unit	21,653,548	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Pajak Rokok			0	5 Unit	22,779,554	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	75 %		0 %	70 %	194,102,000						70 %	785,744,500	
5 02 03 1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tanah dan bangunan yang terlegalkan	Bidang		Bidang	25 Bidang	194,102,000						25 Bidang	785,744,500	
5 02 03 1.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset yang disertifikatkan Jumlah Papan Naa Aset yang terpasang Jumlah Penanganan Sengketa Aset Daerah				65 Persil 60 Papan Nama 5 Sengketa	121,753,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Pajak Rokok			NTB WTP	65 Persil 60 Papan Nama 5 Sengketa	432,134,022	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 1.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan secara Optimal Jumlah BMD yang digunakan secara optimal				474 Obyek 80 Obyek	72,349,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	474 Obyek 80 Obyek	353,610,478	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02	KEUANGAN					502,158,500							2,237,705,125		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A		A	80 A	12,300,000					80 A	1,425,043,959		
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penggangan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0					0 Dokumen	18,385,145		
5 02 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	6,755,456	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	7,099,904	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	898,857	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	875,887	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		0	0 Dokumen	2,755,041	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	0					17 Dokumen	62,394,930		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				12 Orang	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	12 Orang	49,699,791	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	1 Dokumen	794,679	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/ Semesteran / Bulanan yang tersusun				17 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	17 Dokumen	11,900,460	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0						0 Dokumen	20,820,120	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 Dokumen	6,512,886	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang Tersusun				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 Dokumen	11,791,409	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD yang tersusun dan diterbitkan				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	2,515,825	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admintrasi Kepegawaian yang tersusun dan di terbitkan	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0						0 Dokumen	1,179,140,891	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang ikut Diklat Formal				0 Orang	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 Orang	1,179,140,891	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan, Barang dan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis		Jenis	2 Jenis	12,300,000						2 Jenis	107,932,224	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Pelatan dan Perlengkapan Kantor				0 Jenis	0		Pajak Rokok			0	0 Jenis	5,184,534	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang tersedia				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 Dokumen	21,920,953	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tersedia				0 exemplar	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 exemplar	1,461,745	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu				24 kali	12,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	24 kali	14,629,415	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah dan Dalam Daerah				0 kali	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			0	0 kali	64,735,577	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin yang tersedia	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0						0 Dokumen	19,833,210	
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang tersedia				0 paket	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 paket	19,833,210	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa		Jasa	2 Jasa	0						2 Jasa	11,734,563	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang Tersedia				0 surat	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 surat	2,975,695	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 jasa	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 jasa	8,758,868	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara	Unit		Unit	1 Unit	0						1 Unit	4,802,876	
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor yang terpelihara				0 paket	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 paket	4,802,876	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %		0 %	100 %	489,858,500						100 %	812,661,166	
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	489,858,500						10 Dokumen	812,661,166	
5 02 02 1.03 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2D yang diterbitkan				1000 Dokumen	295,506,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1000 Dokumen	513,816,908	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Dokumen SILPA yang diterbitkan				1 Dokumen	556,200	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	636,639	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
5 02 02 1.03 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh OPD diterbitkan				136 Dokumen	25,504,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	136 Dokumen	31,995,392	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang Tersusun				3 Dokumen	93,903,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	3 Dokumen	217,372,721	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah SP2D yang diterbitkan				1000 Dokumen	2,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1000 Dokumen	2,320,230	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan OTH Perhitungan Pihak Ketiga yang Tersusun				3 Dokumen	41,808,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	3 Dokumen	22,576,586	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas				1 Dokumen	17,041,100	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	17,626,323	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang di rekon				136 Dokumen	5,159,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua	Pajak Rokok			NTB WTP	136 Dokumen	4,209,119	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Terkait							Kelurahan							
5 02 02 1.03 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sub kegiatan				1 Dokumen	765,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	1 Dokumen	390,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 1.03 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Pembinaan Penatausahaan Kab/Kota				5 Dokumen	7,615,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok			NTB WTP	5 Dokumen	1,716,933	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
TOTAL							891,161,257,304							869,571,491,214	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dievaluasi				2 Dokumen	92,555,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	2 Dokumen	163,004,585	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	77,505,443,671						16 Dokumen	89,452,998,396	
5 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				370 orang	77,299,873,671	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	370 orang	89,024,728,599	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Tugas ASN				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	0 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				2950 Dokumen	92,135,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2950 Dokumen	118,746,329	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB		0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun				2 Dokumen	40,580,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2 Dokumen	79,456,090	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti				2 Dokumen	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	2 Dokumen	70,448,493	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				18 Dokumen	5,260,000	Kota Mataram,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan		Kantor Induk dan UPTB UPPD	18 Dokumen	40,995,075	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan /Semesteran/SKPD						Sekarbela, Kekalik Jaya		Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Bappenda Prov. NTB			
5 02 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi				12 Dokumen	65,855,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda Prov. NTB	12 Dokumen	118,623,810	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	12,062,400						2 Dokumen	21,268,497	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				22 Dokumen	3,010,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	22 Dokumen	8,031,217	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				33 Dokumen	5,910,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	33 Dokumen	9,406,227	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	3,142,400	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Barang Milik Daerah di Bappenda	1 Dokumen	3,831,053	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	161,670,000						1 Dokumen	734,317,675	
5 02 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Hasil Rakor Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah				1 Dokumen 47.22 Milyar Rupiah	67,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD Pengelola Retribusi	1 Dokumen 47.22 Milyar Rupiah	408,685,606	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Paket pengembangan Aplikasi Pendapatan Retribusi				2 Paket	52,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	2 Paket	210,548,440	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah yang di Data dan di Proses				0 Obyek	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Obyek	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah				0 Dokumen	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah yang di tetapkan				0 paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Retribusi	0 paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Rekapitulasi dan Hasil Evaluasi Pengelolaan Retribusi Daerah dan PLL Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Retribusi dan Pendapatan Lain-lain				2 Dokumen 4 Dokumen	41,600,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		OPD Pengelola Retribusi	2 Dokumen 4 Dokumen	115,083,629	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	184,078,000						1 Dokumen	403,953,125	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				48 Kali	76,960,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	48 Kali	67,219,049	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0 Stel	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Stel	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan		dan Berkeadilan					
5 02 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	33,004,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	1 Dokumen	114,311,226	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	53,004,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	12 Dokumen	109,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Pensiun				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Orang	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				0 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN Bappenda Provinsi NTB	0 Orang	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB		0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional				15 Orang	21,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	15 Orang	55,610,806	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisai peraturan perundang-undangan terkait				1 kali	0	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk		ASN Bappenda Provinsi NTB	1 kali	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pendapatan Daerah						Kecamatan, Semua Kelurahan		Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
5 02 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Peserta Bimtek				50 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Bappenda Provinsi NTB	50 Orang	57,812,044	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	persen		persen	95 persen	1,854,456,365						95 persen	3,603,757,483	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan				16 Jenis	18,680,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	16 Jenis	26,334,397	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga				2 Jenis	4,350,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	2 Jenis	5,103,853	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor				106 Jenis	181,037,665	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	106 Jenis	346,074,868	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				18 Jenis	999,179,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	18 Jenis	1,449,291,315	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				3 Jenis	15,120,000	Kota Mataram, Sekarbela,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	3 Jenis	28,965,117	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kekalik Jaya		Yang Berkualitas dan Berkeadilan					
5 02 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				0 Paket	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi				1366 Orang/Tahun	204,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1366 Orang/Tahun	244,150,419	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				144 Kali	194,526,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	144 Kali	383,094,203	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip				44 Dokumen	22,933,700	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	44 Dokumen	37,525,586	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kunjungan website resmi Bappenda				65000 kunjungan	213,675,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	65000 kunjungan	1,083,217,725	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah di Kantor IndukBappenda	paket		paket	2 paket	366,555,000						2 paket	7,480,769,413	
5 02 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas				0 unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional				1 Unit	270,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Unit	270,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 buah/set	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 buah/set	69,957,085	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya				1 Unit	71,500,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Unit	748,303,278	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud				1 Paket	25,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	1 Paket	119,324,078	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya				0 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 unit	6,098,184,972	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				3 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	3 Paket	175,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				0 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kantor Induk dan UPTB UPPD Bappenda se NTB	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang	Jenis		Jenis	3 Jenis	3,900,850,000						3 Jenis	3,166,078,268	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				11000 Surat	46,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	11000 Surat	89,339,077	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				20 Jenis	1,587,100,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	20 Jenis	1,603,180,434	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	0 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah tenaga administrasi Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor Jumlah tenaga Sopir				14 Orang 36 Orang 3 orang 9 Orang 6 Orang 3 Orang	2,267,000,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Kantor Induk, UPTB UPPD Bappenda, OPD dan Stakeholder terkait	14 Orang 36 Orang 3 orang 9 Orang 6 Orang 3 Orang	1,473,558,757	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang di Pelihara	Jenis		Jenis	6 Jenis	556,578,800						6 Jenis	979,762,197	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pelihara dan dibayar PKBnya				1 Unit	25,165,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	1 Unit	27,927,478	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara dan dibayar PKBnya				35 Unit	275,305,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	35 Unit	365,576,410	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				33 buah/set	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	33 buah/set	25,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin				270 unit	131,143,800	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	270 unit	199,459,572	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah paket aset tetap lainnya				0 Paket	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud				2 Paket/Tahun	50,055,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	2 Paket/Tahun	139,656,259	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara atau direhab				556 meter persegi	59,910,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	556 meter persegi	222,142,478	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				0 Paket	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 Paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi				0 paket	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 paket	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang di Pemeliharaan/Rehabilitasi				0 meter persegi	0	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Barang Milik Daerah yang ada di Kantor Induk Bappenda	0 meter persegi	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	38,44 %		0 %	36,78 %	490,617,800						36,78 %	595,429,201	
5 02 02 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	65,770,000						2 Dokumen	181,594,241	
5 02 02 1.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)				2 Dokumen	65,770,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	OPD Pengelola Pendapatan Daerah	2 Dokumen	181,594,241	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	424,847,800						4 Dokumen	413,834,960	
5 02 02 1.03 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya				3394.62 Milyar Rupiah 70.18 Milyar Rupiah	424,847,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CHT	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Kabupaten/Kota	3394.62 Milyar Rupiah 70.18 Milyar Rupiah	413,834,960	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	1,691,685,660						52,03 %	6,556,383,054	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rupiah		Milyar Rupiah	1650.24 Milyar Rupiah	1,691,685,660						1650.24 Milyar Rupiah	6,556,383,054	
5 02 04 1.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah target pajak daerah yang ditetapkan Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Target Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Target Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Target Penerimaan Pajak Rokok				1661.92 Milyar Rupiah 396.89 Milyar Rupiah 1.69 Milyar Rupiah 338.32 Milyar Rupiah 525.84 Milyar Rupiah 399.18 Milyar Rupiah	376,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan		1661.92 Milyar Rupiah 396.89 Milyar Rupiah 1.69 Milyar Rupiah 338.32 Milyar Rupiah 525.84 Milyar Rupiah 399.18 Milyar Rupiah	729,277,302	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Kajian PajakPajak Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) pelayanan pajak daerah Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disusun Jumlah fasilitasi Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya Jumlah Rekomendasi kesamsatan				5 Dokumen 4 MoU 1 Dokumen 11 Regulasi 2 Rekomendasi	487,734,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan		5 Dokumen 4 MoU 1 Dokumen 11 Regulasi 2 Rekomendasi	2,243,724,929	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak				2 kali	43,465,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan		2 kali	319,837,049	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak	Jumlah paket perangkat keras sistem				10 Unit/buah	205,654,560	Semua Kab/Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait		10 Unit/buah	1,055,187,371	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang diadakan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				dengan Pengelolaan Pendapatan			
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen data potensi pajak (PBBKB, PAP dan Pajak Rokok) Jumlah Obyek Pajak Daerah Potensial Jumlah Potensi Aktif Daftar Ulang Jumlah Subyek PAP yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan Jumlah WP Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU)				1766130 Obyek 3 Dokumen	56,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	1766130 Obyek 3 Dokumen	339,180,421	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan Jumlah Record yang diolah dan disimpan dalam Database Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola				4 paket 5 Paket 1760000 Obyek 5 Paket	70,055,000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	4 paket 5 Paket 1760000 Obyek 5 Paket	278,993,560	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor Jumlah Subyek pajak Yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Air Permukaan				142.25 obyek 5 Subyek	1,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	142.25 obyek 5 Subyek	1,609,173	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang Diedukasi				14300 Orang	91,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan	14300 Orang	179,494,949	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				10 Dokumen	21,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan	10 Dokumen	185,776,274	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Surat tagihan Pajak daerah (PAP); Surat Ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) PBBKB				35 Obyek	30,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan	35 Obyek	50,556,671	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Sinkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Dok) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen 1 kasus	22,955,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan	4 Dokumen 1 kasus	162,710,718	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL Jumlah Sentra Layanan Kesamsatan yang Nilai persepsinya sangat baik Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				30739 Obyek 4 Dokumen 6 Samsat 6 Dokumen 2250 lembar	56,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaam Pendapatan	30739 Obyek 4 Dokumen 6 Samsat 6 Dokumen 2250 lembar	537,596,917	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Menurunnya Jumlah Notice Pajak Yang dibatalkan/kesalahan													
5 02 04 1.01 13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen Data Potensi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Jumlah Penerimaan dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah				2 Dokumen 62.38 Milyar Rupiah 370.31 Milyar Rupiah 57.42 Milyar Rupiah	228,262,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak dan stakeholder yang terkait dengan Pengelolaan Pendapatan	2 Dokumen 62.38 Milyar Rupiah 370.31 Milyar Rupiah 57.42 Milyar Rupiah	472,437,720	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,672,103,500						3,972,953,979		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,946,952,500						83.28 Nilai	2,361,017,936	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	36,286,800						1 Dokumen	48,286,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				600 Dokumen	36,286,800	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		UPPD Mataram dan Pihak Terkait	600 Dokumen	48,286,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	7,735,900						4 Dokumen	14,647,583	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2,117,900	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,772,994	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	5,618,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Mataram dan Pihak Terkait	2 Dokumen	11,874,589	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/non dokumen hasil penataan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	13,354,000						12 Dokumen	29,522,225	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				216 Kali	13,354,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Staf UPPD Mataram	216 Kali	29,522,225	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						336,003,300							492,224,557	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				15 Jenis	13,912,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		15 Jenis	20,569,673	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 Jenis	32,273,600	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				59 Jenis	135,985,200	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		59 Jenis	195,833,273	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				3 Jenis	10,982,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	17,659,178	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu yang difasilitasi				1000 Orang/Kali	58,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Orang/Kali	111,117,295	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	77,650,000	Kota Mataram, Selaprang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		12 Kali	139,054,761	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Dasan Agung			(PD-3)				
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				0 Unit	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,293,222,500						1,361,732,427		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	4,220,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	5,548,873	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	449,002,500	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Jenis	455,559,712	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				28 Orang	840,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		28 Orang	900,623,842	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						260,350,000						414,605,144		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				16 Unit	188,670,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Unit	169,429,293	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				28 Unit	27,080,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		28 Unit	57,586,206	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	44,600,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Unit	187,589,645	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	725,151,000						52,03 %	1,611,936,043	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	725,151,000						6 Dokumen	1,611,936,043	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	14,400,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	138,000,476	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				82500 Obyek	155,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	82500 Obyek	122,363,085	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang ditetapkan				245600 Obyek	123,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	245600 Obyek	264,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	17,000,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	55,843,860	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang tidak lanjuti				200 Surat	53,350,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	478,723,483	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2500 Obyek	517,246,000	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2500 Obyek	553,005,139	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,075,177,700						3,133,737,118		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,632,207,700						83.28 Nilai	2,095,413,549	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	39,247,000						1 Dokumen	44,757,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				600 Dokumen	39,247,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan Pihak Terkait	600 Dokumen	44,757,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,598,600						4 Dokumen	7,404,971	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,887,400	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,766,002	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,711,200	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Praya dan Pihak Terkait	2 Dokumen	4,638,969	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen/non dokumen hasil penataan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	9,055,000						12 Dokumen	23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	9,055,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Pimpinan dan Staff UPPD Praya	24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						323,758,100							563,400,176	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9 Jenis	13,064,700	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		9 Jenis	20,549,697	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40 Unit	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		40 Unit	151,614,414	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				38 Jenis	130,775,900	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		38 Jenis	154,923,096	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				6 Jenis	9,717,500	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Jenis	16,646,398	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	83,746,923	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	119,500,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	127,929,271	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)			0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,024,379,000							1,137,318,130	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	3,788,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	8,332,188	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	240,591,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Jenis	263,056,540	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				26 Orang	780,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		26 Orang	865,929,402	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232,170,000							318,562,140	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				22 Unit	168,960,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		22 Unit	207,483,465	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				41 Unit	32,460,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		41 Unit	55,821,664	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	30,750,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	55,257,011	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	442,970,000						52,03 %	1,038,323,569	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	442,970,000						6 Dokumen	1,038,323,569	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	11,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	103,852,710	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				37456 Obyek	155,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37456 Obyek	106,947,650	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang ditetapkan				206500 Obyek	96,000,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	206500 Obyek	177,397,808	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,855,888	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	46,415,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	349,576,235	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2150 Obyek	275,600,000	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2150 Obyek	254,693,278	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,499,209,260					3,706,420,657			
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,976,299,260						83.28 Nilai	2,299,446,269	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	42,950,000					1 Dokumen	38,020,879		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				525 Dokumen	42,950,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	525 Dokumen	38,020,879	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,665,500					4 Dokumen	6,676,959		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,914,800	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,746,803	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,750,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,930,156	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	10,800,000					4 Dokumen	22,278,726		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Selong	24 Kali	22,278,726	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						334,386,200						450,537,870		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				8 Jenis	13,584,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		8 Jenis	20,218,429	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				26 Jenis	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		26 Jenis	19,032,635	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				83 Jenis	129,842,700	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		83 Jenis	149,819,686	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				9 Jenis	10,109,500	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		(PD-3)				Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 Jenis	7,990,377		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	750 Orang/Kali	83,677,007		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	130,150,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12 Kali	149,014,989		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0						0		
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0 Buah	0		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0 Unit	0		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,329,597,560						1,500,398,657		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan				1000 Surat	6,500,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1000 Surat	8,506,423		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	273,097,560	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	4 Jenis	326,323,682		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				35 Orang	1,050,000,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		35 Orang	1,165,568,552	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						254,900,000							281,533,178	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				21 Unit	193,530,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		21 Unit	214,774,685	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				15 Unit	30,770,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		15 Unit	28,399,133	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	30,600,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	38,359,360	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	522,910,000						52,03 %	1,406,974,388	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	522,910,000						6 Dokumen	1,406,974,388	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	13,050,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	123,014,079	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				35500 Obyek	155,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	35500 Obyek	145,087,385	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				326000 Obyek	145,000,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	326000 Obyek	249,580,214	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	43,891,587	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	45,305,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	433,601,489	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang Terjaring				2965 Obyek	305,600,000	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2965 Obyek	411,799,634	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						2,170,526,540						3,143,349,756		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,734,762,540						83.28 Nilai	2,247,641,216	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	38,157,800						1 Dokumen	37,415,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				585 Dokumen	38,157,800	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	585 Dokumen	37,415,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Persen		Persen	4 Persen	3,260,500						4 Persen	5,503,595	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,758,900	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,779,098	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,501,600	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Sumbawa dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,724,497	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000						23,971,132		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						357,509,240						531,582,327		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	12,401,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Jenis	25,571,427	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 Unit	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Unit	34,403,014	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				62 Jenis	127,528,740	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		62 Jenis	161,540,738	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				8 Jenis	9,219,500	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		8 Jenis	23,925,631	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Jenis	6,660,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	43,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	94,955,092	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	158,700,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	183,196,048	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,121,400,000							1,282,759,422	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	5,720,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	9,522,199	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	245,680,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Jenis	307,428,104	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum				29 Orang	870,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi		29 Orang	965,809,119	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kantor lainnya						Badas, Labuhan Badas			elayanan publik (PD-3)				
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203,635,000						366,409,740		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				14 Unit	152,670,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		14 Unit	169,429,293	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				36 Unit	29,690,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		36 Unit	86,007,534	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	21,275,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	110,972,913	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	435,764,000						52,03 %	895,708,540	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	435,764,000						6 Dokumen	895,708,540	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10,950,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	118,124,412	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				27514 Obyek	157,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	27514 Obyek	114,347,183	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				145600 Obyek	91,000,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	145600 Obyek	147,601,913	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	53,286,162	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	14,257,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	166,038,932	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				1450 Obyek	305,600,000	Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1450 Obyek	296,309,938	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,707,303,050						2,348,098,299		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,337,008,550						83.28 Nilai	1,680,144,369	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	30,640,000						1 Dokumen	37,144,000	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				575 Dokumen	30,640,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Raba Bima dan Pihak Terkait	575 Dokumen	37,144,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,265,000						4 Dokumen	6,982,258	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,530,000	Kota Bima, Mpunda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPPD Raba Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	2,771,107	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	183,700,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	223,177,898	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Unit	0	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				50 Unit	0	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		50 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						758,225,000							850,171,712	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	7,850,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	11,459,533	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Jenis	120,375,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	172,542,211	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				21 Orang	630,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		21 Orang	666,169,968	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat yang diadministrasikan	surat		surat	12500 surat	164,500,000						12500 surat	217,787,723	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan				10 Unit	109,050,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit	121,020,924	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lapangan														
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				36 Unit	27,700,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	36 Unit	41,083,857	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	27,750,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	0	1 Unit	55,682,942	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	370,294,500					52,03 %	667,953,930		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	370,294,500					6 Dokumen	667,953,930		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	10,100,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	81,790,390	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				23450 Obyek	155,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	23450 Obyek	79,753,954	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				130172 Obyek	64,000,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	130172 Obyek	129,843,632	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,101,241	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	6,639,500	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	91,753,392	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2484 Obyek	275,600,000	Kota Bima, Mpunda, Lewirato	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2484 Obyek	239,711,321	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN					2,296,646,400					3,399,817,127				
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,839,751,900					83.28 Nilai	2,239,228,689		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	39,055,000					1 Dokumen	39,186,000		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				678 Dokumen	39,055,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan Pihak Terkait	678 Dokumen	39,186,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,400,800					4 Dokumen	7,693,401		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,849,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,513,546	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,551,800	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Gerung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	4,179,855	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000						19,975,943		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	19,975,943	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						343,779,100						392,573,899		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	12,700,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	19,620,816	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2 Unit	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				22 Jenis	129,599,100	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		22 Jenis	150,704,066	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				3 Jenis	16,130,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	17,340,229	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				1000 Orang/Kali	58,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Orang/Kali	84,964,346	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	120,150,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	111,954,065	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							137,816,852	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				0 Unit	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	137,816,852	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,220,647,000							1,351,815,370	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	4,080,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	7,907,144	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	226,567,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Jenis	245,231,340	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				33 Orang	990,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		33 Orang	1,098,676,886	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222,070,000							290,167,224	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				22 Unit	154,770,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		22 Unit	171,759,820	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				40 Unit	30,300,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		40 Unit	61,947,620	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	37,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	56,459,784	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	456,894,500					52,03 %	1,160,588,438		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	456,894,500					6 Dokumen	1,160,588,438		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak				10 Kali	12,775,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	117,680,502	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				24850 Obyek	155,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	24850 Obyek	142,689,273	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				245850 Obyek	87,000,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	245850 Obyek	185,875,043	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	65,335,762	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	37,564,500	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	333,309,713	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2350 Obyek	305,600,000	Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2350 Obyek	315,698,145	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,402,134,400						2,225,823,426		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,093,484,400						83.28 Nilai	1,515,590,189	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	38,120,000					1 Dokumen	36,578,000		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang di Verifikasi				540 Dokumen	38,120,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	540 Dokumen	36,578,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,972,400					4 Dokumen	6,647,550		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,581,400	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,691,203	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,391,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Taliwang dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,956,347	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000						23,971,132		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						296,747,000						508,613,820		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	9,730,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Jenis	20,243,399	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23 Unit	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		23 Unit	60,031,039	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Bertong							
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				17 Jenis	98,727,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		17 Jenis	123,547,548	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	8,090,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	16,534,532	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	82,966,752	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	129,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	197,300,173	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							48,789,577	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				16 Buah	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Buah	48,789,577	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Bertong							
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						543,825,000						599,139,580		
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan				1000 Surat	4,500,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	8,323,310	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3 Jenis	179,325,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 Jenis	190,687,026	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				12 Orang	360,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Orang	400,129,244	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201,020,000						291,850,530		
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				17 Unit	149,910,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		17 Unit	126,414,428	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				18 Unit	14,110,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		18 Unit	48,286,294	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	37,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	117,149,808	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	308,650,000					52,03 %	710,233,237		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	308,650,000					6 Dokumen	710,233,237		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	9,400,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	110,167,328	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				23450 Obyek	155,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	23450 Obyek	139,467,820	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124000 Obyek	64,000,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124000 Obyek	132,063,181	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	45,855,888	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	5,695,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	94,572,220	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Kendaraan yang Terjaring				1830 Obyek	215,600,000	Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	1830 Obyek	188,106,800	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,517,458,100						2,282,106,376		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,273,876,100					83.28 Nilai	1,486,070,469		
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	38,230,000					1 Dokumen	33,524,849		
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				678 Dokumen	38,230,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak terkait	678 Dokumen	33,524,849	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,869,700					4 Dokumen	6,031,958		
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,698,900	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,857,337	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,170,800	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Tanjung dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,174,621	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000						24,276,320		
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	24,276,320	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						289,836,400						372,757,097		
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	11,223,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Jenis	19,393,312	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Unit	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				34 Jenis	99,645,900	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		34 Jenis	125,877,187	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				6 Jenis	8,267,500	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		6 Jenis	21,346,515	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	7,200,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,990,377	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu di Fasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	83,226,439	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Pelaksanaan Rapat				12 Kali	120,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	114,923,267	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						690,550,000							781,505,627	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Adminstrasikan				1000 Surat	5,500,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	11,071,112	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Jenis	205,050,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 Jenis	235,216,733	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	480,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Orang	535,217,782	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						241,590,000							267,974,618	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				16 Unit	160,290,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Unit	158,381,709	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				17 Unit	44,300,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		17 Unit	53,808,977	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	37,000,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	55,783,932	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	243,582,000						52,03 %	796,035,907	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	243,582,000						6 Dokumen	796,035,907	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	9,400,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	106,385,993	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				25400 Obyek	155,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	25400 Obyek	127,435,088	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124900 Obyek	55,052,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124900 Obyek	143,771,304	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	51,168,157	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	9,575,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	95,182,596	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor				2100 Obyek	155,600,000	Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2100 Obyek	272,092,769	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,442,775,660						2,235,767,625		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,114,139,660						83.28 Nilai	1,555,783,182	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	37,080,000						1 Dokumen	36,047,367	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				574 Dokumen	37,080,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3) Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	574 Dokumen	36,047,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2,525,000						4 Dokumen	6,496,510	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,475,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	2 Dokumen	2,783,981	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
											(PD-3)				
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,050,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Dompu dan Pihak Terkait	2 Dokumen	3,712,529	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000							23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277,361,600							473,199,026	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	7,467,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Jenis	20,526,392	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Unit	0	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		8 Unit	41,873,573	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				18 Jenis	71,114,600	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		18 Jenis	133,181,279	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	4,980,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	20,528,500	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				1 Jenis	6,600,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Jenis	7,324,513	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	82,993,386	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	143,700,000	Kab. Dompus, Dompus, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	166,771,383	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Dompus, Dompus, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				0 Unit	0	Kab. Dompus, Dompus, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						631,953,060							743,840,320	
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	6,600,000	Kab. Dompus, Dompus, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	8,336,627	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 Jenis	145,353,060	Kab. Dompus, Dompus, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	168,908,254	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	480,000,000	Kab. Dompus, Dompus, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Orang	566,595,439	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154,420,000							272,228,827	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan				10 Unit	109,050,000	Kab. Dompus, Dompus, Bali	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 Unit	112,564,441	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Lapangan														
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				12 Unit	26,870,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Unit	67,640,764	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	18,500,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	92,023,622	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	328,636,000					52,03 %	679,984,443		
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	328,636,000					6 Dokumen	679,984,443		
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	9,400,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	80,399,621	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				14520 Obyek	157,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	14520 Obyek	126,111,793	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				124500 Obyek	55,000,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	124500 Obyek	133,956,013	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	48,079,876	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Obyek	4,679,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Obyek	68,503,614	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2000 Obyek	245,600,000	Kab. Dompu, Dompu, Bali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2000 Obyek	222,933,526	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5 02	KEUANGAN						1,544,114,200						2,419,153,776		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	83.28 Nilai	1,231,179,200						83.28 Nilai	1,731,318,787	
5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	37,355,000						1 Dokumen	42,077,105	
5 02 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi				478 Dokumen	37,355,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda dan Pihak terkait	478 Dokumen	42,077,105	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil penataan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	3,160,300						4 Dokumen	6,505,388	
5 02 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	1,861,500	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	2,774,548	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun				2 Dokumen	1,298,800	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	UPPD Panda Bima dan Pihak terkait	2 Dokumen	3,730,840	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,800,000							23,971,132	
5 02 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah frekuensi pelaksanaan kegiatan imtak dan olahraga				24 Kali	10,800,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		24 Kali	23,971,132	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360,728,900							637,417,372	
5 02 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	9,475,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 Jenis	20,530,831	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15 Unit	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		15 Unit	132,091,481	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor				37 Jenis	110,864,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		37 Jenis	133,172,956	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan				5 Jenis	7,829,900	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	16,647,729	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan				2 Jenis	6,660,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	7,391,099	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kali Tamu difasilitasi				750 Orang/Kali	43,500,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		750 Orang/Kali	83,266,391	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat				12 Kali	182,400,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 Kali	244,316,885	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
5 02 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				0 Unit	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel				0 Buah	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		0 Buah	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	0	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						660,425,000							808,315,452	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 02 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan				1000 Surat	6,425,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1000 Surat	12,731,335	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2 Jenis	174,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 Jenis	262,587,105	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan dan layanan umum kantor lainnya				16 Orang	480,000,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Orang	532,997,012	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158,710,000							213,032,338	
5 02 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				9 Unit	91,050,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		9 Unit	101,044,980	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin				16 Unit	39,910,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		16 Unit	54,501,032	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor				1 Unit	27,750,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Unit	57,486,326	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	54,03 %		0 %	52,03 %	312,935,000						52,03 %	687,834,989	
5 02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	312,935,000						6 Dokumen	687,834,989	
5 02 04 1.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah				10 Kali	9,550,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	10 Kali	86,118,512	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 1.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Obyek Kendaraan Bermotor				17540 Obyek	155,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	17540 Obyek	133,172,956	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor				84560 Obyek	64,055,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	84560 Obyek	139,716,187	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan				2 Rekomendasi	13,800,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2 Rekomendasi	49,702,367	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Teguran yang ditindak lanjuti				200 Surat	9,775,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	200 Surat	79,920,420	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5 02 04 1.01 12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan				2345 Obyek	215,600,000	Kab. Bima, Palibelo, Panda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	2345 Obyek	199,204,547	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
TOTAL							106,393,018,506							142,380,235,723	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03						12,479,437,109						34,715,196,341		
5	03	01					11,174,774,109						30,560,196,723		
5	03	01	1.01				117,759,000						309,398,859		
5	03	01	1.01	01			90 % 100 %	19,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	02			90 % 100 %	19,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	03			90 % 100 %	19,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah
5	03	01	1.01	04			90 % 100 %	19,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dan Fisik Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah yang terseusun secara Berkelanjutan				90 % 100 %	19,110,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dan Fisik Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah yang terseusun secara Berkelanjutan				90 % 100 %	5,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	22,713,696	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Dan Fisik Persentase Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Perangkat Daerah yang terseusun secara Berkelanjutan				90 % 100 %	16,289,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	141,281,018	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,034,445,549							25,035,321,826	
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Realisasi keuangan				90 %	8,882,915,549						90 %	24,865,890,422	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD				150 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		150 dokumen	4,962,349	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase NHP/LHP yang terselesaikan				100 %	100,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	74,544,711	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan				2 dokumen	0	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan		2 dokumen	8,574,648	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	SKPD							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Capaian Realisasi keuangan Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				90 % 100 %	25,370,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	29,080,829	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	11,676,117	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Capaian Realisasi keuangan Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				90 % 100 %	17,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	21,619,060	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase NHP/LHP yang Terselesaikan				100 %	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	18,973,690	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,526,100							22,352,394	
5 03 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	9,796,922	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 &	4,526,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 &	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset				2 berita acara	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik		2 berita acara	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)				
5 03 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD				12 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 dokumen	1,609,114	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25,000,000							168,810,748	
5 03 01 1.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai				2 jenis	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 jenis	13,200,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut				3 item	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 item	16,610,748	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal				100 %	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	25,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai				90 laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 laporan	4,900,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 08	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas				2 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		2 pegawai	15,000,000	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan							
5 03 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT				20 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		20 pegawai	80,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan				4 aturan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 aturan	3,200,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan				4 aturan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 aturan	900,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						989,655,960							2,212,400,291	
5 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan				20 jenis	24,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		20 jenis	30,944,264	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	378,991,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	580,942,294	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	16,880,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	34,231,091	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana dengan baik				100 %	19,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	55,498,044	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase penyelenggaraan rapat dan fasilitas tamu dengan baik				100 %	31,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	574,688,389	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyelenggaraan rapat dan fasilitas tamu dengan baik				100 %	475,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	758,217,863	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata				7 bidang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		7 bidang	107,821,645	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	persentase pelaksanaan pengelolaan informasi (website dan sosmed) yang informatif				100 %	43,504,560	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	70,056,701	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							710,950,385	
5 03 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia				1 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 unit	364,878,663	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia				3 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		3 unit	158,539,779	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia				4 paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		4 paket	187,531,943	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						775,407,500						1,301,403,607		
5 03 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase surat menyurat yang terdisposisi dan terselesaikan dengan baik				100 %	10,247,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	21,500,475	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal				100 %	285,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	438,128,055	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kepuasan Pelayanan Kepegawaian secara Internal Persentase Layanan Administrasi Umum yang Terlaksana dengan baik				100 % 100 %	479,410,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 100 %	841,775,077	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227,980,000						799,558,613		
5 03 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 %	201,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	90 %	449,256,854	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan yang terpelihara	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara				2 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 unit	62,138,836	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara				2 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	2 unit	9,121,966	Badan Kepegawaian Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)				
5 03 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase BMD dengan Kualitas Baik				90 %	26,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 %	53,728,383	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitas				1 gedung	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 gedung	225,312,574	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1,304,663,000							4,154,999,618	
5 03 02 1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						557,967,000							1,587,436,041	
5 03 02 1.01 01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK				1500 formasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1500 formasi	6,434,635	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK				400 formasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		400 formasi	47,470,714	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Data Pegawai yang Diperbarui Secara Berkala Persentase fasilitasi Surat Keputusan Pensiun tepat waktu Persentase Keterisian Formasi CPNS/PPPK Persentase Peta Jabatan yang tersusun				100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	418,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	801,805,173	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Persentase Rencana Kebutuhan Pegawai yang Tersusun Berdasarkan Anjab dan ABK													
5 03 02 1.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK				100 Kab/kota	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 Kab/kota	57,468,389	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN				1 kegiatan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 kegiatan	8,574,648	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase fasilitasi Surat Keputusan Pensiun tepat waktu				100 %	6,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	111,494,148	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN				1 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 dokumen	44,515,196	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase bantuan hukum ASN yang difasilitasi Persentase Fasilitasi KORP RI ASN Persentase pelaksanaan pembekalan kewirausahaan				100 % 100 % 100 %	41,952,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 % 100 %	30,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN				1 aplikasi	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		1 aplikasi	7,936,110	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase Data Talent yang memuat profil				100 % 50 %	90,595,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan		100 % 50 %	327,551,576	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kepegawaian	talenta Persentase Layanan Kepegawian yang dilakukan secara digital Persentase Pegawai yang databasanya tersedia lengkap				100 %		Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %		
5 03 02 1.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi				13950 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		13950 pegawai	97,298,544	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik				13950 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		13950 pegawai	46,886,908	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02	Mutasi dan Promosi ASN													1,470,315,062	
5 03 02 1.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pengelolaan mutasi ASN antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Povinsi NTB Persentase pengelolaan mutasi masuk dan Keluar ASN dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB				100 % 100 %		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 %	153,997,040	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat tepat waktu Persentase PNS yang Lulus ujian dinas penyesuaian kenaikan pangkat dan Penyesuaian Ijasah				100 % 90 %		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 90 %	437,015,175	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pengisian JA melalui Talent Pool				20 % 100 %		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		20 % 100 %	879,302,847	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase pengisian JPT melalui seleksi terbuka						Kelurahan							
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						142,940,000						526,071,107		
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling				30 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		30 pegawai	66,407,916	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase ASN yang Lulus assesmen kompetensi Jabatan Fungsional Persentase ASN yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi Persentase ASN yang meningkat Kualifikasi Pendidikannya Persentase Jabatan yang telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan				100 % 100 % 100 % 100 %	14,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 % 100 % 100 % 100 %	6,932,694	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal				80 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		80 orang	46,979,952	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat				10 kerjasama	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 kerjasama	113,495,508	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta				300 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		300 pegawai	60,825,273	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat				20 orang	20,240,000	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi		20 orang	39,107,695	Badan Kepegawaian Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Fungsional	Jafung dan Uji Kompetensi						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
5 03 02 1.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional				1 kegiatan	22,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 kegiatan	20,117,585	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase layanan administrasi pengelolaan karier ASN dalam Jabatan Fungsional				100 %	27,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	84,286,971	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK				40 DUPAK/PAK	58,325,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	40 DUPAK/PAK	51,247,208	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karier jabatan Fungsional				2 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	2 dokumen	36,670,305	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						192,099,000						571,177,408		
5 03 02 1.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur				3 peraturan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	3 peraturan	17,942,908	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik				12893 pegawai	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	12893 pegawai	177,212,445	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Melaporkan Kinerja secara Tepat Waktu				80 % 80 % 80 %	129,202,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik	80 % 80 % 80 %	70,115,084	Badan Kepegawaian Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Persentase Dokumen Saasaran Kinerja yang Sudah menerapkan prinsip SMART Persentase Penilaian Kinerja ASN dengan Kategori Baik						Kecamatan, Semua Kelurahan			(PD-3)				
5 03 02 1.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase fasilitasi pelaksanaan Pemberian tanda Penghargaan (SLKS) yang sesuai aturan				100 %	33,082,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 %	40,870,059	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya				200 orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	200 orang	67,615,665	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur				1 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	1 dokumen	30,346,958	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase izin cuti yang difasilitasi Persentase Layanan izin perceraian yang difasilitasi setiap bulan Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Persentase unit kerja yang dilakukan pembinaan disiplin dan kode etik kode perilaku				100 % 80 % 1 % 100 %	29,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	100 % 80 % 1 % 100 %	102,594,758	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin				30 SK	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	30 SK	21,540,611	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 02 1.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS				20 SK	0	Semua Kab/Kota,	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi	20 SK	5,962,117	Badan Kepegawaian Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
5 03 02 1.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN				12 dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		12 dokumen	36,976,803	Badan Kepegawaian Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 03	KEPEGAWAIAN						115,870,000						438,169,098			
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						27,380,000						204,409,584			
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,114,000						9,888,210			
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Capaian Realisasi keuangan Persentase NHP/LHP yang Terelesaikan				90 % 100 %	5,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		90 % 100 %	6,567,815	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase NHP/LHP yang Terelesaikan				100 %	2,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	3,320,395	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						19,266,000						194,521,374			
5 03 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase penyediaan bahan logistik kantor yang tersedia dengan baik				100 %	16,916,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	52,218,697	Badan Kepegawaian Daerah	
5 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia				5 Jenis	2,350,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		5 Jenis	5,473,179	Badan Kepegawaian Daerah	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 Kali	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 Kali	136,829,498	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						88,490,000							233,759,514	
5 03 02 1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						88,490,000							233,759,514	
5 03 02 1.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi Persentase ASN yang Diberikan Konseling dan Dapat Meningkatkan Kinerjanya				10 mou 30 pegawai	8,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 mou 30 pegawai	57,523,121	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang Telah Terpetakan Kompetensinya				100 %	69,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		100 %	165,271,790	Badan Kepegawaian Daerah
5 03 02 1.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase ASN yang Telah Terpetakan Kompetensinya				10 %	10,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)		10 %	10,964,603	Badan Kepegawaian Daerah
TOTAL							12,595,307,109							35,153,365,439	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 04 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyerapan realisasi anggaran gaji dan tunjangan ASN				100 Persen	12,218,797,733	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	100 Persen	12,361,707,725	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyerapan realisasi anggaran pelaksana tugas ASN pengadministrasi keuangan				100 Persen	258,229,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	100 Persen	34,793,669	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu				100 Persen	22,320,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	100 Persen	22,891,089	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Persentase laporan keuangan berkala yan tersusun tepat waktu				100 Persen	75,721,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Nusa Tenggara Barat	100 Persen	23,480,942	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	54,480,000						1 Dokumen	44,205,686	
5 04 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dokumen RKBMD dan laporan BMD perangkat daerah yang tersusun tepat waktu				100 Persen	54,480,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	44,205,686	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	285,121,600						100 Persen	666,319,267	
5 04 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan				90 Persen	49,511,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	90 Persen	47,517,783	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan				90 Persen	100,340,600	Semua Kab/Kota, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi	BPSDMD Provinsi NTB	90 Persen	191,196,470	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		kantor sesuai dengan dokumen perencanaan						Kecamatan, Semua Kelurahan			pelayanan publik (PD-3)				
5 04 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan bahan logistik kantor				90 Persen	7,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	90 Persen	77,226,800	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan				100 Persen	19,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	74,090,460	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				100 Persen	15,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	15,977,959	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 Persen	92,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	260,309,795	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan		Bulan	12 Bulan	34,500,000						12 Bulan	668,558,013	
5 04 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan				17 Unit	0				Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	17 Unit	341,875,333	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan ketersediaan peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan RKBMD				100 Persen	34,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	326,682,680	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan kantor	Persen		Persen	100 Persen	2,044,982,480						100 Persen	2,279,063,511	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyelesaian proses administrasi layanan surat menyurat tepat waktu				100 Persen	5,402,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	7,145,587	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi				90 Persen	683,580,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	90 Persen	773,984,300	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyelesaian proses administrasi layanan umum dan kepegawaian tepat waktu				100 Persen	1,356,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	1,497,933,623	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor yang Memadai	Persen		Persen	100 Persen	497,405,000						100 Persen	913,603,330	
5 04 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan pemeliharaan kendaraan dinas yang terpenuhi				100 Persen	172,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	191,014,276	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional tepat waktu				100 Persen	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	99,862,242	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan BMD perangkat Daerah sesuai RKBMD dan tepat waktu				100 Persen	210,255,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	447,726,812	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor sesuai RKBMD dan tepat waktu				100 Persen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	BPSDMD Provinsi NTB	100 Persen	175,000,000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Fungsional Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Manajerial Persentase Hasil Evaluasi, Pelaporan dan Kerjasama Penguatan Kapasitas SDM Melalui Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pejabat Fungsional yang Bersertifikat Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Tekhnis	Index Index Index Index Index		Index Index Index Index Index	0.03 Index 0.09 Index 100 Index 0.55 Index 0.13 Index	3,835,148,760					0.03 Index 0.09 Index 100 Index 0.55 Index 0.13 Index	18,248,222,741		
5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen		Persen	100 Persen	387,717,360					100 Persen	1,065,906,265		
5 04 02 1.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Yang Dilaksanakan Sesuai dengan Dokumen Perencanaan				100 Persen	90,278,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	100 Persen	87,770,367	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.01 02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	Persentase penyusunan standar perangkat pembelajaran pada bidang kompetensi teknis yang disempurnakan dan tersusun tepat waktu				100 Persen	17,028,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	100 Persen	66,441,678	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Urusan Pemerintahan Umum														
5 04 02 1.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang lulus dan bersertifikat pengembangan kompetensi teknis				100 Persen	217,832,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	100 Persen	769,583,926	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase tercapainya pembinaan dan pengendalian pengembangan kompetensi teknis				100 Persen	62,577,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	ASN/Peserta Pengembangan Kompetensi	100 Persen	142,110,294	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kelembagaan Sumber Belajar dan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional Serta Sertifikasi Kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	3,447,431,400						100 Persen	17,182,316,476	
5 04 02 1.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial ,fungsional dan latsar PNS sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun				100 Persen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen	46,651,977	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional														
5 04 02 1.02 02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase dokumen pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang disusun tepat waktu				100 Persen	46,055,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen	138,516,363	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase ASN jabatan fungsional tertentu lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang tersertifikasi				100 Persen	90,789,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen	237,057,205	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase dokumen kelembagaan Pengelolaan yang disusun tepat waktu Persentase tenaga pengembang Tenaga Pengembang Kompetensi (TPK) yang terkirim Persentase widyaiswara yang memenuhi standar kompetensi				100 Persen 100 Persen 100 Persen	363,154,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen 100 Persen 100 Persen	544,855,713	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase tercapainya kesepakatan bersama (KB) antara Gubernur NTB dengan Bupati/Walikota se NTB dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Antar Lembaga melalui BPSDMD Provinsi NTB dengan BKPSDM Kabupaten/Kota Se NTB dalam rangka penguatan kapasitas SDM melalui Pengembangan Kompetensi ASN yang bersertifikat				100 Persen	62,431,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN,JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen	58,242,100	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 1.02 06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase capaian penyusunan modul kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, pimpinan daerah dan Latsar CPNS Persentase penentuan metode pembelajaran kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, Pimpinan daerah dan latsar CPNS (classical, BL dan DL) Persentase tersusunnya buku pedoman dan SOP kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, fungsional, pimpinan daerah, dan latsar CPNS				100 Persen 100 Persen 100 Persen	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN, JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen 100 Persen 100 Persen	66,441,678	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				100 Persen	2,760,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN, JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen	16,048,192,096	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5 04 02 1.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan	Persentase hasil evaluasi pasca pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang tervalidasi dan ditindaklanjuti Persentase tercapainya pembinaan dan pengendalian pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				100 Persen 100 Persen	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	CPNS, ASN, JFT dan Pimpinan Daerah, Widyaiswara serta Tenaga Pengembang	100 Persen 100 Persen	42,359,344	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
TOTAL								19,552,866,573					35,440,000,480		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	07					PENGLOLAAN PENGHUBUNG							8,663,173,192	13,237,165,397					
5	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai		Nilai	B Nilai	8,172,423,192			B Nilai	12,066,769,149			
5	07	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan pelaporan OPD	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0			4 Dokumen	122,972,357			
5	07	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	14,821,826	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	28,687,030	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	29,963,267	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	8,353,803	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	9,501,861	Badan Penghubung Daerah
5	07	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah			1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	19,756,701	Badan Penghubung Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Kelurahan							
5 07 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Laporan evaluasi kinerja daerah				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	11,887,869	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5,052,622,742						1 Dokumen	6,707,064,159	
5 07 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 Dokumen	5,052,622,742	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	6,665,011,044	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi ASN				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	10,590,824	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen akuntansi SKPD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	10,675,444	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan akhir tahun				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	12,664,709	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen Laporan Keuangan SKPD				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Orang	1 Dokumen	8,122,138	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan Kebutuhan OPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0						1 Dokumen	10,617,181	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
5 07 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Dokumen	1 Dokumen	10,617,181	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana OPD	tahun		tahun	1 tahun	267,896,050						1 tahun	403,187,323	
5 07 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang tersedia				7 Jenis	8,823,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	7 Jenis	35,801,218	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				12 Jenis	18,848,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	12 Jenis	30,572,628	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah logistik kantor yang tersedia				10 Jenis	15,340,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	10 Jenis	36,007,220	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan				2 Jenis	8,684,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	2 Jenis	9,865,450	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia				5 Bacaan	16,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	5 Bacaan	32,460,807	Badan Penghubung Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat				54 kali	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Terlaksananya persediaan barang OPD	54 kali	258,480,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							27,744,279	
5 07 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas				1 unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)		1 unit	27,744,279	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana prasarana penunjang OPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2,474,624,400						2 Dokumen	3,353,233,196	
5 07 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat keluar				500 Surat	18,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	500 Surat	138,169,339	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening				4 Rekening	513,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	4 Rekening	607,164,374	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor				31 Orang	1,943,384,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Jasa Pelayanan umum kantor	31 Orang	2,607,899,483	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas OPD	Unit		Unit	20 Unit	377,280,000						20 Unit	1,441,950,654	
5 07 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas				23 unit	172,950,000	Semua Kab/Kota, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	23 unit	531,968,814	Badan Penghubung Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kecamatan, Semua Kelurahan		Pelayanan Publik	mendukung investasi (PD-7)				
5 07 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap				31 unit	25,830,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	31 unit	49,221,340	Badan Penghubung Daerah
5 07 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabili- tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				2 Unit	178,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Sarana Prasarana Kendaraan Milik OPD	2 Unit	860,760,500	Badan Penghubung Daerah
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang) Tingkat Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	orang %		orang %	41000 orang 75 %	490,750,000						41000 orang 75 %	1,170,396,248	
5 07 02 1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Kunjungan di Mess NTB dan Anjungan NTB di TMII Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Anjungan NTB TMII	orang orang		orang orang	39000 orang 18000 orang	490,750,000						39000 orang 18000 orang	1,170,396,248	
5 07 02 1.01 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	jumlah Promosi produk unggulan				1 event	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	1 event	58,600,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah pelayanan				75 kali	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	75 kali	95,407,248	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk unggulan				8 event	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu- hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	8 event	208,860,000	Badan Penghubung Daerah

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 02 1.01 04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Jumlah pameran produk unggulan				1 event	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	1 event	80,000,000	Badan Penghubung Daerah
5 07 02 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan anggota organisasi sosial dan anggota kemasyarakatan				3 Kegiatan	440,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat integrasi hulu-hilir sistem agribisnis dalam mendukung investasi (PD-7)	Tamu yang berkunjung di Mess dan di anjungan NTB	3 Kegiatan	727,529,000	Badan Penghubung Daerah
TOTAL							8,663,173,192							13,237,165,397	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			transformasi pelayanan publik (PD-3)	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
6 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Gaji/Tunjangan/Honor Jumlah PTT Penerima Honor	Orang Orang		Orang Orang	129 Orang 129 Orang	12,970,690,424						129 Orang 129 Orang	16,634,167,939	
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jml ASN penerima gaji/tunjangan				115 Orang	12,673,921,424	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115 Orang	15,958,696,202	Inspektorat
6 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml PTT Penerima Honor				15 Orang	289,980,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Orang	652,055,884	Inspektorat
6 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dok. Laporan				1 Laporan	6,789,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	23,415,853	Inspektorat
6 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	Laporan		Laporan	4 Laporan	10,500,000						4 Laporan	46,177,392	
6 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dok. Laporan				4 Laporan	10,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Laporan	46,177,392	Inspektorat
6 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Orang		Orang	100 Orang	69,250,000						100 Orang	330,978,201	
6 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Ppeserta Diklat Substantif, Penjenjangan dan Lainnya				100 Orang	69,250,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	330,978,201	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Adminitrasi Umum	Jenis, Laporan		Jenis, Laporan	107 Jenis, Laporan	619,345,900						107 Jenis, Laporan	2,097,522,764	
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Belanja Alat Listrik dan Eletronik				14 Jenis	10,127,800	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	14 Jenis	30,747,386	Inspektorat
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Barang/Jasa yang Diadakan				14 Jenis	63,743,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	14 Jenis	529,178,836	Inspektorat
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang yang Diadakan				48 Jenis	79,324,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	48 Jenis	297,262,135	Inspektorat
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang; Lembar; Buah				9 Jenis, Lembar, Buah	58,950,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	9 Jenis, Lembar, Buah	154,058,185	Inspektorat
6 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman				2 Jenis	132,200,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	2 Jenis	359,336,269	Inspektorat
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah				20 Jenis	275,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terselenggara n ya Administ rasi Um um Perangk at Daer ah	20 Jenis	726,939,953	Inspektorat
6 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	Unit		Unit	8 Unit	0						8 Unit	245,278,915	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
6 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit				0 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	53,632,279	Inspektorat
6 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Meubel yang Diadakan				6 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit	191,646,636	Inspektorat
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis dan Belanja Jasa	Jenis, Orang		Jenis, Orang	39 Jenis, Orang	640,964,300						39 Jenis, Orang	1,036,595,167	
6 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar				6 Jenis	50,920,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	111,702,629	Inspektorat
6 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis				4 Jenis	329,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	551,618,715	Inspektorat
6 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih dan CS				29 Jenis, Orang	260,594,300	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29 Jenis, Orang	373,273,823	Inspektorat
6 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat pemeliharaan	Unit		Unit	186 Unit	458,650,000						186 Unit	806,776,963	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan yang Mendapatkan Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan				25 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	33,520,174	Inspektorat
6 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Mobil dan Motor Kendaraan Dinas/Operasional				24 Unit	178,290,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24 Unit	317,972,374	Inspektorat
6 01 01 1.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Meubeleir yang Mendapatkan Pemeliharaan				45 Unit	20,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	50,280,261	Inspektorat
6 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan / Perlengkapan yang Mendapatkan Pemeliharaan				91 Unit	90,360,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91 Unit	103,322,585	Inspektorat
6 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Lap. Kegiatan Pemeliharaan				1 Laporan	145,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	301,681,569	Inspektorat
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	% % %		% % %	91.11 % 44 % 85 %	2,056,040,000						91.11 % 44 % 85 %	5,396,478,430	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Pengawasan pada PD													
6 01 02 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan Internal	Dok. Laporan		Dok. Laporan	162 Dok. Laporan	1,307,800,000						162 Dok. Laporan	3,951,897,824	
6 01 02 1.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Laporan Hasil Evaluasi				62 LHE	70,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	62 LHE	198,994,526	Inspektorat
6 01 02 1.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok. LHA, LHE dan Monev				36 Laporan	712,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	36 Laporan	1,500,347,583	Inspektorat
6 01 02 1.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dok. Laporan Hasil Reviu				8 LHR	150,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	8 LHR	333,841,495	Inspektorat
6 01 02 1.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dok. Laporan Hasil Reviu				16 LHR	205,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	16 LHR	570,056,822	Inspektorat
6 01 02 1.01 05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Dok. Laporan dan Hasil Evaluasi				20 Laporan	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	20 Laporan	575,503,851	Inspektorat
6 01 02 1.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dok. LHA				1 LHA	30,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 LHA	202,077,041	Inspektorat
6 01 02 1.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dok. Laporan Monev				19 Laporan	110,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	19 Laporan	571,076,506	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Dok. Laporan		Dok. Laporan	25 Dok. Laporan	748,240,000						25 Dok. Laporan	1,444,580,606	
6 01 02 1.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dok. Laporan Monev TPTGR				4 Laporan	558,240,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	4 Laporan	875,619,893	Inspektorat
6 01 02 1.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dok. LHA				21 LHA	190,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	21 LHA	568,960,713	Inspektorat
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	% % %		% % %	22.22 % 6.55 % 96 %	1,705,960,000						22.22 % 6.55 % 96 %	3,599,518,199	
6 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	16 Dokumen Laporan	121,500,000						16 Dokumen Laporan	532,777,696	
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dok. Regulasi Kebijakan Pengawasan				3 Dok. Regulasi	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3 Dok. Regulasi	40,402,537	Inspektorat
6 01 03 1.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan				13 Laporan	121,500,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13 Laporan	492,375,159	Inspektorat

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 03 1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	Dok. Laporan		Dok. Laporan	132 Dok. Laporan	1,584,460,000						132 Dok. Laporan	3,066,740,503	
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Laporan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi PD				118 Laporan	250,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	118 Laporan	574,698,964	Inspektorat
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dok. Laporan Hasil Monev PMPRB				1 LHE	57,450,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	1 LHE	124,510,017	Inspektorat
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi				11 Laporan	1,237,010,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	11 Laporan	2,105,750,089	Inspektorat
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dok. Laporan Kegiatan				2 Laporan	40,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik (PD-3)	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi	2 Laporan	261,781,433	Inspektorat
TOTAL							18,675,921,424							30,680,960,032	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
										Nasional	Daerah											
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01						12,920,604,699						48,114,938,378									
8	01	01					5,953,730,099						8,273,554,867									
8	01	01	1.01				137,600,800						306,283,048									
8	01	01	1.01	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
8	01	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja						1 Dokumen	21,212,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	34,965,323	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA						1 Dokumen	22,191,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	35,544,057	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA						1 Dokumen	22,191,400	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	35,544,057	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD						1 Dokumen	4,402,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	5,074,526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD						1 Dokumen	4,127,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	5,074,526	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8	01	01	1.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Dokumen LAKIP Dokumen LAPTAH						1 Dokumen 1 Dokumen	63,475,200	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman,		1 Dokumen 1 Dokumen	83,200,784	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPJ Dokumen LPPD				1 Dokumen 1 Dokumen		Kecamatan, Semua Kelurahan			ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen 1 Dokumen		
8 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab./Kota se NTB T.2022 Jumlah Peserta Rapat Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kesbangpol Kab/Kota se NTB T.2023				40 Orang 40 Orang	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		40 Orang 40 Orang	106,879,775	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													6,239,905,047	
8 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang		4,590,604,699	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		50 Orang	6,140,583,704	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Terlaksananya Administrasi Kantor				2 Orang 12 Bulan		38,025,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Orang 12 Bulan	53,608,563	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Administrasi Keuangan				12 Bulan		3,700,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		12 Bulan	4,548,829	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen		26,952,600	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	34,279,237	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen		5,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan		1 Dokumen	6,884,714	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
								Semua Kelurahan			perlindungan masyarakat (PD-10)				
8 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1,535,000						1,887,149		
8 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Aset (Barang Milik Daerah) SKPD				1 Dokumen	1,535,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	1,887,149	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						306,192,000						517,157,002		
8 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik kantor				2 Jenis	10,300,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	2 Jenis	18,404,316	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat Kebersihan kantor Tersedianya Alat Rumah Tanga Kantor				10 Jenis 4 Jenis	5,560,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	10 Jenis 4 Jenis	18,823,423	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor				25 Jenis	10,690,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	25 Jenis	39,346,263	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotocopy dan Cetak				5 Jenis	5,441,500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	5 Jenis	13,042,845	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Tersedianya Bahan Publikasi				1 Jenis 2 Jenis	36,800,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Jenis 2 Jenis	40,397,937	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Makan dan Minum tamu				500 Orang	22,650,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		500 Orang	25,202,971	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Koordinasi/Konsultasi ke Luar daerah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi ke Kab/Kota Provinsi NTB Terfasilitasinya Makan dan Minum Rapat				1 Dokumen 1 Dokumen 300 Orang	214,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen 1 Dokumen 300 Orang	361,939,247	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							165,000,000	
8 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional				1 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Unit	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya CCTV Tersedianya Laptop Tersedianya Lemari Arsip Tersedianya PC Tersedianya Printer				1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit	110,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						680,040,000							775,199,072	
8 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai				1400 Lembar	5,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1400 Lembar	11,531,896	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Internet Rekening Air Rekening Listrik				3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	90,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan		3 Rekening 1 Rekening 1 Rekening	111,384,836	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional					Daerah		
								Semua Kelurahan									
8 01 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya AC Terpeliharanya Komputer/Laptop Terpeliharanya Printer				20 Unit 15 Unit 12 Unit	10,840,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		perlindungan masyarakat (PD-10)		20 Unit 15 Unit 12 Unit	48,640,457	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ASN yang Sehat Jasmani dan rohani Terfasilitasinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Terfasilitasinya Tim Admin Website SKPD				50 Orang 12 Bulan 12 Bulan	573,600,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		50 Orang 12 Bulan 12 Bulan	603,641,883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163,480,000							268,123,548			
8 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pejabat				1 Unit	25,000,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit	48,070,056	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2) Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)				8 Unit 6 Unit	138,480,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		8 Unit 6 Unit	148,119,703	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 01 1.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor				1 Unit	0	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Unit	71,933,789	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER						431,915,000							529,781,293			

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	KEBANGSAAN														
8 01 02 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						431,915,000						529,781,293		
8 01 02 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Masyarakat pada Daerah rawan konflik yang mendapatkan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan melalui Sekolah Perjumpaan Jumlah Peserta Konsolidasi GNRM dan Kader Bela Negara Jumlah Peserta Rakor Forum Kemitraan Pembauran				100 Orang 100 Orang 40 Orang	281,475,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 Orang 100 Orang 40 Orang	383,444,004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa				1 Dokumen	150,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	146,337,289	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						4,458,849,600						33,671,239,086		
8 01 03 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,						4,458,849,600						33,671,239,086		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 03 1.01 03	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
8 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi Jumlah Partai Politik yang difasilitasi Verifikasi Administrasi Berkas Parpol				3 Lembaga 12 Parpol 12 Parpol	4,016,334,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		3 Lembaga 12 Parpol 12 Parpol	33,148,535,457	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 03 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Parpol Jumlah Peserta Kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik dan Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi dalam Meningkatkan partisipasi Politik Jumlah Peserta Rakor Bersama Kesbangpol Kab/Kota se NTB				40 Orang 60 Orang 50 Orang	291,340,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		40 Orang 60 Orang 50 Orang	244,641,098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 03 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik				1 Dokumen	151,175,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	278,062,531	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						669,760,000						1,600,137,061		
8 01 04 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						669,760,000						1,600,137,061		
8 01 04 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Lembaga yang difasilitasi				8 Lembaga	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	8 Lembaga	1,368,000,489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 04 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Rapat koordinasi Pengawasan Ormas Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas				125 Orang 75 Orang	177,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	125 Orang 75 Orang	172,786,649	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 04 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pemberdayaan Ormas dan Pengawasan Ormas				1 Dokumen	72,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)	1 Dokumen	59,349,922	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN						469,690,000						848,629,511		

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
8 01 05 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						469,690,000						848,629,511		
8 01 05 1.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta Rapat Finalisasi Naskah kampung Madani Jumlah Peserta Rapat Timdu P4GN Jumlah peserta Rapat Uji Naskah kampung Madani oleh Pakar Jumlah Peserta Rapat Uji Publik Naskah kampung Madani Terfasilitasinya Tim Terpadu P4GN Prov. NTB				70 Orang 189 Orang 70 Orang 110 Orang 26 Orang	193,195,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		70 Orang 189 Orang 70 Orang 110 Orang 26 Orang	354,342,992	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 05 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta Kegiatan Pembekalan Satgas/Mentor Fasilitator Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Jumlah Peserta rapat dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Mentor, dll Desa bersinar Jumlah Peserta Sosialisasi Anti Narkoba bagi Toga,Toma, Toda, dan Kepala Desa di desa Bersinar				100 Orang 210 Orang 300 Orang	176,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		100 Orang 210 Orang 300 Orang	253,260,060	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 05 1.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				2 Dokumen	100,455,000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		2 Dokumen	241,026,459	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
	Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						936,660,000						3,191,596,561		
8 01 06 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						936,660,000						3,191,596,561		
8 01 06 1.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Fasilitasi Tim Jejaring Deteksi Dini Gangguan Keamanan Lembaga yang difasilitasi (Bale Mediasi)				85 Orang 1 Lembaga	450,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		85 Orang 1 Lembaga	855,085,702	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 06 1.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah Peserta Bimtek Dasar Intelejen Jumlah Peserta Rakorda FKDM Jumlah Peserta Rakorda Timdu PKS Jumlah Peserta Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Mediasi Konflik				30 Orang 50 Orang 120 Orang 180 Orang 20 Kali	386,660,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		30 Orang 50 Orang 120 Orang 180 Orang 20 Kali	303,454,832	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
8 01 06 1.01 05	Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Nasional				1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		1 Dokumen	125,732,088	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8 01 06 1.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Peserta Rapat Forkopimda dan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Forkopimda Terfasilitasinya Forkopimda Terfasilitasinya Tim Koordinasi Forkopimda Terfasilitasinya Tim Sekretariat Forkopimda				300 Orang 10 Bulan 10 Bulan 10 Bulan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok		Penguatan stabilitas ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (PD-10)		300 Orang 10 Bulan 10 Bulan 10 Bulan	1,907,323,939	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
TOTAL							12,920,604,699							48,114,938,378	